



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Asuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
**#bangga
melayani
bangsa**

RANCANGAN AKHIR RKPD 2027



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2027**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 5
1.3.1 RKPD dengan RKP Tahun 2026	I - 6
1.3.2 RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	I - 8
1.3.3 RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	I - 8
1.3.4 RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	I - 10
1.3.5 RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah	I - 10
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 10
1.4.1 Maksud	I - 10
1.4.2 Tujuan dan Sasaran	I - 10
1.5 Sistematika Penulisan	I - 11
1.6 Pendekatan Baru	I - 12
1.7 Pendekatan Proses	I - 13
1.8 Rujukan Kebijakan	I - 15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 81
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 291
2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	II - 302
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD	II - 345
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	II - 382
2.3.1. Permasalahan Pembangunan	II - 382
2.3.2. Isu Strategis	II - 399

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional	III - 2
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah	III - 14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 61
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 62
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 77
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 84
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Prov. Sumatera Selatan	III - 85
3.3.1. APBD Kabupaten/Kota	III - 85
3.3.2. APBN	III - 87
3.3.3. Pendanaan Alternatif Lainnya	III - 88

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV - 2

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV - 7

 4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya IV - 8

 4.2.1.1. Telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 IV - 8

 4.2.1.2. Telaahan RKP Tahun 2027 IV - 17

 4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044..... IV - 46

 4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)..... IV - 57

 4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV - 68

 4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah IV - 71

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan..... V - 1

5.2. Indikator Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V - 25

 5.2.1. Kota Palembang V - 26

 5.2.2. Kabupaten Banyuasin V - 31

 5.2.3. Kabupaten Ogan Ilir V - 39

 5.2.4. Kabupaten Ogan Komering Ilir..... V - 44

 5.2.5. Kabupaten Musi Banyuasin..... V - 50

 5.2.6. Kota Lubuk Linggau V - 56

 5.2.7. Kabupaten Musi Rawas V - 60

 5.2.8. Kabupaten Musi Rawas Utara V - 65

 5.2.9. Kota Pagar Alam..... V - 70

 5.2.10. Kabupaten Lahat..... V - 75

 5.2.11. Kabupaten Empat Lawang..... V - 80

 5.2.12. Kabupaten Muara Enim V - 85

 5.2.13. Kota Prabumulih V - 91

 5.2.14. Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir V - 96

 5.2.15. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur V - 100

 5.2.16. Kabupaten Ogan Komering Ulu..... V - 106

 5.2.17. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan V - 112

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Indikator Makro Pembangunan VII - 1

7.2. Indikator Kinerja Utama VII - 2

7.3. Indikator Kinerja Daerah VII - 3

BAB VIII PENUTUP

VIII - 1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 I - 6
Tabel 1.2	Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional I - 7
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 II - 2
Tabel 2.2	Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2024 II - 3
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Ha)..... II - 11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014-2023 II - 26
Tabel 2.5	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan . II - 29
Tabel 2.6	Data Sebaran Hotspot Sumatera Selatan Tahun 2023 II - 32
Tabel 2.7	Perbandingan Jumlah Sebaran Hotspot dari Tahun 2015-2023..... II - 32
Tabel 2.8	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024..... II - 33
Tabel 2.9	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 II - 33
Tabel 2.10	Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan..... II - 34
Tabel 2.11	Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan II - 35
Tabel 2.12	Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan II - 38
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023..... II - 42
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023 II - 43
Tabel 2.15	PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Miliar Rupiah) (ADHB) ... II - 44
Tabel 2.16	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)..... II - 45
Tabel 2.17	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)..... II - 45
Tabel 2.18	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024 II - 52
Tabel 2.19	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024 II - 53
Tabel 2.20	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Provinsi Tahun 2023-2024..... II - 58
Tabel 2.21	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017-2024 (tahun) II - 61
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024 (tahun) II - 62
Tabel 2.23	Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 II - 64
Tabel 2.24	Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI II - 78
Tabel 2.25	Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 - 2023 II - 80
Tabel 2.26	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 II - 92

Tabel 2.27	Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 93
Tabel 2.28	Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024.....	II - 100
Tabel 2.29	Persentase Case Detection Rate Penyakit TBC di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 106
Tabel 2.30	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Selatan Yang Terakreditasi Tahun 2019 – 2024	II - 111
Tabel 2.31	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2024.....	II - 113
Tabel 2.32	Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 114
Tabel 2.33	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II - 114
Tabel 2.34	Tabel Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II - 119
Tabel 2.35	Tabel Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II - 120
Tabel 2.36	Tabel Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023	II - 121
Tabel 2.37	Daftar Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023	II - 122
Tabel 2.38	Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 124
Tabel 2.39	Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II - 126
Tabel 2.40	Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II - 126
Tabel 2.41	Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 127
Tabel 2.42	Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 129
Tabel 2.43	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ...	II - 130
Tabel 2.44	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II - 131
Tabel 2.45	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036 ..	II - 135
Tabel 2.46	Status Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II - 136
Tabel 2.47	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016-2023	II - 143
Tabel 2.48	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023	II - 145
Tabel 2.49	Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (<i>Backlog</i>) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II - 148
Tabel 2.50	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II - 150
Tabel 2.51	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat Tahun 2024.....	II - 150
Tabel 2.52	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II - 151

Tabel 2.53	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II - 152
Tabel 2.54	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2024 ..	II - 162
Tabel 2.55	Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	II - 162
Tabel 2.56	Rekapitulasi DTKS, BPNT, PKH dan PBI-JKN Provinsi Sumatera Selatan Periode September 2024	II - 168
Tabel 2.57	Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (ASEM) .	II - 177
Tabel 2.58	Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 178
Tabel 2.59	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023	II - 179
Tabel 2.60	Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2024	II - 181
Tabel 2.61	Sandingan Target RPJMD Terhadap Realisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020 - 2021	II - 183
Tabel 2.62	Capaian Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2023	II - 189
Tabel 2.63	Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)	II - 191
Tabel 2.64	Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)	II - 191
Tabel 2.65	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta Jumlah Hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024	II - 193
Tabel 2.66	Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan per 31 Desember 2024	II - 195
Tabel 2.67	Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024	II - 196
Tabel 2.68	Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023	II - 199
Tabel 2.69	Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2022	II - 203
Tabel 2.70	Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan	II - 205
Tabel 2.71	Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	II - 206
Tabel 2.72	Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 206
Tabel 2.73	Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	II - 207
Tabel 2.74	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai	II - 209
Tabel 2.75	Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan	II - 210
Tabel 2.76	Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin	II - 212
Tabel 2.77	Produktivitas Angkutan Penyebrangan Tanjung Api – Api	II - 215
Tabel 2.78	Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan	II - 215
Tabel 2.79	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang	II - 216
Tabel 2.80	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara Silampari Lubuk Linggau	II - 217
Tabel 2.81	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah Ada PPID	II - 221
Tabel 2.82	Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 223

Tabel 2.83	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 225
Tabel 2.84	Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan (Triliun Rupiah)	II - 226
Tabel 2.85	Perkembangan Kepemudaan di Sumatera Selatan	II - 228
Tabel 2.86	Perkembangan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2023	II - 230
Tabel 2.87	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	II - 232
Tabel 2.88	Daftar Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	II - 234
Tabel 2.89	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 235
Tabel 2.90	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 per dimensi ..	II - 237
Tabel 2.91	Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Sumatera Selatan	II - 238
Tabel 2.92	Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 240
Tabel 2.93	Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2021-2023.....	II - 240
Tabel 2.94	Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.....	II - 242
Tabel 2.95	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 243
Tabel 2.96	Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya (ton) Provinsi Sumatera Selatan 2021-2024	II - 247
Tabel 2.97	Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024	II - 248
Tabel 2.98	Produksi Benur dan Nener (Ribu) Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023	II - 248
Tabel 2.99	Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Tahun 2022	II - 263
Tabel 2.100	Data Lahan Kritis UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 263
Tabel 2.101	Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan	II - 264
Tabel 2.102	Lahan Kritis yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan	II - 265
Tabel 2.103	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	II - 266
Tabel 2.104	Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 – 2023	II - 268
Tabel 2.105	Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	II - 270
Tabel 2.106	Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan	II - 271
Tabel 2.107	Nilai Impor beberapa Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024	II - 272
Tabel 2.108	Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 274
Tabel 2.109	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024	II - 275
Tabel 2.110	Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2022	II - 276
Tabel 2.111	Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan	II - 276

Tabel 2.112	Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 278
Tabel 2.113	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 283
Tabel 2.114	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 284
Tabel 2.115	Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2022	II - 285
Tabel 2.116	Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 286
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 287
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 288
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Science Techno Park Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 289
Tabel 2.120	Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis 2014-2022	II - 289
Tabel 2.121	Rapat-Rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021.....	II - 290
Tabel 2.122	Rapat Alat Kelengkapan DPRD PProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022	II - 290
Tabel 2.123	Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022	II - 290
Tabel 2.124	Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014-2022	II - 291
Tabel 2.125	Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2022	II - 291
Tabel 2.126	Perkembangan pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	II - 292
Tabel 2.127	Perkembangan Nilai Tukar Petani	II - 294
Tabel 2.128	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021	II - 294
Tabel 2.129	Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 295
Tabel 2.130	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 – 2023	II - 297
Tabel 2.131	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 299
Tabel 2.132	Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2021	II - 301
Tabel 2.133	Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2022	II - 302
Tabel 2.134	Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2022	II - 302
Tabel 2.135	Kategori Penilaian SDGs	II - 305
Tabel 2.136	Capaian per Indikator TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022	II - 305
Tabel 2.137	Capaian TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022	II - 308
Tabel 2.138	Capaian Per Indikator TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022	II - 309
Tabel 2.139	Capaian TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022	II - 310
Tabel 2.140	Capaian Per Indikator TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022	II - 310
Tabel 2.141	Capaian TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022	II - 313
Tabel 2.142	Capaian Per Indikator TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022	II - 314

Tabel 2.143	Capaian TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022	II - 316
Tabel 2.144	Capaian Per Indikator TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022	II - 316
Tabel 2.145	Capaian TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022	II - 319
Tabel 2.146	Capaian Per Indikator TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023 ..	II - 320
Tabel 2.147	Capaian TPB Air bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023	II - 322
Tabel 2.148	Capaian Per Indikator TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022	II - 322
Tabel 2.149	Capaian TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022	II - 323
Tabel 2.150	Capaian Per Indikator Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	II - 324
Tabel 2.151	Capaian TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	II - 326
Tabel 2.152	Capaian TPB Per Indikator Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023	II - 326
Tabel 2.153	Capaian TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023	II - 328
Tabel 2.154	Capaian Per Indikator TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022	II - 328
Tabel 2.155	Capaian TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022	II - 329
Tabel 2.156	Capaian Per Indikator TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023	II - 330
Tabel 2.157	Capaian TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023 ...	II - 332
Tabel 2.158	Capaian TPB Per Indikator Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tahun 2023	II - 332
Tabel 2.159	Capaian TPB Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tahun 2022	II - 333
Tabel 2.160	Capaian Per Indikator TPB Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023	II - 333
Tabel 2.161	Capaian TPB Per Indikator Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023	II - 334
Tabel 2.162	Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Lautan Tahun 2022	II - 334
Tabel 2.163	Capaian TPB Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Tahun 2022	II - 336
Tabel 2.164	Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022	II - 337
Tabel 2.165	Capaian TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022	II - 340
Tabel 2.166	Capaian Per Indikator TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022	II - 340
Tabel 2.167	Capaian TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022	II - 343
Tabel 2.168	Capaian Per Indikator TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022	II - 344
Tabel 2.169	Capaian TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022	II - 345
Tabel 2.170	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024	II - 367
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026	III - 12
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024.....	III - 15
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut lapangan usaha, 2018 - 2024	III - 16
Tabel 3.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)...	III - 17
Tabel 3.5	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah).....	III - 18

Tabel 3.6	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)	III - 19
Tabel 3.7	Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Desember 2024 ...	III - 20
Tabel 3.8	Nilai Ekspor Sepuluh Golongan Barang Utama Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024	III - 21
Tabel 3.9	Nilai Ekspor Sumatera Selatan Menurut Sektor, 2024	III - 22
Tabel 3.10	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Januari-Desember 2023	III - 23
Tabel 3.11	Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan	III - 24
Tabel 3.12	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024	III - 32
Tabel 3.13	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024	III - 33
Tabel 3.14	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi Tahun 2023 – 2024	III - 39
Tabel 3.15	Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan.....	III – 61
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2026.....	III - 77
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2026	III - 84
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2026.....	III - 85
Tabel 3.22	Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2023.....	III - 86
Tabel 3.23	APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025 di Provinsi Sumatera Selatan.....	III - 87
Tabel 3.24	Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	III - 88
Tabel 3.25	Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan.....	III - 89
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027	IV - 3
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi, Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2027 ...	IV - 11
Tabel 4.3	Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2027 dan Tema serta Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027	IV - 16
Tabel 4.4	Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2027.....	IV – 18
Tabel 4.5	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2027.....	IV – 20
Tabel 4.6	Sandingan Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional RKP dengan Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027	IV – 22
Tabel 4.7	Dukungan Program Daerah RKPD 2027 terhadap Asta Cita, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Nasional pada RKP 2027	IV - 27
Tabel 4.8	Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV – 59
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027	IV - 70
Tabel 4.10	Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027 dengan Isu Strategis Tahun 2027	IV - 72
Tabel 5.1	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	V – 4

Tabel 5.2	Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan	V - 6
Tabel 5.3	Capaian dan Target Indikator Makro dan Kota Palembang	V - 26
Tabel 5.4	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	V - 31
Tabel 5.5	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	V - 39
Tabel 5.6	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V - 44
Tabel 5.7	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin.....	V - 50
Tabel 5.8	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau	V - 56
Tabel 5.9	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	V - 60
Tabel 5.10	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara.....	V - 65
Tabel 5.11	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kota Pagar Alam	V - 70
Tabel 5.12	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat.....	V - 75
Tabel 5.13	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang.....	V - 80
Tabel 5.14	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	V - 85
Tabel 5.15	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	V - 92
Tabel 5.16	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	V - 96
Tabel 5.17	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	V - 101
Tabel 5.18	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu....	V - 106
Tabel 5.19	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan	V - 112
Tabel 6.1	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	VI - 2
Tabel 6.2	Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026	VI - 3
Tabel 7.1	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	VII - 1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2026	VII - 2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2026	VII - 3

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2027	I - 12
Gambar 2.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 1
Gambar 2.2 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan	II - 6
Gambar 2.3 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan	II - 8
Gambar 2.4 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan	II - 10
Gambar 2.5 Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	II - 13
Gambar 2.6 Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 15
Gambar 2.7 Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	II - 17
Gambar 2.8 Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 19
Gambar 2.9 Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	II - 21
Gambar 2.10 Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan	II - 23
Gambar 2.11 Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan	II - 25
Gambar 2.12 Sebaran Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II - 27
Gambar 2.13 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel, 2022	II - 31
Gambar 2.14 Peta Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II - 37
Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023	II - 41
Gambar 2.16 Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023	II - 49
Gambar 2.17 Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 49
Gambar 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024....	II - 50
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	II - 51
Gambar 2.20 Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 54
Gambar 2.21 Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 55
Gambar 2.22 Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 56
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	II - 57
Gambar 2.24 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 59
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024.....	II - 60
Gambar 2.26 Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan	II - 63
Gambar 2.27 Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya	II - 64
Gambar 2.28 Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 82
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 83

Gambar 2.30	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 83
Gambar 2.31	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 84
Gambar 2.32	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 85
Gambar 2.33	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 85
Gambar 2.34	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2018-2024	II - 86
Gambar 2.35	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 88
Gambar 2.36	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 88
Gambar 2.37	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 89
Gambar 2.38	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II - 89
Gambar 2.39	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kab/Kota Tahun 2023	II - 90
Gambar 2.40	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2023	II - 91
Gambar 2.41	Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Sumsel dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 100
Gambar 2.42	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II - 101
Gambar 2.43	Jumlah Kematian bayi Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II - 102
Gambar 2.44	Tren prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 103
Gambar 2.45	Tren Prevalensi Balita Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 103
Gambar 2.46	Persentase Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 104
Gambar 2.47	Cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 104
Gambar 2.48	Persentase Desa Yang Melaksanakn STBM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 105
Gambar 2.49	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 105
Gambar 2.50	Annual Parasit Incidence (API) Malaria Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024.....	II - 106
Gambar 2.51	Cakupan Pengobatan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun 2019-2024	II - 107
Gambar 2.52	Jumlah Kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 108
Gambar 2.53	Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 9 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 109

Gambar 2.54	Pesentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 110
Gambar 2.55	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 111
Gambar 2.56	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 112
Gambar 2.57	Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	II - 134
Gambar 2.58	Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	II - 136
Gambar 2.59	Tampilan Portal Kebijakan Satu Peta (KSP)	II - 138
Gambar 2.60	Portal Tanah Air Indonesia	II - 142
Gambar 2.61	Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 143
Gambar 2.62	Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 144
Gambar 2.63	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 145
Gambar 2.64	Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2023	II - 146
Gambar 2.65	Jumlah Kepala Keluarga MBR yang tidak memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II - 149
Gambar 2.66	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023	II - 156
Gambar 2.67	Perkembangan Nilai Pilar Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023	II - 156
Gambar 2.68	Penghargaan Pembinaan Terbaik dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022	II - 157
Gambar 2.69	Penghargaan Pembinaan Terbaik dalam Tata Operasional Sarana dan Prasarana POL PP Tahun 2022	II - 158
Gambar 2.70	Penghargaan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Tahun 2022	II - 158
Gambar 2.71	Piagam BNPB Tahun 2017-2018	II - 159
Gambar 2.72	Penyerahan Piagam BNPB	II - 160
Gambar 2.73	Tren Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 164
Gambar 2.74	Tren Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 165
Gambar 2.75	Persentase PSKS perorangan yang Berperan Aktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 167
Gambar 2.76	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2010-2024	II - 169
Gambar 2.77	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan	II - 171
Gambar 2.78	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan	II - 172
Gambar 2.79	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	II - 174
Gambar 2.80	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 175

Gambar 2.81	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023	II - 176
Gambar 2.82	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 176
Gambar 2.83	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II - 180
Gambar 2.84	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2023.....	II - 192
Gambar 2.85	Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019- 2024 di Provinsi Sumsel.....	II - 197
Gambar 2.86	Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) .	II - 202
Gambar 2.87	Total Fertility Rate (TFR)	II - 203
Gambar 2.88	Angkutan Sungai di Sungai Musi	II - 209
Gambar 2.89	Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api	II - 216
Gambar 2.80	Penghargaan Smart Society Smart Province	II - 218
Gambar 2.81	Penghargaan tingkat Nasional Top Digital Award dan kategori Top Digital Implementation 2022 on Province Government Tahun 2022	II - 219
Gambar 2.82	Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan	II - 220
Gambar 2.83	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	II - 220
Gambar 2.84	Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON	II - 230
Gambar 2.85	Launching Computer Security Insident Responses Team (CSIRT) 11 Kabupaten/Kota se-Sumsel dan 7 Pergurua Tinggi di Palembang dan Lampung	II - 234
Gambar 2.86	Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara	II - 235
Gambar 2.87	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	II - 236
Gambar 2.88	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2024	II - 237
Gambar 2.89	Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan ...	II - 247
Gambar 2.90	Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan	II - 249
Gambar 2.91	Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin	II - 250
Gambar 2.92	Pulau Kemaro	II - 251
Gambar 2.93	Museum Al Quran Raksasa	II - 252
Gambar 2.94	Rumah di Kampung Arab Al-Munawar	II - 253
Gambar 2.95	Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring	II - 254
Gambar 2.96	Data Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 256
Gambar 2.97	Politeknik Pariwisata Palembang	II - 257
Gambar 2.98	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2016-2023	II - 258
Gambar 2.99	Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 259
Gambar 2.100	Target dan Realisasi Produksi Jagung Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 260
Gambar 2.101	Target dan Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 261
Gambar 2.102	Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (US\$)	II - 270
Gambar 2.103	Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	II - 280
Gambar 2.104	Kebun Raya Sriwijaya	II - 288
Gambar 2.105	Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2024	II - 293

Gambar 2.106	Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023	II - 297
Gambar 2.107	Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 298
Gambar 2.108	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2023	II - 299
Gambar 2.109	Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2023	II - 300
Gambar 2.110	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	II - 303
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018 – 2023	III - 14
Gambar 3.2	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024	III - 20
Gambar 3.3	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan	III - 23
Gambar 3.4	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2024.....	III - 28
Gambar 3.5	Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	III - 29
Gambar 3.6	Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	III - 30
Gambar 3.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 31
Gambar 3.8	Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 34
Gambar 3.9	Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 35
Gambar 3.10	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 37
Gambar 3.11	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	III - 38
Gambar 3.12	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	III - 40
Gambar 3.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2024	III - 41
Gambar 3.14	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan	III - 42
Gambar 3.15	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan	III - 43
Gambar 3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	III - 45
Gambar 4.1	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027.....	IV - 7
Gambar 4.2	Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2027	IV - 7
Gambar 4.3	Prioritas Nasional RKP	IV - 19
Gambar 4.4	KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	IV - 48
Gambar 4.5	KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya.....	IV - 50
Gambar 4.6	KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	IV - 52
Gambar 4.7	KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya.....	IV - 54
Gambar 4.8	KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	IV - 54

Gambar 4.9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Develpoment Goals</i> (TPB/SDGs)	IV – 58
Gambar 4.10	Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan	IV - 59
Gambar 5.1	Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan	V - 2
Gambar 5.2	Peta Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	V - 6
Gambar 5.3	Lingkup Wilayah Patungraya Agung	V - 14
Gambar 5.4	Peta Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan	V - 15
Gambar 5.5	KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	V - 16
Gambar 5.6	KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya.....	V - 18
Gambar 5.7	KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	V - 19
Gambar 5.8	KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya.....	V - 21
Gambar 5.9	KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	V - 23
Gambar 5.10	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Palembang	V - 27
Gambar 5.11	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin	V - 32
Gambar 5.12	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	V - 40
Gambar 5.13	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir...	V - 45
Gambar 5.14	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	V - 51
Gambar 5.15	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau	V - 57
Gambar 5.16	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	V - 61
Gambar 5.17	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara ...	V - 66
Gambar 5.18	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam.....	V - 71
Gambar 5.19	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat.....	V - 76
Gambar 5.20	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang.....	V - 81
Gambar 5.21	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim	V - 86
Gambar 5.22	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih	V - 93
Gambar 5.23	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir	V - 97
Gambar 5.24	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur	V - 102
Gambar 5.25	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu .	V - 107
Gambar 5.26	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	V - 113

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan kewenangannya maka, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah serta dinamika daerah dan nasional.

Dalam prosesnya perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, yang lebih dikenal dengan istilah THIS.

Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. RKPD yang sudah ditetapkan menjadi

acuan dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seluruh tahapan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput secara sistematis melalui aplikasi SIPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang RPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2).

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun

2025-2029, penyusunan RKPD mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan kebijakan dan isu strategis RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKP Tahun 2026. Secara detail keterkaitan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 ini, dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 RKPD dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 mengacu pada dokumen Rancangan RKP 2026 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKPD Tahun 2027 dan Rancangan RKP Tahun 2026 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan
Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	3. Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	5. Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7. Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 tersebut disusun berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, target Rancangan RKP Tahun 2026 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 9 (sembilan) isu strategis yaitu:

1. Kemiskinan dan Stunting masih tinggi.
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum optimal.
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal.
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas belum optimal.
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal.
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi belum optimal.
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam mendorong Pengembangan Wilayah.
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan.
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Tabel 1.2

Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROVINSI
% Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,9 – 7,50	5,7 - 7,2
PDRB per Kapita (ADHB)	85,1 – 87,5*	104,00
Kontribusi PDRB Provinsi	3,0*	3,11
Tingkat Kemiskinan	6,00 - 6,50	8,24 – 9,24
Rasio Gini	0,362 - 0,367	0,298 - 0,305
Indeks Modal Manusia	0,575	0,56 – 0,57
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57	76,42
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,84	68,70
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30 – 4,87	3,45 - 3,54

Sumber : *Rancangan Awal RKP Tahun 2027

Tabel diatas menunjukkan target indikator makro Provinsi yang harus dicapai di tahun 2027 untuk mendukung capaian nasional.

1.3.2. RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting masih tinggi.
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum optimal.
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal.
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas belum optimal.
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal.
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi belum optimal.
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam mendorong Pengembangan Wilayah.
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan.
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

1.3.3. RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi RKPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

- (1) Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- (3) Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- (4) Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi;
- (5) Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- (6) Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
- (7) Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRW Provinsi, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu RKPD Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.4. RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan. Secara detail dijelaskan pada Bab V.

1.3.5. RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RKPD tahun 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Untuk detail Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dijelaskan lebih lanjut di Bab VI.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

1.4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- (1) Mendukung terwujudnya Visi Misi Kepala Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2027, dengan fokus tahun 2027 menitikberatkan transformasi ekonomi hijau, pemerataan dan peningkatan kualitas SDM serta produk unggulan daerah, penguatan daya saing ekonomi rakyat, dengan dukungan pemerataan infrastruktur berwawasan mitigasi risiko serta digitalisasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik, serta memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih sebagai bentuk optimalisasi pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat.
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselerasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan;
- (3) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data yang terkini dan akurat;
- (4) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

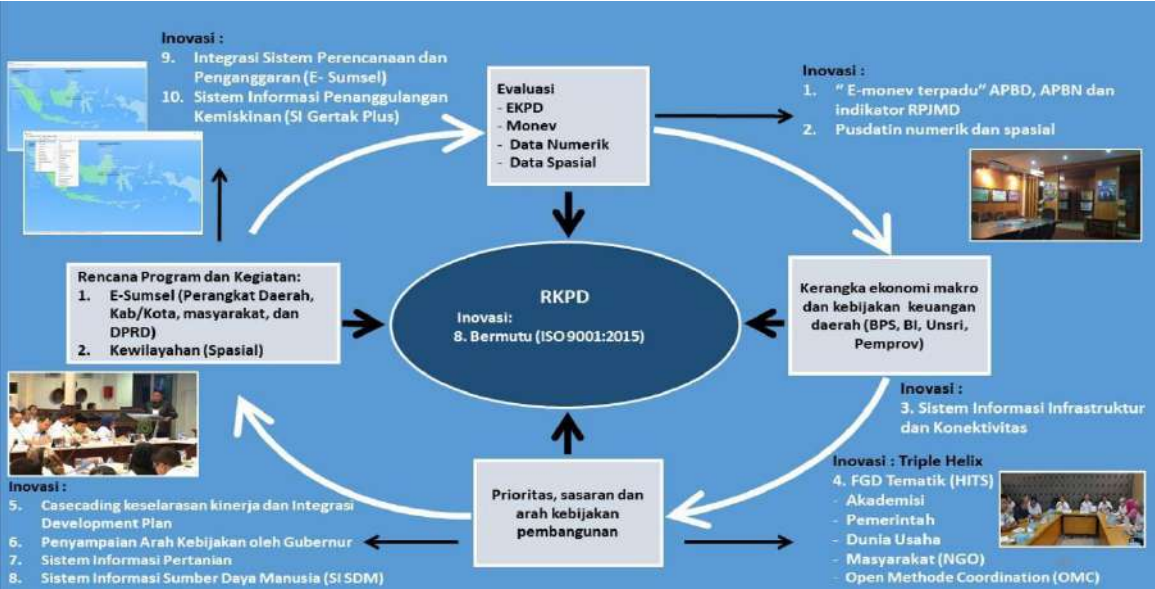
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

1.6. Pendekatan Baru

Penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program dan program follows result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2027



Pendekatan Substansi yang digunakan adalah:

1. Tematik : Merupakan pendekatan perencanaan dimana difokuskan sampai dengan program prioritas daerah.
2. Holistik : Untuk mencapai sasaran prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya dalam penanggulangan kemiskinan, program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan kepemilikan asset, sehingga penduduk miskin dapat lepas dari jerat kemiskinan
3. Integratif : Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi, harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Pembangunan Pertanian Dinas Pertanian dan Hortikultura melakukan program kegiatan peningkatan produktivitas lahan, Dinas Pengelolaan Sumber Air melakukan perbaikan atau pembangunan saluran irigasi, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan upaya penghentian konversi lahan produktif dan reforma agrarian yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan.

4. Spasial : Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

1.7. Pendekatan Proses

1). Pendekatan SIPD

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan telah dilakukan melalui SIPD yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274, 391 sampai 395. Kemudian turunan berupa Permendagri Nomor 70 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178, dimana seluruh usulan Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, Kabupaten/Kota dan Pokok-pokok pikiran DPRD/hasil penjangkaran aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dan seluruh pembuatan dokumen perencanaan daerah (dokrenda) termasuk RKPD tahun 2027 dilakukan melalui aplikasi SIPD.

Guna memenuhi amanat peraturan-peraturan diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan aplikasi SIPD untuk perencanaan tahun 2027. Di dalam aplikasi SIPD terdapat 3 informasi pemerintah daerah yaitu :

1. Informasi Pembangunan Daerah
Kaitan dengan data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
Terdiri dari Informasi Perencanaan Anggaran Daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya.
3. Informasi Pemerintah Daerah lainnya
Terdiri dari informasi LPPD, EPPD, Perda, dan Binwas/Audit, dst.

Proses verifikasi pokok pikiran anggota dewan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. *Inputting* usulan pikir melalui akun anggota dewan
2. Validasi oleh Sekretariat DPRD
3. Validasi oleh Mitra Bappeda
4. Validasi oleh OPD Tujuan
5. Validasi TAPD

2). Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Forum Konsultasi Publik,
2. Rapat Stakeholder Provinsi, dan
3. Musrenbang.

3). Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan mengikut sertakan unsur akademisi, praktisi, ahli, dan tenaga fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4). Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2027 dan proses perencanaan Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat/Umum, dan Perangkat Daerah telah dapat menyampaikan usulan kegiatan tahun 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara detil dapat dijelaskan sebagai berikut : Musrenbang Sektoral (Ratek Trilateral Meeting) yang dihadiri oleh *stakeholder* untuk memfokuskan dan mempermudah *memfollow-up* usulan dari Kabupaten/Kota yang akan diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk RKPD Tahun 2027 yang diinput oleh Kabupaten/Kota melalui SIPD. Selanjutnya usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan sinkron dengan target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan skala prioritas arah kebijakan RKPD Tahun 2027 dapat diakomodir menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027.

a. Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini yaitu:

1. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial (facebook, instagram, twitter), dan secara langsung melalui penyebaran brosur/flyer di mall, sekolah, perguruan tinggi.
2. Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui datang langsung (tatap muka), usulan/proposal, melalui website www.bappeda.sumselprov.go.id dan melalui SIPD.
3. Penjaringan aspirasi masyarakat secara interaktif melalui radio.
4. Usulan dapat dilakukan juga dengan Proposal dan melalui reses DPRD yang nantinya diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan didistribusikan ke Perangkat Daerah oleh Bappeda untuk selanjutnya diverifikasikan oleh Perangkat Daerah.

5). Pendekatan Politik

Rekomendasi kebijakan dari DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk sejalan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran provinsi yang ditempatkan pada pos belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

1.8. Rujukan Kebijakan

Arah kebijakan pada RKPD 2027 merujuk kepada beberapa hal yaitu:

1. Kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2025;
2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2025-2029;
3. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
4. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
5. Prioritas Pembangunan Nasional pada Rancangan RKP Tahun 2026;
6. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
7. RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 1^o 25' 13" sampai 4^o 55' 17" Lintang Selatan dan antara 102^o 3' 52" dan 106^o 19' 45" Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Peta Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Peta Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : geoportal.sumseprov.go.id, 2017

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,68 Km² dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Ogan Komering Ulu	3.774,50	13	157	101,63
2	Ogan Komering Ilir	17.071,33	18	327	45,68
3	Muara Enim	6.763,91	22	255	94,65
4	Lahat	4.333,07	24	378	102,00
5	Musi Rawas	6.122,59	14	199	68,85
6	Musi Banyuasin	14.550,79	15	242	48,61
7	Banyuasin	12.262,76	21	313	69,32
8	OKU Selatan	3.412,72	19	312	200,59
9	OKU Timur	4.369,25	20	259	96,36
10	Ogan Ilir	2.302,86	16	241	190,84
11	Empat Lawang	2.234,10	10	156	150,71
12	PALI	1.842,56	5	71	113,85
13	Musi Rawas Utara	5.937,80	7	89	33,63
14	Palembang	352,51	18	107	5.028,26
15	Prabumulih	625,91	6	35	241,06
16	Pagar Alam	367,73	5	72	657,81
17	Lubuk Linggau	447,31	8	45	467,17
Sumatera Selatan		91.592,43	86.771,68	241	3.258

Sumber : Hasil Konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka Kota Palembang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.028,26 jiwa per Km2. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 33,63 jiwa per Km2. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 di atas.

Total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebanyak 8.889.913 jiwa yang tersebar di 17 (tujuhbelas) kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2023 berada di Kota Palembang sebanyak 1.772.492 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kota Pagar Alam sebanyak 150.881 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah dan Distribusi Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ogan Komering Ulu	366.889	369.567	372.272	376.977	379.130	383.039
Ogan Komering Ilir	730.399	734.354	740.346	767.821	797.429	807.085
Muara Enim	580.608	593.769	615.720	630.809	633.779	640.962
Lahat	434.904	435.375	435.419	436.489	444.949	450.281
Musi Rawas	403.993	406.196	410.210	414.009	407.694	411.787
Musi Banyuasin	588.782	620.229	651.861	688.969	644.386	651.950
Banyuasin	814.492	818.766	824.551	837.062	874.210	885.902
OKU Timur	643.603	647.225	655.703	673.966	668.035	429.535
OKU Selatan	415.971	417.201	417.424	418.040	424.190	674.184
Ogan Ilir	414.036	420.783	428.108	431.558	431.043	436.141
Empat Lawang	333.857	334.809	335.024	335.506	342.178	345.641
Pali	182.402	195.729	200.855	204.473	202.681	205.384
Musi Rawas Utara	193.630	194.507	194.799	195.475	195.962	198.413
Palembang	1.619.533	1.668.164	1.704.538	1.754.437	1.706.371	1.718.440
Pagar Alam	196.460	146.889	147.640	148.264	147.836	203.312
Lubuk Linggau	227.330	229.063	232.739	237.576	242.976	149.199
Prabumulih	146.128	197.641	198.605	203.643	200.673	246.046
Sumatera Selatan	8.293.017	8.430.267	8.565.814	8.755.074	8.743.522	8.837.301

Sumber: Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, 2022 & BPS, 2024

Kondisi Geologi

Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai- sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau.

Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17- 634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik api) yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2015, luas kawasan budidaya sebesar 7.779.146,89 Ha atau 84,93% sedangkan luas kawasan lindung sebesar 1.380.096,11 Ha atau 15,06%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

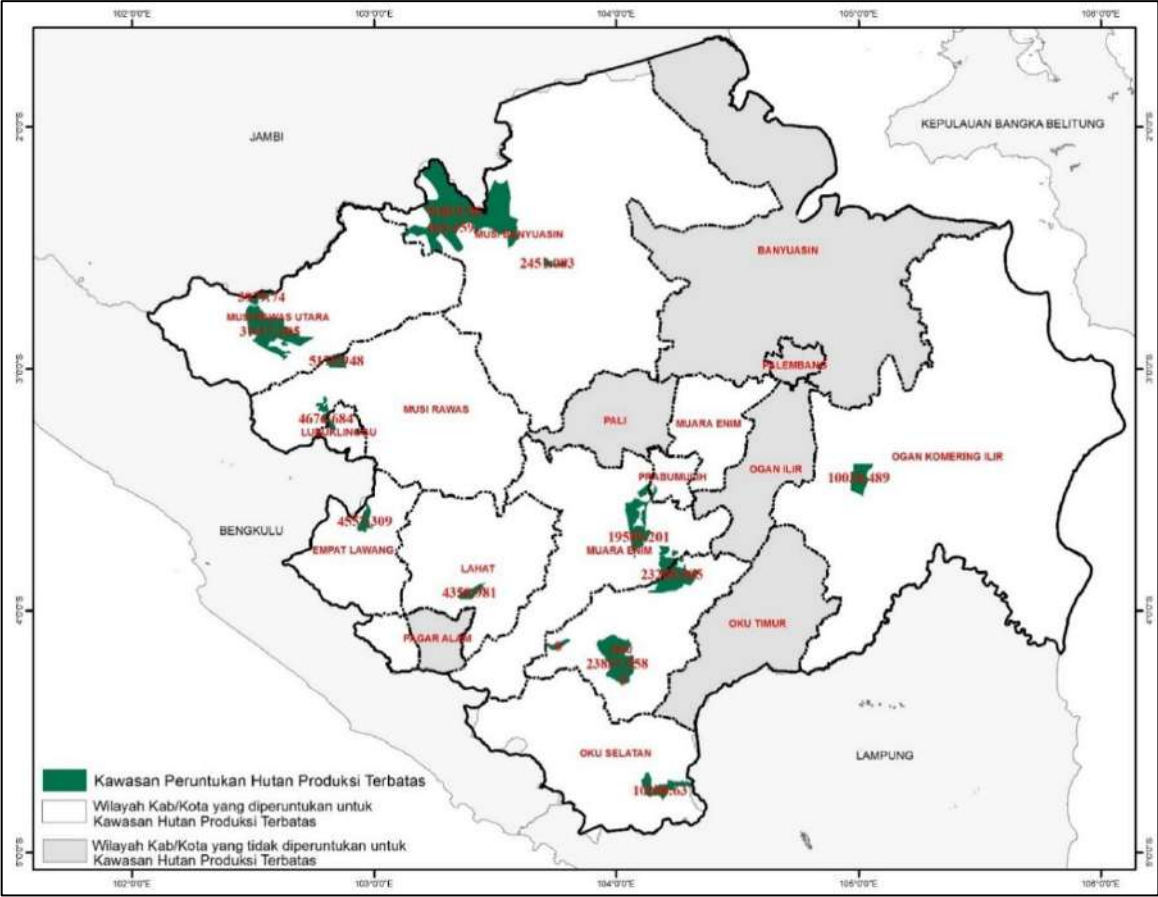
Pengembangan Kawasan Hutan Produksi ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan hasil hutan yang optimal, terkendali, serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 213.688,39 Ha, meliputi:

- 1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 94.301,17 Ha;
- 2) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 36.511,59 Ha;
- 3) Kabupaten Muara Enim dengan luas 25.498,07 Ha;
- 4) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 18.646,99 Ha;
- 5) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 10.238,82 Ha; dan
- 6) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 10.034,54 Ha;
- 7) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 7.385,84 Ha;
- 8) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 4.555,02 Ha;
- 9) Kabupaten Lahat dengan luas 4.350,98 Ha;
- 10) Kota Lubuk Linggau dengan luas 1.096,22 Ha;
- 11) Kota Prabumulih dengan luas 1.069,14 Ha.

Peta mengenai peruntukan kawasan hutan produksi terbatas diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- b. Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dengan luas 1.690.839,50 Ha.
- 1) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 642.534,22 Ha;
 - 2) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 398.493,87 Ha;
 - 3) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 167.044,67 Ha;
 - 4) Kabupaten Muara Enim dengan luas 156.139,89 Ha;
 - 5) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 109.927,10 Ha;
 - 6) Kabupaten Banyuasin dengan luas 70.757,90 Ha;
 - 7) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 54.958,68 Ha;
 - 8) Kabupaten Lahat dengan luas 27.160,94 Ha;
 - 9) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan luas 23.168,03 Ha;
 - 10) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas 19.475,77 Ha;
 - 11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 17.845,18 Ha;
 - 12) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 3.233,26 Ha; dan
 - 13) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 100,00 Ha.

Map of Sumatra Barat showing the distribution of permanent forest production areas. The map includes district boundaries and names, with green shading indicating designated areas. A legend at the bottom explains the symbols: green for designated areas, white for districts designated for such areas, and grey for districts not designated. Numerous numerical values are scattered across the map, likely representing specific data points for each area.

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- c. Kawasan hutan produksi konversi merupakan kawasan yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain, dengan luas 145.356,92 hektar :
- 1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 59.986,87 Ha;
 - 2) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 24.069,55 Ha;
 - 3) Kabupaten Banyuasin dengan luas 27.248,50 Ha;
 - 4) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 19.795,43 Ha;
 - 5) Kabupaten Muara Enim dengan luas 13.105,27 Ha;
 - 6) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 1.136,57 Ha;
- dan
- 7) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 14,73 Ha.

Tabel 2. 2
Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Ha)

No	Kabupaten /Kota	HPT	HP	HPK	Keterangan
1	Banyuasin	-	70.757,90	27.248,50	HPT = Hutan Produksi Terbatas HP = Hutan Produksi Tetap HPK = Hutan Produksi yang dapat diKonversi
2	Empat Lawang	4.555,02	3.233,26	-	
3	Lahat	4.350,98	27.160,94	-	
4	Muara Enim	25.498,07	156.139,89	13.105,27	
5	Musi Banyuasin	94.301,17	398.493,87	59.986,87	
6	Musi Rawas	7.385,84	167.044,67	19.795,43	
7	Musi Rawas Utara	36.511,59	109.927,10	1.136,57	
8	Ogan Ilir	-	100,00	14,73	
9	Ogan Komering Ilir	10.034,54	642.534,22	24.069,55	
10	Ogan Komering Ulu	18.646,99	54.958,68	-	
11	Ogan Komering Ulu Selatan	10.238,82	17.845,18	-	
12	Ogan Komering Ulu Timur	-	19.475,77	-	
13	Penukal Abab Lematang Ilir	-	23.168,03	-	
14	Lubuk Linggau	1.096,22	-	-	
15	Pagar Alam	-	-	-	
16	Palembang	-	-	-	
17	Prabumulih	1.069,14	-	-	
	Jumlah	213.688,39	1.690.839,50	145.356,92	

Catatan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan KepMenLHK Nomor : SK.8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018

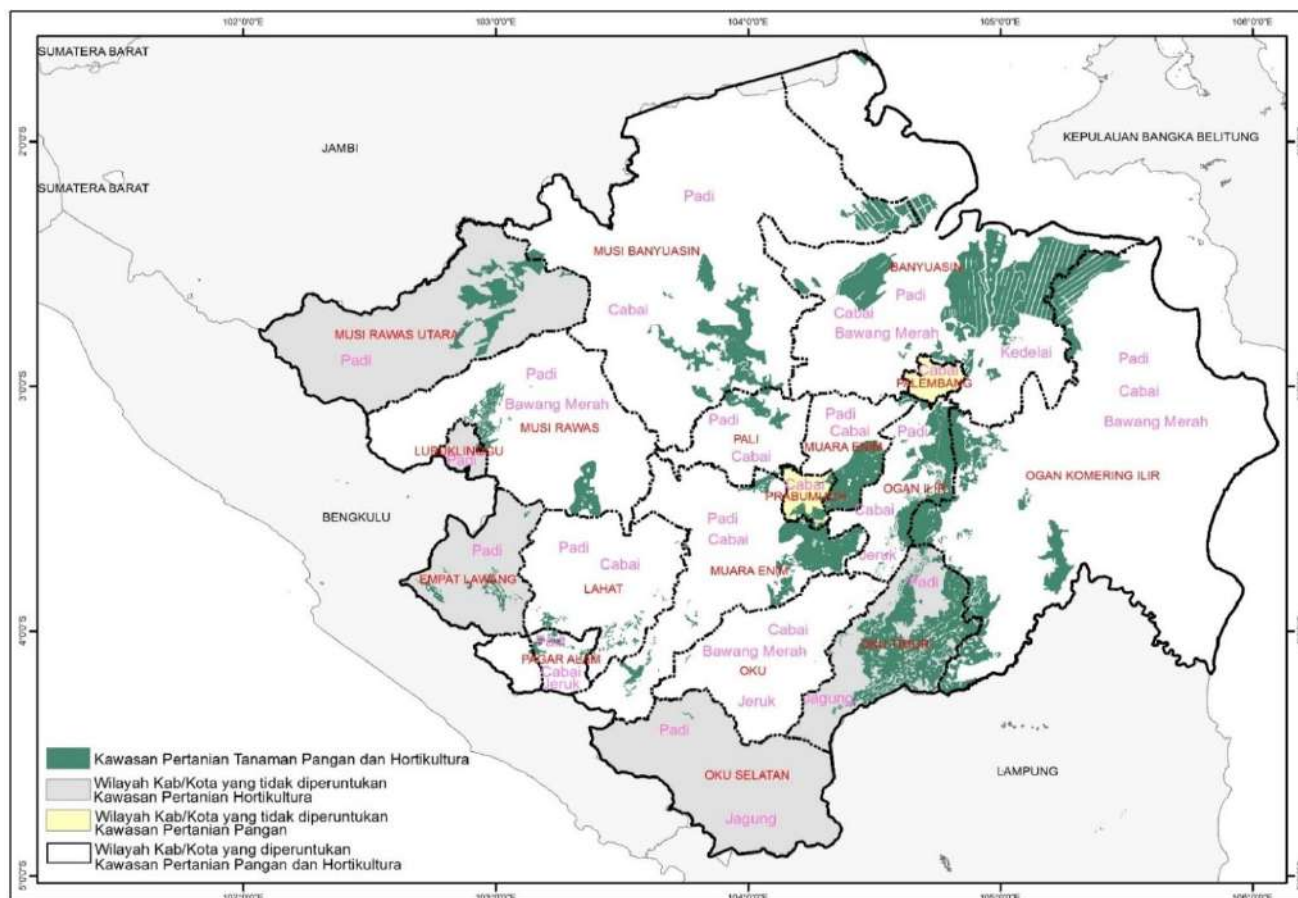
2. Kawasan peruntukan pertanian

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian adalah pengendalian alih fungsi pertanian khususnya pada lahan produktif yang memiliki irigasi dipertahankan fungsi dan peruntukannya guna menunjang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan kawasan pertanian ditujukan untuk mengembangkan area produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan.

Rencana kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- a. Kawasan pertanian pangan yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
 - 1) Padi (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - 2) Jagung (terutama di Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan); dan
 - 3) Kedelai (terutama di Kabupaten Banyuasin).
- b. Kawasan pertanian hortikultura yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
 - 1) Cabai (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang)
 - 2) Bawang merah (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin); dan
 - 3) Jeruk (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam).

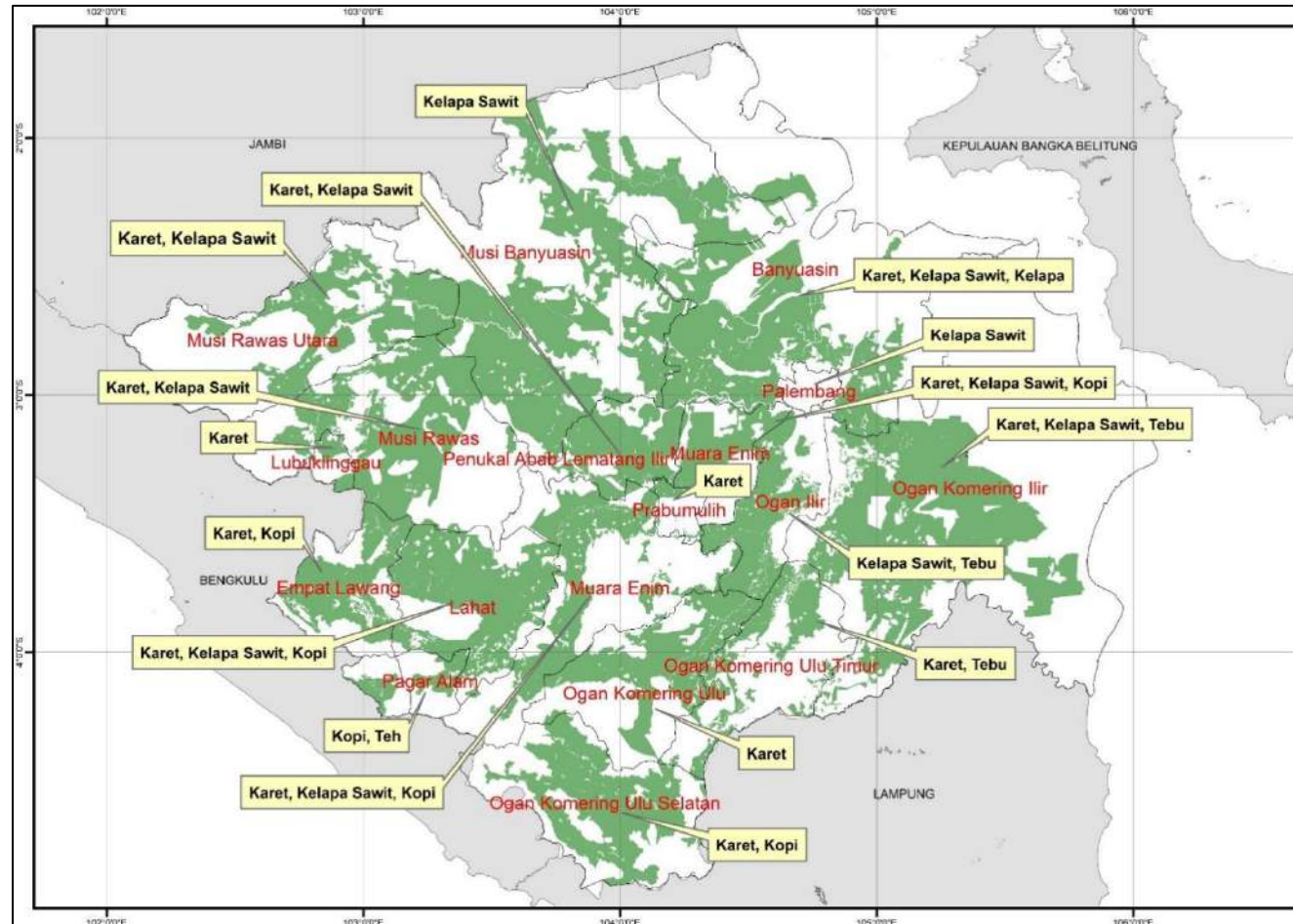
Gambar 2. 5
Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- c. Kawasan perkebunan yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan, serta pengembangan sentra produksi perkebunan di seluruh wilayah Provinsi dengan jenis komoditi unggulan, meliputi:
- 1) Karet (terutama di Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Lahat OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau);
 - 2) Kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
 - 3) Kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam);
 - 4) Kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin; dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - 5) Tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir); dan
 - 6) Teh (terutama di Kota Pagar Alam).

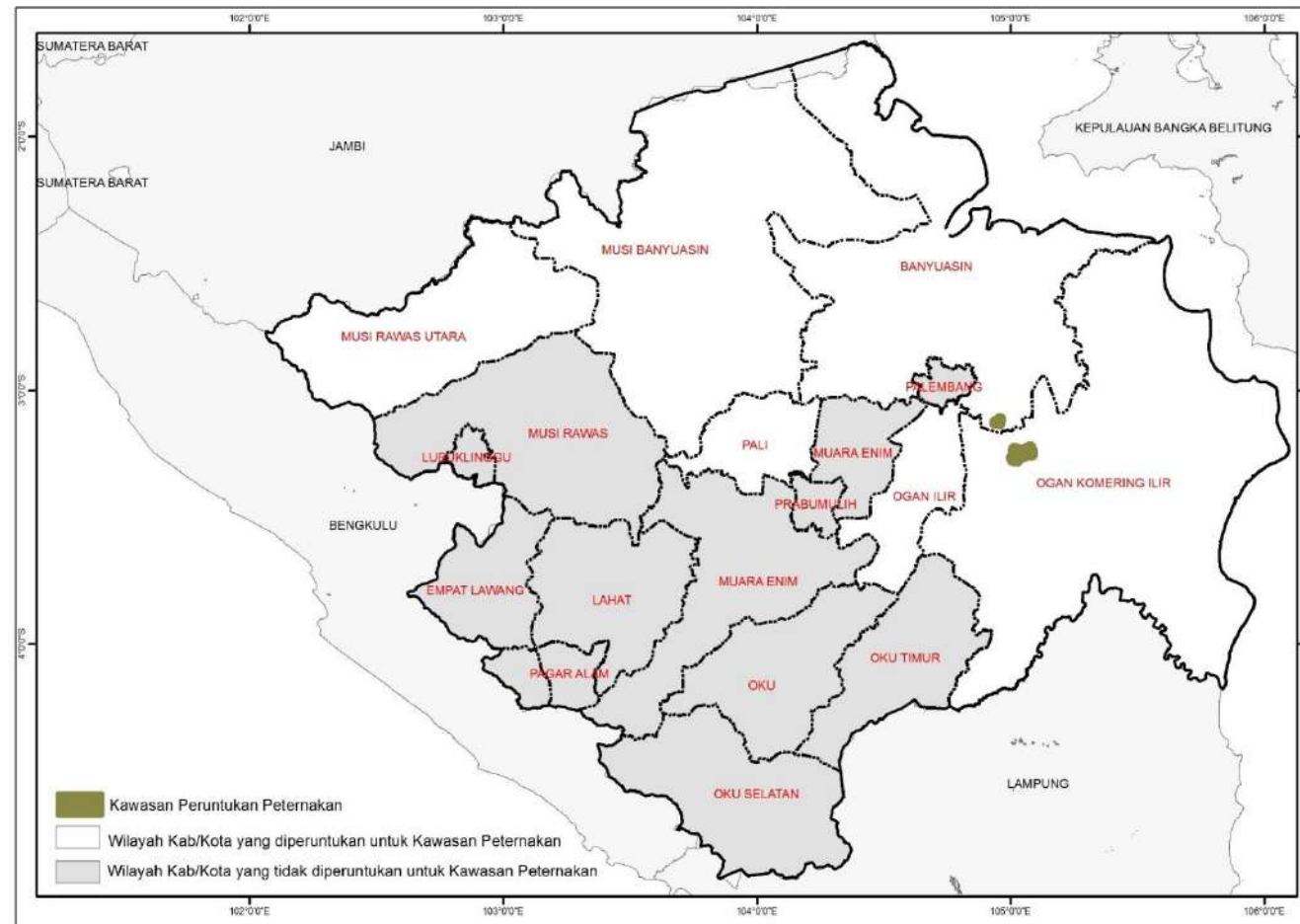
Gambar 2. 6
Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- d. Kawasan peternakan yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi terutama di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Gambar 2. 7
Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan



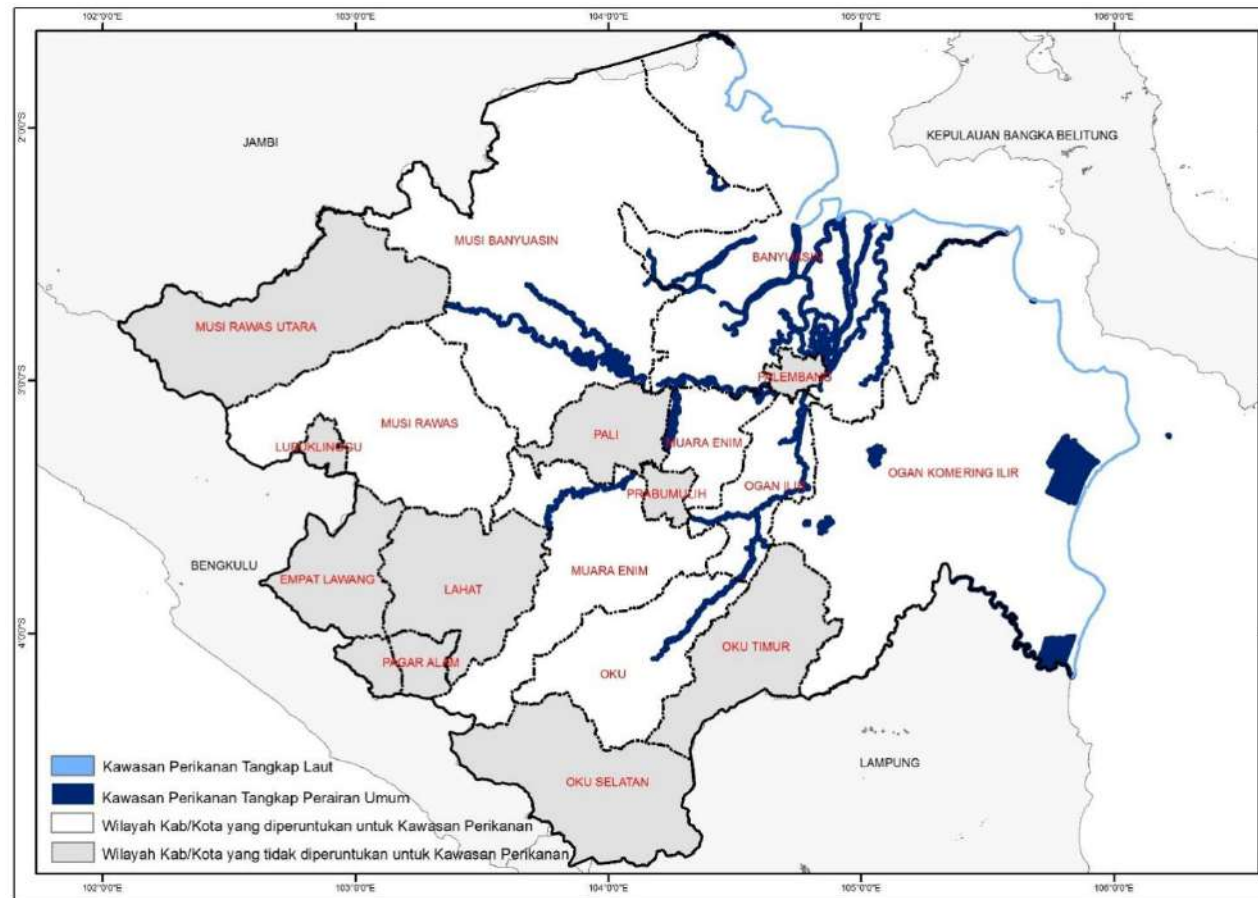
Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

3. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan perikanan tangkap meliputi:

- a. Perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin); dan
- b. Perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Ogan Ilir.

Gambar 2. 8
Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

4. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.

Arahan pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat; dan
- c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

5. Kawasan peruntukan pariwisata

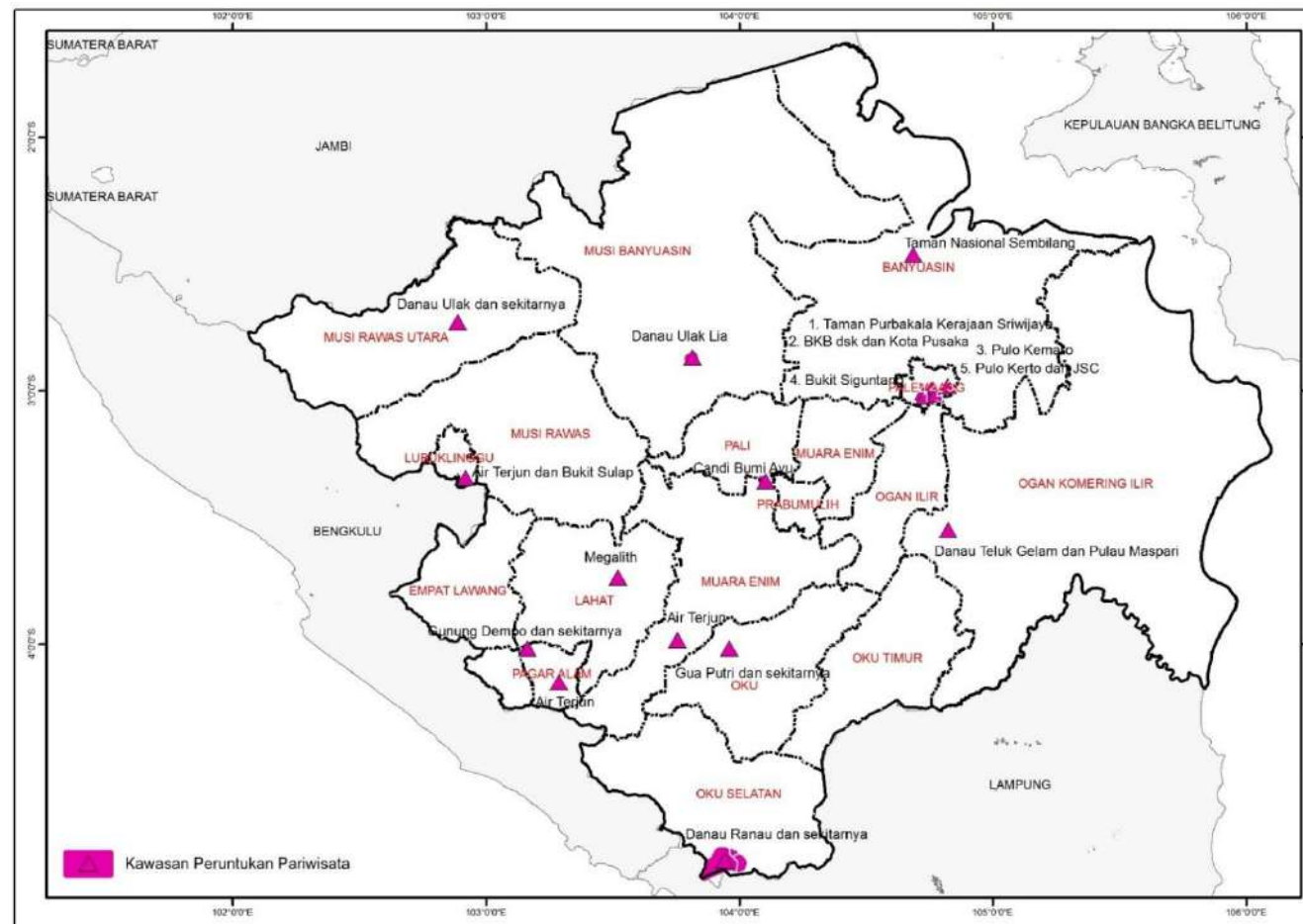
Kriteria dalam penetapan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki:

- a. Keindahan alam dan keindahan panorama;
- b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; dan
- c. Bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Pengembangan pariwisata diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:

- a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang);
- b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam);
- c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan);
- d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam);
- e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU);
- f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI);
- g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin);
- h. Air Terjun dan Bukit Sulap (Lubuk Linggau);
- i. Air Terjun (Muara Enim);
- j. Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin);
- k. Danau Raya dan sekitarnya (Musi Rawas Utara); dan
- l. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

Gambar 2. 9
Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

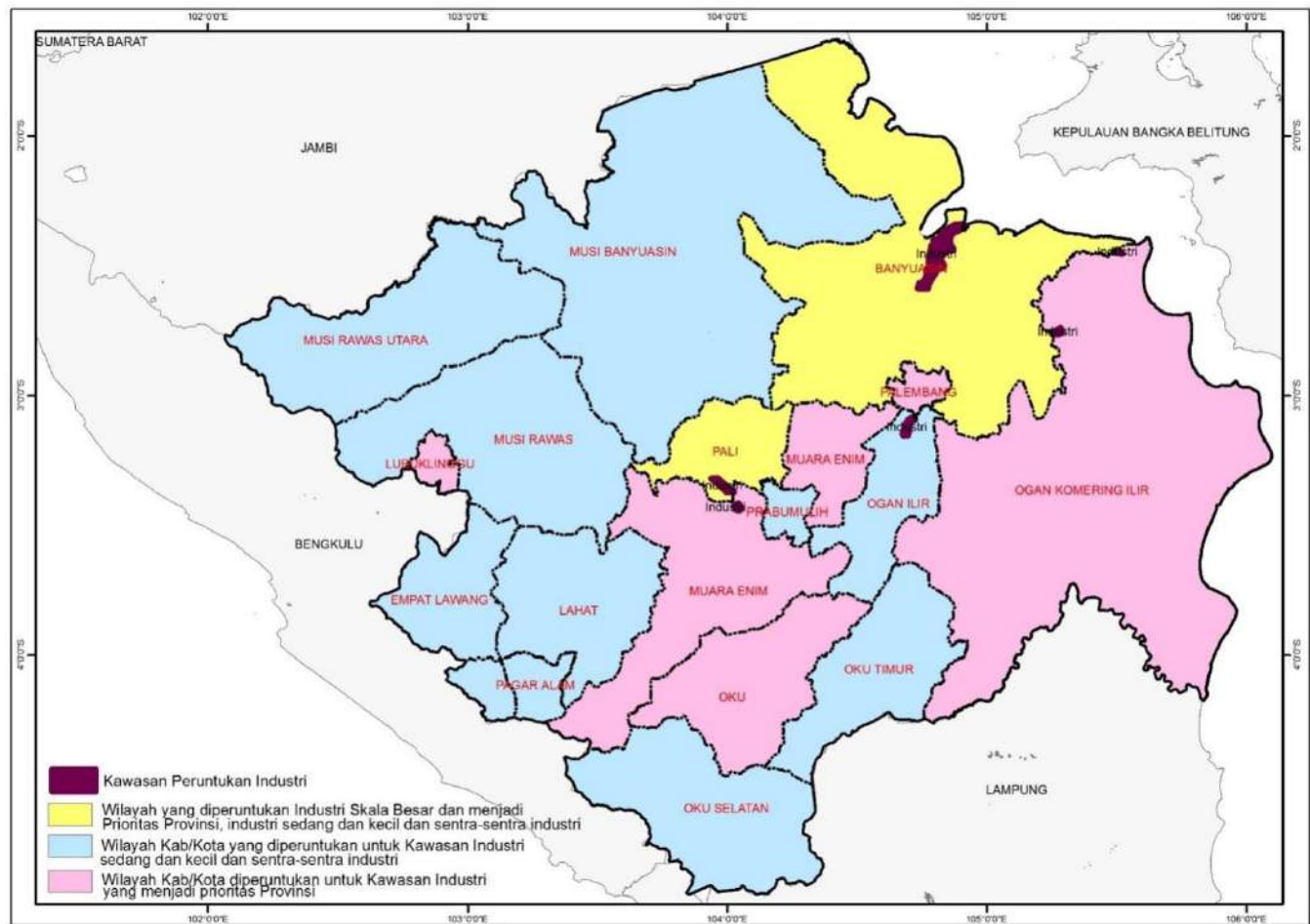
6. Kawasan peruntukan industri

Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas penunjang.

Pengembangan kawasan industri dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi, yaitu:

- a. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-Api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
- b. Industri sedang dan industri kecil dan sentra-sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/ kota; dan
- c. Industri yang menjadi prioritas Provinsi terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

Gambar 2. 10
Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan



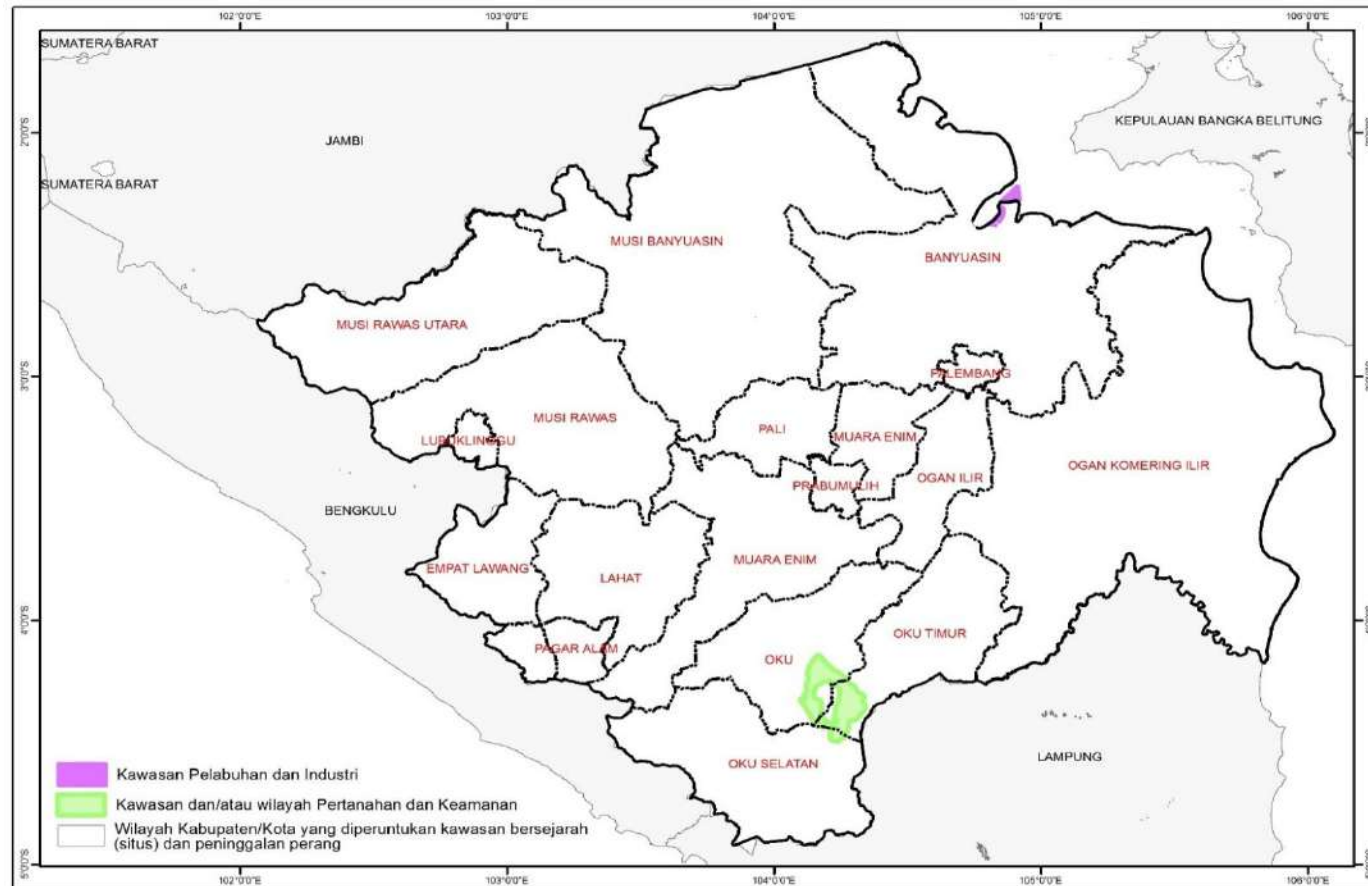
Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

7. Kawasan peruntukan lainnya

Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya ditujukan bagi peruntukan kawasan yang meliputi :

- a. Kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi; dan
- c. Kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/ terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PDR).

Gambar 2. 11
Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

2.1.1.1. Wilayah Rawan Bencana

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2014 sampai tahun 2023 berjumlah 1.392 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, banjir bandang, kecelakaan kapal, semburan lumpur dan Hujan Es. Jumlah kejadian bencana terbesar adalah bencana kebakaran sebanyak 775 kejadian dari tahun 2014 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014 – 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2014 - 2023										Total
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Banjir	24	22	29	22	34	31	47	22	43	90	364
2	Kebakaran	91	90	25	91	99	117	88	98	52		775
3	Tanah longsor	19	19	9	18	18	14	17	7	17	28	166
4	Puting Beliung	7	5	11	25	20	11	12	21	30	85	227
5	Banjir Bandang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
6	Kecelakaan Kapal	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
7	Semburan Lumpur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Hujan Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Erosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
10	Tersambar petir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Total	141	136	74	156	171	173	164	148	147	219	1.553

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Bencana asap akibat dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam dan ulah dari perbuatan manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Jumlah bencana banjir sebanyak 364 kejadian yang juga dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Jumlah kejadian bencana terkecil atau yang paling

sedikit adalah bencana semburan lumpur dan hujan es yaitu sebanyak 1 kejadian selama sembilan tahun terakhir pada periode 2014-2023.

Gambar 2. 12
Sebaran Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Rekapitulasi kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 adalah sebanyak 141 kejadian yang terdiri dari bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan angin puting beliung. Pada tahun 2015 jumlah kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 136 kejadian bencana. Pada tahun 2024 jumlah kejadian bencana alam sebanyak 304 kejadian dengan total kejadian bencana alam selama 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah 1.553 kejadian. Berdasarkan sebaran kejadian bencana di provinsi sumatera selatan pada tahun 2024, ada 3 kabupaten/kota yang memiliki kejadian bencana paling banyak yaitu Kota Palembang berjumlah 61 kejadian bencana, kabupaten Ogan Ilir berjumlah 44 kejadian bencana dan kabupaten Muara Enim berjumlah 39 kejadian bencana.

Dilihat dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Indeks Risiko bencana tersebut tiap tahunnya stabil dan berada dalam kategori yang rawan sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki risiko bencana yang paling tinggi adalah Kabupaten Empat Lawang, sedangkan yang memiliki risiko

bencana yang paling sedang adalah Kabupaten OKU Selatan. Meskipun demikian, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki risiko bencana yang sedang dan tinggi sehingga perlu adanya upaya penanggulangan bencana dan penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 4
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
Empat Lawang	158,00	158,00	153,07	154,31	151,98	Tinggi
Muara Enim	155,20	155,20	155,20	152,86	148,92	Tinggi
Musi Rawas	155,20	155,20	145,27	146,94	148,80	Tinggi
Ogan Komering Ilir	153,20	153,20	153,20	146,36	145,52	Tinggi
Ogan Komering Ulu	155,20	155,20	155,20	145,51	144,08	Tinggi
Musi Rawas Utara	155,20	155,20	154,15	142,61	141,07	Sedang
Penukal Abab Lematang Ilir	155,20	155,20	155,20	142,57	136,76	Sedang
Prabumulih	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	Sedang
Palembang	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	Sedang
Ogan Komering Ulu Timur	131,20	131,20	131,20	131,20	125,17	Sedang
Banyuasin	136,07	141,43	137,81	130,11	124,44	Sedang
Pagar Alam	126,40	126,40	126,40	126,40	123,96	Sedang
Lubuk Linggau	124,80	124,80	124,80	124,80	122,02	Sedang
Musi Banyuasin	132,40	132,40	125,53	117,86	120,98	Sedang
Ogan Ilir	132,40	120,56	116,43	117,60	115,97	Sedang
Lahat	109,07	109,07	116,55	111,56	111,09	Sedang
Ogan Komering Ulu Selatan	130,00	130,00	120,26	106,15	105,47	Sedang
Sumatera Selatan	139,62	139,24	137,31	132,99	131,24	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.1.1.1.1. Bencana Banjir

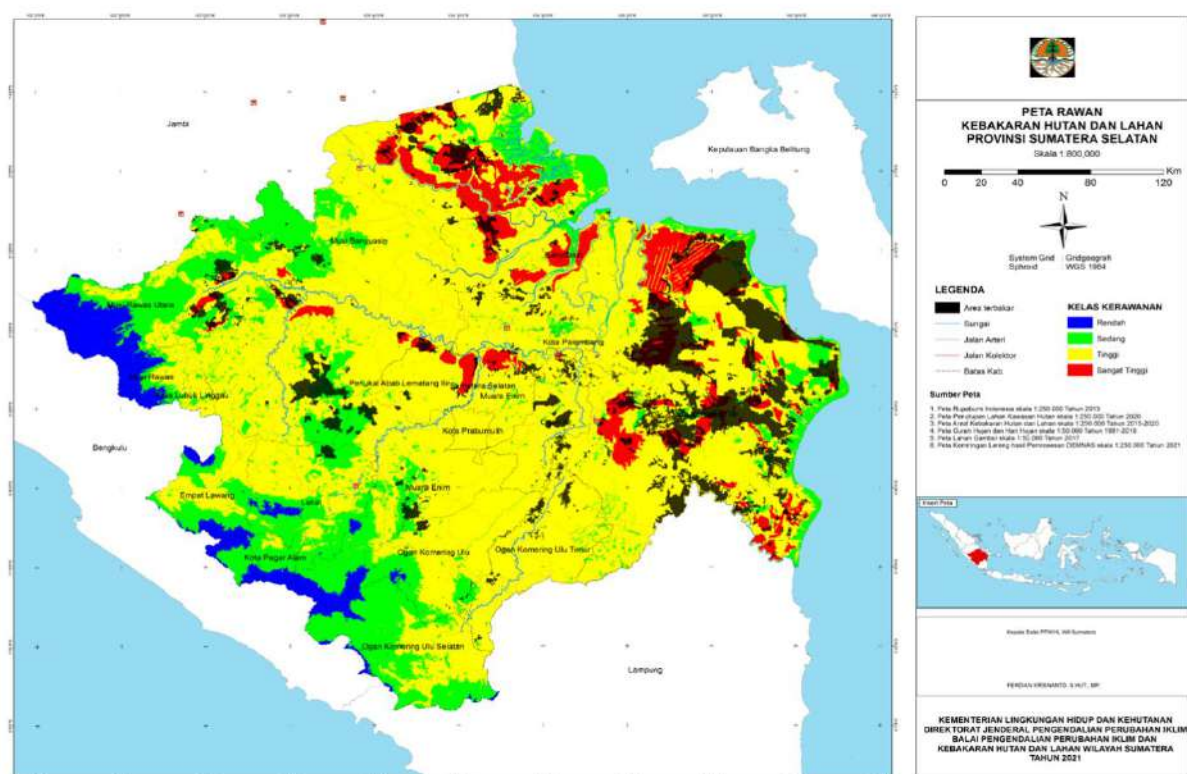
Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga Tahun 2023 tercatat 364 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi :

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batang Harileko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi.
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi Bingin Teluk dan Noman.
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam.
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi Muara Kuang.
- Di Sub DAS Komerling banjir terjadi di Muaradua.
- Di pertemuan Sungai Musi - Sungai Kelingi, Sungai Musi - Sungai Lakitan dan Sungai Musi - Sungai Rawas terjadi pada saat debit puncak sungai-sungai.
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

2.1.1.1.2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercatat 20.547 sebaran hotspot bencana kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (Januari-Desember). Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran di daerah rawan kebakaran.

Gambar 2. 13
Peta Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumsel, 2022



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pada Peta Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2022, terlihat bahwa wilayah timur laut Sumatera Selatan yang masuk ke area terbakar dan kategori kerawanan sangat tinggi, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin, diikuti oleh wilayah Sumatera Selatan bagian tengah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Wilayah timur seperti Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, dan Lahat tergolong sedang dan rendah.

Di bawah ini merupakan lokasi sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan data tim monitoring hotspot Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 5
Data Sebaran Hotspot Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	KOTA/KABUPATEN	SEBARAN PER BULAN 2022												JMLH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Palembang							2	2	24	26	4		58
2	Pagaralam			1	1			1	1	2	5			11
3	Lubuk Linggau		1							8	5	2	1	17
4	Prabumulih	2	2	1	5	3	6		1	5	30	4	8	67
5	Ogan Ilir			4	6	5	12	14	69	292	359	43	8	812
6	Ogan Komering Ilir	6	7	7	11	10	20	36	216	3131	6113	1054	25	10636
7	Ogan Komering Ulu	3	3	3	12	6	10	1	52	283	203	27	4	607
8	Oku Timur				3	5	6	8	27	216	406	47	4	722
9	Oku Selatan	2	5	2	15	3	11	5	30	91	173	65	23	425
10	Musi Rawas	14	12	10	59	15	27	16	107	202	245	27	15	766
11	Musi Banyuasin	11	9	20	38	59	43	30	97	453	611	92	18	1457
12	Banyuasin	2	8	14	5	38	14	26	96	717	982	136	5	2019
13	Empat Lawang	4	3	1	18	5	7	15	38	69	62	5	6	231
14	Lahat	2	7	4	14	18	21	19	110	163	178	10	11	557
15	Muara Enim	4	7	7	24	16	26	13	53	255	317	43	46	811
16	Muratara	9	12	13	41	47	20	19	84	277	439	37	10	1008
17	Pali		6	6	10	29	12	6	25	139	92	8	10	343
TOTAL/BULAN		59	82	93	262	226	235	211	1008	6327	10246	1604	194	20547

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tabel 2. 6
Perbandingan Jumlah Sebaran Hotspot dari Tahun 2015-2023

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JMLH
2015	13	35	42	29	137	229	656	1.800	11.285	11.584	1.182	51	27.043
2016	23	13	29	19	28	98	121	317	218	70	25	4	965
2017	9	4	22	26	61	92	148	232	418	130	39	33	1.214
2018	36	20	13	38	42	52	198	264	673	663	51	31	2.081
2019	12	16	15	35	138	95	256	1.308	6.829	6.973	1.347	367	17.391
2020	380	138	457	350	291	354	388	1.121	473	279	238	67	4.536
2021	11	17	49	122	139	217	556	403	642	357	121	160	2.794
2022	66	80	180	212	351	197	328	345	331	92	117	13	2.312
2023	59	82	93	262	226	235	211	1008	6327	10246	1604	194	20547

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini adalah data luas sebaran kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021-2024 berdasarkan jenis lahan yaitu lahan mineral dan lahan gambut di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2.8
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021-2024 (dalam Ha)

No	Kabupaten	2021			2022			2023			2024		
		Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total
1	Banyuasin	181	35	216	11		11	14981	11469	26450	2231	456	2687
2	Kota Lubuk Linggau	7		7			-			-			-
3	Kota Prabumulih	4		4	1		1			-	10		10
4	Lahat	66		66	19		19	321		321	4		4
5	Muara Enim	128	2	130	128		128	2844	227	3071	1086	567	1652
6	Musi Banyuasin	527		527	191	10	201	2247	2007	4255	1957	2054	4011
7	Musi Rawas	760		760	433		433	1174	176	1350	1187	21	1209
8	Musi Rawas Utara	225	9	234	625	6	631	2785	2118	4903	413	445	859
9	Ogan Ilir	998		998	1443		1443	7497		7497	717		717
10	Ogan Komering Ilir	786	248	1035	219	28	247	35221	35636	70857	1145	411	1556
11	Ogan Komering Ulu	330		330	262		262	19		19	676		676
12	Ogan Komering Ulu Timur	65		65	96		96	1372		1372	80		80
13	Ogan Komering Ulu Selatan	44		44	5		5	3		3	211		211
14	Penukal Abab Lematang Ilir	446		446	61		61	311	144	455	248	28	276
15	Kota Palembang	0			24		24	1079		1079	1		1
16	Kab. Empat Lawang	49		49	9		9	23		23	10		10
17	Kota Pagar Alam												
	Jumlah	4.615	295	4.910	3.525	43	3.568	69.877	51.776	121.653	9.976	3.982	13.957

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Dari data di atas dapat terlihat bahwa tahun 2021 luas karhutla mencapai 4.910 ha, pada tahun 2022 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 3.568 ha. Untuk tahun 2024 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menurun menjadi 13.957 ha.

Tabel 2.9
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

No.	Kabupaten	Gambut (Ha)	Mineral (Ha)	Grand Total (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	40.459,94	39.566,02	80.025,96
2	Banyuasin	11.975,62	15.050,33	27.025,95
3	Ogan Ilir		7.853,53	7.853,53
4	Musi Rawas Utara	2.117,72	2.933,14	5.050,86
5	Musi Banyuasin	2.007,32	2.247,19	4.254,51
6	Muara Enim	226,96	2.989,30	3.216,26
7	Musi Rawas	175,88	1.204,05	1.379,93
8	Ogan Komering Ulu Timur		1.373,26	1.373,26
9	Kota Palembang		1.079,16	1.079,16
10	Penukal Abab Lematang Ilir	143,90	310,66	454,56
11	Lahat		324,28	324,28
12	Empat Lawang		23,21	23,21
13	Ogan Komering Ulu		18,84	18,84
14	Ogan Komering Ulu Selatan		2,53	2,53
	Grand Total	57.107,34	74.975,52	132.082,86

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Dari data di atas dapat terlihat bahwa tahun 2019 luas karhutla mencapai lebih dari 329.484 ha, dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semakin berangsur menurun hingga pada tahun 2022 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 3.720 ha. Untuk tahun 2023 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan cukup meningkat menjadi 132.082,86.

Tabel 2.10
Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Kecamatan		Desa		Jumlah
		Rawan	Sangat Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
1	Ogan Komering Ilir	18	14	63	87	150
2	Banyuasin	19	14	111	35	146
3	Musi Banyuasin	14	12	68	66	134
4	Ogan Ilir	13	7	57	15	72
5	Muara Enim	18	12	102	39	141
6	Penukal Lematang Abab Ilir	5	5	34	11	45
7	Musirawas	13	8	88	27	115
8	Musirawas Utara	7	7	43	21	64
9	Empat Lawang	7	3	47	5	52
10	Lahat	18	7	80	12	92
11	Ogan Komering Ulu	12	7	68	23	91
12	Ogan Komering Ulu Selatan	17	8	83	20	103
13	Ogan Komering Ulu Timur	12	na	22	25	47
14	Pagaralam	4	8	5	1	6
15	Palembang	8	1	10	1	11
16	Lubuk Linggau	5	2	9	4	13
17	Prabumulih	5	2	10	4	14
JUMLAH		195	118	900	396	1.296

Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan,

Dari tabel di atas dapat dilihat desa rawan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, Kabupaten/Kota yang memiliki desa terbanyak rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 111 desa, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling sedikit memiliki desa rawan kebakaran hutan dan bencana adalah Kota Pagaralam yaitu hanya 5 desa.

Kemudian untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai desa terbanyak dengan kategori sangat rawan kebakn hutan dan lahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah 87 desa, sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki desa paling sedikit dengan kategori sangat rawan kebakaran

hutan dan lahan adalah Kota Pagaralam dan Kota Palembang yaitu hanya satu desa.

Untuk mengantisipasi adanya potensi kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas, dibentuk adanya program desa tangguh di BPBD Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebaran sebagai berikut.

Tabel 2.11
Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Desa	Kecamatan	Ket
1	Ogan Ilir	Rambutan	Indralaya Utara	
		Tanjung Pering	Indralaya Utara	
2	Ogan Komering Ilir	Riding	Pangkalan Lampan	
		Sumber Makmur	Lempuing	
		Suka Putih	Pedamaran	
		Cinta Jaya	Pedamaran	
		Tanjung Beringin	Tanjung Lubuk	
		Kota Bumi	Tanjung Lubuk	
3	Banyuasin	Lebung	Rantau Bayur	
4	Musi Banyuasin	Mangsang	Bayung Lincir	
		Muara Medak	Bayung Lincir	
5	Lahat	Gunung Kembang	Kikim Timur	
6	Muara Enim	Seganit,	Kecamatan SDU	
		Kota Padang	Kecamatan SDT	
		Lubuk Nipis	Panang Enim	
7	OKU Timur	Banuayu	Buay Pe,muka	
8	Prabumulih	Jungai	Rambang Kapak	
9	PALI	Pengabuan	Abab	
		Air Itam Timur	Penukal	
		Benakat Minyak	Talang Ubi	

Sumber: Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui desa tangguh di BPBD Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua desa yang masuk dalam data Desa Tangguh yaitu, Desa Rambutan dan Desa Tanjung Pering yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara. Selanjutnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki enam desa yaitu, Desa Riding, Desa Suka Putih, Desa Cinta Jaya, Desa Tanjung Beringin, dan Desa Kota Bumi.

Selanjutnya pada Kabupaten Banyuasin hanya terdapat di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, dan yang terakhir adalah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga Desa Tangguh yaitu, Desa Mangsang, Desa Muara Medak, dan Desa Mendes yang terletak di Kecamatan Bayung Lincir, pada kabupaten lahat desa Gunung Kembang, Pada Desa Muara Enim Desa Seganit,

Tanjung sirih, kota padang, lubuk nipis, pada kabupaten OKU timur desa banuayu, Pada Kota Prabumulih Desa Jungai, dan Kabupaten Pali desa Pengabuan, Desa Air Itam Timur, dan Desa Benakat minyak.

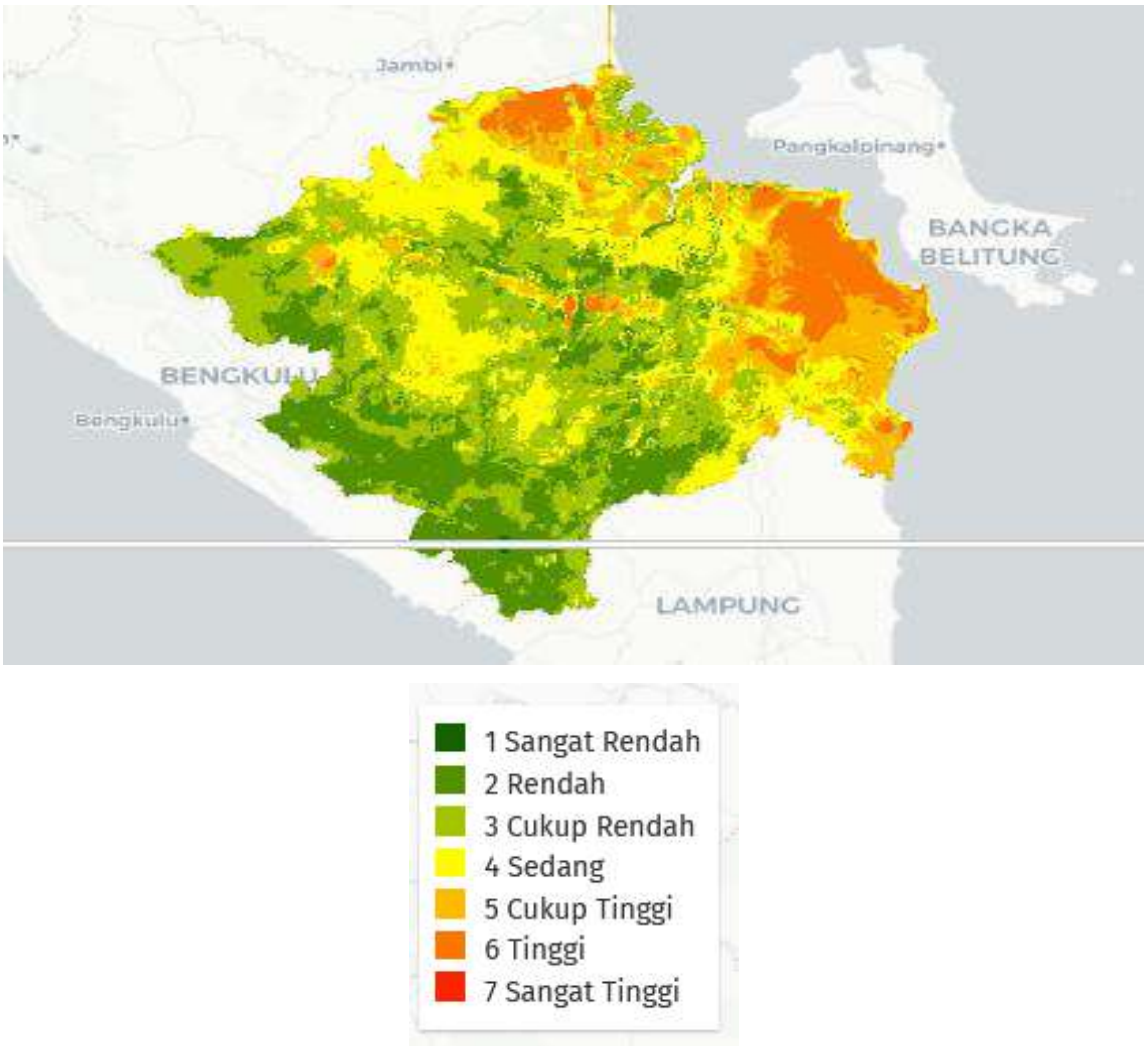
Selain desa tangguh, dibentuk pula regulasi/kebijakan untuk menangani dan mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya adalah :

1. Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Nomor : 8 Tahun 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Nomor : 1 Tahun 2018, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Gambut;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2023, tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 11 Tahun 2015, tentang Prosedur Tetap Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatanm Nomor : 115/KPTS/DLHP/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Propinsi Sumatera Selatan;
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 180/KPTS/BPBD-SS/2021, tanggal 9 Maret 2021, tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla di Propinsi Sumatera Selatan;
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 235/KPTS/BPBD-SS/2021, tanggal 1 April , tentang Pembentukan POSKO SATGAS Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunla di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 346/KPTS/DISHUT/2021, tanggal 19 Mei, tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Pencegahan dan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan lahan Berbasis Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET) Provinsi sumatera Selatan;

9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Gubernur Sumsel No.596/KPTS/DISHUT/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rapergub tentang Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Tidak Produktif dan Tanah Terlantar.

Potensi resiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan pada tahun 2023 berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Sumatera Selatan dibuat melalui peta prakiraan risiko kebakaran untuk mengetahui gambaran tingkat risiko berdasarkan matriks risiko yang menghubungkan antara tingkat kerentanan dengan peluang terjadinya kejadian hujan bawah normal. Tingkat risiko sangat tinggi artinya wilayah tersebut memiliki kerentanan tinggi dan peluang mendapatkan hujan di bawah normal melebihi 0,6. Tingkat risiko sangat rendah artinya wilayah tersebut memiliki kerentanan rendah dan peluang mendapatkan hujan di bawah normal kurang dari 0,4. Berikut ini adalah peta potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan prakiraan BMKG.

Gambar 2. 14
Peta Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk antisipasi dini antara lain :

- Sosialisasi
- Penyebarluasan Maklumat Larangan Membakar
- Aktivasi Posko
- Patroli Terpadu
- Pelatihan, Peningkatan Kapasitas, Pembinaan Kelompok, Relawan, RPK Perusahaan
- Patroli Udara
- Teknologi Modifikasi Cuaca
- Pembuatan Kanal Bloking

Audit Kepatuhan Perusahaan dalam Kesiapsiagaan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla.

2.1.1.1.3. Bencana Tanah Longsor

Tercatat 142 kejadian longsor di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 9 tahun yaitu dari Tahun 2014 hingga Tahun 2023. Berdasarkan dari data hasil pemetaan gerakan tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa potensi gerakan tanah yang melanda Provinsi Sumatera Selatan relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki potensi gerakan tanah, dimana lokasi yang memiliki potensi sebagian besar berada pada jaringan jalan dengan jenis potensi bencana berupa longsor. Kabupaten/kota yang rawan mengalami longsor adalah Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

Tabel 2.12
Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
1	Musi Rawas	Surulangun		Longsor	Jalan raya
		Muara Rupit	Madang	Longsor	Jalan raya
			Bingin rupit	Longsor	Jalan raya
			Tanjung Beringin	Longsor	Jalan raya
		Muara Kelingi			
		Muara Beliti			
		Terawas			
2	Lahat	Pendopo	Lingge	Longsor	Kebun kopi & buah

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
		Tanjung Sakti	Tanjung Raya	Longsor	Kebun kopi & buah
			Tebing S. Manna	Runtuh	Jalan raya, km 10
			Pulau panas	Longsor Batu	Jalan raya, km 19,5
			Sindang Panjang	Runtuh Batu	Jalan raya, km 27
			Tanjung Sakti Lama	Longsor Batu	Jalan raya, km 2
			Ds Pulau Timun	Longsor	Jalan raya, km 8
		Pulau Pinang	Ds Tj. Mulak	Amblesan	Badan jalan 5 m
				Gejala runtuh	km 17
			Tanjung Sirih	aliran batu	Jalan raya, km 14
			Muara Seban	kompleks	Jalan raya, km 3
			Jati	longsoran	Jalan raya, km 3,3
			Kuba	longsoran	Jalan raya, km 6,4
		Kikim	Saung Naga	longsoran	Jalan raya, km 63
			Bungamas	longsoran	Jalan raya, km 15
			Gunung Kerto	longsoran	Jalan raya, km 40
			Paduraksa	longsoran	Jalan raya, km 34,5
			Gn. Kembang	longsoran	Jalan raya, km 25
		Lahat	Sugiharas	longsoran	Jalan raya, km 19,5
			Sukarame	longsoran	Jalan raya, km 18,5
		Kota Agung	Tj. Tebat	longsoran	Jalan raya, km 31,5
3	Empat Lawang	Ulu Musi	Bandaraji	Longsor	Jalan raya
			Karang Jaya	Longsor	Jalan raya
			Tangga Rasa	Longsor	Jalan raya
			Karang Dapo	Longsor	Tebing sungai
4	Pagar Alam	Tebing tinggi	Penanggungan	kompleks	Jalan raya, km 72
			Paharudipo	gejala runtuh	Jalan raya, km 56
		Dempo selatan	Sukajadi	gejala runtuh	Jalan raya, km 57
			Air Betung	gejala runtuh	Jalan raya, km 5 PA
			Mingkik	gejala runtuh	Jalan raya, km 37,5
			Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18
		Dempo Utara	Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
5	Muara Enim	G. Megang	Ujanmas	longsor	Jalan raya
		Tanjung Enim	Tanjung Raja	longsor	Jalan raya
		Tanjung Agung	Darmo	longsor	Jalan raya
			Seleman	longsor	Jalan raya
			Paduraksa	longsor	Jalan raya
			Padang Bindu	longsor	Jalan raya, km 4-9
			Talang T. Benawa	Aliran tanah	Jalan raya, km 13
			Talang T. Semen	Aliran tanah	Jalan raya, km 16
		Semedo Darat Laut	Talang habibnuh	longsor	Jalan raya, km 19
			Talang keli	longsor	Jalan raya, km 23
			talang P.Rinkeh	longsor	Jalan raya, km 27-30
			Pulau Panggung	Runtuh	Jalan raya
			Padang Bindu	Runtuh	Jalan raya
			Sukaraya	Aliran tanah	Jalan raya
			Penyandingan	Aliran tanah	kebun
			Talang Gudang	longsor	Jalan raya, km 35
			Ds. P Panggung	longsor	Jalan raya, km 3 - 3,2
			Ds. Batusurau	Runtuh	Jalan raya, km 4,3
			Ds. Muarobanau	longsor	Jalan raya, km 3
			Ds. Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 72
			Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Semedo Darat Tengah	Ds. Sri Tanjung	longsor	Jalan raya, km 11
			Ds. Muara Tenang	longsor	Jalan raya, km 14
		Muara Enim	Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Lawang Kidul	Karang asam	longsor	Jalan raya, km 16
		Tanjung Agung	Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 29
			Pandan enim	Runtuh	Jalan raya, km 49
			Pulau Pinang	Runtuh	Jalan raya, km 51
			Pandan Dulang	Runtuh	Jalan raya, km 52

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
			Simpang Meo	longsor	Jalan raya, km 56
6	OKU	Pengandonan		longsor	Jalan raya
7	OKU Timur	Martapura		longsor	Jalan raya
8	OKU Selatan	Muara dua		longsor	Jalan raya
		Banding agung	Ds Mekakau hilir	Aliran tanah	Jalan Desa
		Pulau beringin	P Bgin- Ulu Danau	Aliran tanah	Jalan raya
			Gunung Batu	Runtuh Batu	Jalan raya
			Pagar agung	longsoran	Jalan raya
			Wates	Runtuh Batu	Jalan Desa

Sumber : Pemetaan Gerakan Tanah Dinas Pertambangan dan Energi

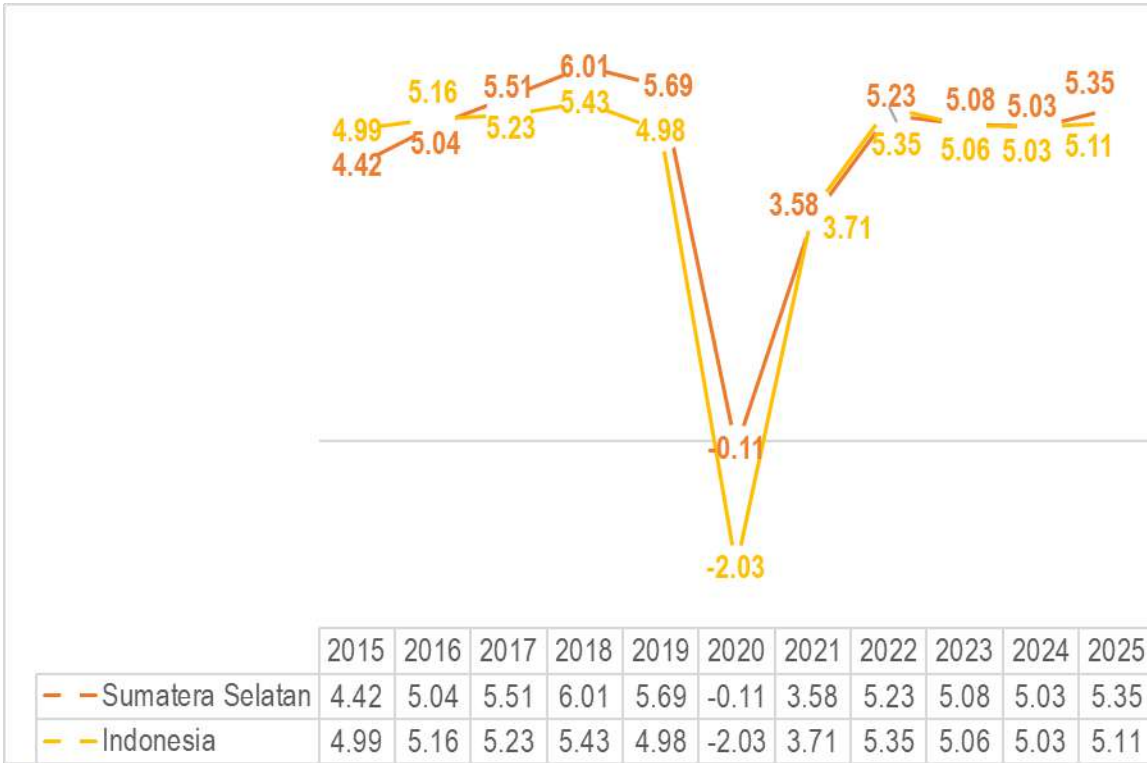
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Hal ini menunjukkan momentum pertumbuhan yang positif dan stabil setelah periode pemulihan pascapandemi. Pertumbuhan ini umumnya didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 5,11 persen.

Gambar 2.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh signifikan sebesar 9,66 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,48 persen; *Real Estate* sebesar 7,79 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,88 persen. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 5,79 persen; 4,56 persen dan 3,42 persen.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan										Distribusi									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2.33	3.34	1.75	2.91	3.82	2.15	2.59	5.15	2.17	7.79	14.84	14.48	15.17	14.71	13.08	13.10	13.56	14.24	13.94	14.89
B. Pertambangan dan Penggalan	9.09	8.11	-4.08	5.47	6.28	7.89	3.33	3.98	5.93	0.61	20.17	20.33	18.32	21.03	27.71	26.60	24.60	23.32	24.25	24.28
C. Industri Pengolahan	5.40	4.82	0.72	2.18	4.39	3.69	4.39	3.58	5.54	5.13	19.51	19.37	19.73	19.09	17.51	17.91	18.27	18.54	18.16	17.81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.85	10.29	14.67	5.76	1.46	4.40	8.48	11.39	4.68	6.06	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.96	7.46	4.83	-4.69	0.66	0.33	2.66	-0.06	1.27	1.98	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
F. Konstruksi	5.59	3.34	-0.01	-0.02	1.27	3.55	5.89	2.92	8.11	8.09	12.99	12.55	12.53	11.92	10.67	10.69	10.80	10.56	10.75	10.56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.09	8.22	-1.34	5.79	10.37	7.60	7.42	8.36	8.85	8.58	12.95	13.54	13.71	13.47	12.97	13.40	13.85	14.13	14.16	14.13
H. Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.30	-5.91	-2.20	11.63	7.48	3.44	6.65	4.85	6.03	2.37	2.48	2.35	2.12	2.21	2.46	2.50	2.41	2.52	2.41
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	13.15	15.34	-7.21	4.43	14.67	13.14	9.39	8.71	10.29	11.58	1.76	1.97	1.87	1.81	1.77	1.91	2.01	2.07	2.09	2.07
J. Informasi dan Komunikasi	7.73	8.15	12.79	6.04	8.12	6.35	8.84	8.85	4.97	5.39	2.85	2.91	3.29	3.21	2.91	2.90	3.00	2.83	2.89	2.83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	-1.44	1.64	4.19	-0.60	4.60	7.09	2.26	2.74	1.94	2.54	2.36	2.39	2.38	2.08	2.07	2.13	2.09	2.05	2.09
L. Real Estate	7.95	8.03	2.24	5.81	5.23	4.28	8.17	7.31	7.74	7.98	3.08	3.19	3.34	3.24	2.9	2.87	2.94	2.98	3.01	2.98
M,N. Jasa Perusahaan	9.51	9.57	-2.08	0.60	2.90	2.03	5.18	4.96	6.50	6.36	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.70	1.09	4.17	3.88	3.70	3.73	9.35	10.84	-0.75	-0.02	2.85	2.67	2.9	2.77	2.45	2.42	2.51	2.28	2.57	2.28
P. Jasa Pendidikan	2.72	4.73	-1.50	6.57	2.24	2.23	6.76	7.90	-0.02	4.86	2.36	2.35	2.4	2.37	2.06	2.03	2.15	2.06	1.99	2.06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.56	9.57	10.14	5.63	4.15	-0.02	7.34	5.66	5.96	5.74	0.59	0.62	0.72	0.70	0.63	0.60	0.63	0.60	0.61	0.60
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.06	7.77	5.23	0.93	2.05	1.95	4.12	3.90	4.11	4.72	0.76	0.79	0.86	0.80	0.71	0.69	0.70	0.68	0.68	0.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.23	5.08	5.03	5.22	5.42	5.20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

- Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:
- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,60 persen;
 - 2) Industri Pengolahan sebesar 18,27 persen;
 - 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,85 persen;
 - 4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,56 persen; dan
 - 5) Konstruksi sebesar 10,80 persen.
- Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Rank	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018 - 2024						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)	Pertambangan dan Penggalian (24,60%)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)	Industri Pengolahan (18,27%)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,85%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,56%)

V	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)	Konstruksi (10,80%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2024, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2021-2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan pada tahun 2022, akan tetapi di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 26,61 persen dan 24,60%.

Tabel 2.15
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha Per Sub Kategori		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62,234.20	65,661.80	68,961.20	72,602.30	77,172.25	82,399.82	90,046.53
B	Pertambangan dan Penggalian	84,604.30	92,166.10	83,283.00	103,810.20	163,520.90	167,372.90	163,335.00
C	Industri Pengolahan	81,822.10	87,834.50	89,705.80	94,212.90	103,317.40	112,694.80	121,330.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	536.90	575.10	673.00	727.70	751.15	800.02	876.50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	502.00	558.00	606.00	595.00	604.09	614.14	640.95
F	Konstruksi	54,494.80	56,906.60	56,977.90	58,864.40	62,954.78	67,278.81	71,717.14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	54,322.40	61,412.80	62,324.50	66,480.80	76,530.69	84,297.46	91,958.70
H	Transportasi dan Pergudangan	9,947.70	11,223.40	10,668.90	10,471.90	13,043.41	15,483.89	16,579.86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,396.60	8,937.50	8,519.40	8,933.40	10,470.48	12,044.55	13,370.89
J	Informasi dan Komunikasi	11,943.20	13,177.40	14,936.50	15,852.30	17,142.47	18,257.14	19,905.37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,640.90	10,716.00	10,878.30	11,728.20	12,283.33	13,028.56	14,166.10
L	Real Estate	12,901.20	14,462.10	15,202.60	15,984.20	17,127.44	18,072.53	19,502.51
M, N	Jasa Perusahaan	529.80	615.10	616.50	623.10	663.62	698.52	747.94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,959.50	12,100.90	13,181.30	13,653.40	14,473.67	15,216.34	16,669.52
P	Jasa Pendidikan	9,899.20	10,636.70	10,928.20	11,676.20	12,164.87	12,746.35	14,304.86
Q	Jaga Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,479.30	2,820.40	3,254.90	3,473.50	3,691.86	3,799.28	4,154.71
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,178.10	3,598.10	3,889.30	3,947.40	4,166.98	4,363.52	4,654.93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		419,392.20	453,402.70	454,607.40	493,636.90	590,079.40	629,168.70	663,961.70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat dari perkembangan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga

Berlaku dari tahun 2018 - 2024, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2018 nilai PDRB ADHB sebesar 419.392,20 Milliar Rupiah meningkat menjadi 663.961,70 Milliar Rupiah tahun 2024.

Tabel 2.16
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TW III 2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277,771.06	296,904.98	295,605.35	308,635.30	347,794.20	381,441.02	410,001.84	110,342.16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,358.15	7,240.99	6,748.58	7,130.46	8,067.44	8,983.35	10,660.62	2,793.09
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,460.27	36,686.87	31,995.00	34,055.60	34,163.92	37,333.91	40,972.97	10,182.97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	157,634.55	160,152.72	162,651.12	165,435.57	182,083.24	191,036.81	205,916.35	53,803.07
5	Perubahan Inventori	-972.55	-731.37	-1,972.33	380.65	-6.06	3.76	7.56	6.03
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-53,859.32	-46,851.48	-40,420.32	-22,000.73	17,976.69	10,369.83	-3,597.62	8,168.89
Produk Domestik Regional Bruto		419,392.16	453,402.71	454,607.40	493,651.91	590,079.43	629,168.67	663,961.72	185,296.20

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 410.001,84 miliar rupiah. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 205.916,35 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.17
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TW III 2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183,420.98	190,641.45	186,943.08	190,560.72	201,978.44	212,618.53	222,564.23	58,316.59
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,563.10	5,009.23	4,710.91	4,806.55	5,067.13	5,419.47	6,261.17	1,582.74
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,604.63	22,801.46	19,869.06	20,444.95	20,691.85	21,900.25	23,736.29	5,645.38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,301.18	113,186.34	114,605.19	111,007.10	108,306.92	110,986.58	115,875.99	29,829.65
5	Perubahan Inventori	-227.60	-319.38	-1,331.43	54.85	-2.07	1.88	3.75	2.92
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-22,178.22	-15,854.35	-9,667.59	-469.00	7,461.35	10,040.73	10,678.19	7,102.15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		298,484.07	315,464.75	315,129.22	326,405.18	343,503.62	360,967.45	379,119.63	102,479.44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 222.564,23 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 115.875,99.

Laju Inflasi

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,12. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 109,43 dan terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar 2,87 persen dengan IHK sebesar 108,52.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,50 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,75 persen; kelompok transportasi sebesar 0,82 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,23 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,43 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Desember 2025 sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 2,91 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Sumatera Selatan pada 4 kabupaten/kota, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,91 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,01 pada Desember 2024 menjadi 110,12 pada Desember 2025. Secara m-to-m perkembangan harga menunjukkan adanya peningkatan indeks dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,49 persen.

Sementara secara kumulatif sampai dengan Desember 2025 tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,91 persen.

Tabel IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2024	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2025 (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2025 (%)
Umum (Headline)	107.01	110.12	0.49	2.91	2.91	0.49	2.91
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110.5	114.37	1.06	3.5	3.5	0.32	1.07
Pakaian dan Alas Kaki	102.62	102.37	-0.08	-0.24	-0.24	0	-0.01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.58	103.72	0.06	1.11	1.11	0.01	0.15
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100.86	101.03	0.03	0.17	0.17	0	0.01
Kesehatan	103.4	104.18	-0.01	0.75	0.75	0	0.02
Transportasi	109.87	110.77	0.39	0.82	0.82	0.05	0.11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99.53	99.1	0	-0.43	-0.43	0	-0.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105.59	107.13	-0.01	1.46	1.46	0	0.03
Pendidikan	106.31	107.18	0	0.82	0.82	0	0.05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105.99	107.35	0.13	1.28	1.28	0.01	0.11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114.31	135.15	1.11	18.23	18.23	0.1	1.39

Sumber : BPS 2026

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,50 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,75 persen; kelompok transportasi sebesar 0,82 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,46

persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,23 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,43 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, mie kering instant, bawang merah, ikan patin, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tomat, bawang putih, ikan nila, kacang panjang, bayam, ikan mujair, angkutan udara, kangkung, sawi putih/pecay/pitsay, dan telepon seluler. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2025, antara lain: emas perhiasan, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah bensi, telur ayam ras, bawang putih, dan angkutan udara. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m adalah tomat.

Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,39 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

1.1. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,50 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,50 pada Desember 2024 menjadi 114,37 pada Desember 2025. Subkelompok yang

mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok makanan sebesar 3,71 persen dan terendah yaitu subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 1,64 persen.

Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 1,07 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: cabai merah sebesar 0,44 persen; beras sebesar 0,18 persen; daging ayam ras sebesar 0,09 persen; mie kering instant sebesar 0,08 persen; bawang merah sebesar 0,07 persen; ikan patin sebesar 0,07 persen; Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) masing-masing sebesar 0,05 persen; ikan dencis dan wortel masing-masing sebesar 0,03 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: tomat sebesar 0,18 persen; bawang putih sebesar 0,07 persen; ikan nila, kacang panjang, bayam, dan ikan mujair masing-masing sebesar 0,02 persen; serta kangkung, sawi putih/pecay/pitsay, ayam hidup, dan ketimun masing-masing sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,32 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu: bawang merah sebesar 0,07 persen; daging ayam ras sebesar 0,06 persen; cabai rawit sebesar 0,06 persen; cabai merah sebesar 0,05 persen; telur ayam ras sebesar 0,02 persen; dan bawang putih sebesar 0,02 persen.

1.2. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,24 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 102,62 pada Desember 2024 menjadi 102,37 pada Desember 2025. Sub kelompok yang mengalami deflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok alas kaki sebesar 0,32 persen dan terendah yaitu subkelompok pakaian mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,22 persen. Namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan inflasi yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

1.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,11 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 102,58

pada Desember 2024 menjadi 103,72 pada Desember 2025. Subkelompok pada kelompok ini yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,04 persen dan terendah yaitu subkelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 0,47 persen. Sementara subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tidak mengalami perubahan indeks dibandingkan Desember 2024.

Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen dan kontrak rumah sebesar 0,02 persen. Sementara tidak ada komoditas yang memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap deflasi y-on-y. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,01 persen

1.4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,17 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 100,86 pada Desember 2024 menjadi 101,03 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun sebesar 0,99 persen. Sementara subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y yaitu subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,23 persen. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,01 persen. Namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan inflasi yang signifikan terhadap inflasi m-to-m

1.5. Kesehatan

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,75 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,40 pada Desember 2024 menjadi 104,18 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok jasa kesehatan lainnya sebesar 1,83 persen dan terendah yaitu subkelompok jasa rawat jalan sebesar 0,12 persen. Sementara subkelompok jasa rawat inap tidak mengalami perubahan indeks dibandingkan Desember 2024. Kelompok ini pada Desember

2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,02 persen. Namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

1.6. Transportasi

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,82 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 109,87 pada Desember 2024 menjadi 110,77 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 1,78 persen. Sementara inflasi y-on-y terendah terjadi pada subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,63 persen, sementara subkelompok jasa pengiriman barang tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,11 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bensin sebesar 0,04 persen; tarif kendaraan roda empat online dan pelumas/oli mesin masing-masing sebesar 0,02 persen; sepeda motor dan tarif kendaraan roda dua online masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu tarif angkutan udara sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu bensin sebesar 0,03 persen; dan tarif angkutan udara sebesar 0,02 persen.

1.7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,43 persen atau terjadi penurunan indeks dari 99,53 pada Desember 2024 menjadi 99,10 pada Desember 2025. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi y-on-y, 1 subkelompok mengalami inflasi y-on-y dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,71 persen. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y, yaitu subkelompok subkelompok jasa keuangan sebesar 0,22 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu, dan subkelompok layanan informasi dan komunikasi dan subkelompok asuransi. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan terhadap

deflasi y-on-y sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-to-y yaitu telepon seluler dan televisi berwarna masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

1.8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,46 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,59 pada Desember 2024 menjadi 107,13 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok layanan kebudayaan sebesar 8,18 persen dan terendah yaitu subkelompok layanan rekreasi dan olahraga sebesar 0,27 persen. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,03 persen. Namun tidak ada komoditas yang signifikan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

1.9. Pendidikan

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,82 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 106,31 pada Desember 2024 menjadi 107,18 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok pendidikan menengah sebesar 1,67 persen dan terendah yaitu subkelompok pendidikan lainnya sebesar 0,10 persen. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y yaitu: sekolah menengah atas sebesar 0,02 persen dan sekolah dasar sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

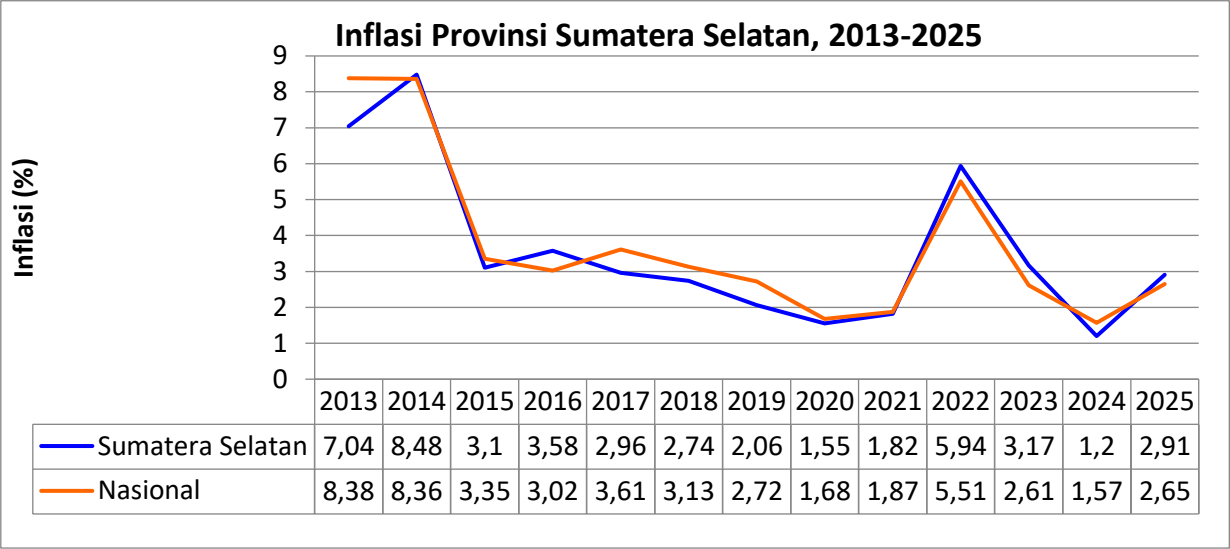
Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,28 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,99 pada Desember 2024 menjadi 107,35 pada Desember 2025. Kelompok ini terdiri dari 1 subkelompok, yaitu subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,28 persen. Kelompok ini pada

Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,11 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu ayam goreng sebesar 0,03 persen; dan roti bakar sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,01 persen.

1.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok ini pada Desember 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 18,23 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 114,31 pada Desember 2024 menjadi 135,15 pada Desember 2025. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 38,06 persen dan terendah yaitu perawatan pribadi sebesar 1,86 persen. Sementara subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks dibanding Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 1,39 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 1,30 persen; pasta gigi sebesar 0,02 persen; sikat gigi, hand body lotion dan popok bayi sekali pakai masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu emas perhiasan sebesar 0,09 persen.

Gambar 2.16
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2025

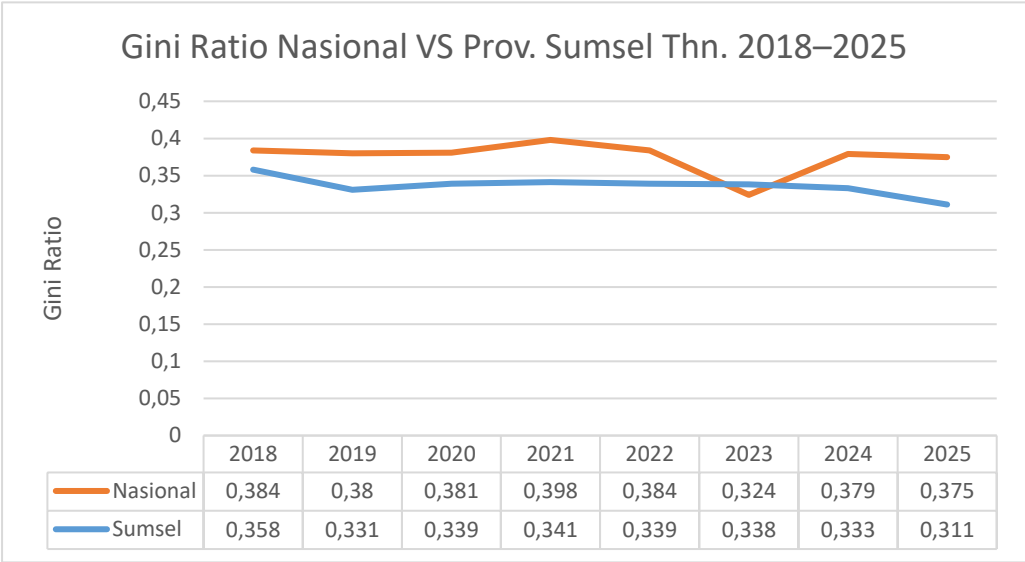


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2018-2025 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2024 -Maret 2025 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,311

Gambar 2.17
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2018-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,333 keadaan Maret 2024 menjadi 0,311 keadaan Maret 2025 atau turun 0,022 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Gini Ratio Sumatera Selatan menunjukkan arah positif menuju distribusi pendapatan yang lebih merata. Penurunan konsisten selama delapan tahun menandakan efektivitas kebijakan daerah. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga tren ini agar berkelanjutan dan inklusif.

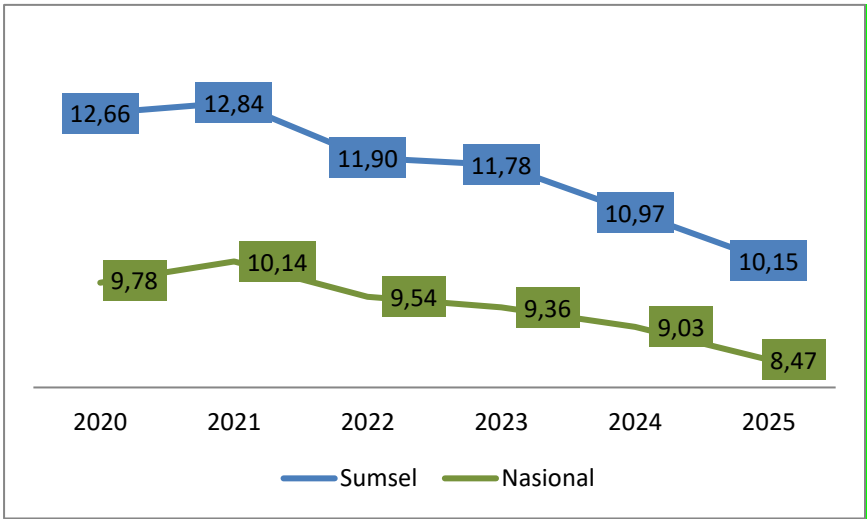
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 10,15 persen pada tahun

2025. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,081 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,92 juta penduduk pada tahun 2025. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, pada tahun 2027 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan sudah menjadi satu digit. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.

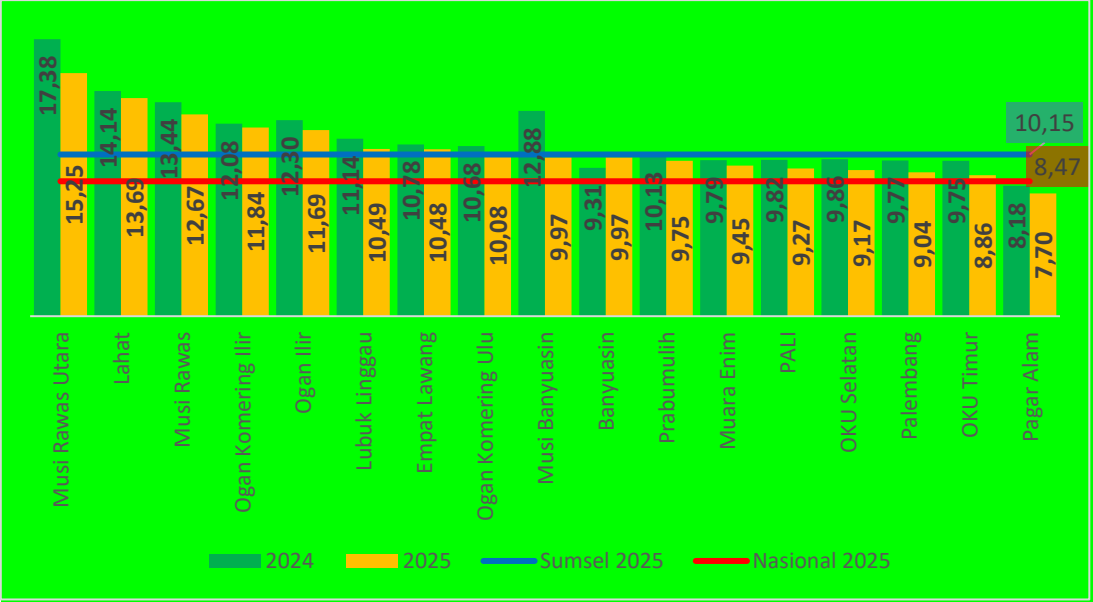
Gambar 2.18
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan data BPS, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang memiliki kemiskinan tertinggi diatas angka provinsi pada tahun 2025 yaitu Musi Rawas Utara (15,25%); Lahat (13,69%); Musi Rawas (12,67%); Ogan Komering Ilir (11,84%); Ogan Ilir (11,69%); Lubuklinggau (10,49%) dan Empat Lawang (10,48%). Sedangkan kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinan lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi adalah Kota Pagar Alam yaitu 7,70 persen.

Gambar 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat sebanyak 920 ribu jiwa mengalami penurunan sebanyak 64,24 ribu jiwa dibandingkan tahun 2024. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mengalami penurunan setelah dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (*covid- 19*). Persentase penduduk miskin pada awal *covid- 19* pada tahun 2020 sebesar 12,66 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 12,84 persen. Tetapi dengan adanya pelanggaran pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan *covid-19*, memicu perekonomian daerah kembali menggeliat sehingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,90 persen dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,15 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.18
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	387,80	693,78	1.081,58	12,16	12,96	12,66
2021	402,25	711,51	1.113,76	12,36	13,12	12,84

2022	371,50	673,18	1.044,69	11,23	12,31	11,90
2023	371,75	673,93	1.045,68	11,07	12,21	11,78
2024	342,34	641,9	984,24	10,04	11,53	10,97
2025	314,49	605,12	919,60	9,10	10,79	10,15

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan baik sebelum dan saat terjadinya covid-19. Pada periode satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin, begitu pula di perdesaan penduduk miskinnya menurun sebesar 0,68 persen poin. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,96 persen menjadi 10,79 persen pada tahun 2025, sedangkan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 12,16 persen pada tahun 2020 menjadi 9,10 persen pada tahun 2025.

Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi covid-19 lebih berpengaruh terhadap aktivitas dan pemulihan ekonomi di perkotaan daripada di perdesaan. Kebijakan pengetatan mobilitas dan kebijakan lainnya yang berkenan dengan mitigasi penularan covid-19 lebih terasa di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis daripada di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara Nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/ kota tidak kalah penting untuk ditelaah. Hal tersebut sangat krusial untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin serta ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Palembang dengan jumlah mencapai 162,31 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar

11,28 ribu dibanding tahun 2024 yang jumlahnya mencapai 173,59 ribu jiwa. Persoalan kemiskinan di Kota Palembang memang terbilang lebih kompleks karena sebagai ibukota provinsi, tentu kota ini menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Selatan bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.19
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

KABUPATEN/KOTA		2025				
KODE	KABUPATEN/KOTA	Jml Penduduk Miskin (dalam ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
1601	Ogan Komering Ulu	39,58	10,08	1,48	0,33	588.225
1602	Ogan Komering Ilir	105,26	11,84	1,36	0,26	493.783
1603	Muara Enim	64,82	9,45	1,28	0,28	512.439
1604	Lahat	58,66	13,69	2,55	0,72	606.881
1605	Musi Rawas	54,70	12,67	1,33	0,23	616.298
1606	Musi Banyuasin	69,61	9,97	1,49	0,38	627.094
1607	Banyu Asin	77,63	8,48	1,08	0,22	560.840
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	35,49	9,17	1,27	0,27	456.280
1609	Ogan Komering Ulu Timur	62,89	8,86	0,97	0,18	453.488
1610	Ogan Ilir	53,21	11,69	1,45	0,37	614.656
1611	Empat Lawang	27,88	10,48	1,44	0,32	440.405
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	18,87	9,27	1,01	0,19	530.583
1613	Musi Rawas Utara	31,25	15,25	2,22	0,47	666.294
1671	Kota Palembang	162,31	9,04	1,40	0,32	699.920
1672	Kota Prabumulih	19,89	9,75	1,19	0,25	687.666
1673	Kota Pagar Alam	11,20	7,70	0,82	0,12	444.962
1674	Kota Lubuklinggau	26,35	10,49	1,10	0,16	632.783
Prov Sumatera Selatan		919,60	10,15	1,64	0,37	581.702

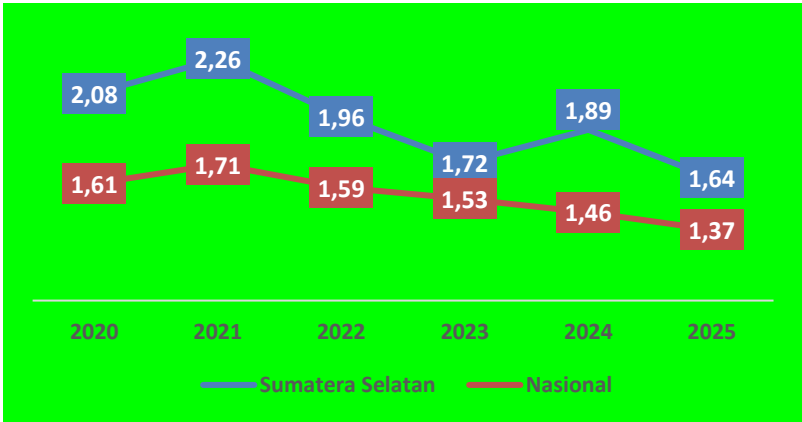
Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Selanjutnya ditinjau dari signifikansi penurunan persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota tidaklah sama. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa ada ketidakmerataan kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hendaknya ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparagan dari kemiskinan. Secara umum, indeks P1 pada periode 2020-2025 berfluktuasi. Indeks P1 mengalami penurunan dari sebesar 2,08 di tahun 2020 menjadi 1,64 di tahun 2025.

Meskipun terjadi peningkatan P1 di tahun 2025, namun tren indeks P1 pasca adanya pandemi Covid-19 cenderung membaik. Penurunan nilai indeks P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin sudah mulai membaik pasca terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia.

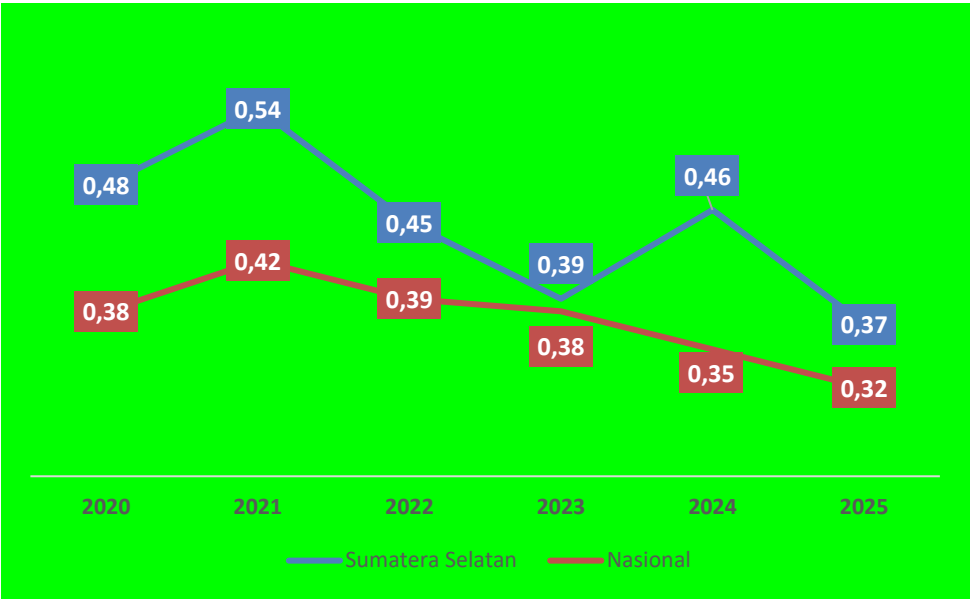
Gambar 2.20
Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Demikian pula dengan indeks keparahan (P2) yang turut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari 0,48 menjadi 0,37 di tahun 2025. Sama hal nya dengan indeks P1, meskipun indeks P2 Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan di tahun 2025 ini, namun sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat adanya pandemi. Penurunan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menurun. Fenomena itu dapat mengindikasikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup dinikmati secara merata di antara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/ pengeluaran di antara mereka semakin mendekat. Namun memang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingat penurunan Indeks Keparahkan Kemiskinan yang relatif lambat turun.

Gambar 2.21
Tren Perkembangan Indeks Keparahkan (P2)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Keadaan maret 2025, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,48 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 1,74. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,33 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,40. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK di perkotaan relatif lebih jauh dibandingkan daerah perdesaan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan. Dengan demikian dibutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan yang lebih intensif di daerah perkotaan khususnya dalam menjaga daya beli penduduk miskin.

Peningkatan nilai P1 dan P2 tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meningkat. Fenomena ini mengungkapkan bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan namun jika kita melihat lebih detil bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di dalamnya masih perlu perbaikan.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan makanan, air minum

bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

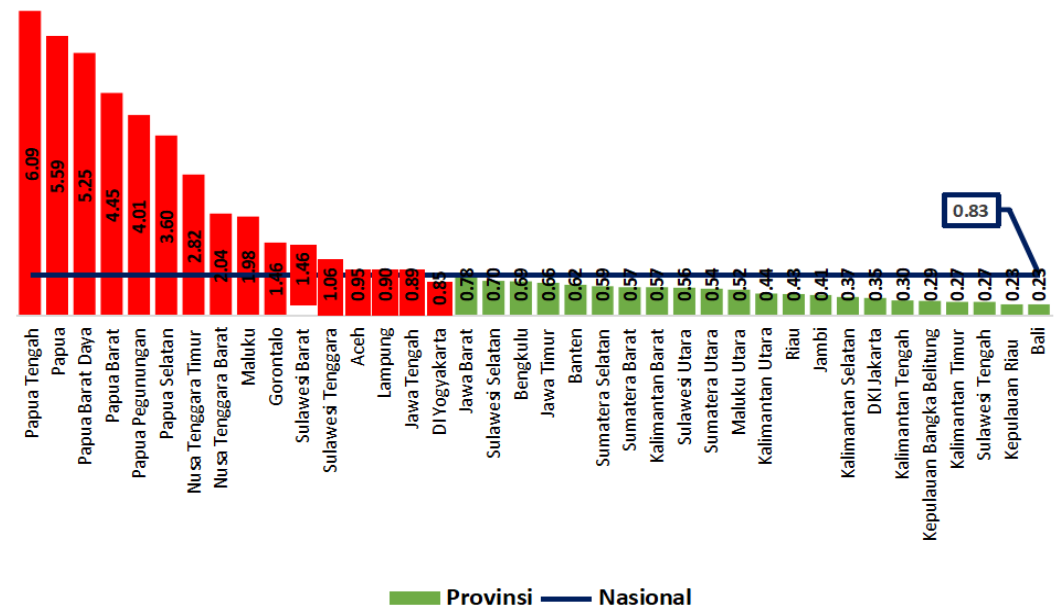
Gambar 2.22
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional terus mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari tahun 2020 sebesar 2,25 persen menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem per Provinsi juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup besar yaitu 4,72 persen poin dari tahun 2020 sebesar 5,31 persen menjadi 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem baik Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawah satu persen dan telah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di
Indonesia Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Jika dibandingkan dengan provinsi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat perpulau di Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan (0,70 persen poin), di kawasan Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan (0,10 persen poin), di kawasan Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,39 persen poin), di kawasan Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah (1,17 persen poin), di kawasan Pulau Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua (2,08 persen poin), dan di kawasan Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,11 persen poin).

Tabel 2.20

Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Per Provinsi Tahun 2023 – 2024

Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Papua Tengah		6,09	Sumatera Selatan	1,29	0,59
Papua	7,67	5,59	Sumatera Barat	0,41	0,57
Papua Barat Daya		5,25	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Papua Barat	6,43	4,45	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Papua Pegunungan		4,01	Sumatera Utara	0,78	0,54
Papua Selatan		3,60	Maluku Utara	0,67	0,52
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Riau	0,67	0,43
Maluku	2,59	1,98	Jambi	0,81	0,41
Gorontalo	2,44	1,46	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Sulawesi Barat	0,75	1,46	DKI Jakarta	0,57	0,35
Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Aceh	1,83	0,95	Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29
Lampung	1,32	0,90	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jawa Tengah	1,11	0,89	Sulawesi Tengah	1,44	0,27
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Kepulauan Riau	0,35	0,23
Jawa Barat	0,79	0,78	Bali	0,19	0,23
Sulawesi Selatan	1,01	0,70	Indonesia	0,83	0,83
Bengkulu	2,08	0,69			
Jawa Timur	0,82	0,66			
Banten	1,12	0,62			

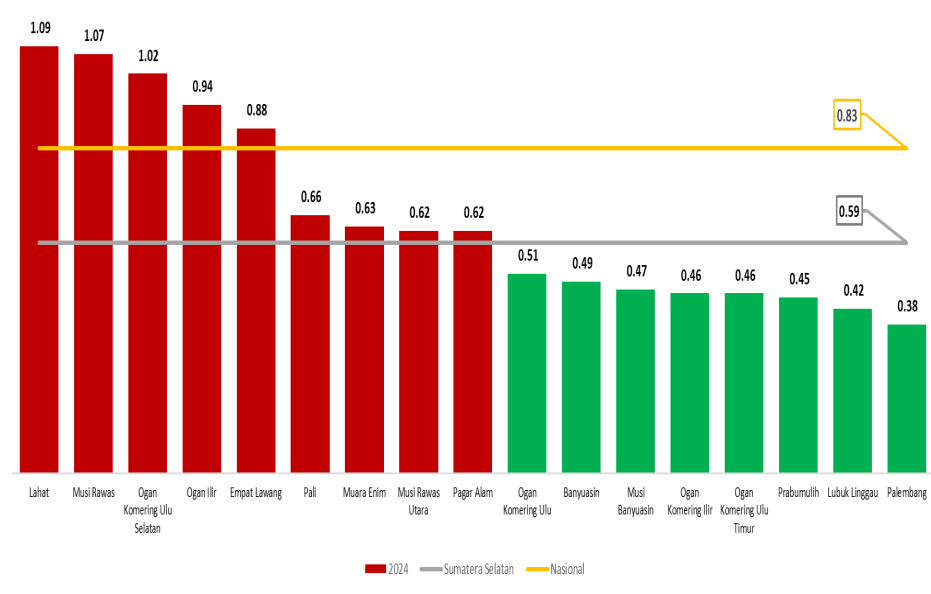
Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam 26 (dua puluh enam) Provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau sekitar 68,42 persen dari total Provinsi di Indonesia dan 12 (dua belas) Provinsi yang berada diatas 1 persen kemiskinan ekstrem atau sekitar 31,58 persen total Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 hampir semua kabupaten/ kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2023 kecuali Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, OKU Timur, Prabumulih, yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Ada 9 kabupaten/ kota yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya, tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Palembang.

Gambar 2.24

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

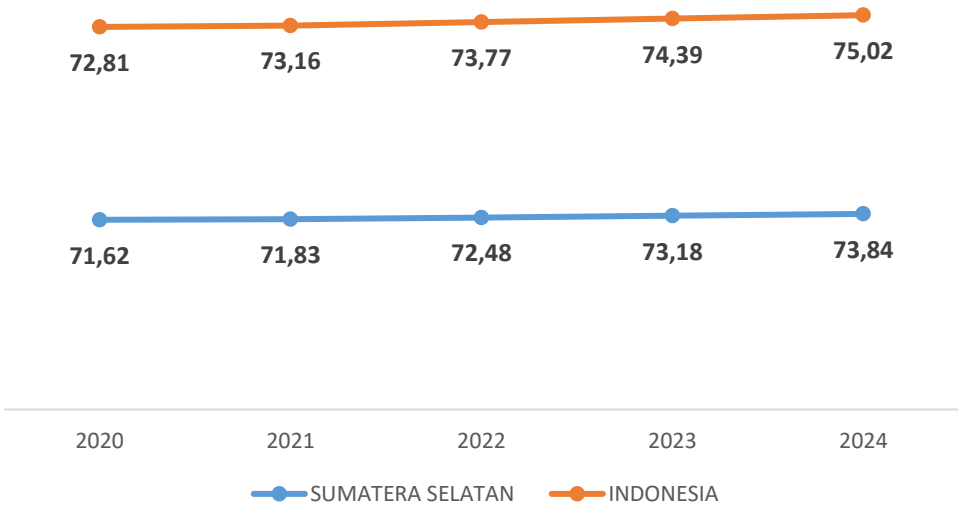


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 71,62 pada 2020 menjadi 73,84 pada 2024 dan merupakan status IPM kategori “tinggi” walaupun capaian Provinsi masih di bawah capaian Nasional sebesar 75,02.

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024



Sumber: BRS BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah diukur pada penduduk usia 25 tahun ke atas sebagaimana perhitungan IPM Metode baru dimana rata rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun mengulang). Berdasarkan data dari BPS rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan secara agregat menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan total sebesar 0,67 tahun (setara ±8 bulan sekolah). Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2024–2025, yang mengindikasikan percepatan pemulihan dan penguatan sektor pendidikan pascapandemi. Capaian RLS Provinsi Sumatera Selatan masih di bawah capaian Nasional namun kesenjangan semakin menyempit, terutama pada 2025 (selisih turun menjadi 0,16 tahun). Ini menunjukkan bahwa laju peningkatan Sumatera Selatan relatif lebih cepat dibanding tren nasional pada periode terakhir.

Dengan RLS 8,91 tahun pada 2025, rata-rata penduduk Sumatera Selatan baru menyelesaikan kelas 2 SMP, belum mencapai standar ideal wajib belajar 12 tahun. Hal ini menunjukkan tantangan transisi SMP ke SMA masih besar. faktor ekonomi, jarak sekolah, dan kesiapan keluarga masih memengaruhi partisipasi pendidikan lanjutan serta program afirmasi pendidikan menengah perlu diperkuat.

Menurut kabupaten/kota angka rata-rata lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2025 yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada pada angka 7,42 tahun dan 7,49 tahun atau setara tahun pertama pada SMP yang mencerminkan masih tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Sementara Kota Palembang dan Kota Prabumulih sudah mencapai rata-rata kelas 1 SMA menyusul kemudian Kota Lubuk Linggau dan Kota Pagar Alam yang sudah mencapai kelas 3 SMP. Untuk kabupaten/kota lainnya, angka rata-rata lama sekolah masih setara dengan kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP.

Tabel 2.21
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota
Pada Tahun 2020-2025 (tahun)

No	Kab/kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ogan Komering Ulu	8,70	8,71	8,73	8,85	8,86	9,07
2	Ogan Komering Ilir	7,04	7,05	7,07	7,08	7,19	7,49
3	Muara Enim	7,79	7,80	7,90	8,14	8,27	8,45
4	Lahat	8,46	8,52	8,53	8,56	8,69	9,03
5	Musi Rawas	7,52	7,53	7,55	7,56	7,57	7,61
6	Musi Banyuasin	7,62	7,63	7,65	7,68	7,95	8,29
7	Banyuasin	7,20	7,44	7,45	7,46	7,48	7,65
8	OKU Selatan	7,84	7,85	7,86	8,05	8,25	8,48
9	OKU Timur	7,55	7,56	7,80	8,07	8,08	8,13
10	Ogan Ilir	7,86	7,87	7,91	8,08	8,09	8,16
11	Empat Lawang	7,60	7,64	7,65	7,66	7,68	8,02
12	Pali	7,04	7,05	7,06	7,08	7,27	7,42
13	Musi Rawas Utara	6,84	7,09	7,26	7,50	7,51	7,80
14	Palembang	10,53	10,75	10,91	10,92	10,93	11,25
15	Prabumulih	9,96	9,97	10,20	10,35	10,36	10,37
16	Pagar Alam	9,39	9,40	9,41	9,43	9,44	9,78
17	Lubuk Linggau	9,89	9,90	9,91	9,93	9,94	10,15
Sumatera Selatan		8,24	8,30	8,37	8,50	8,57	8,91
Indonesia		8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 5 November 2025

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah pada Provinsi Sumatera selatan secara agregat meningkat stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,45 tahun sedangkan pada tahun 2025 sebesar 12,65 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Meningkatnya angka harapan lama sekolah

menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota, angka harapan lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2025 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu baru 11,99 tahun dan 12,02 tahun. Sementara angka harapan lama sekolah yang terlama berada di Kota Palembang sudah mencapai 14,47 tahun.

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan,
2020-2025 (tahun)

Kabupaten/Kota	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ogan Komering Ulu	12,60	12,83	12,84	12,99	13,00	13,01
Ogan Komering Ilir	11,42	11,68	11,89	11,97	11,98	11,99
Muara Enim	11,97	11,98	11,99	12,01	12,02	12,03
Lahat	12,34	12,35	12,43	12,44	12,45	12,46
Musi Rawas	12,08	12,19	12,21	12,22	12,23	12,43
Musi Banyuasin	12,00	12,29	12,30	12,31	12,33	12,34
Banyuasin	11,75	11,77	11,95	12,09	12,34	12,54
OKU Selatan	11,75	11,76	11,78	11,79	11,82	12,02
OKU Timur	12,23	12,45	12,46	12,47	12,49	12,66
Ogan Ilir	12,30	12,31	12,32	12,41	12,42	12,43
Empat Lawang	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
Pali	12,05	12,17	12,30	12,49	12,50	12,69
Musi Rawas Utara	11,57	11,58	11,61	11,70	11,90	12,07
Palembang	14,41	14,42	14,43	14,45	14,46	14,47
Prabumulih	12,91	12,92	13,03	13,31	13,41	13,42
Pagar Alam	12,85	13,05	13,24	13,49	13,50	13,51
Lubuk Linggau	13,37	13,38	13,39	13,55	13,69	13,88
Sumatera Selatan	12,45	12,54	12,55	12,63	12,64	12,65
Indonesia	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, 5 November 2025

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Ragam budaya di Provinsi Sumatera Selatan tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, busana tradisional, seni tari, hingga kekayaan kuliner khas daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Keragaman tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga tercermin dalam tata kehidupan sosial masyarakat, sistem nilai, adat istiadat, serta pola interaksi yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan rasa hormat terhadap tradisi.

Sebagaimana daerah lain di Pulau Sumatera, kebudayaan Sumatera Selatan tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang serta interaksi lintas peradaban. Budaya Melayu menjadi fondasi utama yang membentuk identitas masyarakatnya, kemudian diperkaya oleh pengaruh ajaran agama Islam yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, serta jejak peradaban Hindu-Buddha yang berkembang pada masa lampau. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadi pusat kekuasaan maritim, perdagangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Warisan sejarah tersebut hingga kini masih mewarnai karakter budaya, nilai luhur, serta identitas masyarakat Sumatera Selatan sebagai bagian penting dari khazanah kebudayaan Nusantara.

Sejarah, Kepurbakalaan dan museum

Menilik sejarah Sumatera Selatan maka sesungguhnya di daerah ini sudah ada peradaban yang tinggi di masa pra sejarah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya prasasti peninggalan masa pra sejarah. Ditemukannya batu megalit berumur ribuan tahun di daerah Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat merupakan indikasi, berkembangnya kebudayaan masa itu. Kabupaten Lahat sendiri kini dikenal dengan sebutan daerah “sejuta megalit”.

Situs yang paling banyak dikenal adalah Situs Tinggi Hari di Kecamatan Pulau Pinang. Selain itu beberapa situs tersebar secara acak di beberapa kecamatan, hingga ke Kota Pagaralam. Situs-situs ini menarik wisatawan dengan minat khusus, diantaranya sejarawan dan peneliti. Diduga masih ada peninggalan lainnya yang masih belum ditemukan, mengingat sebaran situs yang ditemukan berada di beberapa tempat.

Kehidupan masa lalu di Provinsi Sumatera Selatan semakin diperkuat dengan ditemukannya Situs Gua Harimau yang terletak di Desa Padang Bindu, berjarak sekitar 35 kilometer dari Kota Baturaja. Situs Gua Harimau ditemukan pada tahun 2008 dan mulai dilakukan penelitian di situs ini mulai tahun 2009. Gua Harimau memiliki kondisi yang sangat ideal sebagai hunian bagi manusia masa lalu, sehingga ada banyak temuan yang didapatkan ketika meneliti Situs Gua Harimau, seperti sisa hunian, perbengkelan dan kuburan dari kebudayaan pada zaman Neolitik. Di sini juga ditemukan adanya 81 kubur manusia masa lalu.

Temuan ini semakin memperkuat bahwa Sumatera Selatan kaya akan kehidupan masa purbakala.

Gambar 2.26
Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan



Sumber foto : kompasiana.com dan mongabay.co.id

Untuk melestarikan situs dan bangunan cagar budaya, khususnya peninggalan arkeologi dari masa Kerajaan Sriwijaya, khususnya di Kawasan Karanganyar (Palembang), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah membangun sebuah taman yang dikenal dengan sebutan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, seluas 20 Ha yang berada dalam kawasan Karanganyar yang merupakan situs yang paling penting dalam perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Taman ini menyajikan data lengkap Kerajaan Sriwijaya mulai artefak, replika, foto, peta dan koleksi etnografi.

Gambar 2.27
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya



Sumber foto : kamerabudaya.com

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya melakukan peningkatan peranan seni dan budaya terutama untuk meningkatkan pariwisata di Sumatera Selatan. Tahun 2023 sudah dilakukan pendataan terhadap bangunan sebagai cagar budaya. Dari hasil pendataan terdapat 771 Cagar Budaya baik situs maupun bangunan yang berupa gedung kantor, rumah, museum, bunker peninggalan jepang, rumah ibadah, pemakaman, candi dan lain-lain.

Tabel 2.23
Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
1.	Masjid Lawang kidul
2.	Gedung Ledeng/ Kantor Walikota
3.	Balai Prajurit
4.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
5.	Masjid Kiyai Merogan
6.	Kampung Kapitan
7.	Kampung Arab Al Munawar
8.	Museum Tekstil
9.	SMP Negeri 1 Palembang
10.	Masjid Suro (Al- Mahmudiyah)
11.	Rumah Residen Palembang
12.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
13.	Pasar Cinde
14.	Kantor Pos Palembang
15.	R.S. Ak. Gani
16.	Rumah Assegaf 7
17.	Rumah Assegaf 6
18.	Rumah Kolonial 4
19.	Rumah Kolonial 3
20.	Rumah Assegaf 5
21.	<i>Tower Signal</i> Stasiun Kertapati
22.	Rumah Assegaf 4
23.	Rumah Assegaf 3
24.	Rumah Assegaf 2
25.	Rumah Walikota
26.	Rumah Kolonial 2
27.	Rumah Kolonial 1
28.	Kantor PT. Alwi Assegaf
29.	Rumah Tradisional 5 Ulu No.1
30.	Bunker Jakabaring
31.	Rumah Dinas PT. KAI
32.	Rumah Dinas PT. KAI
33.	Balai Diklat Rendang PT. KAI Drive III
34.	Mess Diponegoro No. 12
35.	Mess Diponegoro No. 10
36.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
37.	Rumah Assegaf 1
38.	MONPERA (Monumen Perjuangan Rakyat)
39.	Dipo Lokomotif

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
40.	StasiunKertapati
41.	Balai Pertemuan
42.	Bunker Charitas
43.	Rumah Al Munawar 7
44.	Rumah Al Munawar 6
45.	Rumah Al Munawar 5
46.	Rumah Al Munawar 4
47.	Rumah Al Munawar 3
48.	Rumah Al Munawar 1
49.	Rumah Kapitan 5
50.	Rumah Kapitan 4
51.	Rumah Kapitan 3
52.	Rumah Kapitan 2
53.	Rumah Kapitan 1
54.	Kantor Telkom
55.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
56.	RS. Charitas
57.	Gereja PIB Immanuel
58.	Bangunan Pasar Kuto Batu 4
59.	Bangunan Pasar Kuto Batu 3
60.	Bangunan Pasar Kuto Batu 2
61.	Bangunan Pasar Kuto Batu 1
62.	Bunker Jepang Yayasan Karya Ibu
63.	Bunker Jepang Sumisno
64.	Rumah Batu 5
65.	Rumah Batu 4
66.	Rumah Batu 3
67.	Rumah Batu 2
68.	Rumah Batu 1
69.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
70.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
71.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
72.	Bangunan Sekanak 14
73.	Bangunan Sekanak 13
74.	Bangunan Sekanak 12
75.	Bangunan Sekanak 11 / Bangunan Gudang
76.	BangunanSekanak 10 / Rumah Samtung
77.	Bangunan Sekanak 9
78.	Bangunan Sekanak 8
79.	Bangunan Sekanak 7
80.	Bangunan Sekanak 6 / Toko Pisang
81.	Bangunan Sekanak 5 / Bank BRI
82.	BangunanSekanak 4 / PT.HOKTONG
83.	Rumah Samping Museum SMB II
84.	Bangunan Sekanak 3
85.	Bangunan Sekanak 2
86.	Bangunan Sekanak 1
87.	Rumah Tradisional Temon 4
88.	Rumah Tradisional Temon 3 / Hasyim Ning
89.	Bunker Joko
90.	Bangunan Temon 3
91.	Bangunan Temon 2
92.	Bangunan Temon 1
93.	Rumah Limas Cek Mas / NyimasZuchro
94.	Klenteng Tri Dharma Chandra Nadi (SoeiGoeat Kiong)
95.	Rumah Limas Jaya Laksana
96.	Hotel Musi
97.	Pasar Cinde
98.	Benteng Kuto Besak
99.	Masjid Agung Palembang
100.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
101.	Masjid Kiai Marogan

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
102.	Rumah Ulu
103.	Rumah Limas ‘ PangeranSyarif Abdulrachaman Alhabsi ‘
104.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
105.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
106.	Rumah Limas Rumah Bari
107.	Gedung PD Budiman 1940
108.	Masjid Sultan Agung
109.	Rumah Limas PangeranSyarif Ali
110.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 7)
111.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 6)
112.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 5) , Ibu Bariah
113.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 4) Jamaludin Basuaidd
114.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam (Rumah 3)
115.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 2), Samsuri
116.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrads dan Al-Balajam(Rumah 1)
117.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
118.	Bekas Gedung BP-7 Palembang
119.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
120.	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
121.	Bangunan 1930
122.	Toko Bangunan Maju jaya
123.	Toko Surya
124.	Toko BesiSaudara
125.	Rumah Limas Lamo
126.	Rumah Limas H. Murod
127.	Masjid Al-Amanah
128.	Rumah Limas Hj. Ningyu
129.	Rumah Limas Nangcik Hasan
130.	Rumah limas A. Tholib Abu bakar
131.	Rumah Limas Kaakapudin
132.	Rumah singgah Soekarno
133.	Rumah Limas HjNurjanah
134.	Rumah Limas Abdul karim
135.	Rumah Limas Cikya
136.	Rumah Tinggal (Rumah Bari / Rumah Lama)
137.	Rumah Markas Jepang
138.	Rumah Limas
139.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrads dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
140.	Makam Candi Welan (Makam Susuhunan Abdurrachman)
141.	Makam Kambang Koci
142.	Makam Candi Angsoko
143.	Makam Ratu Bagus Kuning
144.	Jembatan Ampera
145.	Makam Ahmad bin Syech
146.	Makam Pangeran Syarif Ali
147.	Kompleks Makam Sabokingking
148.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudin Raden Hasan
149.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
150.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertuo SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia
151.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin PangeranSuryoWikromoSubekti
152.	Makam Putro Dinato Ali
153.	Makam Ratu Pembayun
154.	Makam Sultan Agung Komarrudin Sri Teruno
155.	Makam Pangeran Mangkubumi Nebing Kapal
156.	Makam PangeranKramajayo Perdana Menteri
157.	Jembatan Kertapati Tahun 1939

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
158.	Kompleks Makam Sabokingking
159.	Situs Karanganyar
160.	Makam Putri Kembang Dadar
161.	Makam Raja Batu Api
162.	Makam Raja Sigentar Alam
163.	Candi Gede Ing Suro 6
164.	Candi Gede Ing Suro 5
165.	Candi Gede Ing Suro 4
166.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Bawah
167.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Atas
168.	Candi Gede Ing Suro 2
169.	Candi Gede Ing Suro 1
170.	Pemakaman Mansyur
171.	Makam Raden Nangling
172.	Makam Panembahan
173.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
174.	Kompleks Makam Gede Ing Suro
175.	Komplek Makam Kesultanan Palembang Kawah Tekurep
176.	Kompleks Makam Sabokingking
177.	Makam Madi Alit dan Goa Jepang
178.	Masjid Agung Palembang
179.	Klenteng Tri Darma Chandra Nadi (Goei Goeat Kiong)
180.	Bangunan Pasar Kuto Batu I
181.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
182.	Bangunan Pasar Kuto Batu III
183.	Rumah Limas Cek Mas/Nyim as Zuchro
184.	Hotel Musi
185.	Bangunan Pasar Kuto Batu IV
186.	Bangunan Temon I
187.	Bangunan Temon II
188.	Bangunan Temon III
189.	Bangunan Pasar Kuto Batu II
190.	Rumah Tradisiona l Temon 3/ Hasyim Ning
191.	Rumah Limas Jaya Laksana
192.	Bunker Joko
193.	Gereja BIP Immanuel
194.	RS. Charitas
195.	BangunanSekanak 1
196.	Rumah Tradisiona l Temon 4
197.	Kantor Telkom
198.	Makam Ahmad bin Syech
199.	Makam Pangeran Syarif Ali
200.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
201.	Makam Panembah an
202.	BangunanSekanak 3
203.	BangunanSekanak 2
204.	Rumah Samping Museum SMB II
205.	Candi Gede Ing Suro 5
206.	Makam Raden Nangling
207.	BangunanSekanak 4/ PT. HOKTONG
208.	Bangunan Sekanak 5/ Bank BRI
209.	Bangunan Sekanak 6/Toko Pisang
210.	BangunanSekanak 7
211.	Bangunan Sekanak 10/Rumah Samtung
212.	Bangunan Sekanak 9
213.	Bangunan Sekanak 8
214.	Kepala Arca Boddhisatwa
215.	BangunanSekanak II/ Bangunan Gudang
216.	JembatanKertapatiTahun 1939
217.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrad dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
218.	Bangunan Sekanak 14

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
219.	Palung Batu
220.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
221.	Prasasti Swarnnapattra No. Inv. 04.13
222.	Masjid Kiai Marogan
223.	Prasasti Boom Baru
224.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
225.	Celengan Makam
226.	Arca Budha Bingin Jungut
227.	Mimbar
228.	Arca Budha Wairocana
229.	Celengan Masjid
230.	Rumah Limas PangeranSyarif Ali
231.	Satu Set peralatan makan hadiah dari ibu wakil Presiden Ibu Rachmi Hatta
232.	Lampu Gantung
233.	Setrika Arang
234.	Tempatminum Bir Putih
235.	Mesin Singer Duduk (MesinJahittangan)
236.	Bokor
237.	Selendang Padang Warna Merah
238.	Bangunan Sekanak 13
239.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
240.	Sandaran Tiang Bendera dan Sandaran Tongkat Khotib
241.	Arca Ibu Mendukung Anak
242.	Makam Candi Angsoko
243.	Tepak Sirih
244.	Radio
245.	Satu Set Keramikdari Istana Negara
246.	Lukisan Sungai Sekanak
247.	Rumah Batu 1
248.	Bangunan Sekanak 12
249.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 7)
250.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 5) , Ibu Bariah
251.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
252.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
253.	Lukisan Gunung Jempol
254.	Mobil Jeep
255.	Lukisan Memotong Padi
256.	Kepala Arca Awalokiteswara No. Inv. 04.87
257.	Prasasti SwarnnapaTtra No. Inv.04.13
258.	Bekas Gedung BP-7
259.	Sepeda
260.	Pemakaman Mansyur
261.	Meja Kerja
262.	Koper Bekas
263.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
264.	CupuTembako
265.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 6)
266.	Dua Kursi Tamu
267.	Kain Batik Tulis Motif Naga
268.	Arca Buddha Wairocana
269.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 4) Jamaludin Basuaid
270.	Lukisan Puteri
271.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
272.	Peluru
273.	Rumah Batu 2
274.	Meriam Lela 9
275.	Bukit Siguntang
276.	Meriam Lela 13
277.	Gedung PD Budiman 1940

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
278.	Arca Budha Tingkip
279.	Makam Pangeran Mangkubumi Nebing Kapal
280.	Bunker Jepang
281.	Bunker Jepang Yayasan Karya Ibu
282.	Makam Putro Dinato Ali
283.	Meriam Lela 8
284.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
285.	Meriam (ke 1)
286.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertua SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia
287.	Meriam Lela 4
288.	Kantor Pos Palembang
289.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin Pangeran Suryo Wikromo Subekti
290.	Masjid Lawang Kidul
291.	Rumah Limas Rumah Bari
292.	Rumah Batu 3
293.	Meriam Lela 14
294.	Meriam Lela 11
295.	Meriam Lela 7
296.	Rumah Batu 4
297.	Rumah Batu 5
298.	R.S. Ak. Gani
299.	Makam Sultan Agung Komarrudin Sri Teruno
300.	Gedung Ledeng/Kantor Walikota
301.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudin Raden Hasan
302.	Meriam (ke 4)
303.	Meriam Lela 3
304.	Makam Candi Welan (Makam Susuhunan Abdurrahman)
305.	Makam Putri Kembang Dadar
306.	Meriam Lela 12
307.	Mata Uang Logam 1 Sen Tahun 1945
308.	Makam Kambang Koci
309.	Bunker Jepang Sumisno
310.	Jalan Talang Keranggo
311.	Situs Karanganyar
312.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
313.	Meriam Lela 12
314.	Meriam Lela 5
315.	Bangunan Sekanak 13
316.	Meriam Lela 6
317.	Komplek Makam Kesultanan Palembang
318.	SMP Negeri 1 Palembang
319.	Satu Set Keramik dari Istana Negara
320.	Museum Tekstil
321.	Jembatan Ampera
322.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
323.	Kampung Arab Al Munawar
324.	Makam Ratu Bagus Kuning
325.	Masjid Suro (Al-Mahmudiyah)
326.	Kitab Shirotol Mustaqim
327.	Masjid Sultan Agung
328.	5 Sen
329.	Rumah Assegaf 6
330.	Lampu Gantung
331.	Rumah Asessgaf 7
332.	Kitab Tauhid
333.	Rumah Asessesgaf 4
334.	Al-Quran Kuno
335.	Rumah Residen Palembang
336.	Kampung kapitan

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
337.	NaskahTanduk
338.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
339.	Rumah Kolonial 3
340.	5 Sen
341.	Tower Signal StasiunKertapati
342.	Rumah Asessegaf 5
343.	Meriam Lela 2
344.	GELUMP AI
345.	Rumah Asessegaf 3
346.	Rumah Kolonial 1
347.	Rumah Kolonial 4
348.	Meriam Lela 1
349.	Kantor PT. Alwi Assegaf
350.	Surat Bolo
351.	Meriam Besar 1
352.	Rumah Walikota
353.	Kitab Undang – Undang Simbur Cahaya
354.	Gelumpai Billah
355.	Khahas
356.	Rumah Assegaf 2
357.	Arca Singa
358.	Meriam Besar 2
359.	Hikayat Dewa Mendu
360.	Naskah Jaya Sampurna
361.	Rumah Kolonial 2
362.	Piagam Padang Ratu
363.	Gelumpai BikuSuci
364.	Kitab Smaradahana
365.	Kitab Syahwatain
366.	Makam Raja Sigentar Alam
367.	Kitab Sejarah Nabi Muhammad
368.	Rumah Tradisiona l 5 Ulu No.1
369.	Arca Ganesha tidaksempurna
370.	Makam Raja Batu Api
371.	Hidayatus As-salikin
372.	Naskah Islam
373.	Kitab Maulud
374.	Kitab Hidayatul Mujahid
375.	Kitab Sairu Salikin II
376.	Kitab At- Takafur Wal'iktibar
377.	Balai Pertemuan
378.	Kitab Sejarah Islam
379.	Kitab Nawawi I
380.	Gelumpai
381.	Arca Budha Siguntang
382.	Sejarah Islam
383.	Depo Lokomotif
384.	Balai Diklat Rendang PT.KAI Drive III
385.	Naskah Matan Jurumiyah
386.	Mess Diponegoro No. 10
387.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
388.	Rumah Assegap 1
389.	Kitab Nawawi II
390.	Kitab Riyadhatu n Nafsi Wat Tahzibil Khalqi
391.	Bunker Jepang
392.	Rumah Dinas PT. KAI
393.	Silsilah Tarekat
394.	StasiunKertapati
395.	Kitab Berzanzi
396.	Kitab Matan Jurumiah II
397.	Mess Diponegoro No.12
398.	Kitab Hidayatul Salikin

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
399.	Kitab adabun nikah
400.	MONPER A (Monumen Perjuangan Rakyat)
401.	Kitab Perukunan
402.	Kitab Zakat
403.	Kamus Arab
404.	Kitab Tahlil Amsir Ila Perempuan
405.	Kitab Dammud Dunia
406.	Kitab Hadist Shohih Tumizi
407.	Kitab Dammil Wal Ujub
408.	Bunker Charitas
409.	Kitab Assimak Wal-Wujud
410.	Hidayatus As-Salikin
411.	Rumah Al Munawar 7
412.	Kitab Assimak Wal- Wujud
413.	Makam Ahmad bin Syech
414.	Rumah Al-Munawar 1
415.	Rumah Al-Munawar 6
416.	Kitab Al- khaufur Raja
417.	Rumah Al-Munawar 3
418.	Kitab Al- Azkar Wal-fawa'i
419.	Rumah Kapitan 4
420.	Rumah Al-Munawar 5
421.	Rumah Al-Munawar 4
422.	Rumah Kapitan 2
423.	Suro 6
424.	Kitab Manakif
425.	Rumah Kapitan 1
426.	Kitab Israris Shalah
427.	Rumah Kapitan 5
428.	Rumah Kapitan 3
429.	Rumah tradisional temon 4
430.	Klenteng tri dharma chandra nadi (soel goeat kiong)
431.	Bangunan pasar kuto batu 1
432.	Bangunan pasar kuto batu 3
433.	Rumah tradisional temon 3 / hasyim ning
434.	Makam Panglima Batu Api
435.	Prasasti-prasasti Sriwijaya (Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Telaga Batu, Lima Prasasti Sidayatra, Palas Pesemah dan Boom Baru)
436.	Arca-arca Budha Bukit Siguntang (Arca Budha Bukit Siguntang dan Arca Budha Wairocama)
437.	Gedung Sekolah (Sekolah SD,SMP,SMA Muhammadiyah Tanjung enim)
438.	Rumah Tradisional Pulau Panggung
439.	Gedung Aula SMA TABA (SMA Bukit Asam)
440.	Elektrik Centre (Sentral Listrik)
441.	Tiang Jembatan Motik
442.	Penyaringan Batu Bara "Lorge" (Penyaringan)
443.	Kamar Bola
444.	Gedung Kantor SMAN 1 Muara Enim
445.	Perumahan Pegawai PT. Bukit Asam (Kantor Koperasi Pensiun)
446.	Rumah Kepala BAM (Kantor CSR PT.Bukit Asam)
447.	Kolam Renang (Antrasita)
448.	Sentral Telepon
449.	Jembatan Lama
450.	Gereja Santo Yosep Tanjung Enim
451.	SD Emanuel (SD Xaverius Emanuel)
452.	Kantor Yonkav 5/DPC
453.	Rumah Pangeran Lubai
454.	Rumah Tradisional Semendo Perapau
455.	Makam Puyang Bang Bengok

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
456.	Keris, Tombak dan Meriam Puyang Bang Bengok
457.	Eks Rumah Sakit Lama Daerah Kayuagung
458.	Lapangan Bola Saringan
459.	Rumah Limas SeratusTiang
460.	Makam Pangeran Rejet Wira Laksana
461.	Rumah Depati Bahar
462.	Rumah Pangeran Djaja Pati Kerama Djaja
463.	Makam Puyang Bucit
464.	Makam Ratu Jimat
465.	Makam PetoriSeriam Kuning
466.	Rumah Haji Bahri
467.	Rumah Depati M Nur
468.	Masjid Jamik
469.	Rumah Tokeh Jahri
470.	Rumah Pangeran Haji Toyut
471.	Rumah Depati Amir Hamzah
472.	Batu Paso
473.	Rumah Depati Tjoekronegoro (A. Ambon)
474.	Makam Buyut Bedendang (Petori Kulit Bening)
475.	Rumah Depati Baridun
476.	Candi 1 Bumi Ayu
477.	Candi 2 Bumi Ayu
478.	Candi 3 Bumi Ayu
479.	Candi 4 Bumi Ayu
480.	Candi 5 Bumi Ayu
481.	Candi 6 Bumi Ayu
482.	Candi 7 Bumi Ayu
483.	Candi 8 Bumi Ayu
484.	Candi 9 Bumi Ayu
485.	Candi 10 Bumi Ayu
486.	Candi 11 Bumi Ayu
487.	Tugu Bor Minyak
488.	Perumahan Pertamina
489.	Goa Harimau
490.	Goa Putri
491.	Goa Selabe
492.	Jembatan Ogan I
493.	Stasiun Kereta Api Baturaja
494.	Rumah Sakit Antonio
495.	Rumah Tradisional Dusun Baturaje
496.	Situs Megalitik Tanjung Aro
497.	Situs Megalitik Tegur Wangi
498.	Situs Megalitik Tebing Tinggi
499.	Kubur Batu, Arca Manusia Dibelit Ular Tanjung
500.	Situs Belumai
501.	Kubur Batu Pematang Bangao
502.	Arca Manusia, Kubur Batu dan Pahatan Bukit Selatan
503.	Arca Manusia dan MegalitTebing Tinggi
504.	Komplek Megalitik Talang Batu Gong
505.	Komplek Megalit Cawing Lama
506.	Danau Candi
507.	Makam Serunting Sakti (siPahitLidah)
508.	Arca Manusia dibelit Ular
509.	Kubur Batu/Rumah Batu Tanjung Aro
510.	Kubur Batu/Rumah Batu Belumai
511.	Arca Manusia Belumai
512.	Batu Dakon Belumai 1
513.	Batu Dakon Belumai 2
514.	Arca Manusia Menunggang Kerbau Belumai

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
515.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 1
516.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 2
517.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 3
518.	Kubur Batu/ Rumah Batu Tegur Wangi 1
519.	Arca Manusia Tegur Wangi 1
520.	Arca Manusia Tegur Wangi 2
521.	Arca Manusia Tegur Wangi 3
522.	Arca Manusia Tegur Wangi 4
523.	Kubur Batu/Rumah Batu Tegur Wangi
524.	Batu Balai/Dinding Bergambar
525.	Batu Berelief Cawang Baru 1
526.	Batu Berelief Cawang Baru 2
527.	Batu Dalkon Tebing Tinggi
528.	Batu Datar Tebing Tinggi
529.	Arca Manusia Menunggang Kerbau Tebing Tinggi
530.	Arca Manusia di Belit Ular
531.	Menhir Tebing Tinggi
532.	Arca Manusia Jambat Akar
533.	Arca Manusia Talang Batu Gong
534.	Meja Batu/Dolmen Talang Batu Gong
535.	Tetralith Talang Batu Gong 1
536.	Arca Manusia Talang Batu Gong 1
537.	Arca Manusia Talang Batu Gong 2
538.	Batu Datar Talang Batu Gong
539.	Tetralith Talang Batu Gong 2
540.	Batu Tulis Agung Lawang
541.	Batu Betangkup Agung Lawang
542.	Arca Gajah Beringin Jaya
543.	Batu Dalkon/Batu Berlubang Beringin Jaya
544.	Lumpang Batu Beringin Jaya
545.	Pahatann Kepala Manusia di Dinding Batu Burung Dinang
546.	Arca Manusia Muara Siban
547.	Arca Manusia tanpa Kepala Burung Dinang
548.	Relief Manusia dan Burung Hantu Sungai Kukuy
549.	Arca Manusia Talang Ternak
550.	Dolmen Dusun Belumai
551.	Rumah Baghi Tatahan
552.	Nisan Berelief
553.	Arca Kepala Manusia
554.	Makam Puyang Mambang Sakti
555.	Makam Puyang Minak Balak Seribu
556.	Makam Puyang Putri
557.	Makam Puyang H. Abdullah
558.	Makam Puyang Empu Serawan
559.	Makam Puyang Sekuntai
560.	Terowongan 5 Km
561.	Batu Badak
562.	Makam Puyang Sembrani Sakti
563.	Batu Pasir Beras Pasir
564.	Batu Perahu Telungkup
565.	Batu Ciuman
566.	Goa Ratu
567.	Gua Asmara
568.	Gua Kelambit

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
569.	Gua Kelambit
570.	Gua Sarang Burung Walet
571.	Menher
572.	Tebing Batu
573.	Air Panas Kembuhak
574.	Kembuhak Badas
575.	Kembuhak Malu
576.	Kembuhak Bubuw
577.	Patung Main Sindi
578.	Patung Gajah
579.	Patung Anjing
580.	Lesung Batu
581.	Makam Puyang Bale Seribu
582.	Makam Puyang Raje Kuase
583.	Makam Puyang Meruhum
584.	Makam Puyang Dewi Itam Manis
585.	Makam Puyang Gerizak
586.	Makam Ratu Nengkuse
587.	Senjata Pusaka Keris Sakti
588.	Benteng Tinggi
589.	Makam Puyang Serunting Sakti
590.	Piano Tue
591.	Lemari Tue
592.	Rumah Adat Suku Semendo
593.	Makam Si Pahit Lidah
594.	Makam Puyang Seranjang
595.	Makam Puyang Umpu Batin Tuha
596.	Makam Puyang Tanjung Kedatun
597.	Lamban Tuha
598.	Batu Tapal
599.	Batu Lesung
600.	Batu Kursi
601.	Batu Bersusun
602.	Luang Betung
603.	Batu Bertangkup
604.	Sumber Air Panas
605.	Batu Peti
606.	Batu Sejajar
607.	Batu Tapak Puyang
608.	Batu Marmer
609.	Candi Jepara
610.	Lamban Tuha
611.	Batu Kebayan
612.	Batu Mega
613.	Rumah Adat
614.	Rumah Adat
615.	Makam Puyang Air Rambutan
616.	Makam Puyang Rakse Baya
617.	Batu Jung
618.	Batu Meriam
619.	Batu Tapak Seribu
620.	Batu Lesung
621.	Makam Puyang Naga Berisang
622.	Batu Lesung

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
623.	Batu Situs Tapak Kerbau
624.	Benteng Perang Pauh
625.	Sumur Putri
626.	Batu Pengaringan
627.	Kereta Kencana
628.	Rumah Pangeran Ba'sir
629.	Rumah Pangeran Abdul Hamid
630.	Makam Puyang Umpuan Ratu
631.	Makam Puyang Guru Sakti
632.	Makam Puyang Syeh Umar Shihab
633.	Makam Puyang Tuan Tanda Woli
634.	Makam Puyang Markodum
635.	Makam Puyang Tanda Tuan Abdul Rahman
636.	Makam Puyang BP. Peliung
637.	Makam Puyang Tanjung Darussalam
638.	Makam Puyang Tuan Junjungan Ahmad Badar
639.	Rumah Haji Khotib Nawawi
640.	Makam Puyang Batin Puluh
641.	Makam Puyang Tuan Dipulau
642.	Makam Puyang Ratu Bagus Baginda Ali
643.	Megalitik batu Beghamben
644.	Situs Tinggihari
645.	Komplek Megalit Tanjung Mulak
646.	Menhir Batu Aji Karang Dalam Ulu
647.	Megalitik Batu Macan
648.	Megalitik Nek Nambeng
649.	Komplek Megalit Rindu Hati
650.	Megalitik Batu Kerbau
651.	Megalitik Bilik Batu Kota Raya
652.	Megalitik Batu Putri
653.	Kubur Batu Talang Pagar Agung
654.	Area Megalit dan Dolmen
655.	Megalitik Baturang
656.	Arca Manusia, Dolmen dan Arca Batu Gunung Kaya
657.	Area Megalit Tanjung Beringin
658.	Megalitik Tanssjung Raja
659.	Arca Megalit Muara Dua
660.	Megalitik Batu Lebuhan
661.	Balai Yasa
662.	Gereja St. Michael
663.	Sungai Lematang
664.	Sungai Perigi
665.	Batu Gajah
666.	Batu Pengantin
667.	Rumah Limas H. Braksan
668.	Rumah DepatiAhmak
669.	Rumah Depati Ahmad
670.	Makam Keluarga Penghulu Kiai Haji Abdul Mukti
671.	Rumah Limas Depati Suut
672.	Situs Batu Bergores Jarakan
673.	Situs Megalit Manggilan
674.	Batu Menhir Lingge
675.	Meja Batu/Dolmen Situs Umo Jati
676.	Makam Puyang Gadis
677.	Tempayan Kubur
678.	Naskah kuno
679.	Makam Pesirah Sembilan
680.	Makam Puyang Goak

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
681.	Rumah Adat
682.	Tempayan Kubur
683.	Samurai
684.	Rutan
685.	Terowongan Kereta api
686.	Rumah Benteng
687.	Makam Puyang Jagalambu
688.	Komplek Rumah Pangeran H. Anng Mahidin
689.	Kawasan Teluk Kijing
690.	Rumah Pangeran Epil
691.	Watervang
692.	Senjata CIS
693.	Jubah Malea
694.	Pedang Pucuk Umbai
695.	Haligi Mupe
696.	Tombak
697.	Keris Moneng Keregak
698.	Lemari Besi Kecil
699.	Lemari Besi Besar
700.	Guci
701.	Rumah Panggung Tradisional
702.	Makam Keramat Lebai seketi
703.	Makam Bidan Aye
704.	Masjid Al Marhamah
705.	Makam Keramat Koneng Kerengak
706.	Makam Keramat Koneng Klepa
707.	Makam Keramat Kejora
708.	Makam Keramat Krio Mambul
709.	Makam Keramat Satang Temberas
710.	Makam Kuno Sekitar Makam Keramat
711.	Makam Kuno sekitar Makam Koneng Klepa
712.	Makam Istri Pangeran Sembilan Dewa
713.	Makam Keramat Bisu
714.	Makam Kuno (LDR 3)
715.	Makam Kuno (LDR 4)
716.	Senapan
717.	Keris
718.	Bendera Indonesia Lama
719.	Jeep
720.	Mesin Ketik
721.	Puing Pesawat
722.	Kereta Api
723.	Al Quran Tulis Tangan
724.	Seragam Tentara
725.	Tombak
726.	Monumen Perjuangan Letkol Atmo
727.	Makam Keramat Depati Kuning
728.	Menhir sekitar Makam Keramat Depati Kuning
729.	Makam Keramat Depati Bodo
730.	Benteng Tanah Ulak Lebar
731.	Makam Keramat Bukang kurap
732.	Makam Kuno Ulak Lebar
733.	Pecahan Keramik Cina dan Gerabah
734.	Masjid raya

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
735.	Kompleks bangunan Belanda
736.	Batu Djong
737.	Bisokop Gelora
738.	Patung Budha Maitreya
739.	Makam Moneng Sepati
740.	Masjid agung Al Basri
741.	Keramat Meja Batu
742.	Makam Paku Alam
743.	Makam Depati Kecil
744.	Makam Puyang Ketol
745.	Keramat Kriyo Grudo
746.	Makam Peserah
747.	Rumah Belanda
748.	Batu Dulang Meja Batu
749.	Keramat Haji Besar
750.	Batu Bercorak
751.	Patung Naga
752.	Candi Lesung Batu
753.	Makam Pangeran Emas
754.	Makam Raja Empedu
755.	Makam Putri Daro Putih
756.	Situs Batu Merah
757.	Dayung Biduk
758.	Mariam Naga
759.	Pedang Bersejarah
760.	Selendang Sutra 7 Meter
761.	Sabuk Kain Mas
762.	Makam Depati Kurus
763.	Makam Depati Said
764.	Batu Moning
765.	Piagam Kulit Kayu
766.	Rumah Tuo
767.	Alun Alun Desa
768.	Makam Kuno
769.	Sedekah Bumi
770.	Rumah Bari Pangkalan Balai
771.	Rumah Tradisional Sungsang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sementara itu juga telah ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat sampai dengan tahun 2023, yaitu Tari Erai-Erai, Sedekah Balaq, Telok Abang Palembang, Incang-Incang Pedamara, dan Musik Jidur Pedamaran. Adapun 49 Warisan Budaya Tak Benda berikut sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel 2.24
Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

No.	Tahun	Nama Wbtb	Asal Daerah	Domian
1.	2013	Songket	Palembang	Songket
2.		Dulmuluk	Palembang	Dulmuluk
3.	2014	Rumah Ulu	Oku	Rumah Ulu
4.		Rumah Limas	Palembang	Rumah Limas
5.		Pempek	Palembang	Pempek
6.		Tari Gending Sriwijaya	Palembang	Tari Gending Sriwijaya
7.		Guritan	Pagaralam	Guritan
8.	2015	Irama Batang Hari Sembilan	Pagaralam	Irama Batang Hari Sembilan
9.		Senjang	Musi Banyuasin	Senjang
10.		Bolu Delapan Jam	Palembang	Bolu Delapan Jam
11.	2016	Bidar	Palembang	Bidar
12.		Warahan	Oku Timur	Warahan
13.		Ande-Ande	Banyuasin	Ande-Ande
14.	2017	Rejung	Musirawas	Rejung
15.		Kerajinan Lak	Palembang	Kerajinan Lak
16.		Tari Penguton	Oki	Tari Penguton
17.	2018	Rumah Baghi	Pagaralam	Rumah Baghi
18.		Surat Ulu	Sumsel	Surat Ulu
19.		Timbang Kepala Kebo	Banyuasin	Timbang Kepala Kebo
20.		Tikar Purun	OKI	Tikar Purun
21.		Tari Kebargh	Pagaralam	Tari Kebargh
22.		Tari Silampari Kayangan Tinggi	Musirawas	Tari Silampari Kayangan Tinggi
23.		Pindang	Palembang	Pindang
24.		Idangan/Ngobeng	Palembang	Ngobeng
25.	2019	Midang		Midang
26.		Tanjak	Palembang	Tanjak
27.		Cak Ingkling	Sumsel	Cak Ingkling
28.		Musik Kelentangan	Musi Banyuasin	Musik Kelentangan
29.		Tempoyak	Palembang	Tempoyak
30.		Tam-Tam Duku	Musi Rawas	Tam-Tam Duku
31.		Benteng-Bentengan	Musi Rawas	Benteng-Bentengan
32.		Tari Sambut Muara Enim	Muara Enim	Tari Sambut Muara Enim
33.	2020	Adat Perkawinan Mabang Handak	Kab. OKI	Adat Perkawinan Mabang Handak
34.		Lelang Lebak Lebung	Kab. OKI	Lelang Lebak Lebung
35.	2021	Jejuluk	OKU Timur/ OKI	Jejuluk
36.		Sedekah Serabi	Empat Lawang	Sedekah Serabi

No.	Tahun	Nama Wbtb	Asal Daerah	Domian
37.		Tari Lading	PALI	Tari Lading
38.		Sagarurung	PALI	Sagarurung
39.		Gulo Puan	OKI	Gulo Puan
40.		Tepung Tawar Perdamian	Palembang	Tepung Tawar Perdamian
41.		Burgo	Palembang	Burgo
42.		Selendang Mudawaroh Sulaman Kelengkang	Palembang	Selendang Mudawaroh Sulaman Kelengkang
43.		Sedekah Rame	Lubuk Linggau	Sedekah Rame
44.	2022	Serambe Banyuasin	Banyuasin	Serambe Banyuasin
45.	2023	Telok Abang Palembang	Palembang	Telok Abang Palembang
46.		Icang-Incang Pedamaran	OKI	Icang-Incang Pedamaran
47.		Musik Jidur	OKI	Musik Jidur
48.		Tari Erai-Erai	Lahat	Tari Erai-Erai
49.		Sedekah Balaq	OKU Timur	Sedekah Balaq

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2023 (data termutakhir)

Kesenian Sumatera Selatan terus dipacu, disamping untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat juga diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan Sanggar seni di Sumatera Selatan, walaupun tidak terlalu pesat namun tetap memperlihatkan pertumbuhan. Hal ini sedikit banyak memperlihatkan adanya kegiatan seni di masyarakat.

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 1.116 sanggar seni, jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 jumlah sanggar seni sebanyak 1.090 sanggar seni, seiring dengan meningkatnya jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan, dibeberapa Kabupaten maupun Kota ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2015 - 2024

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar Seni										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Palembang	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
2	Ogan Ilir	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	
3	Ogan Komering Ilir	24	41	41	41	41	41	41	71	71	71	
4	Muara Enim	-	593	593	593	593	593	598	598	598	605	
5	Ogan Komering Ulu	63	82	82	82	82	82	28	28	28	28	
6	OKU Selatan	17	17	17	17	17	27	27	28	29	29	

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar Seni										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	OKU Timur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
8	Prabumulih	10	10	10	13	13	11	11	11	11	11	
9	Empat Lawang	18	18	19	19	19	27	28	28	28	28	
10	Musi Banyuasin	11	13	41	41	41	45	45	45	41	41	
11	Banyuasin	24	24	21	35	35	35	35	55	55	55	
12	Musi Rawas	22	33	33	33	33	58	58	65	71	23	
13	Lahat	18	18	18	23	23	23	24	24	24	5	
14	Pagaralam	-	22	24	24	24	23	23	24	47	47	
15	Lubuk Linggau	25	41	55	52	52	52	0	0	0	32	
16	Musirawas Utara	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	
17	PALI	5	5	8	8	25	25	25	25	25	50	
	Jumlah	317	997	1042	1061	1061	1124	1026	1090	1116	1113	

Sumber : Statistik Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, diolah, 2024

Olahraga

Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan event-event olahraga yang bertaraf nasional maupun internasional, diantaranya Kejuaraan Internasional MX GP, Qubica AMF Bowling World Cup ke-55, Sriwijaya Ranau Gran Fondo, Kejuaraan Nasional PBSI 2019, International Triathlon 2020, dan yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan. Suksesnya penyelenggaraan event-event olahraga ini salah satunya karena didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada. Salah satu fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan terancangih serta berstandar Internasional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, terbentang luas di kawasan *Jakabaring Sport City*, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai tahun 2017. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pendidikan menengah, sedangkan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk penyelenggaraannya. Namun demikian, kinerja pendidikan dasar masih menjadi ukuran kinerja pemerintah provinsi sesuai RPJMD. Pemerintah provinsi bertugas membina dan mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun bergerak fluktuatif. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2020–2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan capaian nasional. Pada awal periode, khususnya tahun 2020 hingga 2022, APK Provinsi Sumatera Selatan berada pada level sangat tinggi, bahkan mencapai 112 pada tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan akses dan partisipasi pendidikan dasar yang luas, termasuk partisipasi peserta didik di luar usia sekolah resmi.

Namun demikian, sejak tahun 2023 terjadi penurunan APK yang berlanjut hingga tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya dinamika demografis, perubahan angka usia sekolah, atau dampak lanjutan dari faktor eksternal seperti penyesuaian pascapandemi dan perbaikan pendataan peserta didik. Pada tahun 2025, APK Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan tanda pemulihan meskipun masih berada di bawah capaian puncak pada awal periode.

Secara keseluruhan, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan tetap mempertahankan APK SD sederajat di atas rata-rata nasional. Hal ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kebijakan pendidikan dasar, khususnya dalam menjaga keberlanjutan partisipasi sekolah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

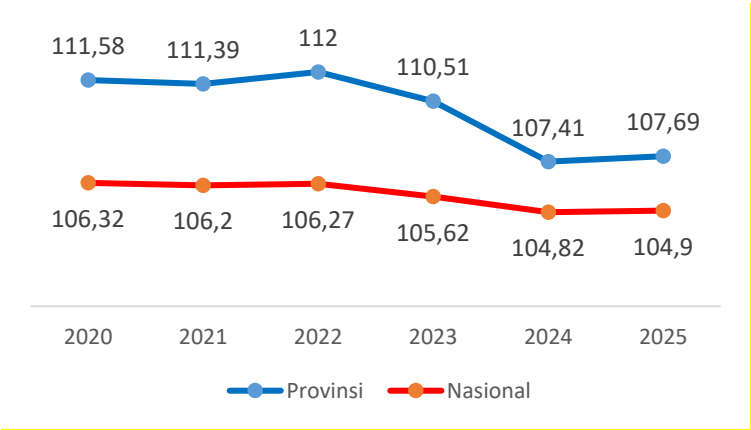
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dan masih berada di bawah capaian nasional. Pada awal periode, APK provinsi berada pada angka 88,78 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 89,78 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan menengah pertama di Sumatera Selatan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 85,46. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi peserta didik, yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, maupun penyesuaian data kependudukan dan pendidikan. Pada tahun 2025, APK SMP sederajat di Sumatera Selatan mulai menunjukkan pemulihan dengan naik menjadi

87,24, meskipun capaian tersebut masih belum menyamai kondisi sebelum tahun 2024. Sementara itu, secara nasional APK SMP sederajat relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Nilai APK nasional berada di atas 92 sepanjang periode pengamatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 93,02. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat nasional, partisipasi pendidikan SMP dapat dipertahankan dengan baik. Secara keseluruhan, kesenjangan antara APK SMP sederajat Provinsi Sumatera Selatan dan nasional masih cukup nyata, terutama pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang berfokus pada transisi lulusan SD ke SMP, pencegahan putus sekolah, serta pemerataan akses pendidikan SMP, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial ekonomi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA sederajat di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang semakin kuat, khususnya pada tiga tahun terakhir. Pada awal periode, APK provinsi berada pada level 81,73 dan relatif tertinggal dibandingkan capaian nasional. Setelah mengalami fluktuasi kecil pada tahun 2022, APK SMA sederajat di Sumatera Selatan mulai meningkat secara signifikan sejak tahun 2023. Peningkatan yang cukup tajam pada periode 2023–2025 mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan daya jangkau pendidikan menengah atas, yang dapat dikaitkan dengan penguatan kebijakan wajib belajar 12 tahun, perluasan daya tampung satuan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan. Pada tahun 2025, APK provinsi mencapai 88,90, mendekati capaian nasional sebesar 89,53.

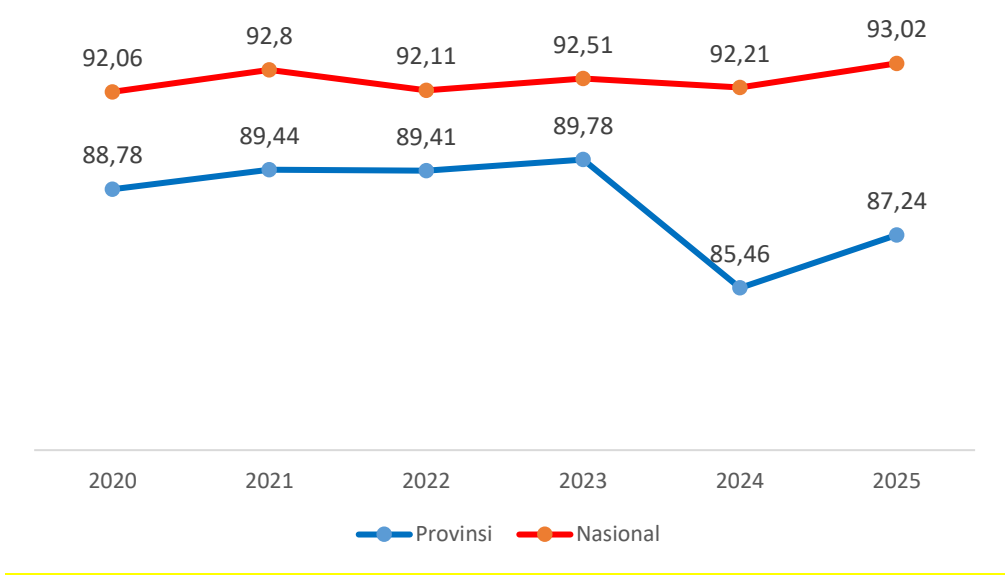
Sementara itu, secara nasional APK SMA sederajat menunjukkan tren peningkatan yang stabil sepanjang periode pengamatan, dari 84,53 pada tahun 2020 menjadi 88,53 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan nasional dalam mendorong partisipasi pendidikan menengah atas. Secara keseluruhan, meskipun APK SMA sederajat Provinsi Sumatera Selatan masih sedikit berada di bawah rata-rata nasional, tren peningkatan yang konsisten dan penyempitan kesenjangan menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program peningkatan partisipasi pendidikan SMA sederajat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sekolah bagi lulusan SMP dan menekan angka putus sekolah.

Gambar 2.28
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



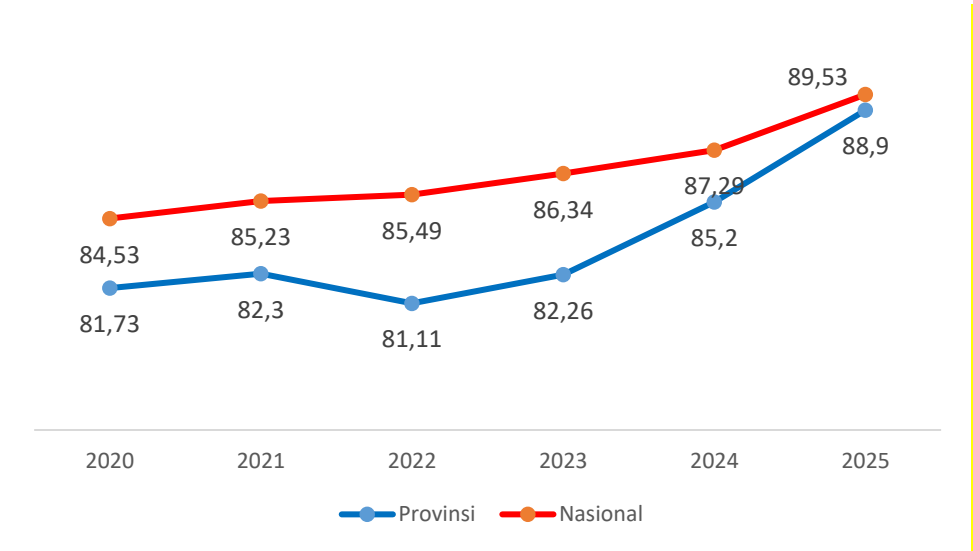
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.29
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

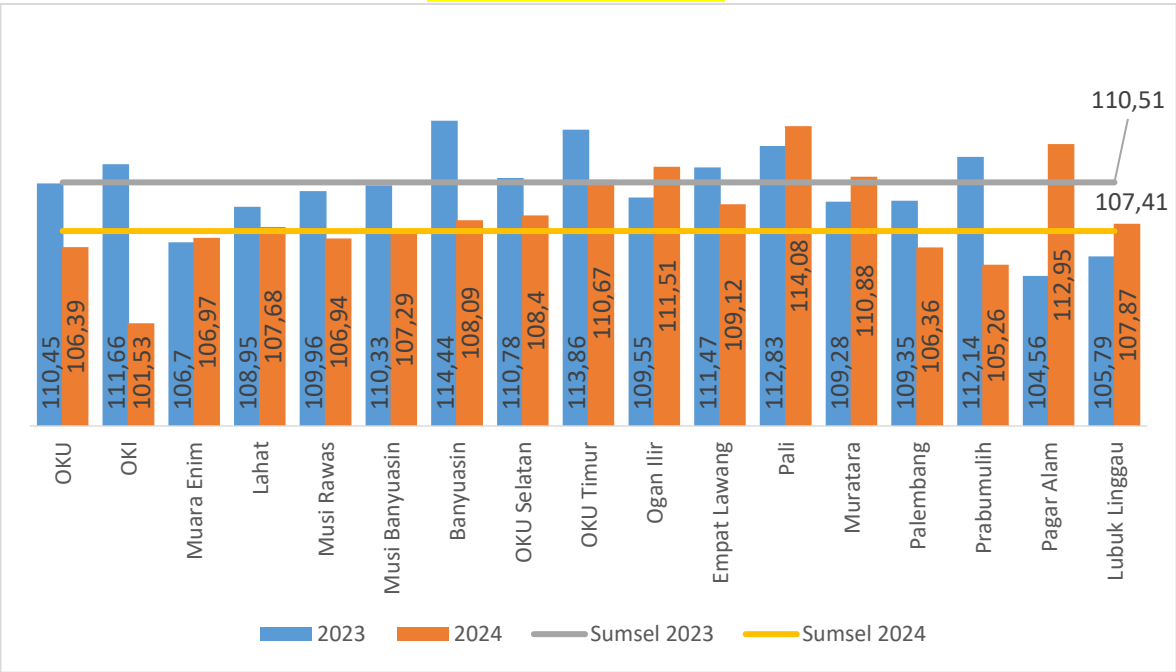
Menurut data BPS pada tahun 2024 terdapat 10 kab/kota yang capaian APK tingkat SD yang melampaui APK Provinsi. APK SD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 berada pada angka sekitar 107,41. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota, terlihat adanya variasi kinerja antarwilayah. Sejumlah kabupaten/kota telah melampaui capaian provinsi, menunjukkan partisipasi pendidikan SD yang relatif tinggi. Daerah-daerah tersebut antara lain PALI, Ogan Ilir, OKU Timur, Muratara, dan Pagar Alam. Capaian yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi ini

mengindikasikan akses dan partisipasi pendidikan dasar yang cukup baik, termasuk kemungkinan adanya siswa usia di luar kelompok usia resmi yang masih terakomodasi dalam jenjang SD. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota berada sedikit di atas atau mendekati capaian provinsi, seperti Banyuasin, OKU Selatan, dan Empat Lawang. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang relatif sejalan dengan rata-rata Sumatera Selatan.

Di sisi lain, terdapat kabupaten/kota yang masih berada di bawah capaian provinsi, antara lain Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Palembang, Prabumulih, serta Lubuk Linggau yang berada sedikit di atas namun masih mendekati garis provinsi. Daerah-daerah ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama dalam penguatan akses, pemerataan layanan pendidikan dasar, dan pencegahan anak usia SD yang tidak atau belum terlayani secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian APK SD tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah mencapai atau melampaui standar provinsi, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan intervensi yang lebih terarah, khususnya pada wilayah dengan capaian di bawah rata-rata provinsi, guna mendorong pemerataan akses pendidikan dasar di seluruh Sumatera Selatan.

Gambar 2.31
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD Kab/Kota
Tahun 2023-2024



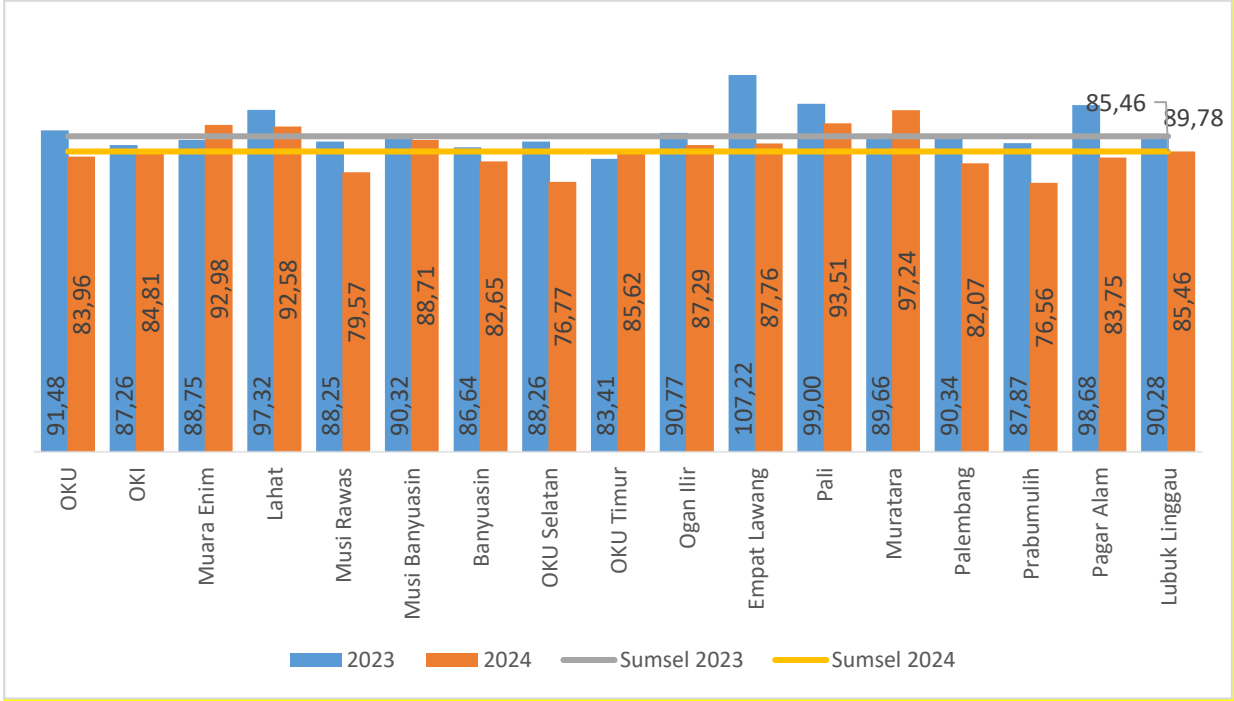
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data BPS tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar SMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 85,46. Angka ini mencerminkan bahwa secara agregat, partisipasi pendidikan jenjang SMP di Sumatera Selatan telah menjangkau sebagian besar penduduk usia SMP, namun masih terdapat variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota, terlihat bahwa kinerja partisipasi pendidikan menengah pertama masih bervariasi antarwilayah. Kabupaten/kota yang memiliki APK SMP di atas capaian provinsi antara lain Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Empat Lawang, PALI, dan Muratara. Capaian tersebut menunjukkan partisipasi SMP yang relatif baik, bahkan di beberapa daerah telah mendekati atau melampaui 90 persen, yang mengindikasikan semakin luasnya akses dan keberlanjutan pendidikan dari SD ke SMP. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota berada di sekitar rata-rata provinsi, seperti OKI, OKU Timur, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Kondisi ini mencerminkan capaian yang relatif sejalan dengan kinerja provinsi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Di sisi lain, terdapat 6 kabupaten/kota yang masih berada di bawah capaian provinsi, antara lain OKU, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Selatan, Palembang, dan Prabumulih. Daerah-daerah ini memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam mendorong transisi lulusan SD ke SMP, penguatan akses sekolah, serta pencegahan putus sekolah.

Secara keseluruhan, capaian APK SMP tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian kabupaten/kota telah melampaui capaian provinsi, namun kesenjangan antarwilayah masih cukup nyata. Perbedaan capaian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat spasial dan kontekstual, dengan fokus pada daerah ber-APK rendah tanpa mengabaikan upaya menjaga kinerja daerah yang sudah tinggi. Optimalisasi transisi SD ke SMP, penguatan layanan pendidikan di wilayah terpencil dan perkotaan rentan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong peningkatan APK SMP yang lebih merata di seluruh Sumatera Selatan

Gambar 2.32
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP
Kab/Kota Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

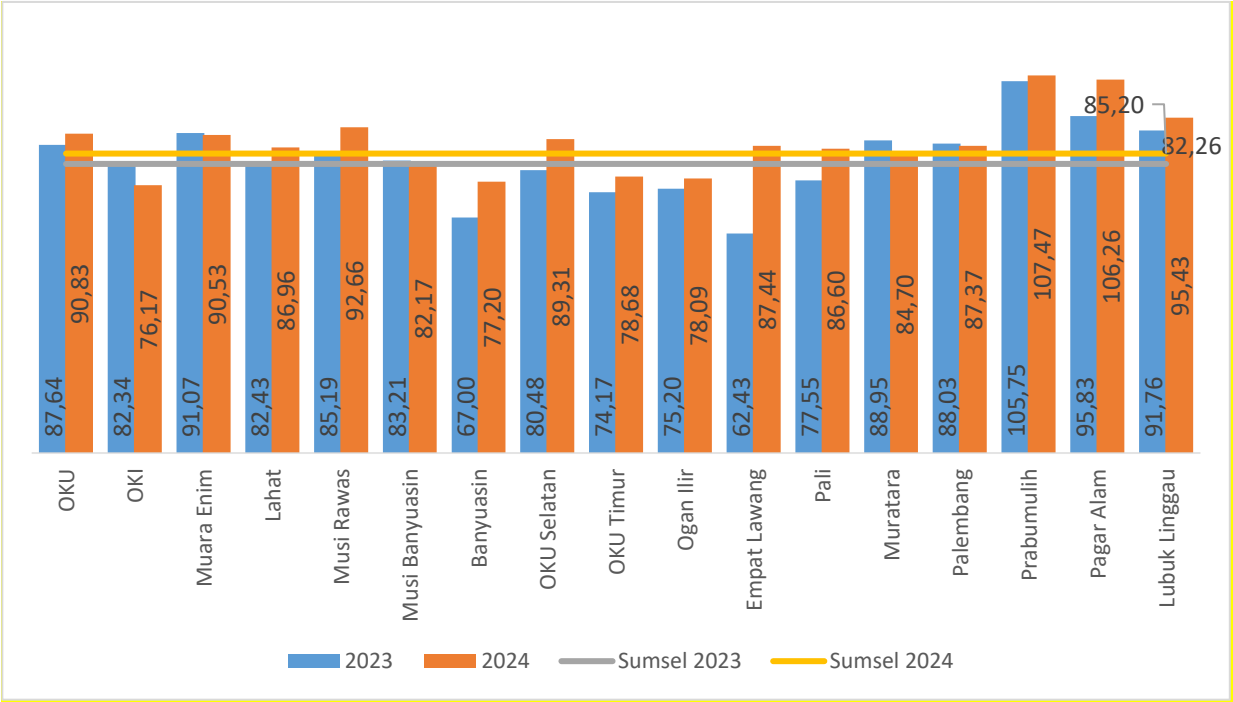
Menurut data BPS pada tahun 2024 APK SMA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 82,26. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan jenjang menengah atas secara umum masih berada pada level menengah, dengan kesenjangan capaian yang cukup lebar antar kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota mencatat APK SMA yang sangat tinggi dan melampaui capaian provinsi secara signifikan. Prabumulih menjadi daerah dengan capaian tertinggi sebesar 107,47, disusul Pagar Alam (106,26) dan Lubuk Linggau (95,43). Capaian yang melebihi 100 persen ini mengindikasikan tingginya daya tarik satuan pendidikan SMA di wilayah tersebut, termasuk masuknya peserta didik dari luar daerah serta masih tertampungnya peserta didik di luar kelompok usia resmi. Selain itu, Musi Rawas (92,66), Muara Enim (90,53), dan OKU (90,83) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencerminkan akses pendidikan SMA yang relatif memadai serta keberhasilan daerah dalam mendorong keberlanjutan pendidikan dari jenjang SMP ke SMA.

Masih terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan APK SMA di bawah capaian provinsi, antara lain Banyuasin (77,20), OKU Timur (78,68), dan Ogan Ilir (78,09). Daerah-daerah ini menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan ke jenjang SMA, yang dapat

dipengaruhi oleh faktor keterbatasan akses sekolah, kondisi sosial ekonomi, serta kecenderungan peserta didik untuk langsung masuk ke dunia kerja. Capaian terendah tercatat di OKI (76,17) dan Banyuasin (77,20). Kondisi ini mengindikasikan masih cukup besarnya proporsi penduduk usia SMA yang belum terlayani pendidikan formal, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, APK SMA Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 82,26 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan menengah atas masih perlu terus ditingkatkan. Kesenjangan capaian antarwilayah cukup tajam, terutama antara kota/kawasan perkotaan dan kabupaten dengan karakteristik geografis serta sosial ekonomi yang lebih menantang. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif dan berbasis wilayah, seperti perluasan akses SMA/SMK, penguatan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan daya tarik pendidikan menengah atas, serta sinergi dengan program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan capaian APK SMA dapat meningkat secara lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Gambar 2.33
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA
Kab/Kota Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara umum, APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan

fluktuasi kecil, namun masih berada jauh di bawah capaian nasional. Sementara itu, APK PT nasional memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan semakin meluasnya akses pendidikan tinggi secara nasional. Pada tahun 2020, APK PT Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 26,41. Angka ini sedikit menurun pada 2021 (26,32) dan relatif stagnan pada 2022 (26,31). Pada 2023, terjadi peningkatan menjadi 27,26, yang menunjukkan mulai membaiknya partisipasi pendidikan tinggi di daerah. Namun, capaian tersebut kembali menurun pada 2024 (26,41) sebelum meningkat lagi pada 2025 menjadi 27,41.

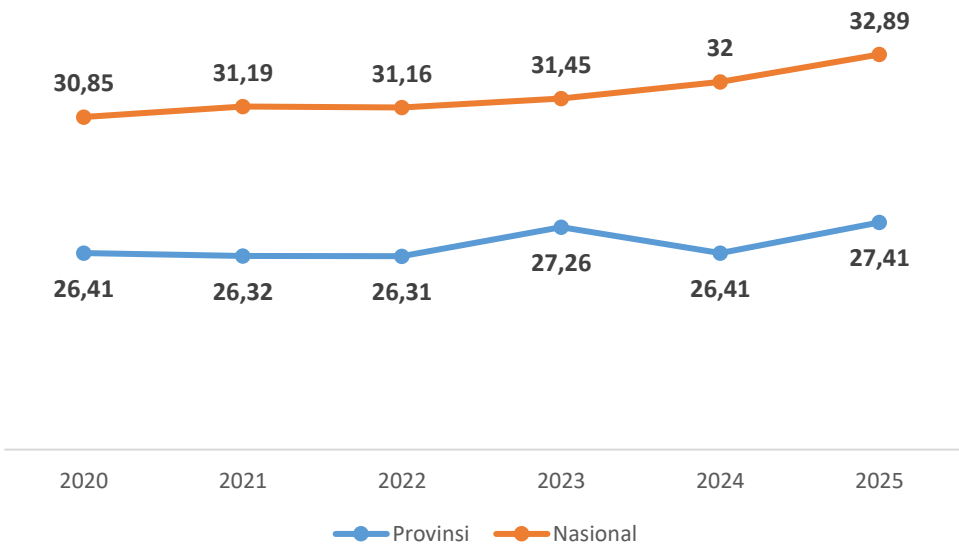
Pergerakan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di Sumatera Selatan belum berlangsung secara konsisten, dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, kesiapan lulusan pendidikan menengah, serta keterjangkauan akses ke perguruan tinggi. Selama periode 2020–2025, terdapat kesenjangan yang relatif besar dan persisten antara capaian APK PT Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Pada tahun 2020, selisih capaian mencapai sekitar 4,44 poin, dan pada 2025 selisih tersebut melebar menjadi sekitar 5,48 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan di tingkat provinsi, laju peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi secara nasional.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa akses, daya tampung, dan daya tarik pendidikan tinggi di Sumatera Selatan masih perlu diperkuat. Faktor-faktor seperti keterbatasan jumlah dan sebaran perguruan tinggi, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kesiapan lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi diduga berperan dalam membatasi peningkatan APK PT di tingkat provinsi. Untuk memperkecil kesenjangan dengan capaian nasional, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terfokus, antara lain melalui perluasan akses perguruan tinggi di wilayah non-perkotaan, peningkatan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, penguatan pendidikan vokasi dan jalur alternatif ke perguruan tinggi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Secara keseluruhan, meskipun APK PT Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah,

tantangan utama ke depan adalah memastikan peningkatan tersebut berlangsung lebih konsisten dan lebih cepat, sehingga kesenjangan dengan capaian nasional dapat dipersempit secara bertahap.

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100 persen, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya. Secara Struktural Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pola yang khas:

- Jenjang SD: sangat tinggi dan mendekati universal (>95%)
- Jenjang SMP: menengah (70–80%)
- Jenjang SMA: relatif rendah (60–63%)

Pola ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar potensi kehilangan peserta didik (drop-out dan non-transisi).

Perkembangan APM SD mengalami Fase stabil tinggi khususnya tahun 2020–2023 yang menunjukkan interpretasi mendekati universal schooling dan menunjukkan keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar. Akan tetapi terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024–2025 yang mengindikasikan munculnya masalah akses, migrasi

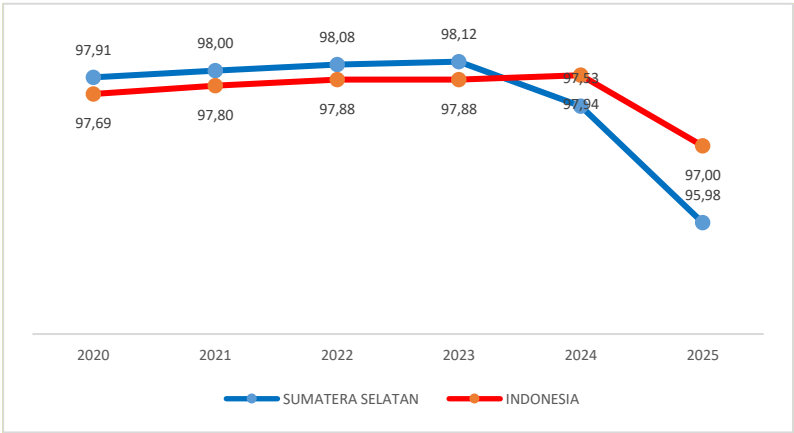
penduduk usia sekolah, atau efek lanjutan pascapandemi. Sementara jika dibandingkan secara Nasional, bahwa sejak 2024, APM Sumsel berada di bawah nasional, dengan selisih melebar pada 2025. Ini menandakan perlunya penguatan kembali kebijakan wajib sekolah dasar di wilayah terpencil.

Perkembangan APM SMP mengalami fase moderat khususnya tahun 2020–2023 yang menunjukkan indikasi perbaikan transisi SD ke SMP serta program zonasi dan BOS mulai berdampak positif. Namun terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2024–2025 yang menunjukkan meningkatnya risiko putus sekolah pada usia SMP sehingga menyebabkan dampak struktural yaitu sekitar 25% anak usia SMP di Sumsel tidak sekolah sesuai umur pada 2025 yang berdampak langsung terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan APM SMA mengalami fase moderat khususnya tahun 2020–2023 yang menunjukkan tren meningkat konsisten yang menunjukkan peningkatan minat melanjutkan pendidikan menengah atas. Angka APM SMA sederajat masih tertinggal dari nasional dimana gap dengan nasional melebar pada 2024–2025. Hal ini menandakan hambatan biaya, jarak sekolah, dan kebutuhan kerja dini.

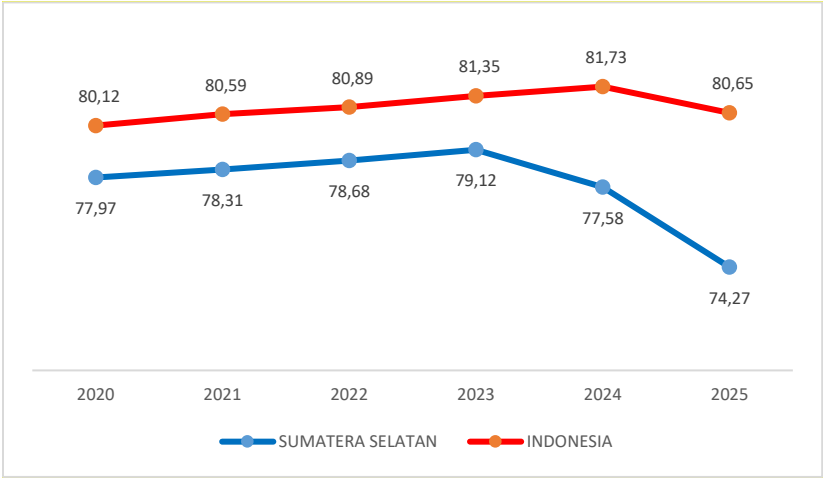
Angka Partisipasi Murni di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah angka nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang sekolah di jenjang tersebut masih tidak sesuai dengan usia sekolahnya. APM dapat disebabkan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang ditimbulkan akibat kondisi geografi yang beragam dan sulit dijangkau, budaya yang belum mendukung untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya dan kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak membantu keuangan keluarga, dan lain-lain.

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



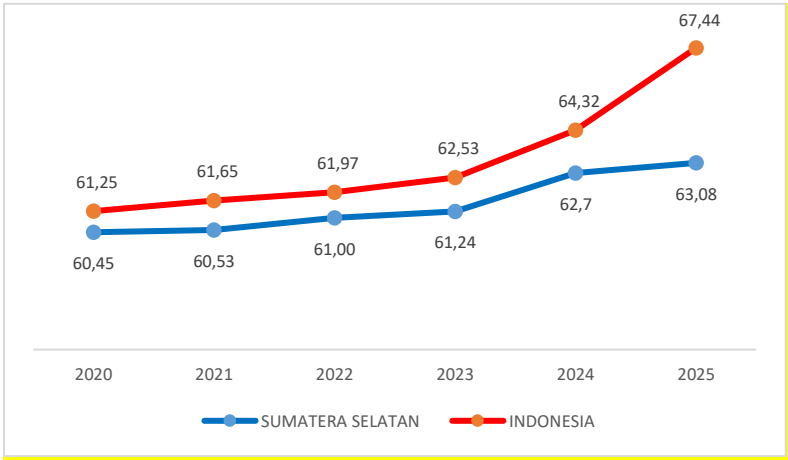
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

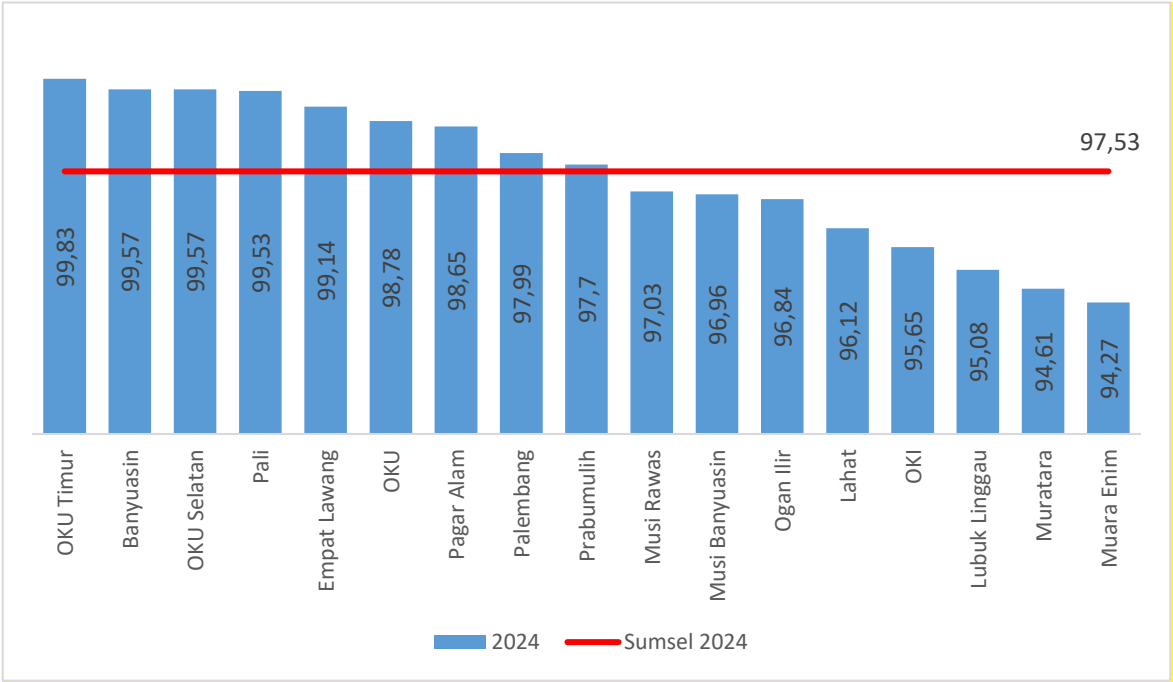
Gambar 2.37
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2024 hampir seluruh kabupaten/kota berada di atas 95%, yang menandakan akses pendidikan dasar sudah sangat baik. Dari grafik di bawah ini terlihat bahwa pada tahun 2024 APM tertinggi dicapai oleh Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Selatan dengan nilai di atas 99,50 persen. Sedangkan APM terendah adalah Kabupaten Muara Enim yaitu 94,27 persen disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 94,61 persen.

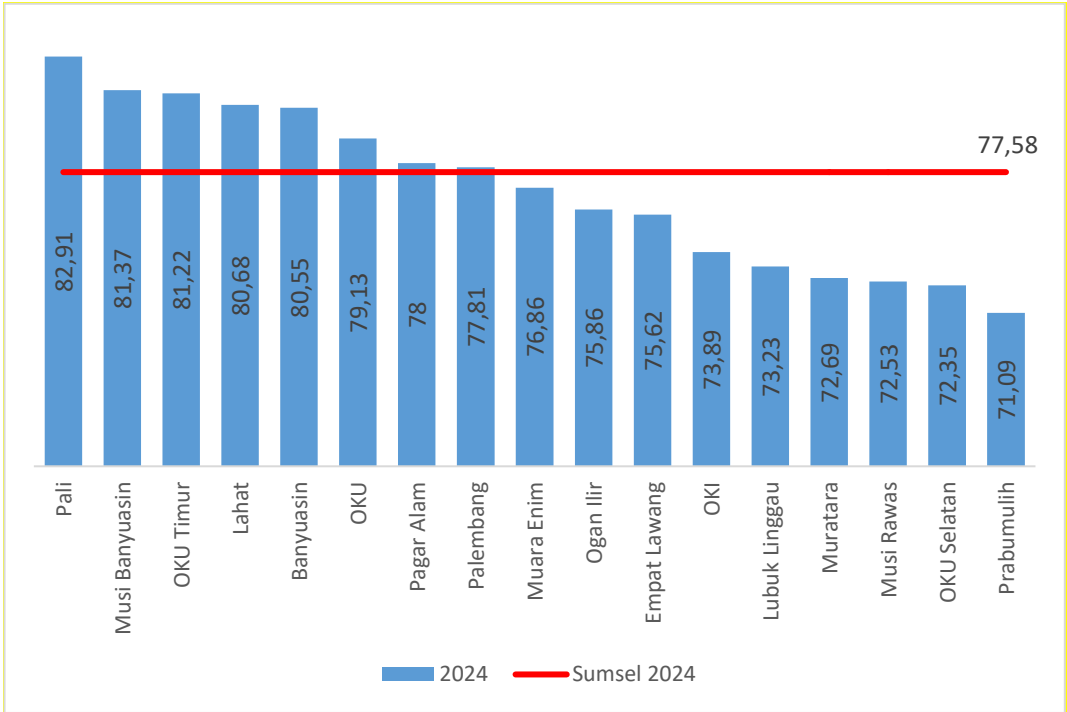
Gambar 2.38
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa tingginya APM SD mencerminkan keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar, ketersediaan sekolah SD yang relatif merata dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar sudah sangat kuat. Meskipun tinggi, masih terdapat kantong-kantong ketertinggalan di wilayah tertentu yang berpotensi disebabkan oleh persebaran penduduk di daerah terpencil dan faktor sosial-ekonomi keluarga.

Gambar 2.39
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat
Menurut Kab/Kota Tahun 2024

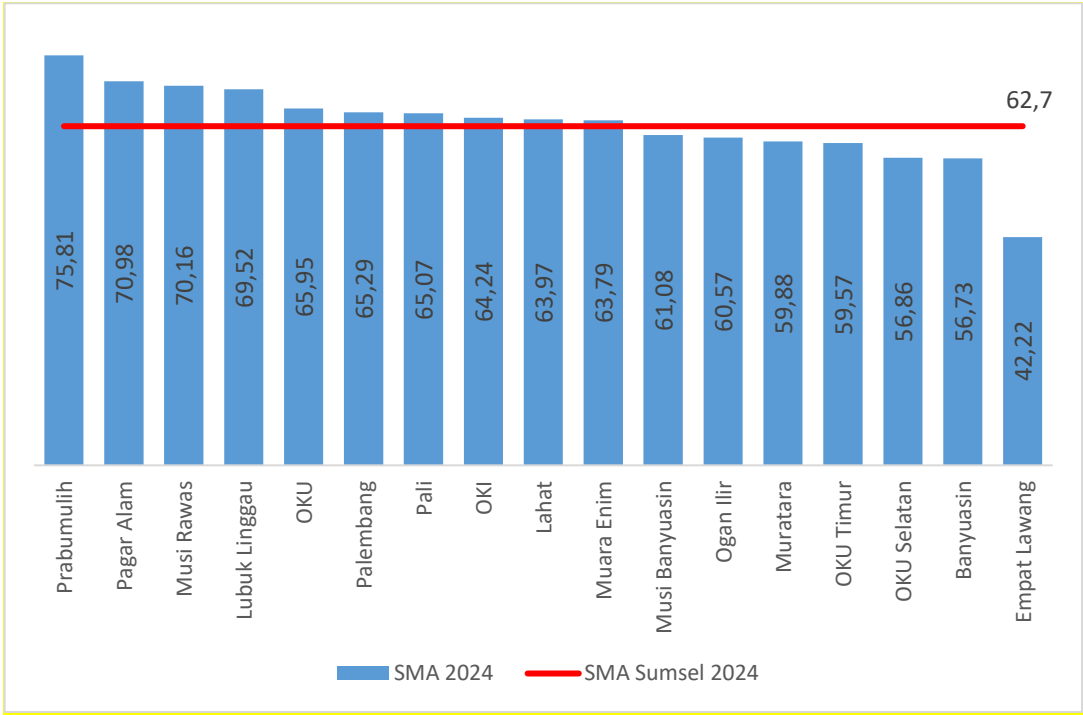


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar APM SMP di atas terlihat bahwa terjadi penurunan tajam sekitar 20 poin dibanding APM SD pada tahun 2024. Terdapat 7 Kabupaten/Kota yang telah melebihi capaian Provisi namun hanya 1 kabupaten/Kota yang melampaui capaian nasional yaitu Kabupaten Pali. Sementara Kota Prabumulih yang memiliki capaian yang rendah yaitu sebesar 71,09.

Dari gambar di atas terdapat rentang selisih antar daerah mencapai lebih dari 11 poin persentase, ini menunjukkan ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan menengah pertama yang cukup serius. Beberapa faktor struktural yang berkontribusi yaitu: jarak sekolah SMP yang lebih jauh dibanding SD, mulainya tekanan ekonomi keluarga sehingga anak membantu bekerja, transisi dari SD ke SMP yang belum optimal (dropout transisi).

Gambar 2.40
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat
Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

APM jenjang SMA/Sederajat Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan drastis dibanding APM SMP (turun ±15 poin). Selisih antara Kota Prabumulih yang tertinggi dan Kabupaten Empat Lawang yang terendah mencapai lebih dari 33 poin. Ini menandakan ketimpangan akses pendidikan menengah atas sangat tajam. Rendahnya APM SMA mengindikasikan bahwa banyak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK, pendidikan menengah atas belum sepenuhnya inklusif sehingga bisa berpotensi meningkatnya angkatan kerja berpendidikan rendah, kemiskinan struktural serta kerentanan pengangguran usia muda.

Dari gambar di atas terdapat 10 Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Nasional. APM tertinggi dicapai oleh Kota Prabumulih sebesar 75,81 dan APM SMA/ sederajat terendah ada di Kabupaten Empat Lawang yaitu 42,22.

Capaian SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri dari Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menjamin kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah.

Tabel 2.26
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Menengah	100	99,33
		= 432.130 orang siswa		
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Usia 4 -18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus	100	84,10
		= 4.009 orang siswa		

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2025

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun terhadap jumlah anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan menengah, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang menjadi target dalam pemenuhan capaian SPM Pendidikan Menengah pada tahun 2024 sebesar 431.628 orang, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan menengah pada tahun 2025 hanya sebesar 432.130 orang. Berdasarkan data tersebut, didapati bahwa capaian SPM Pendidikan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar

99,33%.

Sedangkan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Khusus dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah penduduk usia 4-18 tahun (Disabilitas) terhadap jumlah anak usia 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 4 sampai 18 tahun yang masuk dalam kelompok Disabilitas adalah sebesar 4.009 atau sebesar 84,10 %.

Di bawah ini adalah hasil pencapaian realisasi SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025:

Tabel 2.27
Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	81,61 %	91,72 %	TAHUN 2025 (1 Tahun)

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2025

Pada tahun 2024, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan 81.61 % atau Tuntas Madya, **sedangkan Pada Tahun 2025 Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan adalah 91.72 % (TUNTAS UTAMA).** Dengan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Pemenuhan Anggaran serta Realisasi Target Fisik serta Anggaran untuk pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjadi tolak ukur pencapaian target hasil capaian SPM Bidang Pendidikan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya serta melakukan berbagai langkah Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA-SMK) dan Pendidikan Khusus, seperti penyediaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya personil untuk siswa sekolah, serta peningkatan mutu SDM (Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Penunjang dengan mengadakan peningkatan kompetensi dan berbagai diklat serta pembinaan secara terencana.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan dan Rapor Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diketahui Perkembangan serta Capaian Indikator Prioritas Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026, sehingga dapat diuraikan tentang Analisis tentang Indikator Prioritas Pendidikan untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Pada tahun 2025, Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta dengan Usia 16-18 tahun adalah 70,79. Sedangkan untuk APS di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan adalah 70,79.

Analisis Indikator : Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah, Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Pelayanan Pendidikan, Penyediaan Biaya Personil dan Bantuan kepada Peserta Didik di SMA/SMK kepada keluarga yang tidak mampu, koordinasi dan pendataan untuk data penduduk usia sekolah serta koordinasi pemenuhan gizi untuk peserta didik dengan lembaga serta mitra untuk tiap satuan pendidikan.

2. Kemampuan Literasi

Capaian Kemampuan Literasi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 64,60%, capaian ini naik 4,43 dari tahun 2024 yang mencapai 60,17. sedangkan Capaian Kemampuan Literasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta pada tahun 2025 adalah 61,72%. dimana pada tahun 2024 capaian Kemampuan Literasinya adalah 56,72% atau naik sebesar 5 % pada tahun 2025.

Analisis Indikator: Untuk meningkatkan Capaian Kemampuan Literasi di Tingkat SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan di perlukan pemenuhan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan serta proporsi Pendidik bersertifikat, pemenuhan Kepala Sekolah secara Definitif dan Pendamping sekolah di SMA/SMK karena masih banyak terdata Kepala Sekolah yang belum Definitif atau berstatus Pelaksana Tugas (PLT) di Sekolah Menengah (SMA - SMK) Negeri dan Swasta,

pemenuhan kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas juga refleksi perbaikan pengajaran oleh guru, pemenuhan TIK dan pemenuhan fasilitas alat pembelajaran literasi dan juga melakukan koordinasi pemenuhan Perbaikan Gizi untuk peserta didik di tingkat SMA/SMK negeri dan swasta provinsi Sumatera Selatan sehingga nilai capaian Kemampuan Literasi dapat lebih ditingkatkan.

3. Kemampuan Numerasi

Capaian Kemampuan Numerasi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 64,17 % atau naik 5,39 dari tahun 2024 yaitu 58,78%. sedangkan Capaian Kemampuan Numerasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta pada tahun 2025 adalah 61,89%. dimana pada tahun 2024 capaian Kemampuan Literasinya adalah 54,39% atau naik sebesar 7,5 % pada tahun 2025.

Analisis Indikator: Untuk meningkatkan Capaian Kemampuan Numerasi di Tingkat SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan di perlukan pemenuhan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan serta proporsi Tendik bersertifikat, pemenuhan TIK dan pemenuhan fasilitas serta alat pembelajaran Numerasi, pemenuhan kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas, pemenuhan Kepala Sekolah secara Definitif dan Pendamping sekolah di SMA/SMK karena masih banyak terdata Kepala Sekolah yang belum Definitif atau berstatus Pelaksana Tugas (PLT) di sekolah tingkat SMA/SMK Negeri dan Swasta, juga refleksi perbaikan pengajaran oleh guru, dan juga melakukan koordinasi pemenuhan Perbaikan Gizi untuk peserta didik di tingkat SMA/SMK Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan sehingga nilai capaian Kemampuan Numerasi dapat lebih ditingkatkan.

4. Kualitas Pembelajaran

Capaian Kualitas Pembelajaran untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 62,85% sedangkan tahun 2024 mencapai 63,85%. sedangkan Kualitas Pembelajaran untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta pada tahun 2025 adalah 61,38%. sedangkan pada tahun 2024 capaian Kualitas Pembelajaran adalah 61,98%.

Analisis Indikator: Untuk meningkatkan Capaian Kualitas Pembelajaran di Tingkat SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan di perlukan manajemen kelas yang lebih baik dengan cara peningkatan kapasitas peranan guru dan tendik terkait manajemen kelas dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan atau magang/PKL untuk meningkatkan kemampuan manajemen kelas, dukungan peningkatan karir serta dukungan psikologis terhadap Guru dan tendik untuk peningkatan kapasitas pendidikan serta metode pembelajaran, pemenuhan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan serta proporsi Tendik bersertifikat di sekolah tingkat Sekolah Menengah (SMA/SMK) Negeri dan Swasta, juga refleksi perbaikan pengajaran oleh guru, dan juga melakukan penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah, melakukan pembinaan kelembagaan di tingkat SMA/SMK Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan sehingga nilai capaian Kualitas Pembelajaran dapat lebih ditingkatkan.

5. Penyerapan Lulusan SMK

Penyerapan lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melibatkan tantangan keterbatasan kesesuaian keahlian dengan industri, namun terus ditingkatkan melalui keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Penyerapan Lulusan SMK Negeri dan Swasta di

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 80,89% atau naik 3,25 persen dari tahun 2024 sebesar 77,64%.

Analisis Indikator: Kualitas pembelajaran yang link and match dengan dunia kerja/industri, perlu dilakukan tracer study kepada lulusan SMK Negeri dan Swasta, Pendataan kemitraan SMK, Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana, alat praktik siswa dilembaga pendidikan serta dibutuhkan kepemimpinan Kepala Sekolah yang handal dan mampu merangkul berbagai stakeholder, komite sekolah supaya turut serta bisa menjalin mitra atau bekerjasama dengan mitra SMK serta dunia kerja sehingga persentase lulusan SMK di Provinsi Sumatera Selatan bisa terserap dengan lebih tinggi.

6. Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Kompetensi Lulusan

Kepuasan dunia kerja terhadap lulusan mengacu pada penilaian

pemberi kerja terhadap kesesuaian kompetensi (hard skill dan soft skill), etos kerja, dan kemampuan adaptasi lulusan dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2025, Nilai capaian kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan adalah 85,06% atau naik 1,23 dari tahun 2024 yaitu 83,83%.)

Analisis Indikator: Fasilitasi dan Pengelolaan bursa kerja khusus untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK Negeri dan Swasta di provinsi Sumatera Selatan, Fasilitasi penggunaan sarana prasarana yang memadai bagi guru dan peserta didik untuk praktikum, Fasilitasi Guru SMK mengikuti pelatihan, bimtek, dan Magang/PKL di dunia kerja, Praktisi dunia kerja/industri yang mengajar di SMK agar kompetensi peserta didik meningkat dan sesuai kebutuhan dunia kerja.

7. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan

Pada tahun 2025, Iklim Keamanan Satuan Pendidikan di tingkat SMA Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan adalah 70,45 dimana pada tahun 2024 mencapai 70,98. Sedangkan untuk tingkat SMK Negeri dan Swasta pada Tahun 2025 mencapai 69,06.

Analisis Indikator: Pemahaman dan Sistem pelayanan pendampingan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan fisik/ verbal dan seksual, Sosialisasi dan Advokasi kebijakan pendidikan, Fasilitasi peran bimbingan konseling untuk membangun dan membina karakter peserta didik dan guru tendik dan serta pembinaan kelembagaan manajemen sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan.

8. Iklim Kebhinekaan

Pada tahun 2025, Iklim Kebinekaan di tingkat SMA Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan adalah 71,01 sedangkan capaian pada tahun 2024 mencapai 72,48. Untuk iklim Kebinekaan tingkat SMK Negeri dan Swasta pada tahun 2025 mencapai 69,25.

Analisis Indikator: Pemahaman dan Sistem pelayanan pendampingan terkait Kebinekaan di satuan pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi kebijakan pendidikan tentang iklim kebinekaan, Fasilitasi peran bimbingan konseling untuk membangun dan

membina karakter peserta didik dan guru tendik dan serta pembinaan kelembagaan manajemen sekolah di tingkat SMA/MK Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan Iklim Kebinekaan.

9. Iklim Inklusivitas

Iklim Inklusivitas adalah suasana atau lingkungan yang menerima, menghargai, dan merayakan perbedaan individu (suku, agama, ras, gender, kemampuan fisik dan mental, dsb) sehingga setiap orang merasa diterima. Pada tahun 2025, Iklim Inklusivitas di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan adalah 58,75% atau naik 0,68 dari tahun 2024 sebesar 58,07%. sedangkan Iklim Inklusivitas di tingkat Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 57,03%.

Analisis Indikator: Pemahaman dan Sistem pelayanan pendampingan terkait Iklim Inklusivitas di satuan pendidikan, Fasilitasi peran bimbingan konseling untuk membangun dan membina karakter peserta didik dan guru tendik dan serta pembinaan kelembagaan manajemen sekolah di tingkat SMA/MK Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan Iklim Inklusivitas.

2) Urusan Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendataan Long Form Tahun 2020–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat, kondisi kesehatan lingkungan, serta pola dan gaya hidup.

Pada tahun 2025, Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan mencapai 74,58 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini juga telah melampaui rata-rata Nasional yang tercatat sebesar 74,47 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum derajat

kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan berada pada level yang lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Perbedaan capaian Angka Harapan Hidup antar kabupaten/kota masih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, khususnya perbedaan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Daerah perkotaan cenderung memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi seiring dengan akses layanan kesehatan yang lebih memadai, ketersediaan tenaga medis, serta sarana dan prasarana pendukung kesehatan yang lebih lengkap.

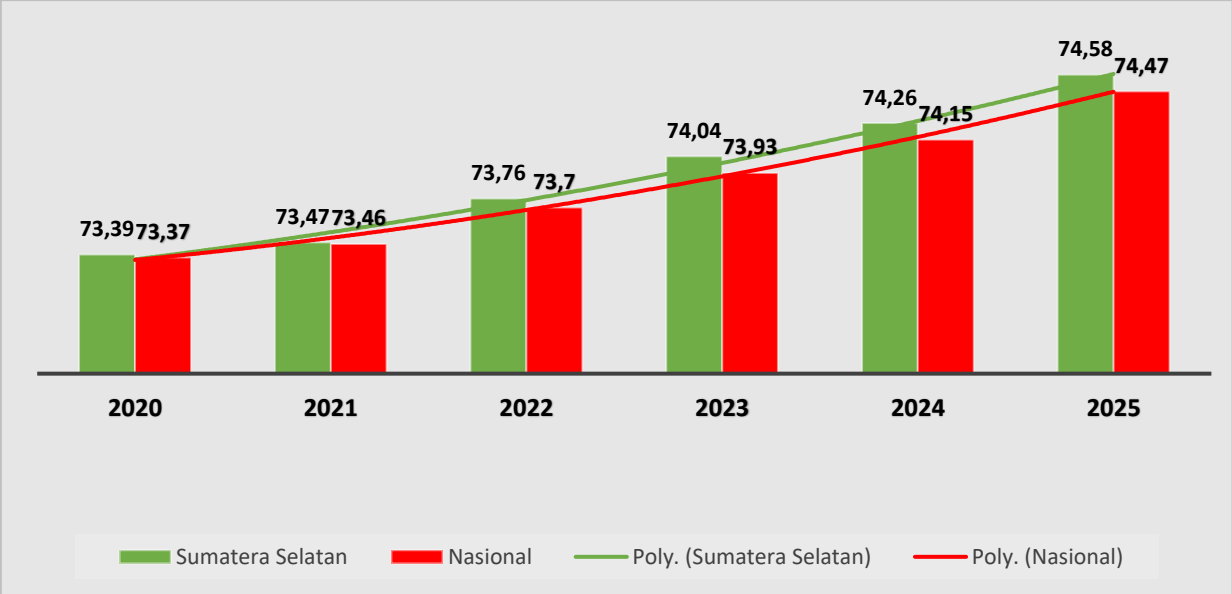
Secara keseluruhan, tren Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan ke depan.

Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2025

NO	WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ogan Komering Ulu	72,88	72,92	73,19	73,44	73,59	73,97
2	Ogan Komering Ilir	73,44	73,5	73,81	74,09	74,23	74,47
3	Muara Enim	73,52	73,63	73,97	74,29	74,49	74,82
4	Lahat	72,56	72,68	73,02	73,36	73,58	73,93
5	Musi Rawas	73,19	73,3	73,65	73,96	74,16	74,45
6	Musi Banyuasin	73,52	73,6	73,92	74,22	74,42	74,72
7	Banyuasin	73,55	73,64	73,98	74,29	74,47	74,73
8	OKU Selatan	72,69	72,7	72,88	73,21	73,44	73,74
9	OKU Timur	73,7	73,76	74,04	74,31	74,51	74,8
10	Ogan Ilir	72,37	72,49	72,86	73,2	73,43	73,78
11	Empat Lawang	70,21	70,25	70,55	70,81	70,93	71,14
12	PAU	73,22	73,28	73,56	73,84	74,02	74,33
13	Musi Rawas Utara	72,34	72,42	72,73	73,01	73,17	73,46
14	Kota Palembang	74,27	74,47	74,91	75,37	75,77	76,26
15	Kota Prabumulih	73,72	73,85	74,22	74,58	74,87	75,33
16	Kota Pagar Alam	72,66	72,8	73,22	73,61	73,88	74,18
17	Kota Lubuk Linggau	73,75	73,88	74,27	74,67	74,97	75,46
Sumatera Selatan		73,39	73,47	73,76	74,04	74,26	74,58
Nasional		73,37	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber: BPS 2025

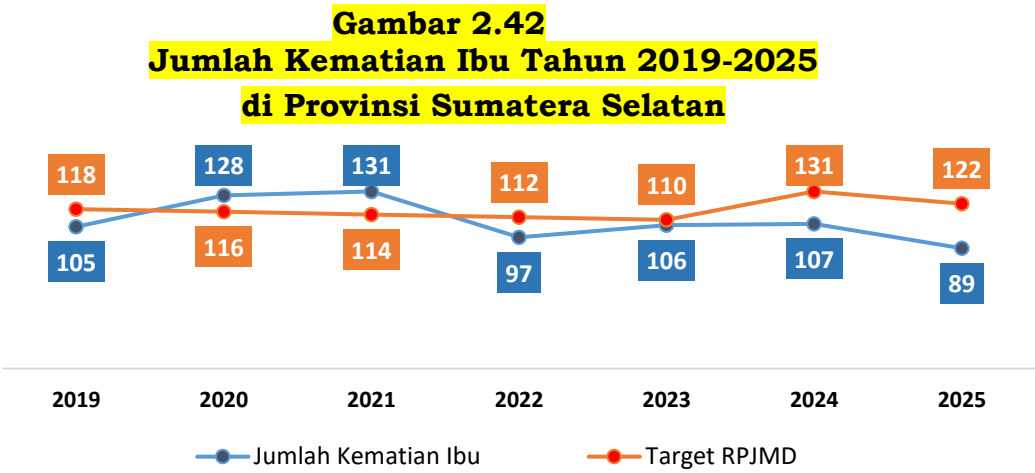
Gambar 2.41
Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Sumsel dan Nasional
Tahun 2020-2025



Sumber: BPS 2025

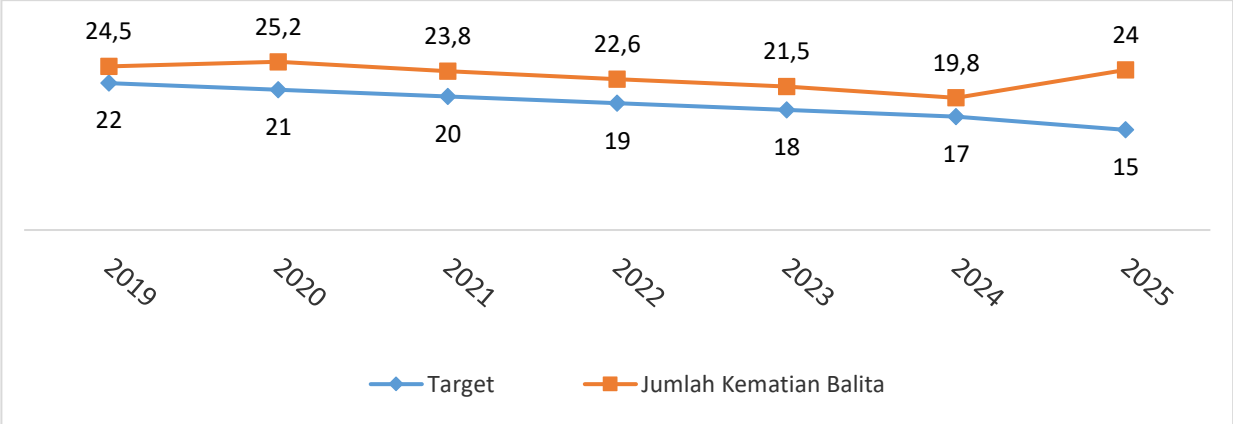
Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 105 kejadian dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 menjadi 128 kejadian dan 131 kejadian, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97 kejadian, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 106 kejadian. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 107, kemudian pada tahun 2025 jumlah kematian ibu menurun menjadi 89.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gambar 2.43
Jumlah Kematian BalitaTahun 2019-2025
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Perkembangan angka kematian balita di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2019–2025 menunjukkan dinamika yang menjadi dasar penguatan kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Meskipun capaian pada tahun 2019–2024 masih berada di atas target, evaluasi kebijakan dan penguatan intervensi kesehatan ibu dan bayi mulai menunjukkan arah perbaikan yang positif, tercermin dari penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025, meskipun masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, menjadi sinyal awal keberhasilan penguatan sistem pelayanan dan pencatatan kesehatan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya efektivitas program kesehatan ibu dan anak, serta semakin baiknya koordinasi lintas sektor dan peran aktif fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.

Prevalensi Balita Stunting

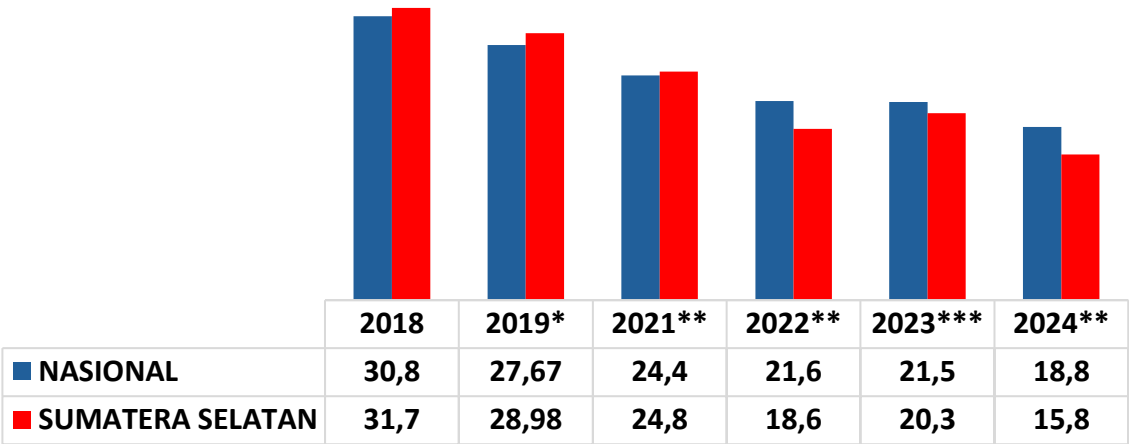
Prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam jangka menengah, meskipun masih mengalami fluktuasi pada periode terakhir. Pada tahun 2018, prevalensi stunting Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 31,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 30,8 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019, prevalensi stunting menurun menjadi 28,98 persen, dan kembali menurun secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 24,8 persen, sejalan dengan tren penurunan nasional.

Penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2022, di mana prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan mencapai 18,6 persen, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 21,6 persen. Namun demikian, pada tahun 2023 prevalensi stunting kembali mengalami peningkatan menjadi 20,3 persen, lebih rendah dari nasional sebesar 21,5

persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan hasil intervensi penurunan stunting.

Pada tahun 2024, prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan tren penurunan menjadi 15,8 persen, lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar 18,8 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas penguatan intervensi pencegahan stunting yang mulai menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kesenjangan terhadap target nasional sebesar 14 persen. Percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan diarahkan pada penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi, peningkatan konvergensi lintas perangkat daerah, serta penajaman sasaran berbasis wilayah dan kelompok berisiko tinggi.

Gambar 2.44
Tren Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2024



Sumber: Riset Kesehatan Dasar RI;
*Laporan Integrasi (Susenas) Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019
** Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, 2022 dan 2024
*** Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Prevalensi stunting pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan serta perbandingannya dengan angka prevalensi stunting nasional sebesar 18,8% dan rata-rata provinsi sebesar 15,8%. Berdasarkan grafik, terlihat adanya variasi capaian prevalensi stunting yang cukup signifikan antar kabupaten/kota.

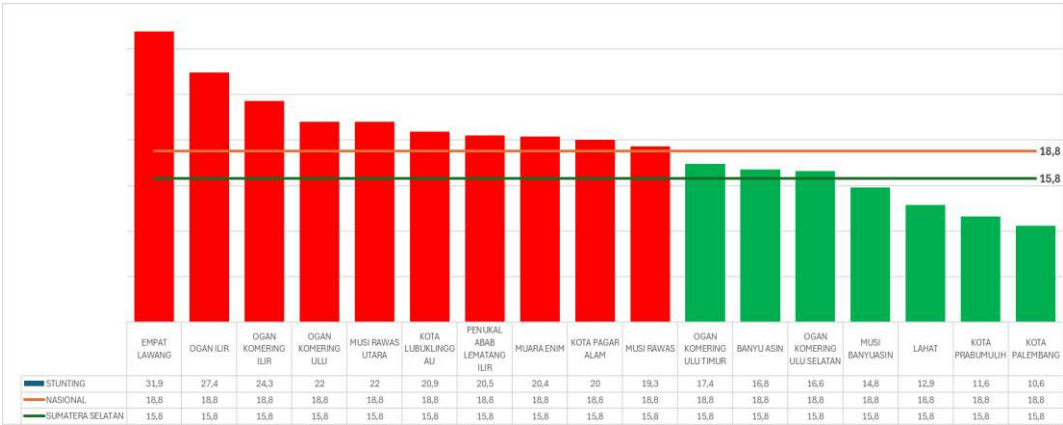
Kabupaten Empat Lawang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu sebesar 31,9%, diikuti oleh Kabupaten Ogan Ilir (27,4%) dan Kabupaten

Ogan Komering Ulu (24,3%). Capaian tersebut berada jauh di atas angka nasional maupun rata-rata provinsi. Selain itu, beberapa kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Musi Rawas juga masih menunjukkan prevalensi stunting di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Sementara itu, sejumlah kabupaten/kota telah mencapai prevalensi stunting di bawah angka nasional dan provinsi. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (17,4%), Kabupaten Banyuasin (16,8%), Kabupaten Ogan Komering Ulu (16,6%), Kabupaten Musi Banyuasin (14,8%), Kabupaten Lahat (12,9%), Kota Prabumulih (11,6%), dan Kota Palembang (10,6%) sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

Secara keseluruhan, data pada grafik menunjukkan bahwa meskipun beberapa kabupaten/kota telah mencapai capaian prevalensi stunting yang lebih baik, masih terdapat kabupaten/kota dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi penurunan stunting yang lebih terfokus dan terintegrasi, terutama pada wilayah dengan prevalensi stunting di atas rata-rata provinsi dan nasional.dapat dilihat pada tren dibawah ini :

Gambar 2.45
Tren Prevalensi Balita Stunting Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024

Penyakit Menular

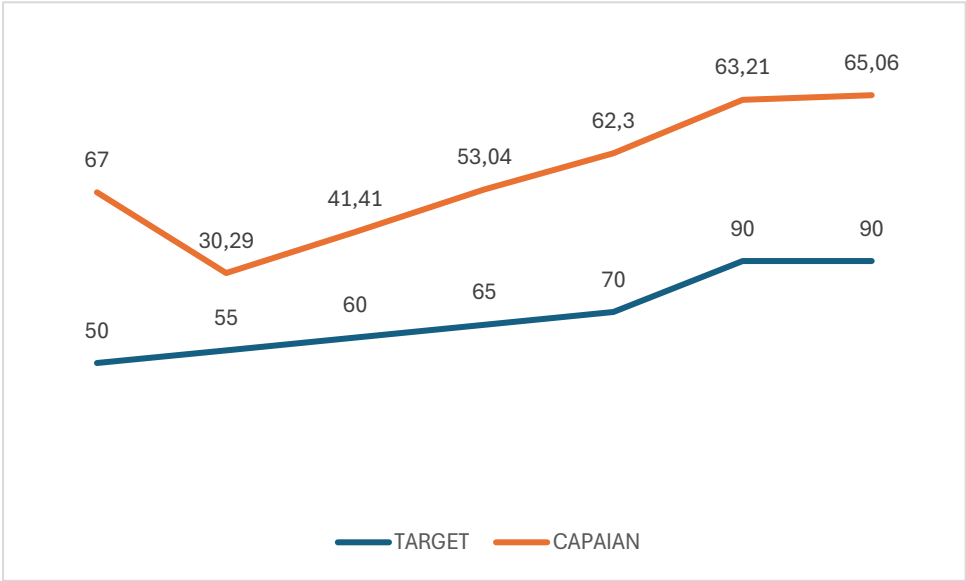
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit Incidence (API) Malaria mengalami fluktuatif dari 0,08 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 0,01 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 0,001 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,0045 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,007 persen. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,001 persen. Demikian hal ini juga menunjukkan bahwa kasus malaria di Sumatera Selatan sangat sedikit. cakupan pengobatan HIV/AIDS mengalami fluaktif, tahun 2019 sebesar 92 persen menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 83 persen, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 88 persen dan tahun 2022 tidak mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 96 persen dan mengalami penurunan menjadi 80 persen pada tahun 2024. Kasus DBD mengalami fluktuasi, Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2019, Pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 2.359 kasus dan tahun 2019 jumlah penderita DBD sebanyak 2.815 kasus. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 1.135 kasus. Akan tetapi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kasus pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.854 kasus. Pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 2.803 kasus, pada tahun 2024, jumlah kasus DBD di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi yaitu sebanyak 6.223 kasus, tahun 2025 mencapai 4.130 kasus dengan 22 kematian. Jumlah itu turun dibandingkan 2024, namun angkanya lebih tinggi dibandingkan 2022 dan 2023.

Tuberculosis (TB)

Angka Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage TBC) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 67 persen menurun menjadi 28 persen pada tahun 2020, namun meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2021 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar 62,3 persen. Namun pada tahun 2024 menurun cukup signifikan menjadi 33,21 persen. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Treatment Coverage TBC masih banyak pasien baru Positif yang belum terdeteksi,

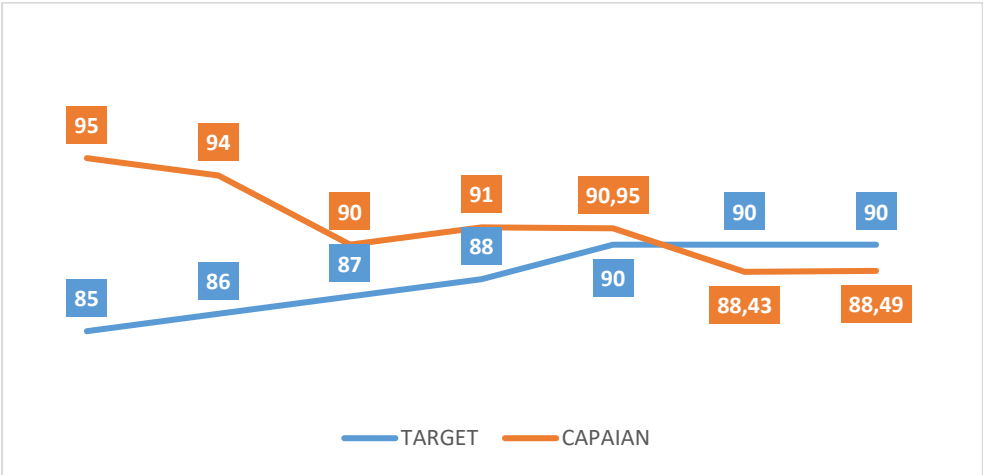
Hal ini memerlukan perhatian kabupaten/kota dan Puskesmas untuk meningkatkan program deteksi/penemuan kasus TB baru.

Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage TBC) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

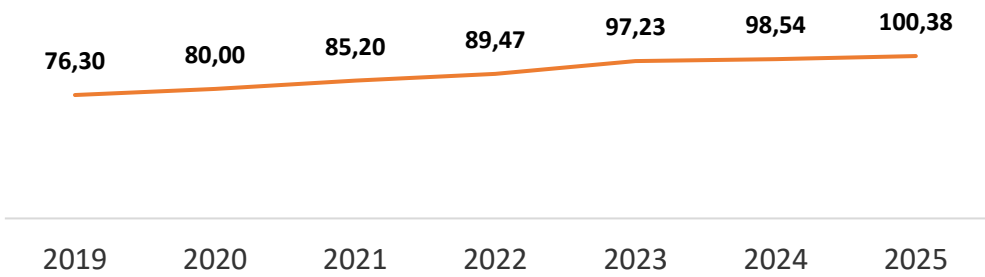
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Gambar 2.56
Persentase Universal Health Coverage (UHC)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Capaian kepesertaan jaminan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan progresif, mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas akses jaminan kesehatan. Peningkatan cakupan dari 76,30% pada tahun 2019 menjadi 98,54% pada tahun 2024, serta mendekati Universal Health Coverage pada tahun 2025 sebesar 99,95%, mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang semakin terarah, khususnya dalam perluasan kepesertaan kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Lonjakan capaian pada tahun 2023 menjadi 97,23% bertepatan dengan penguatan kebijakan pembiayaan kesehatan daerah, termasuk peluncuran Program Sumsel Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) pada September 2023, yang berperan sebagai instrumen akselerasi kepesertaan jaminan kesehatan. Meski demikian, pada tahun 2024 masih terdapat sekitar 1,46% penduduk yang belum terlindungi, yang umumnya berasal dari kelompok dengan dinamika sosial ekonomi tinggi, mobilitas penduduk, serta permasalahan validitas data kepesertaan.

Dalam konteks tersebut, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola data melalui tindak lanjut yang lebih intensif antara Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam penanganan data peserta yang terindikasi ganda maupun tidak aktif. Selain itu, advokasi penganggaran BPJS kuota daerah secara berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk menjaga kesinambungan cakupan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Keberhasilan pencapaian Universal Health Coverage secara menyeluruh juga sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik dalam aspek regulasi, pendanaan, maupun koordinasi lintas sektor.

Provinsi Sumatera Selatan terus memperluas layanan skrining dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum sejak 2019 hingga 2025. Pada awal periode, cakupan layanan baru menjangkau sekitar 50–55% masyarakat melalui Puskesmas dan program promotif-preventif. Sejak 2021, implementasi Sumsel Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) dan layanan mobile/keliling meningkatkan cakupan secara signifikan hingga mencapai hampir seluruh penduduk pada 2024–2025. Layanan ini mencakup skrining tekanan darah, gula darah, kolesterol, deteksi risiko penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi kesehatan, mendukung deteksi dini dan pencegahan komplikasi, arah kebijakan difokuskan pada perluasan cakupan layanan ke seluruh kecamatan, integrasi dengan program promotif-preventif, optimalisasi data dan sistem informasi kesehatan, serta koordinasi lintas sektor, sehingga Provinsi Sumatera Selatan optimistis dapat mewujudkan Universal Health Coverage dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata. Cakupan imunisasi bayi lengkap di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak 2019 hingga 2025. Pada awal periode, cakupan baru sekitar 72–75%, masih di bawah target, terutama akibat keterbatasan akses di daerah terpencil dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sejak 2021, penguatan layanan Puskesmas, program Sumsel Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat), kampanye edukasi, serta layanan keliling (mobile clinic) berhasil meningkatkan cakupan hingga mendekati 100% pada 2025. Layanan ini mendukung deteksi dini, pencegahan penyakit, dan penguatan kesehatan anak, sekaligus menjadi bagian dari strategi menurunkan angka kematian bayi dan balita. Prioritas pembangunan kesehatan anak difokuskan pada peningkatan cakupan imunisasi lengkap, penguatan kampanye edukasi orang tua, perluasan layanan outreach, dan optimalisasi sistem data kesehatan untuk monitoring real-time, sehingga target dapat tercapai secara berkelanjutan. Persentase hipertensi terkontrol di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan sejak 2019 hingga 2025. Pada awal periode, cakupan pasien hipertensi yang berhasil dikendalikan baru sekitar 35–38%, akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah dan keterbatasan akses pengobatan. Sejak 2021, melalui penguatan layanan Puskesmas, program Sumsel Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat), serta kampanye edukasi pola hidup sehat, persentase pasien hipertensi terkontrol meningkat signifikan hingga mencapai 70%

pada 2025. Strategi ini meliputi skrining rutin, edukasi diet dan olahraga, pemantauan tekanan darah, serta pengobatan berkesinambungan.

Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Target capaian Pemerintah daerah provinsi untuk indikator ini adalah 100%. Adapun capaian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.32
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2025

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Indikator ini juga merupakan indikator provinsi dalam menerapkan SPM Kesehatan.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB. Adapun

capaian Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2025 telah mencapai 100%.

Tabel 2.33
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2025

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Upaya pencapaian target Indikator SPM tahun 2025 memiliki beberapa kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. SPM, Pelayanan Krisis Kesehatan Akibat bencana hanya berlaku di Provinsi sehingga mengalami kesulitan bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan kegiatan penanganan krisis kesehatan di kabupaten/kota
2. Sulitnya menyusun kebutuhan anggaran (unit cost) karena perlu melibatkan lintas sektor, khususnya mekanisme pencairan dana pasca bencana yang sifatnya sewaktu-waktu dan memerlukan pencairan dana yang sifatnya segera
3. Upaya pembinaan pada masyarakat terdampak/beresiko bencana belum dilakukan secara maksimal hanya dilakukan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana saja. Sehingga masyarakat yang beresiko dan tinggal di wilayah bencana seperti daerah aliran sungai, rawan longsor dan daerah resiko kabut asap belum mendapatkan pembinaan dan advokasi cara pencegahan dan pertolongan dampak krisis bencana secara maksimal.
4. Kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah provinsi Sumatera Selatan, merupakan kejadian bencana yang selalu berulang, seperti banjir, kabut asap, kecelakaan air kebakaran rumah penduduk dan banjir bandang, untuk itu diperlukan upaya bersama meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan dapat mencegah terjadinya bencana
5. Baru sebagian kabupaten/kota belum mempunyai rencana kontijensi dan rencana operasi sehingga menyulitkan upaya penanggulangan dan

pengecahan krisis kesehatan

6. Badan Penanggulangan Jaminan Sosial bidang Kesehatan tidak menanggung masyarakat terkait bencana.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Tim Penerapan SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran per unit cost untuk kebutuhan pelaksanaan SPM kesehatan.
4. Memberikan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat terutama daerah rawan bencana/resiko tinggi, berdasarkan rencana operasi, mitigasi, dan kontijensi, serta memberikan materi upaya pemahaman serta mencegah terjadi bencana dan cara pertolongan dirinya sendiri (P3K) masyarakat yang beresiko tinggi.
5. Mensosialisasikan (Standar Pelayanan Minimum) SPM, ke pengelola program sampai ketingkat PUSTU, Puskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten/Kota, upaya memberikan pemahaman dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada pra, saat dan pasca krisis bencana, untuk memastikan semua korban/warga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terlayani di pos kesehatan, pelayanan kesehatan swasta, puskesmas dan rumah sakit.
6. Membuat rencana kontijensi, dan peta resiko mulai dari unit terkecil, desa, kecamatan per kejadian bencana untuk memudahkan operasi penanganan bencana saat terjadi bencana krisis kesehatan.

Kinerja Layanan Rumah Sakit Daerah

Realisasi capaian kinerja sektor Kesehatan menunjukkan hasil yang positif dan menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pengelolaan rumah sakit daerah dalam meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Capaian tersebut tercermin dari pemenuhan indikator kinerja utama pada masing-masing rumah sakit daerah, baik dari aspek mutu layanan, kepuasan masyarakat, akses pelayanan, akuntabilitas kinerja, maupun kinerja keuangan BLUD.

1. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, RSUD Siti Fatimah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit mencapai 89,26% dari target 86%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan standardisasi mutu pelayanan rumah sakit telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan juga tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 89,21%, lebih tinggi dari target 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dalam aspek pelayanan unggulan, strata layanan jantung meningkat dari kategori dasar menjadi madya, yang menandakan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan spesialisistik. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah mencapai 131,65% dari target, mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan optimal. Sementara itu, akuntabilitas kinerja rumah sakit juga mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan nilai SAKIP sebesar 80,59 dari target 73. Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola dan manajemen kinerja yang semakin baik.

2. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja Rumah Sakit Khusus Mata pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Program Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Kelompok Target (PENGGARIS) terealisasi sebesar 93% dari target 90%. Program ini telah menjangkau pemeriksaan kesehatan mata siswa/siswi di 33 sekolah SMA/SMK di berbagai kabupaten/kota serta

pemberian kacamata kepada 2.800 siswa secara penuh. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 8 dari target 85. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan yang telah memenuhi standar, didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Jumlah kunjungan pasien mencapai 40.250 pasien atau sebesar 110% dari target, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap RSK Mata sebagai rumah sakit rujukan kelas B. Selain melayani pasien rujukan BPJS dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, RSK Mata juga menyediakan pelayanan umum, VIP, serta Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 89,82% dari target 90% menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan. Dalam aspek peningkatan kompetensi layanan rumah sakit, capaian SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar masih sebesar 52,5%, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui perencanaan dan fasilitasi pelatihan pada periode selanjutnya.

3. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, RS Khusus Gigi dan Mulut menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dengan beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Program BERKAT PLUS Operasi “Lesung” (operasi celah bibir dan langit-langit) terealisasi sebesar 93% dari target 100%. Dari 15 rencana tindakan, satu pasien tidak dapat dilakukan operasi karena kondisi medis yang tidak memungkinkan untuk tindakan bius umum. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 81,15 dari target 80. Peningkatan kepuasan masyarakat didorong oleh penerapan sistem pendaftaran online, penambahan dokter spesialis, ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai standar akreditasi, serta kelengkapan layanan spesialistik. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam percepatan pengumpulan data survei kepuasan masyarakat akibat keterbatasan sarana survei digital.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90,84% menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai standar, antara lain keterbatasan sarana operasi, ketenagaan gizi, pengembangan SDM, serta dukungan sarana penunjang lainnya. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional telah mencapai 100%, yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan pelayanan kefarmasian. Namun, indikator peningkatan kompetensi layanan rumah sakit belum tercapai akibat keterbatasan SDM dokter spesialis tertentu.

4. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam pelayanan kesehatan jiwa. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,49% dari target 87,6%, yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Persentase penanganan pasien rujukan mencapai 100%, mencerminkan optimalnya akses pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan BPJS maupun peserta UHC Sumsel Berkat. Dalam aspek pengembangan SDM, persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kemampuan minimal 20 JPL per tahun mencapai 91,08% dari target 50%.

Nilai SAKIP rumah sakit tercatat sebesar 80,37 dari target 93,1, dengan capaian 86,33%. Meskipun belum mencapai target, terdapat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ke depan. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan BLUD mencapai sebesar 127,53% dari target, didukung oleh kegiatan promosi, publikasi layanan, serta pelaksanaan medical check up.

Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Daerah

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh rumah sakit daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada kategori baik dan sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit daerah telah memenuhi standar pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan prima (*service excellent*) secara berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengambil kebijakan, pimpinan unit pelaksana, hingga seluruh pelaksana pelayanan publik, dalam rangka meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Laporan realisasi capaian indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
Triwulan IV tahun Anggaran 2025**

No	Rumah Sakit Daerah	Target	Realisasi
1.	Siti Fatimah	85%	89,21%
2.	RSK Gigi dan Mulut	80	81,15
3.	RSK Mata	85	87
4.	Ernaldi Bahar	87,6	89,49

Dari tampilan tabel diatas bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di seluruh rumah sakit daerah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan memiliki kualitas yang baik dan sangat baik. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima (*service excellent*) diperlukan komitmen dalam memberikan pelayanan baik oleh pengambil Keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan public.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. Jalan Nasional merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, jalan strategis Nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antaribukota Kabupaten/ kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. Jalan Kabupaten merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
4. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari :

1. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
2. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang – Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Barat Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung:

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah

Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)

(1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment

vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

(2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.

(3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu

Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja mempengaruhi mobilitas orang maupun barang. Salah satu Infrastruktur penentu ialah infrastruktur jalan yang dituntut supaya mampu memfasilitasi. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Jalan di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Total panjang jalan sampai dengan tahun 2023 sebesar 17.876,27 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.581,148 km (8,84%), Jalan Provinsi sepanjang 1.779,27 Km (9,95%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 14.515,85 Km (81,20%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35
Tabel Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2023

		TAHUN 2022	TAHUN 2023
PANJANG JALAN		1.600,16	1.581,148
KONDISI BAIK	Km	807,22	844,598
	%	50,45	53,42
KONDISI SEDANG	Km	705,08	690,61
	%	44,06	43,68

		TAHUN 2022	TAHUN 2023
PANJANG JALAN		1.600,16	1.581,148
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	78,45	40,86
	%	4,90	2,58
KONDISI RUSAK BERAT	Km	9,42	5,08
	%	0,59	0,32
KONDISI JALAN MANTAP	Km	1.512,3	1.535,208
	%	94,51	97,09

Sumber : <https://data.pu.go.id/>, 2023

Tabel 2.36
Tabel Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2022 - 2023

		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
PANJANG JALAN		13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93
KONDISI BAIK	Km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47
	%	33,92	30,37	40,74	34,81
KONDISI SEDANG	Km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63
	%	15,94	43,40	16,84	42,06
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56
	%	26,92	11,79	18,37	7,53
KONDISI RUSAK BERAT	Km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27
	%	23,21	14,44	24,05	15,60
KONDISI JALAN MANTAP	Km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10
	%	49,86	73,77	57,58	76,87

Sumber : <https://data.pu.go.id/>, 2023

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 nomor 130/KPTS/DIS PU BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang sebesar1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam

Jaringan Primer Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 Km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km. Adapun kondisi jalan provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37
Tabel Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023

		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi
PANJANG JALAN		1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27
KONDISI BAIK	Km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04
KONDISI SEDANG	Km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88
KONDISI RUSAK BERAT	Km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97
KONDISI JALAN MANTAP	Km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45
	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Ruas jalan berdasarkan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km (88 ruas) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Daftar Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023

NO	NO RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	KETERANGAN
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	0,36	PALEMBANG
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	1,40	PALEMBANG
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	1,00	PALEMBANG
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	1,20	PALEMBANG
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL. ISKANDAR (PALEMBANG)	1,23	PALEMBANG
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	0,40	PALEMBANG
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	1,00	PALEMBANG
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1,70	PALEMBANG
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	0,80	PALEMBANG
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	1,14	PALEMBANG
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	2,18	PALEMBANG
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2,00	PALEMBANG
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	4,22	PALEMBANG
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	1,69	PALEMBANG
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	1,31	PALEMBANG
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU - PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	5,10	PALEMBANG
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	3,40	PALEMBANG
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2,58	PALEMBANG
19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5,00	PALEMBANG
20	1	20	K	JLN.PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) - BTS. BANYUASIN	1,40	PALEMBANG
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	2,40	PALEMBANG
22	1	22	K	JLN. KAPT. ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	5,40	PALEMBANG
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	12,00	PALEMBANG
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	5,25	PALEMBANG
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	2,70	BANYUASIN
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5,60	BANYUASIN
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. KAB. BANYUASIN)	7,70	PALEMBANG
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO – BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	2,23	PALEMBANG
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKAJADI (BANYU ASIN)	5,75	BANYUASIN
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKOMORO (BANYUASIN)	8,78	BANYUASIN

NO	NO RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	KETERANGAN
31	4			PLAJU – SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB OKI	19,75	PALEMBANG
32	5			JLN. KTM. RAMBUTAN – SP. LOROK	21,33	BANYUASIN
33	6			SP. OPI - BABATAN SAUDAGAR - SRIJABO	35,00	BANYUASIN
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA – SP. LOROK	11,00	OGAN ILIR
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN – CELIKAH (KAYU AGUNG)	40,40	OKI
36	9			SP. MERANJAT – BTS KAB. MUARA ENIM	50,60	OGAN ILIR
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM – PAYARAMAN	8,25	OGAN ILIR
38	11			TANJUNG RAJA – SP. TAMBANG RAMBANG	59,20	OGAN ILIR
39	12			SP. PENYANDINGAN – BTS. KAB. OKUT	24,20	OGAN ILIR
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	11,10	BANYUASIN
41	14			TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	6,80	OKUT
42	15			CEMPAKA - TRANS SP. 1	12,51	OKUT
43	16			SP. TAMBANG RAMBANG – BTS. KAB. OKU	23,50	OKI
44	17			LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	22,28	OKI
45	18			BTS. KAB. OKI – SP. KEPUH	50,95	OKUT
46	19			BTS. KAB. OGAN ILIR- PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	28,30	OKUT
47	20			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	40,84	MUBA
48	21			BETUNG - PETANGGAN	21,30	OKUT
49	22			DABUK REJO – BTS. KAB. OKUT	15,30	OKUT
50	23			PETANGGAN – TJ. KEMUNING – BTS. KAB. OKI	18,90	OKUT
51	24			GUMAWANG - RASUAN (SP. KEPUH)	23,55	OKUT
52	25			PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	21,05	OKUT
53	26			GUMAWANG – PETANGGAN	21,40	OKUT
54	27			SP. KEPUH – KURUNGAN NYAWA	41,70	OKUT
55	28			KURUNGAN NYAWA – GUMAWANG	28,60	OKUT
56	29			KURUNGAN NYAWA – MARTAPURA	21,40	OKUT
57	30			MARTAPURA – SP. MARTAPURA	29,15	OKUT
58	31			SP. SUKAJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	31,25	OKU
59	32			SP. LENGKITI - SP MARTAPURA	21,05	OKU
60	33			SP. MARTAPURA – MUARA DUA	25,40	OKUS
61	34			MUARA DUA – SP. HAJI	11,00	OKUS
62	35			SP. HAJI – SP. CAMPANG	35,00	OKUS
63	36			SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	35,60	OKUS
64	37			SP. MUARA SINDANG - BTS. PROV. BENGKULU	25,40	OKUS
65	38			MUARA DUA - SP. SENDER	41,75	OKUS
66	39			SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	18,03	OKUS
67	40			LEmbak – BTS. KAB. OGAN ILIR	20,45	MUARA ENIM
68	41			LEmbak - MODONG (BTS. KAB. PALI)	16,90	MUARA ENIM
69	42			BTS. KAB. OGAN ILIR – BERINGIN	24,10	MUARA ENIM
70	43			SP. RAJA - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	46,10	MUARA ENIM
71	44			SP. AIR ITAM – SP. TALANG BULANG	36,50	PALI
72	45			BTS. KAB. MUBA-SP. AIR ITAM	36,40	PALI
73	46			JLN. SP. BELIMBING – PENDOPO (PALI)	35,00	PALI
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	32,00	PALI
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	39,00	PALI
76	49			SP. SUGIHWARAS – BTS. KAB. LAHAT	51,03	OKI
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	37,50	LAHAT
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM – SP. AIR DINGIN	35,17	LAHAT
79	52			MUARA SIBAN – SP. EMBACANG	48,00	LAHAT
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ.ARO (PAGARALAM)	6,80	PAGAR ALAM
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	7,30	PAGAR ALAM
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	27,60	EMPAT LAWANG
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	13,62	LUBUK LINGGAU DAN MUSI RAWAS
84	57			TEBING TINGGI – TANJUNG RAYA	40,03	EMPAT LAWANG
85	58			SP. PERIUK – TUGU MULYO – TERAWAS	36,95	MUSI RAWAS
86	59			PAGARALAM – TANJUNG RAYA	47,00	PAGAR ALAM
87	60			TERAWAS – TABATINGGI – MAUR	59,86	EMPAT LAWANG
88	61			TANJUNG RAYA – BTS. PROV. BENGKULU	32,23	EMPAT LAWANG
				TOTAL	1779,27	

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi Tahun 2023 yaitu sebesar 88,15%. Kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.39
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya
di Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	PANJANG	KONDISI JALAN PROVINSI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	PALEMBANG	74,08	59,55	80,39	9,48	12,80	4,80	6,48	0,25	0,34
2	BANYUASIN	53,68	12,78	23,81	29,30	54,58	7,70	14,34	3,9	7,27
3	MUBA	40,84	8,39	20,54	20,60	50,44	11,85	29,02	0,00	0,00
4	OGAN ILIR	102,18	36,61	35,83	48,39	47,36	14,67	14,36	2,51	2,46
5	OKI	204,68	60,02	29,32	87,21	42,61	30,05	14,68	27,4	13,39
6	OKU	101,65	29,35	28,87	56,20	55,29	15,3	15,05	0,80	0,79
7	OKUT	269,46	199,34	73,98	42,52	15,78	16,00	5,94	11,60	4,30
8	OKUS	192,18	148,36	77,2	34,47	17,94	5,75	2,99	3,60	1,87
9	MUARA ENIM	123,48	98,53	79,79	14,26	11,55	3,69	2,99	7,00	5,67
10	PALI	186,00	152,5	81,99	21,42	11,52	7,88	4,24	4,20	2,26
11	PAGARALAM	14,10	6,63	44,89	4,75	33,69	2,97	21,06	0,05	0,35
12	LAHAT	83,17	50,57	60,80	27,00	32,46	5,60	6,73	0,00	0,00
13	EMPAT LAWANG	146,86	104,26	70,99	28,85	19,64	6,75	4,60	7,00	4,77
14	MURA	113,45	94,93	83,68	11,6	10,22	4,52	3,98	2,40	2,12
15	MURATARA	59,86	51,66	86,30	6,80	11,36	1,40	2,34	0,00	0,00
16	LUBUKLINGGAU	13,62	8,42	61,82	4,00	29,37	1,20	8,81	0,00	0,00
TOTAL		1.779,27	1.121,60	63,04	446,85	25,11	140,13	7,88	70,71	3,97
% KONDISI			88,15 (JALAN DALAM KONDISI MANTAP)				11,85 (JALAN DALAM KONDISI RUSAK)			

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023.

Untuk meningkatkan nilai rasio kemantapan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus dalam penanganan infrastruktur jalan yaitu penanganan jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Sementara untuk mempertahankan nilai rasio kemantapan jalan difokuskan pada pemeliharaan jalan dalam kondisi baik dan sedang. Indikator tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, juga dukungan pendanaan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk melebarkan jalan menuju standar dan mempertahankan kondisi jalan mantap.

Analisis perbandingan kinerja dan capaian tahun lalu dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan *baseline* pengukuran target kinerja di tahun berikutnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan handal, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta pemanfaatan pendanaan di luar APBD Provinsi Sumatera Selatan harus dioptimalkan untuk mencapai target rasio persentase kemantapan jalan. Penanganan jalan Provinsi Sumatera Selatan juga harus fokus pada peningkatan kualitas jalan agar tercapainya umur rencana jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan terciptanya keselamatan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengembangan jaringan jalan juga berguna untuk mendukung terwujudnya konektivitas antar wilayah. Selain itu untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial, infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Berikut ini Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2.40
Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha)
1	D.I. Komering Selatan/Way Komering	Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. OKU Timur	57.488
2	D.I. Kelingi Tugu Mulyo	Kab. Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau	10.163
3	D.I. Air Keruh	Kab. Empat Lawang	3.152
4	D.I. Lintang Kanan	Kab. Empat Lawang	3.054
5	D.I. Lintang Kiri	Kab. Empat Lawang	3.038
6	D.I. Air Lakitan	Kab. Musi Rawas	9.500
7	D.I. Muara Riben	Kota Pagar Alam	3.050
	Jumlah		89.445

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2.41
Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
Kab. Banyuasin		
1	D.I.R. Air Saleh	17.011
2	D.I.R. Air Senda	4.711
3	D.I.R. Delta Air Sugihan Kiri	34.690
4	D.I.R. Delta Cinta Manis	5.554
5	D.I.R. Delta Upang	5.896
6	D.I.R. Gasing Puntian	4.830
7	D.I.R. Ka. Agung Hilir	9.777
8	D.I.R. Karang Agung I	6.300
9	D.I.R. Kr. Agung Tengah	4.001
10	D.I.R. Kumbang Padang	4.268
11	D.I.R. Padang Sugihan	10.200
12	D.I.R. Pulau Rimau	28.184
13	D.I.R. Telang I	18.676
14	D.I.R. Telang II	9.660
Kab. Musi Banyuasin		
15	D.I.R. Air Tenggulang	6.156
16	D.I.R. Kr. Agung Hilir	6.350
17	D.I.R. Kr. Agung II/Tengah	17.000

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
Kab. Ogan Ilir		
18	D.I.R. Lbk. Tanjung Seteko	3.876
19	D.I.R. Ogan Keramasan I + II	9.660
Kab. Ogan Komering Ilir		
20	D.I.R. M. Gajah Mati	5.950
21	D.I.R. Sugihan Kanan	20.885
22	D.I.R. Sungai Lumpur	3.500
	JUMLAH	237.133

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015, memiliki luasan total sebesar 41.541 Ha untuk Daerah Irigasi dan 49.509 Ha untuk Daerah Irigasi Rawa.

Pada tahun 2023, Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi Sumsel 2023 dengan kondisi baik 77,99%, rusak berat 1,74%.

Tabel 2.42
Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Empat Lawang						
1	D.I. Air Keban	1.500	89,37	9,55	1,08	0,00
Kab. Lahat						
2	D.I. Air Gohong	1.200	63,87	16,17	18,74	1,23
3	D.I. Air Makim	1.000	98,09	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Air Manna I	1.500	87,17	5,43	7,40	0,00
5	D.I. Air Merendang	1.341	95,22	4,78	0,00	0,00
6	D.I. Air Mulak (total lost karena faktor bencana longsor)	1.645	0,00	0,00	0,00	0,00
7	D.I. Air Pangi	1.001	75,88	16,08	8,04	0,00
8	D.I. Masam Bulau	1.500	98,29	1,71	0,00	0,00
9	D.I. Tebing Panjang	1.256	99,30	0,70	0,00	0,00

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Muara Enim						
10	D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	1.000	62,58	21,00	13,00	3,42
11	D.I. Danau Tampang	2.690	49,44	21,00	25,84	3,72
12	D.I. Endikat Bengkok /T.Bute	1.500	82,61	17,39	0,00	0,00
13	D.I. Lecah Paye	1.295	46,33	22,01	9,58	22,08
14	D.I. Tunggul Bute	2.400	51,00	25,00	13,00	11,00
Kab. Musi Rawas						
15	D.I. Air Deras I	1.461	85,67	6,37	7,96	0,00
16	D.I. Air Gegas	2.300	60,00	21,00	13,00	6,00
17	D.I. Air Satan	1.175	84,19	10,31	5,50	0,00
18	D.I. Megang Tikip	1.077	70,20	22,93	6,87	0,00
Kota Pagaralam						
19	D.I. Air Merah	1.500	58,00	21,00	13,00	8,00
20	D.I. Pasemah	1.107	89,55	10,45	0,00	0,00
21	D.I. Selangis Besar/ Jemair	1.020	86,49	13,51	0,00	0,00
22	D.I. Selangis Kecil	1.352	58,00	21,00	13,00	8,00
Kab. OKU Selatan						
23	D.I. Air Pius	1.600	100,00	0,00	0,00	0,00
24	D.I. Air Sungkai	1.500	100,00	0,00	0,00	0,00
25	D.I. Air Sunur	1.701	100,00	0,00	0,00	0,00
Kab. OKU Timur						
26	D.I. Air Gilas	1.050	58,00	21,00	13,00	8,00
27	D.I. Lebak Datuk	2.102	99,45	0,55	0,00	0,00
28	D.I. Lebak Semendawai	1.768	63,04	19,27	10,89	6,80
	JUMLAH	41.541	77,99	11,37	5,77	1,74

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Sedangkan kondisi jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi di Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan kondisi baik sebesar 15,52% dan rusak berat sebesar 84,48%.

Tabel 2.43

Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi
di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Perm en PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			B ai k	Rusak Ringa n	Rusak Sedan g	Rusak Berat
Kab. Muara Enim						
1	D.I.R Air Putak	1.200	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
Kab. Musi Banyuasin						
2	D.I. R Bailangu	2.150	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
3	D.I. R Buntiale	2.000	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
4	D.I. R Danau Cala	1.769	5, 6 5	0,00	0,00	94,35
5	D.I.R Lumpatan	1.300	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
6	D.I.R Pinang Banjar	1.000	4 7, 8 2	0,00	0,00	52,18
7	D.I.R Rantau Panjang	1.922	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
Kab. Banyuasin						
8	D.I.R Rantau Bayur	1.500	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Illir						
9	D.I.R Lbk Bakung	2.975	0, 0 0	0,00	0,00	100,00

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Perm en PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			B ai k	Rusak Ringa n	Rusak Sedan g	Rusak Berat
10	D.I.R Lbk Lorok	1.681	0,00	0,00	0,00	100,00
11	D.I.R Lbk Parit	1.575	0,00	0,00	0,00	100,00
12	D.I.R Lbk Purna Jaya	2.002	0,00	0,00	0,00	100,00
13	D.I.R Lbk Tj Pering	2.559	25,43	0,00	0,00	74,57
14	D.I.R Lbk Palas	2.450	44,76	0,00	0,00	55,24
15	D.I.R Lbk Tiang Bilik	1.750	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Komering Ilir						
16	D.I.R Bumi Agung	1.750	46,63	0,00	0,00	53,37
17	D.I.R Doros	1.400	17,86	0,00	0,00	82,14
18	D.I.R Jejawi	1.400	73,02	0,00	0,00	31,97

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Perm en PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			B ai k	Rusak Ringa n	Rusak Sedan g	Rusak Berat
19	D.I.R Mesuji Illir/ S. Buaya	2.916	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
20	D.I.R Pancur	2.450	1 0, 2 0	0,00	0,00	90,80
21	D.I.R Sangkaji	1.400	8 3, 2 9	0,00	0,00	16,71
22	D.I.R Suka Pulih	1.750	2 4, 9 9	0,00	0,00	75,01
23	D.I.R Ulak Jerman/Jermal	1.050	9, 5 2	0,00	0,00	90,48
Kab. OKU Timur						
24	D.I.R Lebak Datuk	1.960	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
25	D.I.R Lebak Pauh	2.100	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
26	D.I.R Lebak Semendawai	1.400	7 0, 7 1	0,00	0,00	29,29
27	D.I.R Lebak Tobong	2.100	0, 0 0	0,00	0,00	100,00
		49.509	15,	0,00	0,00	84,48

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Perm en PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			B ai k	Rusak Ringa n	Rusak Sedan g	Rusak Berat
			52			

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini rekapitulasi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2.44
Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Empat Lawang	18	5.614
2	Kab. Lahat	214	13.348
3	Kab. Muara Enim	241	24.327
4	Kab. Musi Rawas	43	7.203
5	Kab. Ogan Komering Ulu	34	3.824
6	Kab. OKU Selatan	41	5.179
7	Kab. OKU Timur	1	650
8	Kota Lubuk Linggau	5	1.529
9	Kota Pagar Alam	99	5.025
	JUMLAH	696	66.699

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2.45
Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.R	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Banyuasin	3	2.066
2	Kab. Muara Enim	4	2.757
3	Kab. Musi Banyuasin	56	17.812
4	Kab. Ogan Ilir	50	14.704
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3	1.019
6	Kab. OKU Timur	1	700
7	Kota Palembang	2	341
	JUMLAH	119	39.398

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Penataan Ruang

Penataan Penataan ruang Provinsi mengacu pada peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016-2036, yang merupakan arahan atau dasar dalam pembangunan, baik perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai matra spasial yang bersifat strategis, sehingga perlu dipertimbangkan kondisi capaian dan permasalahan penataan ruang yang ada yaitu :

1. Perlu menetapkan kawasan-kawasan yang potensial dengan nilai pengaruh terhadap provinsi untuk diprioritaskan penanganannya.
2. Percepatan penetapan RTRW Provinsi yang telah memasuki masa 5 tahun pertama.
3. Mendorong revisi RTRW kabupaten/kota dan penyusunan RDTR Kabupaten/kota.
4. Integrasi RTRW kedalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya kebijakan strategs nasional, Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
6. Percepatan penyelesaian tumpang tindih RTRW, Kawasan hutan

dan batas wilayah.

7. Integrasi RZWP-3-K kedalam RTRW Provinsi.

8. Arahan struktur ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2022 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2023.

Penataan ruang sebagai matra spasial mengatur pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi dengan memberikan arah peruntukkan sesuai dengan peraturan yang ada tidak terlepas dari pemanfaatan, penggunaan dan penyebarluasan informasi gesospasial.

Arahan struktur ruang di Provinsi Sumatera Selatan meliputi arahan sistem perkotaan yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Palembang yang merupakan 142 omesti perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan 142 omesti perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kesebelas 142 omesti perkotaan yang termasuk kedalam PKW tersebut, tujuh diantaranya sudah ditetapkan dalam RTRW Nasional terdiri dari:
 - (1) Prabumulih (Kota Prabumulih); PKW
 - (2) Lubuklinggau (Kota Lubuklinggau); PKW
 - (3) Muara Enim (Kabupaten Muara Enim); PKW
 - (4) Baturaja (Kabupaten OKU); PKW
 - (5) Lahat (Kabupaten Lahat); PKW
 - (6) Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin); PKW
 - (7) Kayu Agung (Kabupaten OKI); PKW
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan 142 omesti perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 - (1) Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin);
 - (2) Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang);
 - (3) Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas);
 - (4) Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan);
 - (5) Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin);
 - (6) Gumawang (Kabupaten OKU Timur);

- (7) Tugumulyo (Kabupaten OKI);
- (8) Talang Ubi (kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
- (9) Peninjauan (Kabupaten OKU);
- (10) Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas Utara);
- (11) Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin);
- (12) Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
- (13) Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas);
- (14) Pengandonan (Kabupaten Ogan Komering Ulu).

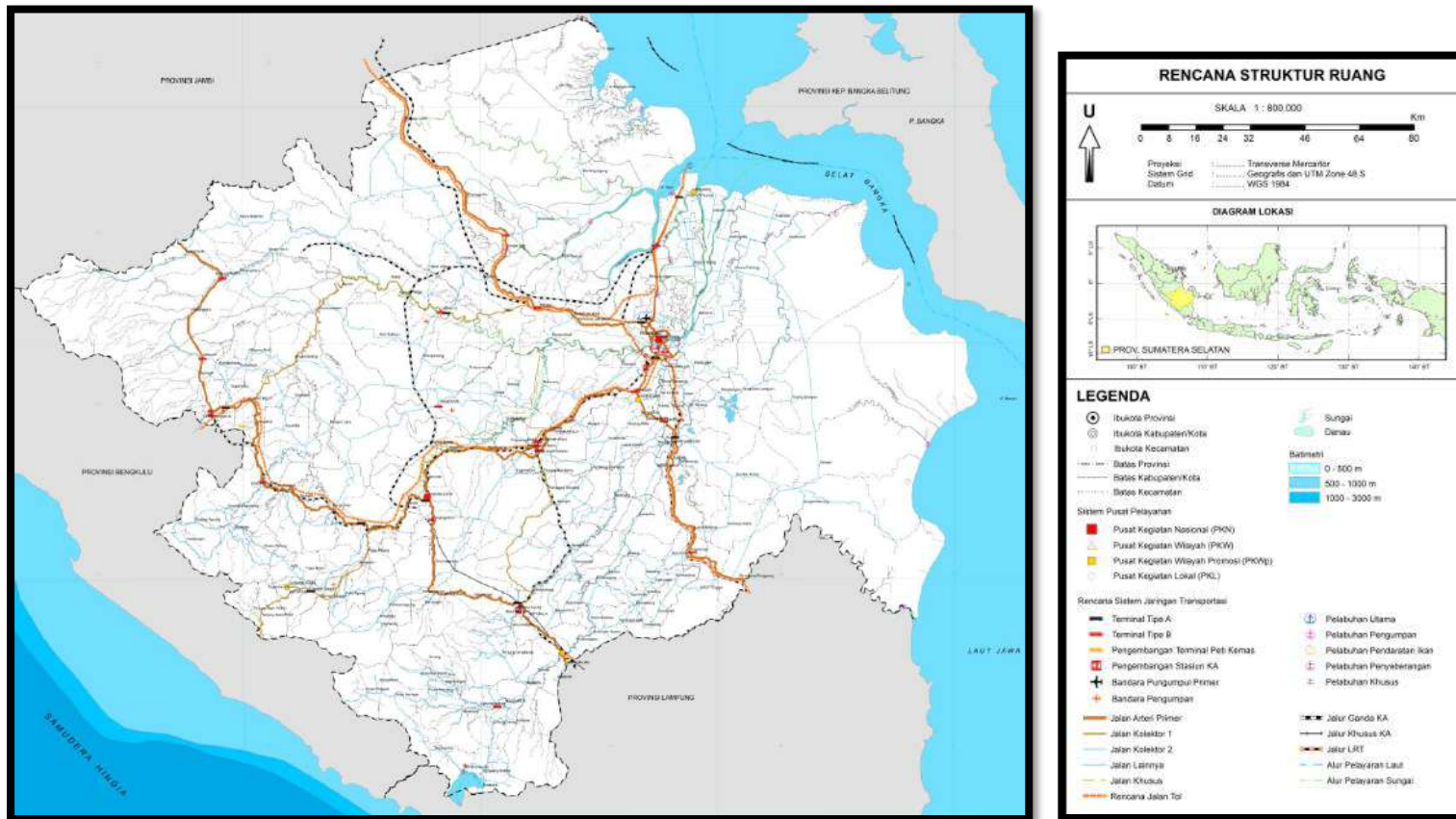
Pengembangan sistem jaringan konektivitas utama, meliputi Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Transportasi berupa:

- a. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) di Sumatera Selatan meliputi : Palembang – Indralaya, Betung-Tempino-Jambi; Betung-Palembang-Kayu Agung; Sp. Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu; Pematang Panggang-Kayu Agung; Palembang-Tanjung Api Api dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
- b. Jaringan rel kereta api di Provinsi Sumatera Selatan menghubungkan beberapa wilayah, yaitu : Palembang – Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau dan Palembang – Prabumulih – Baturaja – Tanjung Karang (Provinsi Lampung) dan Palembang – Betung – Jambi.

Pengembangan Pelabuhan sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional meliputi : Boom Baru Palembang sebagai Pelabuhan Utama, Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Palembang sebagai Pelabuhan Pengumpul, Sungai Lumpur sebagai Pelabuhan Pengumpul, Kertapati sebagai Pelabuhan Pengumpul dan pengembangan 143 omestic 143 angkutan penyeberangan Tanjung Api-Api.

Peta struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 2.57
Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Arahan peruntukkan 145omestic145g pengembangan 145omesti lindung dan pengembangan 145omesti budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

Tabel 2.46
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036

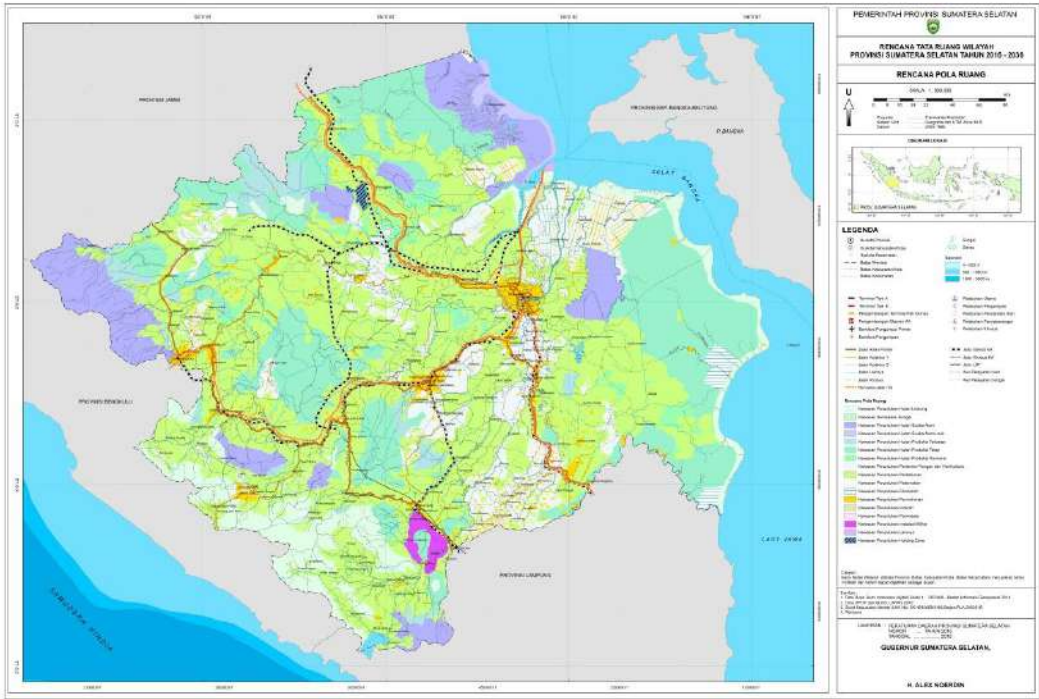
RENCANA POLA RUANG			LUAS (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNNG			
	1	Hutan Lindung	577.327,00	6,63
	2	Sempadan Sungai, Sempadan Danau	13.143,92	0,14
	3	KPA, KSA dan Cagar Budaya	790.625,19	9,09
	4	Kawasan Rawan Bencana*		
	5	Kawasan Lindung Geologi*		
	Jumlah		1.380.096.11	15.06
B	KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Hutan Produksi :			
	1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	208.724,00	2,40
	2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.713.581,00	19,69
	3	Kawasan Hutan Produksi Konversi	176.694,00	2,03
2	Kawasan Pertanian :			
	1	Kawasan Pertanian Pangan dan Hortikultura	936.074,00	10,76
	2	Kawasan Perkebunan	3.802.422.21	43,70
	3	Kawasan Perikanan	543.022,32	5,92
	4	Kawasan Peternakan	2.297,31	0,03
3	Kawasan Permukiman		320.924,67	3,69
4	Kawasan Pertambangan*		1.231.361,13	13,4
5	Kawasan Pariwisata		9.933,12	0,11
6	Kawasan Industri		17.072,28	0,20
7	Kawasan Peruntukan Daerah Latihan Militer		45.000,00	0,52
8	Kawasan Peruntukan Lainnya			
	1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45.000,00	0,52
	2	Kawasan Reklamasi	3.000,00	0,03
	Jumlah		7.779.146,89	84,93
Total = A + B			9.159.243,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Catatan :
KPA = Kawasan Pelestarian Alam
KSA = Kawasan Suaka Alam
* Luasan tidak dijumlahkan, yaitu :
a. Kawasan Rawan Bencana
b. Kawasan Lindung Geologi
c. Kawasan Pertambangan

Peta Pola ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.58
Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Status Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan semua telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.47
Status-Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
	Sumatera Selatan	No. 11 Tahun 2016	24-Okt-16
1	Banyuasin	No.6 Tahun 2019	24-Okt-18
2	Empat Lawang	No. 09 Tahun 2012	27-Jul-12
3	Lahat	No. 11 Tahun 2012	21-Des-18
4	Muara Enim	No. 13 Tahun 2018	21-Des-18
5	Musi Banyuasin	No. 08 Tahun 2016	30-Sep-16
6	Musi Rawas	No. 02 Tahun 2013	21-Okt-13
7	Musi Rawas Utara	No. 12 Tahun 2018	31-Des-18
8	Ogan Ilir	No. 01 Tahun 2012	24-Jan-12
9	Ogan Komering Ilir	No. 09 Tahun 2013	09-Jul-13
10	Ogan Komering Ulu	No. 22 Tahun 2012	27-Des-12
11	OKU Selatan	No. 3 Tahun 2021	16-Mar-21
12	OKU Timur	No. 7 Tahun 2021	9-Jul-21
13	PALI	No. 01 Tahun 2018	20-Jul-18
14	Lubuk Linggau	No. 01 Tahun 2012	31-Agust-12

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
15	Pagar Alam	No. 07 Tahun 2012	19-Nop-12
16	Palembang	No. 15 Tahun 2012	27-Des-12
17	Prabumulih	No. 01 Tahun 2014	02-Apr-14

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kota Se Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan *one map policy* melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 719/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, telah dibentuk kelembagaan Informasi Geospasial Daerah (IGD) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Ada beberapa kegiatan utama *one map policy*, yaitu 1) kompilasi; 2) integrasi; dan 3) sinkronisasi. Saat ini, Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) di Provinsi Sumatera Selatan telah terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kebijakan Satu Peta (KSP) & (JIGD) Sumatera Selatan

Kegiatan KSP di Sumatera Selatan pada awalnya diawali dengan menyusun “*Roadmap*” Kebijakan Satu Peta pada Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, menyusun Petunjuk teknis dan Standar Operasional (SOP), mengidentifikasi sebanyak 75 Peta Tematik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (dari 85 tematik yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketelitian Skala 1:50.000), serta 10 peta tematik sektor yang lainnya sesuai kondisi di Sumatera Selatan seperti Peta : Persebaran fasiliitas Pendidikan, Kesehatan, Perkebunan, Desa, Kawasan Kumuh, Air Bersih, Sanitasi, Kemiskinan, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ekoregion serta peta tematik peta irigasi/ sawa beririgasi sehinga Sumatera Selatan saat ini

mengidentifikasi sebanyak 95 peta tematik dengan jumlah layer peta sebanyak 1187.

Selanjutnya, bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang maka diperlukan data yang data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sah, ayng ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang diwujudkan dalam bentuk peta.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dengan mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan memang benar benar mendukung pembangunan dan untuk kemudahan dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang.

Adapun portal Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonimian dapat diakses melalui alamat <https://onemap.big.go.id/peta>.

Gambar 2.59
Tampilan Portal Kebijakan Satu Peta (KSP)



Sumber : <https://onemap.big.go.id/peta>

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, diamanatkan bahwa data dan informasi geospasial yang sebelumnya diperuntukan untuk pemegang akses yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, untuk saat ini ditambahkan “Masyarakat” selaku pemegang akses yang terdiri dari orang-perseorangan, Badan Hukum dan Badan Usaha. Walaupun sekarang akses ke 149omest belum dibuka, akan tetapi setelah peluncuran Geoportal 2.0 akses ke Publik akan dibuka, walaupun akan tetap diatur tentang hak akses untuk data data khusus 149omest.

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak November 2017 telah memiliki geoportal tersendiri, data diakses melalui (<http://geoportal.sumselprov.go.id>) terkoneksi dengan geoportal pusat <http://tanahair.indonesia.go.id>. Pelaksanaan Kegiatan JIGD Prov sumsel melalui beberapa pilar antara lain:

Elemen Kebijakan, menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh proses kegiatan dalam penyelenggaraan kebijakan yang tepat diharapkan akan menghasilkan proses penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada.

Elemen Kelembagaan, berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum penyelenggaraan IG, rencana kerja, dan anggaran dalam penyelenggaraan IG.

Elemen Teknologi, berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam membangun simpul jaringan.

Elemen Standar Data, berkaitan dengan ketersediaan data geospasial dan informasi geospasial serta manajemen data spasial untuk mendukung sarana berbagi pakai data.

Elemen Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) bidang IG dalam pengelolaan simpul jaringan.

Penghargaan

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mendapatkan 2 penghargaan *Bhumandala Award* dari Badan Informasi Geospasial dengan katagori sebagai berikut:

- 1) Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Kemudian di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Kemudian di tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Rajata yaitu penghargaan Simpul Jaringan Terbaik kategori Tingkat Provinsi.

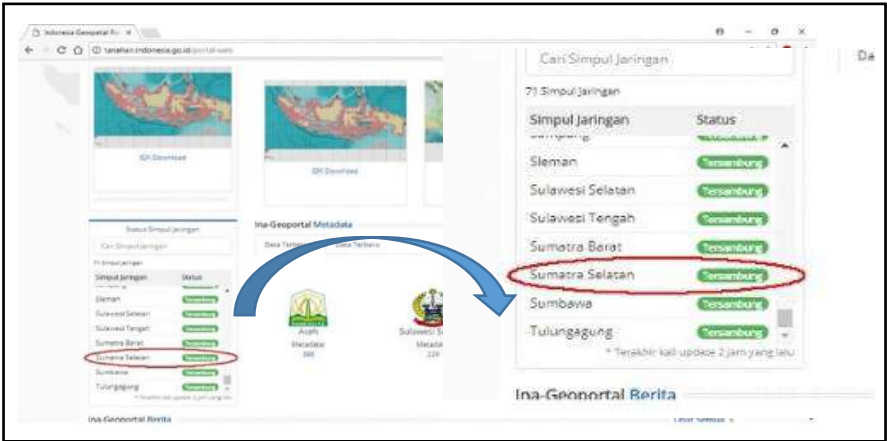
- 2) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan Simpul Jaringan Terbaik kategori Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palembang.

Pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih Penghargaan Bhumandala yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- 2) Bhumandala Kanaka (Medali Emas) diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportalnya dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu penilaian juga dilakukan Pedoman Penghargaan Simpul Jaringan Tahun 2024 berdasarkan konten data, kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia).
- 3) Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi
Bhumandala Ariti (medali perunggu) diberikan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemetaan, perencanaan dan navigasi di Indonesia.
- 4) Penghargaan Geoportal Terbaik
Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan dalam tampilan yang menarik, kecepatan akses yang tinggi, dan konten data yang lengkap.

Sumatera Selatan telah melakukan sinkronisasi Peta Indikatip Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) melalui proses validasi dan verifikasi teknis tematik dan rancangan PITTI terhadap 18 IGT antara lain peta : Penunjukan (DISHUT dan BPKH II), Penetapan (DISHUT dan BPKH II), RTRWP (DPUBMTR), KHDTK (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HA (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HTI, IUPHHK RE, IUPHHK HTR, IUP (ESDM), HGU (DISBUN dan ATR/BPN), HPL (ATR/BPN) (Tipologi Izin), Lokais Transmigrasi , sebanyak 6603 tipologi yang terindikasi tumpang tindih yang tersebar 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Gambar 2.60
Portal Tanah Air Indonesia



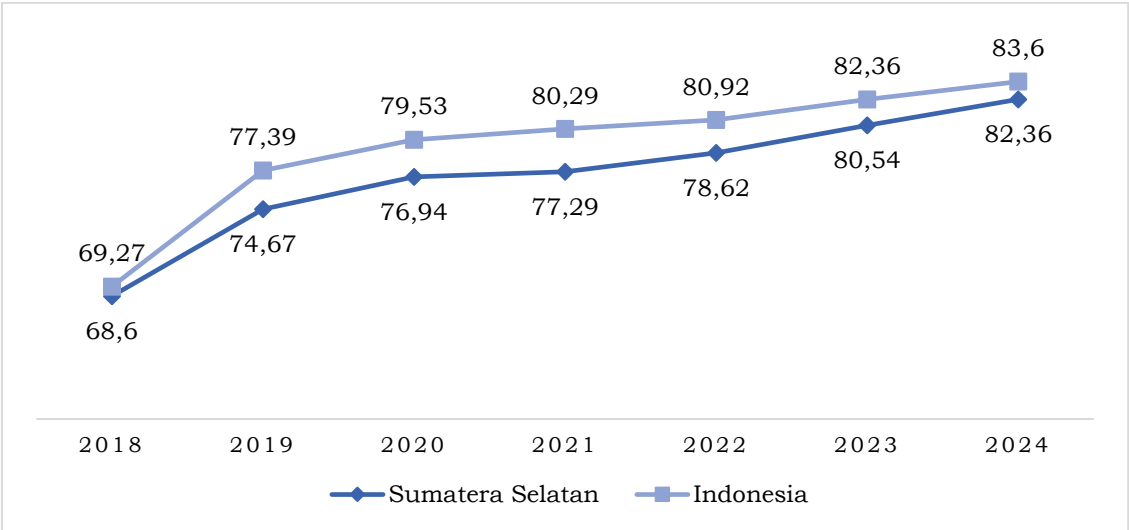
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Akses Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 77,34 persen pada tahun 2024. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Gambar 2.61
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 – 2024



Sumber : BPS Sumsel, 2024

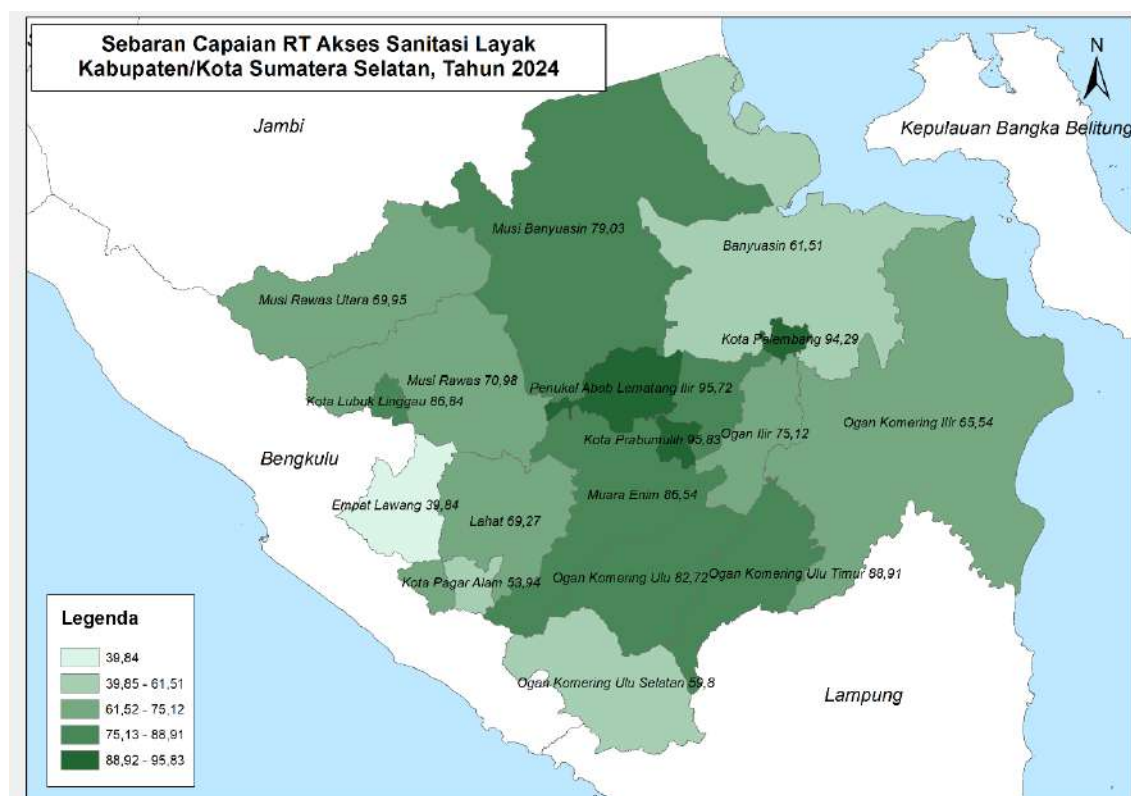
Tabel 2.48
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2020 – 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	80,15	82,94	84,39	80,78	82,72
2	Ogan Komering Ilir	74,72	68,93	63,95	69,73	65,54
3	Muara Enim	84,99	84,80	84,16	85,58	86,54
4	Lahat	69,34	70,52	70,35	70,19	69,27
5	Musi Rawas	71,78	69,34	73,69	74,50	70,98
6	Musi Banyuasin	74,85	71,81	80,71	83,52	79,03
7	Banyu Asin	73,06	72,12	72,80	74,53	61,51
8	OKU Selatan	53,86	57,68	57,54	63,20	59,80
9	OKU Timur	78,80	84,63	87,48	88,25	88,91
10	Ogan Ilir	73,28	68,52	71,55	76,17	75,12
11	Empat Lawang	57,60	53,52	66,93	67,81	39,84
12	PALI	90,49	94,38	89,40	95,22	95,72
13	Musi Rawas Utara	58,13	66,05	65,73	68,57	69,95
14	Kota Palembang	89,63	94,48	92,66	95,16	94,29
15	Kota Prabumulih	91,23	95,20	97,61	96,44	95,83
16	Kota Pagar Alam	52,71	58,20	62,11	61,28	53,94
17	Kota Lubuklinggau	85,87	85,85	87,64	86,05	86,84
Sumatera Selatan		76,94	78,08	78,62	80,54	77,34
Nasional		79,53	80,29	80,92	82,36	83,60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gambar 2.62

Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



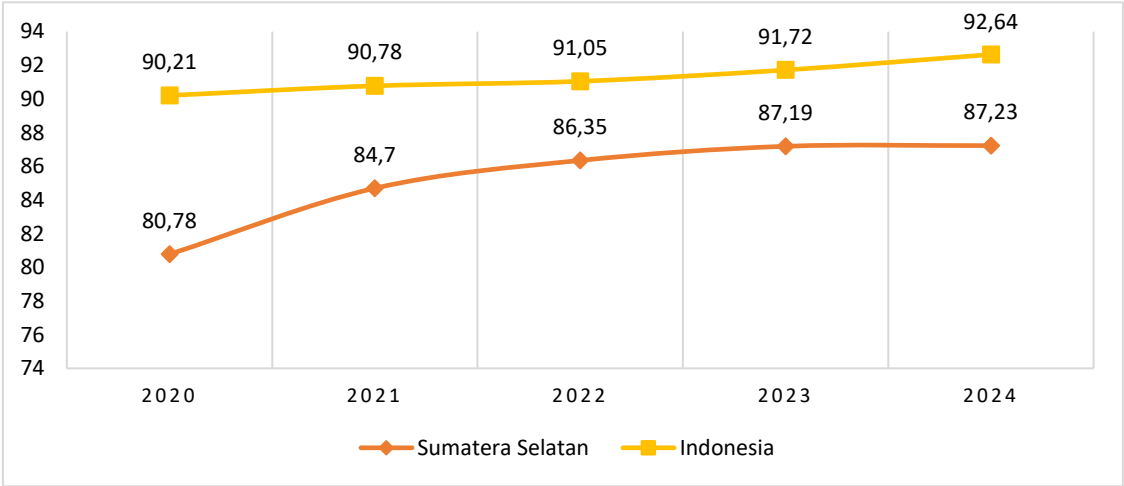
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025—diolah

Akses Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 sebesar 80,78 persen menjadi 87,23 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuk Linggau sebesar 97,18% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 69,33%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen. Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72 % dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan

yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan 155 omestic agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan 155omestic besar berupa hutan-hutan dan rawa.

Gambar 2.63
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Sumsel, 2025

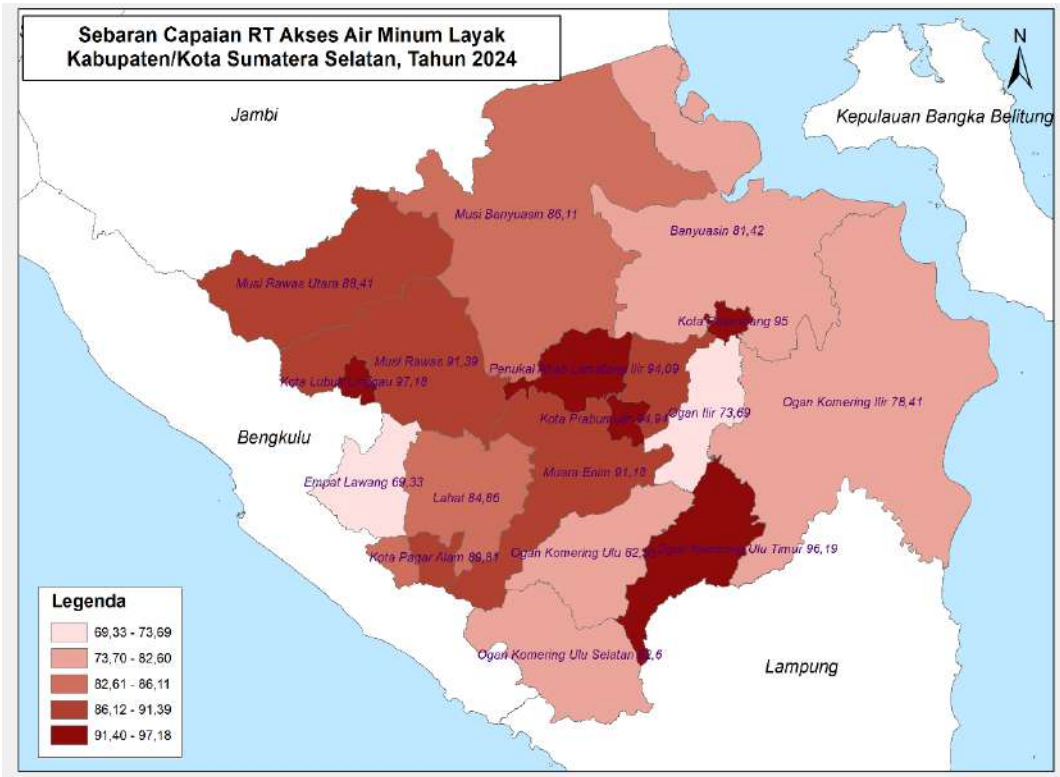
Tabel 2.47
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	78,98	81,78	82,76	82,33	82,55
2	Ogan Komering Ilir	84,23	79,02	78,52	80,59	78,41
3	Muara Enim	82,15	89,48	91,51	90,78	91,18
4	Lahat	67,44	81,67	84,35	86,16	84,86
5	Musi Rawas	77,08	83,15	93,22	89,34	91,39
6	Musi Banyuasin	84,72	79,37	81,75	85,58	86,11
7	Banyu Asin	70,38	76,97	78,25	80,66	81,42
8	Ogan Komering Ulu Selatan	67,75	77,12	76,52	80,18	82,60
9	Ogan Komering Ulu Timur	89,91	93,32	94,15	96,92	96,19
10	Ogan Ilir	73,08	72,53	71,88	75,10	73,69
11	Empat Lawang	31,41	51,87	64,85	65,94	69,33
12	Penukal Abab Lematang Ilir	83,90	87,49	85,78	91,18	94,09
13	Musi Rawas Utara	73,24	80,33	87,13	86,25	88,41
14	Kota Palembang	92,40	97,43	97,96	96,71	95,00
15	Kota Prabumulih	96,40	93,77	98,42	95,69	94,94
16	Kota Pagar Alam	88,95	93,16	85,76	88,58	89,81

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
17	Kota Lubuklinggau	97,10	96,10	96,41	97,52	97,18
	Sumatera Selatan	80,78	84,70	86,35	87,19	87,23
	Nasional	90,21	90,78	91,05	91,72	92,64

Sumber : BPS Sumsel, 2025

Gambar 2.64
Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2024



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025—diolah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendorong dalam peningkatan Akses Air minum dan Sanitasi ada beberapa terobosan antara lain;

- Melakukan pemetaan untuk daerah-daerah yang masih rendah aksesnya terhadap air minum dan sanitasi guna untuk memacu kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
- Melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota melalui POKJA AMPL Provinsi dalam pembuatan regulasi agar seluruh stakeholder terlibat secara 156omesti-sama.
- Melakukan Pelaksanaan pembangunan sanitasi serentak untuk memacu kabupaten/Kota berinovasi dalam akselerasi pembangunan Air Minum, Sanitasi dan penanganan 156omesti

kumuh, yang bertujuan; 1) mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan Akses air minum, sanitasi dan Kawasan Kumuh, 2) Menurunkan Presentasi rumah tidak layak huni, 3) Melaksanakan fungsi POKJA AMPL/Sanitasi Provinsi dalam aspek advokasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, 4) Meningkatkan Pelibatan multistakeholder dalam pembangunan Air minum, sanitasi, Penanggulangan Kawasan kumuh, dan Perumahan, 5) Mendorong Inovasi daerah dalam Pembangunan Air Minum, sanitasi dan penanganan Kawasan Kumuh, 6) Mencari sumber-sumber pendanaan lainnya seperti CSR, BAZNAS.

Akses Kepemilikan Rumah

Untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Perumahan Berbasis Komunitas merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu. MBR yang tergabung dalam komunitas ini akan membeli lahan perumahan yang telah disediakan dan difasilitasi oleh komunitasnya, sedangkan untuk bahan bangunan rumah dan upah dibantu oleh pemerintah.

Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2023 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2023 sebanyak 2,773,719 KK dan jumlah KK yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2023 sebanyak 2.345.422 KK.

Tabel 2.48
Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (*Backlog*)
di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

NO	WILAYAH	JML PENDUDUK TAHUN 2023	JUMLAH KK	Persentase Status Kepemilikan Rumah (%)			
				Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas Sewa	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogan Komering Ulu	383,039	116,687	81.16	4.87	13.39	0.58
2	Ogan Komering Ilir	807,085	263,200	89.60	0.87	9.53	-

3	Muara Enim	640,962	200,314	86.85	1.97	10.40	0.78
4	Lahat	450,281	137,318	84.64	3.26	11.56	0.54
5	Musi Rawas	411,787	135,040	90.91	0.36	8.83	-
6	Musi Banyuasin	651,950	222,445	88.25	2.54	8.89	0.33
7	Banyuasin	885,902	277,476	90.57	2.77	5.04	1.61
8	OKU Selatan	429,535	124,857	85.56	4.56	9.87	-
9	OKU Timur	674,184	218,197	97.48	-	2.52	-
10	Ogan Ilir	436,141	136,952	89.87	1.01	8.78	0.34
11	Empat Lawang	345,641	102,374	81.71	2.54	15.75	-
12	Pali	205,384	63,199	89.04	0.91	9.71	0.34
13	Muratara	198,413	62,961	86.05	2.00	10.32	1.63
14	Kota Palembang	1,718,440	530,007	69.65	9.23	20.05	1.08
15	Kota Prabumulih	203,312	62,573	84.36	8.47	7.16	-
16	Kota Pagar Alam	149,199	45,797	75.84	6.95	14.65	2.56
17	Kota Lubuk Linggau	246,046	74,320	81.99	7.44	10.57	-
Sumatera Selatan		8,837,301	2,773,719	85.50	3.51	10.41	0.58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	100	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	100	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

SPM terkait pemenuhan kebutuhan air minum Curah lintas Kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sampai dengan saat ini belum ada melayani rumah tangga lintas kabupaten/kota. Provinsi Sumsel sudah memiliki Perseroda Tirta Sriwijaya Maju (TSM) yang akan melayani penyediaan air minum curah lintas Kabupaten/kota dan kedepan akan mengembangkan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2024 untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan, namun untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada pemenuhan SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebagai berikut :

Tabel 2.51
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	230.000.000,-	223.144.920,-	97.02
2	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	100.000.000,-	74.122.175,-	74.12
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	620.040.972,-	547.777.122,-	88.35
4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000,-	269.565.754,-	89.86
5	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,-	72.079.140,-	72.08

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada pemenuhan SPM urusan Bidang Perumahan Rakyat pada saat penganggaran awal RKPD telah dianggarkan namun di efisiensi dikarenakan refocusing anggaran untuk covid 19. Pagu anggaran dan realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	89.184.625,-	84.784.625,-	95.07
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	173.541.360,-	170.151.510,-	98.05
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	75.000.000,-	70.853.000,-	95,07
4	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	10.000.000,-	10.000.000,-	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan rakyat antara lain:

1. SPAM Regional / Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota antara lain :
 - Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya SPAM regional;
 - Kondisi saat ini pembangunan SPAM Regional dirasakan belum efisien dan efktif mengingat masing-masing kab/kota memiliki PDAM yang dapat mencakup pelayanan wilayahnya serta terdapat sungai/anak sungai yang melintas antar kab/kota yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat setempat;
 - Pelayanan air minum di wilayah regional sebagian masih dapat dilayani Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan SPAM Regional; dan
 - Diperlukan anggaran yang cukup besar utuk merealisasikan

pembangunan SPAM Regional.

2. Air Limbah Domestik Regional lintas Kab/Kota antara lain :

- Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional;
- Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
- Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; dan
- Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi antara lain adalah kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi.

Solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan diatas antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan, permasalahan dan kendala dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Menyusun strategi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dalam rangka Pengembangan Air Minum Curah dan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan Instansi terkait seperti Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Perkim terkait status penetapan bencana ,pendataan dan kebutuhan pemenuhan;

4. Melaksanakan penelitian dan kajian lebih mendalam serta melakukan identifikasi, fasilitasi, sosialisasi dan pendataan/survey pendahuluan terkait kegiatan-kegiatan dalam pencapaian SPM.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rumah Tangga Bersanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54 persen pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2025 ada 9 jenis Perda dan 3 jenis Pergub yang ditegakkan. Dari 12 Perda dan Perkada tersebut semuanya dapat ditegakkan dengan capaian sebesar 100% dari target 95% Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 terdapat 35.908 anggota Satlinmas yang tersebar 2.853 desa/kelurahan di 17 Kabupaten/Kota, sedangkan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100% dengan target 100%. Dengan data siskamling yang aktif sebanyak 4.958 dan yang tidak aktif sebanyak 1.311 Dengan terjaminnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Terkait dengan kondisi kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh banyak Prestasi yang telah dicapai yaitu:

1. Penghargaan BPBD Provinsi kategori Akuntabilitas sebagai Juara I tahun 2014
2. Penghargaan dan ucapan terima kasih sebagai pembicara dalam Training Psychology First Aid, topik “Usir Traumatik Paska Bencana di UIN Raden Patah” tahun 2015.
3. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik Wilayah II (Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera) tahun 2016.
4. Penghargaan untuk Pelatihan Penguatan Kapasitas LPB PWM Sumsel dan Kaji Kebutuhan dalam Tanggap Darurat tahun 2016.
5. Sertifikat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerja bersama dalam aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui operasi pencegahan, patroli terpadu, deteksi dini, pelaporan pemantauan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan semester I tahun 2016.
6. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan Pusdalops Tingkat Provinsi 2016
7. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik 2 wilayah Barat Tahun 2017

8. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik I Wilayah 3 Tahun 2018

Gambar 2.71
Piagam BNPB Tahun 2017 – 2018



Kerja keras Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait dalam menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berbuah manis. Sumatera Selatan dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah tiga mengalahkan Kalimantan dan Jawa dalam Penganugerahan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Award di Bali, Kamis, 22 Februari 2018. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewakili Gubernur Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan mendapatkan peringkat pertama karena dianggap berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan berhasil mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak 2015. kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 lalu di beberapa daerah di Sumsel menjadi pelajaran hebat Pemerintah Provinsi dan *stakeholder* terkait. Provinsi Sumatera Selatan sangat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih Sumsel resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam penanggulangan bencana khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.72
Penyerahan Piagam BNPB



Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

pNO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU				PELAYANAN GANTI RUGI		CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/ PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5 = 4/3x100	6	7	8 = 7/6x100	9 = (5+8)/2 x 100	10
1	TRANTIBUMLI NMAS	12	12	100%	100	100	100	100	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.54

Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat/ Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95%	95%	100%	Faktor Penghambat : - kurangnya tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap perda dan perkada - sarana dan prasarana kendaraan operasional belum maksimal dalam penegakan perda dan perkada - keterbatasan Anggaran untuk mendukung kegiatan penegakan perda
2	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%	Faktor Penghambat : Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelaporan gangguan trantibum disekitarnya, sehingga penyelesaian gangguan trantibum didapatkan dengan cara patroli. Faktor Pendorong : Pelaksanaan patroli rutin untuk pencegahan dan penanganan gangguan trantibum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
3	Pemberdayaan Satlinmas	Persentase Satlinmas yang aktif	%	99%	100%	101%	Faktor Pendorong : Telah terdatanya satlinmas di Provinsi Sumatera Selatan
4	Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	80%	80%	100%	Faktor Penghambat : - Terbatasnya anggaran yang dimiliki. - Jumlah kendaraan yang dimiliki Damkar Kab/Kota tidak sebanding dengan luas Wilayah di Daerah. - Terbatas SDM dan Sanpras yang dimiliki Damkar Kab/Kota. - Belum seluruh daerah yang memiliki Dinas Damkar Mandiri. Faktor Pendorong : - Telah adanya perjanjian kerjasama antar Kab/Kota yang berbatasan - Telah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat - Telah dibentuknya Relawan Pemadam Kebakaran di Kab/Kota hingga tingkat Desa - Telah ditambahnya Pos Pemadam Kebakaran di Kab/Kota

Palembang, Januari 2026
PIH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MAHARESIYAMA, S.E., M.M
PEMBINA Tk. I (IV.b)
NIP.197108222006041004

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ada, serta belum maksimalnya Perangkat Daerah terkait untuk menjalankan Perda yang dipangku. Selain itu, berdasarkan data dilapangan tidak terdapat warga negara yang terkena dampak atas penegakan Perda dan Perkada yang berhak mendapat layanan dan tidak terdapat warga negara yang terlayani terkait pelayanan ganti rugi maupun pengobatan dikarenakan tidak adanya warga negara yang terkena dampak atas penegakan Perda dan Perkada baik cidera dan kerusakan aset milik warga negara, sehingga pencapaian SPM Trantibumlinmas belum maksimal.

6) Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam Permensos nomor 8 tahun 2012, terdapat 26 jenis PMKS yaitu 1) Anak balita terlantar, 2) Anak terlantar, 3) Anak yang berhadapan dengan hukum, 4) Anak jalanan, 5) Anak dengan disabilitas, 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), 8) Lanjut usia terlantar, 9) Penyandang disabilitas, 10) Tunasusila, 11) Gelandangan, 12) Pengemis, 13) Pemulung, 14) Kelompok minoritas, 15) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, 16) Orang dengan HIV/AIDS, 17) Korban penyalahgunaan NAPZA, 18) Korban trafficking, 19) Korban tindak kekerasan, 20) Pekerja migran bermasalah sosial, 21) Korban bencana alam, 22) Korban bencana sosial, 23) Perempuan rawan sosial ekonomi, 24) Fakir miskin, 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis dan 26) Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terdapat 12 jenis PSKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 tahun 2012 yaitu: 1) Pekerja Sosial Profesional, 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 3) Taruna Siaga Bencana (Tagana), 4) Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS), 5) Karang Taruna, 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), 7) Keluarga Pioner, 8) Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), 9) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, 10) Penyuluh Sosial, 11) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 12) Dunia Usaha.

Pemberdayaan PSKS secara optimal perlu dilakukan karena merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan.

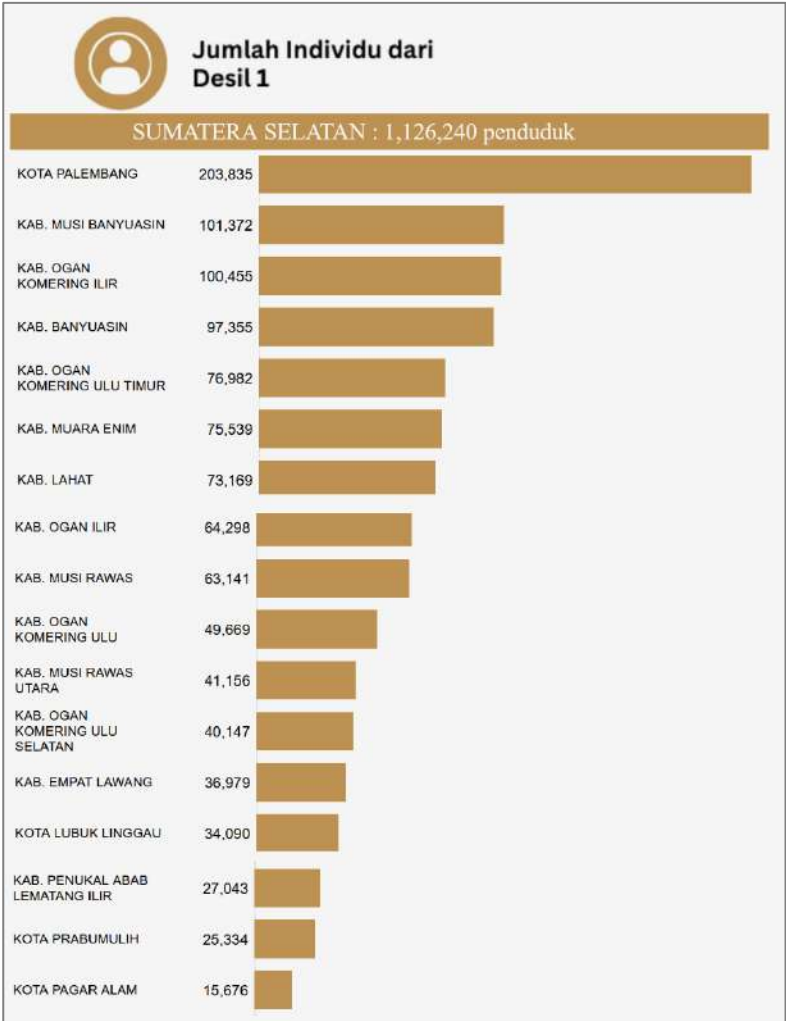
DTSEN

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data nasional yang memuat informasi kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia dan digunakan sebagai rujukan utama dalam perencanaan, penargetan, serta evaluasi kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial. DTSEN mengelompokkan penduduk ke dalam beberapa desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana Desil 1 merepresentasikan 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menggunakan DTSEN sebagai satu-satunya data rujukan dalam penetapan sasaran program pembangunan, bantuan

sosial, dan pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan ketepatan sasaran dan integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.76

Jumlah Individu dari Desil 1



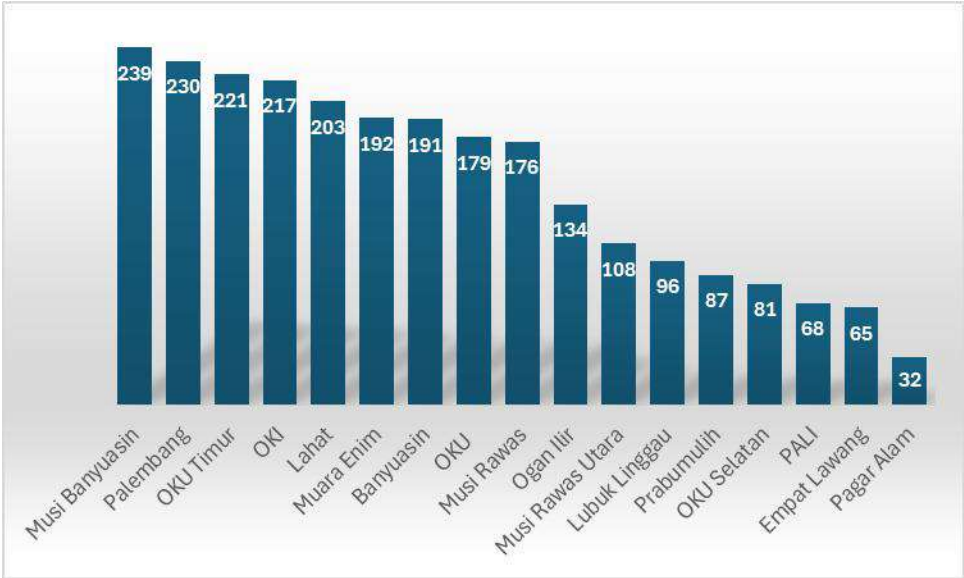
Sumber: DTSEN 2025, <https://pemberdayaan.go.id>

Berdasarkan data DTSEN, jumlah individu Desil 1 di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 1.126.240 penduduk. Distribusi Desil 1 menunjukkan konsentrasi tertinggi berada di Kota Palembang dengan 203.835 individu, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Tingginya jumlah Desil 1 di Palembang mengindikasikan bahwa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, kota besar tetap menghadapi persoalan kemiskinan dalam jumlah absolut yang signifikan, terutama pada kelompok masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor informal dan memiliki kerentanan pendapatan.

Pada wilayah kabupaten, khususnya daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis sektor primer, jumlah individu Desil 1 relatif tinggi dan tersebar di berbagai wilayah seperti Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, dan Musi Rawas. Kondisi ini mencerminkan kerentanan kesejahteraan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi alam. Sementara itu, kota-kota dengan jumlah penduduk lebih kecil seperti Pagar Alam, Prabumulih, dan Lubuk Linggau mencatat jumlah Desil 1 yang lebih rendah, yang lebih dipengaruhi oleh skala populasi dibandingkan tingkat kesejahteraan semata. Secara keseluruhan, sebaran Desil 1 berdasarkan DTSEN ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis karakteristik wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.

Gambar 2.77

Jumlah Disabilitas dari Desil 1



Sumber: DTSEN 2025, <https://pemberdayaan.go.id>

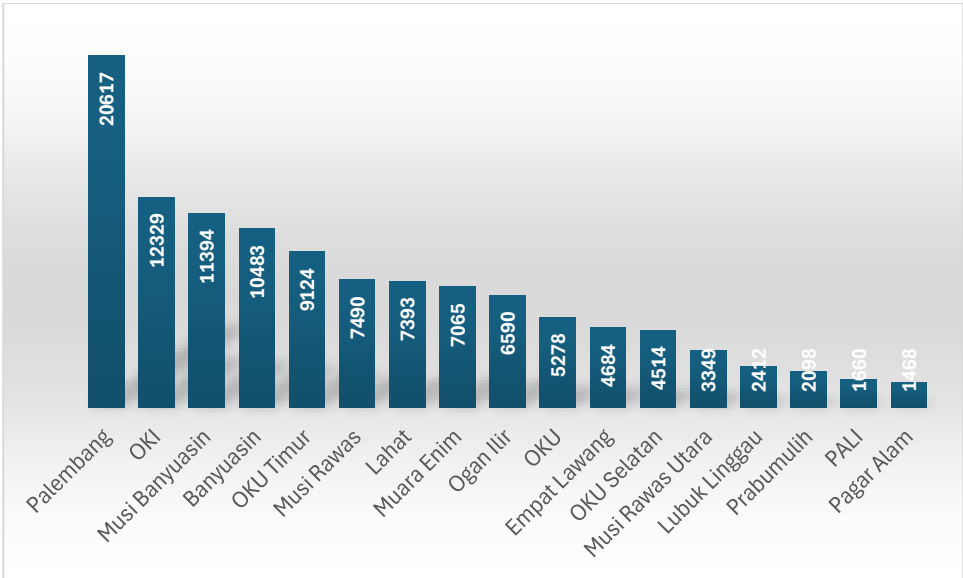
Berdasarkan data DTSEN, jumlah penyandang disabilitas yang berada pada Desil 1 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan sebaran yang relatif terkonsentrasi pada wilayah dengan jumlah penduduk besar dan karakteristik ekonomi yang rentan. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat jumlah tertinggi dengan 239 individu, disusul Kota Palembang (230), Kabupaten OKU Timur (221), dan

Kabupaten Ogan Komering Ilir (217). Tingginya jumlah penyandang disabilitas Desil 1 di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan adanya kerentanan ganda, yakni keterbatasan fisik atau mental yang dihadapi individu disabilitas sekaligus keterbatasan akses ekonomi, layanan dasar, dan kesempatan kerja yang layak.

Pada kabupaten berbasis sektor primer seperti Lahat, Muara Enim, Banyuasin, OKU, dan Musi Rawas, jumlah penyandang disabilitas Desil 1 juga tergolong signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan infrastruktur layanan disabilitas, akses kesehatan, serta rendahnya inklusivitas pasar kerja di wilayah perdesaan memperbesar risiko kemiskinan pada kelompok disabilitas. Sementara itu, kota-kota dengan jumlah penduduk lebih kecil seperti Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Pagar Alam mencatat jumlah yang lebih rendah, yang lebih dipengaruhi oleh skala populasi dibandingkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas itu sendiri. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang inklusif disabilitas, dengan penajaman intervensi berbasis wilayah melalui peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang berada pada Desil 1.

Gambar 2.78

Jumlah Lansia dari Desil 1



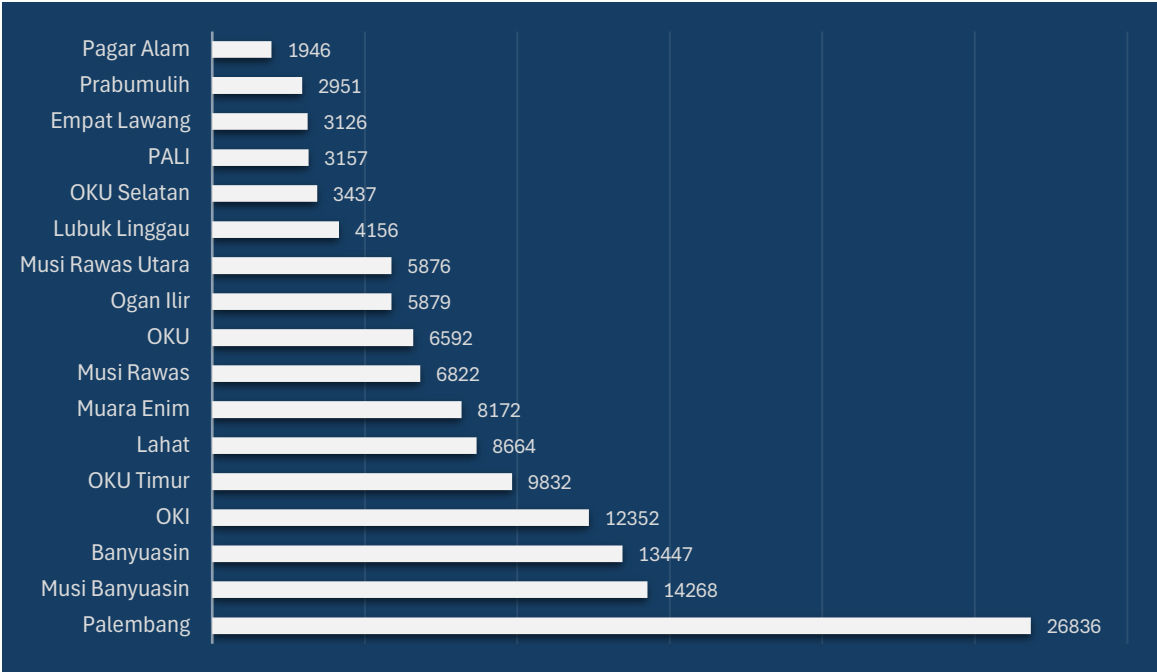
Sumber: DTSEN 2025, <https://pemberdayaan.go.id>

Berdasarkan data DTSEN, jumlah lansia yang berada pada Desil 1 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang menonjol. Kota Palembang mencatat jumlah lansia Desil 1 tertinggi dengan 20.617 individu, diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (12.329), Musi Banyuasin (11.394), dan Banyuasin (10.483). Tingginya jumlah lansia Desil 1 di wilayah-wilayah ini mengindikasikan besarnya kelompok penduduk lanjut usia yang menghadapi keterbatasan pendapatan, ketergantungan ekonomi, serta risiko kerentanan sosial, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan layanan kesehatan.

Pada kabupaten lain seperti OKU Timur (9.124), Musi Rawas (7.490), Lahat (7.393), Muara Enim (7.065), Ogan Ilir (6.590), dan OKU (5.278), jumlah lansia Desil 1 juga tergolong signifikan dan mencerminkan tantangan kesejahteraan lansia di wilayah dengan karakteristik ekonomi berbasis sektor primer. Keterbatasan jaminan pendapatan di usia lanjut, akses layanan kesehatan yang belum merata, serta ketergantungan pada dukungan keluarga memperbesar risiko kemiskinan pada kelompok lansia. Sementara itu, daerah dengan jumlah penduduk lebih kecil seperti Lubuk Linggau, Prabumulih, PALI, dan Pagar Alam mencatat jumlah lansia Desil 1 yang lebih rendah, yang lebih dipengaruhi oleh skala populasi dibandingkan kondisi kesejahteraan semata. Secara keseluruhan, sebaran ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan sosial yang berfokus pada lansia miskin, dengan menjadikan DTSEN sebagai data rujukan utama sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Gambar 2.79

Jumlah Keluarga yang Belum Menerima Bansos Bersyarat tetapi Memenuhi Syarat



Sumber: DTSEN 2025, <https://pemberdayaan.go.id>

Berdasarkan data DTSEN, masih terdapat jumlah keluarga yang cukup besar di Provinsi Sumatera Selatan yang belum menerima bantuan sosial bersyarat meskipun telah memenuhi kriteria penerima. Kondisi ini paling menonjol di Kota Palembang dengan 26.836 keluarga, disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (14.268), Banyuasin (13.447), dan Ogan Komering Ilir (12.352). Tingginya angka pada wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan adanya potensi exclusion error, yaitu keluarga miskin dan rentan yang secara sosial ekonomi layak namun belum terjangkau oleh program bantuan sosial bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dinamika perubahan kondisi rumah tangga, mobilitas penduduk, serta keterlambatan pemutakhiran data menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini, terutama di wilayah perkotaan dan kabupaten dengan jumlah penduduk besar.

Pada wilayah lain seperti OKU Timur (9.832), Lahat (8.664), Muara Enim (8.172), Musi Rawas (6.822), OKU (6.592), Ogan Ilir (5.879), dan Musi Rawas Utara (5.876), jumlah keluarga layak namun belum menerima bansos bersyarat juga tergolong signifikan. Hal ini mencerminkan tantangan penjangkauan dan pendampingan sosial di

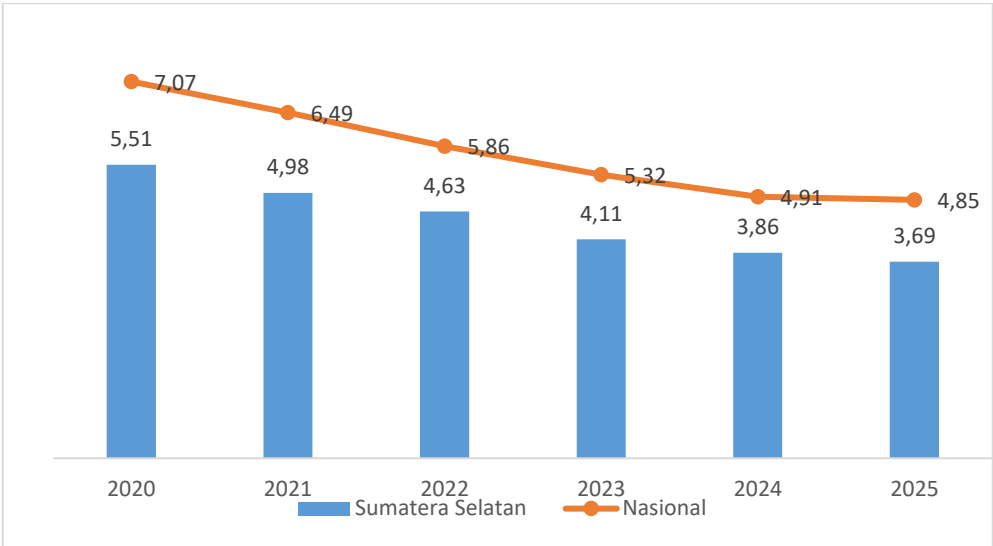
wilayah dengan karakteristik perdesaan dan basis ekonomi sektor primer, di mana keterbatasan akses layanan dan verifikasi lapangan masih menjadi kendala. Sementara itu, daerah dengan jumlah penduduk lebih kecil seperti Lubuk Linggau, OKU Selatan, PALI, Empat Lawang, Prabumulih, dan Pagar Alam mencatat jumlah yang relatif lebih rendah, yang lebih dipengaruhi oleh skala populasi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan urgensi percepatan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN sebagai data rujukan tunggal, serta penguatan koordinasi pusat–daerah dalam penyaluran bantuan sosial bersyarat sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, agar keluarga yang memenuhi syarat tidak lagi tertinggal dari intervensi perlindungan sosial.

7) Urusan Tenaga Kerja

7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2025 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,63% di tahun 2022, 4,11% di tahun 2023, 3,86% di tahun 2024 dan 3,69% di tahun 2025. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2022 dan 2025 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2020-2025 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2020-2025



Sumber: BPS, 2025

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 sebanyak 179,71 ribu orang atau berkurang sebanyak 8,80 ribu orang dari Agustus 2023 sebesar 188,51 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri atas 4.492,57 ribu orang penduduk bekerja dan 172,36 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah Angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing -masing bertambah sebanyak 5,13 ribu orang dan 12,47 ribu orang, sedangkan pengangguran turun 7,35 ribu orang.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,94 persen poin sejak Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 69,88 persen, turun 0,68 persen poin dibanding Februari 2025. TPAK Adalah persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

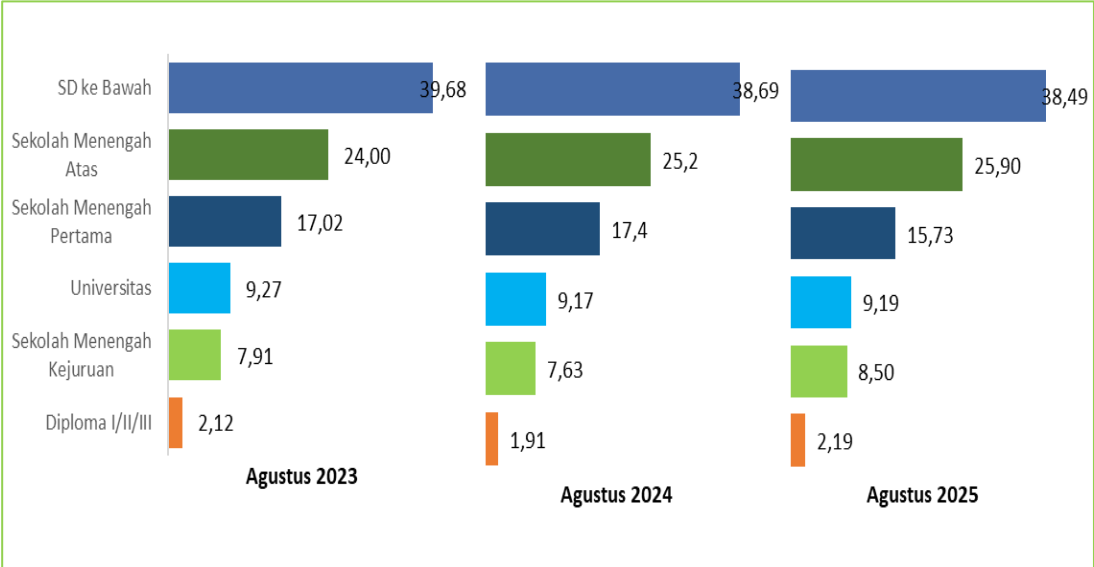
Berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,82 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,46 persen. Dibandingkan pada Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,97 persen poin sedangkan TPAK Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2025, Sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,49 persen. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami tren yang menurun sejak Agustus 2023. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,38 persen dan mengalami tren yang semakin meningkatkan dari Agustus 2023. Distribusi penduduk bekerja menurut Pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023 dan Agustus 2024.

Dibandingkan dengan Agustus 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 0,20 persen poin dan 1,67 persen poin. Selanjutnya penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan juga mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,70 persen poin 0,28 persen poin, dan 0,02 persen poin.

Gambar 2.77
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang
Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan

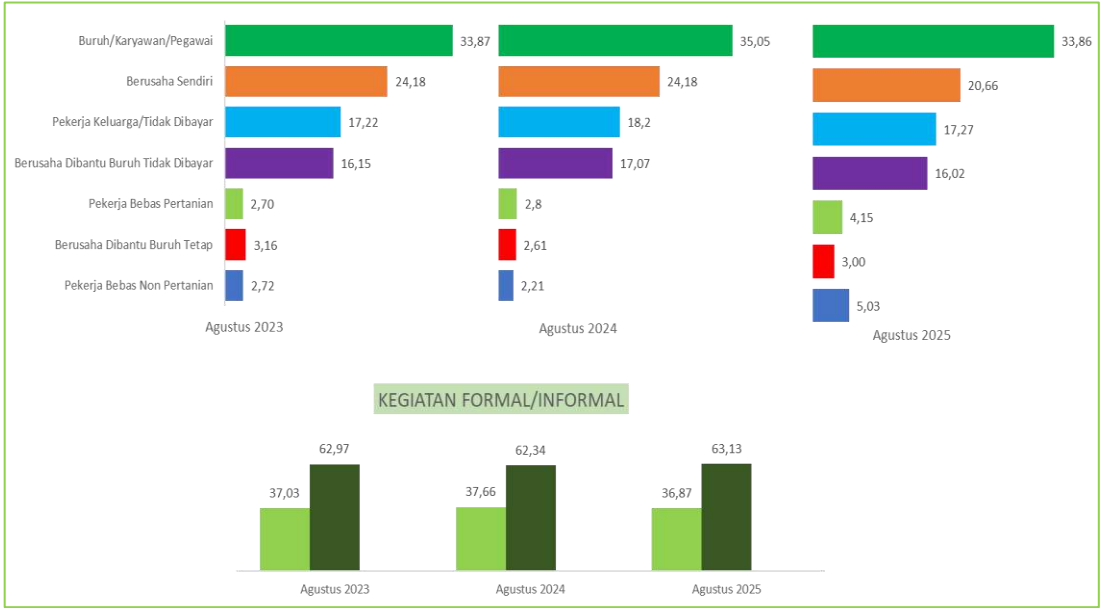


Sumber: BPS Sumsel, 2025

Bila dibandingkan Agustus 2023 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja juga turun pada pendidikan SD (1,19 persen poin), SMP (1,29 persen poin), pendidikan SMK meningkat (0,59 persen poin) dan Pendidikan Diploma meningkat (0,07 persen poin). Peningkatan kontribusi yang cukup besar terdapat pada penduduk bekerja dengan pendidikan SMA sebesar 1,9 persen dan Pendidikan Universitas menurun sebesar 0,08 persen.

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

STATUS PEKERJAAN UTAMA



Sumber: BPS Sumsel, 2025

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak

tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2.836,38 ribu orang (63,13 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.656,19 orang (36,87 persen). Dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,79 persen poin sedangkan pendudukan bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen poin.

7.4. Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik

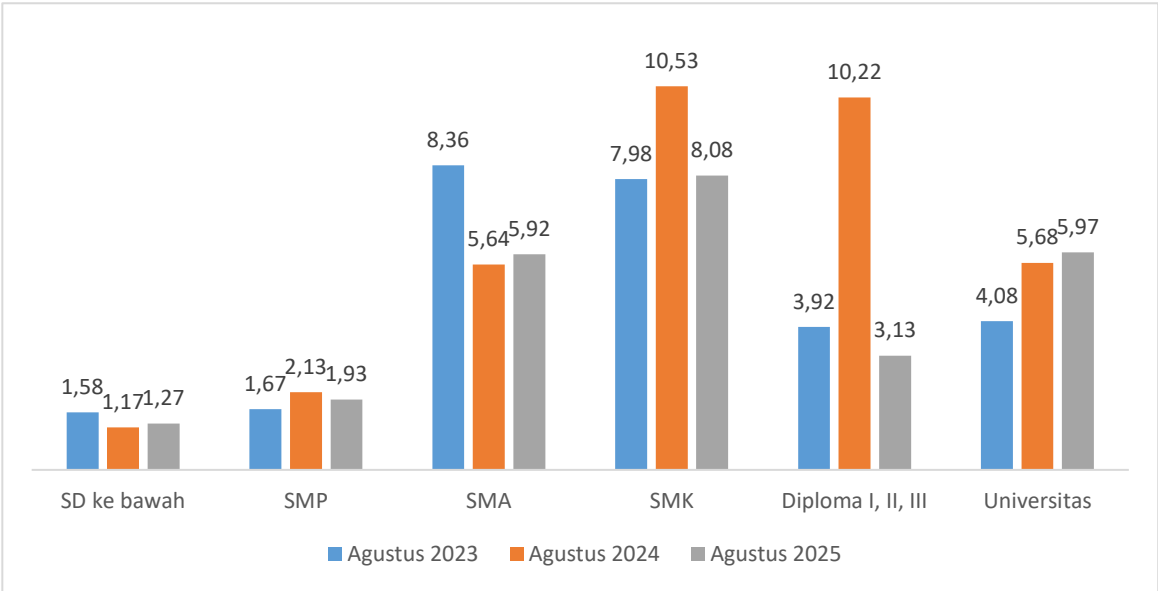
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama pada Agustus 2024, Agustus 2023, dan Agustus 2022. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,92 dan 8,08 persen meskipun terus mengalami penurunan sejak tahun 2023. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,27 persen.

Dibandingkan Agustus 2024, TPT hampir semua kategori mengalami penurunan kecuali untuk tamatan SD yaitu naik sebesar 0,10 persen poin dan SMK yang turun sebesar 2,45 persen poin. Namun jika dibanding Agustus 2023, kategori yang mengalami peningkatan yaitu tamatan SMA sebesar 0,28 persen poin, tamatan SMP mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin, DI/II/III menurun sebesar 7,09 persen poin sedangkan SI/II/III meningkat sebesar 0,29 persen poin.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja

di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 2.79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: BPS Sumsel 2025

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut

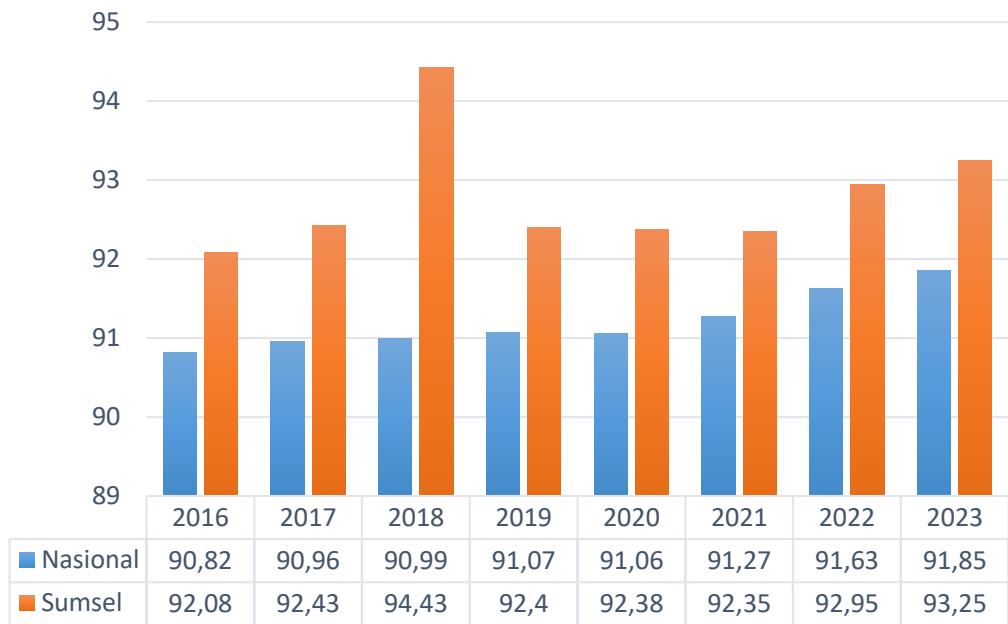
belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

8) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian IPG Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 92,95 persen. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional yaitu sebesar 91,63 persen atau nomor 10 tertinggi di Indonesia. Capaian pada tahun 2023 sebesar 93,25 persen dan masih berada di atas angka nasional sebesar 91,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa GAP pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Sumatera Selatan setiap tahun membaik, dimana prestasi pembangunan manusia perempuannya relatif besar dibandingkan laki-laki.

Gambar 2.80
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 – 2023



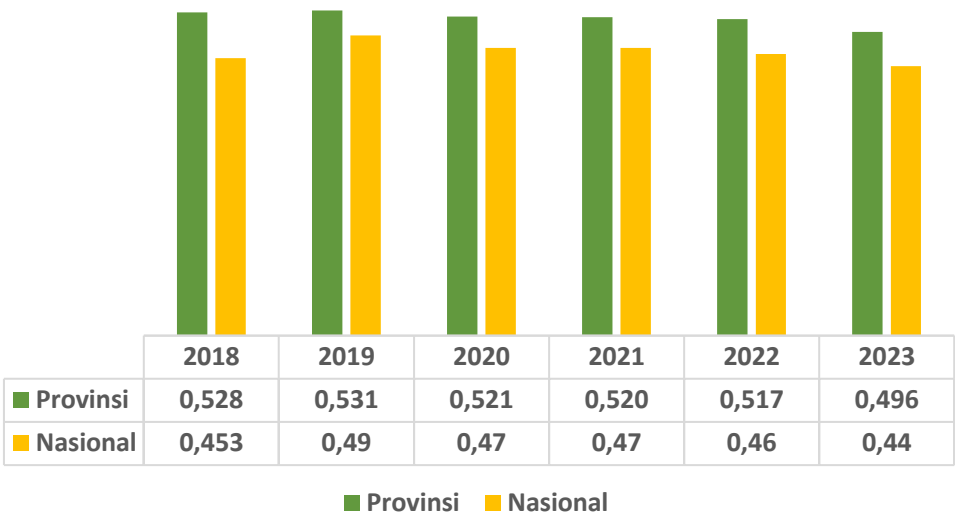
Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG adalah adopsi dari Gender Inequality Index (GII) yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,032 poin, rata-rata turun 0,006 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Selatan semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Gambar 2.81
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

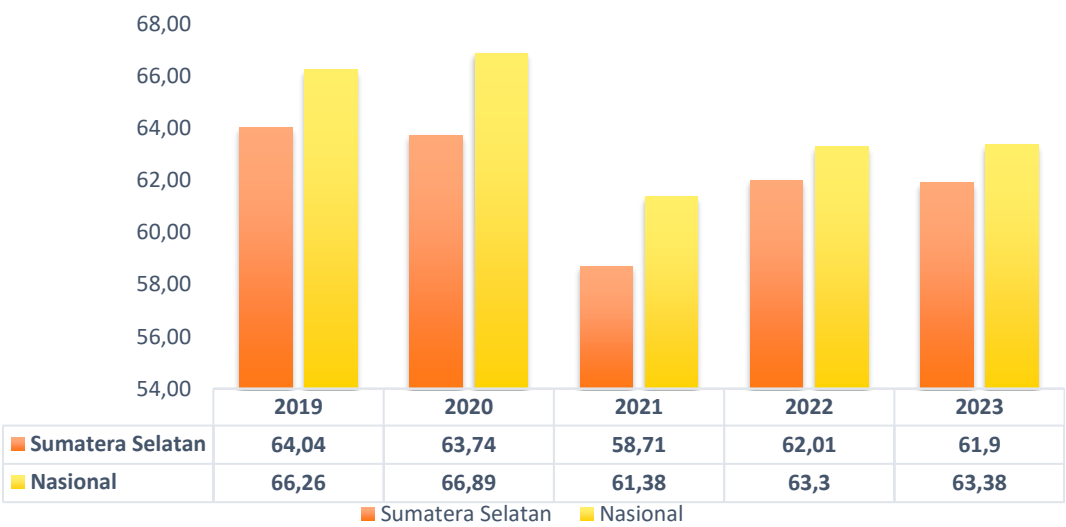


Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 62,01 tetapi masih berada di bawah capaian nasional. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja keras bersama agar Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan lebih Optimal.

Gambar 2.82
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PPPA Sumsel

9) **Urusan Pangan**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan tercermin dari ketersesedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Meningkatnya ketahanan pangan merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah. Berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Ketahanan Pangan serta menurunnya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU). Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Selatan meningkat signifikan dari 74,07 pada Tahun 2024 menjadi 79,31 pada Tahun 2025. Sementara itu, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) menunjukkan penurunan, meskipun relatif kecil, dari 5,97 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,94 persen pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan tren positif dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan penurunan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2021 s.d. 2025 selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.56
IKP dan PoU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

No.	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	69,55	69,64	73,82	74,07	79,31

2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,82	7,37	6,53	5,97	5,94

Sumber: DKPP Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.56, IKP menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Pada Tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 69,55 dan relatif stagnan pada tahun 2022 menjadi 69,64. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,82 dan terus meningkat pada Tahun 2024 sebesar 74,07, hingga mencapai 79,31 pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan di masyarakat.

Sementara itu, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) cenderung mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2021 PoU tercatat sebesar 6,82 persen dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 7,37 persen. Namun, angka tersebut menurun pada Tahun 2023 menjadi 6,53 persen, kemudian kembali menurun pada Tahun 2024 sebesar 5,97 persen, dan mencapai 5,94 persen pada Tahun 2025. Penurunan PoU ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan IKP yang meningkat sejalan dengan menurunnya angka PoU menunjukkan keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi ketahanan pangan tercermin dari 3 pilar utamanya yaitu :

1. Aspek Ketersediaan Pangan
2. Aspek Keterjangkauan Pangan
3. Aspek Pemanfaatan Pangan

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan strategis di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.57
Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 (ASEM)

No.	Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Minus (Ton)
1	Beras	1.124.468,10	853.178,14	271.289,95
2	Jagung	195.264,47	148.326,39	46.938,08
3	Kedelai	67.046,33	67.042,19	4,14
4	Bawang Merah	30.444,39	30.425,77	18,61
5	Bawang Putih	26.158,17	26.142,75	15,42
6	Cabai Besar	45.983,83	45.341,68	642,15
7	Cabai Rawit	28.161,60	27.822,72	338,88
8	Daging Ruminansia	12.309,52	14.361,73	-2.052,20
9	Daging Unggas	158.788,25	119.812,84	38.975,41
10	Telur Ayam	193.812,50	99.155,72	94.656,78
11	Gula Pasir Konsumsi	118.050,52	106.223,44	11.827,08
12	Minyak Goreng/Sawit	213.960,35	197.110,46	16.849,90

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2025

Berdasarkan dari data ketersediaan dan kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan 12 (dua belas) komoditi pangan di Provinsi Sumatera Selatan diproyeksikan dapat terpenuhi dengan baik kecuali daging sapi-kerbau, sumber pemenuhan kebutuhan diperoleh dari akumulasi produksi dari wilayah dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun impor/barang masuk dari luar provinsi;
2. Diproyeksikan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi bawang putih sepenuhnya dilakukan melalui impor/barang masuk dari luar provinsi dikarenakan bawang putih tidak dapat tumbuh di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi kedelai, cabai besar, cabai rawit dan bawang merah sebagian besar bersumber dari impor/barang masuk dari luar provinsi.

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Komoditi	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Max	Min	CV
Beras Premium	14.265	14.184	14.181	14.167	14.425	14.774	14.892	14.871	14.786	14.726	14.706	14.693	14.556	14.892	14.167	2,0%
Beras Medium	12.216	12.219	12.235	12.229	12.377	12.988	13.105	13.082	12.937	12.918	12.839	12.796	12.662	13.105	12.216	2,9%
Beras SPHP	12.390	12.398	12.446	12.417	12.457	12.435	12.500	12.444	12.417	12.410	12.387	12.394	12.425	12.500	12.387	0,3%
Jagung Tk Peternak	6.097	6.100	6.100	6.168	6.250	6.259	6.250	6.740	6.795	6.884	7.100	7.270	6.501	7.270	6.097	6,6%
Kedelai Biji Kering (Impor)	9.878	9.882	9.922	10.074	10.209	10.254	10.283	10.289	10.260	10.207	10.200	10.232	10.141	10.289	9.878	1,6%
Bawang Merah	37.451	35.486	42.753	46.693	41.211	39.767	43.718	46.786	38.217	37.052	38.531	43.951	40.968	46.786	35.486	9,3%
Bawang Putih Bonggol	40.308	39.816	43.351	45.094	39.677	36.146	34.983	34.591	34.338	33.826	33.810	35.117	37.588	45.094	33.810	10,4%
Cabai Merah Keriting	61.030	57.708	50.017	54.844	42.090	37.621	38.156	37.712	56.373	53.735	60.573	65.198	51.255	65.198	37.621	19,4%
Cabai Merah Besar	55.060	52.836	46.097	50.731	38.499	33.625	34.610	34.793	50.744	50.157	55.764	63.062	47.165	63.062	33.625	20,5%
Daging Sapi Murni	135.477	135.982	139.691	136.363	135.574	136.376	135.677	135.579	135.507	135.365	135.473	135.599	136.055	139.691	135.365	0,9%
Cabai Rawit Merah	72.551	72.062	78.893	69.223	40.218	41.883	48.814	38.437	40.446	38.282	38.896	62.933	53.553	78.893	38.282	30,1%
Daging Ayam Ras	35.087	33.210	33.756	30.862	31.102	32.869	33.383	32.871	35.958	36.822	36.273	38.508	34.225	38.508	30.862	6,8%
Telur Ayam Ras	28.039	27.345	28.057	27.177	26.796	27.297	27.495	27.503	27.277	28.549	28.485	29.220	27.770	29.220	26.796	2,5%
Gula Konsumsi	17.822	17.957	18.078	18.051	18.049	17.965	17.876	17.809	17.668	17.546	17.517	17.545	17.824	18.078	17.517	1,2%
Minyak Goreng Kemasan	19.511	19.796	19.822	19.895	19.935	19.869	19.901	19.847	19.770	19.731	19.704	19.678	19.788	19.935	19.511	0,6%
Minyak Goreng Curah	16.216	16.143	16.137	16.164	16.133	16.102	16.055	16.019	15.959	15.905	15.884	15.912	16.052	16.216	15.884	0,7%
Tepung Terigu (Curah)	8.773	8.665	8.665	8.655	8.633	8.670	8.668	8.684	8.676	8.639	8.597	8.557	8.657	8.773	8.557	0,6%
Minyakita	17.578	17.724	17.739	17.668	17.600	17.566	17.520	17.380	17.334	17.282	17.262	17.324	17.498	17.739	17.262	1,0%
Tepung Terigu Kemasan	12.651	12.607	12.639	12.645	12.615	12.599	12.614	12.617	12.586	12.600	12.590	12.650	12.618	12.651	12.586	0,2%
Ikan Kembung	36.016	36.602	36.873	37.038	37.248	37.293	37.340	37.556	37.938	38.197	38.489	39.347	37.495	39.347	36.016	2,4%
Ikan Tongkol	26.446	26.994	27.414	27.284	27.348	27.421	27.407	27.543	28.328	28.467	29.090	29.446	27.766	29.446	26.446	3,2%
Ikan Bandeng	27.028	27.626	27.840	27.839	27.719	27.633	27.647	27.741	28.216	28.352	28.471	28.670	27.898	28.670	27.028	1,6%
Garam Konsumsi	11.703	11.394	11.378	11.213	10.996	10.967	10.970	10.970	10.936	10.905	10.841	10.857	11.094	11.703	10.841	2,4%
CV Rata-rata																5,5%

Sumber: Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan hasil analisis, Perkembangan harga komoditi pangan strategis pada tahun 2025 tingkat konsumen terpantau cukup stabil, terutama untuk komoditi : beras premium, beras medium, kedelai biji kering, bawang putih (bonggol), daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, gula pasir lokal, minyak goreng, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam, tepung terigu kemasan dan terigu curah. Terkecuali untuk komoditi cabe rawit merah (CV 30,1%) dan jagung tingkat peternak (CV 6,6%). Tetapi secara rata-rata Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis (%) ≤ 15 % yaitu 5,5 %.

Fluktuasi harga cabe rawit merah bukan hanya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga secara nasional. Fluktuasi Harga cabe rawit merah diakhir dan awal tahun akibat peningkatan permintaan. Kenaikan harga komoditas hortikultura tidak bisa dilepaskan dari faktor fundamental yang memengaruhi pasokan dan permintaan secara simultan. Dua faktor utama yang berkontribusi besar pada lonjakan ini adalah gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan antisipasi kenaikan permintaan pasar jelang Natal dan Tahun Baru. Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan suhu tidak menentu selama kuartal ketiga hingga kuartal keempat 2025 yang mengganggu masa panen dan kualitas produksi cabai rawit merah, cuaca ini memperlambat pertumbuhan tanaman

dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah sentra produksi. Imbasnya, suplai ke pasar menjadi sangat terbatas dan terdistorsi sehingga harga naik tajam.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	KelompokPangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi		
		Ideal	Aktual	
			2024	2025
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	1,5	1,73
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji berminyak	1,0	0,3	0,24
6.	Kacang-kacangan	10,0	6,2	6,74
7.	Gula	2,5	1,9	2,41
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-
Total		100	93,78	95,12

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mencapai angka 95,1 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,8 melebihi target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yakni sebesar 94,1. Capaian ini salah satu bukti bahwa pola konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan sudah mengarah pada komposisi konsumsi yang beragam. Konsumsi sayur dan buah sudah sesuai standar ideal. Sedangkan konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Konsumsi padi-padian, minyak dan lemak, serta pangan hewani telah melebihi anjuran sehingga perlu diturunkan untuk mencapai komposisi seimbang. Hal ini menunjukkan konsumsi penduduk Sumatera Selatan ada perbaikan kualitas konsumsi masyarakat yang mengarah pada keberagaman dan gizi seimbang.

Selain itu kondisi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan 2025 dapat dilihat dari Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Gambar 2.83
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024

Hasil dari penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan diketahui bahwa tidak ada satupun wilayah kecamatan yang mengalami kondisi rawan pangan kronis, hal ini terlihat dari hasil analisis FSVA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Diketahui sebagian besar atau 99,18 % wilayah kecamatan sudah berada pada kondisi tahan pangan, hanya 0,82 % wilayah kecamatan yang tergolong pada kondisi rentan pangan.

Dari skala prioritas penanganan kerawanan pangan Sumatera Selatan dapat diurutkan untuk prioritas 3 terdapat 3 kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat di Kecamatan Peninjauan dan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Karang Jaya serta Kabupaten Banyuasin Kecamatan Selat Penuguan. Kabupaten/Kota, prioritas 4 terdapat di 22 kecamatan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, prioritas 5 tersebar di 43 kecamatan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dan terakhir prioritas 6 terdapat di 225 kecamatan yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota.

Tabel 2.60
Target dan Realisasi Produksi Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KIERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025	REALISASI	PERSEN
1	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pendapatan peternak	PRODUKSI DAGING (Ton)*	175.890	173.328	98,54
		1. Sapi	15.766	13.145	83,38
		2. Kerbau	768	521	67,84
		3. Kambing	2.007	1.158	57,70
		4. Domba	132	42	31,82
		5. Babi	220	17	7,73
		6. Ayam Buras	6.859	5.796	84,50
		7. Ayam Ras Petelur	14.521	12.087	83,24
		8. Ayam Ras Pedaging	132.795	138.148	104,03
		9. Itik	2.822	2.414	85,54
		PRODUKSI SUSU (Liter)*	33	10	30,30
		1. Sapi Perah	-	-	-
		2. Kerbau Perah	3	-	-
		3. Kambing PE.	30	10	33,33
		PRODUKSI TELUR (Ton)*	232.762	248.538	106,77
		1. Ayam Buras	3.484	8.474	243,22
		2. Ayam Ras Petelur	221.889	226.105	101,90
		3. Itik	4.946	12.997	262,77
		4. Puyuh	200	59	29,5
		5. Itik Manila	2.243	903	40,25

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. SUMSEL, 2025

Produksi daging pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 175.890 ton dan terealisasi sebesar 173.328* ton (98,54%). Adapun capaian produksi daging sebesar 173.328* ton tersebut terdiri dari daging sapi sebesar 13.145 ton (83,38%), daging kerbau 521 ton (67,84%), daging kambing 1.158 ton (57,70%), daging domba 42 ton (31,82%), daging babi 17 ton (7,73%), daging ayam buras 5.796 ton (84,50%), daging ayam ras petelur 12.087 ton (83,24%), daging ayam ras pedaging 138.148 ton (119,28%), daging itik sebesar 2.414 ton (85,54%).

Produksi susu pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai 5 ton untuk sapi perah. Namun produksi susu di Sumatera Selatan untuk sapi perah tidak terealisasi dikarenakan populasi sapi perah di Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi bantuan sapi perah dan fasilitas lainnya seperti pakan konsentrat dari Dinas Peternakan, selain itu kurangnya

kemampuan peternak dalam melakukan pemeliharaan khusus bagi sapi perah.

Produksi telur pada Tahun 2025 ditargetkan 260.965 ton dan terealisasi mencapai 253.631 ton (97,19%). Adapun produksi telur sebanyak 253.631 ton tersebut terdiri dari telur ayam ras petelur sebesar 226.040 ton (90,87%), telur ayam buras 8.619 ton (220,49%), telur Itik sebesar 17.151 ton (309,19%), telur puyuh 102 ton (44,93%) dan telur itik manila 1.719 ton (68,27%).

Produksi telur sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam provinsi. Dari hasil pengumpulan data diketahui ada peningkatan pada produksi telur ayam buras dan itik. Dimana realisasi produksi telur ayam buras dan itik melebihi target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Ancaman Ketahanan Pangan

1. Risiko Iklim dan Bencana Alam

- Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan peternakan. Hal ini termasuk hujan deras yang menyebabkan potensi banjir dan gangguan pada irigasi sawah atau lahan ternak. Iklim yang tidak stabil dapat menyebabkan kegagalan tanam/ketidakpastian produksi.
- Meskipun banjir besar tahun 2025 terutama terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, fenomena semacam ini menunjukkan kerentanan kawasan Sumatera terhadap cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada rantai distribusi pangan regional, termasuk akses pasar dan logistik.

Ancaman: Penurunan produktivitas panen/pakan ternak, erosi lahan, kerusakan infrastruktur distribusi pangan.

2. Tekanan pada Harga dan Krisis Distribusi Pangan

- Pemerintah Sumatera Selatan mengantisipasi **kenaikan harga kebutuhan pokok** seperti cabai menjelang Natal - Tahun Baru, yang menunjukkan tekanan pada harga akibat permintaan musiman dan kondisi pasokan.
- Harga yang tidak stabil bisa memperlebar kesenjangan akses pangan, khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Ancaman: Ketidakstabilan harga pangan → menurunkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

3. Alih Fungsi Lahan dan Krisis Lahan Pertanian

- Sumatera Selatan mengalami tantangan berupa **penyusutan lahan pertanian** akibat alih fungsi menjadi non-pertanian/industrialisasi atau ekspansi lahan perkebunan lainnya. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memetakan dan mengamankan lahan produktif.

Ancaman: Berkurangnya luas lahan tanam → potensi produksi pangan menurun jangka panjang.

4. Kerentanan pada Sektor Peternakan

- Sektor peternakan berpotensi terpengaruh oleh peristiwa alam dan wabah penyakit, seperti kejadian bencana alam di Sumatera pada akhir 2025 yang menyebabkan kerugian ternak dalam

jumlah besar (misal puluhan ribu ekor di beberapa provinsi Sumatera) — meskipun data khusus Sumatera Selatan tidak disebutkan, fenomena regional ini mencerminkan risiko yang perlu diantisipasi.

- Ancaman penyakit hewan menular atau gangguan pakan terkait iklim dapat mengurangi produktivitas dan berdampak pada pasokan daging, telur, susu.

Ancaman: Penurunan produktivitas peternakan dan kerugian peternak.

5. Tantangan Distribusi dan Infrastruktur

Masalah distribusi menjadi tantangan ketahanan pangan jika pasokan tidak lancar sampai ke pasar tradisional, terutama saat cuaca buruk atau bencana. Sumatera Selatan meningkatkan penguatan stok dan pengaturan distribusi untuk meredam gejolak harga.

Ancaman: Hambatan distribusi → dampak ketersediaan pangan di pasar lokal.

6. Ketergantungan Sistem Pertanian dan Sumberdaya Lokal

- Pemerintah provinsi menyusun **Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025** untuk memetakan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, sehingga kebijakan dapat diarahkan lebih efektif.
- Pemetaan ini menunjukkan perlunya perencanaan berbasis data untuk mengantisipasi ancaman pangan dan meningkatkan ketahanan pangan regional.

Ancaman: Tingginya kerentanan di wilayah tertentu terhadap kekurangan pangan.

7. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama lintas sektor mengimplementasikan berbagai program seperti cetak sawah, optimasi lahan, dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk menghadapi ancaman pangan dan memperkuat produksi pangan lokal.

Risiko yang Masih Perlu Diatasi: Sinkronisasi kebijakan pusat - daerah, penyediaan infrastruktur irigasi, dan peningkatan kapasitas petani agar adaptif terhadap tekanan iklim, pasar, dan penyakit.

10) Urusan Pertanahan

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya diperoleh melalui pembebasan/ganti rugi tanah. Pengadaan tanah tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terutama berkaitan dengan pengadaan tanah.

Pelaksanaan pembebasan lahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun capaian luas tanah bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian Persentase Luas tanah Bersertifikat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2023

No	Tahun	Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar	
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)
1	2012	20.472	148.097	3.750.108	3.041.872
2	2013	71.057	1.111.385	3.679.051	1.930.487
3	2014	53.150	66.640	3.657.005	1.863.846
4	2015	28.104	19.955	3.628.901	1.843.891
5	2016	20.373	623.052	3.608.528	1.220.838
6	2017	201.324	98.182	3.477.727	1.832.305
7	2018	117.789	50.153	3.359.938	1.782.152
8	2019	92.709	37.717	3.267.229	1.744.434
9	2020	53.965	29.010	3.213.264	1.715.425
10	2021	129.615	89.325	3.083.649	1.626.100
11	2022	79.206	50.006	3.004.443	1.576.094
12	2023	200.893	70.962	2.803.550	1.505.132
Jumlah		1.068.657	2.394.484	40.533.393	21.682.576

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2023 (data termutakhir)
Ket. Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan

Berdasarkan data diatas masih terdapat 40.533.393 bidang tanah yang belum terdaftar, dan untuk tanah yang terdaftar baru 2.394.484 bidang tanah, dapat dilihat selisih yang cukup jauh antara bidang tanah yang terdaftar dan tanah yang belum terdaftar. Tidak hanya capaian bidang tanah yang terdaftar saja, tetapi juga masih adanya beberapa konflik lahan yang belum diselesaikan di Sumatera Selatan, 66 kasus pada 15 Kabupaten/Kota dan 2 kasus pada Provinsi Sumatera Selatan. Total keseluruhan terdapat 68 kasus yang harus diselesaikan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sangatlah strategis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dan di lain pihak tuntutan dunia internasional akan kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu perwujudan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan ataupun aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Adapun keberhasilan yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik Nasional. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yaitu Dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Penghargaan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada

saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Istana Bogor.

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK
Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
		(Ton CO2-eq)				
1	Lahan dan Gambut	198.947	563.967	82.705,00	82.705,00	27.078.090,00
2	Pertanian dan Peternakan	190.911	2.035	-	-	-
3	Energi dan Transportasi	13.274	-	204,135	204,135	-
4	Pengelolaan Limbah	2.943	9.198	16.375,43	48,068	44.509,762
Total		406.075	575.200	99.284,57	82.957,20	27,122,600

Sumber : Data olahan dari Sistem Pelaporan online AKSARA

Tabel 2.63
Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK
Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)

Tahun	Capaian Penurunan	Target Penurunan
2019	4,39%	4,95 %
2020	5,56%	5,56 %
2021	11,61%	6,18 %
2022	17,60%	6,80 %
2023	49.57%	7,14 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sudah baik apabila dibandingkan dengan target dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Nilai emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan juga sudah baik karena Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (POKJA) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sudah berperan aktif melaksanakan kegiatan konservasi karbon dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

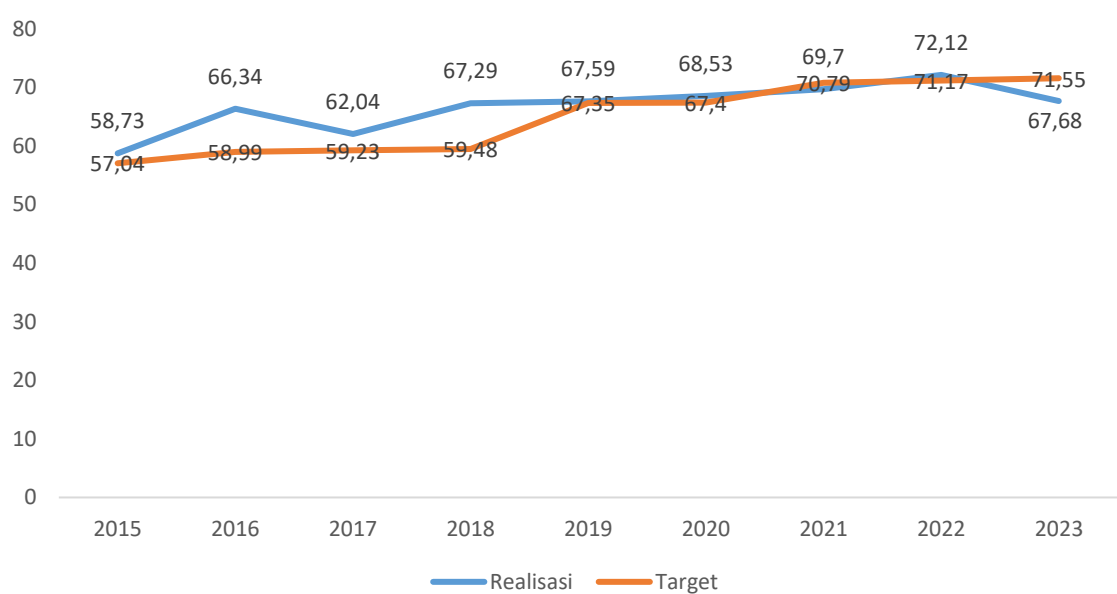
Pada tahun 2023, Nilai Emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan Jika dikaitkan dengan revisi target penurunan nasional dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Nationally Determined Contribution (NDC) Provinsi Sumatera Selatan yang berubah dari 27,3% di tahun 2024 menjadi 29% di tahun 2030 sudah melampaui target tersebut. Sektor Hutan dan Lahan, sub Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut Mendominasi Aksi mitigasi ini.

Dengan upaya Peningkatan Cadangan Karbon melalui Pembinaan pengembangan hutan tanaman industri dan produksi kayu kepada Perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori sedang yaitu berkisar antara 50 sampai dengan 70. Untuk tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori Bagus yaitu berkisar antara 70 sampai dengan 90. Akan tetapi terjadi lagi penurunan Nilai IKLH pada tahun 2023, yaitu sebesar 67.68 jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,12, Hal ini juga disebabkan oleh adanya perubahan perhitungan indikator IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian Republik Indonesia. Perubahan perhitungan indikator IKLH ini melibatkan perubahan perhitungan indikator penyusunnya yaitu Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Gambar 2.84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2023



Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Indeks kualitas udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Sebelum adanya perubahan perhitungan Indikator IKLH, IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu Sulfur

Dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NO2), akan tetapi setelah adanya perubahan perhitungan, ada penambahan parameter PM2.5 (Particulate Matter 2.5 mikron).

Sebelum adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, Indeks kualitas air (IKA) dihitung menggunakan status mutu dengan metode Indeks Pencemaran, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003, setelah adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, IKA dihitung dengan tidak membandingkan kualitas air (modifikasi dari metode NSF – WQI, National Sanitation Foundation – Water Quality Index). Nilai Maksimum IKA pada perubahan perhitungan indikator IKLH ini adalah 100.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), hutan merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Pada perubahan perhitungan indikator IKLH, IKTL dihitung dengan mengakomodir semua jenis tutupan lahan (23 klasifikasi tutupan lahan) yang sebelumnya hanya 9 jenis tutupan lahan.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Titik kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 mengalami pengurangan dari tahun 2023 yaitu sebesar 15.886 titik kebakaran (hotspot). Semula 20.547 titik kebakaran di tahun 2022, menurun menjadi 4.661 titik kebakaran (hotspot) pada tahun 2021. Begitupun untuk luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 terjadi penurunan luas lahan yang terbakar dibandingkan tahun 2023, yaitu berkurang dari 121.653 hektar pada tahun 2023 menjadi 13.957 hektar lahan terbakar pada tahun 2024.

Tabel 2.64
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten	2021		2022		2023		2024	
		hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	400	1035	144	247	10636	70.857	364	1.556
2	Banyuasin	196	216	113	11	2.019	26.450	404	2.687
3	Musi Banyuasin	365	527	366	201	1457	4.255	980	4.011

4	Musi Rawas	286	760	366	433	766	1.350	539	1.209
5	Muara Enim	153	130	170	128	811	3.071	729	1.652
6	Musi Rawas Utara	163	234	317	631	1008	4.903	499	859
7	Ogan Ilir	110	998	35	1443	812	7.497	87	717
8	Penukal Abab Lematang Ilir	225	446	238	61	343	455	126	276
9	OKU Timur	114	65	49	96	722	1.372	127	80
10	Lahat	291	66	121	19	557	321	277	4
11	Ogan Komering Ulu/OKU	165	330	115	262	607	19	185	676
12	Empat Lawang	92	49	90	9	231	23	117	10
13	Palembang	4	na	2	24	58	1.079	8	1
14	OKU Selatan	196	44	151	5	425	3	166	211
15	Pagaralam	6	na	5	na	11	na	4	na
16	Lubuk Linggau	18	7	14	na	17	na	11	na
17	Prabumulih	10	4	94	1	67	na	38	10
	Total	2794	4.910	2390	3.568	20547	121.653	4661	13.957

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan juga menjadi wewenang provinsi.

Sampai dengan 30 Juni 2025 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 9.135.317 jiwa dan yang sudah wajib KTP sebanyak 6.612.473 jiwa dan yang sudah berhasil memperoleh cetak KTP-El sebanyak 6.333.294 atau 95,78% .

Di tingkat Kabupaten dan Kota, sudah Cetak KTP-El yang sudah mencapai di atas 98 persen adalah Kota Palembang sebesar 98,74%, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 98,17%, Kabupaten Muara Enim sebesar 98,05%, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 98,01%. Sementara ada 2 kabupaten yang paling rendah pencapaian Cetak KTP-Elnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 83,17% dan Kabupaten Empat Lawang 63,81%.

Kendala yang terjadi dalam pencapaian perekaman dan cetak KTP-El antara lain karena kendala jaringan listrik, sarana dan prasarana terbatas, alat rekam yang rusak, dan lokasi jauh dari jangkauan serta banyaknya blanko KTP-El yang rusak.

Tabel 2.65
Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan
Per 31 Juni 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk	JML Wajib KTP	Sudah Cetak	
					Jumlah	%
1	1601	OGAN KOMERING ULU	392.649	284.405	275.996	95,78
2	1602	OGAN KOMERING ILIR	809.627	585.413	574.673	97,04
3	1603	MUARA ENIM	660.533	474.698	465.442	98,17
4	1604	LAHAT	449.951	330.196	321.608	97,40
5	1605	MUSI RAWAS	429.670	314.058	304.390	96,92
6	1606	MUSI BANYUASIN	746.735	523.179	512.753	98,01
7	1607	BANYUASIN	896.192	638.795	624.197	97,71
8	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	700.327	515.545	500.048	96,99
9	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	408.280	305.153	253.792	83,17
10	1610	OGAN ILIR	449.215	267.718	315.007	97,28
11	1611	EMPAT LAWANG	337.578	150.199	170.841	63,81
12	1612	PALI	216.100	145.081	146.983	97,86
13	1613	MUSI RAWAS UTARA	205.366	145.081	140.034	96,52
14	1671	PALEMBANG	1.814.716	1.309.492	1.293.017	98,74
15	1672	PAGAR ALAM	153.984	113.319	110.922	97,88
16	1673	LUBUKLINGGAU	249.573	178.489	174.783	97,92
17	1674	PRABUMULIH	214.821	152.915	148.808	97,31
		PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.135.317	6.612.473	6.333.294	95,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel, 2025

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sejalan dengan dinamika kebijakan pembangunan desa, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa telah menetapkan perubahan instrumen pengukuran pembangunan dan kemandirian desa. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Indeks Desa sebagai instrumen pengukuran yang baru.

Indeks Desa sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 9 Tahun 2024 merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan, kemandirian, dan keberlanjutan desa secara lebih komprehensif. Penyempurnaan dari Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa sebagai alat ukur tunggal capaian pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat keterpaduan data, serta menyesuaikan

indikator pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Hasil pengukuran Indeks Desa digunakan sebagai dasar penetapan status desa, perumusan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penentuan prioritas program dan kegiatan, serta sebagai salah satu rujukan dalam pengalokasian Dana Desa. Dengan demikian, Indeks Desa menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti, khususnya pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tertinggi sebesar 1% dan Alokasi Kinerja untuk Desa Berkembang, Maju dan Mandiri serta indikator lainnya sebesar 4% dari total Dana Desa.

Indeks Desa merupakan indeks komposit yang disusun dari beberapa dimensi utama yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh. Indeks Desa terdiri atas 6 komponen dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola. Masing-masing dimensi ini kemudian dipecah lagi menjadi sub-dimensi dengan indikator-indikator spesifik.

Semua dimensi pada indeks desa digunakan secara terintegrasi untuk menetapkan status dan tingkat perkembangan desa sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Indeks Desa mengklasifikasikan status kemajuan dan kemandirian desa yang terdiri atas Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Tabel 2.67
Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
Tingkat Nasional Tahun 2025

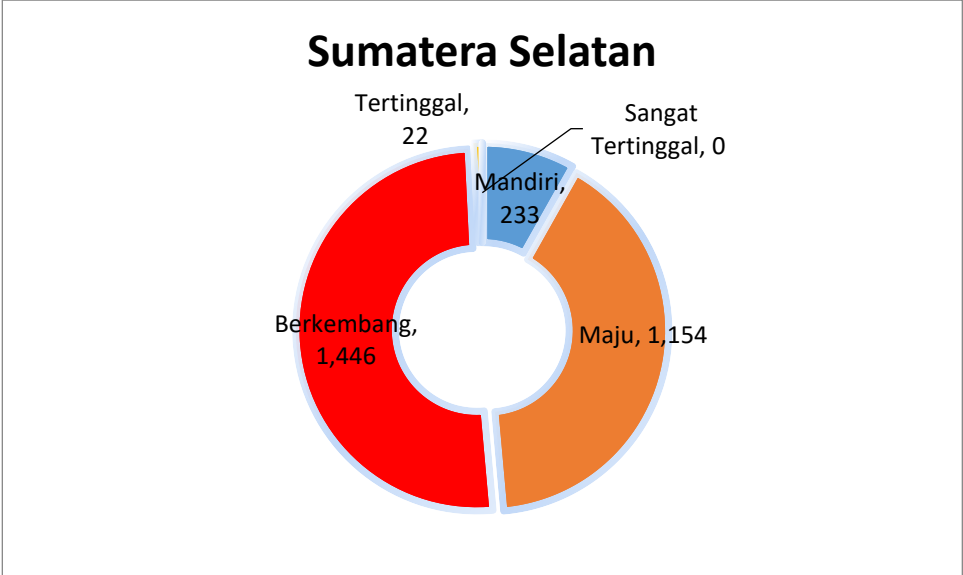
NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	20.503 Desa
2	Desa Maju	23.579 Desa
3	Desa Berkembang	21.813 Desa
4	Desa Tertinggal	4.672 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.694 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4 Desa
TOTAL		75.265 Desa

Sumber : Lampiran Kepmendes dan PDT No.343 Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025, dari total 75.265 desa di Indonesia pada tahun 2025, sebanyak 20.503 desa (27,24%) telah berstatus Desa Mandiri dan 23.579 desa (31,33%) berstatus Desa Maju. Sementara itu, Desa Berkembang tercatat sebanyak 21.813 desa (28,99%), sedangkan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal masing-masing berjumlah 4.672 desa (6,21%) dan 4.694 desa (6,24%). Selain itu, terdapat 4 desa (3 desa di Provinsi Aceh dan 1 desa Provinsi Kalimantan Selatan) yang tidak memenuhi kriteria penilaian Indeks Desa karena kondisi khusus yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pengukuran. Komposisi ini menunjukkan tren peningkatan kualitas pembangunan desa secara nasional, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi kebijakan yang terarah untuk percepatan penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Tabel 2.85

**Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**



Sumber : Lampiran Kepmendes dan PDT No.343 Tahun 2025

Sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Status Kemajuan dan Kemandirian Desa menunjukkan bahwa mayoritas desa berada pada kategori Berkembang dan Maju. Dari 2.855 jumlah desa di Sumatera Selatan, sebanyak 1.446 desa berstatus Berkembang dan 1.154 desa telah mencapai status Maju. Sementara itu, desa dengan status Mandiri tercatat sebanyak 233 desa, mencerminkan capaian positif dalam penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan tata kelola desa. Di sisi lain, jumlah desa berstatus Tertinggal relatif kecil, yaitu 22 desa, dan tidak terdapat desa dengan status Sangat Tertinggal. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam pembangunan desa secara berkelanjutan serta efektivitas intervensi pembangunan perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.68
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Status Desa					Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Banyuasin	17	113	158	0	0	288
2	Empat Lawang	5	48	94	0	0	147
3	Prabumulih	0	10	2	0	0	12
4	Lahat	21	174	165	0	0	360
5	Muara Enim	27	107	111	0	0	245
6	Musi Banyuasin	112	88	28	1	0	229
7	Musi Rawas	7	84	95	0	0	186
8	Musi Rawas Utara	0	25	57	0	0	82
9	Ogan Ilir	3	94	129	1	0	227
10	Ogan Komering Ilir	7	85	222	0	0	314
11	Ogan Komering Ulu	14	56	70	3	0	143
12	OKUS	1	67	167	17	0	252
13	OKUT	5	177	123	0	0	305
14	PALI	14	26	25	0	0	65
	Total	233	1154	1446	22	0	2855

Sumber : Lampiran Kepmendes dan PDT No.343 Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa kondisi desa di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Dari total 2.855 desa, sebanyak 233 desa berada pada status Mandiri, 1.154 desa berstatus Maju, dan 1.446 desa berada pada kategori Berkembang. Sementara itu, desa dengan status Tertinggal tercatat sebanyak 22 desa, dan tidak terdapat desa dengan status Sangat Tertinggal.

Secara spasial, kontribusi desa Mandiri terbesar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 112 desa, diikuti Kabupaten Muara Enim (27 desa) dan Kabupaten Lahat (21 desa). Desa berstatus Maju paling banyak terdapat di Kabupaten Lahat (174 desa), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (177 desa), dan Kabupaten Banyuasin (113 desa). Sementara itu, desa dengan status Berkembang dominan terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (222 desa), Kabupaten Banyuasin (158 desa), dan Kabupaten OKU Selatan (167 desa). Adapun desa berstatus Tertinggal masih ditemukan secara terbatas di Kabupaten Musi Banyuasin (1 desa), Kabupaten Ogan Ilir (1 desa), Kabupaten Ogan Komering Ulu (3 desa), dan Kabupaten OKU Selatan (17 desa). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa di Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada jalur yang positif, dengan mayoritas desa berada pada kategori berkembang dan maju, serta tantangan pembangunan yang semakin terfokus pada wilayah-wilayah tertentu yang masih tertinggal.

Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa PPDT Tahun 2020-2024 mengamanatkan Lokasi Prioritas Nasional dimana dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (Non KPPN). Serta menetapkan juga 62 daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.

Dari lokus 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 1 kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago yang berada di Kabupaten Banyuasin dengan status Kawasan Mandiri. Sedangkan untuk Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (Non KPPN), Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 3 Kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Musi Rawas, Kawasan Perdesaan Sentra Produksi Padi Organik Penunjang Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kawasan Perdesaan Sikap Dalam di Kabupaten Empat Lawang. Selain itu juga Provinsi Sumatera Selatan 1 lokus daerah tertinggal yaitu berada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan kawasan perdesaan sebagai salah satu prioritas nasional berdasarkan kebijakan pembangunan nasional yang berada dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Salah satu strategi pembangunan kawasan perdesaan untuk menuju kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah, revitalisasi Bumdes dan Bumdesa Bersama, pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, dan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan mitra pembangunan lainnya. Sedangkan salah satu strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar

pusat pertumbuhan, pengembangan potensi unggulan daerah dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup yang salah satunya adalah perlombaan desa dan kelurahan. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan regional. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan mempunyai 2 (dua) rangkaian kegiatan pokok yaitu penilaian dan temu karya nasional. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi beberapa aspek yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dengan membandingkan data atau kondisi desa atau kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir, data profil Desa dan kelurahan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau dokumen perencanaan kelurahan.

Tabel 2.68
Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025

PEMENANG	NAMA DESA / KELURAHAN					
	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Juara I	Pemenang Desa	Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS	Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
	Pemenang Kelurahan	Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Dempo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang	Desa Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang	-

Juara II	Pemenang Desa	Desa Enggal Rajo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin	Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKUT	Desa Kurangan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT	Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara	Desa Battuwina Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu
	Pemenang Kelurahan	-	-	-	Desa Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kabupaten Pagar Alam	-
Juara III		Desa Sukamaju Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI	Desa Sumber Sari Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara	Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim	Desa Tanjung Agung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Lahat	Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Juara Harapan I		Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim	Desa Sido Mulyo 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin	Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS	Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir	Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin
Juara Harapan II		Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lili Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	Desa Tirta Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin	Desa Sido Makmur Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Juara Harapan III		-	Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten OKU	Desa Giri Mulya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat	Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Desa Simpang Taos Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel Tahun 2025

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan untuk menyaring desa dan kelurahan terbaik di setiap Kabupaten/Kota, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan setiap tahun dan pemenang lomba desa dan kelurahan ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian lomba tersebut mempertimbangkan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, perkembangan profil desa dan kelurahan, tingkat kepatuhan kepala

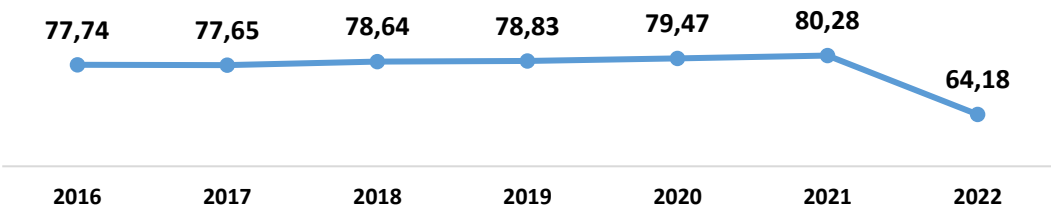
desa dan lurah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta upaya desa dan kelurahan dalam melestarikan adat dan budaya setempat.

Sebagai bentuk motivasi, para juara 1 perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi akan diikutsertakan pada lomba desa dan kelurahan tingkat nasional/regional. Serta akan diundang pada acara temu karya nasional di ibukota negara dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diraih.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan atau Dinas Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

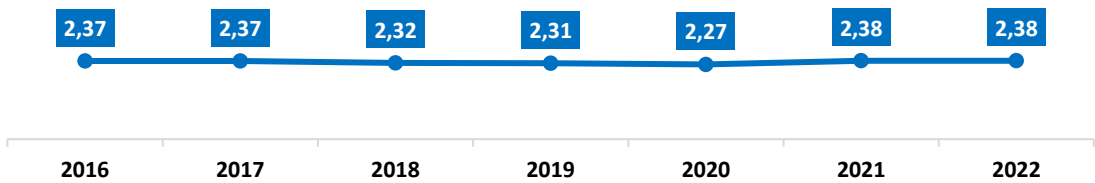
Gambar 2.86
Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)



Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Selama beberapa tahun terakhir persentase pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat. Capaian pemakaian kontrasepsi bagi PUS tahun 2016 sebesar 77,74%, angka tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun 2017 sebesar 77,65%. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga Tahun 2021 terus meningkat berturut-turut menjadi 78,64% tahun 2018, sebesar 78,83% tahun 2019, 79,47% di tahun 2020 dan 80,28% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 persentase pemakaian kontrasepsi bagi PUS menurun menjadi 64,18%.

Gambar 2.87
Total Fertility Rate (TFR)



Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Capaian Total angka kelahiran (*Total Fertility Rate*/TFR) selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) secara umum mengalami tren penurunan. Tahun 2016 sebesar 2,37 terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 2,27. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat dengan angka yang sama yaitu menjadi 2,38.

Tabel 2.68
Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (org)	Unmet Need KB(%)
1	2016	1.650.420	194.402	11,78
2	2017	1.685.705	202.742	12,03
3	2018	1.726.165	192.363	11,14
4	2019	1.778.618	197.893	11,13
5	2020	1.788.136	225.305	12,6
6	2021	1.740.923	262.880	15,1
7	2022	1.262.814	188.160	14,9

Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan,2023

Perkembangan unmet need KB dari tahun 2016-2022 secara umum mengalami tren naik turun, untuk tahun 2016 dari jumlah orang yang mengalami Unmet Need sebesar 11,78% (194.402 orang) dari Jumlah PUS 1.650.420. Pada tahun 2017 dari Jumlah PUS sebesar 1.685.705 orang mengalami unmet need sebesar 12,03% (202.742 orang). Pada tahun 2018 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, Jumlah PUS 1.726.165 orang sehingga persentase unmet neednya 11.14% (192.363 orang), sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 11,13% (197.893 orang) dari Jumlah PUS

yang terdata 1.778.618 orang namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,6% dari jumlah PUS sebanyak 1.788.136 orang dengan 225.305 orang. Pada tahun 2021 jumlah PUS yang mengalami unmet need meningkat kembali menjadi 262.880 orang atau 15,1% dari jumlah PUS sebanyak 1.740.923 orang dan pada tahun 2022 menurun menjadi 188.160 orang atau sebesar 14,9% dari 1.262.814 orang.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimaliasasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitas pelaksanaan kampung KB.

15) Urusan Perhubungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditingkatkan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagian pengemudi kendaraan belum berjalan baik. Ditambah lagi dengan masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan maka masalah keselamatan transportasi jalan harus mendapat perhatian serius dan mendapat prioritas dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor transportasi

Transportasi Darat

Prasarana pendukung yang saat ini telah dimiliki oleh Sumatera Selatan adalah **36 terminal** angkutan umum yang terdiri dari terminal tipe A sebanyak 8 terminal atau sebesar **22,2 persen**, tipe B sebanyak 7 terminal atau sebesar **19,4 persen** dan tipe C

sebanyak **21 terminal** atau sebesar **58,3 persen**. Semakin banyak angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang berplat hitam (travel) dan beroperasinya jalan TOL berdampak terhadap semakin berkurangnya angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang sama dan pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

Tabel 2.69
Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B	C C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih			C C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading			C C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang 2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit		B	C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan	A		C C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A		C C C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A		C C
14	Lahat	1. Batay 2. Muara Siban 3. Lembayung	A		C C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber: Statistik Dishub Sumsel, 2023 (data termutakhir)

Pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta api yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2.70
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuklinggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda *Light Rail Transit* (LRT) sepanjang 23,4 km yang dibangun dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai Komplek Olahraga Jakabaring. Terdapat 13 stasiun, yaitu stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. LRT dioperasikan pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Pertumbuhan penumpang LRT sangat baik, kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah rata-rata penumpang per bulan. Pada tahun 2018, jumlah penumpang LRT sebanyak 922.432 orang dan meningkat menjadi 4.182.326 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini

dorong oleh mulai efektifnya angkutan umum *Feeder LRT* sehingga memberikan koneksi penumpang bisa *point to point*.

Tabel 2.71
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023

No	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BARANG (TON)	10,276,778	12,761,827	14,934,008	18,678,576	22,574,537	26,029,055
2	PENUMPANG (ORANG)	1,097,656	1.132.815	302,896	184,709	661.626	765,764

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Suamtera Selatan dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Sejak diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Manfaat dari LRT bagi Suamtera Selatan adalah peningkatan mutu pelayanan transportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi. Gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang, moda transportasi ramah lingkungan, dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Suamtera Selatan dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah penumpang *Light Rail Transit* (LRT) Suamtera Selatan.

Tabel 2.72
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	BULAN	PENUMPANG		
		2021	2022	2023
1	Januari	102.919	193.990	316.521
2	Februari	91.648	156.520	261.581
3	Maret	117.297	195.842	279.622
4	April	112.398	156.521	361.765
5	Mei	147.850	355.840	336.260
6	Juni	159.642	260.710	355.364
7	Juli	102.552	245.984	370.468
8	Agustus	89.951	234.443	345.598
9	September	125.082	257.444	351.428
10	Oktober	178.517	310.270	344.388
11	November	173.679	310.171	342.228
12	Desember	197.598	410.000	417.496
	TOTAL	1.599.133	3.087.735	4.082.719

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut:

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi), dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbonenya* yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT;
2. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikkan kinerja *performance* pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang;
3. Mengembangkan park and ride di beberapa stasiun LRT serta mengembangkan *skybridge* sebagai transit *joint development*;
4. Menciptakan *public policy* dengan *stated preference* agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan kendaraan genap ganjil, kawasan *three in one*;

- 5. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamphlet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT;
- 6. Membuat Surat edaran atau peraturan gubenur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum;
- 7. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kerata Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti *Advertising*, *Transit Joint Development* dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana saat ini operasional dilakukan oleh PT. KAI;

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak pengusaha prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan *non fare box* diluar tiket penumpang seperti pendapatan *advertising*.

Transportasi Air

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Gambar 2.88
Angkutan Sungai di Sungai Musi



Tabel 2.73
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komerling	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin Musi Banyuasin	Tungkal Ilir Sungai Lilin, Sanga Desa	1 2	2 3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
14	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI	Abad	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
15	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	1 2	65
16	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
17	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
18	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
19	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
	Total			62	355

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2023 (data mutakhir)

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel 2.74
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja, Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab
86	Muara Enim	S.Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2023 (data mutakhir)

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan Keuangan bersifat khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, Tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan Tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.75
Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
I	2020			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	2021			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	2022			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebubus	Beton

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung

dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 Nautical Mile, Alur Sungai Banyuasin (Kelas II) sepanjang 11 Nautical Mile dan Alur Sungai Lematang 115 Nautical Mile.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jenis kapal antara lain : speedboat, tugboat, kapal gandeng/ tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik. Dermaga Penyeberangan TAA menuju Bangka sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah penumpang dimana hal itu disebabkan oleh wabah covid 19 dimana jumlah penumpang sebanyak 99.189 orang penumpang dan kendaraan yang diangkut 127,785 unit.

Tabel 2.76
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH TRIP	3,721	4,543	5,171	3.074	3.160
2	JUMLAH PENUMPANG	99,189	287,969	67,525	65.096	66.263
3	JUMLAH KENDARAAN	127,785	108,006	136,071	105.503	99.773

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel 2.77
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Gol I (Sepeda)	47	11	13	13	25
2	Gol II (Sepeda Motor)	27,066	17,881	14,849	17,934	19.695
3	Gol III (Bemo)	610	113	54	154	76

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	46,213	36,605	45,781	43,181	37.891
5	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	46,864	53,311	64,060	36.788	34.779
6	Gol VI (truck Fuso)	5,889	5,725	9,401	6.557	6.531
7	Gol VII (truck tronton)	1,024	706	1,437	876	776

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023 (data mutakhir)

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Darmaga Laut Regional Tanjung Api-Api ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pada tahun 2019 dermaga tersebut sudah diresmikan dan mulai beroperasi sebagai pelabuhan Pengumpul, Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Pelindo dan KSOP untuk mengelolanya.

Gambar 2.89
Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan direvitalisasi, Jumlah Bandara yang Ada di Sumatera Selatan yang beroperasi ada 3 yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam Selanjutnya akan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2019 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 3,966,122 orang penumpang datang atau berangkat menggunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren menurun keberangkatan penumpang domestik dan internasional menggunakan fasilitas Bandara SMB II tahun 2020 s.d. 2021 rata-rata dibawah 100% /tahun yang disebabkan wabah covid 19, dan perlahan meningkat di tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2.78
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
BERANG KAT	Domestik	Pesawat	17,788	8,895	6,664	8,607	9,345
		Penump ang	1,832,673	697,787	530,551	977,362	1,322,376
	Internasio nal	Pesawat	859	0	0	0	73
		Penump ang	129,764	0	0	0	11,304

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
DATANG	Domestik	Pesawat	17,758	8,775	6,634	8,540	9,349
		Penumpang	1,876,797	735,522	521,074	965,579	1,313,711
	Internasional	Pesawat	860	0	0	0	92
		Penumpang	126,888	0	0	0	15,169
TOTAL		Pesawat	37,265	17,670	13,298	17,147	18,694
		Penumpang	3,966,122	1,433,309	1,051,625	1,942,941	2,636,087

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2023

Tabel 2.79
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara Silampari Lubuk Linggau

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2023

Tahun	Jenis Pesawat	Pesawat		Penumpang (Org)		Bagasi (Kg)		Cargo (Kg)	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2019	ATR72	337	337	14.755	17.140	15.602	23.649	6.781	998
	B737-500	355	355	33.465	29.756	251.284	211.368	38.527	39.166
	A320	365	365	40.152	40.601	288.066	266.246	23.074	17.340
2020	ATR72	129	129	5.067	6.240	7.638	9.953	4.561	2.459
	B737-500	69	69	4.896	3.972	37.435	28.505	14.094	5.505
	A320	124	124	14.372	133.349	108.490	116.898	14.794	11.296
2021	ATR72	24	24	724	792	2.568	2.289	53	5
	B737-500	1	1	64	147	481	1.378	13	29
	A320	79	78	7.606	8.571	58.869	72.593	2.984	4.860
2022	A320	168	168	21.058	21.388	178.351	178.259	1.021	-
2023	A320	317	317	42.673	41.847	347.433	346.401	5.891	26
2024	A320	376	376	51.489	49.723	410.888	372.947	8.239	0
2025	A320	386	386	54.660	52.473	464.698	414.287	12.570	0

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2024

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka upaya mendorong percepatan Penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*, maka di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2017, dan Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh prestasi dalam bidang pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang didukung lapisan Masyarakat dari *Smart Nation*, Sebagai : “*Smart Society Smart Province*”.

Gambar 2.80
Penghargaan Smart Society Smart Province



Pada tahun 2020 Pengendalian Infrastruktur TIK dioptimalkan melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, *monitoring* dan pengendalian *bandwith* dan jaringan yang dilakukan pada masing-masing OPD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan total *bandwith* internet sebesar 600 Mbps.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian di Tahun 2022 menerima penghargaan tingkat Nasional *Top Digital Award* tahun 2022 yang diraih Gubernur Sumsel H. Herman Deru adalah untuk kategori *Top Leader on Digital Implementation 2022*. Dan juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga meraih penghargaan kategori *Top Digital Implementation 2022 on Province Government* dari *It Works*. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Penyelenggara *Top Digital Awards 2022* sekaligus CEO PT Madani Solusi Internasional (Madani Group) dan Pemimpin Redaksi Majalah *It Works*.

Gambar 2.81
Penghargaan tingkat Nasional *Top Digital Award* dan kategori *Top Digital Implementation 2022 on Province Government Tahun 2022*



Kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 676/Diskominfo/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pelaksanaan penilaian SPBE yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat nilai indeks SPBE : **2,62** dalam Predikat **Baik** pada tahun 2023 dan diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Gambar 2.82
Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan

NO	URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pengelolaa Informasi Publik melalui Komisi Informasi mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah dengan predikat Informatif. Penganugerahan diberikan Komisi Informasi Pusat dengan melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) kepada 348 Badan Publik di Indonesia.

Gambar 2.83
Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022



Tabel 2. 7 Indeks Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik Sumatera Selatan 2024

No	Kabupaten & Kota	RB	SAKIP	IPP
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BB	69, 07 (B)	A (4,57)
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	B	60.02 (B)	A (4,52)
3	Pemerintah Kab. Muara Enim	A	76,51 (BB)	A (4,56)
4	Pemerintah Kab. Lahat	B	66,67 (B)	B (3,89)
5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	BB	71, 27(BB)	A (4,51)
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BB	62,01 (B)	A (4,51)
7	Pemerintah Kab. Banyuasin	BB	65,70 (B)	A-(4,46)
8	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BB	62,33 (B)	A (4,58)
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	B	62.60 (B)	A-(4,14)
10	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BB	62,36 (B)	A-(4,40)
11	Pemerintah Kab. Empat Lawang	B	62,91 (B)	A-(4,07)
12	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	B	62,39 (B)	A-(4,34)
13	Pemerintah Kota Palembang	A	72,01 (BB)	A (4,66)
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	BB	63,68 (B)	B (3,99)
15	Pemerintah Kota Lubuklinggau	B	74,94 (BB)	A-(4,44)
16	Pemerintah Kota Prabumulih	BB	60,68 (B)	A-(4,46)
17	Pemerintah Kab. Penukal Abab Pematang Ilir	B	62,33 (B)	A-(4,44)
18	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	74,73 (BB)	77,52 (BB)	A (4,60)

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/> 2024

Dalam nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 terkategori pelayanan prima. Secara umum Indeks Pelayanan Publik pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tergolong sangat baik dan pelayanan prima, walaupun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang terkategori B, yaitu Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Beberapa faktor yang menyebabkan IPP kurang optimal yaitu belum optimalnya profesionalisme SDM aparatur, sistem informasi pelayanan publik yang masih minim terutama pada saat pemutakhiran data, dan belum tumbuh kembangnya inovasi pelayanan. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah kabupaten/kota rata-rata sudah baik dan sangat baik.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Data perkembangan koperasi di Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 7.032 unit dengan jumlah anggota

sebanyak 254.958 orang, volume usaha Rp. 1.988.345.238.965, dan SHU sebesar Rp. 133.923.310.236

Tabel 2.81
Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
Tahun 2017-2023

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palembang	Jumlah Koperasi	Unit	1.080	1.080	1.049	1078	1.102	1.113	1.122
	Koperasi Aktif	Unit	819	819	623	656	682	699	715
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	261	261	426	422	420	414	407
Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	415	415	433	445	480	491	505
	Koperasi Aktif	Unit	294	294	316	328	129	148	164
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	121	121	117	117	351	343	341
Musi Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	277	277	310	313	359	367	387
	Koperasi Aktif	Unit	265	265	299	302	348	356	376
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	12	12	11	11	11	11	11
Lubuk Linggau	Jumlah Koperasi	Unit	205	205	208	208	219	220	221
	Koperasi Aktif	Unit	102	102	109	109	122	123	124
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	103	103	99	99	97	97	97
Musi Rawas	Jumlah Koperasi	Unit	730	730	662	667	691	700	704
	Koperasi Aktif	Unit	599	599	516	521	545	554	560
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	131	131	146	146	146	146	144
Prabumulih	Jumlah Koperasi	Unit	168	168	132	132	146	148	149
	Koperasi Aktif	Unit	85	85	102	102	116	118	119
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	83	83	30	30	30	30	30
Muara Enim	Jumlah Koperasi	Unit	479	492	476	482	493	500	509
	Koperasi Aktif	Unit	315	333	281	287	298	306	316
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	164	159	195	195	195	194	193
Ogan Komering Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	399	399	498	506	534	542	553
	Koperasi Aktif	Unit	267	267	411	420	449	458	465
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	132	132	87	86	85	84	88
Ogan Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	204	217	227	227	184	188	192
	Koperasi Aktif	Unit	166	199	125	125	130	134	138
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	38	18	102	102	54	54	54
Ogan Komering Ulu	Jumlah Koperasi	Unit	377	377	377	382	392	394	396
	Koperasi Aktif	Unit	269	269	275	280	290	292	294

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	108	108	102	102	102	102	102
OKU Timur	Jumlah Koperasi	Unit	421	421	446	453	474	481	493
	Koperasi Aktif	Unit	402	402	167	174	197	202	215
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	19	19	279	279	277	279	278
OKU Selatan	Jumlah Koperasi	Unit	216	216	234	235	244	245	246
	Koperasi Aktif	Unit	129	129	42	38	47	48	38
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	87	87	192	197	197	197	208
Empat Lawang	Jumlah Koperasi	Unit	187	187	170	177	201	209	213
	Koperasi Aktif	Unit	124	124	82	89	113	121	125
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	63	63	88	88	88	88	88
Lahat	Jumlah Koperasi	Unit	392	392	429	432	461	465	469
	Koperasi Aktif	Unit	293	293	179	148	140	147	155
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	99	99	250	284	321	318	314
Pagar Alam	Jumlah Koperasi	Unit	109	113	127	128	133	136	140
	Koperasi Aktif	Unit	43	47	65	54	34	36	43
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	66	66	62	74	99	100	97
Musi Rawas Utara	Jumlah Koperasi	Unit	365	365	309	311	336	336	341
	Koperasi Aktif	Unit	260	260	66	68	94	88	92
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	105	105	243	243	242	248	249
Penukal Abab Lematang Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	180	180	112	111	119	125	135
	Koperasi Aktif	Unit	156	156	98	97	103	109	119
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	24	24	14	14	16	16	16
Provinsi	Jumlah Koperasi	Unit	118	118	205	133	163	207	257
	Koperasi Aktif	Unit	111	111	124	48	83	128	178
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	7	7	81	85	80	79	79
TOTAL JUMLAH KOPERASI		Unit	6.005	6.272	6.352	6.404	6.780	6.938	7.032

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data mutakhir)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 jumlah UMKM Sumsel sebanyak 2.102.478 unit meningkat menjadi 2.372.692 unit di tahun 2023, begitu juga dengan modal kerja dan investasi dari Rp. 9.689.308.000.000 di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 11.213.443.000.000 ditahun 2023. Sedangkan omzet usaha mikro

kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2023 juga terus mengalami peningkatan dari Rp. 25.528.906.000.000 tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 36.266.015.000.000 ditahun 2023, begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 sebanyak 3.038.087 orang meningkat menjadi 3.246.953 orang ditahun 2023.

Tabel 2.82
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UMKM	Unit	2,102,478	2,103,268	2,108,604	2,208,553	2,208,553	2,319,780	2,323,663	2,372,692
	Pengusaha Mikro Kecil	Unit	2,100,487	2,101,230	2,106,528	2,206,528	2,206,528	2,315,649	2,320,148	2,369,147
	Pengusaha Menengah	Unit	1,991	2,038	2,076	2,025	2,025	3,212	3,515	3,545
2	Modal Kerja dan Investasi	Rp. Juta	9,689,308	9,731,551	9,830,871	9,839,421	9,839,421	10,001,594	11,100,221	11,213,443
	Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	8,388,365	8,379,635	8,463,431	8,467,482	8,467,482	8,551,585	8,702,046	8,789,066
	Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1,300,943	1,351,916	1,367,440	1,372,421	1,372,421	2,360,243	2,398,175	2,424,377
3	Omzet	Rp. Juta	25,528,906	25,531,333	30,467,638	31,426,812	31,426,812	31,961,421	32,819,923	36,266,015
	Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	20,548,074	20,402,754	26,184,781	27,113,005	27,113,005	28,020,549	28,080,814	31,169,704
	Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4,980,832	5,128,579	4,312,857	4,313,812	4,313,812	4,740,485	4,739,109	5,096,311
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	3,038,087	3,059,356	3,066,587	3,082,040	3,082,040	3,117,847	3,239,179	3,246,953
	Pengusaha Mikro Kecil	Orang	3,010,997	3,031,704	3,042,461	3,054,117	3,054,117	3,088,430	3,207,309	3,214,733
	Pengusaha Menengah	Orang	27,090	27,652	28,792	27,923	27,923	30,493	31,870	32,220

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2024

a. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pegusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Realisasi

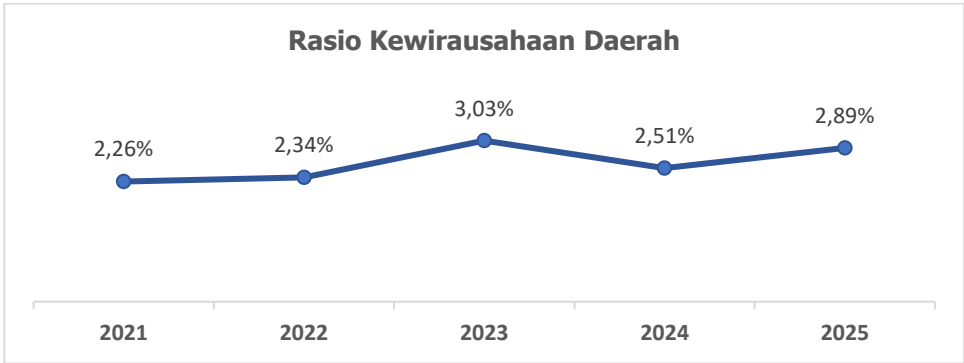
rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Rasio Kewirausahaan Daerah (Dalam ribu orang)

Uraian	Agt 2021	Agt 2022	Agt 2023	Agt 2024	Agt 2025
Angkatan kerja	4,398.91	4,497.96	4,588.17	4,659.81	4,664.94
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	99.38	105.22	138.92	116.93	134.8
Rasio Kewirausahaan	2.26%	2.34%	3.03%	2.51%	2.89%

Sumber: Sakernas, BPS 2025

Gambar Rasio Kewirausahaan Daerah Tahun 2021-2025



Sumber: Sakernas, BPS 2025

Rasio kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2021 hingga 2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, rasio kewirausahaan daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2.89% atau meningkat 15% jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024.

b. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi

Indikator Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Provinsi belum memiliki data pada periode 2021–2023, sehingga perkembangan kinerjanya baru dapat dianalisis mulai tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian indikator tercatat sebesar 0,4%, yang mencerminkan mulai terbangunnya basis data UKM non pertanian secara lebih terstruktur serta meningkatnya perhatian terhadap sektor

ini sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 0,3%, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan usaha, serta akses pembiayaan dan pasar bagi UKM non pertanian.

Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat strategi pengembangan UKM non pertanian melalui peningkatan akses permodalan, penguatan kapasitas usaha, perluasan pasar, serta peningkatan kualitas SDM pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan proporsi UKM non pertanian secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja.

	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi	n/a	n/a	n/a	0.40%	0.30%

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Prov. Sumsel

c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

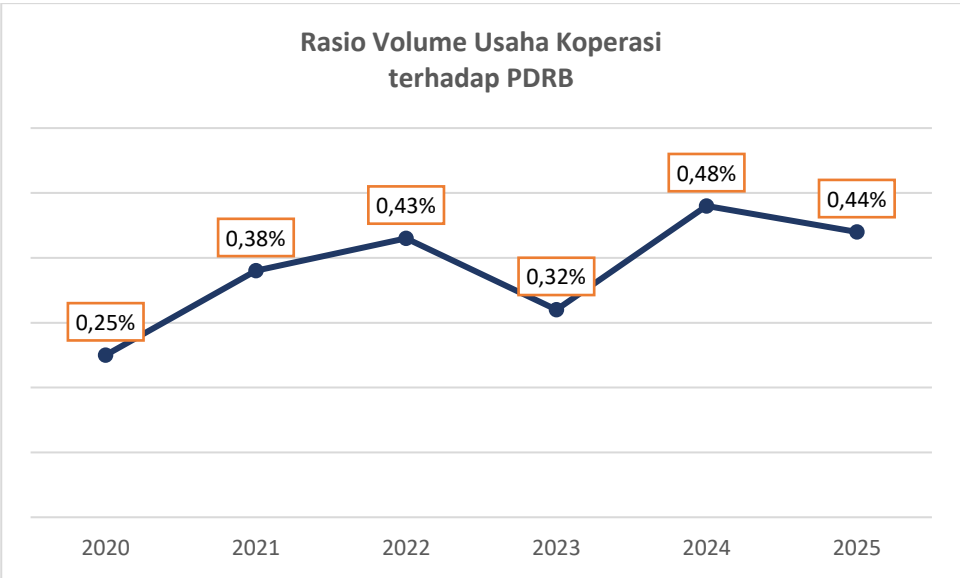
Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam periode 2020–2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,25%, kemudian meningkat menjadi 0,38% pada 2021 dan kembali naik menjadi 0,43% pada 2022, mencerminkan mulai pulihnya aktivitas usaha koperasi pascapandemi serta meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,32%, yang diduga dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas usaha dan penyesuaian kinerja koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio meningkat signifikan menjadi 0,48%, sebelum sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 0,44%, namun tetap berada di atas capaian tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peran koperasi dalam perekonomian daerah terus mengalami penguatan meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing usaha. Capaian tahun 2024 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus mendorong transformasi koperasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM,

akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta perluasan kemitraan usaha. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDRB secara berkelanjutan.

Selain itu, pada tahun 2025 telah dilaksanakan peluncuran dan peresmian kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian masyarakat yang berbasis pada prinsip gotong royong. Melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berkelanjutan, diharapkan koperasi mampu berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Di Provinsi Sumatera Selatan, hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya telah memasuki tahapan pembangunan fisik gerai, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

**Gambar Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
Tahun 2021-2025**



Sumber: Dinas Koperasi & UKM Prov. Sumsel

*Data capaian 2025 masih menggunakan data PDRB 2024 dikarenakan untuk tahun 2025 belum ada rilis BPS

18) Urusan Penanaman Modal

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 15,47 Triliun dari target tahun 2025 sebesar 20,00 Triliun atau persentase capaian sebesar 77,35 persen. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025 adalah 47,19 Triliun dari yang ditargetkan sebesar 22,50 Triliun. Capaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2025 sudah melebihi target.

Tabel 2.83
Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan (Triliun Rupiah)

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun)	19,13	19,09	20,47	17,58	21,90	21,88	19,5	34,25	20,00	15,47
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun)	9,14	16,27	9,79	23,53	10,47	25,6	22	36,67	22,50	47,19

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), total realisasi investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp70,92 triliun. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp62,67 triliun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya

perlambatan realisasi investasi pada tahun 2025, yaitu sebesar – 11,63% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dan masih berada di bawah target pertumbuhan investasi yang ditetapkan sebesar 7,5%.

Berdasarkan analisis data yang ada, perlambatan kinerja investasi pada tahun 2025 ini terjadi pada investasi PMA dengan perlambatan sebesar 54,83% dari tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh beberapa investor PMA yang telah menyelesaikan fase investasi sejumlah proyek strategisnya pada tahun sebelumnya (2024) sehingga di tahun 2025 investasi yang dilakukan lebih bersifat operasional seperti Industri manufaktur (industri kertas & percetakan) sebesar Rp 2,85 Trilyun adalah penyumbang PMA utama di 2025 sedangkan di tahun 2024 mencapai Rp 17,93 trilyun. Adapun beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. Jumlah Proyek Investasi PMA di Sumatera Selatan belum begitu banyak yang melakukan pengembangan investasinya di tahun 2025.
2. Beberapa proyek-proyek besar menyelesaikan fase padat modalnya, sehingga pada tahun 2025 aliran dana investasi secara alamiah mengalami penurunan. Investasi yang masuk pada tahun berjalan lebih banyak difokuskan pada fase operasional atau penyelesaian akhir proyek, yang secara nominal relatif lebih kecil.

Kontribusi investasi tahun 2025 ini terutama pada sektor Industri Kertas dan Percetakan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, pertambangan, industri kertas dan farmasi. Hal ini terlihat pada pertumbuhan investasi PMDN yang mencapai pertumbuhan 28,69% dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan PMDN cenderung berasal dari ekspansi proyek domestik atau skala lokal, misalnya pengembangan industri manufaktur, pertambangan mineral, dan sektor infrastruktur yang terus berlanjut. PMDN juga lebih cepat mencapai target lokal jika dibandingkan PMA, khususnya bila dilihat terhadap target RPJMD dibanding target nasional — artinya investasi domestik relatif lebih stabil. PMDN berperan sebagai “penyangga” utama investasi di Sumatera Selatan saat PMA melemah. Ini mencerminkan

kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap potensi ekonomi lokal sangat baik.

Sedangkan dari sisi pertumbuhan investasi terjadi perlambatan tetapi dari sisi capaian target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di tahun 2025 sebesar Rp 42,5 Trilyun, telah tercapai dengan sangat baik dengan capaian Rp 62,67 Trilyun atau mencapai 147,46%. Meskipun demikian, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi investasi pada masa mendatang guna mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan

Tujuan pembinaan generasi muda adalah menghasilkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, berwirausaha, berjiwa kepeloporan, mempunyai kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Situasi di Sumatera Selatan semakin mengalami kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Hal ini merupakan sistem yang semakin teradaptasi yang memungkinkan berkembangnya generasi muda di Sumatera Selatan, seperti adanya sarana dan prasarana bagi generasi muda, terlindungnya generasi muda dari dampak buruk narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah terlihat di lapangan, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan kegiatan pornografi, prostitusi, perdagangan manusia, risiko kemerosotan karakter moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, dan hilangnya komitmen dan sentimen nasional.

Peran pemuda juga didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda yang memperkuat Program Peningkatan Partisipasi Pemuda dan upaya peningkatan kewirausahaan dan keterampilan hidup di kalangan generasi muda di daerah tertinggal dan

teknologi pemuda dan manajemen HIV-AIDS. Upaya penguatan peran aktif dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan dilaksanakan melalui pembinaan kader wirausaha sesuai minat, bakat, dan potensi generasi muda serta potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader wirausaha meliputi pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan akses permodalan.

Capaian indikator kepemudaan dan keolahragaan menunjukkan dinamika yang beragam. Hasil evaluasi kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah, khususnya dalam pengembangan kapasitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target optimal, terutama pada aspek pertumbuhan wirausaha muda dan partisipasi masyarakat berolahraga. Pada indikator Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda, capaian sebesar 89,63% mengindikasikan bahwa meskipun program pemberdayaan wirausaha muda telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat tantangan struktural berupa keterbatasan akses permodalan, inkubasi usaha, serta keberlanjutan pendampingan pasca pelatihan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan laju pertumbuhan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan.

Sedangkan aspek partisipasi masyarakat berolahraga masih bervariasi dan belum serta merta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas fisik. Sebaliknya, indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda berhasil mencapai target 100%. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan program peningkatan kapasitas pemuda, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda yang menjangkau berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap capaian optimal indikator ini.

Capaian yang sangat tinggi pada indikator Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang Berperan dalam Pembangunan menunjukkan adanya perluasan cakupan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan. Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh intensifikasi program berbasis

partisipasi massal, integrasi kegiatan kepramukaan dengan agenda pembangunan daerah, serta pencatatan data yang semakin komprehensif.

Perkembangan kepemudaan selama Tahun 2024 – 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.84
Perkembangan Kepemudaan di Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja (RKPD 2027)	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda	%	40,5	50	123,46	40,5	36,3	89,63
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	%	40	40	100	40	40	100
3	Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka Berperan dalam Pembangunan	Orang	4.000	34.842	871,05	4.000	144.768	3.619,20

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Indikator Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda menunjukkan penurunan capaian dari 123,46 persen pada tahun 2024 menjadi 89,63 persen pada tahun 2025. Capaian yang sangat tinggi pada tahun 2024 disebabkan oleh masifnya program fasilitasi kewirausahaan pemuda, dukungan pelatihan berbasis komunitas, serta kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi yang relatif kondusif. Sementara itu, penurunan capaian pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya target kualitas usaha, pengetatan akses permodalan, serta adanya penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada intensitas pendampingan kewirausahaan pemuda.

Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan capaian yang stabil, yakni sebesar 100 persen. Kondisi ini mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peran aktif pemuda melalui organisasi kepemudaan, forum partisipatif, serta keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Stabilitas capaian

ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan dan fasilitasi kepemimpinan pemuda telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Indikator Jumlah Pemuda dan Anggota Pramuka yang Berperan dalam Pembangunan menunjukkan lonjakan capaian yang sangat signifikan, dari 871,05 persen pada tahun 2024 menjadi 3.619,20 persen pada tahun 2025. Capaian ini disebabkan oleh perluasan cakupan pendataan, meningkatnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kwartir gerakan pramuka, serta tingginya keterlibatan pramuka dalam kegiatan sosial, kebencanaan, dan pembangunan karakter. Lonjakan tersebut juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif lebih rendah dibandingkan potensi riil partisipasi pemuda, sehingga realisasi melampaui target secara signifikan.

Keolahragaan

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan Internasional, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan terancang serta berstandar Internasional, terbentang luas di kawasan Jakabaring Sport City, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

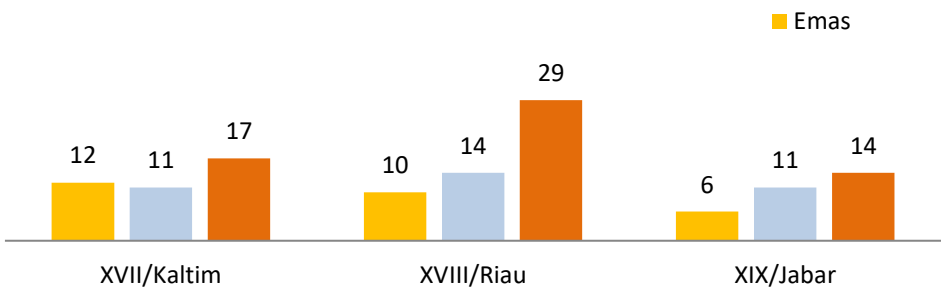
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut. Terselenggaranya event-event yang bertaraf Nasional bahkan Internasional merupakan bukti kepedulian Pemerintah terhadap perkembangan keolahragaan di Sumatera Selatan, yang paling

fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian hasil pembinaan Olahraga diketahui bahwa hasil yang dicapai oleh Kontingen Sumsel pada PON XVII 2008 di Kalimantan Timur, PON XVIII 2012 di Riau, PON XIX 2016 di Bandung kurang memuaskan, sedangkan pada PON XX 2020 Tahun 2021 di Papua yang menargetkan perbaikan peringkat dianggap cukup berhasil dengan perolehan 8 medali emas, 4 medali perak, dan 16 medali perunggu serta menempati peringkat 17 di klasemen akhir perolehan medali. Namun, yang menjadi kebanggaan adalah para Atlet yang memperkuat Sumsel merupakan Atlet Putra Daerah. Untuk itu, akan dioptimalkan pembinaan pada atlet muda berpotensi melalui pembinaan empat tahunan. Berikut perolehan Medali Sumsel pada PON disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.84
Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Dalam hal Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, ternyata masih berada di bawah target dengan capaian 84,00%. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pasca pandemi, keterbatasan akses sarana olahraga di beberapa wilayah, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup aktif dan sehat. Sebaliknya, indikator Jumlah Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional serta Jumlah Pembinaan Atlet Muda melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari fokus pembinaan atlet potensial, dukungan pendanaan yang memadai, serta pemanfaatan fasilitas olahraga berstandar nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kualitas pelatih dan sistem seleksi atlet juga menjadi faktor kunci dalam pencapaian prestasi olahraga. Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk memperkuat kualitas

intervensi pembangunan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis hasil.

Perkembangan keolahragaan selama tahun 2024 – 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.85
Perkembangan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja (RKPD 2027)	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	30	25,2	84	30	25,2	84
2	Jumlah Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional	Buah	180	325	180,56	180	201	111,67
3	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Orang	265	219	82,64	265	296	111,7

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Indikator Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga menunjukkan capaian yang stagnan pada tahun 2024 dan 2025, yakni sebesar 84 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan partisipasi olahraga masyarakat belum mengalami percepatan yang signifikan. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di beberapa wilayah, perubahan pola aktivitas masyarakat, serta belum optimalnya kampanye olahraga massal yang berkelanjutan.

Indikator Jumlah Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional mengalami penurunan capaian dari 180,56 persen pada tahun 2024 menjadi 111,67 persen pada tahun 2025. Tingginya capaian pada tahun 2024 didorong oleh padatnya agenda kejuaraan serta puncak performa atlet pada siklus pembinaan sebelumnya. Sementara itu, penurunan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh transisi atlet, regenerasi cabang olahraga, serta penyesuaian pola pembiayaan pembinaan prestasi yang lebih selektif dan berbasis prioritas.

Indikator Jumlah Pembinaan Atlet Muda menunjukkan peningkatan capaian dari 82,64 persen pada tahun 2024 menjadi 111,7 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan penguatan fokus kebijakan

pada pembinaan usia dini dan atlet muda sebagai investasi jangka panjang prestasi olahraga daerah. Dukungan program talent scouting, sekolah olahraga, serta sinergi dengan induk organisasi cabang olahraga menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan capaian indikator ini. Dari kedua tabel terkait perkembangan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di atas, dalam urusan Kepemudaan, capaian angka pertumbuhan Wirausaha Muda yang belum sepenuhnya mencapai target mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan hilirisasi program kewirausahaan. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2027, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas intervensi melalui inkubasi usaha, perluasan jejaring pembiayaan, serta pendampingan berkelanjutan agar pertumbuhan wirausaha muda dapat lebih stabil dan berdaya saing. Pada urusan keolahragaan, capaian prestasi olahraga yang melampaui target menunjukkan keberhasilan pembinaan atlet dan dukungan sarana prasarana. Namun rendahnya angka partisipasi masyarakat berolahraga menjadi tantangan yang perlu direspon melalui kebijakan promotif dan preventif. Dalam RKPD Tahun 2027, kebijakan diarahkan pada pemerataan sarana olahraga, optimalisasi ruang publik, serta peningkatan literasi olahraga masyarakat. Secara keseluruhan, perbandingan capaian indikator kinerja kepemudaan dan keolahragaan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya pergeseran fokus kebijakan dari ekspansi program menuju penguatan kualitas dan keberlanjutan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan strategi dan penajaman program pada periode perencanaan selanjutnya, agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sumatera Selatan.-

20) Urusan Statistik

Urusan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan terutama terkait ketersediaan Data statistik Sektoral; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi. Arah penyediaan data harus dapat diakses semua lapisan Masyarakat dan Pemerintah secara terintegrasi dan selalu di update sesuai perkembangan untuk berbagai kebutuhan terutama bagi pembangunan di Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik di tahun 2020 telah melaunching Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA). Kegiatan ini memperkenalkan Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA) yang dilauching pada tanggal 23 November 2020 dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selata

Tabel 2.86
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-385.f/01000/ES/11/2023 Jakarta, 6 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Gubernur Sumatera Selatan
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah 2,00 dengan predikat "Cukup". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan pada Lampiran. Demikian disampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan penguatan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



PtL. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Dalam Negeri



21) Urusan Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO), maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching Kegiatan CSIRT (Computer Security Insident Response Team). Pada Tanggal 22 November 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumselprov-CSIRT).

Pada Tanggal 25 November 2023 bertempat di Griya Agung Palembang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Launching Computer Security Insident Response Team (CSIRT) 11 Kabupaten/Kota Se-Sumsel dan 7 Perguruan Tinggi di Palembang dan Lampung, antara lain CSIRT Kab/Kota yang dilaunching antara lain, Prabumulih Kota CSIRT ; Ogan Ilir Kab - CSIRT ; OKU Kab - CSIRT; OKI Kab - CSIRT; OKU Timur Kab -CSIRT;

OKU Selatan Kab -CSIRT; Muara Enim Kab-CISRT; Lahat Kab-CSIRT; Banyuasin Kab-CSIRT; MUBA Kab-CSIRT; dan MURA Kab-CSIRT. Sedangkan perguruan tinggi Palembang dan Lampung antara lain B CSIRT, CSIRT UMDP, ARMAJAYA CSIRT, UTI CSIRT, UMMETRO CSIRT serta AISYAH BEDA CSIRT.

Gambar 2.85
Launching Computer Security Insident Response Team (CSIRT) 11 Kabupaten/Kota Se-Sumsel dan 7 Perguruan Tinggi di Palembang dan Lampung



Tabel 2.87
Daftar Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1.	Kota Palembang	PalembangKota-CSIRT
2.	Kota Prabumulih	PrabumulihKota- CSIRT
3.	Kabupaten Banyuasin	BanyuasinKab- CSIRT
4.	Kabupaten Musi Banyuasin	MusiBanyuasinKab- CSIRT
5.	Kabupaten Musi Rawas	MusiRawasKab- CSIRT
6.	Kabupaten Ogan Ilir	OganIlirKab- CSIRT
7.	Kabupaten OKI	OKIKab- CSIRT
8.	Kabupaten Muara Enim	MuaraEnimKab- CSIRT
9.	Kabupaten Lahat	LahatKab- CSIRT
10.	Kabupaten OKU	OKUKab- CSIRT
11.	Kabupaten OKUT	OKUTKab- CSIRT
12.	Kabupaten OKUS	OKUSKab- CSIRT

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mendapatkan Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal kontribusi dan dukungan bagi pembentukan CSIRT Organisasi sector Administrasi Pemerintahan dan Sektor Pendidikan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Gambar 2.86
Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara



Tabel 2.88
Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.429.365.817

22) Urusan Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan secara umum program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut antara lain:

- 1. Program peningkatan keragaman budaya
- 2. Program pengembangan nilai budaya
- 3. Program pengelolaan kekayaan budaya
- 4. Program permuseuman dan nilai-nilai budaya Sumsel

Dari program tersebut, jumlah sanggar seni yang berkembang di provinsi sumatera selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.87
Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2023 (data mutakhir)

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 1.116 sanggar seni, jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 jumlah sanggar seni sebanyak 1.090 sanggar seni. Peningkatan sanggar seni yang paling pesat terjadi pada tahun 2016.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provinsi Sumatera Selatan merupakan instrumen penting dalam mengukur capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif dan berkelanjutan. IPK menggambarkan kondisi dan perkembangan kebudayaan daerah melalui berbagai dimensi, antara lain pelestarian warisan budaya, pengembangan ekspresi budaya, pendidikan dan literasi budaya, ekonomi budaya, serta tata kelola kebudayaan. Capaian IPK Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah berjalan dan terus mengalami penguatan, meskipun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPK menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan. Upaya

peningkatan IPK diarahkan melalui penguatan peran pelaku budaya, optimalisasi pelestarian warisan budaya benda dan tak benda, peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, serta sinergi lintas sektor dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, IPK tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja pembangunan kebudayaan, tetapi juga sebagai acuan strategis dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar xxx Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, 2024

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan gambar diatas, Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 50,86 mengalami fluktuasi hingga akhirnya meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 61,78. Hal ini menunjukkan peningkatan seperti adanya kemajuan dalam berbagai aspek kebudayaan suatu wilayah, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Capaian terakhir IPK Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 61,78 berada sedikit di atas Nasional sebesar 59,98. Sedangkan capaian untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2024 IPK Sumatera Selatan mencapai angka **61,78** sedangkan IPK Nasional **59,98**. Namun meski demikian di beberapa dimensi seperti Ekonomi Budaya, Pendidikan dan Ekspresi Budaya tetap akan menjadi perhatian juga akan ditingkatkan.

Tabel : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Nama Dimensi	Skor IPK Nasional	Skor IPK Sumsel
D1	Ekonomi Budaya	31,25	23,87
D2	Pendidikan	73,41	69,51
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75,71	77,94
D4	Warisan Budaya	54,93	66,53
D5	Ekspresi Budaya	39,85	35,98
D6	Budaya Literasi	64,40	65,94
D7	Gender	57,51	61,65
	Skor IPK (Rata-Rata)	59,98	61,78

Sumber : Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 215/M/2025, 23 Desember 2025

Sebagai capaian penting di bidang kebudayaan, pada tahun 2025 terdapat 1(satu) Cagar Budaya Provinsi, yaitu Percandian Bumi Ayu di Kabupaten PALI, berhasil didaftarkan dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Prestasi ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat peradaban penting di Indonesia yang memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi.

Gambar 2.90
Penetapan Percandian Bumiayu sebagai Cagar Budaya Nasional





Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

23) **Urusan Perpustakaan**

Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan Perpustakaan adalah “Terwujudnya Budaya Literasi menuju Sumsel Cerdas”. Upaya perwujudan budaya literasi adalah dengan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM/TKM) di Sumatera Selatan. IPLM mengukur berbagai aspek kelembagaan perpustakaan, sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca menilai minat, kebiasaan, perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.

Nilai IPLM dan TGM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPLM Sumsel	12,63	14,57	15,62	14,42	15,18
(Metode Baru)	-	-	-	68,64	72,24
IPLM Nasional	12,93	13,54	13,55	14,58	15,44
(Metode Baru)	61,55	64,45	64,50	69,42	73,52
TGM Sumsel	52,38	55,51	61,52	64,15	69,62
TGM Nasional	55,74	59,52	63,90	66,70	72,44

Sumber: Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, 2025

Nilai IPLM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 68,64 atau 14,42 pada tahun 2023 menjadi 72,24

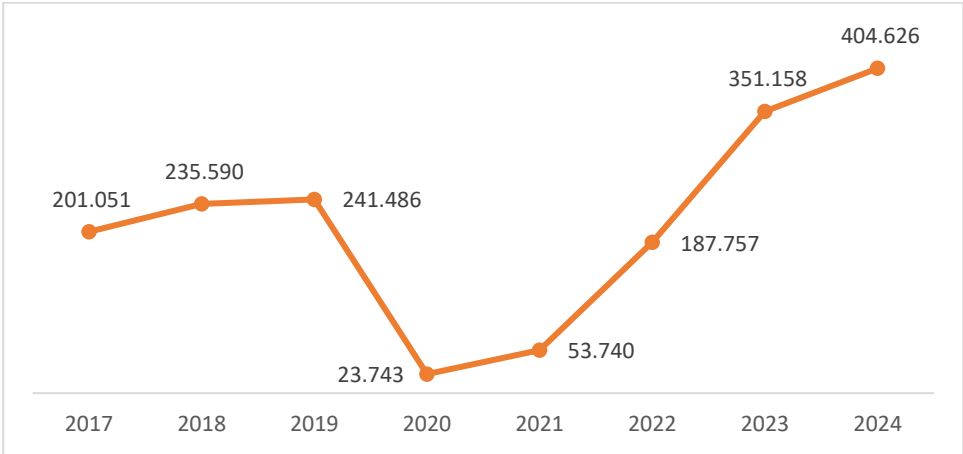
atau 15,18 pada tahun 2024 dengan kategori “Sedang”. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek literasi masyarakat, seperti akses terhadap bahan bacaan, ketersediaan fasilitas perpustakaan, serta aktivitas literasi di tingkat komunitas. Disisi lain, IPLM tahun 2024 secara nasional juga mengalami peningkatan dari 69,42 menjadi 73,52, sehingga IPLM Sumatera Selatan masih berada di bawah nilai nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh (1) tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan yang masih rendah dan belum memnuhi standar, (2) tingkat kemanfaatan koleksi oleh pemustaka masih rendah, (3) jumlah tenaga perpustakaan yang belum mencukupi kebutuhan Masyarakat, (4) tingkat kunjungan Masyarakat ke perpustakaan per hari masih rendah, (5) tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anggota perpustakaan masih rendah.

Berdasarkan hasil kajian tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang dirilis oleh Perpustnas, bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Nasional pada tahun 2024 berada di kategori Sedang dengan nilai 72,44 meningkat 5,74 point dari tahun 2023 dengan nilai 66,77. Sedangkan TGM Masyarakat Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 69,62 meningkat sebesar 5,47 point dari tahun 2023 yakni sebesar 64,15. Adapun lima komponen alat ukur Tingkat Kegemaran membaca terdiri dari frekwensi membaca (kali/minggu), durasi/lama waktu membaca (hari/jam), banyaknya bahan bacaan/buku yang tamat dibaca (dalam 3 bulan), frekwensi membaca akses internet (kali/per minggu) dan durasi akses internet (jam/per hari).

Perpustakaan Provinsi Sumsel saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik ditandai dengan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan. Berdasarkan hasil survey Tim Survey Kepuasan Masyarakat Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Nilai IKM untuk pelayanan di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar 90,57 indeks dengan kategori Sangat Baik meningkat dari tahun 2023 sebesar 90,12 dengan kategori yang sama. Secara umum jenis layanan perpustakaan diantaranya terdiri dari layanan pemanfaatan sumber sumber informasi perpustakaan, layanan penyediaan bahan pustaka, layanan informasi, layanan pemanfaatan sarana prasarana

perpustakaan, layanan pembinaan terhadap berbagai jenis perpustakaan serta layanan pelestarian bahan pustaka.

Gambar 2.
Jumlah Pengunjung yang mendapat Pelayanan di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, 2025

Ketersediaan dan kualitas layanan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan. Dilihat dari tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan dan pustakawan di Sumatera Selatan masih sangat terbatas jumlahnya. Sampai dengan tahun 2024 jumlah Pustakawan yang tersedia hanya sebanyak 185 orang dan Tenaga Teknis sebanyak 11.485 orang. Guna memenuhi keterbatasan tenaga fungsional pustakawan, maka keberadaan tenaga teknis pengelola perpustakaan diharapkan dapat mengambil perannya di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Sesuai dengan Standar Internasional Federation of Library Associations dan Institusions (IFLA), bahwa 1 orang tenaga perpustakaan (pustakawan) melayani 2.500 orang penduduk.

Tabel 2. 8
Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

No	Sumber Daya Manusia Perpustakaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pustakawan	88	147	185	189	185	185
	Provinsi	28	27	33	30	27	29
	Kab/kota	30	39	93	105	105	105
	Sekolah	2	2	3	2	-	-
	Perguruan Tinggi	28	62	39	40	40	40
	Khusus	-	6	17	12	13	13
2.	Tenaga Teknis	365	792	10.446	9.424	9.613	11.485
	Provinsi	54	45	72	59	90	65

No	Sumber Daya Manusia Perpustakaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kab/kota/Kec/Desa/Kel	123	123	1.123	2.011	2.116	2.247
	Sekolah	109	540	8.807	6.286	6.287	8.051
	Perguruan Tinggi	79	79	381	103	143	143
	Khusus	-	5	63	965	977	979

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan data Sebaran Perpustakaan Dalam Peta di Perpustakaan Nasional, pada tahun 2024 jumlah perpustakaan yang bersertifikat Standar Perpustakaan Nasional (SNP) sebanyak 4.535 perpustakaan, terdiri dari Perpustakaan Umum sebanyak 1.605 perpustakaan, Perpustakaan Sekolah sebanyak 2.795 perpustakaan, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 92 perpustakaan dan Perpustakaan Khusus sebanyak 38 perpustakaan. Selain itu Perpustakaan Provinsi saat ini juga sedang menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhannya dan berubahnya menjadi pusat belajar serta kegiatan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (inklusi sosial).

Tabel 2. 9
Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2025

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perpustakaan Umum	1.481	847	879	1.523	629	2.010	2.218
2.	Perpustakaan Sekolah	13.918	8.353	8.416	7.009	5.088	5.087	6.128
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	132	94	171	95	108	108	145
4.	Perpustakaan Khusus	783	783	46	818	261	259	315
TOTAL		16.314	10.077	9.512	9.445	6.086	7.464	8.806

Sumber : data.perpusnas.go.id, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, 2026

Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap informasi terus meningkat, pengembangan koleksi buku juga terus dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan baik melalui pengadaan, tukar menukar, hibah, sumbangan dan kerjasama. Sampai dengan tahun 2024, Koleksi deposit Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan telah diperkaya dengan (1) Koleksi konten lokal yang dihimpun melalui para penerbit lokal baik Pemerintah maupun Swasta sejumlah 19.775 judul, (2) Non buku berupa

majalah, surat kabar, buletin, jurnal, brosur sebanyak 261 judul, (3) pustaka kelabu berupa tesis, skripsi, disertasi sebanyak 155 judul, dan (4) kaset CD/DVD/DVD sebanyak 155 judul.

Tabel 2.10
Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Judul Buku	261.269	261.929	265.251	275.302	286.050	289.511
Jumlah Eksemplar	829.070	834.988	839.989	865.859	878.519	899.827

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi melalui sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat (Talkshow, Road Show, Seminar, Lomba dll), pengembangan bahan bacaan baik konvensional maupun digital, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi daerah kewenangan provinsi, memperluas layanan silang layan dan layanan perpustakaan keliling, pendirian pojok baca di ruang-ruang publik, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, meningkatnya kerjasama di dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta pengukuhan Bapak/Bunda Literasi (BULE) Kabupaten/Kota sebagai motor penggerak literasi di kabupaten/ kota.

24) Urusan Kearsipan

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kearsipan sesuai dengan visi dan misi ke enam Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubenur Sumatera Selatan “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis digital menuju Pelayanan Publik yang berkualitas”, dengan unsur didalamnya Dinas Kersipan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan “Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan”.

Strategi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan adalah melalui :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) Terintegrasi dan SIKN/JIKN dalam Pengelolaan dan Layanan Arsip.
2. Tingkat Kepatuhan dalam penyelenggaraan Kearsipan dan Manajemen Kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan LKD Kabupaten / Kota.
3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Kearsipan guna mewujudkan Sistem Tata Kelola Kearsipan yang baik.
4. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Dengan ditetapkan strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemangku tugas dan fungsi bidang Kearsipan untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi/Diklat/Bimbingan Teknis seperti:

- Bimbingan Teknis Kearsipan “Pemberkasan dan Penataan Arsip Konvensional” di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis secara Daring
- Sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Yang diikuti oleh 482 (empat ratus delapan puluh dua) orang di lingkungan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Selatan yang dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu secara *offline* (tatap muka) dan secara *virtual* (zoom meeting).

- Pemilihan Arsiparis Teladan

Pemilihan Arsiparis Teladan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta memberikan penghargaan kepada arsiparis yang berprestasi sehingga dapat mewujudkan layanan kearsipan yang prima bagi masyarakat, yang diikuti oleh 42 Orang Fungsional Arsiparis

lingkup Perangkat Daerah Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota.

- Pendidikan dan Pelatihan Berdasarka tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan dan latihan/bimbingan teknis sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang
- Pembinaan Kearsipan pada 39 Perangkat Daerah, 17 Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan 6 Organisasi Masyarakat/organisasi politik dan Masyarakat

2. Tingkat Ketersediaan Arsip

Untuk menjamin Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, Akuntabilitas Kinerja dan alat bukti yang sah dilakukan dengan :

- Pendataan dan Penataan arsip dinamis adalah sebuah proses krusial dalam manajemen arsip yang melibatkan pengolahan arsip aktif dan inaktif dari unit kerja menuju pusat arsip (record center). Proses ini dilakukan secara sistematis berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk memastikan manajemen arsip yang tertib, efisien, dan mudah diakses. Tahapan ini merupakan bagian dari siklus hidup arsip yang esensial, khususnya dalam fase penyusutan arsip, untuk menjaga efisiensi ruang penyimpanan dan keamanan informasi. Prosedur ini wajib mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengamanatkan pengelolaan arsip secara profesional dan akuntabel. Sebagai contoh, dalam satu periode waktu, target yang ditetapkan adalah mendata 1.500 arsip. Melalui implementasi yang efektif, realisasi pendataan bahkan melampaui target tersebut, mencapai 1.753 arsip dari 6 OPD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan kearsipan yang optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Akuisisi Arsip Statis

Pengelolaan arsip statis adalah upaya untuk menjaga warisan sejarah suatu organisasi dan memastikan ketersediaan informasi penting untuk masa depan. Adapun target Pengelolaan Arsip Statis tahun 2025 adalah Dikelolanya Arsip Statis hasil Akuisisi yang digunakan sebagai bahan untuk Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.

Akuisisi Arsip Statis tahun 2025 sebanyak 383 Arsip Statis. Untuk pengelolaan arsip statis adalah Daftar Arsip Statis,

Guide Khazanah Arsip, Guide Tematik, Daftar Inventaris Arsip dan laporan kegiatan Akuisisi. Selain itu penyerahan arsip statis sejarah melalui aplikasi spreadsheet.

- **Pemindahan Arsip Inaktif**

Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan memindahkan arsip yang sudah jarang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dari unit kerja ke unit kearsipan atau tempat penyimpanan arsip inaktif (record center) sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA), guna menjamin pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan efisien serta memudahkan temu kembali apabila arsip tersebut masih diperlukan. Adapun arsip inaktif yang dipindahkan ke Dinas Kearsipan pada tahun 2025 adalah 5.963 Berkas

3. Persentase perangkat Daerah dan LKD kab/kota yang menerapkan pengelolaan Kearsipan sesuai NSPK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nilai hasil pengawasan kearsipan dan tingkat digitalisasi arsip tahun 2025 pada kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **88,19** (delapan puluh delapan koma satu sembilan) dengan kategori **“A (Memuaskan)”**.

pada masa transisi Implementasi Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka nilai hasil Pengawasan kearsipan internal menggunakan nilai rata-rata perangkat daerah yang diambil secara sampling. Adapun nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **93,58** (sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan) dengan kategori

“AA (Sangat Memuaskan)”.

4. Melaksanakan Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kearsipan yaitu menyajikan, memberikan infomarsi kearsipan dan menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD). Pada tahun 2025 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang telah bergabung dalam aplikasi SIKN/JIKN versi 3 dengan total arsip yang telah didigitalisasi sebanyak 200 dokumen (100%) sesuai dengan target tahun 2025.

Total Seluruh Pengguna Layanan Sampai Desember 2025 adalah sebanyak :

SKM	: 500 Qusioner	
Youtube	: 522 Pengunjung	
Pengunjung SIKN JIKN	: 536 Pengunjung	
Pameran	: 4.863 Pengunjung	+

Total Pengguna layanan : 6.421 Pengunjung

Provinsi Sumatera Selatan terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Target nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 81 dengan realisasi kinerja 84,13 atau lebih tinggi 3,13 poin dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 sebesar 81,36 maka terdapat peningkatan sebesar 14,22 poin pada tahun 2025.
2. Nilai Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN adalah ukuran kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan aturan kepegawaian. Target nilai Indeks NSPK pada tahun 2025 adalah 90 dengan realisasi kinerja 88,55

atau lebih rendah 1,45 poin dari target yang ditetapkan. Tahun 2025 Nilai NSPK Provinsi Sumatera Selatan bernilai 88,55 dengan Predikat A (Unggul).

3. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2025 targetnya tetap sama dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 692,06% atau dengan capaian 100%. Capaian Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian sasaran kinerja ini dihitung dan dinilai dari perbandingan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- b. Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) diluar PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT lainnya, JFU dan Struktural

- c. Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\% \\ &= \frac{4.097}{592} \times 100\% \\ &= \mathbf{692,06\%} \\ &\text{Capaian Kinerjanya } 692,06\% / 100\% = \mathbf{100} \end{aligned}$$

4. Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12% dengan realisasi 16,61% dan capaian realisasi 100%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang dihitung dan dinilai adalah perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

b. Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain.

c. Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

X

$$= \frac{779}{4.689} \times 100\%$$

$$= 16,61\%$$

$$\text{Capaian Kinerjanya } 16,61\% / 12\% = 100\%$$

5. Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 81,25% dan capaian realisasi 100% .

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 81,25% dan capaian realisasi 100%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

b. Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) yang Bersertifikat Kompetensi (diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan).

c. Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi}}{\text{Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{633}{779} \times 100\%$$

$$= 81,25\%$$

$$= 81,25\%$$

Capaian Kinerjanya 81,25% / 100% = **100%**

6. Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian mencakup prosedur, waktu, sarana, dan kompetensi petugas. Target nilai Indeks NSPK pada tahun 2025 adalah 90 dengan realisasi kinerja 90,36 atau lebih tinggi 0,36 poin dari target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja urusan Kepegawaian tahun 2025 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.110
Capaian Target Indikator Kinerja urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Nilai IP ASN	%	81	84,13	100
2	Nilai NSPK	%	90	88,55	98,38
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	692,06	100
4	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	16,61	100
5	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	81,25	100
6	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	90,36	100

Sumber : BKD Provinsi Sumsel, 2025

a. **Pendidikan dan Pelatihan**

Pada tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sumatera Selatan secara total telah menyelenggarakan 78 Kegiatan kediklatan dengan Total Peserta berjumlah 3.378 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel...
Jumlah kegiatan kediklatan tahun 2025

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Sumber Dana
1	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	15 kegiatan	602 orang	APBD + BLUD
2	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	28 kegiatan	1.467 orang	APBD + BLUD
3	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	11 kegiatan	490 orang	APBD + BLUD
4	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	24 kegiatan	819 orang	APBD + BLUD
	Total	78 kegiatan	3.378 orang	

Sedangkan Capaian kinerja Utama urusan Pendidikan dan Pelatihan, pada OPD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengacu kepada RPJMD dan Renstra BPSDMD Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.115
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27	30	111%	APBD dan BLUD

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 27, realisasi yang dicapai mencapai nilai 30, atau 111 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan BPSDMD dalam meningkatkan kualitas kompetensi ASN baik pada aspek manajerial, teknis, maupun fungsional, melalui penyelenggaraan

pengembangan kompetensi yang terarah dan berkelanjutan.

Pencapaian tersebut didukung oleh implementasi program pengembangan kompetensi yang masif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan 78 kegiatan diklat dengan total 3.378 peserta ASN. Selain itu, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga sumber pembiayaan pengembangan kompetensi tidak hanya bergantung pada APBD murni, tetapi juga didukung oleh sumber pendanaan BLUD. Penerapan BLUD ini memberikan fleksibilitas dan keberlanjutan pembiayaan, yang berdampak langsung pada meningkatnya jumlah kegiatan diklat serta luasnya jangkauan peserta, sekaligus memperkuat kontribusi BPSDMD terhadap peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN, khususnya pada dimensi kompetensi.

Selain itu, pada tahun 2025, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan strategis sebagai bentuk pengakuan atas kinerja kelembagaan dan kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN, antara lain:

1. Sebagai Lembaga Pelatihan Berprestasi Peringkat ke-4 se-Indonesia Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
2. Mendapatkan Akreditasi Istimewa dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Mendapatkan Akreditasi A (Sangat Baik) dari Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kearsipan untuk Program Pelatihan Teknis Bidang Kearsipan
4. Sebagai Perangkat Daerah dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI), dengan peringkat ke-4 di lingkungan Pemprov. Sumsel

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2024 sebesar 722.954 ton meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 682.528 ton.

Tabel 2.93
Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya (ton)
Provinsi Sumatera Selatan 2021-2024

Jenis Produksi	2021		2022		2023		2024*	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Ikan Tangkap (Ribuan Ton)	212.000	144.136	220.000	151.343,6	228.000	224.756	228.000	208.685
Ikan Budidaya (Ribuan Ton)	500.000	410.708	525.000	431.243,8	545.000	457.772	579.000	514.269

Sumber : *Angka Sementara Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2025

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 44,25 kg/kapita/tahun naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,01 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh meningkatnya produksi perikanan, serta didukung oleh promosi dan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Salah satu jenis ikan unggulan produksi Sumatera Selatan adalah ikan patin.

Gambar 2.88
Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan



Tabel 2.94
Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024

Konsumsi Ikan (Kg/kapita/th)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
	40.04	44,36	42.36	42.71	42.84	43.02	44,01	44,25

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2024 (Data belum Validasi Nasional)

Produksi benih udang windu (benur) pada tahun 2023 sebesar 700.000 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.300.000 dan terus menurun dari tahun ke tahun sehingga capaiannya sangat minim dari target yang telah diproyeksikan, terutama nener yang lebih rentan terhadap perubahan baku mutu air sehingga tidak lagi menjadi sasaran target produksi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) hal ini dikarenakan baku mutu air di Kawasan tersebut kurang mendukung untuk kelangsungan produksi nener dan benur, untuk tetap mendukung kelangsungan produksi maka diperlukan treatment serta kualitas air dengan metode tertentu dengan biaya yang sangat tinggi serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sangat minim ditambah jarak tempuh Pulau Maspari yang menjadi sentra Produksi Benur dan Nener sangat jauh dari daratan dan bukan merupakan lintasan transportasi umum. Jumlah produksi benur udang dan nener bandeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.95
Produksi Benur dan Nener (Ribu)
Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023

Jenis Produksi	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi benih udang windu (benur) (ekor)	10.000	2.000	15.000	2.000	18.000	1.300	18.000	700
Produksi benih bandeng (nener) (ekor)	7.000	-	11.000	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2023 (data mutakhir)

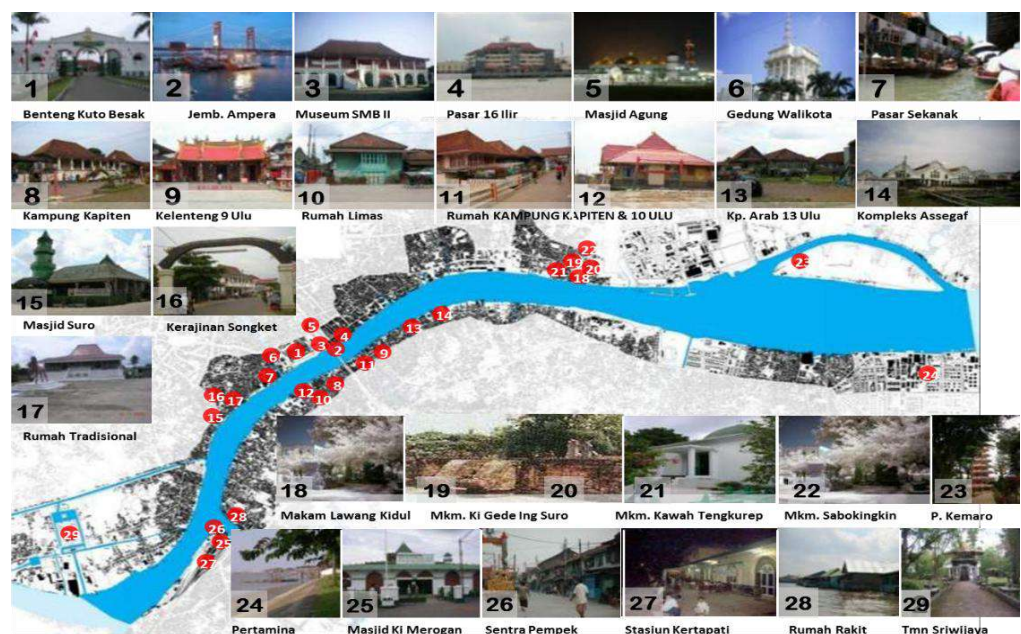
Disamping produksi ikan dan benih ada beberapa masalah yang cukup krusial pada sektor perikanan Sumatera Selatan, antara lain Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, di wilayah perairan Sumatera Selatan. Luasnya perairan Sumatera Selatan menjadi tantangan tersendiri

bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum selain itu, terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pada sektor perikanan dan perairan.

23) **Urusan Pariwisata**

Sumatera Selatan kaya akan potensi wisata, selain wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; Sumatera Selatan mengembangkan wisata olahraga yang potensi ini belum dilirik oleh Provinsi lain. Wisata olahraga ini berpusat di Jakabaring Sport City. Untuk mendukung wisata ini di Kota Palembang sudah dikembangkan paket wisata yang dapat dilihat pada peta dibawah:

Gambar 2.90
Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan



Saat ini Sumatera Selatan juga menggiatkan pengembangan wisata religi. Tempat-tempat wisata religi di Sumatera Selatan yang ada dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut: Masjid Agung pada mulanya disebut Masjid Sultan. Perletakan batu pertama pada tahun 1738, dan peresmian pada hari tanggal 28 Jumadil Awal 115 H atau 26 Mei 1748. Masjid Agung didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang dikenal pula dengan Jayo Wikramo (tahun 1724-1758). Masjid Agung Palembang bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, dan menjadi salah satu masjid tertua di Kota Palembang.

a. Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin

Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Indonesia, China dan Eropa. Bentuk arsitektur Eropa terlihat dari pintu masuk di gedung baru masjid yang besar dan tinggi. Sedangkan arsitektur China dilihat dari masjid utama yang atapnya seperti kelenteng. Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran sungai Musi. Secara administratif, berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003.

Gambar 2.91
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin



b. Pulau Kemaro

Pulau Kemaro terletak di tengah Sungai Musi, sekitar 6 KM dari Jembatan Ampera. Saat ini Pulau Kemaro adalah salah satu tempat wisata di Palembang yang paling terkenal. Di Pulau Kemaro terdapat sebuah vihara yang banyak didatangi oleh umat Buddha untuk berdoa dan berziarah. Di sini juga dapat ditemukan sebuah makam yang merupakan makam dari seorang putri Palembang. Putri ini mempunyai cerita tersendiri, yaitu dia menikah dengan anak raja dari China dengan mas kawin berupa 9 guci emas, namun pada akhirnya pasangan tersebut menerjunkan diri ke sungai dan tenggelam. Di Pulau Kemaro terdapat beberapa hal menarik, misalnya pagoda berlantai 9 yang dibangun pada tahun 2006, dan pohon cinta. Masyarakat setempat percaya bahwa bila sepasang kekasih mengukir namanya di pohon cinta ini, maka hubungan cinta mereka akan berlanjut sampai dengan pernikahan.

Gambar 2.92
Pulau Kemaro



c. Museum Al Quran Raksasa

Al Quran Raksasa adalah hasil karya seni anak bangsa bernama Sofwatillah Mohzaib. Pria satu ini memang dikenal punya minat yang besar terhadap seni kaligrafi. Bahkan wakil rakyat di DPR RI ini menjadi salah satu tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap Masjid Agung Palembang. Suatu hari, Opat sapaan akrabnya, baru saja terlelap tidur setelah selesai mengukir kaligrafi ornamen bagian pintu Masjid Agung Palembang. Dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi tersebut mengisyaratkan dirinya untuk membuat alquran terbesar di dunia. Dengan berbagai pertimbangan, disertai niat dan tekad yang bulat, ia pun mewujudkan mimpinya itu dengan mengawalinya dari surat Alfatiha. Lalu kemudian satu keping potongan Alquran tersebut dipamerkannya di masjid tersebut,

dengan harapan ada donatur yang bersedia untuk mendukung niatnya. Dari isyarat melalui mimpi, mulai mengagas pembuatan Alquran Raksasa ini.

Gagasan pembuatan Alquran itu tercetus pada tahun 2002 silam, setelah Opat merampungkan pemasangan kaligrafi pintu dan ornamen Masjid Agung Palembang. Dari sana juga inspirasi membuat mushaf Alquran dengan ornamen khas Palembang. Satu keping mushaf Alquraan surat Alfatiha ditunjukkan kepada salah seorang toko masyarakat Palembang. Tentu saja dengan harapan untuk mengajak dermawan dan relasinya mensupport pembuatan alquran tersebut. Tepat pada 1 Muharram 1423 atau 15 Maret 2002 Alquran tersebut dipamerkan di bazar pada peringatan Tahun Baru Islam. Namun resmi diluncurkan pada 14 Mei 2009 di Masjid Agung Palembang. Di kota yang pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat banyak objek wisata bernilai tinggi. Salah satunya adalah Museum Al Quran Raksasa yang berlokasi di Jalan M Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 03, RW 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Ornamen interior di Museum Al Quran Raksasa di Palembang. Bukan tanpa alasan, objek wisata religi ini disebut Alquran Wisata religi muslim. Sebab, Al Quran tersebut dipahat di permukaan kayu tembesu berukuran panjang 177 centimeter dengan lebar 140 centimeter dan ketebalan 2,5 centimeter.

Gambar 2.93
Museum Al Quran Raksasa



Alquran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Alquran Raksasa ini terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat/diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu trembesi dengan biaya tidak kurang Rp 2 miliar, dimana masing-masing lembar ukuran halamannya 177 x 140 x 2,5 sentimeter dan tebal

keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Alquran yang terdiri dari 630 halaman ini juga dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci Alquran pada warna dasar kayu coklat dengan huruf Arab timbul warna kuning dengan ukiran motif kembang di bagian tepi ornamen khas Palembang yang sangat indah di pandang dan enak dibaca.

Proses pembuatannya sendiri memakan waktu relatif lama, sekitar tujuh tahunan. Alquran Raksasa ini terbesar dan pertama di dunia dalam bentuk Alquran 30 juz yang di buat pada media dari kayu jenis trembesi. Alquran terbesar ini sebelum resmi dipublikasikan, sengaja di pajang seluruh ayat-ayat suci di dalam ruang pameran Masjid Agung Palembang selama tiga tahun untuk mendapat koreksi dari seluruh umat. Pada akhir 2011, Alquran ini dinilai layak untuk dipublikasikan dan pada Senin, 30 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama seluruh delegasi konferensi parlemen Organisasi Konferensi Islam (OKI) meresmikan penggunaan Alquran yang disebut sebagai Alquran terbesar yang dicetak di atas lembaran kayu trembesi. Sejumlah asset yang dimiliki Sumsel seperti Alquran raksasa yang hanya ada satu-satunya di dunia juga menjadi unggulan dalam menarik wisatawan. Selain itu asrama haji yang dilengkapi Ka'bah dan lintasan sa'i ukuran sebenarnya, *mock up* pesawat dan hotel syariah dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Mahakarya asli Wong Kito itu, tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal. Bahkan turis dari mancanegara, terutama dari negara-negara Arab banyak yang sengaja berkunjung untuk membuktikan sendiri karya seni yang tiada duanya itu.

d. Kampung Arab Al-Munawar

Perkampungan yang terletak di kawasan 13 Ulu di tepian Sungai Musi dan Sungai Ketemenggungan. Di kompleks ini, terdapat paling kurang delapan rumah yang usianya diperkirakan lebih dari satu abad. Salah satunya, rumah permukiman Arab pertama di Kampung 13 Ulu, Habib Abdurrahman Al Munawar.

Gambar 2.94
Rumah di Kampung Arab Al-Munawar



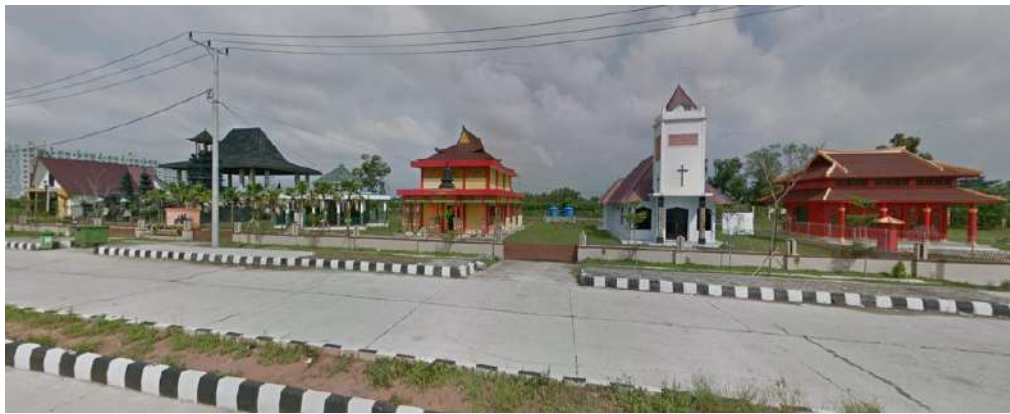
Keseluruhan rumah berkonstruksi panggung dengan menggunakan bahan kayu unglen dan sebagian lagi menggunakan batu secara keseluruhan. Sebagian dari rumah itu berarsitektur limas seperti rumah Habib Abdurrahman dan sebagian lagi telah mendapat sentuhan Timur Tengah dan Eropa.

Di kampung ini, juga terdapat rumah Kapten Arab. Seperti halnya sukubangsa Cina dan India, pada tahun 1825, Pemerintah Belanda di Palembang melakukan pendekatan. Dari tiap sukubangsa itu, diangkatlah pemimpin kaum dengan pangkat Kapten. Kapten terakhir di Kampung Al Munawar ini bernama Ahmad Al Munawar yang wafat pada tahun 1970.

e. Komplek Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun enam rumah ibadah di kawasan *venue* Asian Games di Kompleks Jakabaring *Sport City (JSC)* Palembang. enam rumah ibadah yang dibangun tersebut adalah Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Pura, Vihara, dan Kelenteng di dalam satu lokasi. Selain untuk memudahkan para pemeluk agama tersebut dalam beribadah, lokasi tempat ibadah yang dibangun secara berdekatan juga menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Selatan merupakan masyarakat yang rukun antar umat beragama, hal inilah yang menyebabkan Sumatera Selatan sebagai kawasan *zero conflict* antar suku, agama, ras, dan golongan.

Gambar 2.95
Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring



f. Replika Sarana Prasarana Ibadah Umroh (Asrama Haji)

Asrama haji Palembang saat ini sudah berfungsi menjadi tempat untuk mempersiapkan segala urusan perjalanan bagi jama'ah calon haji maupun umroh serta tempat wisata religi bagi masyarakat karena di area tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk pelatihan persiapan dalam menunaikan rukun Islam kelima.

Asrama haji tersebut dilengkapi replika Kabah, lintasan Sa'i dan fasilitas lainnya, selain itu di area asrama haji Palembang juga nantinya akan dilengkapi dengan unta, hotel syariah dan fasilitas lainnya seperti yang ada di tanah suci. Saat ini asrama haji Palembang telah dilengkapi miniatur pesawat supaya masyarakat yang akan pergi haji/umroh dapat mengetahui tata cara naik pesawat serta melaksanakan ibadah di dalam pesawat selama perjalanan tersebut. Nantinya calon jamaah haji/umroh yang akan menunaikan rukun Islam kelima ataupun umroh manasiknya dapat dilaksanakan di asrama haji Palembang. Dalam waktu dekat ini akan dibangun hotel syariah sehingga kawasan tersebut benar-benar menjadi tempat wisata religi terutama bagi umat Muslim. Dengan lengkapnya fasilitas untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut bukan saja untuk memudahkan calon jamaah pergi haji/umroh tetapi juga asrama haji Palembang bisa menjadi tempat wisata keagamaan bagi umat Islam.

g. Dukungan SDM Pariwisata melalui SMK Pariwisata dan Politeknik Pariwisata

Untuk Mewujudkan promosi dan pemasaran tersebut harus didukung oleh Sumberdaya Manusia yang handal. SDM Pariwisata yang ada di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 antara lain :

- Jumlah pemandu wisata yang terdaftar di HPI (Himpunan Pramuwisma Indonesia) 70 orang, pemandu wisata yang aktif 10 orang, pemandu wisata yang menjadi profesi 6 orang, pemandu wisata yang berserifikat 30 orang (15 orang dari HPI), sedangkan pemandu wisata yang aktif berbahasa inggris aktif sebanyak 4 orang.
- Tenaga kerja Usaha Pariwisata Sumatera Selatan 59.808 orang, yang terdiri dari 22.570 orang tenaga kerja usaha Sanggar Seni, 21.313 orang tenaga kerja usaha Rumah Makan, 8.333 orang tenaga kerja usaha Perhotelan, 1.916 usaha Daya Tarik Wisata (DTW), 1.758 orang tenaga kerja usaha Rekreasi, 1.371 orang tenaga kerja usaha Perjalanan, 2.006 orang tenaga kerja usaha Cinderamata, dan 541 orang tenaga kerja Usaha SPA. Jika dilihat berdasarkan Gender maka diperoleh 51,71% tenaga kerja bergender laki-laki dan 48,29% perempuan.

Gambar 2.96
Data Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Sumber : Buku Statistik Pariwisata Prov. Sumsel, 2023

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pariwisata yang meliputi pembinaan usaha pariwisata, standarisasi bidang pariwisata, penyelenggaraan promosi, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, dan pengembangan SDM kepariwisataan, yang dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan, dimana keragaman tersebut tersebar di setiap kabupaten/kota destinasi dengan dukungan daya daya tarik wisatanya baik berupa wisata alam, wisata tirta, dan wisata sejarah/budaya, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, dan lain-lain.

Gambar 2.97
Politeknik Pariwisata Palembang



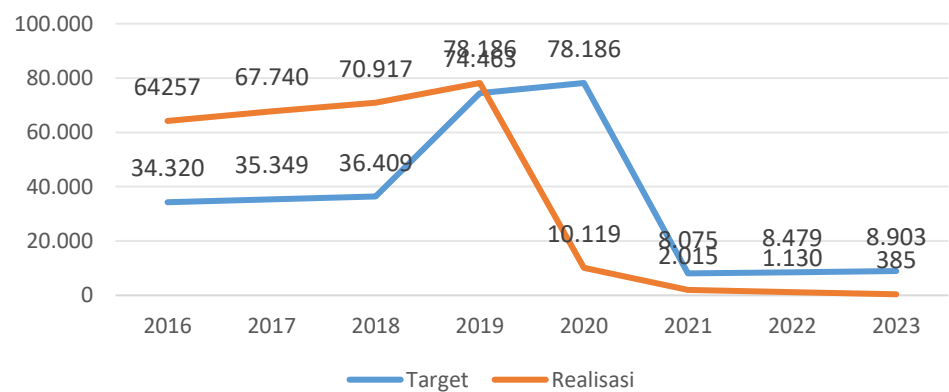
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebanyak 385 orang sedangkan di tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1.130 orang. Jumlah wisman yang datang ke Sumatera Selatan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 65,92 %, selain karena tidak adanya event skala internasional pada tahun 2023, hal ini juga disebabkan belum dibukanya jalur penerbangan internasional dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, yang berdampak pada arus kunjungan wisatawan mancanegara.

Sedangkan jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 1,542,485 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.697.666 orang atau mengalami kenaikan sebesar 139,72%. Dibukanya kembali akses kunjungan wisata dalam negeri setelah PPKN ditanggihkan menyebabkan arus wisatawan nusantara untuk melakukan perjalanan dalam negeri khususnya ke Sumatera Selatan meningkat signifikan.

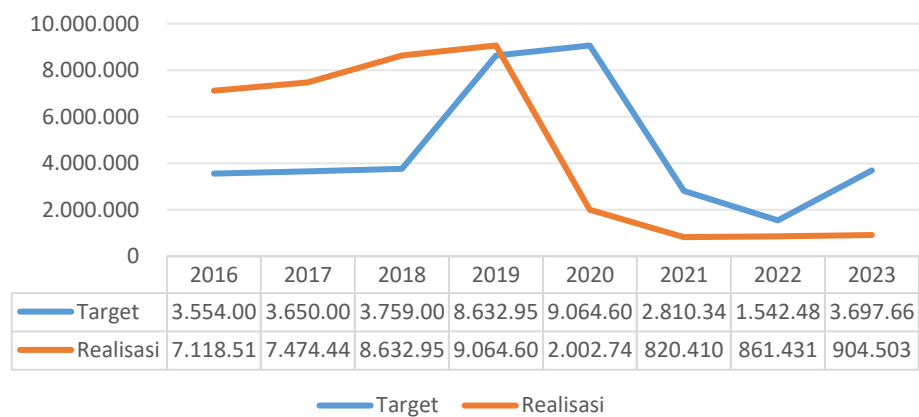
Gambar 2.98
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan

Nusantara di Sumsel Tahun 2016-2023

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Sumsel Tahun 2016 - 2023



Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Sumsel Tahun 2016 - 2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel, 2023

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi dan Makan Minum adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, dan digunakan untuk mengukur signifikansi ekonomi sektor tersebut di dalam struktur ekonomi regional. Sektor Akomodasi dan Makan Minum mencakup aktivitas seperti hotel, motel, penginapan lainnya, restoran, kafe, warung makan, katering, jasa boga, dan penyediaan makanan.

Beberapa fungsi dan manfaat dari perhitungan rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum ini antara lain untuk menilai peran sektor pariwisata dan pendukungnya, karena akomodasi dan makan minum biasanya terkait erat dengan sektor pariwisata. Kemudian untuk membandingkan antar wilayah untuk melihat daerah mana

yang bergantung pada sektor Akomodasi dan Makan Minum ini pada wilayah tersebut. Dan dapat juga dijadikan dasar perencanaan pembangunan sektor jasa, terutama dalam mendukung UMKM, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel 2. 57 Realisasi Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (miliar rupiah), 2020-2024

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55	13.370,89
Total PDRB	454.607,40	493.636,85	590.079,43	629.168,67	663.961,72
Rasio (%)	1,87	1.81	1.77	1.91	2.01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data pada tabel, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, nilai PDRB sektor ini tercatat sebesar Rp8.519,35 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp8.933,41 Milyar pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp10.470,48 Milyar, dan terus berlanjut hingga mencapai Rp12.044,55 Milyar pada tahun 2023 serta Rp13.370,89 Milyar pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya pemulihan dan ekspansi aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi dan makan minum, khususnya pada periode pascapandemi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Total PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp454.607,40 Milyar pada tahun 2020 menjadi Rp663.961,72 Milyar pada tahun 2024. Peningkatan Total PDRB ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah secara umum berada dalam kondisi bertumbuh dan semakin stabil. Namun demikian, pertumbuhan antar sektor ekonomi tidak berlangsung

secara proporsional, yang tercermin dari perubahan kontribusi relatif sektor akomodasi dan makan minum terhadap Total PDRB.

Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Total PDRB mengalami penurunan pada periode 2020–2022, yaitu dari 1,87% pada tahun 2020 menjadi 1,81% pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 1,77% pada tahun 2022. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor tersebut mengalami peningkatan nilai PDRB secara absolut, laju pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam periode yang sama.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 1,91% dan 2,01%. Peningkatan PDRB sektor ini setiap tahunnya tidak hanya mencerminkan pemulihan, tetapi juga pertumbuhan struktural yang berkelanjutan. Pemerintah daerah yang terus mendorong pengembangan UMKM kuliner, digitalisasi layanan makanan-minuman, dan promosi pariwisata menjadi katalis penting dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan intelektual manusia sebagai sumber utama dalam menghasilkan produk dan jasa. Ekonomi kreatif mencakup 17 (tujuh belas) sub sektor, antara lain kuliner, fashion, kriya (kerajinan tangan), musik, seni rupa, desain produk, arsitektur, desain interior, periklanan, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni pertunjukan, penerbitan, aplikasi, dan pengembangan permainan. Untuk mengukur ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan digunakan indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang merupakan turunan dari Indikator Proporsi PDB Ekonomi Kreatif pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Sumsel Wonderful 2030 merupakan arah pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang menitikberatkan pada penguatan event-event lokal dan daerah sebagai daya tarik utama destinasi. Event pariwisata diposisikan sebagai ruang aktualisasi

budaya daerah yang dikemas secara kreatif, adaptif terhadap tren kekinian, serta mampu menjawab dinamika pasar pariwisata. Melalui pendekatan ini, event tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi destinasi, tetapi juga sebagai penggerak pergerakan wisatawan dan peningkatan lama tinggal.

Dalam implementasinya, pengembangan event pariwisata juga diarahkan pada penguatan event olahraga dan kuliner sebagai bagian dari diversifikasi daya tarik wisata. Event pariwisata olahraga dimanfaatkan untuk menjangkau segmen wisatawan aktif dan komunitas, sementara event kuliner menjadi sarana promosi kekayaan gastronomi lokal yang berbasis kearifan budaya daerah. Penguatan event-event tersebut turut mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya, melalui keterlibatan pelaku seni, komunitas kreatif, UMKM, serta generasi muda. Sinergi antara pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya pada dimensi ekspresi budaya, partisipasi masyarakat, dan tata kelola kebudayaan. Dengan demikian, pengembangan event pariwisata dalam kerangka Sumsel Wonderful 2030 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan.

Gambar 2.90
Perhelatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Sriwijaya Ranau Grand Fondo dan Festival Sriwijaya merupakan dua event unggulan yang merepresentasikan kekuatan pariwisata event di Provinsi Sumatera Selatan. Sriwijaya Ranau Grand Fondo pertama kali diselenggarakan pada 9 November 2019 dan sejak saat itu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai ikon event pariwisata olahraga (sport tourism) yang memadukan tantangan olahraga bersepeda dengan keindahan alam Danau Ranau dan sekitarnya. Event ini tidak hanya menarik peserta dari berbagai daerah, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat citra Sumatera Selatan sebagai destinasi pariwisata aktif dan berkelas, sekaligus mendorong pergerakan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Gambar 2.91
Kemeriahan Festival Sriwijaya



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Sementara itu, Festival Sriwijaya yang telah diselenggarakan selama 33 tahun menjadi salah satu event budaya tertua dan paling konsisten di Sumatera Selatan. Festival ini berperan penting dalam melestarikan dan menampilkan kekayaan seni, budaya, serta sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya melalui berbagai pertunjukan dan

atraksi budaya. Keberlanjutan Festival Sriwijaya menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga identitas budaya daerah, sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik pariwisata berbasis budaya yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sinergi antara event pariwisata olahraga dan festival budaya tersebut memperlihatkan bahwa Sumatera Selatan memiliki fondasi yang kuat dalam mengembangkan pariwisata event yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkarakter.

Gambar 2.92
Geliat Inovasi Festival Kreatif Sriwijaya



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai penguatan terhadap pengembangan event pariwisata berbasis ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyelenggarakan Festival Kreatif sebagai salah satu event terbaru yang dirancang untuk mendorong tumbuh kembang UMKM berbasis subsektor ekonomi kreatif. Festival ini menjadi ruang promosi, apresiasi, dan kolaborasi bagi pelaku UMKM, khususnya pada subsektor kuliner, fashion, dan kriya yang merupakan unggulan Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui penyelenggaraan Festival Kreatif, potensi produk lokal tidak hanya diperkenalkan kepada masyarakat luas, tetapi juga dikemas sebagai daya tarik pendukung pariwisata daerah. Kehadiran event ini memperkuat sinergi antara pariwisata dan ekonomi kreatif, mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal, serta memperluas akses pasar bagi UMKM. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap tren kekinian dan melibatkan komunitas kreatif, Festival Kreatif diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah sekaligus memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kunjungan wisatawan dan pergerakan ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan program strategis **Sumsel Wonderful 2030**, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, menjadi salah satu target utama pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Penguatan event pariwisata berbasis budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai target tersebut, melalui peningkatan daya tarik destinasi, kualitas pengalaman wisatawan, serta perluasan jangkauan promosi pariwisata daerah.

Gambar 2.93
Anugerah Desa Wisata Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

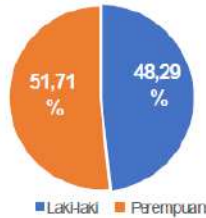
Upaya pencapaian target tersebut juga didukung oleh semangat pengembangan Desa Wisata yang terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan desa wisata diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal, sekaligus memperluas sebaran destinasi pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Sinergi antara pengembangan event pariwisata dan desa wisata diharapkan mampu memperkuat ekosistem pariwisata daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Saat ini di Sumatera Selatan sudah berhasil membentuk

Dalam kerangka **Sumsel Wonderful 2030**, pengembangan desa wisata memegang peran strategis dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisata, sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan. Dampak lanjutannya tidak hanya dirasakan pada penguatan destinasi, tetapi juga tercermin pada peningkatan penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya pada subsektor akomodasi, kuliner, jasa perjalanan, serta pelaku ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan kreativitas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga secara bertahap menembus pasar internasional.

Gambar 2.96
Data Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATENKOTA	Perhotelan	Rumah Makan	ODTW	Sanggar Seni	SPA	Cinderamata	Usaha Perjalanan	Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Total
1	PALEMBANG	5580	10061	122	764	8	827	701	454	18607
2	OGAN ILIR	70	312	220	367	10	26	63	35	1103
3	OGAN KOMERING ILIR	166	701	124	1009	88	202	22	215	2527
4	MUARA ENIM	303	1069	105	12652	59	0	158	55	14.401
5	OKU	303	118	143	746	40	31	51	59	1491
6	OKU SELATAN	109	277	112	1016	3	0	88	6	1611
7	OKU TIMUR	216	216	50	142	35	35	10	23	727
8	PRABUMULIH	120	614	13	169	37	44	19	75	1091
9	EMPAT LAWANG	31	248	81	603	12	13	40	34	1062
10	MUSI BANYUASIN	228	1133	131	402	133	68	31	63	2189
11	BANYUASIN	217	313	110	474	0	197	5	127	1443
12	MUSI RAWAS	9	577	146	1994	0	0	0	107	2833
13	LAHAT	203	358	185	786	34	22	0	23	1611
14	PAGARALAM	336	300	140	1138	15	499	35	189	2652
15	LUBUK LINGGAU	450	1190	64	233	96	80	69	285	2467
16	MURATARA	0	326	12	114	9	0	0	0	461
17	PALU	162	170	166	903	0	42	0	22	1465
TOTAL		8503	17983	1924	23542	579	2086	1382	1772	57.771

Tenaga Kerja Berdasarkan Gender



Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Sumsel Tahun 2024



Sumber : Buku Statistik Pariwisata Prov. Sumsel, 2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pariwisata meliputi pembinaan usaha pariwisata, standarisasi bidang pariwisata, penyelenggaraan promosi, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan, dengan sebaran daya tarik wisata di seluruh kabupaten/kota. Keragaman potensi tersebut meliputi wisata alam, wisata tirta, serta wisata sejarah dan budaya, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel berbintang dan nonbintang, restoran, rumah makan, serta fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendorong pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebanyak 4.219 orang sedangkan di tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.004 orang. Jumlah wisman yang datang ke Sumatera Selatan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 110,52%, hal ini juga disebabkan jalur penerbangan internasional dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin yang sudah mulai dibuka kembali dan arus kunjungan yang mulai meningkat kembali di Palembang, yang berdampak pada arus kunjungan wisatawan mancanegara.

Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 16.123.645 orang dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 23.925.100 orang atau mengalami kenaikan sebesar 33,36%. Kenaikan kunjungan wisatawan Nusantara disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

Daya Tarik Event dan Promosi Pariwisata

- Kenaikan kunjungan dipicu oleh penyelenggaraan berbagai event pariwisata unggulan—termasuk event olahraga, budaya, dan kuliner—yang menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Event-event ini memperluas pilihan pengalaman wisata dan memperkuat promosi destinasi secara nasional.

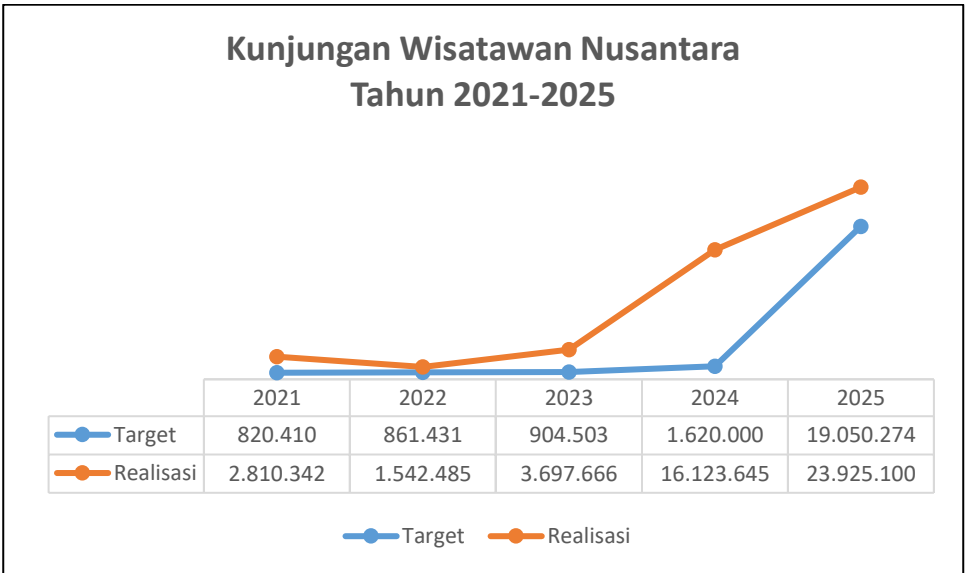
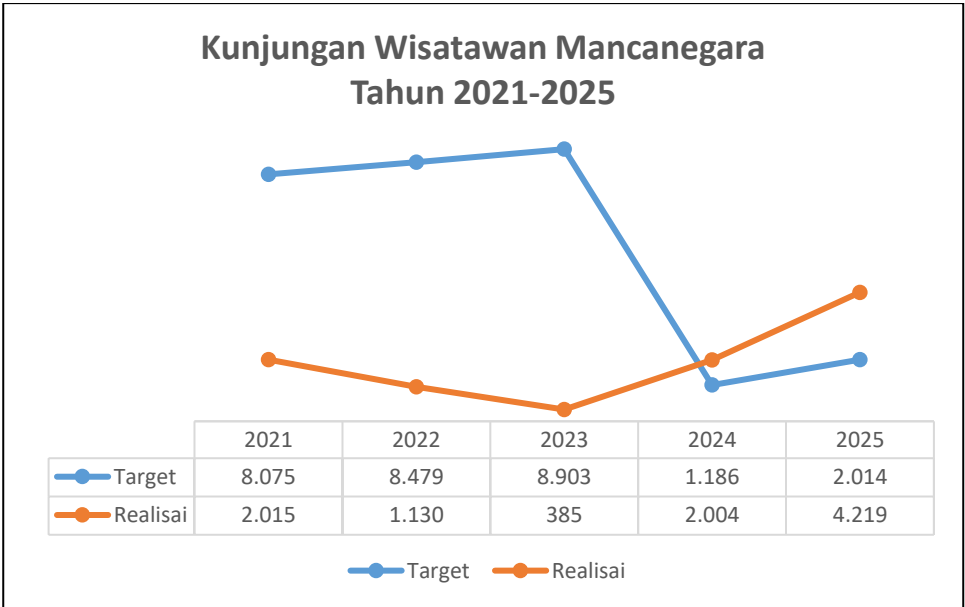
Peningkatan Akses dan Infrastruktur

- Perbaikan aksesibilitas, termasuk fasilitas transportasi dan pembukaan kembali layanan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, turut meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara ke Sumatera Selatan.

Libur Panjang dan Momen Musiman

- Adanya cuti bersama dan libur nasional pada 2025 mendorong mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, terutama ke destinasi populer di Sumatera Selatan seperti Palembang, Pagaralam, dan destinasi budaya lainnya.

Gambar 2.98
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2025. Data diolah

Sejalan dengan visi besar Sumsel Wonderful 2030, pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan diarahkan secara terintegrasi melalui penguatan destinasi, penyelenggaraan event unggulan berbasis budaya, olahraga, dan kuliner, pengembangan desa wisata, serta sinergi dengan sektor ekonomi kreatif. Kekayaan daya tarik wisata alam, sejarah, dan budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, didukung oleh peningkatan kualitas amenities dan aksesibilitas, telah mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, memperpanjang lama tinggal, serta meningkatkan belanja wisata. Kondisi ini secara langsung berdampak positif terhadap kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya dari sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum, seiring meningkatnya tingkat hunian hotel dan aktivitas restoran, rumah

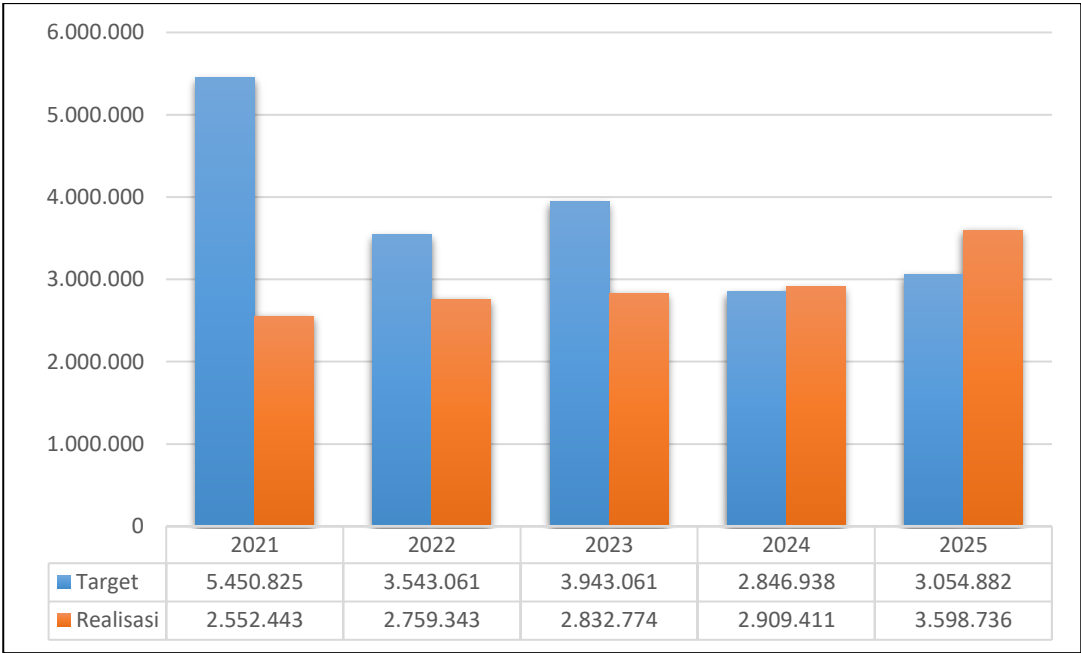
makan, serta usaha kuliner lokal. Dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tren kekinian, sektor pariwisata tidak hanya menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PDRD, guna mendukung pembangunan Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3) Urusan Pertanian

Produksi dan produktivitas petani tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan, terutama Padi. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berfokus pada Sumsel mandiri pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi serta tata Kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Sumatera Selatan diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi. Capaian pada urusan pertanian Provinsi Sumatera Selatan antara lain pada produksi Padi, Jagung, dan Cabe Besar. Grafik perbandingan capaian produksi padi tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Produksi Padi

Gambar 2.99
Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2021-2025 (Ton)



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2025

Berdasarkan Data Angka Sementara Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja produksi Padi tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena dukungan dari sarana produksi yang diperbantukan ke petani baik melalui anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) dalam bentuk benih unggul bermutu dan pupuk serta pestisida yang menyebabkan pertanaman Padi lebih terpelihara dengan baik. Adapun sarana produksi yang diberikan untuk kelompok tani berupa untuk 15.000 Ha lahan yang tersebar pada Kabupaten OKI, Banyuasin, OKU Timur, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Rawas dan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) berupa Benih Label Biru sebanyak 502.620 Kg, Pupuk NPK sebanyak 933.500 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 30.000 liter, dan Pestisida sebanyak 20.000 liter.

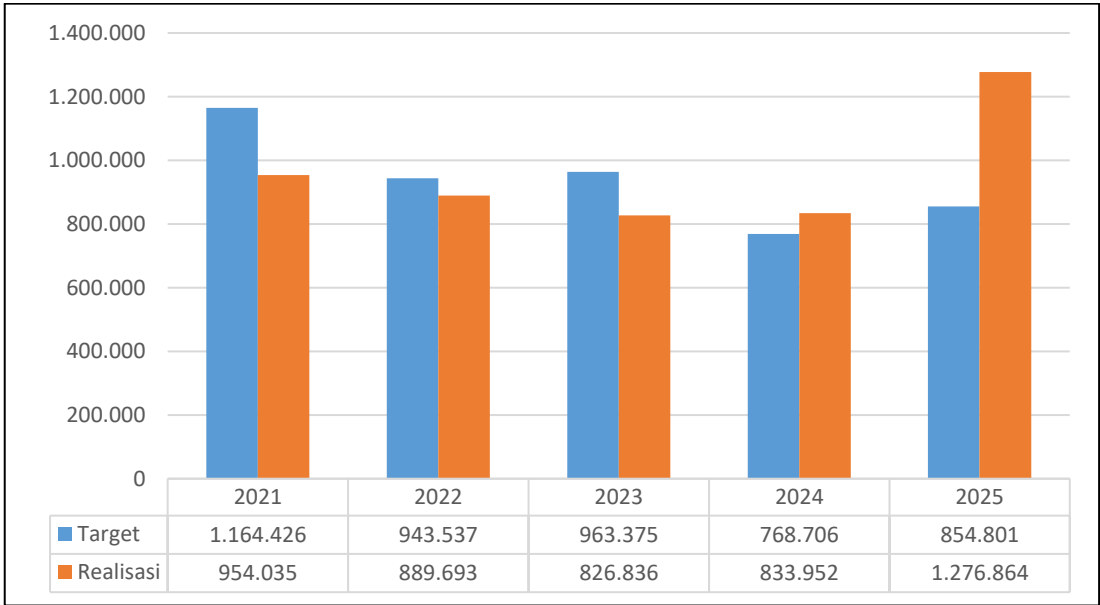
Jika dibandingkan dengan target, capaian produksi padi tahun 2025 dan 2025 sudah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Peningkatan produksi Padi ini tidak terlepas dengan adanya program-program yang bersumber dari Dana APBD Provinsi maupun Dana APBN yang berupa penyediaan bibit unggul serta sarana produksi yang cukup. Selain itu juga didukung oleh SDM pertanian yang bertugas sebagai petugas pendamping ekonomi pertanian menjadi salah satu pendamping petani didalam peningkatan produksi tanaman pangan. Petugas PPEP tersebut mengawal dan mendampingi para petani di

Kabupaten/Kota baik dari sisi penyuluhan pertanian, pengawasan benih tanaman, maupun dari perlindungan tanaman Padi terhadap hama penyakit tumbuhan.

Komoditi Padi merupakan komoditi utama di Provinsi Sumsel dan menjadi salah satu penyumbang swasembada pangan nasional. Dari sisi produksi, Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 5 besar Provinsi dengan jumlah produksi terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Selain tanaman Padi, terdapat beberapa komoditas tanaman pangan yang diusahakan di Provinsi Sumatera Selatan.

Produksi Jagung

Gambar 2.100
Realisasi Produksi Jagung Tahun 2021-2025 (Ton)



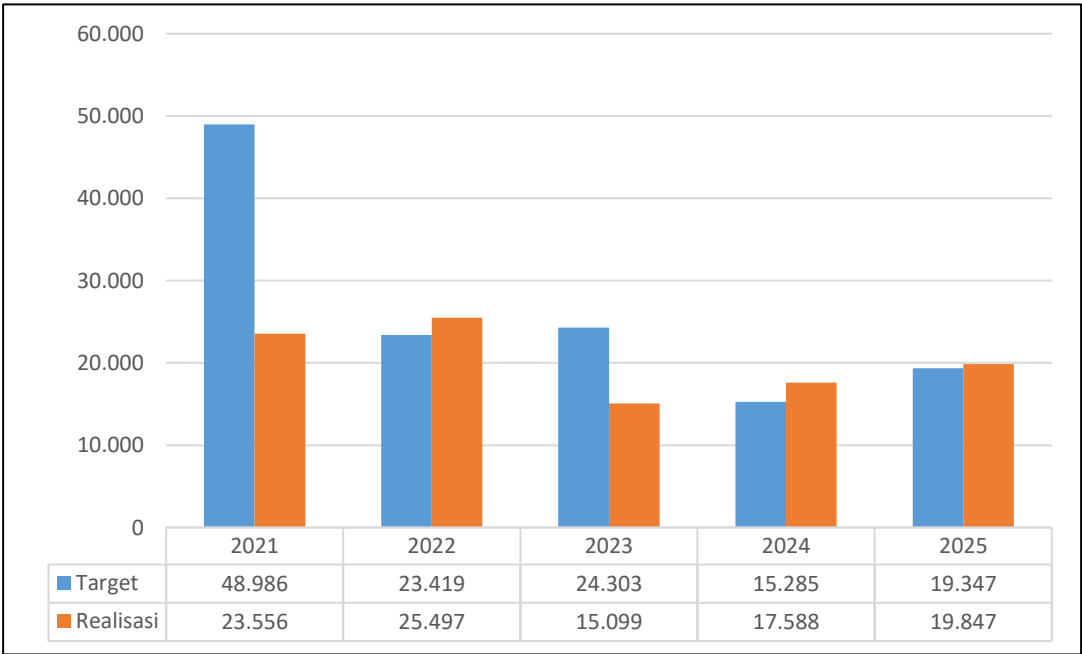
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2025

Capaian produksi jagung tahun 2025 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) adalah 1.276.864 ton lebih besar dari capaian Produksi Jagung Tahun 2024. Produksi jagung tahun 2025 melampaui target disebabkan karena sebagian besar pertanaman jagung pada tahun 2025 tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim di tahun ini. Disamping itu

juga peningkatan produksi jagung disebabkan oleh penanaman yang sesuai dengan bulan tanam yang dipersyaratkan untuk tanaman jagung sehingga untuk kebutuhan tanam jagung dapat terpenuhi dan tercukupi selama proses produksi jagung di seluruh lahan yang ditanami jagung oleh petani. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan alokasi bantuan dari Pemerintah yaitu seluas 2.000 Ha berupa Benih Jagung sebanyak 30.000 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 4.000 liter, dan Pestisida sebanyak 4.000 liter yang tersebar di Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, Banyuasin, dan Empat Lawang. Pengembangan Produksi Jagung perlu dilakukan diversifikasi untuk menjaga ketahanan pangan.

Produksi Cabe Besar

Gambar 2.101
Realisasi Produksi Cabe Besar Tahun 2021-2025 (Ton)



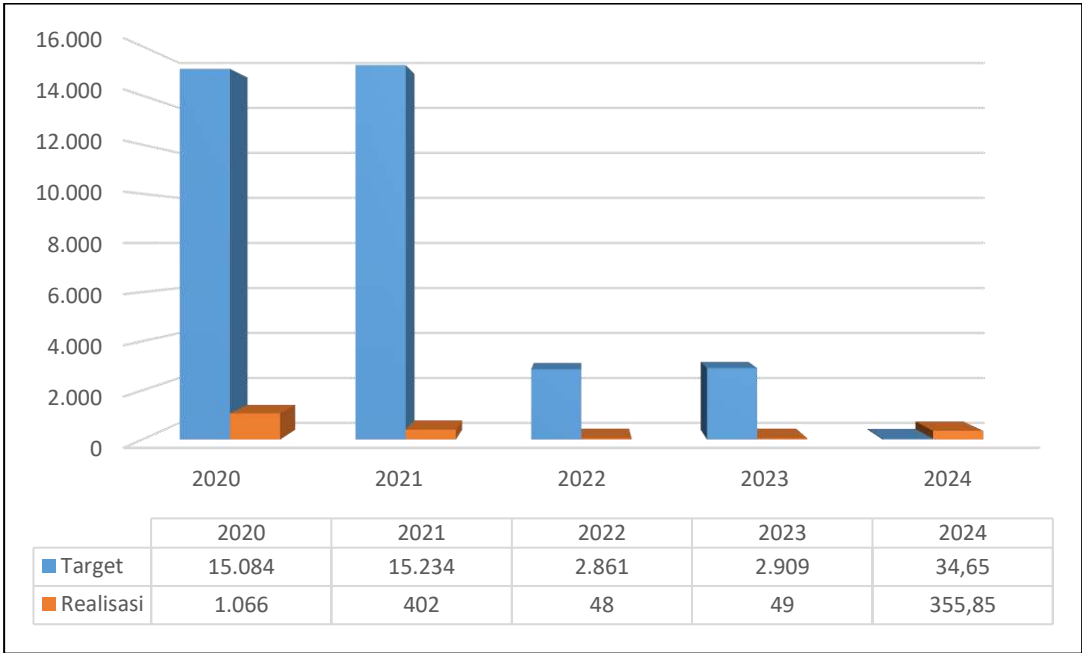
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, 2025

Capaian kinerja produksi Cabe Besar pada tahun 2025 lebih tinggi dari target tahun 2025. Hal ini sangat sejalan karena komoditi cabe besar menjadi IKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi komoditi strategis penyumbang inflasi daerah. Disamping itu juga pada tahun 2025 iklim cukup mendukung dan rendahnya serangan OPT serta jadwal tanam yang sesuai, sehingga menyebabkan produksi Cabe Besar bisa melebihi target yang telah ditetapkan sehingga produksi Cabe Besar mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 100%. Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga mengembangkan tanaman Cabe Besar di beberapa lokasi sentra dan adanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Produksi Kedelai

Gambar 2. 101
Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton)



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, 2023

Capaian kinerja produksi kedelai pada tahun 2024 lebih tinggi dari target tahun 2024. Yang menyebabkan capaian Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian di Tahun 2023 karena adanya carry over kegiatan di tahun 2023, kegiatan di Tahun 2023 baru ditanam di Bulan Oktober, November, Desember 2023, sehingga panen atau produksi di Tahun 2024. Disamping itu juga pada tahun 2024 iklim cukup mendukung dan rendahnya serangan OPT serta jadwal tanam yang sesuai, sehingga menyebabkan produktivitas kedelai bisa melebihi target yang telah ditetapkan sehingga produksi kedelai mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 1000%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi kedelai belum mencapai target. Pertanaman kedelai masih tergantung dengan adanya program bantuan pemerintah, sedangkan untuk pertanaman secara swadaya masih jarang

dilaksanakan disebabkan petani lebih memilih komoditi lain yang lebih menguntungkan dan perawatan pertanaman yang lebih mudah serta pemasaran yang lebih baik.

4) Urusan Kehutanan

Pembangunan kehutanan harus sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan, walaupun dalam kenyataannya terdapat *trade off* antara pembangunan yang berorientasi terhadap pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan terutama kehutanan. Luas lahan kritis merupakan salah satu indikator dari pembangunan kehutanan.

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami proses kerusakan fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya.

Luas lahan kritis Provinsi Sumatera Selatan ±707.169 ha (sumber: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022). Luas Kawasan Rehabilitasi pada tahun 2023 seluas ±4.750,17 Ha bekerjasama dengan Pemegang ijin IPPKH dan Ditjen PDASKHL KLHK, BRGM, Dimas Kehutanan dan Kerjasama Para Pihak.

Tabel 2.96
Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Ha)				TOTAL LUAS LAHAN KRITIS DAN SANGAT KRITIS (Ha)		GRAND TOTAL (Ha)
		KRITIS		SANGAT KRITIS		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	
		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN			
1	Banyuasin	9.974	22	0	0	9.974	22	9.996
2	Empat Lawang	11.903	17.839	37.385	19.068	49.288	36.907	86.195
3	Kota Lubuk Linggau	5.022	1.960	1.079	125	6.101	2.085	8.186
4	Kota Pagar Alam	1.358	1.342	5.590	7.487	6.948	8.829	15.777
5	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0
7	Lahat	31.875	16.761	20.929	17.795	52.804	34.556	87.360
8	Muara Enim	16.858	21.459	19.991	9.478	36.849	30.937	67.786
9	Musi Banyuasin	100.749	3.932			100.749	3.932	104.681
10	Musi Rawas	32.729	5.377	3.812	412	36.541	5.789	42.330
11	Musi Rawas Utara	18.761	6.068	1.645	251	20.406	6.320	26.725
12	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0
13	Ogan Komering Ilir	8.905	833	0	0	8.905	833	9.738
14	Ogan Komering Ulu	31.067	16.930	7.328	340	38.395	17.270	55.665
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.124	71.936	31.307	13.455	97.431	85.391	182.822
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.509	1.801	613	0	3.122	1.801	4.924
17	Penukal Abab Lematang Ilir	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984
JUMLAH TOTAL		342.817	166.262	129.680	68.411	472.497	234.672	707.169
PENJUMLAHAN		509.078		198.090		707.169		

Sumber Data : Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022

Tabel 2.97
Data Lahan Kritis UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	UPTD KPH	KRITIS (Ha)		TOTAL KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)		TOTAL SANGAT KRITIS	TOTAL KRITIS DAN SANGAT KRITIS (Ha)		GRAN TOTAL (Ha)
		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UPTD KPH Wil I Meranti	31.036,75	475,68	31.512,44	0	0	0	31.036,75	475,68	31.512,44
2	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis	46.773,05	28,77	46.801,81	0	0	0	46.773,05	28,77	46.801,81
3	UPTD KPH Wil III Palembang-Banyuasin	1.534,92	8,15	1.543,07	0	0	0	1.534,92	8,15	1.543,07
4	UPTD KPH Wil IV Sungai Lumpur-Riding	1.381,00	0,80	1.381,80	0	0	0	1.381,00	0,80	1.381,80
5	UPTD KPH Wil V Lempuing-Mesuji	6.669,67	831,52	7.501,19	0	0	0	6.669,67	831,52	7.501,19
6	UPTD KPH Wil VI Bukit Nanti - Martapura	32.805,71	16.425,81	49.231,52	7.543,84	520,45	8.064,28	40.349,54	16.946,26	57.295,80
7	UPTD KPH Wil VII Mekakau-Saka	53.702,34	71.308,81	125.011,15	12.790,69	13.267,60	26.058,29	66.493,03	84.576,41	151.069,45
8	UPTD KPH Wil VIII Semendo	5.721,42	21.935,67	27.657,09	17.333,02	14.265,89	31.598,91	23.054,44	36.201,56	59.256,00
9	UPTD KPH Wil IX Suban Jeriji	9.468,88	1.714,00	11.182,88	8.425,93	796,41	9.222,34	17.894,80	2.510,41	20.405,22
10	UPTD KPH Wil X Dempo	1.365,05	1.335,17	2.700,22	5.618,64	7.513,16	13.131,81	6.983,69	8.848,33	15.832,02
11	UPTD KPH Wil XI Kikim-Pasemah	28.798,94	34.318,10	63.117,04	38.631,69	31.251,72	69.883,41	67.430,63	65.569,82	133.000,45
12	UPTD KPH Wil XII Benakat	18.456,29	95,37	18.551,66	60,37	8,65	69,02	18.516,66	104,02	18.620,68
13	UPTD KPH Wil XIII Lakitan-Bukit Cogong	19.017,70	6.833,70	25.851,40	672,26	397,91	1.070,17	19.689,96	7.231,61	26.921,57
14	UPTD KPH Wil XIV Rawas	6.509,24	6.147,96	12.657,20	1.042,85	251,80	1.294,65	7.552,09	6.399,76	13.951,85
15	Kawasan Konservasi	79.520,16	4.853,51	84.373,67	37.562,61	139,36	37.701,98	117.082,77	4.992,87	122.075,65
TOTAL		342.761,13	166.313,02	509.074,14	129.681,90	68.412,95	198.094,85	472.443,02	234.725,97	707.169,00

Sumber Data:
1. Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 41 Tahun 2017, tanggal 19 September 2017

Tabel 2.98
Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN	KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)
2011	985.147,72	246.206,58
2013	299.172,00	13.692,00
2014	181.488,95	12.084,38
2015	187.482,80	12.828,63
2016	182.160,92	12.814,98
2017	182.160,92	12.814,96
2018	611.766,87	121.989,12
2019	611.766,87	121.989,12
2020	611.766,87	121.989,12
2021	611.766,87	121.989,12
2022	509.078	198.090
2023	509.078	198.090
2024	509.078	198.090

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), 2023 (data mutakhir)
Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor :
SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022

Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degradasi fungsi hutan dan lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umumnya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik.

Tabel 2.99
Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan

No	Pelaksana	Sumber Dana								JUMLAH (HA)	RINCIAN LOKASI REHABILITASI				JUMLAH (HA)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		HP	HL	KK	APL	
1	Pemegang Kewajiban IPPKH	Pihak ke-3	742	963	863	478	849	2.317	4.756	10.968	300	8.770	1.898	-	10.968
2	Kementerian LHK / Balai PDASHL Musi	APBN	700	10.400	230	3.100	1.500	320	1003	17.253	300	16.912	-	41	17.253
3	Kementerian LHK / Balai PDASHL Ketahun	APBN	-	7.250	-	-	-	-	-	7.250	-	7.250	-	-	7.250
4	Badan Restorasi Gambut Mangrove	APBN	10	50	-	20	15	-	-	95	73	-	-	22	95
5	Dinas Kehutanan *)	APBD	-	2	-	4	25	29	43	103	60	-	-	43	103
6	PEN Rehabilitasi Mangrove (BRGM)	APBN	-	-	-	250	-	-	-	250	-	250	-	-	250
7	Kerjasama Para Pihak (PLN, SKK Migas, PT.PUSRI, dan Pihak Lainnya)	CSR BUMN	-	-	-	-	9	10	98	117	-	51	-	66	117
TOTAL PER TAHUN			1.452	18.665	1.093	3.852	2.398	2.676	5.900	36.036	733	33.233	1.898	172	36.036

Sumber: Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dishut, 2024 (Data mutakhir)

Jika dilihat dari data diatas terdapat ketimpangan antara jumlah lahan kritis yang ada dengan jumlah lahan kritis yang direhabilitasi. Tidak hanya itu, ada beberapa masalah yang cukup menjadi perhatian pada sektor kehutanan yaitu :

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengendalian terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan hutan
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan hutan, magrove dalam kawasan hutan dan kawasan bernilai ekosistem tinggi.
4. Kurangnya tutupan vegetasi dan pengelolaan DAS.
5. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kelompok perhutanan sosial.

Hal-hal tersebut menjadi fokus bagi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan agar permasalahan diatas dapat teratasi.

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bila dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2019 sebesar Rp. 92.166,09 milyar namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 83.281,99 milyar. Tahun 2021-2023 kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tahun 2024 mengalami

penurunan kembali.

Pada tahun 2021 kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 103.801,70 miliar, Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat menjadi Rp 163.520,90 miliar, dan tahun 2023 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 167.372,90 miliar namun mengalami penurunan tahun 2024 menjadi Rp. 163.335 milyar. Pada tahun 2024 sub sektor yang paling besar kontribusinya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian adalah Sub Sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp. 92.140,39 miliar, kemudian Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar Rp. 38.943,45 miliar dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp. 32.251,18 miliar.

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,09	83.282,99	103.801,70	163.520,90	167.372,90	163.335
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	37.562,70	32.208,31	37.515,47	41.272,12	37.030,73	38.943,45
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	27.642,97	24.560,87	39.084,82	93.384,52	100.011,10	92.140,39
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	26.960,42	26.513,81	27.201,41	28.846,29	30.331,10	32.251,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel 2025
*data tahun 2025 belum update karena belum ada rilis BPS

Capaian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada kurun waktu 2020-2025 sangat baik. Rasio elektrifikasi menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2020 sebesar 98,7% hingga tahun 2022 sebesar 99,90%. Pada tahun 2023 rasio elektrifikasi mengalami kenaikan 0,01% menjadi 99,91%.

Persentase desa berlistrik menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Pada tahun 2020 persentase desa berlistrik mencapai 98,64% dan terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi 98,98% yang mencerminkan upaya perluasan jaringan listrik ke desa-desa yang sebelumnya belum teraliri listrik. Persentase semakin meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 99,01% dan juga di tahun 2023 sebesar 99,05%. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya menjadi 99,26%. Pada tahun 2025, persentase desa berlistrik kembali meningkat menjadi 99,29% yang semakin mendekati desa berlistrik secara menyeluruh di Sumatera Selatan.

Porsi EBT dalam bauran energi primer selama periode 2020-2025 menunjukkan tren meningkat, namun relatif stagnan pada beberapa tahun. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 capaian berada pada angka yang sama yaitu 20,82%. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 23,14% dan setelah itu pencapaian cenderung sama di tahun 2023 yaitu 23,14% dan meningkat di tahun 2025 menjadi 23,15%.

Intensitas energi primer selama periode 2020-2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencapai 230 SBM/Rp Milyar dan menjadi 232,38 SBM/Rp Milyar tahun 2025. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah.

Konsumsi listrik per kapita menunjukkan tren yang cenderung meningkat namun berfluktuasi. Peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 981 kWh/kapita jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022 konsumsi listrik/kapita menurun menjadi 891,97 kWh/kapita. Konsumsi tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 996,26 kWh/kapita. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 sebesar 881,65 kWh/kapita dan tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 925,73 kWh/kapita.

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2020-2025

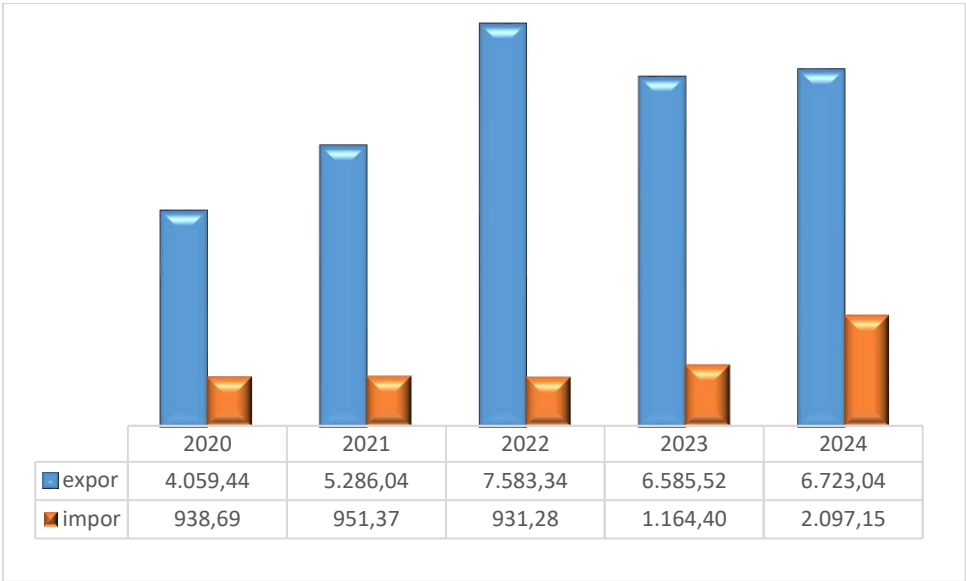
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Elektrifikasi	%	98,7	99,27	99,90	99,91	99,99	99,99
2.	Persentase Desa Berlistrik	%	98,64	98,98	99,01	99,05	99,26	99,29
3.	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	20,82	20,82	23,14	23,14	23,15	23,15
4.	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	230	220	230	210	220	232,38
5.	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	834	981	891,97	996,26	881,65	925,73

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel 2025

6) Urusan Perdagangan

Kondisi neraca perdagangan di Sumatera Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 cukup fluktuaktif, bahkan nilai ekspor Sumatera Selatan sempat turun secara drastis pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh negara-negara di dunia. Pandemi *Covid-19* menyebabkan efek domino di berbagai sektor, salah satunya di sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan luar negeri terdampak virus *Covid-19* terutama ke negara-negara yang terkena wabah tersebut, banyak negara-negara tujuan ekspor yang melakukan lockdown kurun waktu tersebut dan merupakan pasar andalan Sumatera Selatan, seperti China dan Amerika Serikat.

Gambar 2.102
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024, (US\$)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data mutakhir)

Komponen ekspor dan impor memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2020-2024, lebih dari separuh nilai ekspor Sumatera Selatan masih disumbang oleh produk-produk mentah dan setengah jadi, yaitu bubur kayu/pulp, karet, dan batubara. Namun sejak tahun 2024 nilai ekspor kembali meningkat. Hal ini juga memberikan dampak yang positif bagi nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan, walaupun di tahun 2023 ekspor Sumatera Selatan sempat mengalami penurunan sebesar 6,6 % dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh penurunan harga karet dunia yang berimbas pada penurunan ekspor karet Sumsel

Tabel 2.102
Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Jenis Komoditi Ekspor	Nilai FOB (Juta US\$)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karet Remah	1 114,13	1 577,23	-	-	-
Karet dan barang dari karet	704,00	1837,662	1048,107	1095,46	1349,77
Bubur Kayu/Pulp	1 082,16	1 210,29	1435,93	1282,92	1250,06
Batubara	579,69	1.547,14	3379	2872,5	-
Kertas Tisu	127,53	95,66	128	111,91	109,36
Minyak Kelapa Sawit dan Fraksinya	137,5	212,85	322	432,46	264,65
Panel Kayu Lainnya	66,5	72,32	-		-
Kayu barang dari kayu	-	-	97	99,6	104,52
Pupuk	90,78	100,78	97	47,55	56,94
Karet Buatan	64,58	21,24	-	-	-
Bungkil dan Residu	16,31	22,41		42,71	53,11
Bahan kimia anorganik	-	-	66	26,4	25,08
Kimia dasar organic dari hasil pertanian	6,92	24,74	-	-	-
Produk Farmasi	18,7	18,35	29	-	-
Buah-buahan Tahunan	28,77	37,8	31	30,01	48,81

Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Sumatera Selatan Tahun 2024, diolah (data mutakhir)

Nilai ekspor nonmigas Sumatera Selatan pada Tahun 2024 didominasi oleh komoditas karet dan barang dari karet yang mencapai nilai US\$ 1.349,77 juta, namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 didominasi ekspor komoditas batubara yang mencapai 2.87,5 juta . komoditas yang mengalami penurunan pada tahun 2024 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya sebesar 39 persen. Kemudian diikuti oleh komoditas bubur kayu/pulp sebesar US\$ 1.250,06 juta dan bahan kimia anorganik.

Tabel 2.103
Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan

Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas					
Negara	2020	2021	2022	2023	2024
ASEAN		859,12	1713,27	1501,44	1598,05
Malaysia	322	299,7	538	477,13	455,95
Singapura	-	-	199	265,55	-
Philipina	-	70,88	277	261,87	307,83

ASEAN Lainnya		365,72	561,22	496,88	451,99
UNI EROPA		359,25	321,02	217,12	223,72
Jerman	61	82	-	39,29	30,90
Belanda		37,87	34,49	22,83	18,02
Belgia		33,73	53,94	21,73	-
Uni Eropa Lainnya		243,97	167,20	113,16	145,51
Negara Utama Lainnya		3394,65	4708,12	4349,25	4370,58
Tiongkok	1166	2080	2.324	2.634,15	2483,01
India	219	238	848	724,37	737,51
Korea selatan	146	131	326	494,52	516,65
Amerika Serikat	275	467	427	297,98	374,56
Jepang	49	110	337	198,22	258,85
Taiwan		140,85	153,64	124,25	-
Brazil	32	34	-	-	-
Thailand	55	106	262	-	-
Bangladesh	16	26	-	73,39	123,62
Vietnam	-	-	235	-	382,28
Lainnya	708	1111		1.023,61	1.004,57
Jumlah	3049	4684,7	5.773	6.585,52	6.723,04

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2024

Tujuan utama ekspor Sumatera Selatan pada tahun 2024 didominasi ke negara Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan dan Philipina dimana masing-masing mencapai US\$250,01juta, US\$68,07 juta, US\$48,79 juta dan US40,84 juta. Kemudian jika dilihat dari Kawasan nilai ekspor ke negara ASEAN meningkat 22,63 persen atau US\$34,58 juta. Begitu juga ekspor negara Uni Eropa yang meningkat 29,19 persen atau US\$3,51 juta. Hal ini disebabkan peningkatan ekspor yang signifikan ke negara Vietnam, Filipina, Jepang dan Bangladesh serta kontribusi nilai ekspor paling besar diberikan oleh Tiongkok, India dan Korea Selatan.

Tabel 2.104
Nilai Impor beberapa komoditi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2024

No	Deskripsi	NILAI CIF (Juta US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mesin- Mesin/Pesawat Mekanik	450,17	414,91	283,64	628,54	1376,49
2	Pupuk	93,71	114,48	123,49	73,81	87,97
3	Benda-benda dari Besi dan Baja	33,26	23,65	20	47,03	63,60
4	Bubur Kayu/Pulp	11,78	23,47	23,02	20,46	28,61
5	Besi dan Baja	33,26	18,45	20,47	14,62	-

No	Deskripsi	NILAI CIF (Juta US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Plastik dan Barang Plastik	14,38	20,58	21,90	-	-
7	Mesin/Peralatan Listrik	166,57	76,91	61,59	23,19	121,25
8	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	32,95	63,04	83,92	40,18	35,63
9	Bahan Kimia Anorganik	16,64	17,81	-	-	-
10	Karet dan barang dari karet	11,03	34,53	66,15	82,79	62,87
11	Serealia	-	-	-	50,81	61,51
12	Barang dari batu, semen, dan peralatan mekanis dan bagiannya	-	16,94	17,97	40,21	-
13	Reactor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya	-	-	-	40,18	-
14	Kayu dan Barang dari kayu	-	-	-	0,53	62,64
15	Senjata dan Amunisi serta bagiannya	-	-	-	-	27,83
Total Gol Barang Utama		839,35	790,01	708,60	1.007,02	1.928,40
16	Lainnya	76,13	107,90	107,73	116,25	167,43
Total Impor Non Migas		915,49	897,92	816,33	1.123,26	2.067,83

Sumber : BPS Prov. Sumsel (data mutakhir)

Nilai impor non migas beberapa komoditi utama pada tahun 2023 secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari peranan terhadap total impor nonmigas selama periode Januari-Desember 2023 mesin/pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 628,52 Juta US\$, dan diikuti karet dan barang dari karet yang meningkat dari tahun 2022 menjadi sebesar 82,79 Juta US\$. Hal ini masih menjadi perhatian

A. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

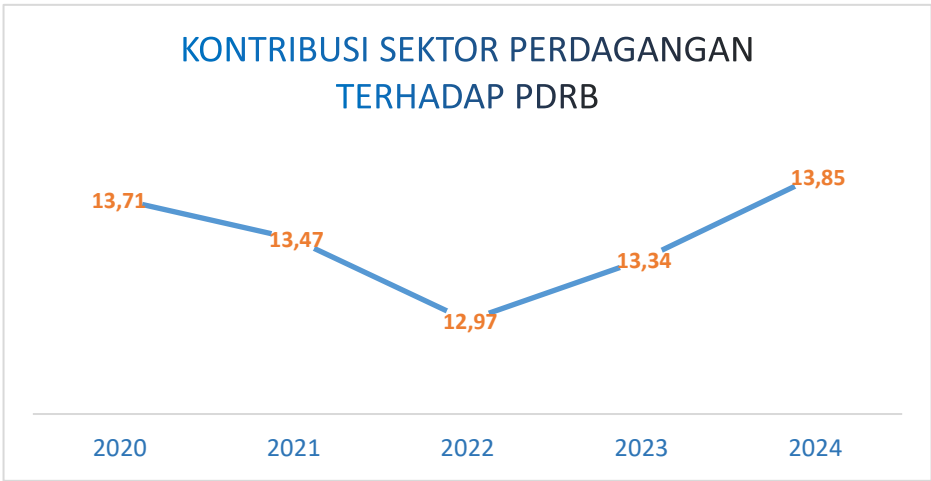
Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar **13,71%**, kemudian mengalami penurunan menjadi **13,47%** pada tahun 2021 dan kembali

menurun pada tahun 2022 menjadi **12,97%**. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak perlambatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat sebagai imbas dari kondisi pemulihan pascapandemi

Memasuki tahun 2023, kontribusi sektor perdagangan mulai menunjukkan tren pemulihan dengan meningkat menjadi **13,34%**, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana kontribusi sektor perdagangan meningkat menjadi **13,85%**, yang mencerminkan semakin menguatnya peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, melalui penguatan sistem distribusi, peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, serta optimalisasi pemanfaatan perdagangan digital dan pasar domestik, sektor perdagangan diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada periode perencanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Gambar 6.1
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025
**data tahun 2025 belum update karena belum ada rilis BPS*

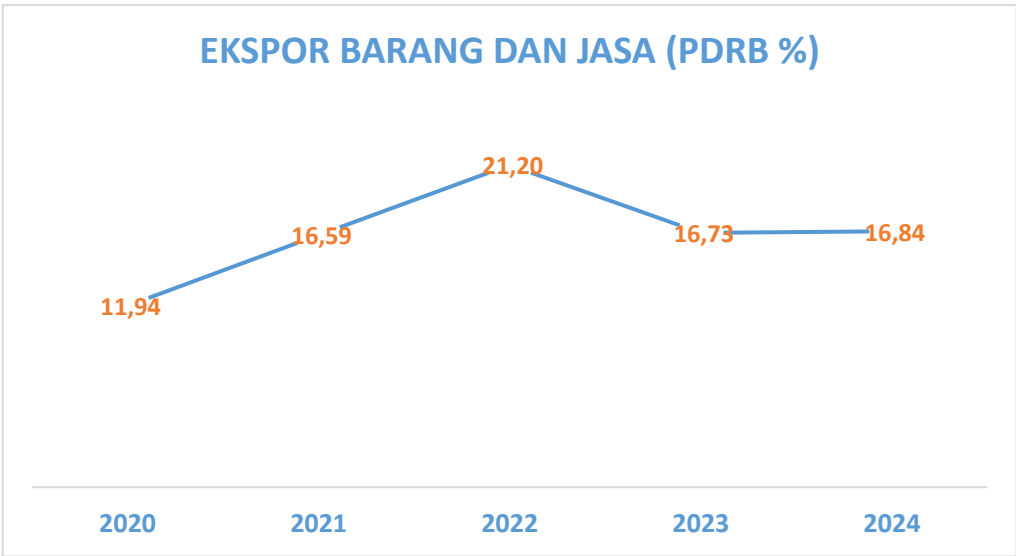
B. Ekspor barang dan jasa (PDRB %)

Perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusi ekspor tercatat sebesar 19,94%, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 16,59%, seiring dengan melemahnya permintaan global dan terganggunya rantai pasok akibat kondisi ekonomi global.

Pada tahun 2022, kontribusi ekspor barang dan jasa meningkat tajam menjadi **21,20%**, yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perdagangan internasional serta meningkatnya permintaan terhadap komoditas unggulan daerah. Namun demikian, pada tahun 2023 kontribusi ekspor kembali menurun menjadi **16,73%**, dan relatif stagnan pada tahun 2024 dengan capaian **16,84%**. Penurunan dan stabilisasi ini mencerminkan adanya tekanan eksternal, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan perlambatan ekonomi mitra dagang.

Secara umum, peran ekspor barang dan jasa masih menjadi komponen penting dalam struktur perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, pada periode perencanaan RKPD Tahun 2027, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja ekspor melalui diversifikasi produk ekspor bernilai tambah, penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, serta perluasan akses pasar ekspor guna meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah.

Gambar 6.2
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

**data tahun 2025 belum update karena belum ada rilis BPS*

C. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

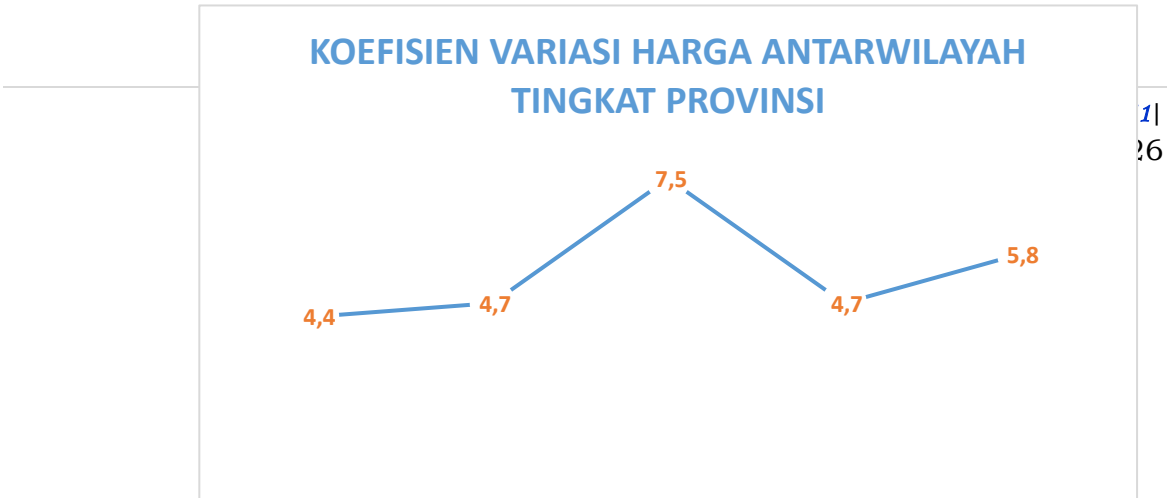
Perkembangan Koefisien Variasi (KV) Harga Antarwilayah di tingkat Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika disparitas harga antar daerah. Pada tahun 2020, nilai koefisien variasi harga tercatat sebesar **4,4%**, kemudian meningkat menjadi **4,7%** pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan mulai meningkatnya perbedaan harga antarwilayah, yang dipengaruhi oleh kondisi distribusi dan keterbatasan mobilitas pada periode tersebut.

Pada tahun 2022, koefisien variasi harga mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi **7,5%**, yang menunjukkan melebarnya disparitas harga antarwilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi, kenaikan biaya transportasi dan energi, serta belum optimalnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai koefisien variasi harga kembali menurun menjadi **4,7%**, mencerminkan perbaikan dalam sistem distribusi dan efektivitas pengendalian harga di tingkat daerah.

Namun demikian, pada tahun 2024 koefisien variasi harga kembali meningkat menjadi **5,8%**, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga yang merata antarwilayah. Secara umum, dinamika ini menegaskan pentingnya penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan ekonomi dan stabilitas harga pada periode perencanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Gambar 6.3

Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

7) **Urusan Perindustrian**

Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 merupakan sektor penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 121.330,20 Miliar (18,35%). Kontribusi tertinggi pada Sektor Industri Pengolahan adalah subsektor Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar Rp. 62.762,76 Miliar dan subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas sebesar Rp. 22.515,25 Miliar .

Sektor IKM Pada Tahun 2025 Secara Keseluruhan berdasarkan hasil rekapitulasi data dari 17 Kabupaten/Kota, sektor Industri Kecil dan Menengah menunjukkan performa kolektif yang signifikan. Secara agregat, terdapat 20.777 Unit Usaha yang telah beroperasi. Aktivitas industri ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 88.547 orang, dengan total nilai investasi yang terakumulasi sebesar Rp714.524.758.000 (Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Distribusi Capaian Berdasarkan Sektor Industri, data menunjukkan variasi kontribusi yang terbagi ke dalam lima sektor utama, dengan rincian total sebagai berikut:

- Sektor Pangan: Merupakan sektor dominan dengan investasi tertinggi mencapai Rp347.211.321.000, didukung oleh 9.569 unit usaha dan penyerapan 36.956 tenaga kerja.

- Sektor Kimia dan Bahan Bangunan (KBB): Memberikan kontribusi investasi sebesar Rp184.078.770.000 dengan total 4.675 unit usaha.
- Sektor Logam dan Jasa: Mencatatkan nilai investasi sebesar Rp115.475.159.000 dari 3.539 unit usaha.
- Sektor Sandang, Kulit, dan Karet: Menyumbang investasi sebesar Rp43.000.860.000 dengan jumlah unit usaha sebanyak 1.885 unit.
- Sektor Kerajinan dan Umum (KRAUM): Memiliki andil investasi sebesar Rp24.758.648.000 yang dikelola oleh 1.109 unit usaha.

Kinerja Wilayah Kabupaten/Kota dilihat dari persebaran wilayah, terdapat dinamika ekonomi yang berbeda pada setiap daerah meliputi :

- Kabupaten OKU Timur tercatat sebagai wilayah dengan investasi tertinggi, yakni mencapai Rp126.538.750.000.
- Kota Palembang menjadi wilayah dengan kapasitas serapan tenaga kerja terbesar yakni sebanyak 17.948 orang, yang sejalan dengan tingginya jumlah unit usaha di wilayah tersebut (2.488 unit).
- Kabupaten Ogan Ilir juga menunjukkan posisi strategis dengan total investasi melampaui angka Rp108 Miliar.

 : Baru

Tabel 2.105
Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2025

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PANGAN			SANDANG DAN KULIT DARI KARET			KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN (KBB)			LOGAM DAN JASA			KERAJINAN DAN UMUM (KRAUM)			JUMLAH TOTAL PER KAB/ KOTA		
		UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PALEMBANG	879	5.210	20.874.525	338	3.413	9.827.929	558	4.026	14.714.421	588	3548	18.067.476	125	1.751	2.143.512	2.488	17.948	65.627.863
2	OGAN ILIR	620	2.626	67.311.650	168	1.474	4.208.100	206	738	26.211.175	175	1.591	7.192.470	105	375	3.868.600	1.274	6.804	108.791.995
3	OKI	1.655	7.976	43.303.300	498	3.350	8.742.500	835	3.960	17.750.100	311	847	9.789.401	282	1.533	4.768.000	3.581	17.666	84.353.301
4	BANYUASIN	382	1.345	9.802.441	75	175	2.865.800	364	1.251	14.301.435	106	317	8.417.167	40	139	3.170.000	967	3.227	38.556.843
5	MUBA	365	1.176	6.565.800	166	355	2.366.650	598	2.482	19.418.066	656	1.343	15.097.740	23	56	500.000	1.808	5.412	43.948.256
6	PRABUMULIH	721	1.576	14.856.350	153	495	2.483.800	319	1.095	10.899.370	247	695	11.616.000	36	70	594.000	1.476	3.931	40.449.520
7	MUARA ENIM	800	2.292	14.801.030	113	297	2.075.000	300	1.368	14.228.811	222	634	2.367.946	80	131	2.899.550	1.515	4.722	36.372.337
8	OKU	116	547	1.966.605	16	88	377.154	316	1.572	9.014.310	109	424	2.744.245	12	47	139.500	569	2.678	14.241.814
9	OKU TIMUR	1.465	4.502	98.580.550	21	53	862.000	284	1.066	12.974.700	326	828	13.988.500	9	31	133.000	2.105	6.480	126.538.750
10	OKU SELATAN	507	1.291	13.035.500	17	74	509.050	107	539	4.671.000	89	237	2.908.000	3	11	54.000	723	2.152	21.177.550
11	LAHAT	466	1.588	17.660.000	32	104	905.000	201	1.438	15.694.500	178	1.001	6.948.630	32	100	515.170	909	4.231	41.723.300
12	PAGAR ALAM	408	2.613	9.964.500	27	49	646.500	6	18	318.000	112	264	4.649.000	192	637	2.589.300	745	3.581	18.167.300
13	EMPAT LAWANG	110	470	3.701.255	1	10	80.000	14	97	1.260.000	21	61	1.001.000	13	23	70.000	159	661	6.112.255
14	MUSI RAWAS	352	1.493	9.379.350	14	53	982.000	295	1.214	15.122.640	82	447	2.255.100	22	241	690.000	765	3.448	28.429.090
15	LUBUK LINGGAU	243	1.067	9.623.205	40	162	2.791.325	183	969	5.572.330	192	722	5.855.712	49	184	1.310.506	707	3.104	25.153.078
16	PALU	312	757	4.042.560	47	86	298.000	41	179	1.009.212	98	268	1.823.062	37	80	649.500	535	1.370	7.822.334
17	MURATARA	168	427	1.742.700	159	324	2.980.052	48	188	918.700	27	89	753.710	49	104	664.010	451	1.132	7.059.172
	JUMLAH	9.569	36.956	347.211.321	1.885	10.562	43.000.860	4.675	22.200	184.078.770	3.539	13.316	115.475.159	1.109	5.513	24.758.648	20.777	88.547	714.524.758

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHB pertumbuhan lapangan usaha sektor Industri Pengolahan secara keseluruhan sebesar 3,91 persen, merupakan sektor terbesar kedua penyumbang PDRB Sumatera Selatan tahun 2024 setelah sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada sektor Industri Pengolahan ini, sub sektor Industri Makanan dan Minuman merupakan sub sektor yang tumbuh tertinggi pertama yaitu sebesar 4,68 persen disusul sub sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional sebesar 4,62 persen, sub sektor Industri Pengolahan Tembakau sebesar 4,23 persen serta Sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 2,9 persen.

Berdasarkan analisa potensi, industri sandang yang mempunyai banyak ragam (songket, jumputan dan tajung) mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan sentuhan pembinaan pada IKM dan pengrajin-pengrajin serta promosi yang baik dengan didukung even-even olahraga berskala internasional dan even pariwisata yang masif maka akan menaikkan angka pertumbuhannya.

Tabel 2.106
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024

Industri Pengolahan/Manufacturing		2020	2021	2022	2023	2024
Lapangan Usaha		1.40	2.78	4.90	4.89	3.13
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-3.50	-0.16	7.67	8.77	-1,38
2	Industri Makanan dan Minuman	4.31	4.30	3.66	3.93	4,68
3	Industri Pengolahan Tembakau	0.67	2.07	2.63	8.05	4,23
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.72	1.03	1.88	2.99	2,04
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	1.05	1.20	2.93	3.06	2,27
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0.23	0.72	3.12	2.44	1,62
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.39	2.95	5.27	2.92	2,47
8	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	1.42	2.51	7.30	4.13	4,62
9	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	-0.52	2.36	4.64	1.58	2,9

Industri Pengolahan/Manufacturing		2020	2021	2022	2023	2024
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0.18	1.02	3.56	3.07	2,18
11	Industri Logam Dasar	0.46	1.70	4.10	2.44	1,49
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-0.06	1.95	3.74	0.75	0,78
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	1.86	1.22	1.52	1.77	1,6
14	Industri Alat Angkutan	1.23	1.22	3.85	2.28	2,74
15	Industri Furnitur	1.24	0.93	2.56	2.69	1,12
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.83	0.79	1.76	2.48	1,72

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2020-2024

8) Urusan Transmigrasi

Penempatan transmigran di Sumatera Selatan telah berlangsung selama 80 tahun bila dihitung dari pertama kali Belanda/Kolonial melaksanakan kolonisasi, yaitu pada tahun 1937 hingga tahun 2017. Transmigran yang telah ditempatkan hingga tahun 2022 telah mencapai 993.996 jiwa yang terdiri dari 178.438 KK dan 734.045 jiwa dari Penempatteen Transmigrasi Asal (PTA) dan sebesar 57.510 KK dan 259.951 jiwa dari Penempatan Transmigrasi Setempat.

Tabel 2.107
Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2022

NO.	KABUPATEN	PTA		PTS		JUMLAH	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1	Ogan Komering Ulu	6.016	25.461	2.986	13.385	9.002	38.846
2	Ogan Komering Ilir	26.182	104.894	12.324	55.560	38.506	160.454
3	Muara Enim	6.403	24.540	5.000	24.577	11.403	49.117
4	Lahat	6.313	26.538	2.831	12.103	9.144	38.641
5	Musi Banyuasin	24.872	107.464	13.908	61.565	38.780	169.029
6	Banyuasin	45.989	188.087	9.978	47.160	55.967	235.247
7	Musi Rawas	19.490	77.836	5.881	27.355	25.371	105.191
8	OKU Timur	42.017	174.889	3.272	12.629	45.289	187.518
9	OKU Selatan	0	0	300	1.208	300	1.208
10	Ogan Ilir	630	2.152	820	3.448	1.450	5.600
11	Empat Lawang	517	2.151	198	904	715	3.055
12	PALI	9	33	12	57	21	90

Jumlah	178.438	734.045	57.510	259.951	235.948	993.996

Sumber: Database Ket transmigrasian Sumsel, 2023

Adapun kawasan transmigrasi yang tercatat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 kawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 108
Rencana Kawasan Transmigrasi yang Telah Ditetapkan
Di Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	KABUPATEN	NO PENETAPAN	LUAS KAWASAN (Ha)	JUMLAH KECAMATAN/ DESA
1.	Belitang	Ogan Komering Ulu Timur	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	109.617,61	13/151
2.	Telang	Banyuasin	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	83.136,19	4/30
3.	Karang Agung Ilir	Banyuasin	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	55.480,57	1/11
4.	Kikim	Lahat	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	165.549,48	6/92
5.	Parit Rambutan	Ogan Ilir	No. 104 Tahun 2017 Tanggal 3 November 2017	19.281,76	3/16
6.	Simpang Rimau	Musi Rawas	No. 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	145.636,11	2/44
7.	PETATA (Penukal Abab, Penukal Utara Dan Talang Ubi)	Penukal Abab Lematang Ilir	No. 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018	66.693,56	4/40
8.	Muara Kuang	Ogan Ilir	No. 115 Tahun 2018 Tanggal 5 Desember 2018	27.400	1/15
9.	Air Balui - Jud Nganti	Musi Banyuasin	No. 87 Tahun 2019 Tanggal 16 Agustus 2019	51.450	1/18
10.	Tulung Selapan	Ogan Komering Ilir	Masih dalam proses di Kementerian Desa, PDT DAN Transmigrasi	21.650	1/?

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, 2022

Dari kawasan transmigrasi tersebut, terdapat 9 lokus kawasan transmigrasi prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yaitu:

- 1) Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Kawasan Transmigrasi Telang Kabupaten Banyuasin
- 3) Kawasan Transmigrasi Kikim Kabupaten Lahat
- 4) Kawasan Transmigrasi Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin
- 5) Kawasan Transmigrasi Simpang Rimau Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

- 6) Kawasan Transmigrasi Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
- 7) Kawasan Transmigrasi Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8) Kawasan Transmigrasi Petata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 9) Kawasan Transmigrasi Air Balui-Jud Nganti Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain dukungan anggaran pemerintah provinsi yang masih minim, masih ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi perihal masalah pertahanan dalam penyelenggaraan transmigrasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan antara lain kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi dan permasalahan sengketa pertanahan terkait transmigrasi. Sampai dengan tahun 2021, masih ada permasalahan sengketa pertanahan di 5 Kabupaten terdiri dari permasalahan tumpang tindih dengan HGU perusahaan di Kabupaten Lahat, Banyuasin dan Musi Banyuasin serta permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan di Kabupaten OKI, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Hingga saat ini telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan di lahan kawasan transmigrasi baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi melalui upaya mediasi dan tinjauan ke lapangan.

Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi yang berkekuatan hukum /berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Agraria/Badan Pertanahan Nasional belum seluruhnya diterima oleh warga transmigrasi, hal ini menjadi beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigran setiap tahun sangat rendah dikarenakan keterbatasan anggaran, sampai tahun 2021 beban tunggakan penerbitan SHM atas tanah transmigran dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.109
Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

NO.	KABUPATEN	JUMLAH UPT	TARGET (PSL)	REALISASI (PSL)	SISA (PSL)	KET
1	MUSI BANYUASIN	84	106,751	102,872	3,679	-
2	BANYUASIN	131	169,966	168,986	980	-

NO.	KABUPATEN	JUMLAH UPT	TARGET (PSL)	REALISASI (PSL)	SISA (PSL)	KET
3	OGAN KOMERING ILIR	97	99,748	98,095	1,653	-
4	MUSI RAWAS	68	49,859	47,430	2,429	-
5	OGAN KOMERING ULU	22	28,730	28,411	419	-
6	OKU TIMUR	138	144,595	142,727	1,868	-
7	LAHAT	39	31,202	29,206	1,996	-
8	MUARA ENIM	34	25,680	25,680	-	-
9	OGAN ILIR	9	5,050	4,411	639	-
10	OKU SELATAN	4	1,680	-	1,680	-
11	EMPAT LAWANG	4	1,279	1,246	33	-
12	PALI	3	1,378	766	612	-
13	PRABUMULIH	2	1,680	1,680	-	-
14	MUSI RAWAS UTARA	17	12,936	11,513	1,423	-
15.	LUBUK LINGGAU	1	300	300	-	-
	JUMLAH TOTAL	653	680,834	663,323	17,411	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2023

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Era reformasi telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan mutu pelayanan yang dihasilkan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2015 menggunakan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan standar yang diakui secara internasional dan memiliki sertifikasi. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan **Total Quality Control** yang mampu menjawab perkembangan globalisasi dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 bukanlah suatu yang didapat dalam sekejap, namun hasil dari usaha perbaikan oleh

semua pejabat maupun personil di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikasi ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pengakuan dari pihak independen terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Gambar 2.103
Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan.

Penganugerahan Pangripta Nusantara kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terbaik bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS sejak tahun 2011. Prestasi Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 : Provinsi Terbaik I (Penilaian RPJMD)
2. Tahun 2012 : Provinsi Terbaik III
3. Tahun 2013 : Provinsi Terbaik I APN Pratama Kelompok B
4. Tahun 2014 : Provinsi Terbaik II APN Utama Kelompok B
5. Tahun 2017 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik III
6. Tahun 2018 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik II
7. Tahun 2019 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik III

2) Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan yang menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil memperoleh predikat WTP tersebut sepuluh tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2024. Opini WTP ini merupakan penghargaan Tertinggi Akuntabilitas Keuangan dari Kementerian Keuangan RI.

3) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

b. Kepegawaian

Pada tahun 2024 Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Kepegawaian sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Target nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan pada tahun 2024 adalah 76 dengan realisasi kinerja 81,36 atau lebih tinggi 5,36 poin dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 sebesar 67,14 maka terdapat peningkatan sebesar 14,22 poin pada tahun 2024.

2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) merupakan perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan Tinggi (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\% \\ &= \frac{4.221}{662} \times 100\% \\ &= 636,65\% \\ &= \text{Capaian Kinerjanya } 636,65\% / 100\% = 100\% \end{aligned}$$

3. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Indikator ini adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\% \\ &= \frac{746}{4.884} \times 100\% \\ &= \text{Capaian Kinerjanya } 15,27\% / 9\% = 100\% \end{aligned}$$

Target tahun 2024 sebesar 9% dengan realisasi sebesar 15,27%. Menunjukkan bahwa persentase Pegawai dengan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Prov. Sumsel meningkat dari sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar 14,21% atau meningkat 1,06 persen poin.

4. Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah sesuai target, Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100%. Capaian Kinerja urusan Kepegawaian tahun 2024

dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.110
Capaian Target Indikator Kinerja urusan Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
1	Nilai IP ASN	%	76	81,36	100
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	636,65	100
3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	15,27	100
4	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100

Sumber : BKD Provinsi Sumsel, 2025

b. Pendidikan dan Pelatihan

Sedangkan Capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan, pada OPD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial dari target 92% terealisasi sebesar 72% sehingga persentase capaian hanya mencapai 79%. Capaian yang hanya mencapai 79 persen, hal ini dikarenakan Pelatihan kepemimpinan masih belum menjadi syarat mutlak untuk menduduki jabatan struktural sehingga masih banyak pejabat yang telah menduduki jabatan tetapi belum mengikuti pelatihan kepemimpinan yang sesuai dengan jabatannya.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, dari target 80% terealisasi sebesar 82% sehingga capaiannya mencapai 102,5%. Hal ini juga dikarenakan adanya kegiatan kediklatan dengan menggunakan sumber dana APBD dan BLUD.
3. Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi, Indikator ini diukur dengan cara membandingkan Jumlah Program Pelatihan yang mengalami peningkatan akreditasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan total program pelatihan yang terakreditasi dikali 100%. Pada tahun 2024, terdapat 6 program akreditasi diantaranya Akreditasi Program

Pelatihan Barang/Jasa dari LKPP, Akreditasi Lembaga Pelatihan serta Akreditasi Program Pelatihan Manajerial dari LAN RI. Dari total 6 program akreditasi, terdapat 2 program yang mengalami peningkatan akreditasi yaitu sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa dari LKPP dan Lembaga Pelatihan dari LAN RI.

Tabel 2.111
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Ket.
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	Persen	92%	72%	
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintah	Persen	80%	82%	
3	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	Persen	15%	33%	

Sumber : BPSDMD Provinsi Sumsel, 2024

Urusan Pengawasan

Salah satu alat ukur akuntabilitas adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, predikat SAKIP Provinsi Sumatera Selatan yang diterima terus meningkat dan dapat mencapai Kategori A. Tetapi pada Tahun 2018 terjadi sedikit penurunan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan. Hingga pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan tetap berupaya berkomitmen dan memperbaiki Capaian Nilai SAKIP agar dapat Kembali mencapai Kategori A.

Tabel 2.112
Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2022

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Predikat
2013	68,20	B	Baik
2014	70,66	B	Baik
2015	75,11	BB	Sangat Baik
2016	76,19	BB	Sangat Baik
2017	80,01	A	Memuaskan
2018	78,71	BB	Memuaskan
2019	78,84	BB	Memuaskan
2020	78,98	BB	Memuaskan
2021	79,76	BB	Memuaskan
2022	78,06	BB	Memuaskan

Sumber : LKPJ Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel, 2022

Secara spesifik, peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal. Dimana 3 (tiga) hal tersebut harus dijadikan prinsip bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai Predikat A pada SAKIP Provinsi.

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)** sebagai perangkat daerah yang secara khusus menyelenggarakan urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan inovasi daerah. Keberadaan BRIDA Provinsi Sumatera Selatan menjadi penguatan kelembagaan litbang daerah yang sebelumnya tersebar dan belum terintegrasi secara optimal.

Kinerja BRIDA Provinsi Sumatera Selatan secara umum tercermin dari perkembangan indikator riset dan inovasi daerah, antara lain Indeks Inovasi Daerah, Kapabilitas Inovasi, serta tingkat pemanfaatan kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) merupakan pendekatan perumusan kebijakan publik yang bertumpu pada data dan bukti ilmiah untuk memastikan keputusan yang diambil efektif, efisien, dan berdampak terukur. Indikator kebijakan berbasis riset merupakan indikator baru yang termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra BRIDA

Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2025–2029. Sementara indikator Kapabilitas inovasi daerah tercermin dalam Aspek Ekosistem Inovasi, pilar Kapabilitas Inovasi pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengukur kemampuan daerah dalam membangun ekosistem inovasi melalui sub-indikator seperti publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, dan belanja riset, sebagai cerminan efektivitas daerah dalam mendorong pengembangan produk, proses, dan teknologi.

Perkembangan capaian kinerja indikator riset dan inovasi daerah selama periode 2023–2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2... Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun			Keterangan
			2023	2024	2025	
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	83,29	75,79	81,23	Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah
2.	Ekosistem Inovasi/Kapabilitas Inovasi	Indeks/Skor	3,34	3,25	Data belum dirilis	Penilaian Kapabilitas Inovasi daerah
3.	*Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)	Persentase/Skor	-	-	-	Persentase/tingkat kebijakan yang didukung hasil riset dan data

** Indikator Baru di RPJMD dan Renstra Brista Tahun 2025-2029
Sumber Data : Data diolah, Brista Provinsi Sumsel, 2026*

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun meningkat pada Tahun 2025 menjadi 81,23. Penurunan capaian pada Tahun 2024 mengindikasikan masih terbatasnya konsistensi pelaksanaan inovasi di tingkat perangkat daerah, sementara peningkatan kembali pada Tahun 2025 mencerminkan mulai menguatnya kembali komitmen dan dukungan terhadap pengembangan inovasi daerah. Capaian tersebut juga mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional pada Tahun 2025 dengan skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 81,23 (kategori sangat inovatif).

Berdasarkan data Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2025, inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat umum berjumlah 186 inovasi, yang terdiri atas inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 30 inovasi, pelayanan publik sebanyak 73 inovasi, dan inovasi lainnya sebanyak 83 inovasi. Hasil riset perlu didiseminasi atau disebarluaskan kepada masyarakat dan pelaku–pelaku usaha, supaya dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan. Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi, pelaku usaha serta masyarakat

umum sejak Tahun 2021 sampai dengan 2025 sebanyak 1072 episode telah dipublikasikan melalui Podcast **"One Day One Innovation"**.

Sementara itu, indikator Ekosistem/Kapabilitas Inovasi Daerah cenderung mengalami penurunan pada periode 2023–2024 dan belum tersedianya data Tahun 2025, yang mencerminkan perlunya masih rendahnya jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan serta belanja riset di daerah. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Brida dalam upaya peningkatan capaian Ekosistem/kapabilitas Inovasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan peningkatan nilai tambah (*added Value*) produk unggulan daerah dan produk UMKM dan pembinaan tenant baru melalui Inkubator Teknologi yang ada di Balitbangda Prov. Sumsel. Adapun pencapaian kinerja Inkubator Teknologi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Capaian Kinerja Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produk Inovasi Hasil Inkubasi	3	4	4	3
2	Jumlah Tenant yang di Inkubasi	3	4	4	3

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, 2026

a. Capaian Kinerja UPTB Kebun Raya Siwijaya

Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Patra Tani, Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Diresmikan pada tanggal 27 Juli 2018. Gubernur Sumsel meresmikan Kebun raya yang perencanaan pembangunannya telah dimulai sejak 2010 lalu turut menggandeng LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai rekan dalam pelestarian lingkungan.

Kebun Raya Sriwijaya dibangun diatas lahan seluah 100 hektar yang berupa lahan gambut basah. Kebun Raya Sriwijaya merupakan kebun raya pertama di Indonesia yang berlokasi di lahan gambut, sekaligus kebun raya terluas yang ada di Indonesia.Kebun Raya sriwijaya dibangun dengan dukungan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.485/Menhut-II/2012 tentang penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan.

Untuk meningkatkan pelayanan Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel telah melakukan peningkatan dan penambahan sarana prasarana /fasilitasi yang ada baik dibidang penelitian, edukasi, dan wisata di Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel antara lain yaitu Rumah Pewarna Alami, Taman Tematik, Spot Foto, Perbaikan Sarana & Prasarana Penunjang Lainnya.

Sejak pertengahan tahun 2019, Kebun Raya SriwijayaProvinsi Sumatera Selatan telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di Kebun Raya Sriwijaya. Pendapatan Retribusi Kebun Raya Sriwijaya pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.666.000 (100,15% dari target).

Kebun Raya Sriwijaya

Gambar :



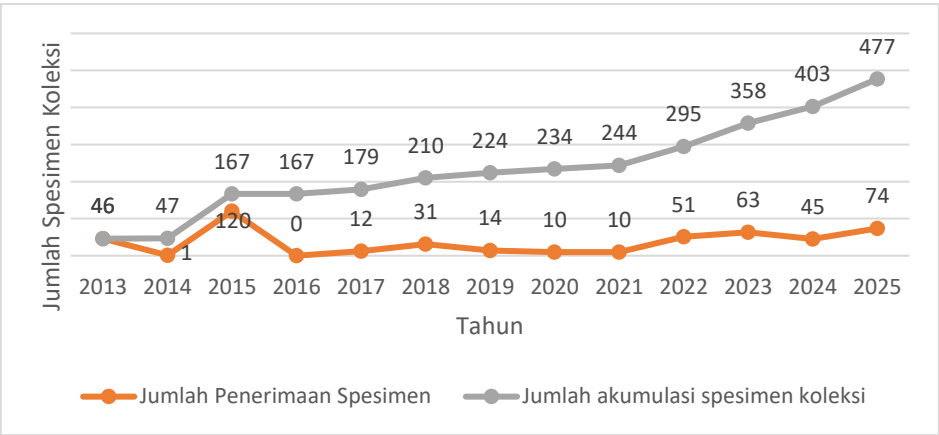
Kebun Raya

Tabel 2.115
Capaian Kinerja Kebun Raya Sriwijaya
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1	Tanaman koleksi Kebun Raya Sriwijaya	697	715	700	775
2	Tanaman Koleksi Herbarium	30 Spesimen	30 Spesimen	30 Spesimen	37 spesimen

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, 2026

Jumlah spesimen koleksi tertanam periode 2013-2025 sebanyak 834 spesimen dengan rincian 477 (57,19%) dalam kondisi hidup. Perkembangan spesimen koleksi hidup ditampilkan dalam Gambar 4 dibawah ini:



Gambar 1.Jumlah Spesimen Koleksi Hidup di Kebun Raya Sriwijaya 2013-2025

b. Capaian Kinerja *Science Techno Park* (STP) Sumsel

Science Techno Park (STP) Sumatera Selatan merupakan revitalisasi *Agrotecnopark* (ATP) Palembang.*Science Techno Park* (STP) dikembangkan pada lokasi ATP I yang terletak di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir seluas 100 hektar dan ATP 3 terletak di Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim seluas 14 hektar.

Science Techno Park (STP) diharapkan dapat menjadi Kawasan Peternakan Terpadu Berbasis Inovasi Teknologi, yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan industri pertanian, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja *Science Techno Park*
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1	Inovasi/teknologi yang diidifusikan	3	4	4	3

Sumber data : *Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, 2026*

UPTB *Science Techno Park*Provinsi Sumatera Selatan sejak pertengahan tahun 2019, telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB *ScienceTechnoPark*Provinsi Sumatera Selatan. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di UPTB STP. Pendapatan Retribusi STP terus meningkat dan pada tahun 2025 pendapatan Retribusi mencapai Rp. 45.600.000,-.

5) **Urusan Sekretariat Dewan**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pelayanan publik dan Aspirasi Masyarakat meliputi kegiatan; persiapan, pencatatan, dan mengatur penyampaian aspirasi langsung (Demonstrasi), tertulis, dan melalui media cetak dan

elektronik kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.117
Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis 2014-2022

No	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Aspirasi tertulis	128	173	192	35	124	102	102	56	6	918
2.	Demo/ Unjuk rasa	26	33	25	24	22	25	25	38	26	244
3.	Audiensi	40	43	48	80	49	20	24	89	83	476

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain memberikan Pelayanan Administratif dalam hal ini memfasilitasi Rapat-Rapat Anggota DPRD berupa Pelayanan Persidangan berikut rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 s.d 2021 yang telah difasilitasi oleh Sekeratriat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.118
Rapat-Rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rapat internal (kali pertemuan)	87	183	150	145	146	27	134	127
2.	Rapat Dengar Pendapat	3	49	16	25	9	27	10	41
3.	Rapat Kerja	75	227	117	124	41	0	89	103
4.	Rapat lintas Komisi	0	0	0	50	0	0	0	0
5.	Kunker Dalam Provinsi (dalam hari)	26	21	56	68	58	15	170	261
6.	Kunker Luar Provinsi (dalam hari)	85	152	112	128	143	17	118	99
7.	Rapat pansus	11	0	42	50	37	3	4	8
8.	Kunker Khusus	-	-	-	-	1	0	1	0
9.	Kunker Pansus	-	18	45	52	19	9	36	33

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data mutakhir)

Tabel 2.119
Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Badan Musyawarah	8	9	9	11	13	9	7	9	6
2.	Badan Anggaran	10	8	9	9	11	12	7	9	11
3.	Badan Kehormatan	1	9	5	4	2	2	1	1	2

4.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi	6	11	7	10	7	5	5	17	15
5.	Rapat Pimpinan	30	30	31	51	21	44	15	11	9

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 2.120
Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rapat paripurna/Paripurna Istimewa	30	30	31	51	48	39	43	44	40

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu

Persentase risalah rapat yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama tahun 2014-2022 diperoleh berdasarkan hasil Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang telah dirangkum dalam bentuk risalah, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Pencapaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Realisasi capaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu selama tahun 2014 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.121
Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014 – 2022

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase risalah rapat yang tepat waktu.	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Selama tahun 2014 s.d 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.122
Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2022

No	Produk Hukum	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peraturan Daerah	21	11	18	21	8	8	12	13	7
2.	Keputusan DPRD	15	10	11	22	50	16	16	19	22
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	7	11	7	9	6	4	7	8	6
4.	Keputusan Bersama	13	11	10	14	10	3	8	8	5
	Jumlah	56	43	46	61	74	31	43	48	40

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2022 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.123
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Total Konsumsi Rumah Tangga	2018	2019	2020	2021	2022
1. ADHB (Triliun Rp)	277,77	296,90	296,56	308,64	347,79
2. ADHK (Triliun Rp)	183,42	190,64	186,94	190,56	201,98
3. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	66,23	65,45	64,69	62,58	58,79

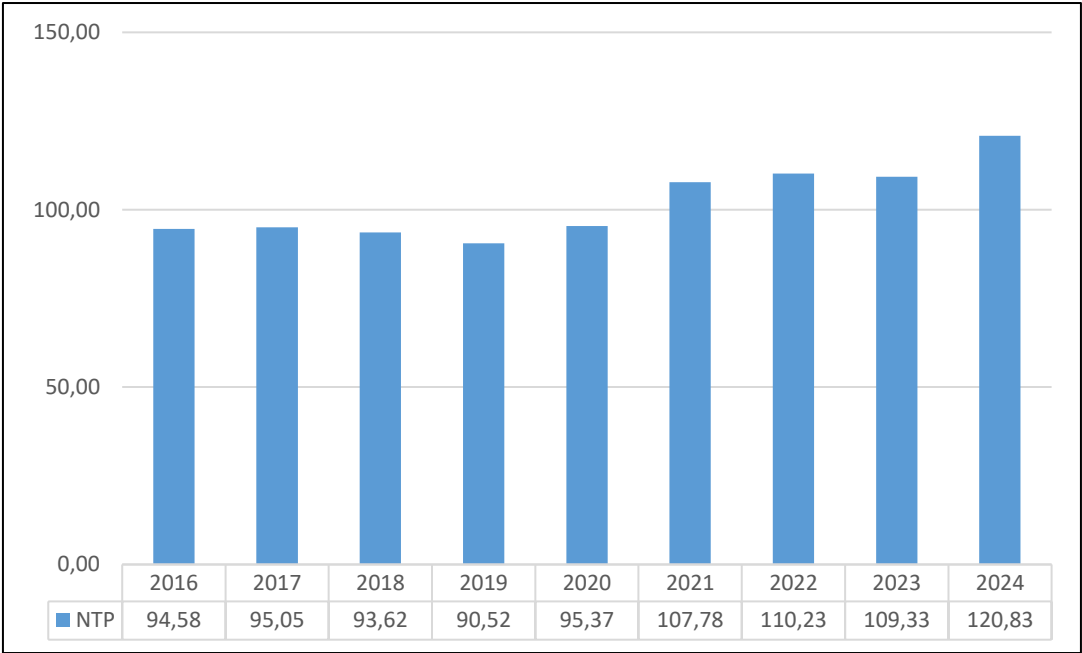
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di daerah perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*termtrade*)

dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah petani sehingga memerlukan perhatian agar Nilai Tukar Petani dapat terus meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya dan untuk keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Gambar 2. 105
Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

NTP Umum Bila dilihat trennya pada 2016-2024 mengalami fluktuatif peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Di tahun 2024 NTP sebesar 120,83 naik dari tahun 2023 yang sebesar 109,33.

Sama halnya dengan capaian PDRB, program/ kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak secara langsung mengarah kepada indikator pencapaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) karena lebih kepada indikator kinerja utama (IKU) dinas berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai kinerja NTP tidak hanya dilihat dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura karena terdapat sub sektor lain berupa sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja tersebut. Indeks harga yang dibayar petani berupa indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan

- persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.124
Perkembangan Nilai Tukar Petani

No	Sub Sektor	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	NTP Total (%)	107,78	110,23	109,33	128,53
2.	NTP Tanaman Pangan (%)	90,30	87,19	100,53	95,15
3.	NTP Hortikultura (%)	89,13	95,08	101,86	86,48
4.	NTP Perkebunan (%)	114,48	118,62	115,29	146,05
5.	NTP Peternakan (%)	102,93	104,92	99,45	101,36
6.	NTP Perikanan (%)	100,25	104,15	112,06	110,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pengeluaran per Kapita Non Makanan

Pengeluaran per kapita kelompok non makanan mengalami tren penurunan dalam kurun waktu 2018-2021. Selama tiga tahun terakhir, persentase pengeluaran per kapita non makanan lebih kecil daripada persentase pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan non makanan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021

No	Pengeluaran Non Makanan	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Non Makanan	466.781	459.890	486.894	517.375
2.	Total pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan	970.078	958.819	1.022.030	579.031
3.	Rasio	48,12	47,96	47,64	89, 35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Total panjang jalan sampai dengan tahun 2022 sebesar 19.350,017 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.580,69 km (8,17%), Jalan Provinsi sepanjang 2.113,747 Km (10,92%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 15.655,58 Km (80,91%).

Tabel 2.126
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di
Sumatera Selatan Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	PANJANG	KONDISI JALAN PROVINSI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	PALEMBANG	72,277	69,63	96,34	1,23	1,70	1,09	1,51	0,33	0,46
2	BANYUASIN	161,695	98,23	60,75	25,28	15,63	3,62	2,24	34,57	21,38
3	MUBA	39,850	36,45	91,47	3,00	7,53	0,40	1,00	0,00	0,00
4	OGAN ILIR	227,600	153,24	67,33	34,97	15,36	10,38	4,56	29,01	12,75
5	OKI	130,531	97,21	74,47	5,62	4,31	3,00	2,30	24,70	18,92
6	OKU	114,190	95,71	83,82	15,21	13,32	1,90	1,66	1,37	1,20
7	OKUT	261,260	229,04	87,67	23,52	9,00	5,35	2,05	3,35	1,28
8	OKUS	192,180	179,85	93,58	6,20	3,23	2,80	1,46	3,33	1,73
9	MUARA ENIM	227,910	117,70	51,64	21,58	9,47	11,68	5,12	76,95	33,76
10	PALI	186,000	167,50	90,05	13,50	7,26	2,90	1,56	2,10	1,13
11	PAGARALAM	14,100	5,70	40,43	6,70	47,52	1,30	9,22	0,40	2,84
12	LAHAT	83,170	71,15	85,55	12,02	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EMPAT LAWANG	153,160	108,52	70,85	33,86	22,11	5,48	3,58	5,30	3,46
14	MURA	142,645	81,05	56,82	9,60	6,73	8,60	6,03	43,40	30,43
15	MURATARA	93,560	78,36	83,75	7,60	8,12	0,20	0,21	7,40	7,91
16	LUBUKLINGGAU	13,619	13,619	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.113,747	1.602,959	75,83	219,890	10,40	58,700	2,78	232,210	10,99
% KONDISI			86,24 (JALAN DALAM KONDISI MANTAP)				13,76 (JALAN DALAM KONDISI RUSAK)			

Sumber: BBPJN III, Dinas PU Bina Marga Sumsel dan Data DAK Kab/Kota, 2023

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2018-2022 dapat dikatakan bahwa

kondisi jalan mantap mengalami Penurunan yaitu mencapai 86,24% (atau sepanjang 1.822,84 km) di tahun 2022, dikarenakan adanya penambahan ruas jalan baru sepanjang 600,094 Km dari jalan kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami rusak berat.

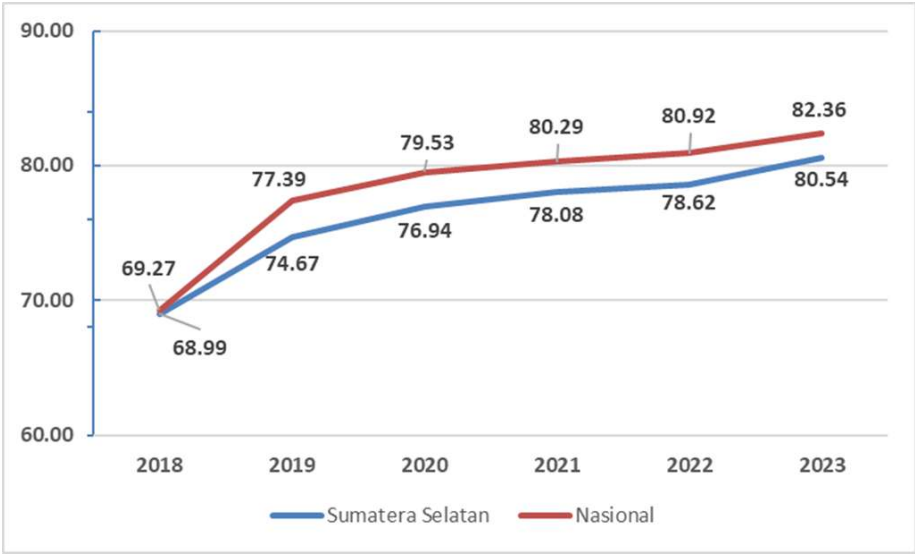
Rumah Tangga Bersanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54 persen pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Gambar 2. 106
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 – 2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

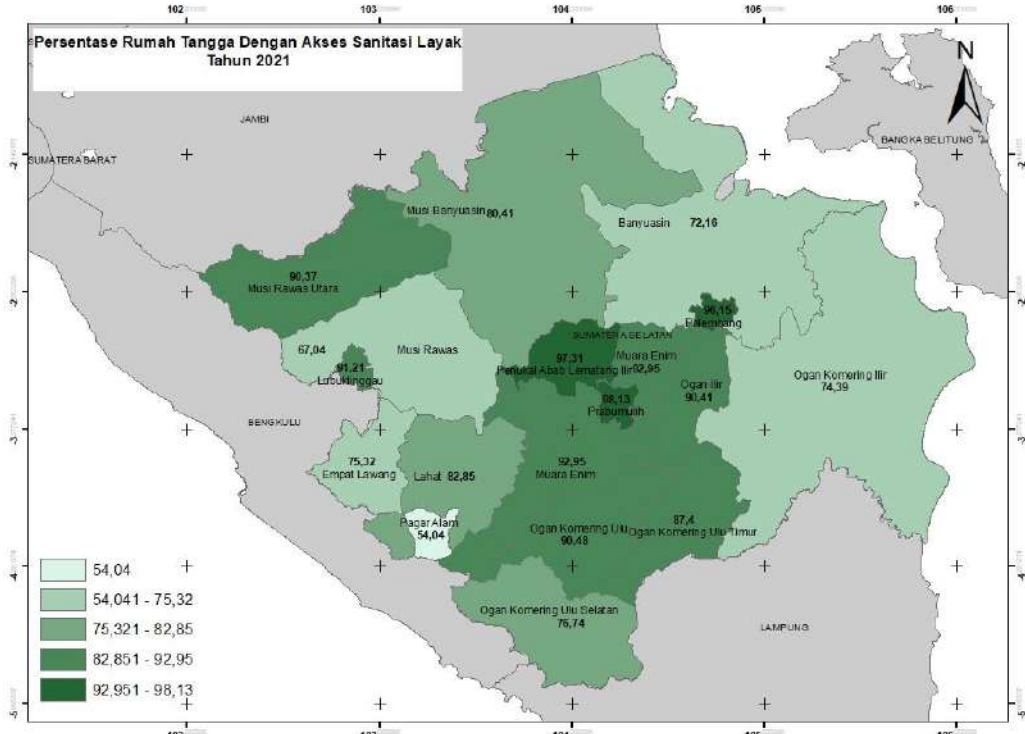
Tabel 2. 127
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2016 – 2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	76.29	80.15	82.94	84.39	80.78
2	Ogan Komering Ilir	67.48	74.72	68.93	63.95	69.73
3	Muara Enim	77.37	84.99	84.80	84.16	85.58
4	Lahat	66.06	69.34	70.52	70.35	70.19
5	Musi Rawas	71.41	71.78	69.34	73.69	74.50
6	Musi Banyuasin	72.41	74.85	71.81	80.71	83.52
7	Banyu Asin	64.63	73.06	72.12	72.80	74.53
8	Ogan Komering Ulu Selatan	57.95	53.86	57.68	57.54	63.20
9	Ogan Komering Ulu Timur	84.57	78.80	84.63	87.48	88.25
10	Ogan Ilir	70.92	73.28	68.52	71.55	76.17
11	Empat Lawang	58.36	57.60	53.52	66.93	67.81
12	Penukal Abab Lematang Ilir	89.29	90.49	94.38	89.40	95.22
13	Musi Rawas Utara	60.69	58.13	66.05	65.73	68.57
14	Kota Palembang	88.35	89.63	94.48	92.66	95.16
15	Kota Prabumulih	92.34	91.23	95.20	97.61	96.44
16	Kota Pagar Alam	58.91	52.71	58.20	62.11	61.28

17	Kota Lubuklinggau	87.58	85.87	85.85	87.64	86.05
Sumatera Selatan		74.67	76.94	78.08	78.62	80.54
Nasional		77.39	79.53	80.29	80.92	82.36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Gambar 2.107
Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



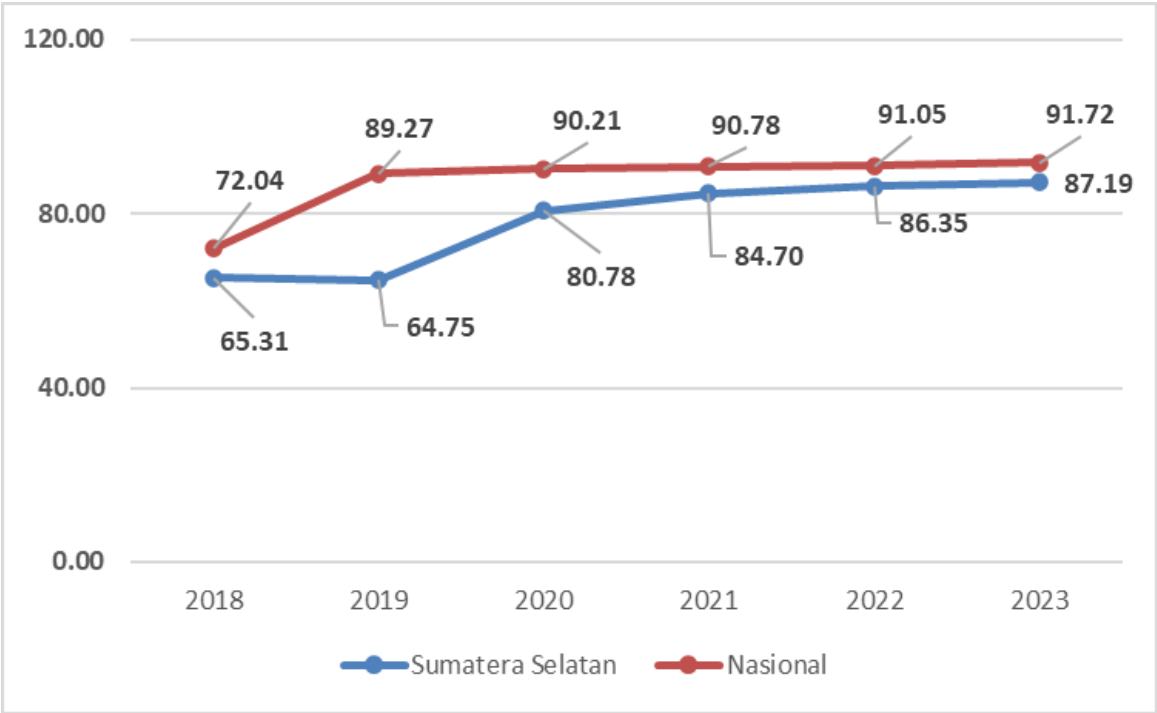
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023—diolah

Akses Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75 persen menjadi 87,19 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuk Linggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen. Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72 % dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana

pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan-hutan dan rawa.

Gambar 2.108
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

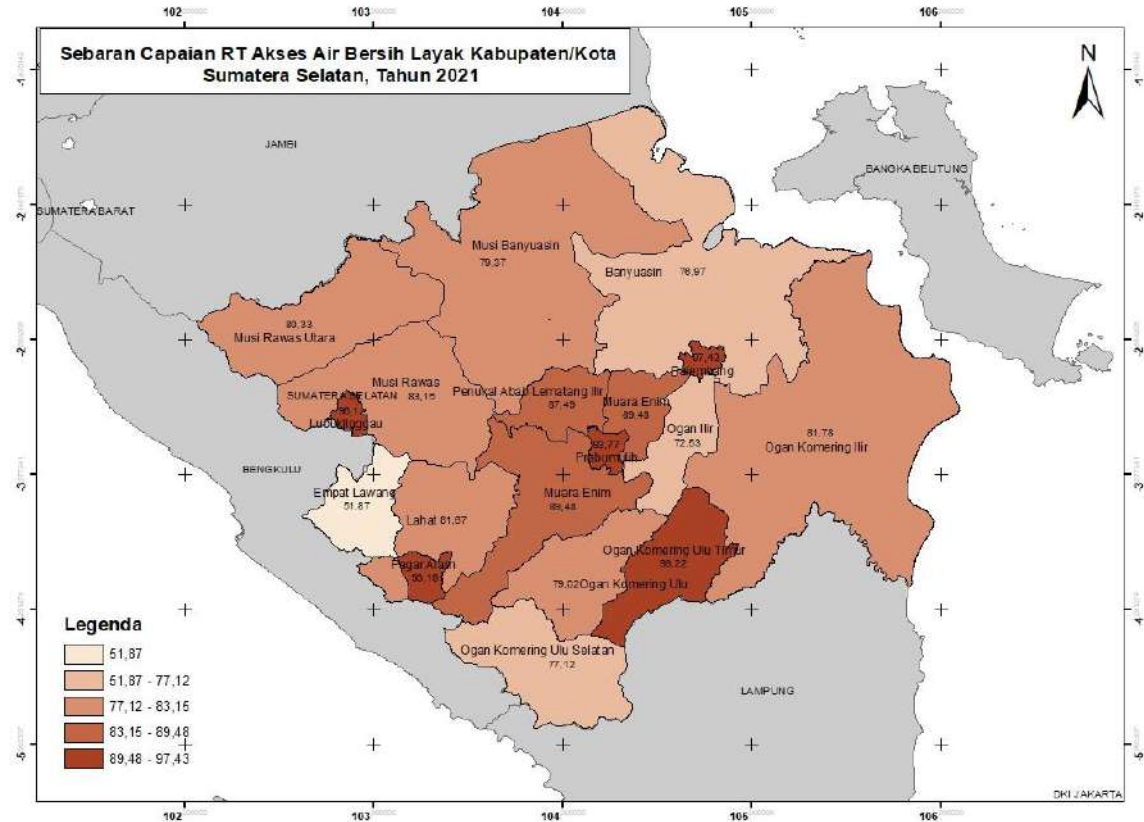
Tabel 2.128
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	67.69	78,98	81.78	82.76	82.33
2	Ogan Komering Ilir	55.67	84,23	79.02	78.52	80.59
3	Muara Enim	60.51	82,15	89.48	91.51	90.78
4	Lahat	47.57	67,44	81.67	84.35	86.16
5	Musi Rawas	67.10	77,08	83.15	93.22	89.34

6	Musi Banyuasin	64.32	84,72	79.37	81.75	85.58
7	Banyu Asin	72.21	70,38	76.97	78.25	80.66
8	Ogan Komering Ulu Selatan	42.77	67,75	77.12	76.52	80.18
9	Ogan Komering Ulu Timur	59.71	89,91	93.32	94.15	96.92
10	Ogan Ilir	55.33	73,08	72.53	71.88	75.10
11	Empat Lawang	21.28	31,41	51.87	64.85	65.94
12	Penukal Abab Lematang Ilir	63.14	83,90	87.49	85.78	91.18
13	Musi Rawas Utara	49.87	73,24	80.33	87.13	86.25
14	Kota Palembang	92.78	92,40	97.43	97.96	96.71
15	Kota Prabumulih	69.54	96,40	93.77	98.42	95.69
16	Kota Pagar Alam	51.78	88,95	93.16	85.76	88.58
17	Kota Lubuklinggau	62.50	97,10	96.10	96.41	97.52
Sumatera Selatan		64.75	80.78	84.70	86.35	87.19
Nasional		89.27	90.21	90.78	91.05	91.72

Sumber : BPS Sumsel, 2023

Gambar 2.109
Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan, 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Tabel 2.129
Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

<i>Indikator</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	20.575	20.368	15.728	13.558	12.861	12.189	13.037
Jumlah Kejahatan yang diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	9.261	5.051	10.514	10.144	8.902	9.356	n/a
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	45,01	53,60	66,85	74,82	69,22	76,76	28,63
Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	259	250	190	164	156	147	153
Jumlah kasus narkoba	1.207	1.443	1.640	1.768	1.621	2.554	4.055
Jumlah kasus pembunuhan	224	161	132	147	-	77	69
Jumlah kejahatan seksual	201	264	211	220	-	169	89
Jumlah kasus penganiayaan	2.629	2.734	2.528	2.043	-	1.708	1.253
Jumlah kasus pencurian	10.771	8.587	8.958	5.398	-	723	375
Jumlah kasus penipuan	3.086	2.939	2.828	1.127	-	1.989	1.768

Sumber : Statistik Kriminal, BPS RI 2022 (data mutakhir)

Selama periode 2015-2020 jumlah tindak kriminalitas di Sumatera Selatan cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2020 sebanyak 12.189 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12.861 kasus. Selain itu, resiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) juga mengalami penurunan, dari 156 pada tahun 2019 turun menjadi 147 pada tahun 2020. Untuk data tahun 2021 akan rilis pada bulan Desember 2022 mendatang.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data, penduduk Sumatera Selatan tidak banyak yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk lulusan SMA ke atas yang angkanya masih dibawah 25 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada persentase penduduk lulusan SD.

Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.130
Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2017-2022

Ijazah yang dimiliki	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Mempunyai Ijazah	15,17	17,59	16,33	15,32	13,63	12,72
SD/MI	32,78	28,12	28,14	27,00	27,87	27,96
SMP/MTs	21,68	20,99	21,39	20,83	21,18	20,44
SMA/MA	20,94	22,96	22,79	25,32	26,24	27,82
SMK/MAK	3,10	3,09	3,29	3,38	2,92	2,67
Diploma I/II	0,33	0,48	0,43	0,36	0,28	0,29
Akademi / DIII	1,39	1,63	1,46	1,47	1,28	1,49
Diploma IV/S1/S2/S3	4,31	4,59	5,74	6,33	6,57	6,57

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2022

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 2.131
Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2016-2022

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)	50,22	49,66	49,35	49,22	48,93	48,11	47,51
Persentase Penduduk Kelompok Umur 0- 14	29,17	28,73	28,47	27,10	26,68	26,93	26,54
Persentase Penduduk Kelompok Umur 15-64	66,57	66,82	66,96	67,62	67,99	67,52	67,79
Persentase Penduduk Kelompok Umur +65	4,26	4,46	4,57	5,27	5,33	5,56	5,67

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS RI (data mutakhir)

2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Setelah berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs), dibentuklah agenda 2030 atau yang dikenal sebagai TPB/SDGs dimana agenda pembangunan ini lebih komprehensif dan inklusif dengan target yang lebih progresif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda universal yang disusun bersama untuk menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan yang mempunyai rencana rinci guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, menjaga keberlangsungan kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup serta keadilan dan pelaksanaan

tata kelola yang terjamin agar kualitas hidup dari generasi ke generasi meningkat.

Berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa dekade aksi (decade of action) pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 (sepuluh) tahun sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, maka Indonesia mengadopsi dan menjadikan TPB/SDGs sebagai agenda pemerintah dalam perencanaan pembangunan nasional. Pada tingkat nasional, agenda TPB/SDG telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan, 92 target dan 209 indikator, sebagai hasil penyesuaian agenda TPB/SDGs dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Adapun pelaksanaan SDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbagi sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Gambar 2.110
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*
(TPB/SDGs)



Sumber : Seknas SDGs

Program TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Rencana Rencana Aksi (RAD) untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023, yang mencakup 17 tujuan dengan 91 target dan 252 indikator. Indikator-indikator yang terkandung di dalamnya merupakan hasil penyelarasan agenda TPB/SDGs dengan indikator-indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercapai seiring berjalannya waktu. Bagian integral dari siklus implementasi bagi seluruh pemangku kepentingan SDGs.

Kegiatan monitoring atau pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dalam pasal 7 butir b tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan dalam hal pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs telah diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut yang menyatakan bahwa setiap Menteri atau Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN atau Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional.

Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dilaksanakan oleh instansi pelaksana dan termasuk program dan kegiatan yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD. Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs ini mencakup 17 tujuan dengan 95 target yang diukur dengan 249 indikator. Kemudian keseluruhan tujuan target dan indikator ini dikategorikan ke dalam empat pilar, yaitu Pilar Sosial sebanyak 32 target dan 95 indikator, Pilar Ekonomi sebanyak 25 Target dan 59 Indikator, Pilar Lingkungan sebanyak 29 target dan 69 indikator serta Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 9 target dan 23 indikator.

Pada penilaian capaian SDGs ini, diukur dengan tiga kategori dengan simbol warna sebagai berikut;

Tabel 2.132
Kategori Penilaian SDGs

Simbol	Keterangan
	Tercapai
	Akan Tercapai/ Membaik
	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus

Gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan per Pilar berdasarkan Laporan RAD SDGs tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tujuan 1.
Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tabel 2.133
Capaian per Indikator TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	12,84 (Mar 2021) 12,79 (Sept 2021)	11,94% - 12,77%	11,90 (Mar 2022) 12,95 (Sept 2022)	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansi bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS; Dinas Kesehatan	%	80	90.00	85.2	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Ketenagakerjaan	%	n.a	64.00	-	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Orang	330	275	-	
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	Dinas Sosial	Keluarga	331.351	317,215	-	

	bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.		Penerima Manfaat (KPM)				
1.3.1.(e)	Presentase Masyarakat Miskin Menerima Rastra/BPNT	BPS	%	20,92	65.70	-	▼
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. (40% Terbawah)	BPS	%	66	71.27	82,92	●
1.4.1.(b)	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. (40% Terbawah)	DINAS KESEHATAN	%	62,7	52.80	71.3	●
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (40% Terbawah)	BPS	%	71,38	73.82	70,88	●
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (40% Terbawah)	BPS	%	73,85	60.87	75,85	●
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (40% Terbawah)	BPS	%	66,54	62.14	78,46	●
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (40% Terbawah)	BPS	%	60,45	57.09	57,95	●
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran (40% Terbawah)	BPS	%	87,98	85.22	87,99	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (40% Ke Bawah)	BPS	%	98,64	100.00	98,87	▶
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	PM	5.788	●

1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten / Kota	17	17	17	●
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial/ BPBD	Orang	PM	1000	6215	●
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial/ BPBD	Orang	PM	50	PM	●
1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Pendidikan/ BPBD	Kabupaten / Kota	PM	8	PM	●
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks resiko	139,24	118.11	137.31	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	2	●
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Rupiah	170M	1.882T	70.048.608.059	▶
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Rupiah (Juta Fungsi Pendidikan)	3.457.560	3,314,721	-	▼
			Rupiah (Juta Fungsi Kesehatan)	709.757	996,26	-	
			Rupiah (Fungsi Perlindungan Sosial)	-	116,440	-	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.c Peningkatan Aset Masyarakat Miskin							
1.c.1	Kepemilikan Aset (emas, perahu, motor)	BDT	RT	PM	PM	-	▼
1.c.2	Rumah Tangga Layak Huni penduduk miskin	BDT	RT	PM	PM	-	▼
Target 1.d Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin							
1.d.1	Pengeluaran konsumsi perkapita per tahun	BPS	Rp (Ribu)	12.434 (Mar 2020) 11.894 (Sept 2020)	11,134	13,157	●

1.d.2	Besaran Garis Kemiskinan	BPS	Rp	439.041 (Mar 2020) 441.259 (Sept 2020)	451,368	457.455 (Mar 2021) dan 463.251 (Sept 2021)	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 27 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 17 indikator atau 63 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 11 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (▶), dan 7 indikator atau 26 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼).

Tabel 2.134
Capaian TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	27	17	3	7

Tujuan 2.
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 2 Tanpa Kelaparan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.135
Capaian Per Indikator TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	SSGI 2022	%	15.7	16.4	14.8	●
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS	%	-	4.01	-	Tidak relevan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SSGI 2022	%	24.8	26	18.6	●
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinkes	%	20.8	7.6	2.6	Belum rilis SSGI
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting(berat badan/tinggi badan)anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	SSGI 2022	%	7.6	7.4	6.9	●
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	7.85	18.9	6.25	●
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	BPS; Dinas Kesehatan	%	59,17	68		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan Tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	skor	86,1	97.8		
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang telah disepakati secara internasional.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Varietas/ Bibit	2	2		Tidak relevan

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 2 Tanpa Kelaparan di atas, semua indikator sudah tercapai dan diatas target Provinsi. Dari 9 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 44 persen yang dilaksanakan tercapai (●), sedangkan 5 indikator perlu perhatian khusus (▼) karena tidak ada data capaian dan 1 indikator belum rilis data tahun 2022.

Tabel 2.136
Capaian TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	9	4	0	5

Tujuan 3.
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.137
Capaian Per Indikator TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian Ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Jumlah Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kasus	131	112	131	●
3.1.2*	Proporsi Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS; Dinas Kesehatan	%	93.87	98		
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	94	94,00		
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.2.1*	Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kasus	31	42	552	▼
3.2.2*	Jumlah Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kasus	411	525	430	●
3.2.2.(a)	Jumlah Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Orang	502	416	513	▼

3.2.2.(b)	Persentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	88.9	95	100	●
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0,24	0,20	0,18	●
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	162/ 100.000 penduduk	341/ 100.000 penduduk	209/ 100.000 penduduk	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0,0000034	<0,25	0.004	●
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	11	11	15	●
3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Juta orang (Filariasis)	108	0	0	●
			Orang (Kusta)	223	0	0	
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	17	17	17	●
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	17	17	17	●
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	PSG 2017; RISKESDAS 2018	%	25	9,1	1,5	●
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	17	17	17	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(a)	Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	1282	435	891	●
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	25	146	80	▶
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	828	195	775	●
3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahguna-an NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNNP Sumatera Selatan	Lembaga	11	12	14	●

3.5.1 (e)	Prevalensi penyalah-gunaan narkoba.	BNNP Sumatera Selatan	%	1,95*	1,2	5	▼
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	SUSENAS BPS	Liter per Kapita	-	PM	-	-
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	39,17	-	
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	23,47	62,60	●
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	69,65	-	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Prov Sumsel	Kelahiran per 1000 perempuan 15 - 19 Tahun	-	21	32,60	▼
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah anak per WUS (15 - 49 tahun)	-	2,27	2,38	▼
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	3,32	10,59	4,7	●
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Dinas Kesehatan; BPJS	%	100	100	89,39	▼
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan; BPJS	%	85,2	95,00	89,39	▶
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	30,65	PM	30,49	●
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							

3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	%	84	PM	95	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 33 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 20 indikator atau 60,61 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 9,09 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (▶), dan 10 indikator atau 30,30 persen yang perlu perhatian khusus karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼), sedang terdapat 3 indikator yang tidak tersedia datanya.

Tabel 2.138
Capaian TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022

No	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	20	3	10

Tujuan 4.
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayati

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.139
Capaian Per Indikator TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	62,8	PM	75,10	●
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	42,04	PM	66,01	●
4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	35,89	84,60	73,20	►
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	111,39	PM	112	●
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	BPS	%	89,44	PM	89,41	●
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS	%	82,30	89,12	81,11	▼
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Tahun	8,78	8.88	8,82	►
4.1.1 (h)	Angka Harapan Lama Sekolah	BPS	Tahun	12,54	13.19	12,55	►
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Kemendikbud	%	24,24	PM	25,08	●
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS	%	82,30	89,12	81,11	▼
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	26,32	36,50	26,31	▼
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	% remaja (15-24)	90,45	71,15	92,77	●
			% remaja (15-59)	62,59	39,90	69,12	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Parti- sipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sedera jat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	BPS					●
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/ MI/ sederajat		%	99,66	102,49	99,71	►
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat		%	101,86	101,00	104,24	●
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMA/ SMK/MA/ sederaja		%	110,89	103,5	104,95	●
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi		%	107,98	116	135,61	●
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	98,78	98.94	98,12	▼
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.						►
		BPS	Persen (umur 15-24 tahun)	99,95	100.00	99,95	►
			Persen (umur 15-59 tahun)	99,65	99,67	99,5	▼
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Kemendikbu d					►
	(1) Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.		%	1,6	PM	1,80	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(2) Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.			31,3	PM	29,00	▼
	(3) Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.			30,5	PM	28,70	▼
	(4) Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik.			34,8	99,30	32,90	▼
	(5) Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.			24,2	95,20	75,80	►
	(6) Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik.			27,3	91.70	23,50	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas pada tahun 2022 di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 43,75 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 5 indikator atau 31,25 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 4 indikator atau 25,00 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.140
Capaian TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai /Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	16	7	5	4

Tujuan 5
Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Secara umum capaian indikator TPB untuk tujuan ke-5 Kesenjangan Gender yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.141
Capaian Per Indikator TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPPA	Dokumen	62 (Perda, Pergub, Edaran Terkait PPPA)	55	67	●
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA	%	0,006	Menurun	0.008	▼
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							

5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	SUSENAS BPS;	% (sebelum umur 18 thn)	12,24 (Susenas, BPS)	Menurun	11,42	•
			% (sebelum umur 15 thn)	0,00	Menurun	0,00	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN dan BPS	Thn	-	>20	21,3 (2017 20,6 (2022,BKKBN Sumsel)	•
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	BPS	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 thn	-	21,00	36,50	▼
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	SUSNES ;BPS	%	82,30	88,12	81,11	▼
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS	%	21,33 (DPRD PROV)	Meningkat	21.33	•
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS	%	31,15 (BPS)	30	21.33	•
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BPS	%	Data belum tersedia karena sumber data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan dilaksanakan tahun 2022)	39,17	61,40	N/a
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN dan BPS	%	12,6 (Hasil Estimasi menggunakan <i>baseline</i> data trend <i>unmet need</i> SKAP 2016 - 2019)	7.51	14,0 (2022, BKKBN Sumsel)	▼
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BPS	%	Data belum tersedia karena sumber	98.8	99,70	N/a

				data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan dilaksanakan tahun 2022)			
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	KEMHU KHAM; BKKBN; Kementrian Kesehatan; kpppa; Kemdikbud	Dokumen	0 (Sumber website peraturan.go.id yang dikelola Kemkumham RI)	1,00	1,00	●
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	%	64,53	66,00	66,25	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB tujuan kelima Kesetaraan Gender di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 (tiga belas) indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 53,84 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 6 (enam) indikator atau 46 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tujuh indikator dari tujuan kelima Kesetaraan Gender yang tercapai adalah: Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan Perempuan, Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah, Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan

reproduksi dan indikator Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.

Empat indikator yang perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai, adalah: Prevalensi kekerasan terhadap anak Perempuan, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR), Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dan indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Sedangkan 2 (dua) indikator yang data capaian Tahun 2022 tidak tersedia adalah: Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi dan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Capaian kedua indikator tersebut tersedia terakhir di Tahun 2017 dan diperoleh berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan oleh BPS. Selanjutnya, BPS tidak menyelenggarakan SDKI untuk periode berikutnya sehingga capaian kedua indikator tersebut tidak tersedia.

Tabel 2.142
Capaian TPB Kesetaraan Gender Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	13	7	0	6

Tujuan 6.
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.143
Capaian Per Indikator TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak
Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	86,35	86,91	87,19	●
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	-	PM	-	►
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS	%	75,28	PM	75,24	▼
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	70,82	90,26	78,62	►
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kelurahan	2.854	3.008	285	▼
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/ Kelurahan	2.077	1.741	2.216	●
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kab/ Kota	7	7	16	●
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2,28	PM	1,35	►
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kab/ Kota	9	12	9	►
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	3,91	4,91	0,48	►
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLHP	Danau Prioritas	1	1	1 (Danau Ranau)	●

6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLHP	% Sungai Kelas II	52	30	51,3	●
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BPDAS dan Dinas Kehutanan	RPDAST	1 DAS (DAS Musi)	148	1 DAS (DAS Musi)	►
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	PSDA, BMKG	Stasiun	53 (25 Stasiun Hidrologi, 28 Stasiun Klimatologi)	2	49 (23 Stasiun Hidrologi, 26 Stasiun Klimatologi)	●
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DLHP	Unit (Onlimo)	2	1	2	●
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara/Lintas Provinsi/Lintas Kabupaten.	DLHP		3	27	3	►
6.5.1.(g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	DLHP	Lembaga	3	3	3	●
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	DLHP	DAS	4	6	0	▼
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kuraang dari 1%.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6..1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	DLHP	Danau	3 (Danau Ranau, Danau Suji, Danau Rayo)	3	3	●
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Kehutanan	ha	-	250.000	0	▼
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DLHP	DAS	4	6	0	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 23 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 12 indikator atau 52,17 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 4 indikator atau 17,39 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau memperbaiki (►), dan 7 indikator atau 30,43 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼). Dari 7 indikator yang

memerlukan perhatian khusus terdapat 4 indikator yang tidak ada data capaian.

Tabel 2.144
Capaian TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	23	12	4	7

Tujuan 7
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.145
Capaian Per Indikator TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	DESDM	%	98.71	99,79	99,90	●
7.1.1(a)	Konsumsi listrik per kapita.	DESDM	Kwh	1.401	1.687	1.470,77	►
7.1.1.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	DESDM	%	94,16	93,67	96,44	●
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	DESDM	%	20.82	21,00	23,14	●
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas Energi Primer.	DESDM	SBM (setara barrel minyak)	PM	PM	PM	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 5 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 80,00 persen yang dilaksanakan tercapai (●), dan 1 indikator atau 20,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►)

Tabel 2.146
Capaian TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	5	4	1	0

Tujuan 8.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.147
Capaian Per Indikator TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Base line</i>) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1.*	Laju pertumbuhan PDRper kapita.	BPS	%	2,28	7,26	3,94	►
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rp.	54.487	59.087	68.338	●
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	1,39	5,2	2,53	►
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	48,20	42,8	45,10	●
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	35,84	49.15	36,72	►
8.3.1 .(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	%	83,70	75	84,24	●
Target 8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	15.072	14.104.65	15.978	●
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok :						●
	- laki-laki	BPS	%	4.84	PM	4,53	●
	- Perempuan			5.2	PM	4,80	●
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	10,93	8,36	7,08	●
8.5.2 .(b)	Tingkat Pengangguran Terbuka.	BPS	%	4,98	3,75	4,63	►

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	25,38	14.93	25,32	►
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1 .(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Perusahaan	43,35	40%	1,65%	►
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	%	5,89	5	-	▼
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.297	86.200	1.130	►
8.9.1 .(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	sedang konfirmasi ke BPS pusat	9.993.727	n.a	►
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISBUDPAR	jumlah	57.189	PM	56.388	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 43,75 persen yang dilaksanakan tercapai (●), dan 8 indikator atau 50,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►),dan 1 indikator atau 6,25 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.148

Capaian TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh,serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	16	7	8	1

Tujuan 9.

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada **tabel berikut ini** :

Tabel 2.149

Capaian TPB Per Indikator Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi.	Dinas PUBM	km	86,24	80	88,15	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas PUBM	km	202	101,83	64,5	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	Km	80	58,2	80	●
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	unit	4 (PGA, LLG, MUBA, PLG)	6 (PGA, LLG, MUBA, PLG, Lahat, PALI)	4 (PLG, LLG, MUBA,PL G)	►
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan	unit	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	●

9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	lokasi	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	●
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita.	BPS	%	19,46%	22,57%	18,41%	►
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,18%	5,83%	4,39%	►
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	BPS	%	n.a	9,46	n.a	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	%	17,60	1	49,57	●
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	-	30	96,2	►
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	%	64,53	66	66,25	●
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	56,89	29	62,57	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 53,85 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 4 indikator atau 30,77 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 2 indikator atau 15,38 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.150
Capaian TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	5	1	7

Tujuan 10.
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.151
Capaian Per Indikator TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	indeks	0,340 (Sept 2020)	0,352	0,330	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,84 (Mar 2021) dan 12,79 (Sept 2021)	9,9-10,78	11,95 (Sept 2022)	►
10.1.1 .(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BPS	kabupa ten	data tidak tersedia	1	1	►
10.1.1 .(c)	Jumlah desa tertinggal.	IDM	desa	357	1400	178	●
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	IDM	desa	15	20	29	●
10.1.1 .(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BDT	%	2,39	7	4,47	►
10.1.1 .(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BDT	%	20,11 (Musi Rawas Utara)	13.6	18,45 (Musi Rawas Utara)	►

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia.	BPS	Indeks	85,08	93,91	86,78	►
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS	formal (%)	data tidak tersedia	67.00	n.a	▼
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.							
10.7. 2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penambahan Dokumen	59	16	18	●
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fasilitas TKLN	12	10	8	►

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 11 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 36,36 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 6 indikator atau 54,54 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 1 indikator atau 9,09 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.152
Capaian TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	11	4	6	1

Tujuan 11.
Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.153
Capaian Per Indikator TPB Kota dan Pemukiman yang
Berkelanjutan Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan							
11.1.1 .(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	59,96	PM	63,15	●
11.1.1 .(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	DISPERKIM	KawasanPerkotaan Metropolitan	1 Kawasan	2 Kawasan	1 Kawasan	●
11.1.1'.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	DISPERKIM	Kota Seding & Kota Baru	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1 .(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	34	35	54,59	●
11.2.1 .(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dinas Perhubungan	Kota Besar	2	2	2	●
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1 .(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	DISPERKIM	Kota Seding	1 Kota	1 Kota	1 Kota	●
11.3.1 .(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DISPERKIM	Metropolita n baru	1	1 metropolitan	1 metropol itan	●
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1 .(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISPERKIM	Kota Pusaka	n.a	4 Kota	4 Kota	●
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara secara global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000.	BPBD	Jiwa	21.311	Menurun	26.950	▼
11.5.1 .(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB).	BPBD	Indeks	132,99	104,36	131,24	▶
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Desa Tangguh	12	3	23	●
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Sistem Peringatan Dini	1	1	1	●
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	%	43,26	85	47,39	▶
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kota Hijau	1 Kota	1 Kota	1 Kota	●
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	100	100	100	●

11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan di atas ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 11 indikator atau 68,75 persen yang dilaksanakan Tercapai (●), 4 indikator atau 25 persen yang dilaksanakan Akan Tercapai/Membaik (►) dan 1 indikator atau 6,25 persen yang dilaksanakan mengalami Perubahan Negatif/Memburuk/Perlu Perhatian Khusus (▼).

Tabel 2.154
Capaian TPB Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	16	11	4	1

Tujuan 12.
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.155
Capaian TPB Per Indikator Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tahun 2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1. (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Peserta Proper	138	135	143	●
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhdap pembangunan berklanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Julmlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Fasilitas Publik	n.a	15	n.a	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan di atas, didapatkan bahwa dai 2 indikator hanya 1 indikator yang dilaksanakan dengan status terpenuhi dengan capaian yang melebihi dari target, sementara untuk indikator kedua tidak tersedia data baik dari baseline awal, target pencapaian dan pencapaian di Tahun 2022. Hal ini perlu pendekatan untuk memastikan ketidaktersediaan data apakah berasal dari data yang tidak tercatat atau diakibatkan dari indikator yang tidak dilaksnakan (▼).

Tabel 2.156
Capaian TPB Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	1	0	1

Tujuan 13
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.157
Capaian Per Indikator TPB Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Dokumen	2	1	2	●
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Jiwa	21.311	Menurun	26.950	▼
13.1.3*	Penurunan jumlah hotspot dikawasan hutan	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	Titik Hotspot	899	389	4661	▼
13.1.4*	Penurunan luas kebakaran hutan	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	Ha	1.253.72	5.984,60	1.678,02	●

13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Dokumen	14	18	5	▼
13.2.2	Jumlah Penurunan emisi GRK sektor lahan dan gambut	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Ton CO2 eq/tahun	14,462,700	4.355.678	14.420.903	●
13.2.3	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	indeks	89.1	96,45	90,25	▶

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 7 indikator yang semuanya telah dilaksanakan, artinya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Komitmennya dalam berkontribusi dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Penanganan Perubahan Iklim.

Tabel 2.158
Capaian TPB Per Indikator Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	7	3	1	3

Tujuan 14.
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 14 Ekosistem Lautan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.159
Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Lautan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Integrasi RZWP-3-K Prov. SS ke RTRW	Materi Teknis RZWP-3-K Prov Sumsel	Materi Teknis RZWP-3-K Prov Sumsel	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPP	1 WPP Laut (WPP 711) 1 WPP Perairan Darat (WPP 438)	Optimalisasi 1 WPP, 1 Prop	1 (WPPNRI 711)	●
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha	976,03 Ha	2,200 Ha	976 Ha	►
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	50	80	80	►
Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua Negara							
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	-	5	0.005	▼
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	1	4	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi	0	1	Na	▼
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	0	11.400 org	Na	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 14 Ekosistem Lautan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 8 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 3 indikator atau 37,50 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 2 indikator atau 25,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 3 indikator atau 37,50 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼).

Tabel 2.160
Capaian TPB Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
14	Melestarikan dan Memanfaat kan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	3	2	3

Tujuan 15.
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 15 Ekosistem Daratan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.161
Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutan an	%	9,17*	9,77	9,22	►
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutan an	%	0,07*	2,2	0,067	●
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas Kehutan an	Ha	-	-	-	●
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Kehutan an	Ha	60.470*	1.926	60.470	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	KK	-	2 KK	3 KK	●
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas Kehutan an	Unit	-	-	-	●
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yango direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutan an	%	0,045*	0,04	0,028	▼
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.							
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	%	-	Harim au Sumat era (8); Gajah Sumat era (125)	Harimau Sumatera (21); Gajah Sumatera (237)	●
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.							
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas Kehutan an	Peratur an	-	-	-	
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							

15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Kehutan an	Kasus	3	3	3	●
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	spesies	-	1	0	▼
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dinas ketahan an pangan dan peternak an; Dinas kehutan an	dokume n	Bidang OKKPD: Registra si PSAT /Sertifik asi Prima (25 Sertifika t/tahun)	3	Bidang OKKPD: Registrasi PSAT /Sertifikasi Prima (336 Sertifikat/t ahun)	●
Kode Indikat or	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				Bidang Keswan dan Kesmav et: SKPAH (Surat Keterangan Produk Pangan Asal Hewan) produk berupa telur dan daging; pengelu aran /pemas ukan melalui jalan darat (22 surat keterang an/bula n)		Bidang Keswan dan Kesmavet: SKPAH (Surat Keterangan Produk Pangan Asal Hewan) produk berupa telur dan daging; pengeluaran /pemasuk an melalui jalan darat (480 surat keterangan /bulan)	

				UPTD Rumah Sakit Hewan: Surat SKKH (Surat Keterang an Kesehat an Hewan) dan Rekome ndasi Hewan; pengelu aran/pe masuk an hewan melalui udara (bandara) (22 surat keterangan/ bulan)		UPTD Rumah Sakit Hewan: Surat SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan Rekomend asi Hewan ; pengeluara n/pemasu kkan hewan melalui udara (bandara) (370 surat keterangan /bulan)	
15.c.1.(a))	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingku ngan hidup dan pertahan an	%	0 (tidak sampai P21 karena penerapan terhadap penegakan hukum)	5	0	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 15 Ekosistem Daratan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 9 indikator atau 69,23 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 1 indikator atau 7,69 persen yang dilaksanakan akan tercapai/membaik (►), dan 3 indikator atau 23,08 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.162
Capaian TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	13	9	1	3

Tujuan 16.
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.163
Capaian Per Indikator TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS, Kepolisian	kasus	Meningkat (2019 : 136)	Menurun	-	●
16.1.3 (b)	Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan	BPS	%	Menurun (2019 : 169)	Menurun	-	●
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%	Meningkat (2020 : 70,82)	Menurun	belum diolah dari mikro data	▶
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPPPA	%	Menurun (0,01)	Menurun	0.01	▶
16.3 Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.	Biro Hukum	%	n.a.	14	43	●
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	88,17	100	-	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota).	BPK	%	Provinsi : 100 Kab/Kota : 94,11	Provinsi : 100%, Kab/Kota : n.a.	Provinsi : 100%, Kab/Kota : n.a.	●
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Biro Organisasi	Nilai	BB (79,76)	A (84-85)	BB (78,06)	▼
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro pengadaan barang dan jasa	%	n.a.	100%	70%	▼
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	Ombudsman RI	%	90%	Provinsi : 95% Kab/Kota : 95%	-	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA	%	21,33	21,33	-	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	16,36	20	19,5	▼
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	72,41	73,11	74,15	●

16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	85,08	93,91	86,78	►
16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	78.51	84,92	80,86	►
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Statu s
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	PM	PM	-	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUK CAPIL	%	90,00	92,50	91,33	▼
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dinas Kominfo	Nilai Keterbu kaan Informas i Publik Pemprov Sumsel	87	88	-	
16.10.2 (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.	Dinas Kominfo	%	80	85	-	
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Kominfo	%	8	9	-	
Target 16.a Memperkuat lembaga lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	KEMEN KUMHA M	Lembag a	PM	PM	-	

Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.	Biro Hukum	Kebijakan Dokumen	0	0	-	

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 23 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 30 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 13 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 13 indikator atau 57 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus (▼) karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai serta 10 indikator atau sebesar 41,67 yang belum tersedia datanya untuk tahun 2022.

Tabel 2.164
Capaian TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk / Perlu Perhatian Khusus
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, penyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	23	7	3	13

Tujuan 17.
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.165							
Capaian Per Indikator TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	7,88	1.94	0,91	▼
17.7.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BPKAD	%	0,72	0.72	0,68	▼
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	%	52.77	35.23	38,38	●
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
17.3.1.(a)	Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.	DPMPSTP	%	-9,62%	2.52	18,12%	●
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota/Kabupaten/Kota (IKK)	KOMINFO	%	-	100	93	▼
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan.	KOMINFO	%	-	25	93	●
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	56,89	29	62,57	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	KOMINFO	%	-	75	93%	●
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.	BPS	%	51,58	5.8	30,37	●
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	99,31	PM	PM	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	BPS	%	95,83	PM	PM	

	informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	pengunjung	74.756	PM	PM	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	100	PM	PM	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	100	PM	PM	

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 14 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 6 indikator atau 66,66% yang dilaksanakan tercapai (●), dan 8 indikator atau 57% perlu perhatian khusus (▼) karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya, target tahun berjalan tidak tercapai dan 5 indikator tidak ada data capaian.

Tabel 2.166
Capaian TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	14	6	0	8

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi baik kinerja maupun keuangan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan

pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pelaksanaan program RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Urusan secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Secara umum, indikator program telah mencapai target, bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD Provinsi Sumatera Selatan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target, baik yang telah mendekati 100% maupun yang masih relatif jauh dari target.

Secara detail capaian indikator program RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut:

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah, tingginya alih fungsi/konversi lahan, produktivitas sektor pertanian masih rendah, ketahanan pangan pangan yang rentan, adanya kesenjangan infrastruktur antar wilayah, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih lambatnya transformasi ekonomi, dan reformasi birokrasi yang rendah.

2.3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi

A. Kondisi Geografi Sumatera Selatan Rentan terhadap Risiko Bencana Alam

Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial dengan total luas 4.976.818 hektar atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tanah *aluvial* umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Selanjutnya ada jenis tanah *histosol* 1.802.458 hektar atau 21% yang lebih populer dikenal sebagai tanah gambut. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Terdapat 11 jenis potensi bahaya bencana di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi: Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Gelombang ekstrem dan Abrasi, Kegagalan teknologi, dan Epidemi dan Wabah Penyakit. Adapun kerentanan dan risiko bencana alam karena kondisi geografis termasuk kelas Tinggi adalah bahaya banjir, secara total potensi luas keseluruhan adalah 6.476.932,00 Ha; potensi luas bahaya tanah longsor adalah seluas 906.740,00 Ha; potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 8.851.703,00 Ha; dan bahaya cuaca ekstrem luas secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 Ha.

Selain itu, permasalahan geografi lain terkait adalah perubahan iklim, seperti musim kemarau yang terjadi setiap tahun meningkatnya ancaman bencana kebakaran terutama di lahan Gambut, bahkan kebakaran lahan Gambut yang besar ini terjadi setiap 4 tahunan. Adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran gambut dapat berdampak pada meningkatnya emisi GRK yang dihasilkan, sehingga berdampak pada semakin buruknya perubahan iklim. Hal ini mengingat Sumatera Selatan

merupakan rumah bagi ekosistem gambut terluas di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektare dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi.

B. Mitigasi Risiko Kebencanaan Belum Optimal

Data indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 131,3, angka ini relatif menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 149,9 dengan kategori sedang. Dengan penurunan indeks risiko bencana tersebut, pencapaian tersebut masih perlu dioptimalkan dari aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim yang berdampak pada kerentanan penghidupan masyarakat, terutama masyarakat rentan.

Daerah dengan indeks risiko bencana tertinggi di tahun 2024 adalah Lahat, Empat Lawang, Muara Enim dan Palembang. Meskipun data indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan tersebut relatif turun selama 7 tahun terakhir, namun potensi risiko bencana alam di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, terutama adalah bencana Banjir yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan letak geografis yang berada di daerah aliran Sungai; (2) Faktor manusia, seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri, serta pembuangan sampah sembarangan.

2.3.1.2 Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 87,23%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,19 persen pada 2023, angka tersebut relatif masih lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 92,64 persen pada 2024. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terendah adalah Kabupaten Empat Lawang (65,94%). Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memenuhi standar Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 91,32% pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbatasan ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum yaitu: (a) kurangnya kuantitas Air, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat; keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum seiring dengan peningkatan kebutuhan air di berbagai sektor dan rumah tangga; degradasi lahan, seperti erosi dan sedimentasi, dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan air di sungai dan danau; Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. (b) rendahnya kualitas Air, disebabkan adanya pencemaran air oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian; kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan, dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan pencemaran air permukaan, sehingga ada keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum.

2.3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan. Kecepatan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pemanfaatan ruang untuk perumahan dan perkantoran. Perkembangan wilayah terutama perkotaan memerlukan lahan yang luas untuk penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan industri, akibatnya lahan semakin menyempit. Selain itu, berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit baik skala kecil maupun besar. Pemanfaatan lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup dan kerentanan penghidupan masyarakat. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan gambut sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada seringnya bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup masyarakat sehingga merugikan pembangunan, banjir, dan kemacetan. Permasalahan alih fungsi lahan sering menimbulkan konflik aturan seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan tumpang tindih perizinan.

2.3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal

A. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya didominasi Sektor Primer

Sumatera Selatan merupakan daerah terkaya ke-5 di era otonomi daerah dengan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan. Pemanfaatan potensi sumberdaya yang potensial masih didominasi oleh sektor primer yaitu sebesar 40%. Sektor primer sebagai komoditas ekspor belum optimal, ini terlihat dari pertumbuhan sektor primer stagnan pada interval 2%-3%. Dilihat dari Indeks ketergantungan sumber daya alam (NRDI) Sumatera Selatan sebesar 9,52, menempati posisi ke-8, angka ini relatif cukup tinggi. Semakin tinggi nilai NRDI berarti semakin tinggi juga tingkat ketergantungan terhadap SDA. Umumnya wilayah yang memiliki NRDI tinggi tidak cukup mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang sebanding dengan kekayaan SDA tambang yang selama ini sudah ada dieksploitasi. Selain itu, *Indeks Natural Resource Curse* (NRC) Sumatera Selatan sebesar 9,50 (peringkat 8 tertinggi). Semakin tinggi nilai indeks NRC di suatu wilayah, artinya memiliki ketergantungan tinggi pula terhadap SDA tambang, terutama wilayah penghasil utama minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara.

B. Pengembangan Potensi Daerah Belum Optimal

Pengembangan potensi daerah belum optimal yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah masih cenderung bersifat *business as usual*, kondisi ini terlihat masih terfokusnya kegiatan di sektor primer sehingga transformasi sektoral relatif lambat, dan hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah masih terbatas. Potensi perkebunan di Sumatera Selatan cukup beragam mulai dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan khususnya produksi komoditi karet terbesar untuk produksi karet alam di Indonesia. Sumatera Selatan menyumbang 34% produksi karet alam nasional pada 2016. Perkembangan produksi karet pada tahun 2024 produksi karet mencapai 1.008.362 ton, Secara rill pertumbuhan produksi karet selama 2020-2024 turun yaitu sebesar -1,99%. Permasalahan menurunnya produksi karet karena adanya serangan penyakit akar putih, penyakit gugur daun yang disebabkan jamur yang menyerang daun berakibat kurangnya jumlah produksi dan kualitas latex atau getah. Selain itu, harga komoditas karet yang tidak stabil bahkan

cenderung turun disebabkan kualitas karet yang rendah atau kurang baik, adanya praktek alih fungsi dan konversi lahan menjadi penyebab luas lahan berkurang. Demikian juga produksi tanaman lainnya selama 2020-2024 mengalami penurunan. Secara Riil tumbuh negatif sebesar -12,37%. Penyebabnya adalah cuaca ekstrem, serangan hama, penyakit tanaman, dan usia tanaman semakin tua. Selain itu, praktik budidaya yang kurang tepat juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, konflik lahan, serta harga jual yang rendah juga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan produksi.

Tanaman perkebunan yang tumbuh positif adalah tanaman kelapa sawit yang secara riil tumbuh sebesar 85,53 persen selama periode 2020-2024, demikian juga tanaman kakao yang tumbuh sebesar 3,86 persen dalam periode yang sama. Tanaman kopi dan kelapa yang secara riil masing-masing tumbuh sebesar 3,73 dan 1,47 persen pada periode 2020-2024. Sementara untuk tanaman perkebunan Lada di Sumatera Selatan masih cukup jarang dikembangkan hanya beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang cocok untuk budidaya lada.

Permasalahan pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan yaitu: (a) belum optimalnya pertumbuhan produksi tanaman perkebunan yang disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan peruntukkan lainnya; (b) nilai tambah tanaman perkebunan relatif masih kecil dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh pengelolaan inefisien, oleh karena itu, hasil produksi tanaman perkebunan diarahkan pada kegiatan hilirisasi (*on farm*), artinya industrialisasi produk pertanian terutama tanaman perkebunan akan mendorong produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh, dan (c) belum optimalnya penerapan ekonomi hijau, termasuk penyesuaian tata guna lahan yang adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan, peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan, peningkatan produktivitas dan diversifikasi, perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil, peningkatan konektivitas dan skala ekonomi, restorasi lahan dan hutan terdegradasi, dan pemanfaatan insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

2.3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan

B. Distribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Menurun Setiap Tahun

Share sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan, sementara disisi lain, sektor jasa menunjukkan tren yang

meningkat. Data tahun 2024 menunjukkan pangsa sektor jasa sudah melampaui sektor pertanian yaitu 43,56% sedangkan sektor pertanian sebesar 13,56%. Isu pangan global semakin menguat seiring perubahan iklim yang ekstrem sehingga berdampak produksi sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam menopang ketahanan pangan cenderung mengalami penurunan kontribusinya terhadap PDRB. Dalam dua dekade kontribusi sektor pertanian menurun sebesar 6 persen. Sektor perkebunan sebagai *leading* sektor pertanian menghadapi kendala volatilitas harga komoditas. Harga komoditas unggulan seperti Kelapa Sawit, Karet dan Kopi sangat ditentukan oleh permintaan dari luar negeri. Dilihat dari tingkat produktivitas, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki produktivitas terendah di antara sektor lainnya dan cenderung menurun. Output yang dihasilkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat.

C. Produktivitas Padi di Sumatera Selatan Meningkat Pesat

Produktivitas tanaman padi menunjukkan tren peningkatan baik di tingkat Sumatera Selatan maupun nasional selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, produktivitas padi di Sumsel berada di angka 48,27 kuintal/hektar, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 51,14 kuintal/hektar. Namun, produktivitas di Sumsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Sumsel mencatatkan angka 51,44 kuintal/hektar dan untuk pertama kalinya melampaui angka nasional yang saat itu berada di 52,26 kuintal/hektar. Peningkatan yang paling mencolok terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana Sumsel melonjak dari 51,44 menjadi 54,06 kuintal/hektar. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 56,19 kuintal/hektar, sebelum sedikit menurun menjadi 55,83 kuintal/hektar di tahun 2024. Sementara itu, angka produktivitas nasional juga mengalami kenaikan, namun dengan laju yang lebih lambat. Dari 51,14 kuintal/hektar pada 2019, angka tersebut naik menjadi 52,90 kuintal/hektar pada tahun 2024. Dari uraian ini menunjukkan bahwa Sumsel tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas padi secara konsisten, tetapi juga berhasil melampaui angka produktivitas nasional sejak tahun 2022. Hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai upaya peningkatan pertanian yang dilakukan di wilayah tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2024 seperti komoditi Jagung juga mengalami peningkatan dari 62,36 kuintal/hektar pada tahun 2023 menjadi 65,89 kuintal/hektar pada tahun 2024, meningkat 5,67%; Kedelai meningkat 2,30%; Kacang Tanah mengalami penurunan 9,72%; Kacang Hijau turun 15,88%; Ubi Kayu turun 1,52%; dan Ubi Jalar turun 1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023. Sebaran komoditas pangan seperti padi, dan jagung masih terkonsentrasi di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, adanya perubahan iklim memberikan ancaman pada potensi gagal panen dengan adanya perubahan curah hujan dan potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu perlu dilakukan diversifikasi sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.

D. Produktivitas Perikanan Budidaya Belum Optimal

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih belum dikembangkan secara optimal. Tercatat dari Tabel 2.25 yang disajikan menunjukkan bahwa pertumbuhan riil produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yaitu sebesar -4,90 persen selama periode 2020-2024. Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan cukup besar, seperti Kabupaten Musi Rawas yang turun sebesar -38,77 persen, diikuti oleh Kota Prabumulih (-23,20%), Lubuklinggau (-20,24%), Musi Banyuasin (-15,76 %), Lahat (-38,77%).

Sementara wilayah yang produksi perikanan budidayanya tumbuh signifikan yaitu OKU Selatan yang tumbuh sebesar 18,79 persen, diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang (9,28%), PALI (9,10%), Ogan Ilir (9,06%), Pagar Alam (5,87%), OKU Timur (3,86%) dan Kabupaten Banyuasin (2,46%). Peningkatan dan penurunan produksi perikanan budidaya dipengaruhi faktor yang beragam, seperti kondisi geografis, teknologi dan informasi pendukung, kualitas air, bibit, lahan, cuaca, dan peralihan tambak menjadi lahan pertanian atau pemukiman serta pengetahuan Pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik.

E. Ancaman Ketahanan Pangan

Tingkat aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan pemanfaatan tahun 2022 masih cukup rendah yaitu sebesar 74,11 dan 61,29, kedua indeks ini menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Secara regional IKP Sumatera Selatan tahun 2024 masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi.

Menurunnya produktivitas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan disebabkan oleh: (1) Produktivitas lahan yang mengalami *leveling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus sehingga untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama diperlukan input yang lebih. Ini terlihat dari nilai NTP yang cenderung tetap; (2) Ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas mendorong peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem; (3) Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan, dan pertambangan; (4) Ketersediaan air yang tidak merata di masing-masing wilayah; (5) Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan) akibat belum maksimalnya teknologi pascapanen; (6) Perubahan iklim (kekeringan, banjir, dan perubahan pola tanam); (7) Serangan hama, penyakit tanaman, dan gulma; (8) Investasi dalam pengembangan penelitian di sektor pertanian masih rendah; (9) Gejolak pangan global menyebabkan terganggunya mata rantai pangan dan pupuk berdampak pada terbatasnya akses pangan sehingga mendorong tingginya Inflasi pangan; (10) Harga pakan ikan yang tinggi dan tidak berkualitas, harga ikan yang relatif rendah dan penggunaan teknologi perikanan budidaya yang tidak tepat, serta penyakit ikan menyebabkan produksi perikanan budidaya turun; dan 11) masih tingginya tingkat kemiskinan, dan masih tingginya balita *stunting*.

2.3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi

Disparitas infrastruktur antar wilayah berdampak pada kesenjangan ekonomi. Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidak efisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Perkembangan yang baik pada infrastruktur di Sumatera Selatan terutama jalan, seperti jalan tol lintas Sumatera, dan infrastruktur lainnya seperti Bandara, Pelabuhan dan *light*

rail transit (LRT) namun secara spasial masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

A. Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang Mantap

Panjang jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori jalan negara, provinsi dan kabupaten pada setiap kabupaten/kota, pada umumnya tidak mengalami pertambahan sejak tahun 2019. Jalan pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat dua jenis permukaan jalan yang belum permanen dengan kategori tidak diaspal dan lainnya dengan angka yang relatif besar dari total panjang jalan yang ada; permukaan jalan tidak diaspal sepanjang 14,46 km dengan lokasi pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, dan permukaan jalan dengan kategori lainnya sepanjang 58,06 km dengan Sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim dan 0,06 km di Kabupaten Banyuasin. Jumlah panjang jalan dan jenis permukaan jalan menunjukkan terhadap upaya peningkatan aksesibilitas yang lebih besar pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan di Provinsi Sumatera Selatan masih terdiri dari komposisi jalan dengan kondisi belum maksimal. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel (2023), pada tahun 2022, jalan di Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik 76,12%, dalam kondisi sedang 10,54%, kondisi rusak 2,68% dan 10,66% dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini juga memberikan tantangan terkait dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut 277,24 ribu mobil penumpang, 1,68 ribu bus, 42,42 ribu truk, dan 898,92 ribu sepeda motor. Kondisi jalan dan jumlah kendaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat keamanan dalam berlalu lintas dan kemudahan aksesibilitas.

B. Konektivitas dan Aksesibilitas yang belum Merata

Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau moda transportasi dan memiliki indeks aksesibilitas yang masih rendah. Konektivitas di beberapa kawasan terutama kawasan Timur Sumatera Selatan/pesisir belum sepenuhnya memiliki jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer II. Ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses ke wilayah-wilayah yang terisolir. Sementara itu, wilayah Koridor Timur masih perlu peningkatan jaringan Pelayanan Angkutan Umum.

Permasalahan konektivitas lainnya belum tersedianya terminal multimoda untuk angkutan barang dan penumpang kawasan metropolitan Patungraya Agung.

Selain itu, pelayanan dari jaringan Kereta Api masih terbatas pada wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Penambahan jalur Kereta Api yang diintegrasikan dengan ruas Lubuklinggau-Bengkulu, dan Muara Enim-Tanjung Api-Api sebagai *outlet* memasarkan produk hasil pertanian, pertambangan, batubara, minyak bumi perlu segera direalisasikan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Angkutan Kereta Api diharapkan mampu menarik gerbong kemakmuran bagi masyarakat Sumatera Selatan, namun menghadapi beberapa kendala seperti daya dukung rel yang masih terbatas dimana jaringan rel rawan anjlok, dan belum terealisasinya pembangunan konektivitas rencana Kereta Api trans Sumatera (Palembang-Jambi dan Palembang-Lampung).

Sumatera Selatan juga memiliki LRT yang mampu mengatasi kemacetan di Kota Palembang, akan tetapi masih menghadapi kendala yaitu: (1) Jaringan pelayanan (*trunk/feeder*) dan fasilitas fisik (stasiun/halte) belum sepenuhnya terintegrasi. (2) Tarif angkutan umum belum terintegrasi sehingga perjalanan (asal-tujuan) dengan angkutan umum dirasakan mahal. (3) Fasilitas pelayanan angkutan umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang (barang bawaan, sepeda, dan lain-lain) belum terakomodasi dengan baik.

C. Fasilitas Transportasi Air Belum Kondusif

Transportasi sungai dan laut belum optimal dalam pengelolaan jalur sungai untuk angkutan barang, penumpang dan wisata. Hal ini karena belum tersedianya pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai outlet dan inlet angkutan barang dan hasil hilirisasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan moda transportasi laut.

D. Fasilitas Angkutan Udara Masih Relatif belum Merata

Saat ini Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) bandara yaitu: Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau, Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kabupaten Pagar Alam, dan Bandar Udara Pangeran Abdul Hamid di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, belum tersedianya fasilitas angkutan udara untuk pergerakan penumpang di Kawasan Selatan pada Provinsi Sumatera Selatan.

Pergerakan penumpang hanya dilakukan melalui akses darat sehingga mobilitas penumpang dari wilayah Selatan relatif terbatas. Sebagian besar mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan di luar Wilayah Sumatera Selatan seperti Provinsi Lampung. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kebocoran wilayah. Transaksi komoditas unggulan Wilayah Selatan seperti Kopi dilakukan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan.

E. Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih dengan kualitas dan jangkauan yang belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal Telepon. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel (2023), pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat desa yang tidak terjangkau dengan jaringan sinyal internet seluler. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir.

F. Kondisi Lingkungan belum Mendukung Derajat Kesehatan

Sanitasi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, demikian pula tersedianya sarana pengelolaan limbah dan pembuangan sampah. Sumatera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, prasarana pembuangan tinja pada lingkungan belum seluruhnya pada fasilitas tempat akhir pembuangan tinja yang sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, sebagian besar pemakaian tempat akhir pembuangan tinja menggunakan tangki septik tank/IPAL *Sewage System* sebanyak 82,68%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 84,39%. Selain itu, yang masih menggunakan kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut sebanyak 4,35%, bahkan masih dijumpai pembuangan tinja di lubang tanah sebesar 11,66%, serta di pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebanyak 1,04 %. Permasalahan dalam sanitasi, limbah dan persampahan di Sumatera Selatan yaitu: Lemahnya penegakan Perda Kebersihan, beberapa SPAL-T skala kawasan telah terbangun namun kondisinya kurang baik, beberapa kabupaten/kota

belum memiliki SPALD-S skala kawasan atau IPLT, dan yang sudah memiliki tetapi kondisinya kurang baik, masih terdapat daerah yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Rawas.

2.3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

A. Tenaga Kerja Terampil di Sumatera Selatan Masih Rendah

Sektor tenaga kerja di Sumatera Selatan di bidang ketrampilan tinggi masih rendah, Ini disebabkan oleh kualitas SDM masih rendah dilihat dari angkatan kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Degradasi pendidikan dalam dunia kerja terus terjadi, beberapa jenis pekerjaan mengharuskan lulusan perguruan tinggi sehingga pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan oleh pekerja lulusan sekolah menengah beralih ke jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap perubahan yang cepat akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

B. Capaian IPM Sumatera Selatan masih Relatif Rendah

Tahun 2024 sebesar 73,84 masih berada di bawah capaian IPM nasional sebesar 75,02. Komponen yang menyebabkan IPM masih relatif rendah yaitu angka harapan hidup sebesar 74,26, dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,57. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum optimal. Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas kesehatan di desa-desa. Jarak antar desa dan permukiman yang masih jarang penduduk menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang terlayani dengan baik.

C. Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Masih Terbatas

Penyerapan tenaga kerja dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Pada tahun 2024 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 31,26 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 8,4 persen. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, SDM yang kompeten dalam jumlah minim juga disebabkan oleh terbatasnya keberadaan sarana prasarana maupun tenaga pelatih BLK yang tersertifikasi.

D.Persentase Standar Kompetensi Minimum Satuan Pendidikan Belum Tercapai

Rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk rerata kompetensi Literasi dan Numerasi. Masing-masing rerata tersebut adalah 58,41% dan 50,37% (pada satuan Pendidikan SMA); 56,59 dan 49,16 (pada satuan Pendidikan SMK); 51,87% dan 48,48% (pada satuan Pendidikan SMALB); 56,30% dan 52,17% (pada satuan Pendidikan SMPLB); 56,88% dan 44,78% (pada satuan Pendidikan SDLB). Penilaian AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dan Numerasi dapat membantu siswa mempelajari bidang ilmu lainnya dengan membentuk cara berpikir dan melatih siswa mencerna informasi baik dalam bentuk tertulis atau angka-angka. Sistem Pendidikan sebagai sumber masalahnya sehingga sudah menjadi hal yang umum istilah seperti: kesenjangan keterampilan di kalangan dunia usaha dan industri.

E.Keterkaitan antara Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja Masih Rendah

Keterkaitan (*link and match*) yang lemah antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disumbang oleh lulusan SMK yaitu sebesar 16,64 persen. Belum adaptifnya kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja dan rendahnya potensi kemandirian wirausaha menjadi beberapa faktor penyebab hal ini.

F.Pekerja Berpendidikan Tinggi yang Bekerja di bidang Keahlian Masih Rendah

Rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi dan bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Hanya terdapat 12,86 persen pekerja berpendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Kondisi tersebut menjadi permasalahan serius, karena lulusan pendidikan menengah dan tinggi pada beberapa bidang memiliki supply semakin banyak. Pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang pendidikan yang diikuti tersebut terpaksa menjadi pilihan bagi para lulusan yang kesulitan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dipelajarinya.

G. Kualitas Keluarga Masih Rendah

Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu sebesar 76,73 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 77,64. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya kepemilikan Buku Nikah mengalami penurunan sebesar -1,25. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,39. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,18. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial mengalami penurunan -0,28.

H. Tingginya Ketimpangan Gender

Nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018 -2024 memiliki posisi IKG Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori “Tinggi” menjadi kategori “Menengah Atas”. namun bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan berada pada posisi nomor dua tertinggi ketimpangan gendernya setelah Provinsi Jambi.

Penyebab tingginya ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah Sebagian besar akibat kontribusi dari Dimensi Pemberdayaan dengan indikator Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA yang masih rendah dan memiliki GAP yang cukup besar dari laki-laki serta Persentase Anggota Legislatif Perempuan yang persentasenya masih sangat kecil dan GAP nya sangat besar jika dibandingkan dengan laki-laki, Penyebab lainnya adalah dari Dimensi Pasar Tenaga Kerja dengan indikator TPAK perempuan yang capaiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki.

Selain itu yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah akibat kontribusi komponen Indeks Pembangunan Gender bidang Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan Harapan Lama Sekolah Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami ketimpangan gender, dimana AHH perempuan lebih tinggi dari AHH Laki-

laki. Begitu juga dengan Pengeluaran Perkapita perempuan lebih rendah dan GAP nya sangat besar dibandingkan dengan laki-laki.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, terdapat 5 kabupaten/ kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 0,479 pada tahun 2024. Sementara 12 kabupaten/kota lainnya masih kesulitan untuk mencapai angka provinsinya. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota.

2.3.1.8 Transformasi Ekonomi belum Optimal

Sumatera Selatan masih **mengandalkan sektor primer dalam pembangunan terutama sektor pertambangan batubara** dengan kontribusi yang cenderung meningkat. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur cenderung stagnan dalam dua dekade yaitu berkisar 17%. Kontribusi terbesar dalam industri pengolahan adalah industri pulp dan kertas sedangkan kontribusi UMKM masih relatif terbatas. Terhambatnya sektor manufaktur terutama industri pengolahan pada UMKM mengindikasikan terjadinya proses “deindustrialisasi” di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) terbatasnya kemampuan mengadopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, (2) keterbatasan dukungan ekosistem industri dari luar Jawa, (3) terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat peningkatan biaya, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, logistik dan tingkat bunga, dan (4) adanya penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan pergeseran permintaan terhadap barang impor yang lebih murah.

Mega tren dunia menunjukkan telah terjadinya transformasi ekonomi dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan ketergantungan pada sumber energi dengan emisi karbon tinggi, bergeser menjadi pendekatan berkelanjutan, yaitu menuju sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Melalui Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, diharapkan ekonomi Sumatera Selatan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mencapai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, mewujudkan ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan dan menurunkan emisi GRK. Transformasi ekonomi yang mengarah ke ekonomi hijau memerlukan hilirisasi SDA unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan inovasi-

inovasi di sektor prioritas terutama sektor berbasis lahan untuk mendukung upaya mencapai *net zero emission*.

2.3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi

a) Tingkat Demokrasi Daerah

Terdapat potensi permasalahan stabilitas demokrasi daerah. Walaupun nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,17, berada pada kategori tinggi, namun relatif masih belum maksimal. IDI Sumatera Selatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai 79,51. Tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, antara lain: (1) Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial dan politik. Hal ini karena masyarakat yang miskin dan tertinggal secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap provokasi dan propaganda dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas daerah. (2) Rendahnya ruang demokrasi terbuka dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat memicu terjadinya protes dan demonstrasi yang dapat berujung pada konflik sosial.

b) Tingkat Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana di Sumatera Selatan sama dengan nasional yang sebesar 137,00 pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 214,00. Angka ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Sumatera Selatan, terdapat 10,473 kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun potensi permasalahan stabilitas daerah dari aspek tingkat kriminalitas antara lain: (1) Potensi rawan terhadap tindak pidana terorisme karena memiliki perbatasan dengan negara Malaysia, yang merupakan salah satu negara asal jaringan terorisme internasional. (2) Potensi rawan terhadap tindak pidana narkoba, karena Sumatera Selatan merupakan daerah transit dan tujuan peredaran narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia. (3) Potensi rawan terhadap tindak pidana premanisme di dorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat memicu terjadinya kriminalitas akibat persaingan antar kelompok masyarakat.

2.3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi dengan predikat Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2020 - 2024. Tetapi pelaksanaan Inovasi Daerah belum optimal karena : (1) Kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten seperti kurangnya jumlah peneliti, perekayasa, analis kebijakan. (2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi. (3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi . (4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendorong inovasi dan apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi. (5) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain. (6) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal. (7) Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif terhadap inovasi.

2.3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Kebijakan reformasi birokrasi akan mendukung capaian pembangunan daerah melalui perbaikan indikator pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan dapat diprediksi (*predictability*). Reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Selatan belum optimal terlihat dari Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B sedangkan kabupaten/kota lainnya masih terkategori C atau CC. Sementara itu, indeks pelayanan publik masih belum merata di pemerintah kabupaten/kota. Permasalahan dalam meningkatkan tata kelola yang baik yaitu: (1) kebijakan tata kelola pada tingkat pemerintah pusat masih terkesan belum terintegrasi (*fragmented*), tumpang tindih dan cenderung cepat berubah seperti aturan SKP. Fungsional dan aturan rentang kendali antara pejabat struktural dan pejabat fungsional sehingga berdampak pada kebijakan yang inkonsisten di pemerintah daerah. (2) Kualitas sumberdaya ASN yang belum merata, dan fungsional di setiap daerah.

2.3.3. Isu Strategis

Penetapan isu strategis didasarkan pada isu strategis global, nasional, regional, isu strategis KLHS RPJMD yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka Isu strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2027.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 diselaraskan dengan:

- 1). Arahana Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
- 2). Arahana RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
- 3). Arahana Tata Ruang, yaitu Arahana Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.
- 4). Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- 5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
 - a. Berkualitas,
 - b. Berkesinambungan,
 - c. Berkelanjutan,
 - d. Berkeadilan,
 - e. Inklusif,

- f. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
- g. Pengelolaan inflasi,
- h. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
- i. Perluasan lapangan kerja, dan
- j. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2025 serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2025

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5 (lima) persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum di tahun 2024, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN)). Konsumsi rumah tangga, khususnya dari kelompok menengah ke atas, tetap baik, dan ekspor nonmigas mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,65 persen, menjadi US\$4.960,3 atau setara dengan Rp78,617 juta di tahun 2024. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita

Indonesia tahun 2024 diperkirakan sebesar US\$4.810 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2023.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat.

Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2024 tumbuh mencapai 7,42 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,20 persen secara keseluruhan tahun 2024, menurun 0,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2024 sebesar 3,37 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 19,15 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2024 sebesar 14,18 persen, mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,96 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2024 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas seperti karet dan barang dari karet dan bubur kayu/ pulp. Karet dan Barang dari karet serta Bahan bakar mineral menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor

komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 46,90 % yang disebabkan oleh adanya peningkatan impor komoditi antara lain Mesin untuk keperluan khusus (142,47%), Mesin untuk keperluan umum (96,96%), dan Generator uap, bukan ketel pemanas (22,70%) yang tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2024. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor Jasa Kesehatan sebesar 13,62 persen, akan tetapi hanya mendistribusikan 0,67 persen dari keseluruhan sektor lapangan usaha.

Transportasi, Real Estate, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 3,27 persen, 8,91 persen, 9,43 persen, 8,83 persen dan 9,05 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman masih terus sejalan dengan sektor Jasa Pendidikan, Administrasi pemerintahan, Transportasi, dan real estate mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (padat karya) perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi. Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Perdagangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga

makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus

menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektorsektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektorsektor untuk makin mendorong permintaan domestic ke depan. Ke depan, perkembangan sektorsektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, makan minum, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 3,91 persen di tahun 2024. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2024 pun menunjukkan gejala *maturity* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 24,69 persen atau turun 6.02 persen dibandingkan tahun 2023 (18,67 persen).

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,04 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 7,88 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Kinirja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang solid, tumbuh positif walaupun ada perlambatan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% sama dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kondisi ini menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 berdasarkan trend diperkirakan tumbuh sebesar 4,80 – 5,60 persen walaupun ditargetkan secara optimis oleh Bappenas sebesar 7,1 persen.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah terutama adanya koordinasi yang saling bersinergis dari TPID Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy)

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai

sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

2) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut

usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

3) Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan

dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2026

Prospek perekonomian Indonesia akan terus membaik. Penguatan sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional yang mendukung implementasi berbagai program strategis yang telah dirancang oleh Pemerintah diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 4,7–5,5% pada 2025 menjadi 4,8–5,6% pada 2026 dan terus meningkat hingga 6,7–7,5% pada 2030. Stabilitas harga juga diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$, disertai dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah sekitar 1,1–1,9% dari PDB pada tahun 2030. Sejalan dengan itu, kredit/pembiayaan dari perbankan akan tumbuh optimal dengan rata-rata 11–13% sampai 2030 dan defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3% dari PDB pada 2030.

Tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini akan tetap fokus pada mitigasi dampak rambatan global terhadap kenaikan inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*), dengan sasaran utama yakni inflasi yang terjaga dalam rentang target dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan di sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau, guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus

didorong sesuai BSPI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendukung makin berkembangnya Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Selain itu, kerja sama sistem pembayaran antarnegara akan diperluas dan pengembangan Rupiah Digital terus dilanjutkan. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan terus diperkuat dengan kebijakan pendukung yakni pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi, yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.1.3. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2027

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen di tahun 2029 yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025,

diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

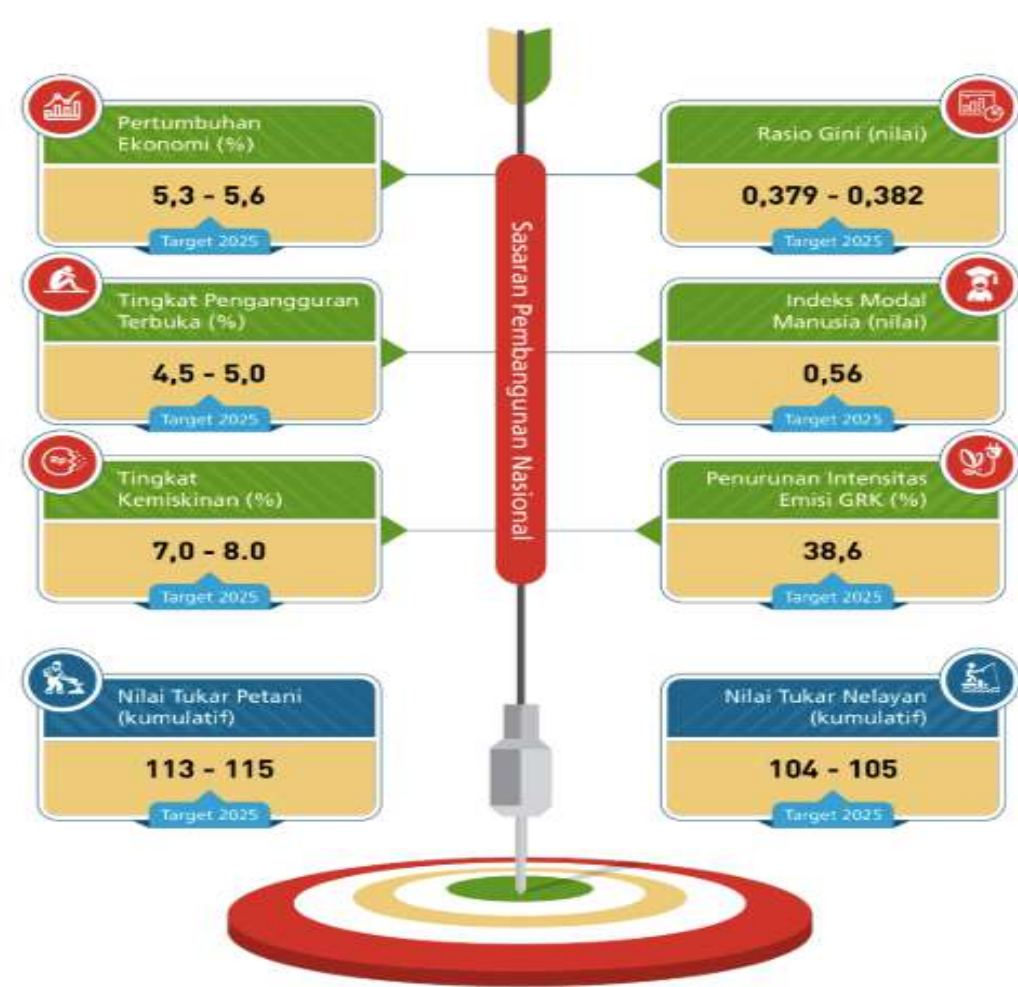
Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Fokus Kebijakan Makro Tahun 2027

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menysasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku

penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

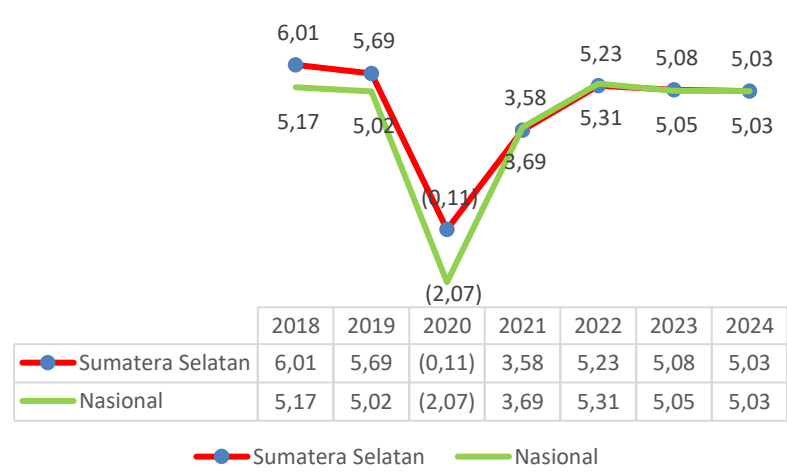
3.1.2.Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbur sebesar 5,08 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2023 setelah kondisi pandemic COVID-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2024 ini berada sama denganc capaian nasional yang juga sebesar 5,03 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024



Sumber: BPS Tahun 2025

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 9,39 persen walaupun secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,14 persen. Kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral adalah kategori jasa Kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi -0,02 persen pada tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 ini bertumbuh positif menjadi sebesar 7.34 persen.

Pada kategori yang mendominasi perekonomian sebesar 24,6 persen yakni kategori pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33 persen yang turun dari tahun 2024 sebesar 7,89 persen. Pada kategori sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua yaitu 13,85 persen, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relative stabil diangka 7.42 persen, naik 0,14 persen dari tahun 2024 yang sebesar 7,28 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Lapangan Usaha	Pertumbuhan							Distribusi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2.33	3.34	1.75	2.91	3.82	2.16	2.59	14.84	14.48	15.17	14.71	13.08	13.1	13.56
B. Pertambangan dan Penggalian	9.09	8.11	-4.08	5.47	6.28	7.89	3.33	20.17	20.33	18.32	21.03	27.71	26.6	24.6
C. Industri Pengolahan	5.4	4.82	0.72	2.18	4.52	3.91	4.39	19.51	19.37	19.73	19.09	17.51	17.91	18.27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.85	10.29	14.67	5.76	1.46	4.4	8.48	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.96	7.46	4.83	-4.69	0.66	0.33	2.66	0.12	0.12	0.13	0.12	0.1	0.1	0.1
F. Konstruksi	5.59	3.34	-0.01	-0.02	1.27	3.55	5.89	12.99	12.55	12.53	11.92	10.67	10.69	10.8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.09	8.22	-1.34	5.79	10.27	7.28	7.42	12.95	13.54	13.71	13.47	12.97	13.4	13.85
H. Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.3	-5.91	-2.2	11.63	7.49	3.44	2.37	2.48	2.35	2.12	2.21	2.46	2.5
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	13.15	15.34	-7.21	4.43	14.67	13.14	9.39	1.76	1.97	1.87	1.81	1.77	1.91	2.01
J. Informasi dan Komunikasi	7.73	8.15	12.79	6.04	8.12	6.35	8.84	2.85	2.91	3.29	3.21	2.91	2.9	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	-1.44	1.64	4.19	-0.6	4.6	7.09	2.54	2.36	2.39	2.38	2.08	2.07	2.13
L. Real Estate	7.95	8.03	2.24	5.81	5.23	4.28	8.17	3.08	3.19	3.34	3.24	2.9	2.87	2.94
M,N. Jasa Perusahaan	9.51	9.57	-2.08	0.6	2.9	2.03	5.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.7	1.09	4.17	3.88	3.7	3.73	9.35	2.85	2.67	2.9	2.77	2.45	2.42	2.51
P. Jasa Pendidikan	2.72	4.73	-1.5	6.57	2.24	2.23	6.76	2.36	2.35	2.4	2.37	2.06	2.03	2.15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.56	9.57	10.14	5.63	4.15	-0.02	7.34	0.59	0.62	0.72	0.7	0.63	0.6	0.63
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.06	7.77	5.23	0.93	2.05	1.95	4.12	0.76	0.79	0.86	0.8	0.71	0.69	0.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.24	5.08	5.03	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

- Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:
- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,6 persen;

- 2) Industri Pengolahan sebesar 18.27 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,85 persen
- 4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,56 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,8 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2024						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)	Pertambangan dan Penggalian (24,6 %)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)	Industri Pengolahan (18.27 %)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,85%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,56%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)	Konstruksi (10,8%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2024, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2021-2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan

tetapi di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan samapi menjadi sebesar 24,6 persen pada tahun 2024.

Tabel 3.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65661.8	68961.2	72602.3	77172.25	82399.82	90046.53
B. Pertambangan dan Penggalian	92166.1	83283	103810.2	163520.9	167372.9	163335
C. Industri Pengolahan	87834.5	89705.8	94212.9	103317.4	112694.8	121330.2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575.1	673	727.7	751.15	800.02	876.5
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	558	606	595	604.09	614.14	640.95
F. Konstruksi	56906.6	56977.9	58864.4	62954.78	67278.81	71717.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61412.8	62324.5	66480.8	76530.69	84297.46	91958.7
H. Transportasi dan Pergudangan	11223.4	10668.9	10471.9	13043.41	15483.89	16579.86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8937.5	8519.4	8933.4	10470.48	12044.55	13370.89
J. Informasi dan Komunikasi	13177.4	14936.5	15852.3	17142.47	18257.14	19905.37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10716	10878.3	11728.2	12283.33	13028.56	14166.1
L. Real Estat	14462.1	15202.6	15984.2	17127.44	18072.53	19502.51
M,N. Jasa Perusahaan	615.1	616.5	623.1	663.62	698.52	747.94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12100.9	13181.3	13653.4	14473.67	15216.34	16669.52
P. Jasa Pendidikan	10636.7	10928.2	11676.2	12164.87	12746.35	14304.86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2820.4	3254.9	3473.5	3691.86	3799.28	4154.71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3598.1	3889.3	3947.4	4166.98	4363.52	4654.93
Produk Domestik Regional Bruto	453402.7	454607.4	493636.9	590079.4	629168.7	663961.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku

dari tahun 2019-2024, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi Miliar 663.961,7 Rupiah tahun 2024.

Tabel 3.5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran dengan rincian Net Ekspor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277771	296905	295605	308635	347794	381441	410002
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6358.15	7240.99	6748.58	7130.46	8067.44	8983.35	10660.6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32460.3	36686.9	31995	34055.6	34163.9	37333.9	40973
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157635	160153	162651	165436	182083	191037	205916
5. Perubahan Inventori	-972.55	-731.37	-1972.3	380.65	-6.06	3.76	7.56
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-53859	-46851	-40420	-22001	17976.7	10369.8	-3597.6
Produk Domestik Regional Bruto	419392	453403	454607	493637	590079	629169	663962

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 410.002 miliar rupiah.

Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 205.916 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.6
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183421	190641.5	186943.1	190560.7	201978.4	212618.5	222564.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4563.1	5009.23	4710.91	4806.55	5067.13	5419.47	6261.17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21604.63	22801.46	19869.06	20444.95	20691.85	21900.25	23736.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111301.2	113186.3	114605.2	111007.1	108306.9	110986.6	115876
5. Perubahan Inventori	-227.6	-319.38	-1331.43	54.85	-2.07	1.88	3.75
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-22178.2	-15854.4	-9667.59	-468.99	7461.35	10040.73	10678.19
Produk Domestik Regional Bruto	298484.1	315464.8	315129.2	326405.2	343503.6	360967.4	379119.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 222.564,2 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 115.876 miliar rupiah

Ekspor

Ekspor Sumatera Selatan pada Desember 2024 naik US\$24 juta (3,73 persen) disbanding November 2024, yaitu dari US\$642,88 juta menjadi US\$666,88 juta. Peningkatan ekspor Desember 2024, disebabkan oleh nilai ekspor non migas yang meningkat sebesar 5,03 persen. Sebaliknya ekspor migas mengalami penurunan signifikan sebesar 14,75 persen. Peningkatan ekspor non migas dikarenakan bertambahnya nilai ekspor komoditas pulp dari kayu.

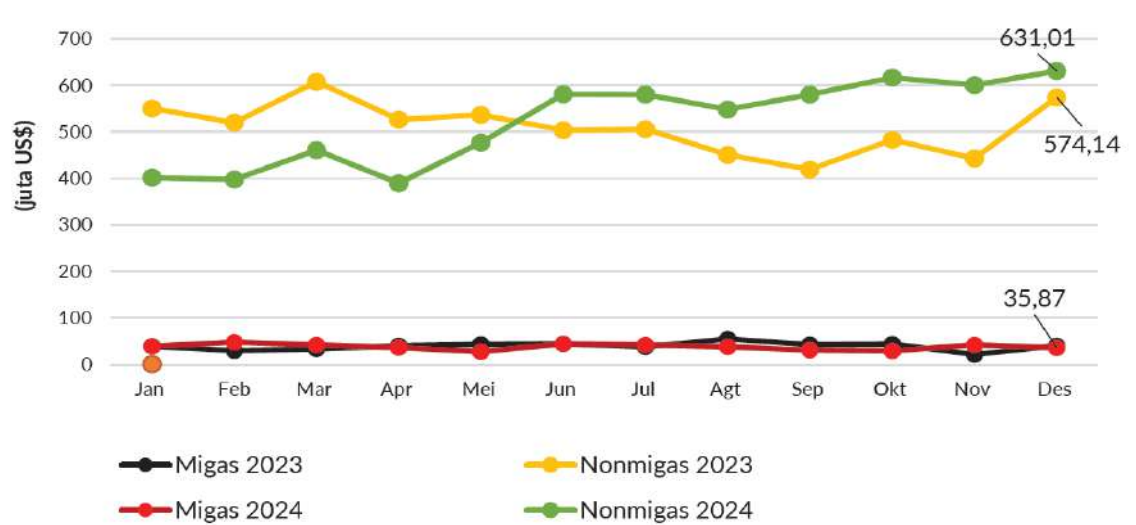
Hal serupa juga terlihat jika nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor pada Desember 2024 meningkat sebesar 8,53 persen jika dibandingkan Desember 2023. Hal ini disebabkan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 9,91 persen. Begitu juga jika dibandingkan secara kumulatif, nilai ekspor mengalami peningkatan 2,09 persen. Hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan ekspor nonmigas 2,33 persen. Dan peran dari komoditas ini mencapai 93 persen terhadap nilai ekspor selama periode Januari-Desember 2024.

Tabel 3.7
Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Desember 2024

Uralan	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	Des'24 thd Des'23 (y-on-y)	Des'24 thd Nov'24 (m-to-m)	Jan-Des 24 thd Jan-Des 23 (c-to-c)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	614,46	642,88	666,88	6.585,52	6.723,04	8,53	3,73	2,09	100,00
Migas	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-11,04	-14,75	-1,09	6,81
- Minyak mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil minyak	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-11,04	-14,75	-1,09	6,81
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	574,14	600,80	631,01	6.122,37	6.264,94	9,91	5,03	2,33	93,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.2
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ekspor non migas mengalami peningkatan pada Desember 2024 jika dibandingkan November 2024. Peningkatan terjadi karena bertambahnya nilai ekspor yang signifikan untuk komoditas Pulp dari Kayu (33,59%), Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (6,87 persen) serta karet dan barang dari karet (1,74 persen). Selanjutnya jika dilihat dari nilai y on y, nilai ekspor non migas juga mengalami peningkatan sebesar 9,91 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada komoditas yang sama yaitu karet dan barang dari karet, pulp dari kayu (bubur kertas), lemak&minyak hewan/nabati, buah-buahan serta baubara dan lignit. Begitu juga jika dilihat secara kumulatif, ekspor mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Komoditas yang mengalami peningkatan signifikan pada periode ini yaitu batubara dan lignit, karet dan barang dari karet, buah-buahan,pupuk dan sisa industri makanan.

Jika dilihat secara komposisi, ekspor nonmigas masih sama seperti periode sebelumnya yang masih didominasi oleh Bahan Bakar Mineral hingga 46 persen. Komoditas utama selanjutnya yaitu Karet & Barang dari karet serta Pulp dari kayu dimana nilai keduanya masing-masing sebesar 21,54 persen dan 19,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan ekspor dari Sumatera Selatan masih berasal dari sumber daya alam dan industri pengolahan.

Tabel 3.8
Nilai Ekspor Sepuluh Golongan Barang Utama Nonmigas
Sumatera Selatan, Desember 2024

Golongan Barang (HS 2 Diji)	Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan (%)			Nilai FOB (juta US\$)		Peran the total ekspor Nonmigas Jan-Des 2024 (%)
	Nov 2024	Des 2024	m to m	c to c	y on y	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan Bakar Mineral [27]	302,40	305,22	0,93	1,28	2,11	2.872,50	2.909,23	46,44
2. Karet dan Barang dari Karet [40]	134,56	136,90	1,74	23,21	44,54	1.095,46	1.349,77	21,54
3. Pulp dari Kayu [47]	93,79	125,30	33,59	-2,56	15,02	1.282,92	1.250,06	19,95
4. Lemak & Minyak He- wan / Nabati [15]	32,13	34,34	6,87	-38,80	22,41	432,46	264,65	4,22
5. Kertas/Karton [48]	8,30	7,50	-9,69	-2,28	-30,06	111,91	109,36	1,75
6. Kayu, Barang dari kayu [44]	10,69	6,68	-37,55	4,94	-37,51	99,60	104,52	1,67
7. Pupuk [31]	0,04	0,00	-100,00	19,74	-100,00	47,55	56,94	0,91
8. Residu, dan Sisa Industri Makanan [23]	2,42	1,26	-48,06	24,35	-73,37	42,71	53,11	0,85
9. Buah-buahan [08]	7,91	6,45	-18,40	62,62	225,77	30,01	48,81	0,78
10. Bahan Kimia Anorganik [28]	0,55	2,20	301,09	-5,01	179,08	26,40	25,08	0,40
Total 10 Golongan Barang	592,79	625,84	5,58	2,15	9,75	6.041,52	6.171,52	99,18
Lainnya	8,01	5,16	-35,52	15,54	32,46	80,85	93,42	0,82
Total Ekspor Non Migas	600,80	631,01	5,03	2,33	9,91	6.122,37	6.264,94	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan ekspor Sumatera Selatan menurut sektor pada Desember 2024 menunjukkan fenomena yang berbeda jika dibanding November 2024. Pada bulan lalu, peningkatan ekspor non migas hanya terjadi pada sektor pertanian. Sebaliknya, pada bulan ini peningkatan terjadi pada komoditas industri pengolahan dan pertambangan. Ekspor untuk komoditas industri pengolahan bertambah US\$31,39 juta atau sebesar 11,04 persen. Kemudian ekspor hasil tambang meningkat US\$2,82 juta atau 0,93 persen. Kemudian jika dilihat secara kumulatif (c to c), terjadi peningkatan untuk seluruh komoditas. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sektor hasil industri pengolahan yaitu US\$ 70,29 juta atau 2,20 persen.

Tabel 3.9
Nilai Ekspor Sumatera Selatan Menurut Sektor, 2024

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	Des'24 thd Nov'24 (m-to-m)	Des'24 thd Des'23 (y-on-y)	Jan-Des'24 thd Jan-Des'23 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	614,46	642,88	666,88	6 585,52	6 723,04	3,73	8,53	2,09	100,00
Migas	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-14,75	-11,04	-1,09	6,81
Nonmigas	574,14	600,80	631,01	6 122,37	6 264,94	5,03	9,91	2,33	93,19
- Pertanian	3,51	13,99	9,99	55,24	90,78	-28,63	184,19	64,35	1,35
- Industri pengolahan	271,72	284,41	315,80	3 194,64	3 264,92	11,04	16,22	2,20	48,56
- Pertam- bangan dan lainnva	298,90	302,40	305,22	2 872,50	2 909,23	0,93	2,11	1,28	43,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Impor

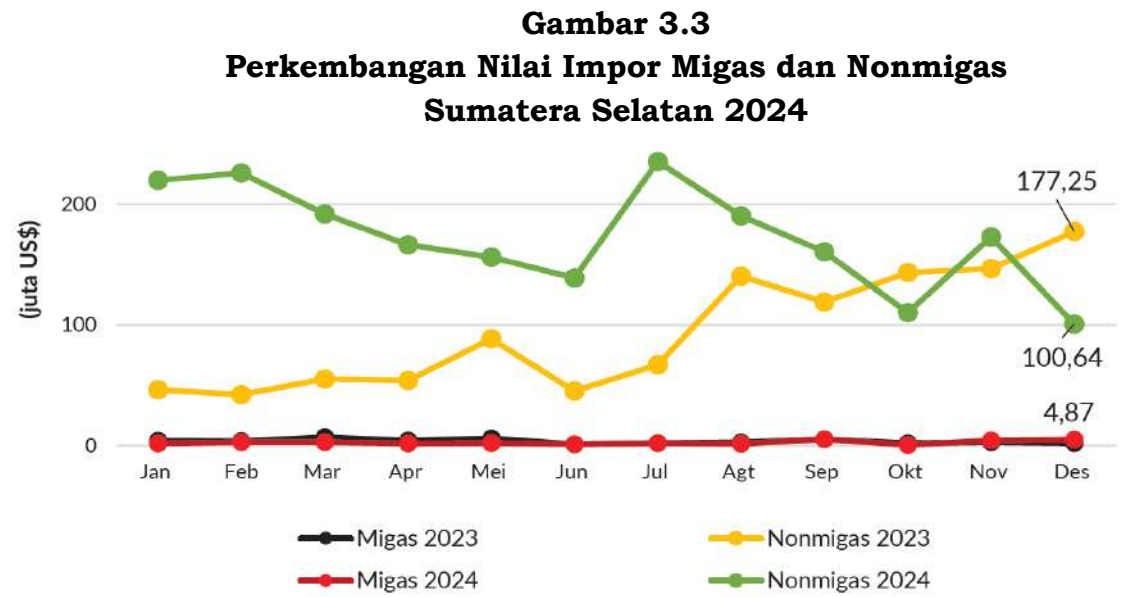
Nilai impor Sumatera Selatan terus menurun sejak Agustus 2024, kemudian meningkat pada bulan November dan kembali menurun pada Desember 2024. Nilai impor mencapai US\$105,51 juta atau berkurang US\$71,33 juta (40,34 persen) dibanding November 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada impor komoditas nonmigas. Impor nonmigas berkurang hingga 41,75 persen sedangkan impor migas meningkat sebesar 20 persen. Hal ini juga serupa jika nilai impor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai impor juga menurun

secara y on y. Impor di bulan Desember menurun 41 persen (y on y) karena berkurangnya impor non migas 43,22 persen. Sebaliknya nilai impor secara kumulatif meningkat hingga 80 persen. Hal ini disebabkan nilai impor non migas yang terus meningkat hingga 84 persen jika dibandingkan 2023. Dan jika dilihat dari distribusinya, impor nonmigas masih mendominasi yaitu sebesar 98 persen.

Tabel 3.10
Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Januari-Desember 2023

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	179,13	176,84	105,51	1 164,40	2 097,15	-40,34	-41,10	80,11	100,00
Migas	1,88	4,06	4,87	41,14	29,32	20,02	159,61	-28,72	1,40
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	1,88	4,06	4,87	41,14	29,32	20,02	159,61	-28,72	1,40
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	177,25	172,79	100,64	1 123,26	2 067,83	-41,75	-43,22	84,09	98,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Desember 2024 yang mencapai US\$100,64 juta, didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya US\$56,80 juta (66 persen). Dilihat perkembangannya terhadap November 2024, impor nonmigas mengalami penurunan US\$67,93 juta (42,71 persen), yang disebabkan oleh penurunan

signifikan pada komoditas Mesin serta barang dari besi dan baja. Begitu juga jika dibandingkan jika dengan Desember 2023, nilai impor juga menurun. Berkurangnya nilai impor disebabkan oleh penurunan signifikan pada komoditas mesin, karet dan barang dari karet.

Tabel 3.11
Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Mesin dan Pera- latan Mekanis dan Bagiannya [84]	121,70	120,86	56,80	628,54	1.376,49	-53,01	-53,33	119,00	66,57
2. Mesin dan Perlengkapan Elektris serta Bagiannya [85]	4,96	5,63	2,29	23,19	121,25	-59,32	-53,81	422,81	5,86
3. Pupuk [31]	2,95	11,27	10,50	73,81	87,79	-6,83	256,23	18,94	4,25
4. Barang dari Besi dan Baja [73]	3,92	2,72	0,48	47,03	63,60	-82,40	-87,82	35,24	3,08
5. Karet dan Barang dari Karet [40]	20,14	1,25	3,07	82,79	62,87	144,65	-84,76	-24,05	3,04
6. Kayu & Barang dari kayu [44]	0,00	11,37	7,72	0,53	62,64	-32,11	-	-	3,03
7. Serealia [10]	10,22	0,00	5,08	50,81	61,51	-	-50,33	21,05	2,97
8. Kereta Api, Trem dan Bagiannya [86]	2,10	2,95	3,83	40,18	35,63	29,61	82,64	-11,31	1,72
9. Pulp dari Kayu [47]	0,88	3,02	1,39	20,46	28,61	-54,19	56,64	39,82	1,38
10. Penjata dan Amunisi serta bagiannya [93]	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	-	-	-	1,35
Total 10 Golongan Barang	166,86	159,07	91,14	967,34	1.900,40	-42,71	-45,38	96,46	90,56
Lainnya	10,39	13,71	9,50	155,93	167,43	-30,72	-8,58	7,37	9,44
Total Impor Non Migas	177,25	172,79	100,64	1.123,26	2.067,83	-41,75	-43,22	84,09	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Total nilai impor dari 12 negara utama pada Desember 2024 mencapai US\$89,12 juta atau turun US\$53,80 juta (37,64 persen) dibandingkan November 2024. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai impor yang signifikan dari negara Tiongkok dan Vietnam. Nilai impor dari Tiongkok berkurang hingga US\$ 50,78 juta, dari Vietnam berkurang US\$9,58 juta. Fenomena serupa juga terjadi ketika nilai impor dibandingkan dengan tahun 2023. Impor dari 12 negara utama mengalami peningkatan jika dihitung secara kumulatif. Nilai impor dari 12 negara utama meningkat hingga dua kali lipat dimana pada

Januari-Desember 2023 sebesar US\$841,38 juta menjadi US\$1.921,02 juta pada periode yang sama di tahun 2024.

Dilihat dari peranannya terhadap total impor Januari-Desember 2024, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok dengan nilai US\$1.225,72 juta (58,45 persen), diikuti oleh Finlandia sebesar US\$243,96 juta (11,63 persen) dan dari Vietnam sebesar US\$107,85 juta (5,14 persen). Kemudian jika dilihat menurut benua, kontribusi yang cukup tinggi berasal dari kelompok negara Uni Eropa sebesar US\$400,63 juta (19,10 persen) dan ASEAN sejumlah US\$282,89 juta (13,49 persen). Komoditas impor yang dikirim dari Tiongkok yaitu Mesin untuk keperluan khusus dan umum, serta peralatan listrik; dari Finlandia yaitu mesin untuk keperluan khusus dan umum serta generator uap; kemudian dari Vietnam yaitu kayu olahan, makanan olahan lainnya dan pupuk.

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Selatan di 4 kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,20 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,74 pada Desember 2023 menjadi 107,01 pada Desember 2024. Secara m-to-m perkembangan harga menunjukkan adanya kenaikan indeks dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,50 persen. Sementara secara kumulatif sampai dengan Desember 2024 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,20 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 109,96 pada Desember 2023 menjadi 110,50 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: daging ayam ras sebesar 0,17 persen; minyak goreng sebesar 0,13 persen; bawang merah sebesar 0,11 persen; bawang putih sebesar 0,10 persen; kopi bubuk sebesar 0,08 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,48 persen atau terjadi penurunan indeks dari 103,11 pada Desember 2023 menjadi 102,62 pada Desember 2024. kelompok ini pada Desember 2024 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,61 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,96 pada Desember 2023 menjadi 102,58 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,67 persen atau terjadi penurunan indeks dari 101,54 pada Desember 2023 menjadi 100,86 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu pengharum cucian/pelembut sebesar 0,04 persen, pembersih lantai sebesar 0,02 persen, dan detergen cair sebesar 0,01 persen.

Kelompok kesehatan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,81 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,56 pada Desember 2023 menjadi 103,40 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu obat dengan resep sebesar 0,01 persen.

Kelompok transportasi pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,60 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,41 pada Desember 2023 menjadi 109,87 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,18 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: pemeliharaan/service dan mobil sebesar 0,06 persen; tarif angkutan

udara sebesar 0,04 persen; mobil sebesar 0,06 persen; tarif jalan tol dan perbaikan ringan kendaraan sebesar 0,03 persen; dan pelumas/ oli mesin dan sepeda motor masing-masing sebesar 0,02 persen.

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,37 persen atau terjadi penurunan indeks dari 99,90 pada Desember 2023 menjadi 99,53 pada Desember 2024. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi y-on-y dan 3 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,41 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu, subkelompok layanan informasi dan komunikasi subkelompok asuransi dan subkelompok jasa keuangan.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,27 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,27 pada Desember 2023 menjadi 105,59 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu tas sekolah sebesar 0,01 persen.

Kelompok pendidikan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,36 pada Desember 2023 menjadi 106,31 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bimbingan belajar sebesar 0,05 persen dan taman kanak-kanak sebesar 0,03 persen.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,52 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,40 pada Desember 2023 menjadi 105,99 pada Desember 2024. Kelompok ini terdiri dari 1 subkelompok, yaitu subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,52 persen. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,13 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan

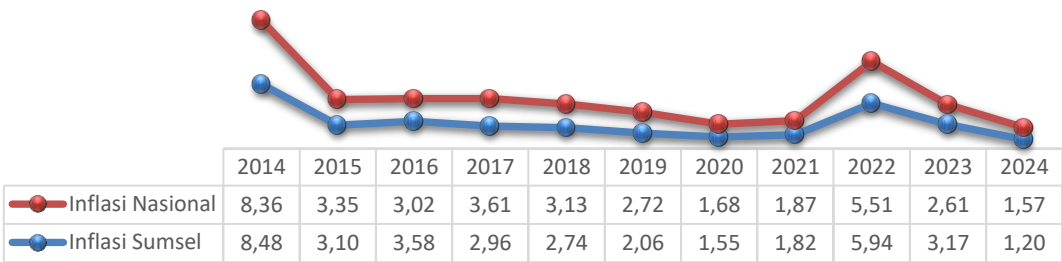
inflasi y-on-y, yaitu pempek dan nasi dengan lauk masing-masing sebesar 0,02 persen dan roti bakar dan sate masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 8,09 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,75 pada Desember 2023 menjadi

114,31 pada Desember 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 20,89 persen. Sedangkan subkelompok perawatan pribadi mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,63 persen. Sementara subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks dibanding Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,58 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 0,62 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada diatas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (yoy), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2024 sebesar 1,20 persen Angka Inflasi Sumatera Selatan berada dibawah angka Inflasi di Nasional.

Gambar 3.4
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2024



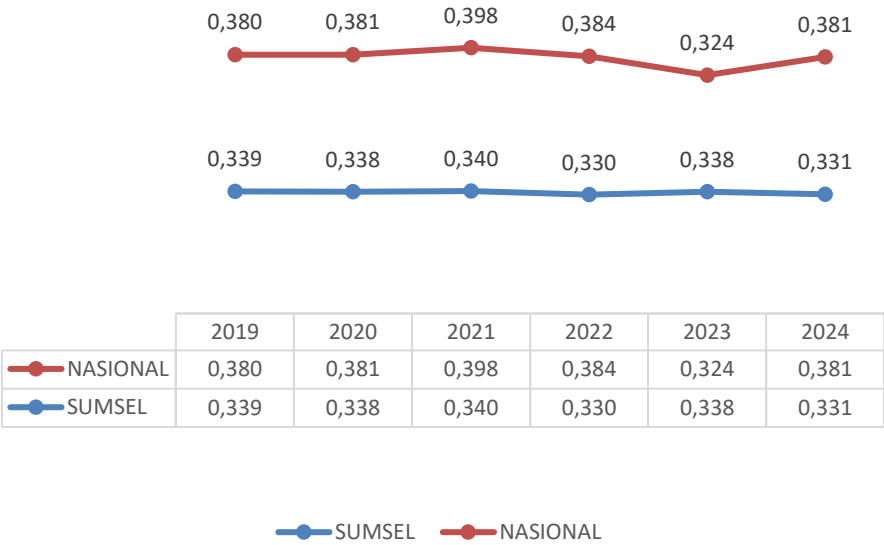
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2019-2024 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun

terakhir atau pada periode September 2021-September 2024 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,331.

Gambar 3.5
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

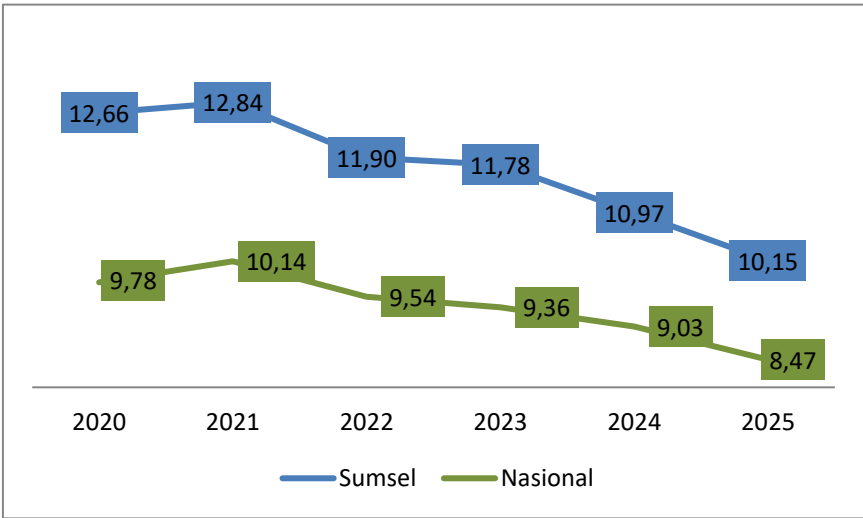
Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan September 2024 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 10,15 persen pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,081 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,92 juta penduduk pada tahun 2025. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-

2029, pada tahun 2027 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan sudah menjadi satu digit. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.

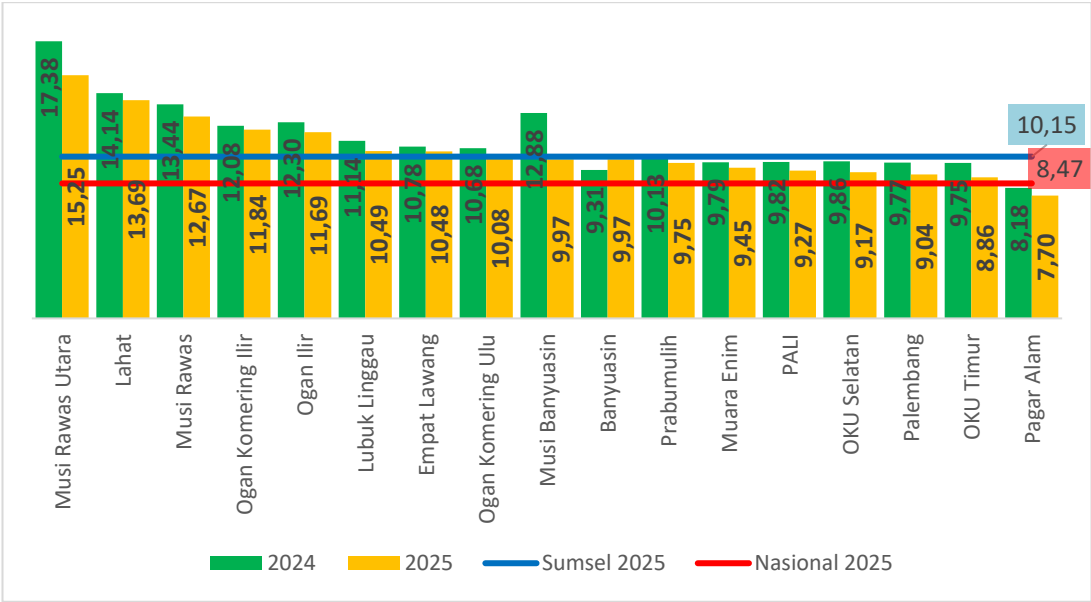
Gambar 2.18
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan data BPS, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang memiliki kemiskinan tertinggi diatas angka provinsi pada tahun 2025 yaitu Musi Rawas Utara (15,25%); Lahat (13,69%); Musi Rawas (12,67%); Ogan Komering Ilir (11,84%); Ogan Ilir (11,69%); Lubuklinggau (10,49%) dan Empat Lawang (10,48%). Sedangkan kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinan lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi adalah Kota Pagar Alam yaitu 7,70 persen.

Gambar 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat sebanyak 920 ribu jiwa mengalami penurunan sebanyak 64,24 ribu jiwa dibandingkan tahun 2024. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mengalami penurunan setelah dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan akibat pandemi *coronavirus disease 2019 (covid- 19)*. Persentase penduduk miskin pada awal *covid- 19* pada tahun 2020 sebesar 12,66 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 12,84 persen. Tetapi dengan adanya pelanggaran pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan *covid-19*, memicu perekonomian daerah kembali menggeliat sehingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,90 persen dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,15 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.18
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2025

	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	387,80	693,78	1.081,58	12,16	12,96	12,66
2021	402,25	711,51	1.113,76	12,36	13,12	12,84
2022	371,50	673,18	1.044,69	11,23	12,31	11,90
2023	371,75	673,93	1.045,68	11,07	12,21	11,78
2024	342,34	641,9	984,24	10,04	11,53	10,97
2025	314,49	605,12	919,60	9,10	10,79	10,15

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan baik sebelum dan saat terjadinya covid-19. Pada periode satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin, begitu pula di perdesaan penduduk miskinnya menurun sebesar 0,68 persen poin. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,96 persen menjadi 10,79 persen pada tahun 2025, sedangkan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 12,16 persen pada tahun 2020 menjadi 9,10 persen pada tahun 2025.

Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi covid-19 lebih berpengaruh terhadap aktivitas dan pemulihan ekonomi di perkotaan daripada di perdesaan. Kebijakan pengetatan mobilitas dan kebijakan lainnya yang berkenan dengan mitigasi penularan covid-19 lebih terasa di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis daripada di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara Nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan

yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/ kota tidak kalah penting untuk ditelaah. Hal tersebut sangat krusial untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin serta ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Palembang dengan jumlah mencapai 162,31 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar 11,28 ribu dibanding tahun 2024 yang jumlahnya mencapai 173,59 ribu jiwa. Persoalan kemiskinan di Kota Palembang memang terbilang lebih kompleks karena sebagai ibukota provinsi, tentu kota ini menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Selatan bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.19
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

KABUPATEN/KOTA		2025				
KODE	KABUPATEN/KOTA	Jml Penduduk Miskin (dalam ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
1601	Ogan Komering Ulu	39,58	10,08	1,48	0,33	588.225
1602	Ogan Komering Ilir	105,26	11,84	1,36	0,26	493.783
1603	Muara Enim	64,82	9,45	1,28	0,28	512.439
1604	Lahat	58,66	13,69	2,55	0,72	606.881
1605	Musi Rawas	54,70	12,67	1,33	0,23	616.298
1606	Musi Banyuasin	69,61	9,97	1,49	0,38	627.094
1607	Banyu Asin	77,63	8,48	1,08	0,22	560.840
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	35,49	9,17	1,27	0,27	456.280
1609	Ogan Komering Ulu Timur	62,89	8,86	0,97	0,18	453.488
1610	Ogan Ilir	53,21	11,69	1,45	0,37	614.656
1611	Empat Lawang	27,88	10,48	1,44	0,32	440.405
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	18,87	9,27	1,01	0,19	530.583
1613	Musi Rawas Utara	31,25	15,25	2,22	0,47	666.294
1671	Kota Palembang	162,31	9,04	1,40	0,32	699.920
1672	Kota Prabumulih	19,89	9,75	1,19	0,25	687.666
1673	Kota Pagar Alam	11,20	7,70	0,82	0,12	444.962
1674	Kota Lubuklinggau	26,35	10,49	1,10	0,16	632.783
Prov Sumatera Selatan		919,60	10,15	1,64	0,37	581.702

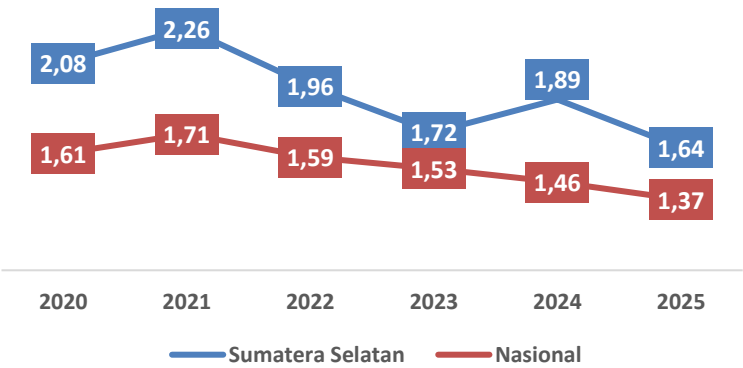
Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Selanjutnya ditinjau dari signifikansi penurunan persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota tidaklah sama. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa ada ketidakmerataan kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera

Selatan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hendaknya ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparagan dari kemiskinan. Secara umum, indeks P1 pada periode 2020-2025 berfluktuasi. Indeks P1 mengalami penurunan dari sebesar 2,08 di tahun 2020 menjadi 1,64 di tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan P1 di tahun 2025, namun tren indeks P1 pasca adanya pandemi Covid-19 cenderung membaik. Penurunan nilai indeks P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin sudah mulai membaik pasca terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia.

Gambar 2.20
Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025

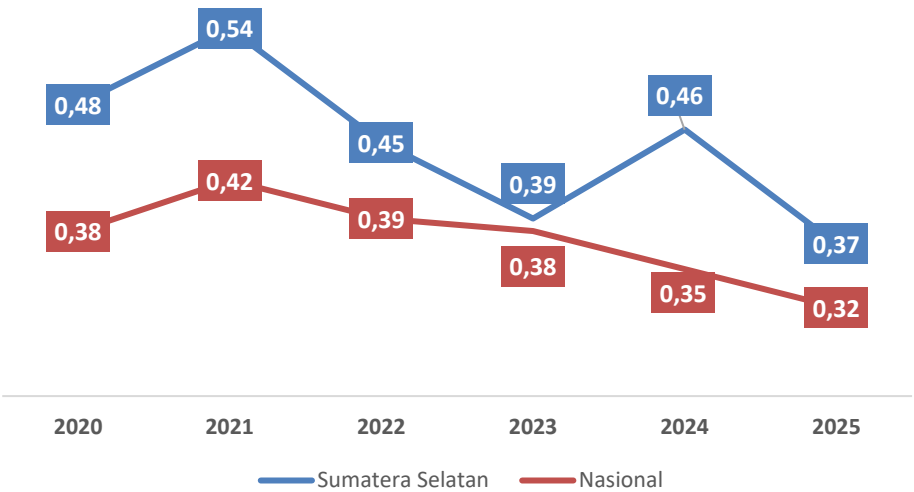


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Demikian pula dengan indeks keparahan (P2) yang turut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari 0,48 menjadi 0,37 di tahun 2025. Sama hal nya dengan indeks P1, meskipun indeks P2 Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan di tahun 2025 ini, namun sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat adanya pandemi. Penurunan

indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menurun. Fenomena itu dapat mengindikasikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup dinikmati secara merata di antara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/ pengeluaran di antara mereka semakin mendekat. Namun memang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingat penurunan Indeks Keparahkan Kemiskinan yang relatif lambat turun.

Gambar 2.21
Tren Perkembangan Indeks Keparahkan (P2)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Keadaan maret 2025, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,48 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 1,74. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,33 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,40. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin

terhadap GK di perkotaan relatif lebih jauh dibandingkan daerah perdesaan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan. Dengan demikian dibutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan yang lebih intensif di daerah perkotaan khususnya dalam menjaga daya beli penduduk miskin.

Peningkatan nilai P1 dan P2 tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meningkat. Fenomena ini mengungkapkan bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan namun jika kita melihat lebih detil bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di dalamnya masih perlu perbaikan.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

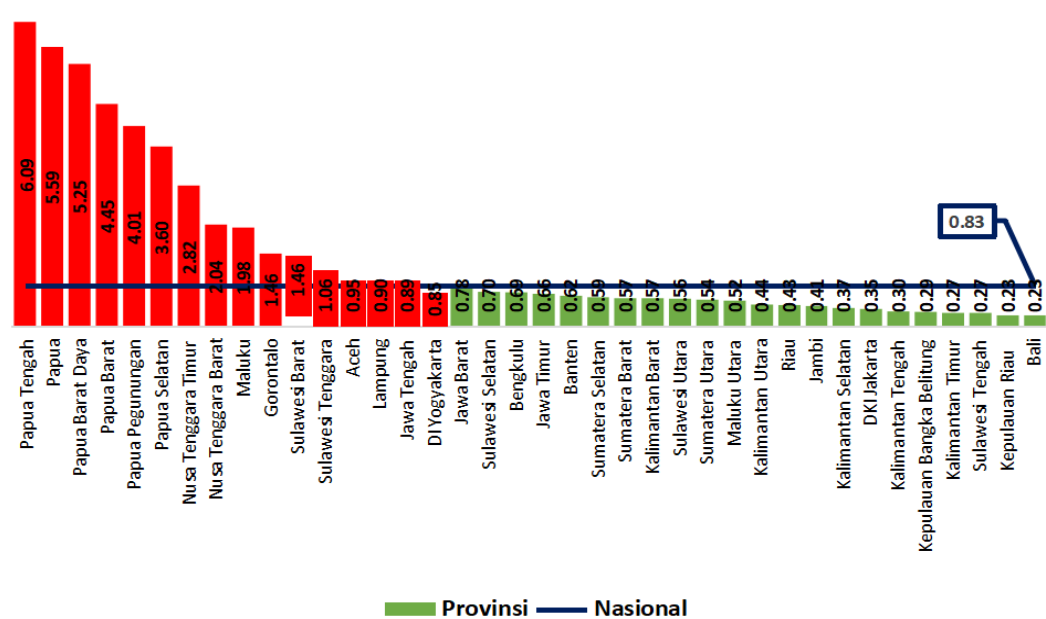
Gambar 2.22
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional terus mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari tahun 2020 sebesar 2,25 persen menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem per Provinsi juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup besar yaitu 4,72 persen poin dari tahun 2020 sebesar 5,31 persen menjadi 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem baik Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawah satu persen dan telah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Jika dibandingkan dengan provinsi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat perpulau di Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan (0,70 persen poin), di kawasan Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan (0,10 persen poin), di kawasan Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,39 persen poin), di kawasan Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah (1,17 persen poin), di kawasan Pulau Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua (2,08 persen poin), dan di kawasan Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,11 persen poin).

Tabel 2.20

**Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Ekstrem Per Provinsi Tahun 2023 – 2024**

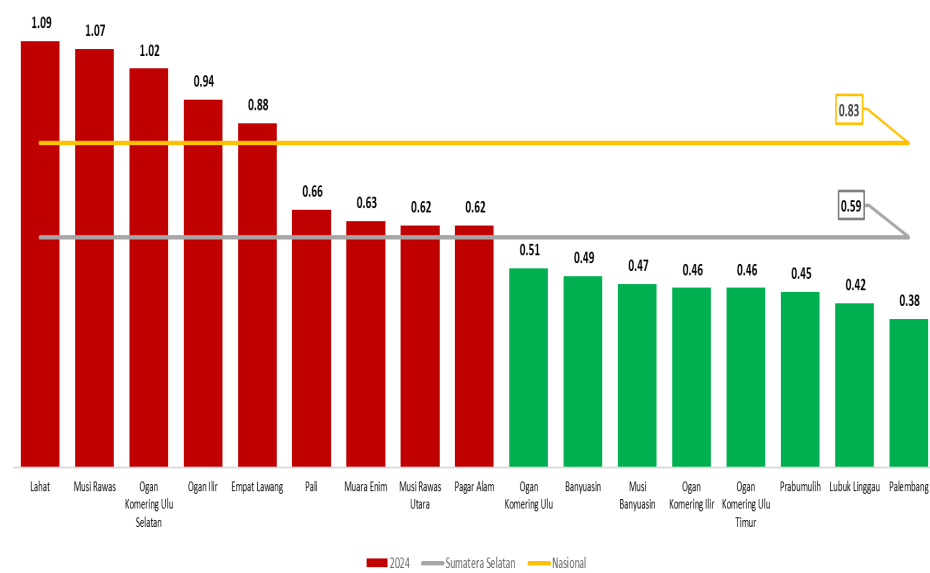
Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Papua Tengah		6,09	Sumatera Selatan	1,29	0,59
Papua	7,67	5,59	Sumatera Barat	0,41	0,57
Papua Barat Daya		5,25	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Papua Barat	6,43	4,45	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Papua Pegunungan		4,01	Sumatera Utara	0,78	0,54
Papua Selatan		3,60	Maluku Utara	0,67	0,52
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Riau	0,67	0,43
Maluku	2,59	1,98	Jambi	0,81	0,41
Gorontalo	2,44	1,46	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Sulawesi Barat	0,75	1,46	DKI Jakarta	0,57	0,35
Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Aceh	1,83	0,95	Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29
Lampung	1,32	0,90	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jawa Tengah	1,11	0,89	Sulawesi Tengah	1,44	0,27
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Kepulauan Riau	0,35	0,23
Jawa Barat	0,79	0,78	Bali	0,19	0,23
Sulawesi Selatan	1,01	0,70	Indonesia	0,83	0,83
Bengkulu	2,08	0,69			
Jawa Timur	0,82	0,66			
Banten	1,12	0,62			

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam 26 (dua puluh enam) Provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau sekitar 68,42 persen dari total Provinsi di Indonesia dan 12 (dua belas) Provinsi yang berada diatas 1 persen kemiskinan ekstrem atau sekitar 31,58 persen total Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 hampir semua kabupaten/ kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2023 kecuali Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, OKU Timur, Prabumulih, yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Ada 9 kabupaten/ kota yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya, tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Palembang.

Gambar 2.24
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

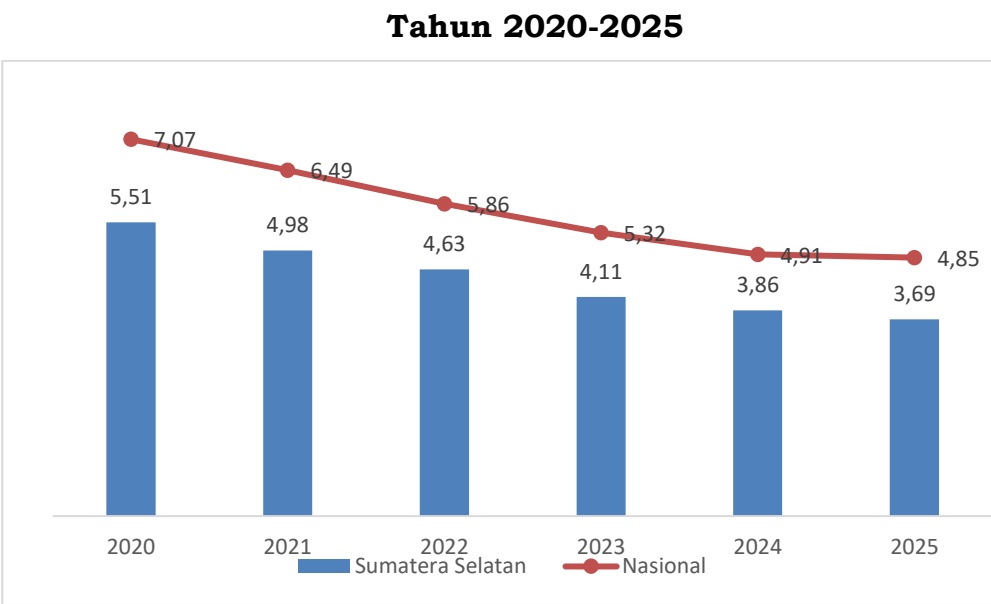


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2025 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,63% di tahun 2022, 4,11% di tahun 2023, 3,86% di tahun 2024 dan 3,69% di tahun 2025. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2022 dan 2025 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2020-2025 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan



Sumber: BPS, 2025

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 sebanyak 179,71 ribu orang atau berkurang sebanyak 8,80 ribu orang dari Agustus 2023 sebesar 188,51 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri atas 4.492,57 ribu orang penduduk bekerja dan 172,36 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah Angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing -masing bertambah sebanyak 5,13 ribu orang dan 12,47 ribu orang, sedangkan pengangguran turun 7,35 ribu orang.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,94 persen poin sejak Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 69,88 persen, turun 0,68 persen poin dibanding Februari 2025. TPAK Adalah persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,82 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan

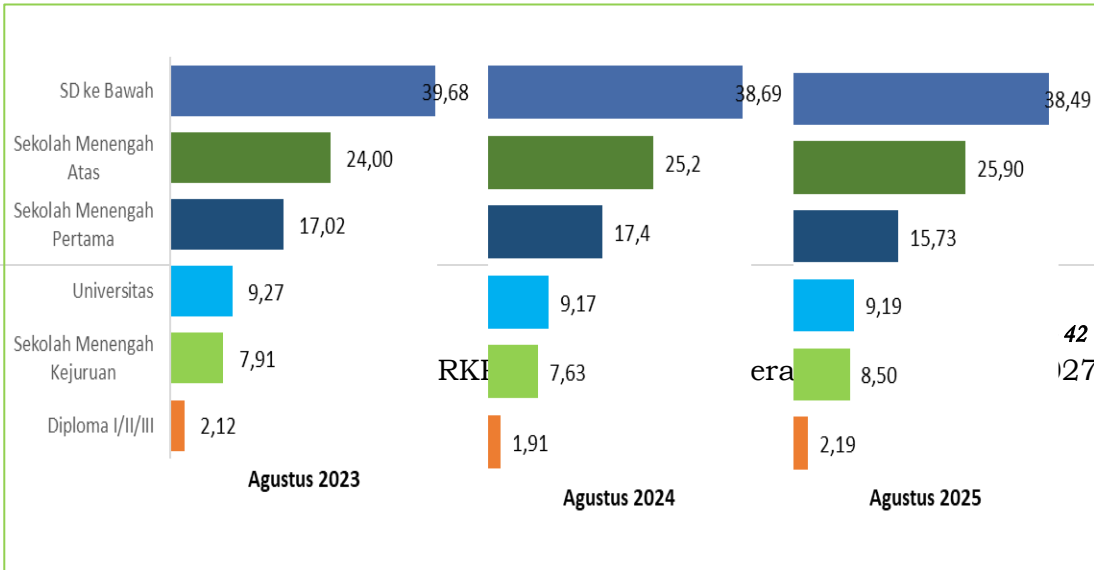
yang sebesar 54,46 persen. Dibandingkan pada Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,97 persen poin sedangkan TPAK Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2025, Sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,49 persen. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami tren yang menurun sejak Agustus 2023. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,38 persen dan mengalami tren yang semakin meningkatkan dari Agustus 2023. Distribusi penduduk bekerja menurut Pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023 dan Agustus 2024.

Dibandingkan dengan Agustus 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 0,20 persen poin dan 1,67 persen poin. Selanjutnya penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan juga mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,70 persen poin 0,28 persen poin, dan 0,02 persen poin.

Gambar 2.77
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan

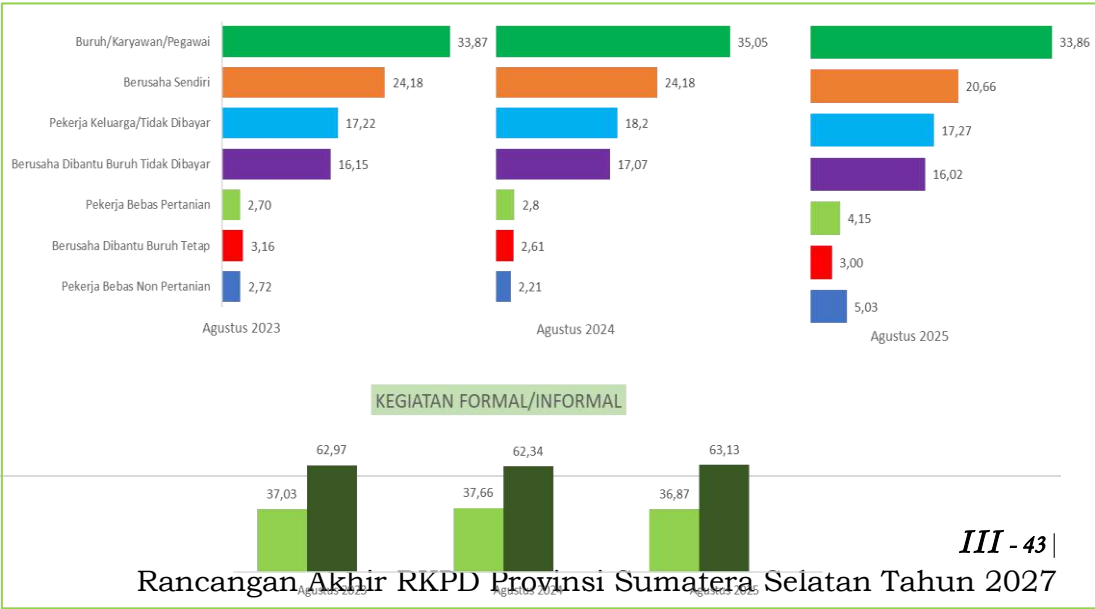


Sumber: BPS Sumsel, 2025

Bila dibandingkan Agustus 2023 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja juga turun pada pendidikan SD (1,19 persen poin), SMP (1,29 persen poin), pendidikan SMK meningkat (0,59 persen poin) dan Pendidikan Diploma meningkat (0,07 persen poin). Peningkatan kontribusi yang cukup besar terdapat pada penduduk bekerja dengan pendidikan SMA sebesar 1,9 persen dan Pendidikan Universitas menurun sebesar 0,08 persen.

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

STATUS PEKERJAAN UTAMA



Sumber: BPS Sumsel, 2025

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2.836,38 ribu orang (63,13 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.656,19 orang (36,87 persen). Dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,79 persen poin sedangkan pendudukan bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen poin.

7.4. Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik

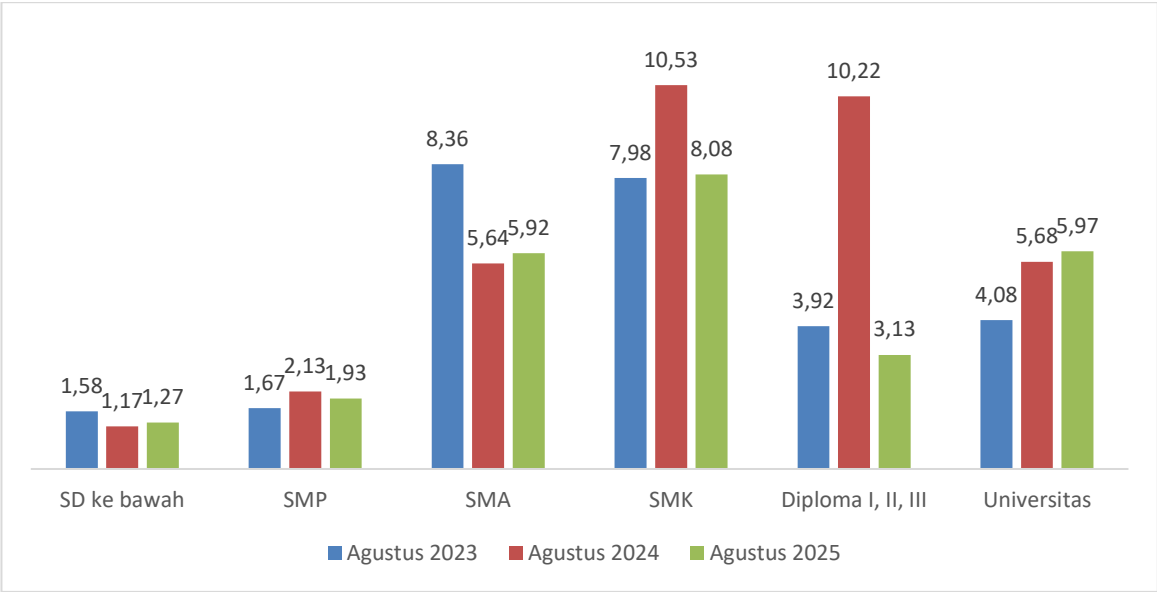
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama pada Agustus 2024, Agustus 2023, dan Agustus 2022. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,92 dan 8,08 persen meskipun terus mengalami penurunan sejak tahun 2023. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,27 persen.

Dibandingkan Agustus 2024, TPT hampir semua kategori mengalami penurunan kecuali untuk tamatan SD yaitu naik

sebesar 0,10 persen poin dan SMK yang turun sebesar 2,45 persen poin. Namun jika dibanding Agustus 2023, kategori yang mengalami peningkatan yaitu tamatan SMA sebesar 0,28 persen poin, tamatan SMP mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin, DI/II/III menurun sebesar 7,09 persen poin sedangkan SI/II/III meningkat sebesar 0,29 persen poin.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 2.79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: BPS Sumsel 2025

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi,

inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Inflasi pada tahun 2025 juga diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ terutama dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan stabilnya daya beli masyarakat yang didukung oleh inflasi yang terkendali. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi menghadapi tantangan dengan adanya risiko pelemahan harga komoditas unggulan di 2025 seperti kelapa sawit dan karet, yang memberikan dampak pada pendapatan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor perkebunan. Aktivitas investasi di Sumatera Selatan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan berakhirnya masa *wait and see* para investor. Di sisi lain, berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta dimulainya pembangunan proyek tol Junction Palembang turut menjadi pendorong investasi. Selain itu, berlanjutnya, perbaikan hasil pertanian seiring dengan cuaca yang kondusif dan optimalisasi produksi melalui pengairan yang baik (beroperasinya bendungan) berpotensi mendorong kinerja ekspor, terutama ekspor antar daerah didukung oleh optimalisasi ekspor batu bara pasca beroperasinya *hauling road*. Namun, konsumsi pemerintah diperkirakan termoderasi seiring normalisasi pasca tingginya aktivitas belanja daerah saat periode Pemilu dan Pilkada 2024.

Dari sisi sektoral, pada tahun 2025, sektor lapangan usaha di Sumatera Selatan diproyeksikan tumbuh positif, meskipun dengan dinamika yang bervariasi di setiap sektor. Sektor pertambangan diperkirakan menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan membaiknya harga komoditas batu bara di pasar global.

Kebijakan energi di Amerika Serikat oleh pemerintahan baru yang mendukung bahan bakar fosil diperkirakan memberikan sentimen positif terhadap sektor ini. Selain itu, keberadaan infrastruktur logistic yang semakin mendukung, seperti jalur transportasi baru, memperkuat daya saing sektor pertambangan di Sumatera Selatan. Sektor pertanian juga diperkirakan tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh cuaca yang lebih kondusif dan selesainya pembangunan infrastruktur irigasi serta bendungan strategis.

Peningkatan produktivitas pertanian, terutama pada komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit, menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Sektor konstruksi diperkirakan terus mencatatkan pertumbuhan yang solid, terutama didorong oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baru. Pembangunan pabrik pulp di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas konstruksi.

Di sisi lain, sector industri pengolahan diproyeksikan tumbuh lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, karena normalisasi aktivitas ekonomi pasca-Pemilu dan Pilkada. Namun, selesainya pembangunan pabrik di OKI akan turut memberikan dampak positif terhadap sektor ini, khususnya melalui peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Sektor perdagangan, meskipun tetap tumbuh, diperkirakan turut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Normalisasi konsumsi masyarakat pasca-Pemilu menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sektor ini. Namun demikian, perdagangan kendaraan bermotor tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini, seiring dengan peningkatan daya beli konsumen domestik.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan tetap resilien, dengan dukungan dari permintaan domestik, investasi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sector non-komoditas, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan sektor jasa, akan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan

ekonomi. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan pengelolaan risiko yang baik, Sumatera Selatan diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan melihat kondisi capaian tahun 2024 ini maka **pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat di tahun 2025** serta di perkirakan tumbuh sebesar **4,8 – 5,6%** didukung oleh inflasi yang melandai dan masuk ke kisaran target. Inflasi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan masih terkendali dan akan kembali ke kisaran target inflasi nasional sebesar **2,5 ± 1% (yoy)**.

Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Tekanan inflasi pada 2025 diperkirakan berasal dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Potensi risiko inflasi impor akibat kebijakan proteksionis di berbagai negara menjadi salah satu faktor pendorong inflasi, meskipun dampaknya relatif terjaga. Selain itu, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun 2025 juga memberikan dampak langsung pada peningkatan harga barang dan jasa.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam TPID kota maupun kabupaten di Sumatera Selatan menjadi kunci menjaga inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hal tersebut utamanya difokuskan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Keluarga Rawan Stunting (KRS) guna menjaga pasokan komoditas bahan pangan dan daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan rantai pasok untuk komoditas lokal diperkirakan mampu mengurangi tekanan harga pada beberapa komoditas pangan strategis.

Tekanan inflasi kelompok inti di 2025 diperkirakan berasal dari implementasi kenaikan PPN di awal tahun. Selain itu, risikp inflasi impor (imported inflation) akibat ketidakstabilan pasokan pangan global juga menjadi tantangan, terutama dalam konteks harga barang yang dipengaruhi pasar internasional. Inflasi pada kelompok harga diatur

Pemerintah diperkirakan didorong oleh kenaikan biaya energi global dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang memengaruhi harga barang dan jasa yang bergantung pada energi. Namun, tarif cukai rokok yang relatif tetap diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi lebih lanjut pada komponen ini.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, inflasi Sumatera Selatan tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen.

Strategi Perekonomian Daerah Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus.

Tantangan:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan, seperti minyak dan gas, serta produk pertanian.
2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di Sumatera Selatan.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Meskipun ada upaya peningkatan infrastruktur, beberapa daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM yang terampil dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih maju.

Peluang:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata: Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kaya. Pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. **Diversifikasi Ekonomi:** Mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dengan mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
3. **Peningkatan Infrastruktur:** Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi:** Adopsi teknologi baru dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut maka diperlukan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

- **Fokus pada Pembangunan Infrastruktur:** Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, pelabuhan (misalnya Pelabuhan Tanjung Carat), dan bandara, untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mempermudah distribusi barang, serta menarik investasi.
- **Penguatan Infrastruktur Digital:** Mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti e-commerce dan fintech, serta meningkatkan akses internet di daerah terpencil untuk memperluas partisipasi ekonomi digital.

2. Diversifikasi Ekonomi

- **Pengembangan Sektor Pariwisata:** Mengoptimalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan, seperti wisata alam, budaya, dan sejarah, melalui pembangunan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, serta

mempromosikan destinasi wisata lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.

- Transformasi Sektor Pertanian dan Perkebunan: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna, program pelatihan untuk petani, serta memperkenalkan pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
- Inovasi di Sektor Industri Kreatif dan Manufaktur: Mendukung pengembangan industri kreatif, seperti seni, kerajinan, dan desain, serta sektor manufaktur dengan memfasilitasi pembentukan pusat inovasi dan pengembangan produk lokal.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja global, terutama dalam sektor teknologi, industri, dan pariwisata.
- Program Kewirausahaan: Mengembangkan program-program kewirausahaan yang mendukung anak muda dan masyarakat untuk memulai usaha, dengan memberikan akses kepada pelatihan, modal usaha, serta memperkenalkan model bisnis baru.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup: Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dengan mendorong sektor kehutanan dan pertanian yang ramah lingkungan.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Investasi dalam pengembangan energi terbarukan (seperti energi surya dan bioenergi) untuk mendukung ketahanan energi lokal serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil.

5. Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Swasta dan Investor

- Fasilitasi Investasi: Meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan insentif bagi investor yang tertarik mengembangkan usaha

di Sumatera Selatan, terutama di sektor infrastruktur, teknologi, dan pariwisata.

- Kerja Sama Antar Daerah dan Pemerintah Pusat: Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan baik.

6. Memperkuat Sektor Ekonomi Digital

- Program Digitalisasi UMKM: Mendorong UMKM untuk bertransformasi ke platform digital guna meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan lokal. Program digitalisasi dapat mencakup pelatihan, pemberian fasilitas dan akses internet yang lebih baik, serta integrasi sistem pembayaran digital.
- Pendanaan untuk Startups: Mendorong pendanaan bagi startup lokal, khususnya yang bergerak dalam sektor teknologi dan inovasi, dengan memberikan akses mudah kepada venture capital dan program inkubator bisnis.

7. Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi

- Penyediaan Bantuan untuk Sektor Terdampak: Menyediakan bantuan atau stimulus ekonomi bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- Program Infrastruktur Hijau: Menyusun program pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas publik ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih efisien.

8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Program Pengurangan Kemiskinan: Mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.

- Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial: Memperkuat jaringan pengaman sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan krisis, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok marginal.

9. Peningkatan Daya Saing dan Konektivitas Global

- Peningkatan Ekspor dan Impor: Memfasilitasi peningkatan ekspor produk-produk unggulan Sumatera Selatan dan membuka akses pasar internasional untuk produk lokal, melalui pembenahan proses logistik dan kebijakan perdagangan.
- Membangun Kemitraan Internasional: Meningkatkan hubungan internasional dengan negara-negara mitra untuk membuka peluang investasi dan kerjasama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan pendidikan.

Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Sumatera Selatan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Dengan berbagai strategi arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan maka **Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2026 ditargetkan sebesar 5,8 – 6,3%.**

Inflasi pada tahun 2026 diharapkan tetap terjaga pada kisaran **1,5 – 3,5%** dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Kondisi **Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 3,75–3,90% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 9,07–10,07%.** Salah satu indikator untuk mengukur penduduk yang menganggur yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu

menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, adanya program pembekalan keterampilan juga dapat menjadi modal bagi pencari kerja untuk membuka lapangan usaha baru.

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,312 – 0,316 dimana Kondisi perekonomian Sumsel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata.

3.1.2.3 Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2027

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 dengan fokus pada pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026 adalah "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur unggulan, termasuk proyek strategis seperti New

Palembang Port Tanjung Carat. Pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Sumatera Selatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, upaya sinkronisasi program dan kegiatan di bidang kebinamargaan dan tata ruang juga menjadi fokus. Rapat teknis yang diselenggarakan bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tantangan dan Peluang Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2027

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus.

Tantangan:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan, seperti minyak dan gas, serta produk pertanian.
2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di Sumatera Selatan.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Meskipun ada upaya peningkatan infrastruktur, beberapa daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM yang terampil dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih maju.
Peluang:
5. Pengembangan Sektor Pariwisata: Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kaya. Pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
6. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dengan mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
7. Peningkatan Infrastruktur: Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Adopsi teknologi baru dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut maka diperlukan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan yaitu:

2. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

- Fokus pada Pembangunan Infrastruktur: Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, pelabuhan (misalnya Pelabuhan Tanjung Carat), dan bandara, untuk meningkatkan konektivitas antar

daerah, mempermudah distribusi barang, serta menarik investasi.

- **Penguatan Infrastruktur Digital:** Mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti e-commerce dan fintech, serta meningkatkan akses internet di daerah terpencil untuk memperluas partisipasi ekonomi digital.

2. Diversifikasi Ekonomi

- **Pengembangan Sektor Pariwisata:** Mengoptimalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan, seperti wisata alam, budaya, dan sejarah, melalui pembangunan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, serta mempromosikan destinasi wisata lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.
- **Transformasi Sektor Pertanian dan Perkebunan:** Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna, program pelatihan untuk petani, serta memperkenalkan pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
- **Inovasi di Sektor Industri Kreatif dan Manufaktur:** Mendukung pengembangan industri kreatif, seperti seni, kerajinan, dan desain, serta sektor manufaktur dengan memfasilitasi pembentukan pusat inovasi dan pengembangan produk lokal.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja global, terutama dalam sektor teknologi, industri, dan pariwisata.
- **Program Kewirausahaan:** Mengembangkan program-program kewirausahaan yang mendukung anak muda dan masyarakat untuk memulai usaha, dengan memberikan akses kepada pelatihan, modal usaha, serta memperkenalkan model bisnis baru.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup: Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dengan mendorong sektor kehutanan dan pertanian yang ramah lingkungan.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Investasi dalam pengembangan energi terbarukan (seperti energi surya dan bioenergi) untuk mendukung ketahanan energi lokal serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil.

5. Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Swasta dan Investor

- Fasilitasi Investasi: Meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan insentif bagi investor yang tertarik mengembangkan usaha di Sumatera Selatan, terutama di sektor infrastruktur, teknologi, dan pariwisata.
- Kerja Sama Antar Daerah dan Pemerintah Pusat: Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan baik.

6. Memperkuat Sektor Ekonomi Digital

- Program Digitalisasi UMKM: Mendorong UMKM untuk bertransformasi ke platform digital guna meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan lokal. Program digitalisasi dapat mencakup pelatihan, pemberian fasilitas dan akses internet yang lebih baik, serta integrasi sistem pembayaran digital.
- Pendanaan untuk Startups: Mendorong pendanaan bagi startup lokal, khususnya yang bergerak dalam sektor teknologi dan inovasi, dengan memberikan akses mudah kepada venture capital dan program inkubator bisnis.

7. Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi

- Penyediaan Bantuan untuk Sektor Terdampak: Menyediakan bantuan atau stimulus ekonomi bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- Program Infrastruktur Hijau: Menyusun program pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas publik ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih efisien.

8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Program Pengurangan Kemiskinan: Mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
- Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial: Memperkuat jaringan pengaman sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan krisis, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok marginal.

9. Peningkatan Daya Saing dan Konektivitas Global

- Peningkatan Ekspor dan Impor: Memfasilitasi peningkatan ekspor produk-produk unggulan Sumatera Selatan dan membuka akses pasar internasional untuk produk lokal, melalui pembenahan proses logistik dan kebijakan perdagangan.
- Membangun Kemitraan Internasional: Meningkatkan hubungan internasional dengan negara-negara mitra untuk membuka peluang investasi dan kerjasama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan pendidikan.

Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Sumatera Selatan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Dengan berbagai strategi arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan maka **Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2027 ditargetkan sebesar 5,9 – 6,4%.**

Inflasi pada tahun 2027 diharapkan tetap terjaga pada kisaran **1,5 – 3,5%** dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Kondisi **Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 3,70–3,85% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 7,90-8,90%.** Salah satu indikator untuk mengukur penduduk yang menganggur yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, adanya program pembekalan keterampilan juga dapat menjadi modal bagi pencari kerja untuk membuka lapangan usaha baru.

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,305-0,309 dimana Kondisi perekonomian Sumsel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda

antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata.

Tabel 3.15
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2024			2025		2026	2027
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Target P-RKPD	Target RKPD	Target RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70 - 5,50*	5,03	5,03	5,3 - 5,5	5,30 - 5,50	5,8-6,3	5,9-6,4
Inflasi (%/tahun)	2,5 ± 1*	1,2	1,57	2,5 ± 1*	1,5 - 3,5*	1,5 - 3,5*	1,5 - 3,5*
Tingkat Kemiskinan (%)	10,95	10,51	8,57	9,37 - 10,37	9,37 - 10,37	9,07 - 10,07	7,90-8,90
Tingkat Pengangguran (%)	4,14	3,86	4,91	3,83 - 3,95	3,82 - 3,93	3,75 - 3,90	3,70 - 3,85
Gini Ratio	0,324	0,331	0,381	0,316-0,320	0,316-0,320	0,312 - 0,316	0,305-0,309
Indeks Pembangunan Manusia	71,63	73,84	75,02	71,96	74,4	74,95	75,49
Indeks Modal Manusia (IMM)	-				0,53	0,55	0,555

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-

Indikator Makro	2024			2025		2026	2027
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Target P-RKPD	Target RKPD	Target RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70 – 5,50*	5,03	5,03	5,3-5,5	5,3-5,5	5,8 – 6,3	5,9-6,4
Inflasi	2,5±1	1,2	1,57	2,5±1	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5-3,5
Tingkat Kemiskinan	10,95	10,51	6,57	9,37 – 10,37	9,37 – 10,37	9,07-10,07	7,90-8,90
Tingkat Pengangguran	4,14	3,86	4,91	3,82 – 3,93	3,82 – 3,93	3,75-3,90	3,70-3,85
Gini Ratio	0,324	0,331	0,381	0,316-0,320	0,316-0,320	0,312-0,316	0,305-0,309
Indeks Pembangunan Manusia	71,63	73,84	75,02	74,4	74,4	74,95	75,49
Indeks Modal Manusia					0,53	0,55	0,555

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui RKPD Tahun 2027, pemerintah Sumsel berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penentuan proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026 maka akan dilihat dulu bagaimana kinerja keuangan periode sebelumnya sehingga penetapan target juga melihat hasil capaian pada periode sebelumnya. Secara umum, kerangka pendanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.11.626.018.318.742,40 mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang sebesar Rp.9.639.432.188.404,00 naik sebesar Rp.1.489.692.814.487,00 atau 13,38 persen.

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2027 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Proyeksi PAD Tahun

Anggaran 2027 diperkirakan sejumlah Rp.5.401.933.993.200,13 mengalami peningkatan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah Rp. 5.132.383.462.643,00 atau bertambah sejumlah Rp.294.096.308.052,00 atau 6,07 persen. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan sejumlah Rp.4.427.642.189.398,79.
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan sejumlah Rp.11.699.961.800,00.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dialokasikan sejumlah Rp.295.735.800.634,49.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah dialokasikan sejumlah Rp.666.856.041.366,85.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

a. Pajak Daerah:

1. Optimalisasi Sistem Pemungutan Pajak

- Implementasi Sistem Digital (e-Pajak): Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem e-Pajak untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Ini meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pemungutan pajak, serta meminimalkan potensi kebocoran pajak.
- Sistem Pembayaran Pajak Online: Pengembangan aplikasi pembayaran pajak secara online mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, yang meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.

2. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak

- Edukasi kepada Wajib Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyuluhan intensif tentang pentingnya pembayaran pajak daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, sosialisasi di media sosial, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- Program Kesadaran Pajak: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah melalui kampanye publik yang efektif.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Pajak

- Layanan Pajak yang Cepat dan Mudah: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pengurusan administrasi dan pembayaran.
- Peningkatan Fasilitas Pelayanan: Menyediakan layanan konsultasi pajak untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan cara pembayaran yang tepat, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

4. Penyederhanaan dan Perbaikan Proses Administrasi

- Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi pajak, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta mempercepat proses verifikasi dan pemrosesan pembayaran.
- Audit dan Pengawasan Ketat: Melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak untuk

memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar dengan benar dan tepat waktu. Hal ini juga untuk mengidentifikasi potensi potensi penerimaan pajak yang belum tergali.

5. Penguatan Sektor Pajak Berbasis Potensi Daerah

- Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dengan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor, khususnya melalui pembaruan data kendaraan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan penerimaan dari sektor ini.
- Pemanfaatan Potensi Pajak dari Sektor Perdagangan dan Perhotelan: Sumatera Selatan, dengan sektor pariwisatanya yang berkembang, juga berusaha memaksimalkan pajak dari sektor ini dengan meningkatkan jumlah wisatawan dan memperbaiki fasilitas umum.

6. Penerapan Insentif dan Kemudahan untuk Wajib Pajak

- Diskon atau Pengurangan Pajak: Dalam beberapa kasus, Pemprov Sumatera Selatan memberikan diskon atau pengurangan pajak untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu atau lebih banyak dari yang dibutuhkan, misalnya dengan memberikan pengurangan pajak untuk kendaraan bermotor yang diperpanjang masa pajaknya lebih awal.
- Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu: Pemerintah juga menerapkan kebijakan insentif untuk pembayaran pajak tepat waktu, seperti pemberian potongan tertentu bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo.

7. Peningkatan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pajak yang Belum Terbayar

- **Penindakan terhadap Penghindaran Pajak:** Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan tegas terhadap penghindaran atau penggelapan pajak dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Pemanfaatan Data untuk Pengawasan Pajak:** Penggunaan teknologi dan big data untuk memonitor dan mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum membayar atau yang membayar kurang dari kewajiban yang ditentukan.

8. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

- **Kerja Sama dengan Kepolisian dan Pengadilan:** Pemprov Sumatera Selatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk memastikan bahwa tindakan hukum dapat diterapkan terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
- **Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat:** Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sistem dan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

9. Inovasi dalam Pengelolaan Pajak

- **Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pajak:** Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinvestasi dalam teknologi untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan pajak daerah. Penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang canggih memungkinkan pemantauan pajak yang lebih akurat dan efektif.
- **Pemanfaatan Data Elektronik untuk Pengelolaan Pajak:** Meningkatkan pengumpulan data elektronik dari

berbagai sektor untuk memastikan bahwa semua potensi pajak dapat dipungut secara maksimal.

b. Retribusi Daerah:

1. Peningkatan Pengawasan dan Penataan Retribusi

- Pengawasan yang Ketat: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat pengawasan terhadap pemungutan retribusi di berbagai sektor, seperti retribusi pasar, parkir, layanan publik (rumah sakit, puskesmas), dan lain-lain. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi.
- Penataan Ulang Tarif Retribusi: Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan penataan ulang tarif retribusi untuk memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai dengan potensi daerah dan daya beli masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Retribusi

- Digitalisasi Retribusi: Pemprov Sumatera Selatan mengembangkan sistem pembayaran retribusi secara elektronik untuk mempermudah proses pembayaran oleh masyarakat. Melalui sistem digital ini, wajib retribusi dapat membayar secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi.
- Penerapan Sistem e-Retribusi: Penerapan sistem e-Retribusi untuk retribusi layanan publik (misalnya pasar, tempat parkir, dan pasar swalayan) guna mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan transparansi. Sistem ini juga mempermudah pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat.

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

- Sosialisasi kepada Wajib Retribusi: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban retribusi dan manfaatnya untuk pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka dalam membayar retribusi.
- Penyuluhan tentang Pentingnya Retribusi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai mekanisme pembayaran retribusi serta fasilitas atau layanan yang didapatkan sebagai imbalan dari pembayaran retribusi tersebut.

4. Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah

- Peningkatan Retribusi Parkir dan Pasar: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk retribusi, seperti tempat parkir dan pasar. Dengan meningkatkan pemantauan dan penataan tempat parkir serta pengelolaan pasar yang lebih profesional, diharapkan penerimaan retribusi dapat meningkat.
- Peningkatan Retribusi Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik yang dikenakan retribusi, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan lainnya, dengan memberikan fasilitas yang lebih baik agar masyarakat lebih tertarik untuk membayar retribusi.

5. Penyederhanaan dan Transparansi Proses Retribusi

- Penyederhanaan Proses Administrasi: Mempercepat dan mempermudah prosedur administrasi terkait pembayaran retribusi, sehingga wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan tanpa hambatan.
- Transparansi Penggunaan Dana Retribusi: Meningkatkan transparansi mengenai penggunaan dana

yang diperoleh dari retribusi, agar masyarakat lebih memahami manfaat langsung yang mereka terima, sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk membayar retribusi.

6. Penerapan Insentif dan Penghargaan untuk Kepatuhan

- Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu: Untuk mendorong pembayaran retribusi tepat waktu, Pemprov Sumatera Selatan memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang membayar retribusi secara tepat waktu. Ini dapat berupa pengurangan tarif atau fasilitas lain yang mendukung.
- Penghargaan bagi Pelaku Usaha yang Taati Retribusi: Memberikan penghargaan atau sertifikat kepada pelaku usaha yang patuh membayar retribusi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk ikut serta dalam kewajiban ini.

7. Evaluasi dan Peninjauan Berkala Tarif Retribusi

- Evaluasi Tarif Retribusi Secara Berkala: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi berkala terhadap tarif retribusi yang berlaku, memastikan bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah dan kebutuhan untuk pembangunan.
- Penyesuaian Tarif Berdasarkan Kebutuhan Daerah: Menyesuaikan tarif retribusi dengan kebutuhan pembangunan daerah, misalnya, jika ada proyek infrastruktur baru atau fasilitas pelayanan publik yang memerlukan dana tambahan, tarif retribusi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

8. Peningkatan Kerjasama dengan Sektor Swasta

- Kolaborasi dengan Pelaku Usaha: Mengajak pelaku usaha untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemungutan retribusi, khususnya di sektor yang memiliki potensi besar, seperti sektor pariwisata, pasar, atau parkir. Kemitraan ini bisa mencakup kerjasama

dalam sistem pembayaran atau penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.

- Bekerja Sama dengan Bank untuk Memudahkan Pembayaran: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan lembaga keuangan atau bank untuk mempermudah proses pembayaran retribusi melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia.

9. Pemanfaatan Retribusi untuk Pembangunan Daerah

- Penggunaan Retribusi untuk Meningkatkan Layanan: Pemerintah Provinsi memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berhubungan langsung dengan retribusi tersebut, misalnya memperbaiki fasilitas umum, memperbaharui infrastruktur, atau menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik.
- Pembangunan Infrastruktur untuk Menarik Pengunjung: Pemprov juga memfokuskan sebagian dana retribusi untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti membangun jalan, tempat wisata, dan fasilitas lainnya yang akan meningkatkan minat pengunjung dan menghasilkan retribusi lebih besar.

10. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Retribusi

- Tindakan Tegas terhadap Penghindaran Retribusi: Pemprov Sumatera Selatan meningkatkan penegakan hukum terhadap individu atau badan usaha yang menghindari atau tidak membayar retribusi dengan benar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wajib retribusi memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sanksi Administratif: Memberikan sanksi administratif seperti denda atau pembatasan akses fasilitas bagi mereka yang tidak membayar retribusi, sebagai upaya

untuk menegakkan aturan dan meningkatkan kepatuhan.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :
 - a) Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
 - b) Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
 - c) Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;

- d) Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Business Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- e) Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- f) Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- g) Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
- 4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - a) Membenahi sistem administrasi menjadi sistem online dan tersentral pusat kontrolnya.
 - b) Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.2. Pendapatan Transfer

Kebijakan Tranfer ke Daerah tahun 2027 secara umum diarahkan untuk:

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
 - a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
 - c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.6.352.173.149.473,18. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

A.1 Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak dialokasikan sejumlah Rp.2.234.150.641.067,80 mengalami penurunan bila dibanding APBD tahun Anggaran 2026 sejumlah

Rp.1.904.568.170.041,00 atau bertambah
Rp.329.582.471.026,80.

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sejumlah Rp.1.818.678.210.468,70. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2027 meliputi, sebagai berikut:
 - a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
 - b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
 - c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan
 - d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp.1.388.706.638.012,23. Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2026 antara lain:
 - a) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
 - b) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh; mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
 - c) Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;

- d) memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
- e) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
- f) mengukur capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
- g) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
- h) mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD

Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- a) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b) memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
- c) mendorong penuntasan target PN;
- d) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- e) meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp.6.685.431.880,93.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
- b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, antara lain melalui:
 - i. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 - ii. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 - iii. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.
- d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2027

dialokasikan sejumlah Rp.4.310.356.071,60 lebih besar dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.4.184.811.720,00. Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	10.036.955.961.132,70	9.547.779.371.502,99	10.962.497.244.934,50	10.068.638.049.867,30	9.639.432.188.404,00	11.626.018.318.742,40
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.930.954.855.677,74	4.875.950.557.289,99	5.309.757.143.255,46	4.569.394.155.706,34	5.132.383.462.643,00	5.401.933.993.200,13
A.	Pendapatan Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.287.466.538.999,46	4.744.634.642.741,87	3.928.279.760.981,86	4.071.314.046.831,00	4.427.642.189.398,79
B.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	12.477.067.295,00	8.552.046.241,00	5.420.244.968,00	5.536.107.400,00	11.699.961.800,00
C.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,00	138.824.929.544,35	106.316.886.488,21	402.588.135.087,00	295.735.800.634,49
D.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	304.584.352.371,13	352.121.003.139,53	417.745.524.728,24	529.377.263.268,27	652.945.173.325,00	666.856.041.366,85
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.495.180.970.161,00	4.502.863.914.041,00	6.219.773.969.470,65
A.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.488.691.677.161,00	4.502.863.914.041,00	5.448.220.921.429,65
A.1	Dana Perimbangan	5.029.223.442.526,00	4.667.946.127.537,00	5.642.095.592.679,00	5.488.691.677.161,00	4.502.863.914.041,00	5.441.535.489.548,72
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.442.737.296.896,00	1.854.967.347.879,00	2.645.802.349.840,00	2.480.132.510.400,00	1.904.568.170.041,00	908.740.402.338,30
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak						1.325.410.238.729,50
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.653.766.188.000,00	1.806.673.215.634,00	1.830.641.652.620,00	1.447.563.526.000,00	1.818.678.210.468,70
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.023.444.858.630,00	1.159.212.591.658,00	1.189.620.027.205,00	1.177.917.514.141,00	1.150.732.218.000,00	1.388.706.638.012,23
A.2	Dana Insentif Daerah	60.870.557.000,00	-	6.625.541.000,00	-	-	6.685.431.880,93
A.3	Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya				6.489.293.000,00		
B.	Kurang Salur DBH SDH dan Pajak						771.553.048.041,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	4.062.924.000,00	4.184.811.720,00	4.310.356.071,60
1.3.1.	Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	4.062.924.000,00	4.184.811.720,00	4.310.356.071,60
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya						

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.6.575.048.548.636,00 mengalami kenaikan sebesar 7,99% dibanding tahun 2026 yang sebesar 5.401.786.299.958,00 belanja operasi tahun 2026 tersebar dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp.3.306.181.419.686,00,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.888.387.847.350,00, belanja subsidi sebesar Rp.3.350.000.000,00 serta belanja hibah sebesar Rp.377.129.281.600,00.

Belanja Modal

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang menghasilkan aset dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal tersebut tersebar untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal selama periode 2022 sampai dengan tahun 2026 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2027 Belanja Modal diproyeksikan menjadi Rp.2.038.884.380.952,00.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja tidak terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif, pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp.19.553.804.801,00 Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.50.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah, yang digunakan untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi, bantuan sosial korban bencana alam, serta pengembalian kesalahan/kelebihan setor kepada pihak ketiga.

Belanja Transfer

Belanja transfer/bantuan keuangan merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Belanja transfer Provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Proyeksi Belanja Transfer Tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp.2.962.085.389.153,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026, yaitu sebesar Rp.3.248.779.683.868,00 berkurang sebesar Rp. 524.839.913.144,00.

Tahun 2027 proyeksi belanja sejumlah Rp.11.626.018.318.741,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan”.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

- c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
- d. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- e. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepd daerah dan atau desa.
- f. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
 - 2) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 4) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%; dan
 - 5) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
- h. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

- i. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur untuk diverifikasi oleh perangkat daerah provinsi sesuai kriteria yaitu:
 - 1) Sesuai kemampuan keuangan daerah
 - 2) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penurunan angka kemiskinan
 - 3) Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar/ Publik kabupaten/kota
 - 4) Mendukung peningkatan/pembangunan yang menjadi Prioritas Daerah kabupaten/kota
 - 5) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di kabupaten/kota antara lain: Jalan, Jembatan, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan daerah lainnya
 - 6) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya
 - 7) Keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD, dan/atau
 - 8) Aspirasi masyarakat hasil kunjungan kerja Gubernur di kabupaten/kota.
- j. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- k. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan

OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- l. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- m. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- n. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- o. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pengalokasian belanja untuk membiayai 4 prioritas daerah RKPD 2025 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah.

Uraian realisasi anggaran tahun 2022 - 2025 serta dan belanja daerah tahun 2026 dan 2027 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2022 – 2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
2	BELANJA DAERAH	9.663.575.726.750,69	9.698.252.360.233,98	10.899.989.950.243,70	9.690.062.435.928,98	9.747.926.839.611,00	11.626.018.318.741,00
1.	BELANJA OPERASI	4.499.276.793.174,07	4.975.235.925.372,77	5.311.081.939.178,72	5.244.646.283.559,27	5.401.786.299.958,00	6.575.048.548.636,00
A.	Belanja Pegawai	2.092.571.068.579,00	2.190.116.137.939,00	2.528.391.380.267,00	2.819.314.921.964,00	3.152.486.058.025,00	3.306.181.419.686,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.275.862.382,07	2.405.532.045.847,87	2.259.380.999.928,72	2.115.888.686.786,27	1.859.950.706.450,00	2.888.387.847.350,00
C.	Belanja Bunga	13.227.699.524,00	8.817.133.280,00	2.786.684.555,00			-
D.	Belanja Subsidi		-	510.541.824.428,00		1.675.000.000,00	3.350.000.000,00
E.	Belanja Hibah	351.202.162.689,00	370.770.608.305,90	9.981.050.000,00	309.442.674.809,00	387.674.535.483,00	377.129.281.600,00
F.	Belanja Bantuan Sosial		-				
	Belanja Biaya Provinsi						
	Pengelolaan Pinjaman						
2.	BELANJA MODAL	1.536.370.414.095,28	1.206.711.898.808,99	1.292.420.009.833,96	1.326.925.954.008,41	1.047.360.855.785,00	2.038.884.380.952,00
A.	Belanja Tanah	8.708.743.955,00	1.743.753.503,00	701.091.453,00	1.336.164.000,00	3.590.000.000,00	243.765.000.000,00
B.	Belanja Peralatan dan Mesin	342.811.302.542,00	345.465.230.996,00	282.043.992.981,25	299.017.722.533,00	208.957.558.846,00	406.409.124.339,00
C.	Belanja Bangunan dan Gedung	361.568.165.909,82	266.624.790.389,12	259.121.500.988,71	252.333.408.823,41	288.679.511.118,00	397.799.490.043,00
D.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	747.812.255.898,46	541.178.479.003,87	699.082.171.086,00	703.198.894.988,00	502.208.426.815,00	970.274.941.570,00
E.	Belanja Aset Tetap Lainnya	75.469.945.790,00	50.703.578.417,00	48.066.059.521,00	66.409.406.979,00	39.624.483.100,00	15.519.000.000,00
F.	Belanja Modal Aset Lainnya		996.066.500,00	3.405.193.804,00	4.630.356.685,00	4.300.875.906,00	5.116.825.000,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.553.804.801,00	16.000.000.000,00	82.301.295,00	33.448.110,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	3.608.374.714.680,34	3.500.304.536.052,22	4.296.405.699.936,00	3.118.456.750.251,30	3.248.779.683.868,00	2.962.085.389.153,00
A.	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	1.914.984.234.446,00	2.179.118.758.571,00	2.399.428.901.098,00	1.906.130.908.101,00	1.531.809.254.533,00	2.148.844.826.794,00
B.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.693.390.480.234,34	1.321.185.777.481,22	1.896.976.798.838,00	1.212.325.842.150,30	1.716.970.429.335,00	813.240.562.359,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2026

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan

pengelolaan pembiayaan daerah dimana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.108.494.651.207,00 dan Pengeluaran Pembiayaan tidak dialokasikan, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2027

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	PEMBIAYAAN	354.251.259.039,14	436.744.445.834,19	257.986.372.616,46	108.494.651.207,36		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.894.033.565,14	322.922.821.755,19	154.808.667.409,91	108.494.651.207,36	108.494.651.207,00	108.494.651.207,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.357.225.474,00	113.821.624.079,00	103.177.705.206,55	-		

Sumber: TAPD (data diolah), 2026

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan didukung juga dari program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, selain dari APBD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

3.3.1. APBD Kabupaten/Kota

Total APBD 17 Kabupaten/Kota sangat signifikan bila dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Optimalisasi pemanfaatan APBD 17 Kabupaten/Kota amatlah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Arah kebijakan pembangunan daerah terkait optimalisasi APBD di 17 Kabupaten/Kota adalah sinkronisasi dan sinergi RKPD provinsi dengan RKPD 17 kabupaten/kota. Dengan demikian, target-target makro pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dikawal pencapaiannya melalui tahapan evaluasi RKPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Sebaliknya, pencapaian target-target RPJMD Kabupaten/Kota juga dapat didukung dana APBD Provinsi karena RKPD Kabupaten/Kota telah sinkron dengan RKPD Provinsi. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menyusun RKPD masing-masing sesuai dengan RPJMD masing-masing.

Namun demikian, tersedia tahapan untuk sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota dengan RKPD Provinsi melalui mekanisme yang telah diatur Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tahapan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kabupaten / Kota	2023	
	Pendapatan	Belanja
Ogan Komering Ulu	Rp 1.443.040.462,01	Rp 1.233.792.104,52
Ogan Koomering Ilir	Rp 2.483.624.534,02	Rp 2.134.483.098,50
Muara Enim	Rp 2.852.960.415,80	Rp 2.535.788.020,96
Lahat	Rp 2.440.902.177,87	Rp 1.994.495.505,02
Musi Rawas	Rp 1.693.391.505,69	Rp 1.698.725.332,52
Musi Banyuasin	Rp 3.594.442.133,05	Rp 3.285.531.945,66
Banyuasin	Rp 2.220.194.953,50	Rp 1.950.409.320,57
OKU Selatan	Rp 1.198.013.341,56	Rp 1.239.752.929,38
OKU Timur	Rp 1.912.099.117,74	Rp 1.883.635.002,96
Ogan Ilir	Rp 1.273.705.291,93	Rp 1.108.497.402,46
Empat Lawang	Rp 1.144.459.693,23	Rp 908.458.408,16
Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1.164.073.152,65	Rp 1.288.612.743,51
Musi Rawas Utara	Rp 1.043.184.864,41	Rp 1.038.440.785,82
Palembang	Rp 3.726.045.316,97	Rp 3.471.088.556,81
Prabumulih	Rp 878.307.964,38	Rp 891.269.371,00
Pagar Alam	Rp 740.022.718,49	Rp 720.087.414,55
Lubuk Linggau	Rp 871.238.278,38	Rp 876.387.520,29

Sumber: Sumsel Dalam Angka 2023

APBD 17 Kabupaten/Kota tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025
di Provinsi Sumatera Selatan

NO	Kab/Kota	APBD-P TA 2024	APBD TA 2025
1	Ogan Komering Ilir	3.478.970.781.967,00	2.593.929.723.727,00
2	Ogan Ilir	1.924.326.969.130,00	1.637.292.019.436,00
3	Banyuasin	2.970.945.623.746,15	2.990.879.772.913,75
4	Musi Banyuasin	4.762.205.290.507,58	3.436.353.775.772,00
5	Palembang	4.986.748.529.728,00	4.820.360.447.056,00
6	Lubuklinggau	1.324.873.204.282,00	1.010.013.052.730,00
7	Pali	1.636.460.423.181,00	1.550.919.412.362,00
8	Musi Rawas	2.170.675.474.247,00	1.907.408.361.312,00
9	Musi Rawas Utara	1.712.026.130.851,83	1.375.371.069.749,00
10	Empat Lawang		1.287.210.971.566,00
11	Muara Enim	4.357.997.788.128,21	3.622.786.525.848,00
12	OKU Selatan		1.411.712.775.863,00
13	Pagar Alam	1.127.429.497.872,00	906.573.559.595,00
14	Prabumulih	1.364.585.516.540,00	1.172.636.419.816,00
15	OKU Timur	2.381.500.719.146,00	2.274.236.117.282,00
16	Lahat	4.060.292.328.863,00	3.539.334.575.650,00
17	Ogan Komering Ulu		1.615.314.605.452,00

Sumber: BPKAD Prov. Sumsel,2025

3.3.2. APBN

3.3.2.1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terdapat beberapa jenis APBN yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perangkat Daerah Provinsi, APBN Tugas Pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Perangkat Daerah Provinsi. Besaran APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi.

Untuk memantau realisasi APBN dan permasalahan yang mungkin timbul dan dapat menghambat realisasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menciptakan inovasi aplikasi online e-monev yang diupdate tiap bulan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2.2. APBN pada Proyek Infrastruktur di K/L

Proyek infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dengan menggunakan dana APBN diantaranya yaitu:

Tabel 3.24
Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027

No	Rincian Output (RO)	Keterangan	Lokasi (Kab/Kota)	Volume	Satuan	Pendanaan	Indikasi K/L	OPD
1	009 - Pembangunan SPAM	Pembangunan SPAM Air Sugihan, Kab. OKI	Kab. Ogan Komering Ilir	60	Literdetik	89.884.800.000	145 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dinas Perkim
2	019 - Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR	BSPS Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 14,704 Unit	Kab. Muba, OKU, Muara Enim, Lahat, Mura, Banyuasin, OKUS, OI, PALI, Kota Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau	14.704	Unit	294.080.000.000	146 - KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkim
3	003 - Pendayagunaan Dokter Spesialis	Pembinaan Dokter Internship	Provinsi Sumatera Selatan	7	Orang	1.680.000.000	024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
4	491 - SMA yang Direvitalisasi	1. SMA Negeri 11 Palembang (10 RKB) (Rp. 5.000.000.000) 2. SMA 1 Banyuasin 3 (4 Paket toilet) (Rp. 550.000.000) 3. SMA 1 Kikim tengah (1 Lab. Biologi) (Rp. 489.000.000)	Kab. Lahat, Kab. Banyuasin dan Kota Palembang	3	Lembaga	6.039.000.000	138 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

Sumber: Hasil Pembahasan Desk Tematik Musrenbangnas, 2025

3.3.3. Pendanaan Alternatif Lainnya

Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan yanitu dengan melakukan pengembangan instrument pembiayaan pembangunan daerah, yaitu untuk membiayai proyek-proyek infratsruktur dengan mekanisme KPBU/Sawasta, maupun pembiayaan utang daerah dengan obligasi/ sukuk daerah. KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dari website [http.kpbu.kemenkeu.go.id](http://kpbu.kemenkeu.go.id) proyek pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang didanai dengan

skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan

KPBU	Sektor	Nama	Kabupaten	Status
1	Sumber Daya Air & Irigasi	Optimalisasi Saluran Irigasi Komering	Ogan Komering Ulu Timur	Penyiapan
2	Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan termasuk bio energi	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dengan Skema KPBU Kota Palembang	Palembang	Penyiapan
3	Jalan	Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Operasi

Sumber: <http://kpbu.kemenkeu.go.id>

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD dalam rangka merumuskan sasaran dan prioritas serta target yang akan dicapai.

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*", maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, RKP 2027, Program Strategis Nasional Tahun 2027, serta pedoman penyusunan RKPD 2027.

Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2027 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 juga melihat capaian pembangunan tahun 2025 yang lalu sebagai *baseline*/dasar perencanaan ke depan yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara

optimal, serta memperhatikan isu strategis yang akan dihadapi di tahun 2027.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan, optimalisasi kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan dan sektor unggulan, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Sumatera Selatan. Hal ini karena selain isu tersebut menjadi atensi publik, bukan hanya di Sumatera Selatan dan nasional, juga karena masih terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, merupakan implementasi dari tahun ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai penjabaran dari periode pertama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah lanjutan dalam mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2027, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas				
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,560-0,570*
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,49
		3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,66 - 69,67
	1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,36 - 9,38
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97-13,00
		3. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	% %	11,76–14,70 2,94 – 8,82
		4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	% %	100,00 68,10
		5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59
		6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74,00
	1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,94
		2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,90
	1.3 Meningkatkan Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,34
	1.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,441
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,07-94,18
		3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,00

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat				
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah		1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5 – 6,3*
		2. PDRB per Kapita	Rp (Juta)	88,7 – 94,6*
		3. Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,1*
		4. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	1,43
		5. Indeks Entropy Theil	Indeks	1,24
		6. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52
	2.1 Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,95
		2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,330
		3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,20
	2.2 Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,23
		2. Persentase Pertumbuhan Investasi	Nilai	7,70
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,06
		4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,89
		5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	6,88
		6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,64
	2.3 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
		2. Inklusi Keuangan	%	95,4
		3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,79
Prioritas Daerah 3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru				
3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air		1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,05
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	23,79
	3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,08
		2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	24,30
		3. Rasio Elektrifikasi	%	100
		4. Persentase Desa Berlistrik	%	100
		5. Kapasitas air baku	m3/detik	2,69
		6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,74

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	3.2 Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20,03
		2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,17
		3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,44
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,70
		2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	76,42
		3. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,473
	4.1 Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Persentas Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	20,52
		2. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	39,97
Prioritas Daerah 4: Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
5. Meningkatkan Kualitas Konektivitas Daerah		Rasio Konektivitas	%	0,685
	5.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1. Waktu Tempuh Jalan Provinsi	jam/100 km	2,50
		2. V/C Rasio Jalan	Rasio	0,385
		3. Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	%	72,00
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat		Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	45,62
	6.1 Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	1. Akses Air Minum Layak	%	92,76
		2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	84,32
		3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	40,50
	6.2 Meningkatnya Hunian dan Permukiman yang Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	69,60
7. Meningkatkan Pengelolaan Bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,14
	7.1 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41

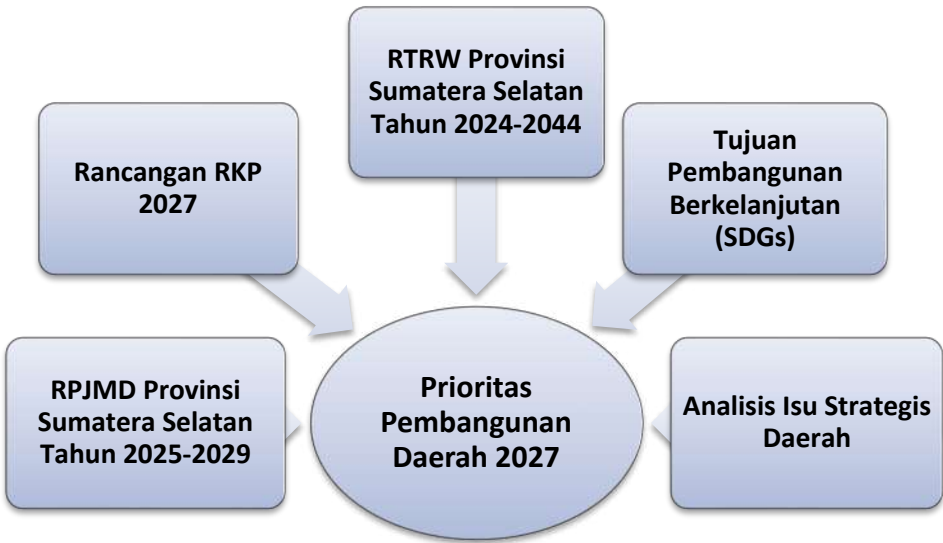
Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan				
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan	%	8,24 - 9,24*
		2. Rasio Gini	Indeks	0,298 - 0,305*
	8.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,45 - 3,54*
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,85
		3. Rasio Kewirausahaan	%	2,65
		4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,42
	8.2 Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial	1. Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,11
		2. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,52
Prioritas Daerah 6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas				
9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (77-78)
	9.1 Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	1. Nilai SAKIP	Indeks	BB (79,33)
		2. Opini BPK	Indeks	WTP
		3. Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,041
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,09 (Sedang)
		5. Indeks Integritas Daerah	Indeks	77,6
	9.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,70)
		2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,26
Prioritas Daerah 7: Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya Dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal				
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial		Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	Indeks	6,70
	10.1 Menguatnya Ketentraman di Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78,35
		2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	72,56
	10.2 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,91

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Keterangan: *Target indikator disesuaikan dengan target kewilayahan untuk Provinsi Sumatera Selatan pada Rancangan RKP 2027

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, telaah RKP Tahun 2027, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah sesuai gambar berikut.



Gambar 4.1.
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKPD tahun 2027, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:



Gambar 4.2.
Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2027

Dengan mempertimbangkan arahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, yaitu :

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Penetapan Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 tersebut disusun dengan mempertimbangkan dan menelaah beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4.2.1.1. Telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 dijabarkan dan dituangkan menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kamajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera

Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Selain Visi dan Misi di atas terdapat 12 (dua belas) program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan setiap Misi yang merupakan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Keterkaitan Misi, Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2027

No	Misi	12 Program Strategis HDCU	Prioritas Daerah RKPD 2027
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.	PS 2: Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) - Bebas Iuran BPJS untuk Kelas 3 dengan Berkat Plus - Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien - Meningkatkan Layanan Primer Kesehatan dengan Memperluas Ketersediaan Dokter Keluarga - Insentif Nakes Terutama di Daerah Terpencil - Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional - Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi Puskesmas PS 4: Pendidikan Yang Berkeadilan - Melanjutkan Program Sekolah yang Berkualitas dan Berkeadilan - Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan dan Mendorong Kurikulum Bermuatan Lokal - Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru- Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi Siswa Berprestasi - Melanjutkan Program Literasi Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PS 11: Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Program Makan Siang Gratis. - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Peningkatan Prestasi Akademik- Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga - Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal- Penguatan Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas	PD 1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas

No	Misi	12 Program Strategis HDCU	Prioritas Daerah RKPD 2027
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat PS 9: Sumsel Wonderfull 2030 - Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism) dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run, Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar lainnya. - Meningkatkan Wisata Kuliner (Food Tourism) dengan cara mempromosikan dan menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di Sumatera Selatan. - Meningkatkan Wisata Budaya (Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. - Membangun Wisata Kesehatan (<i>Health Tourism</i>) PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem	PD 2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
3	Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya	PD 3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Misi	12 Program Strategis HDCU	Prioritas Daerah RKPD 2027
4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata - Mempertahankan Sumatera Selatan pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia - Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) PS 6: Sumsel Interkoneksi - Melanjutkan Konektifitas Antar Daerah - Penyediaan Internet Desa, Terutama bagi Daerah yang Masih Blank Spot - Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik - Menggalakan Program Listrik Masuk Sawah - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Pertahun	PD 4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
5	Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya PS 7: 100.000 Sultan Muda Sumsel - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Per tahun - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Memperbanyak Pelatihan Skill - Meningkatkan Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan.	PD 5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

No	Misi	12 Program Strategis HDCU	Prioritas Daerah RKPD 2027
		PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem	
6	Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani - Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani. - Mengembangkan Meritokrasi, dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. - Menerapkan Sistem Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM. - Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi.	PD 6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
7	Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi	PS 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya - Melanjutkan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz - Mempermudah Pendirian Rumah-Rumah Ibadah di Daerah Sumatera Selatan - Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) - Meningkatkan Upaya Program Moderasi Umat Beragama	PD 7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

No	Misi	12 Program Strategis HDCU	Prioritas Daerah RKPD 2027
	pada kearifan lokal.	- Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Sumatera Selatan - Meningkatkan pendidikan agama, dan mengembangkan toleransi beragama. - Melaksanakan Program Rumah Layak Huni - Mendirikan ISBI Sumsel, membangun Taman Seni Budaya, Melestarikan Aksara Ulu, dan Memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal	

Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi di atas dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang disertai indikator dan target setiap tahunnya seperti yang telah disajikan pada Tabel 4.1 pada Subbab 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di atas.

Arah Kebijakan Pembangunan

Setiap misi dirumuskan menjadi arah kebijakan pembangunan untuk setiap tahunnya. Adapun sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 untuk tahun 2027 dan tema beserta Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2027 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.3.

Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2027 dan Tema serta Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2027	Tema RKPD Tahun 2027	Prioritas RKPD Tahun 2027
• Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan • Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan • Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum dan sarana-prasarana pendidikan • Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional • Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	“Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Melalui Penguatan SDM Unggul, Kemudahan Investasi Dan Industrialisasi serta Didukung Infrastruktur yang Handal”	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
• Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani • Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM • Peningkatan Kemudahan Berinvestasi • Meningkatkan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri • Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah • Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis • Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) • Optimalisasi upaya Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
• Peningkatan Ketersediaan Pangan • Peningkatan Keterjangkauan Pangan • Peningkatan Pemanfaatan Pangan • Peningkatan Ketersediaan Energi • Peningkatan Aksesibilitas Energi • Peningkatan Keterjangkauan Energi • Peningkatan Konservasi Sumberdaya Air • Peningkatan Pendayagunaan Air • Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi • Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir • Peningkatan Daya Saing Produk Hilir • Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir • Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mendukung pembanguna yang berkelanjutan		PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2027	Tema RKPD Tahun 2027	Prioritas RKPD Tahun 2027
• Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan • Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat • Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan Daerah		PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
• Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja • Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan • Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting		PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
• Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik • Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi		PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
• Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan • Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal		PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, diolah

4.2.1.2. Telaah RKP Tahun 2027

Tema Pembangunan

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan substansi RPJMN Tahun 2025-2029 tahun ketiga (tahun 2027), Direktif Presiden, evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, kerangka ekonomi makro, serta kondisi dan isu strategis baik domestik maupun global. Kedudukan RKP Tahun 2027 menjadi penting karena memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah

dilaksanakan di dua tahun pertama sekaligus mengakselerasi ketercapaian sasaran jangka menengah di dua tahun selanjutnya sebagai akhir periode pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui intervensi pada tiga faktor penggerak utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri yang dipandang sebagai tiga pilar utama yang paling menentukan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan berkualitas. Untuk itu, tema RKP Tahun 2027 yang ditetapkan yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**.

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai dan tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2027 berlandaskan pada Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun sasaran pembangunan nasional pada Rancangan RKP 2027, baik untuk nasional maupun sasaran kewilayahan untuk Provinsi Sumatera Selatan, serta penyelarasannya dengan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2027

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2027	Target Sumatera Selatan pada RKP 2027	Target Sumatera Selatan pada RKPD 2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9 – 7,50	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3
PDRB per Kapita (Rp Juta)	US\$ 5.900-5.990 (GNI per Capita)	88,7 - 94,6	88,7 - 94,6
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	3,1	3,1
Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 6,50	8,24 – 9,24	8,24 – 9,24
Kemiskinan Ekstrem (%)	0	-	0,11
Rasio Gini	0,362 – 0,367	0,298 – 0,305	0,298 – 0,305
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,575	0,560 – 0,570	0,56 – 0,57
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	39,57	-	65,48-68,68
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84	-	76,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 – 4,87	3,45 – 3,54	3,45 – 3,54

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2027, diolah

Sasaran pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 telah selaras dengan sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2027 untuk Provinsi Sumatera Selatan.

Prioritas Nasional

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2027 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3.
Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2027

Keterkaitan Prioritas Nasional pada RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
 Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD
 Tahun 2027

PRIORITAS NASIONAL RKP 2027	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2027
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2027	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2027
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Sumber: Rancangan RKP 2027, diolah

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, masing-masing PN memiliki sasaran pembangunan. Adapun sasaran pembangunan dari setiap PN yang disandingkan dengan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang merujuk pada Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Sandingan Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional
RKP Tahun 2027 dengan Indikator Sasaran Pembangunan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPDP Tahun 2027
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia ^{b)}
Indeks HAM	Persentase Capaian Aksi HAM ^{b)}
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	Indeks Daya Saing Daerah ^{a)}
Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	Indeks Entropi Theil ^{a)}
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
<i>Global Cybersecurity Index</i>	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ^{b)}
Indeks Keamanan Laut Nasional	-
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ^{b)}
Indeks Ketahanan Energi	- Konsumsi Listrik per Kapita ^{b)} - Intensitas Energi Primer ^{b)}
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Porsi EBT dalam bauran energi primer
Indeks Ketahanan Air Nasional	Kapasitas air baku
Kapasitas tampungan air	
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman ^{b)}
Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	- Jumlah Produk Tersertifikasi Halal ^{b)} - Aset Perbankan Syariah/PDRB ^{b)} - Indeks Zakat Nasional ^{b)}

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027
<i>Indonesia Blue Economy Index</i> (IBEI)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ^{a)}
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah ^{a)}
Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)^{b)} - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)^{b)}
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	
Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ^{a)}
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ^{a)}
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	
Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	- Rasio Konektivitas - Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan
Total Aset Sektor Keuangan/PDB	Aset Dana Pensiun/PDRB ^{b)}
Aset Perbankan/PDB	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ^{b)}
Aset Dana Pensiun/PDB	Aset Dana Pensiun/PDRB ^{b)}
Aset Asuransi/PDB	-
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi ^{b)}
Total Kredit/PDB	Total Kredit/PDRB ^{b)}
Inklusi Keuangan	Inklusi Keuangan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ^{b)}
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027
Rasio Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan
Rasio PDB Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman
Devisa Pariwisata	
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif ^{b)}
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
Harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah
Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ^{b)}
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ^{b)}
Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) Per wanita usia subur 15-49 Tahun ^{b)}
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{b)}
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)^{b)} - Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)^{b)}
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ^{b)}
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ^{a)}
Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti ^{b)}
Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti ^{b)}
Peringkat Indeks Inovasi Global	Indeks Kapabilitas Inovasi ^{b)}
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Indeks Inovasi Daerah ^{b)}
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ^{b)}
Peringkat pada Asian Games	Indeks Pembangunan Olahraga ^{b)}
Peringkat pada Asian Para Games	
Peringkat pada ASEAN Para Games	
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
Rasio PDB Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Biaya Logistik (% PDB)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan ^{a)}
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persentase Kemiskinan Ekstrem
Proporsi Penduduk Kelas Menengah	PDRB per Kapita ^{a)}
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ^{b)}
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ^{b)}
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Persentase desa mandiri	Persentase desa mandiri ^{b)}
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional ^{a)}
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Indeks Pembangunan Hukum	- Persentase Penegakan Perda ^{b)} - Persentase Capaian Aksi HAM ^{b)}
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Integritas Daerah
Indeks Integritas Partai Politik	
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi ^{a)}
Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	-
<i>Return on Asset (RoA) BUMN</i>	<i>Return on Asset (RoA) BUMD^{b)}</i>
Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	- Indeks Kapasitas Fiskal Daerah - <i>Revenue Mobilization</i> Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD ^{b)}
Rasio Perpajakan terhadap PDB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ^{b)}
Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2027	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan) ^{a)}
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan ^{b)}
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	Indeks Risiko Bencana ^{a)}

Keterangan: ^{a)}Indikator tingkat Tujuan;
^{b)}Indikator tingkat Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKPD Tahun 2027 diharapkan berkontribusi dalam mendukung Asta Cita/Prioritas Nasional. Adapun dukungan Program Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2027 terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional pada RKP 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.

Dukungan Program Daerah RKPD 2027 terhadap Asta Cita, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Nasional pada RKP 2027

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
Asta Cita 1/PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
PPN 1.1. : Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 1.2. : Penguatan Komunikasi Publik dan Media	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)
PPN 1.3. : Penguatan Lembaga Demokrasi	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
PPN 1.4. : Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
PPN 1.5. : Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia	
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) - Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Asta Cita 2/PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PPN 2.1. : Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
PPN 2.2. : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
PPN 2.3. : Swasembada Pangan	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	- Produksi Tanaman Pangan - Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B - Luas Lahan Siap Tanam Padi
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	- Persentase Penanganan Bencana Pertanian - Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian - Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program penyuluhan pertanian	- Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan - Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis - Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan
Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
PPN 2.4. : Swasembada Energi	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi
PPN 2.5. : Swasembada Air	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Debit air baku yang dihasilkan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai
PPN 2.6. : Ekonomi Syariah	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
PPN 2.7. : Ekonomi Digital	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 2.8. : Ekosistem Ekonomi Sirkular	
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
PPN 2.9. : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
PPN 2.10. : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
PPN 2.11. : Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	'Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
PPN 2.12. : Pembangunan Rendah Karbon	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
PPN 2.13. : Pekerjaan Hijau/Green Jobs	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
PPN 2.14. : Pengelolaan Hutan Lestari	
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	- Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	- Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
PPN 2.15. : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut
Asta Cita 3/PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
PPN 3.1. : Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani
Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut
PPN 3.2. : Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	- Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Rasio Elektrifikasi
PPN 3.3. : Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
PPN 3.4. : Pendalaman Sektor Keuangan	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
PPN 3.5. : Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	
Program Pemasaran Pariwisata	- Jumlah wisatawan mancanegara - Jumlah wisatawan nusantara
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	- Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan - Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
PPN 3.6. : Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Asta Cita 4/PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
PPN 4.1. : Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
PPN 4.2. : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Pengembangan Kurikulum	- Jumlah pengembangan Kurikulum - Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
PPN 4.3. : Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase PTK berkualifikasi S-1 - Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik
PPN 4.4. : Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
PPN 4.5. : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Riset dan Inovasi Daerah	- Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
PPN 4.6. : Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	- Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
PPN 4.7. : Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Riset dan Inovasi Daerah	- Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
PPN 4.8. : Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas
PPN 4.9. : Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	
Program Riset dan Inovasi Daerah	- Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
PPN 4.10. : Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif - Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan
PPN 4.11. : Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
PPN 4.12. : Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif - Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan
PPN 4.13. : Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
PPN 4.14. : Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
PPN 4.15. : Peningkatan Ketangguhan Keluarga	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
PPN 4.16. : Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
PPN 4.17. : Peningkatan Kualitas Pemuda	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda
PPN 4.18. : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) - Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan
PPN 4.19. : Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
PPN 4.20. : Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	
Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas
PPN 4.21. : Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	
Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas
Asta Cita 5/PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PPN 5.1. : Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB - Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
PPN 5.2. : Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
PPN 5.3. : Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
PPN 5.4. : Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang
Asta Cita 6/PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
PPN 6.1. : Penguatan Perencanaan Berbasis Bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayan - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
PPN 6.2. : Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya
Program Pemberdayaan Sosial	- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Program Rehabilitasi Sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
PPN 6.3. : Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 6.4. : Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
Program Pengembangan Perumahan	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Asta Cita 7/PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PPN 7.1. : Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Program Pendaftaran Penduduk	- Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Program Pencatatan Sipil	- Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan - Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	- Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	- Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
PPN 7.2. : Reformasi Hukum	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	- Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
PPN 7.3. : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah - Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
PPN 7.4. : Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
PPN 7.5. : Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	
Program Kepegawaian Daerah	- Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi - Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya - Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
PPN 7.6. : Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	- Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi - Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis - Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan
Program Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Efektivitas Kerjasama Daerah - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
PPN 7.7. : Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Efektivitas Kerjasama Daerah - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
PPN 7.8. : Pemerintah Digital	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah - Indeks SPBE - Indeks Pemdi.
PPN 7.9. : Peningkatan Produktivitas BUMN/BUMD	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
PPN 7.10. : Optimalisasi Pendapatan Negara	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD - Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan - Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
PPN 7.11. : Optimalisasi Belanja Negara	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penerimaan Dana Transfer - Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD - Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur - Persentase Penurunan SILPA - Persentase laporan keuangan tepat waktu

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
PPN 7.12. : Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD - Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan - Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
PPN 7.13. : Pengendalian Inflasi	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Asta Cita 8/PN 8: Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
PPN 8.1. : Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Masalah	
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 8.2. : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	
Program pengembangan kebudayaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan - Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan - Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Asta Cita/Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2027/ Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027	Indikator Program
	- Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	- Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni - Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
PPN 8.3. : Pembangunan Berketahanan Iklim	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Air Laut
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Persentase penanganan bencana pertanian - Persentase penanganan DPI terhadap pertanian - Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
PPN 8.4. : Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	
Program Penanggulangan Bencana	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana - Persentase Penanganan Pasca Bencana - Persentase Penanganan Pra Bencana
Program Penanganan Bencana	- Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran - Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Persentase penanganan bencana pertanian - Persentase penanganan DPI terhadap pertanian - Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026 sampai Perpres RKP 2027 terbit.

4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;

- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, kawasan strategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
3. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
4. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sudut kepentingan terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

• Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

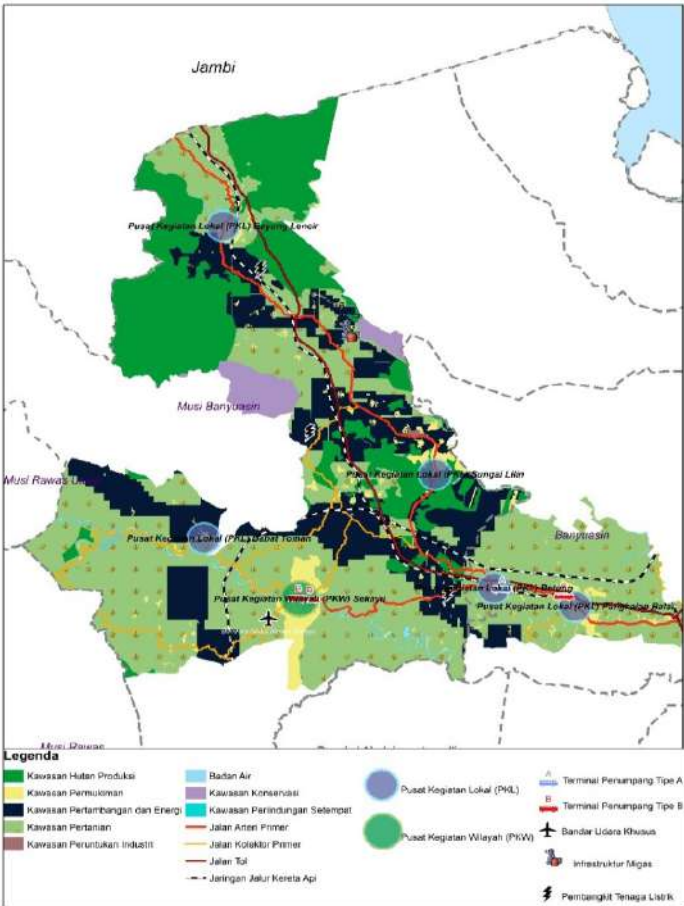
1. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya;
3. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya;

4. KPS Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
5. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya.

A. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 wilayah administrasi kabupaten yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
2. Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 4.4 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

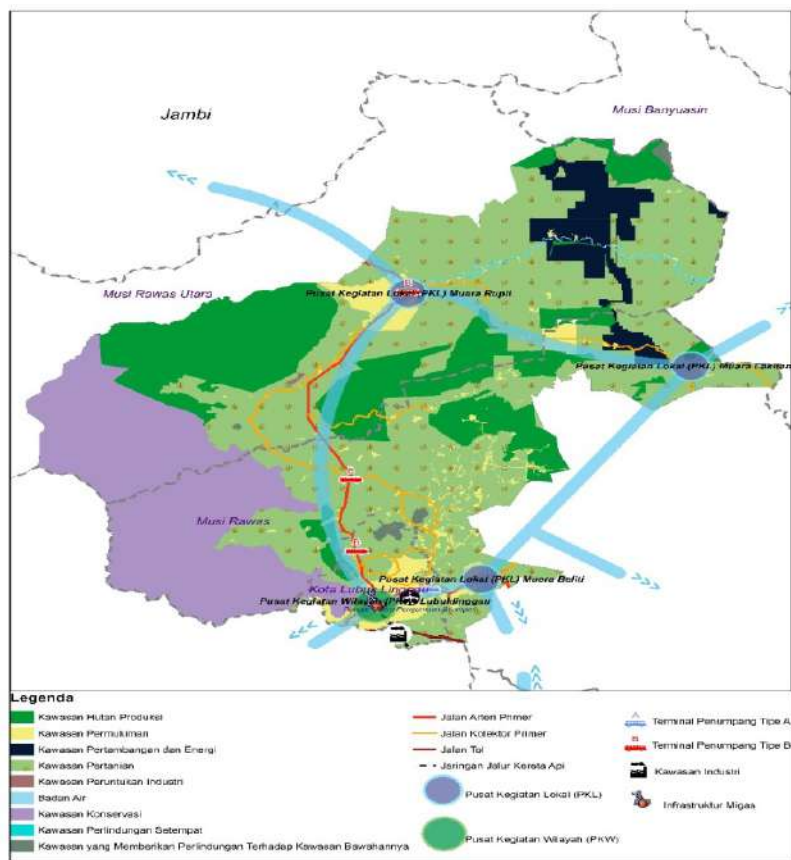
Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PKW di sekitarnya;
- b. pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

B. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya

Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
3. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 4.5 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

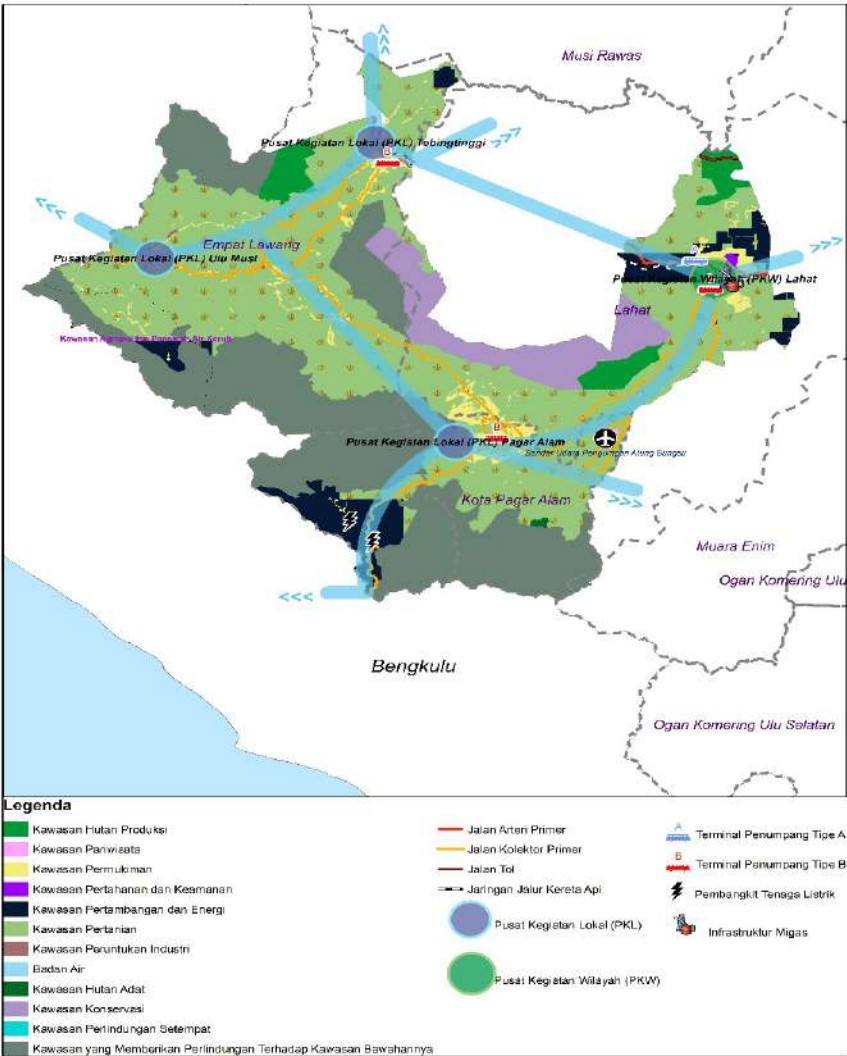
- pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas;
- pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;

- g. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- h. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- i. peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

C. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.



Gambar 4.6 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

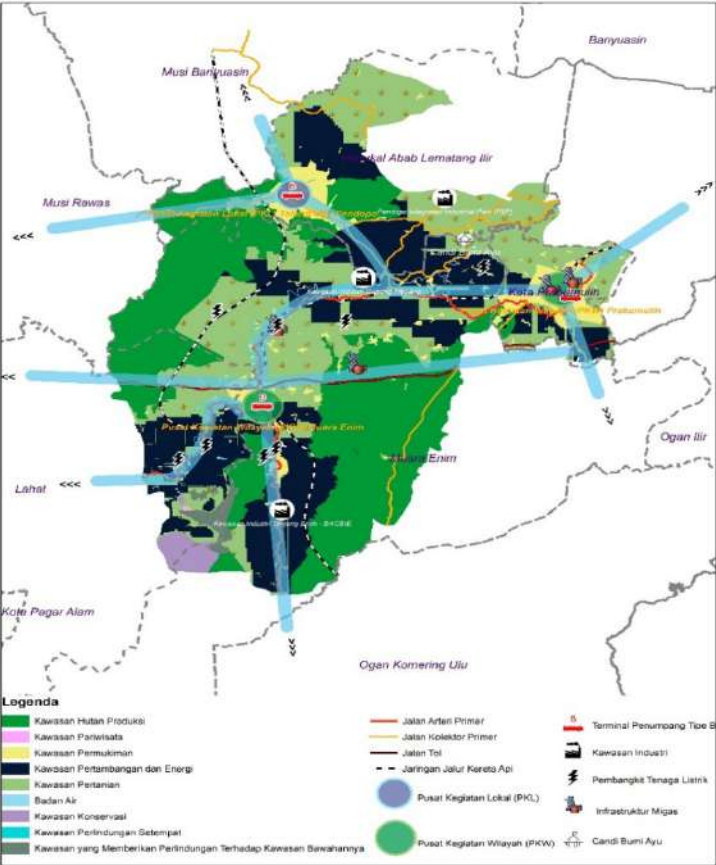
- pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
- pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;

- d. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- g. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

D. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi 4 wilayah administrasi yaitu:

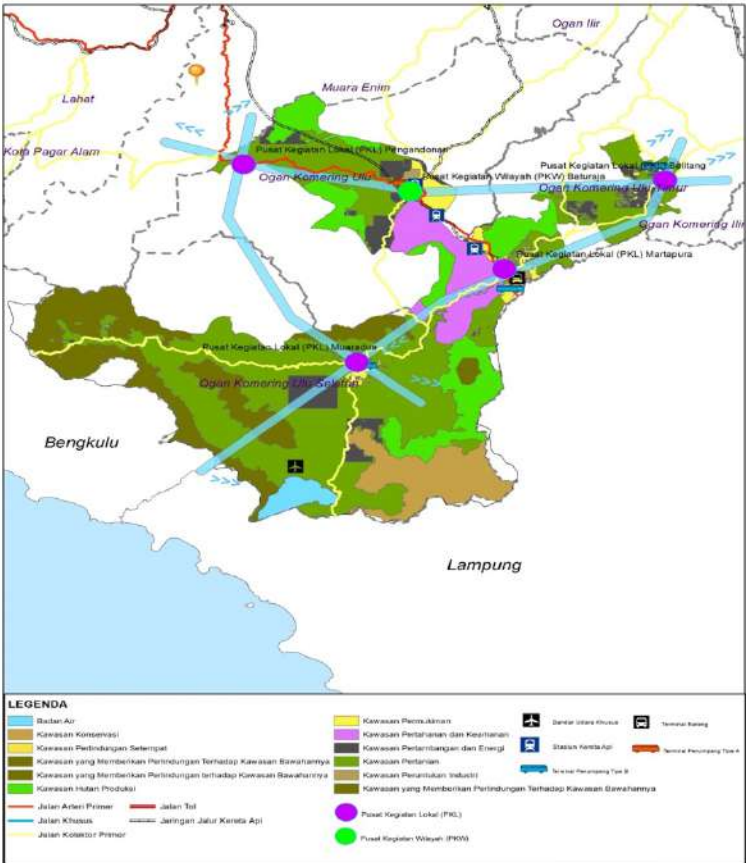
- 1. Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- 2. Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- 3. Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- 4. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.



Gambar 4.7 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

E. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya



Gambar 4.8 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau;
- c. pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten OKU Timur;
- d. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e. pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa

pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata

- f. pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- g. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung; dan
- k. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Air Sugihan) dan Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Salek).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- e. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. melindungi kawasan pesisir dan pantai;
- i. menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir;
- j. peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang merata, inklusif, dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjamin kesejahteraan bagi generasi sekarang dan masa depan. Untuk itu, pada tahun 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Sustainable Developments Goals* (TPB/SDGs). SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". Tujuan ini diharapkan

dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat global, nasional, dan daerah.



Gambar 4.9.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sumber : Seknas SDGs, diolah

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya-upaya yang memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat berjalan seiring dengan visi pembangunan daerah serta kebutuhan dan tantangan lokal yang ada. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (*Green Growth South Sumatra*) merupakan rangkaian upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, terdapat 249 indikator yang harus dicapai pada TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebanyak 98 indikator pada Pilar Pembangunan Sosial, 59 indikator pada Pilar Pembangunan Ekonomi, 69 indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan dan 23 indikator pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.



Gambar 4.10
 Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, diolah

Gambaran umum capaian TPB/SDGs Sumatera Selatan berdasarkan laporan RAD SDGs terakhir diketahui bahwa dari 249 total indikator yang ada, sebanyak 131 indikator atau 52,21 persen yang dilaksanakan tercapai, 57 indikator atau 22,89 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik dan 62 indikator atau 24,90 persen yang dilaksanakan mengalami perubahan negatif atau perlu perhatian khusus/tidak tersedia data.

Memperhatikan analisis terhadap masing-masing capaian SDGs, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian SDGs yang dibagi dalam empat pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Rumusan isu strategis merupakan capaian SDGs dalam kelompok yang belum mencapai target dan yang belum memiliki data. Sedangkan untuk indikator SDGs yang telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun.

Tabel 4.6.
 Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan	Persentase Penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) di	Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
segala bentuk kemiskinan	Sumatera Selatan masih diatas rata-rata nasional; • Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan Komponen pembentuk GK yang memiliki peranan terbesar dibandingkan non makanan;	khususnya wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan yang tinggi; • Diperlukan intensifikasi terhadap strategi pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya komponen makanan melalui Bantuan Sosial;
	• Komoditas sumbangan terbesar pada GK baik perkotaan maupun perdesaan pada beras dan rokok.	• Perlunya dilakukan pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk miskin serta membudayakan prilaku hidup sehat.
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. • Prevalensi Stunting masih cukup tinggi dan adanya ketidakseimbangan dalam pencegahan stunting, terutama di daerah tertentu yang justru mengalami peningkatan angka stunting • Pola konsumsi pangan masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras sebagai komoditas utama dan konsumsi pangan penting lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan masih rendah	• Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam peningkatan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi; • Kampanye edukasi yang intensif mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola asuh yang baik. • Program subsidi pangan atau pemberian bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah perlu diperluas untuk meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan bergizi.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Jumlah kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi - Meningkatnya persentase penyalahgunaan narkoba - Meningkatnya Angka kelahiran pada Perempuan usia 15-19 tahun dan masih relative tinggi	- Menurunkan AKI dan AKB melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi Ibu dan remaja putri; - Peningkatan kesehatan masyarakat disetiap siklus hidup melalui peningkatan mutu posyandu aktif
		- Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif pemberdayaan masyarakat sehat melalui GERMAS - Peningkatan strategi yang komprehensif dan terpadu dalam pembinaan ketahanan remaja dan Pembangunan keluarga
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat masih kurang - Persentase Harapan Lama sekolah masih lebih rendah menunjukkan bahwa banyak individu belum menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi - Persentase guru sekolah dan PLB yang bersertifikat pendidik masih kecil	- Meningkatkan akses dan layanan pendidikan - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan - Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, distribusi pendidik yang merata - Pemerataan pendidikan baik di daerah maupun di perkotaan karena masih terdapat kesenjangan pendidikan baik di kota maupun di desa - Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua	- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang tinggi - Masih adanya praktik perkawinan dini yang	Memperluas Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
perempuan dan anak perempuan	dapat berdampak pada kesehatan reproduksi Jumlah perempuan yang menduduki posisi managerial, keterlibatan perempuan dalam politik dan sosial masih terbatas	masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat - Memperkuat peran perempuan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif. - Melakukan sosialisasi terkait resiko perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	- Kebutuhan dan Konsumsi listrik terus meningkat; - Sumber energi masih bergantung pada Sumber Energi Fosil, belum ada bauran energi terbarukan.	- Menambah ketersediaan energi listrik untuk masyarakat, terutama di daerah terpencil (pesisir, pegunungan, perbatasan) melalui Pembangkit Listrik Berbasis EBT; - Optimalisasi penyediaan energi melalui alternatif energi non batubara/fosil dalam mendukung terwujud Energi Baru Terbarukan di Tahun 2060.
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	- Pertumbuhan ekonomi masih dibawah nasional; - PDRB daerah masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan; - Tenaga kerja formal masih rendah dibandingkan tenaga kerja informal; - TPT diwilayah perkotaan masih tinggi;	- Mengurangi hambatan investasi - Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi - Penguatan Sektor Kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada Investor. - Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita cenderung menurun; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur meningkat namun lambat.	• Meningkatkan kondisi jalan mantap; • Pengembangan Kawasan industri dan Pelabuhan New Port Palembang; dan • Kemudahan dalam berinvestasi melalui Mall pelayanan publik dan Legalisasi Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; • Peningkatan jumlah pekerja kelompok menengah bawah pada sektor formal melalui penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. • Pemerataan pembangunan yang berfokus pada proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah • Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang merubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penghasil secara langsung dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan	• Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	• Mengoptimalkan penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulannya,

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Sumatera Selatan	- Meningkatkan kesadaran wajib pajak, - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5 persen,
	- Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN. - Pertumbuhan ekspor produk non migas.	- Perlunya peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN - Perlunya upaya peningkatan ekspor khususnya produk non migas
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak masih berada di bawah capaian - Persentase masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses fasilitas BAB masih rendah	- Memanfaatkan dana pihak ketiga terutama CSR dalam membangun infrastruktur dasar sanitasi - Membangun kerjasama dengan swasta, masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur dasar sanitasi
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumsel masih tinggi; - Sampah perkotaan yang tertangani masih sedikit; - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masih tinggi;	- Perlu upaya kolaborasi dan terintegrasi berupa kajian dan peta resiko bencana, pembangunan basis data bencana dan perubahan iklim, menindak upaya-upaya yang berdampak pada pencemaran udara, meningkatkan kualitas air sungai dan danau serta pengendalian karhutla. - Pengelolaan sampah terpadu. - Emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, penanganan karhutla, dan persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau masih perlu mendapat perhatian khusus ke depannya.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah Perusahaan Peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru masih rendah; • Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister masih belum terlaksana	• Mendorong seluruh pelaku usaha besar untuk melaksanakan Program Proper • Mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan tindak hanya melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga di fasilitas publik • Peningkatan mutu dan kualitas Pelayanan Publik
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	• Penurunan jumlah hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan; • Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;	• Pemberian edukasi dan penegakan hukum untuk pembukaan lahan dengan bakar dan pengeringan lahan gambut; • Memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang; • Meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sarana kedaruratan untuk MPA dalam penanganan kebakaran;
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	• Jumlah luasan kawasan konservasi laut • Rehabilitasi mangrove • Jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)	• Meningkatkan status kawasan konservasi dari Pencadangan ke Penetapan • Penanaman mangrove (Konservasi spesies yang terancam punah, lokal dan bernilai ekonomi tinggi) • Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,	• Masih rendahnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan • Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan masih belum mencapai target	• Mengidentifikasi dan pemetaan lahan kritis • Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar;

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	• Meningkatkan jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi. • Meningkatkan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup di pengadilan.	• Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi; • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati.
Pilar Lingkungan		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang kokoh	• Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah. • Belum optimalnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. • Belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	• Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan; dan • Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik.

Upaya menjaga kelestarian alam melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi karbon telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, isu deforestasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Namun, beberapa tantangan besar tetap harus menjadi fokus perhatian ke depan, yaitu:

1. Ketimpangan Pembangunan: Meskipun ada kemajuan, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai layanan dasar;

2. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Meningkatkan infrastruktur dasar seperti akses jalan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan perlu terus diupayakan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang;
3. Tantangan Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang semakin nyata memerlukan tindakan lebih konkret untuk mengurangi dampaknya, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian SDGs di tahun mendatang:

1. Kolaborasi yang Lebih Kuat, Pencapaian SDGs yang lebih cepat dan merata hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini harus lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam berbagai program Pembangunan;
2. Peningkatan Infrastruktur di Daerah Tertinggal, Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, termasuk akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Ini penting agar ketimpangan pembangunan dapat dikurangi dan masyarakat lebih merasakan manfaat dari Pembangunan;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, Teknologi digital dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada bukti;
4. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan, Untuk mencapai SDG yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan yang layak, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasional, dan pelatihan kerja untuk memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif;
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Program pemberdayaan yang berbasis pada pengelolaan alam secara berkelanjutan akan membantu mewujudkan SDG yang berfokus pada kelestarian lingkungan.

4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran diarahkan untuk selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Sumber Daya Manusia
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas sekolah, ruang praktik siswa, ruang laboratorium, mebel sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah lainnya.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan sehingga perlunya pengembangan rumah sakit mengenai ruangan UGD, penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kurang mampu yang tempat tinggalnya jauh dan berada di luar kota, akses jalan menuju RS, dan penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti.
 - c. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga seperti pengembangan kegiatan olahraga serta bantuan berupa peralatan dan perlengkapan olahraga.
 - d. Kurangnya daya saing pemuda sehingga diperlukan sarana dan prasaran karang taruna.
2. Permasalahan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian seperti bantuan bibit, benih, pupuk, obat-obatan/herbisida/insektisida, rehabilitasi jalan produksi, dan alat mesin pertanian diantaranya traktor, *combine harvester*, dan *heller* penggilingan kopi.
 - b. Kurangnya sarana perkebunan seperti bantuan bibit.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan seperti bantuan bibit ternak diantaranya sapi, kambing, domba, kerbau, bebek, dan ayam.
 - d. Kurangnya bibit perikanan termasuk bantuan pakan dan kolam.
 - e. Jaringan irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak sehingga perlunya pembangunan/perbaikan irigasi.

- f. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan seperti bantuan peralatan dan bahan produksi.
- 3. Permasalahan Pangan, Energi, Air

Salah satu permasalahan yang ada yaitu kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan seperti bantuan listrik masuk sawah.
- 4. Permasalahan Infrastruktur, Pelayanan Dasar, dan Lingkungan
 - a. Kurangnya akses infrastruktur jalan seperti perlunya pembangunan/perbaikan/peningkatan jalan.
 - b. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sehingga perlunya peningkatan upaya untuk mengurangi kemacetan.
 - c. Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman seperti pembangunan talud embung dan saluran air.
 - d. Kurangnya akses air minum/air bersih sehingga perlunya penyediaan air bersih melalui pembuatan sumur bor dan alat pompa air lainnya.
 - e. Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang salah satunya dapat mengakibatkan banjir sehingga perlu pembuatan/perbaikan siring/gorong-gorong, talang air, kolam retensi, dan lainnya.
 - f. Tingginya potensi bencana banjir sehingga perlunya pembuatan tembok embung.
- 5. Permasalahan Kemiskinan dan Lapangan Kerja
 - a. Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial seperti masih terdapat kendala dalam pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
 - b. Belum optimalnya kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu.
- 6. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti kondisi bangunan yang tidak layak dan perlu rehabilitasi.
- 7. Permasalahan Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya
 - a. Minimnya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah.

Seluruh permasalahan dari pokok-pokok pikiran tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027
➤ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan ➤ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga ➤ Kurangnya daya saing pemuda	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
➤ Kurangnya sarana dan prasarana pertanian ➤ Kurangnya sarana perkebunan ➤ Kurangnya sarana dan prasarana peternakan ➤ Kurangnya bibit perikanan ➤ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➤ Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
➤ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
➤ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➤ Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ➤ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➤ Kurangnya akses air minum/air bersih ➤ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➤ Tingginya potensi bencana banjir	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027
➤ Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial ➤ Belum optimalnya kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
➤ Kurangnya sarana dan prasarana kantor	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
➤ Minimnya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis didasarkan pada permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun 2025 dalam RPJMD dan RKPD, arah kebijakan RPJMD, arah kebijakan Rancangan RKP Tahun 2027 (dalam hal ini untuk sementara waktu merujuk pada Rancangan RKP Tahun 2026 sembari menunggu terbitnya Rancangan RKP Tahun 2027), RPJPD, serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Bab II buku RKPD ini. Berdasarkan perumusan tersebut, terdapat 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;

7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial;

Seluruh isu strategis tersebut dilakukan penelaahan dan dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun konsistensi antara isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2027 dengan Isu Strategis Tahun 2027

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD 2027
- Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
- Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
- Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal	
- Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal	
- Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
- Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	
- Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2027 dilaksanakan melalui program/kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kriteria :

1. Memenuhi kriteria Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
2. Mendukung dan sinergi dengan target sasaran dalam RPJMD 2025-2029
3. Menjawab isu-isu strategis yang faktual dan mendasar serta mengatasi masalah-masalah sebagaimana yang direkomendasikan;
4. Merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Sesuai dengan ketersediaan dan prioritas anggaran.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pengembangan wilayah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi-misi serta program prioritas daerah guna mencapai target pembangunan daerah. Pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 mengacu pada berbagai pedoman perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, proyek strategis nasional yang berlangsung di Sumatera Selatan, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, sinkronisasi dalam perencanaan dan keselarasan antara perencanaan serta penganggaran menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan prioritas pembangunan daerah

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan mencakup strategi pembangunan per kawasan baik perdesaan-perkotaan disertai dengan rencana intervensi pembangunan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berlandaskan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk pengembangan Pulau Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah.

Gambar 5.1

Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin
2. Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim
3. Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau
4. Kawasan Perkotaan Baturaja

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru

1. Banyuasin

Sawit, Karet, Kelapa, Kopi

2. Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Swasembada Pangan

1. Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
2. Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Taman Nasional Sembilang
3. Taman Nasional Kerinci-Seblat

5.1.1 Proyek Strategis Nasional

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

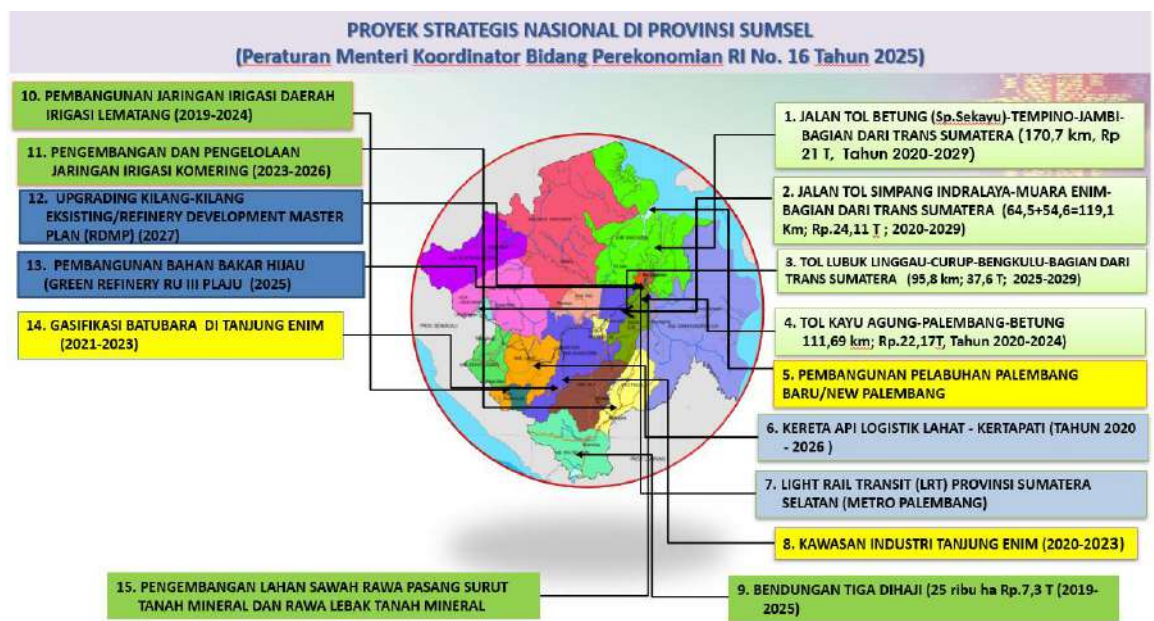
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
			Pemerintah Kab/Kota
Swasembada Pangan			
6	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan <i>Food Estate</i>	Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Rawas dan Kab. Muara Enim	- Kementerian Pertanian, Swasta (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan	13 Kabupaten dan 1 Kota Pagar Alam	- Kementerian Pekerjaan Umum - Pemerintah Kab/Kota
8	<i>Biorefinery</i> Sumatera	PT. Pertamina	- PT Pertamina (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
9	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kota Palembang	- PT Pertamina / PGN - Pemerintah Kota Palembang
<i>Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital</i>			
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	- Swasta - Pemerintah Kab/Kota
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	17 Kabupaten/Kota	- Kemen PAN RB (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	17 Kabupaten/Kota	• Badan Informasi Geospasial • Pemerintah Kab/Kota • Pemerintah Kab/Kota
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Kabupaten/Kota	BUMN (Penugasan)
14	Pembangunan 3 Juta Rumah	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Kota Palembang	• Pemerintah Kota Palembang • Swasta

Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Gambar 5.2
Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
No.16 Tahun 2025



Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025, terdapat 15 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah.

Tabel 5.2
Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatra (170,7 Km, Rp. 21 T, Tahun 2020-2029)	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Tempino dan Jambi	- Progres Seksi 1(Betung-Tungkal Jaya) a) 1A 30,80 km - Progres Lahan : 52,5 % - Progres Konstruksi : 57,64% b) 1B 31,58 km

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			-Progres Lahan : 51,83% -Progres Konstruksi : 13,4% - Progres Seksi 2 (Tungkal jaya-Bayung Lencir) a) Seksi 2A (37,95 Km) - Progres Lahan : 32,21% - Progres Konstruksi :22,85% b) Seksi 2B (18,4 Km) - Progres Lahan : 37,23% - Progres Konstruksi: 22,39% - Progres Sesi 3 (34 Km) (Bayung Lencir-Tempino) - Progres Lahan : 100% - Progres Konstruksi : 100% Telah Operasional dari tanggal 16 Oktober 2024 - Progres Seksi 4 (18 Km) (Tempino-Jambi) - Progres Lahan : 99,76% - Progres Konstruksi: 91,80%
2	Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T ; 2020-2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim	- Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 Km) Progres 100% Operasional 31 Juli 2023, - Seksi Prabumulih-Muara Enim (56,85 Km) Progres Fisik 8,7 % dan Progres Lahan 26,25% (Masuk dalam JTTS Tahap IV / Ditangguhkan). - Penambahan <i>Junction</i> Palembang (8,26km) Status Operasional April 2025
3	Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu-Bagian	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong,	Seksi 1 Lubuk Linggau-Kepahiang 54,5 Km dan Seksi 2 Kepahiang-Taba

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			permohonan hak pengelolaan lahan seluas 59,95 Ha pada tanggal 3 Februari 2025. • Terkait Pengadaan tanah: a. Sertifikasi lahan pelabuhan (59,95 Ha) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A pada tanggal 31 Januari 2025 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. b. Sertifikasi lahan areal fasilitas penunjang (mozaik 5 seluas 810.577 m² dan mozaik 6 seluas 882.943 m²) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. c. Setelah sertifikat lahan selesai selanjutnya lahan akan diserahkan/dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dibangun Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang.
6	Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati (Tahun 2020-2026)	Kab. Lahat, Kab.Muara Enim, Kota Prabumulih, Tarahan Lampung	• <i>Milestone</i> KA Logistik Segmen I Lahat-Kertapati sedang berproses. • Terminal Bongkar Batubara (TBB)/Terminal <i>Unloading System (TULS)</i> Stasiun

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			Kramasan, Sumatera Selatan progres 13,90% Pembangunan <i>Flyover</i> Koridor Ujan Mas beserta kebutuhan pembebasan lahan dibiayai oleh PT. Kereta Api (Persero)
7	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Kota Palembang	Status : Operasi 1) Total <i>Ridership LRT</i> Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai 4,08 Juta penumpang 2) Mekanisme Subsidi (PSO) dilakukan melalui Subsidi KA Perintis di Kementerian Perhubungan 3) Terdapat 2 eskalator yang belum terpasang
8	Kawasan Industri Tanjung Enim (2020-2023)	Tanjung Enim, Kab. Muara Enim	- Konstruksi ditunda sementara sampai diperoleh kepastian tenant baru - Upaya penjajakan calon tenant baru
9	Bendungan Tiga Dihaji (25 ribu ha Rp. 3,955 T (2029-2025)	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Progres konstruksi keseluruhan 63,86%
10	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang (2019-2024)	Kota Pagar Alam	<i>Phase III</i> Saluran Sekunder : 3 Km Gorong-gorong : 3 Bh Bangunan terjun : 7 Bh Bangunan sadap : 1 Bh Bangunan bagi : 1 Bh Pintu air : 6 Bh progres 100,00%

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering (2023-2026)	Kab. Ogan Komering Ulu Timur dan Kab. Ogan Komering Ilir	• <i>Package 1</i> Perjaya <i>Headworks</i>, Komering <i>Main Canal</i>, Lempuing <i>Secondary Canal (Section -3)</i>, Lempuing <i>Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Block G and H)</i> and <i>Telemetry System</i>, progress 9,198% • <i>Package 2</i> Belitang <i>Secondary Canal (BB.0-BB.15)</i>, Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Blok I and J)</i> progres 70,01% • <i>Package 3</i> Belitang <i>Secondary Canal (BB.15-BB.25)</i>, Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Blok K)</i> progress 65,33%
12	<i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP) (2027)</i>	Kota Palembang	Tahap transaksi <i>Bidding FEED, BEDP</i>
13	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Refinery RU III Plaju (2025)</i>)	Kota Palembang	• Pekerjaan Pra FS, Dokumen <i>Basic Engineering Design Package (BEDP)</i>, Dokumen <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> sudah selesai.
14	Gasifikasi Batu Bara di tanjung Enim (2021-2023)	Kab. Muara Enim	• PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021. Proses mendapatkan mitra strategis pendanaan.
15	Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawah Lebak Tanah Mineral	Berlokasi di 7 Kabupaten: Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. MUBA, Kab. OKU Timur, Kab. PALI, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim.	- Cetak Sawah seluas 2.000 Ha - Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi Skala besar (1 unit) berlokasi di Desa Kota Bumi, Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir. - Progres : a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Belitang Panen Raya (BPR) tentang Implementasi Cetak Sawah dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern pada tanggal 13 Januari 2025. b. Rencana <i>Groundbreaking</i> Cetak Sawah seluas 2.000 Ha dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern di Desa Kota Bumi Kec. Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pertengahan April 2025. c. Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah untuk

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			luasan 75.000 Ha dan Konstruksi Cetak Sawah seluas 50.000 Ha di 5 (lima) kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir pada Tahun Anggaran 2025 sedangkan seluas 25.000 Ha akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan sumber dana APBN Kementerian Pertanian

(Progres kemajuan fisik per 2025-2026)

Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Utama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2025-2026

5.1.2 Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Provinsi

Kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

- a. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- b. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- c. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
- d. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung (Patungraya Agung).

1) KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat membentang melintasi empat provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatra Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 13.750 km2. Taman Nasional ini merupakan kawasan

konservasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999.

Taman Nasional Kerinci Seblat berfungsi sebagai kawasan perlindungan untuk proses ekologis yang menunjang kehidupan, kawasan pengawetan keanekaragaman hayati untuk kepentingan pelestarian sumber genetik, wahana bagi pendidikan dan penelitian, serta menunjang pengembangan budaya.

2) Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang

Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan taman nasional yang berdampingan dengan Taman Nasional Berbak. Kawasan seluas 202.896,31 hektar ini berada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa tahun setelah diresmikan sebagai taman nasional, kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu lahan basah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam yang dimilikinya, yakni perpaduan antara dataran dan perairan. Lingkungan tersebut menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang bisa dijumpai di taman nasional ini.

3) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

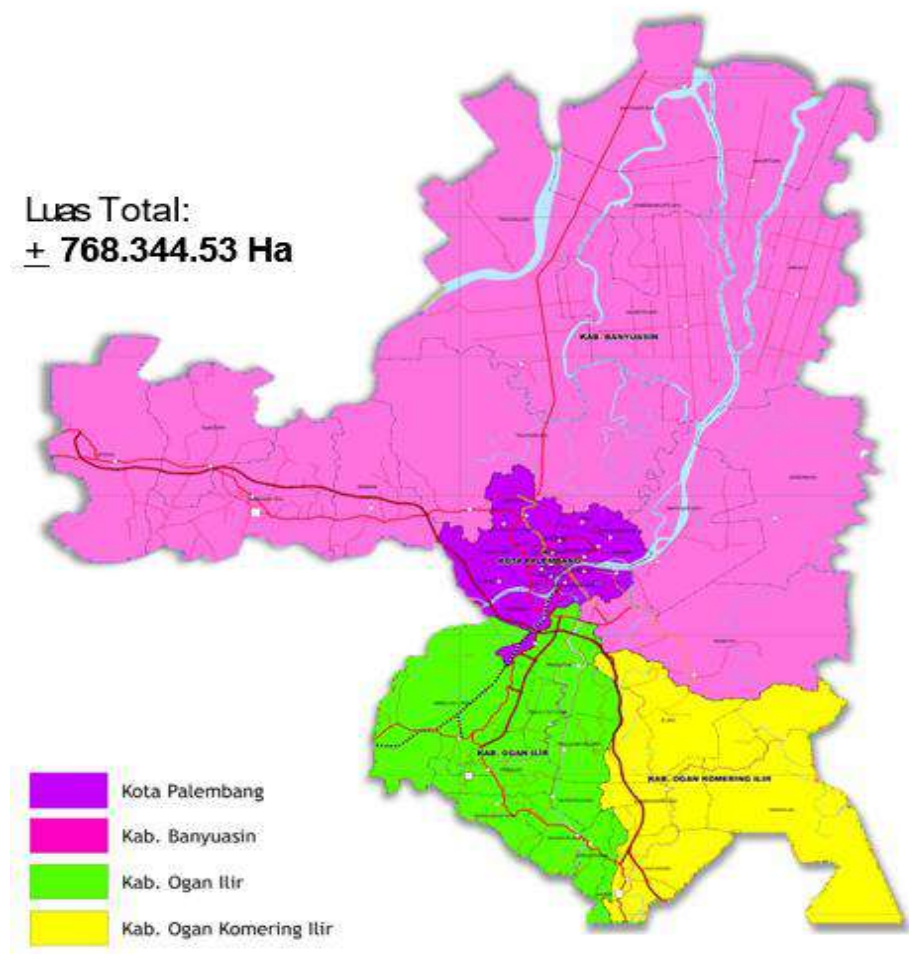
Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayatinya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 313.572,48 hektar.

Secara administrasi pemerintahan, Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung seluas 248.861,48 hektar dan Provinsi Bengkulu seluas 64.711 hektar. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai pelestarian Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera serta perlindungan sistem penyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4) KSN Kawasan Perkotaan Patungraya Agung

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ditetapkan untuk diprioritaskan penataan ruangnya. KSN memiliki pengaruh penting secara nasional, baik dalam bidang kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Gambar 5.3 Lingkup Wilayah Patungraya Agung



Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), wilayah delineasi meliputi:

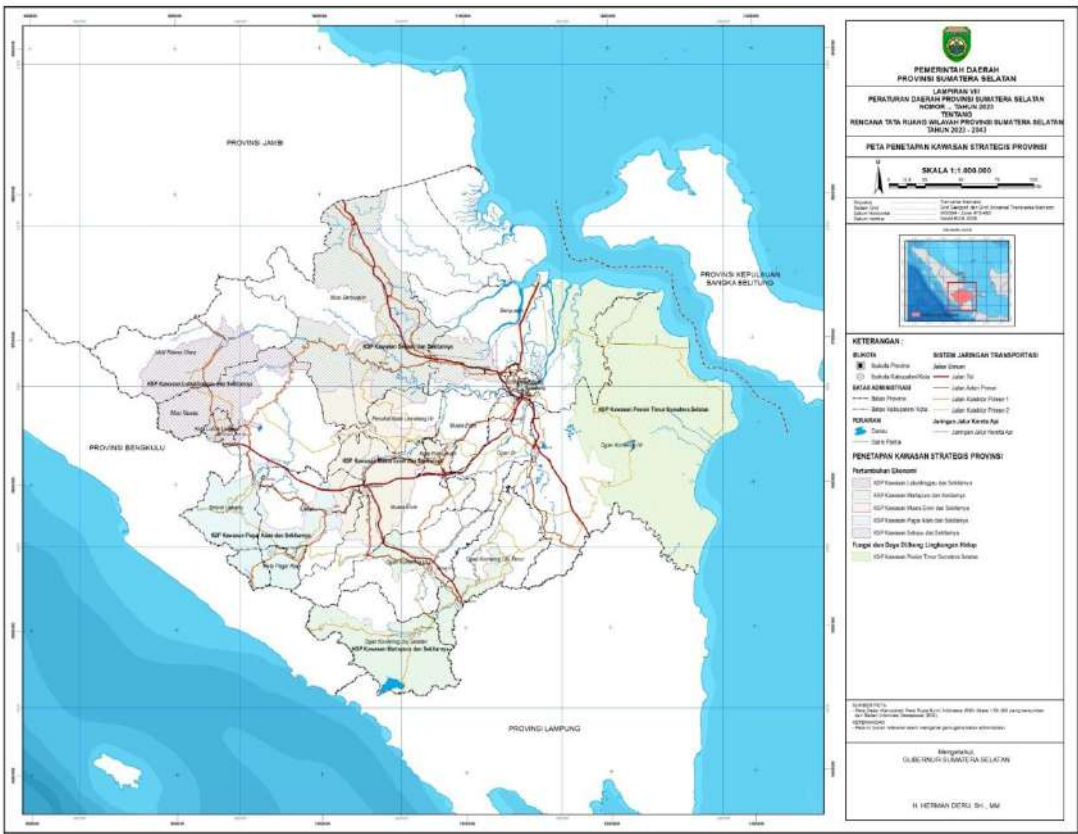
- 1) Kawasan Seluruh wilayah Kota Palembang dengan luasan sebesar ±36,647.94 Ha, meliputi 18 Kecamatan;
- 2) Sebagian Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luasan sebesar ±516,025.4 Ha, meliputi 14 Kecamatan;
- 3) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan luasan sebesar ±87,747.29 Ha, meliputi 10 Kecamatan;
- 4) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan sebesar ±88,396.94 Ha, meliputi 4 Kecamatan.

5.1.3 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:
 - a. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
 - b. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya;
 - c. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya;
 - d. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya; dan
 - e. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya.

Gambar 5.4
Peta Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

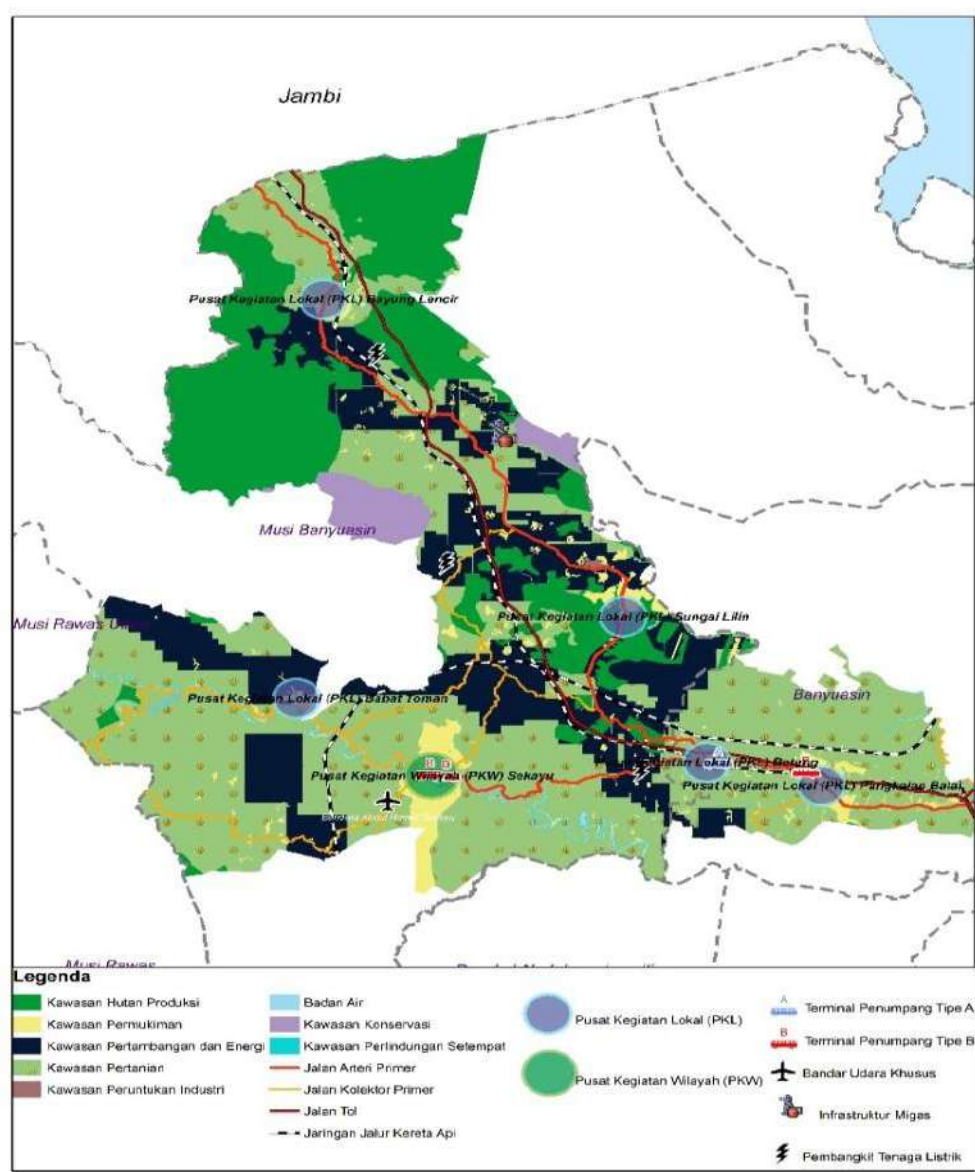


Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

5.1.3.1 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 (dua) wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 5.5 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

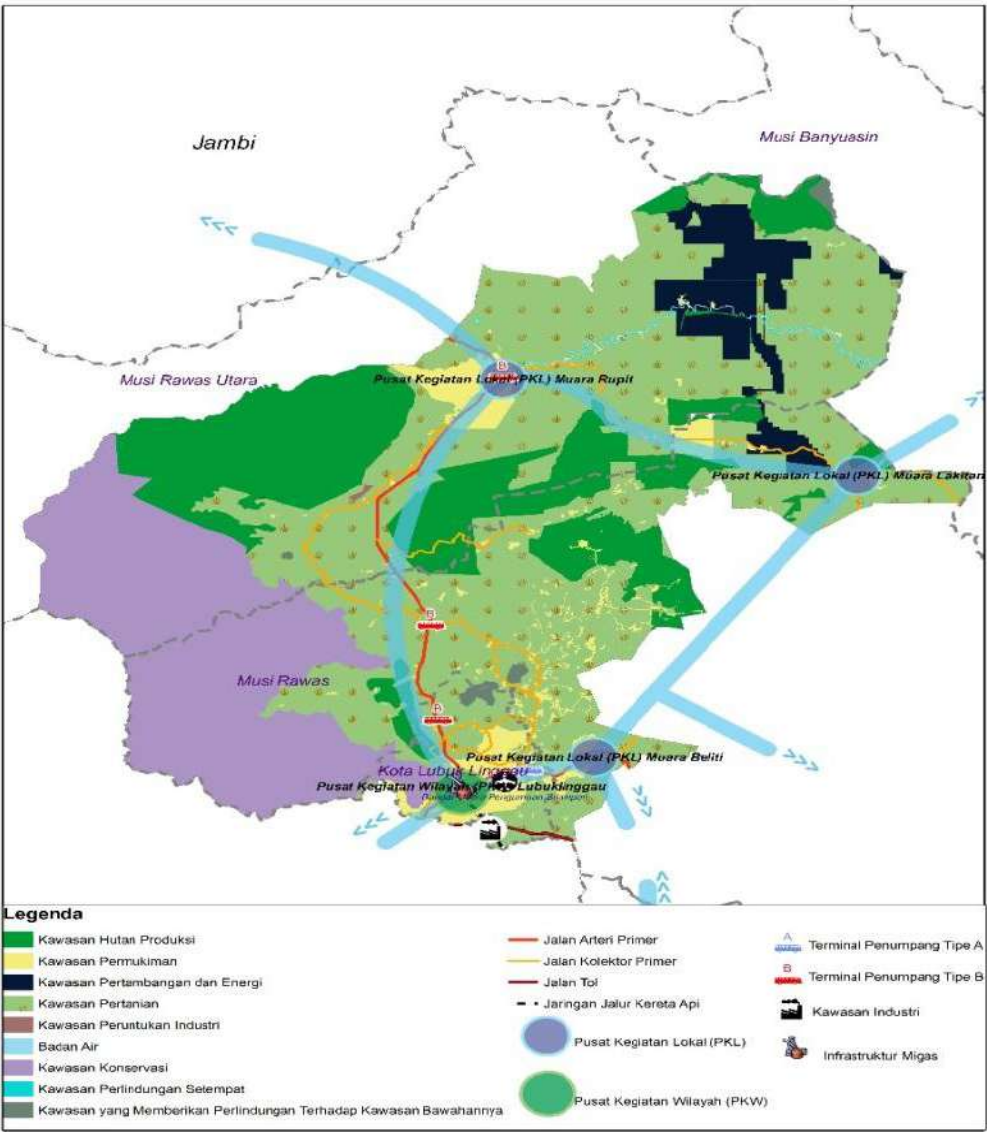
Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan-Kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung;
- b. pengembangan Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- d. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. pencegahan dan pengendalian kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

5.1.3.2 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota antara lain Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 1) Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 5.6 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

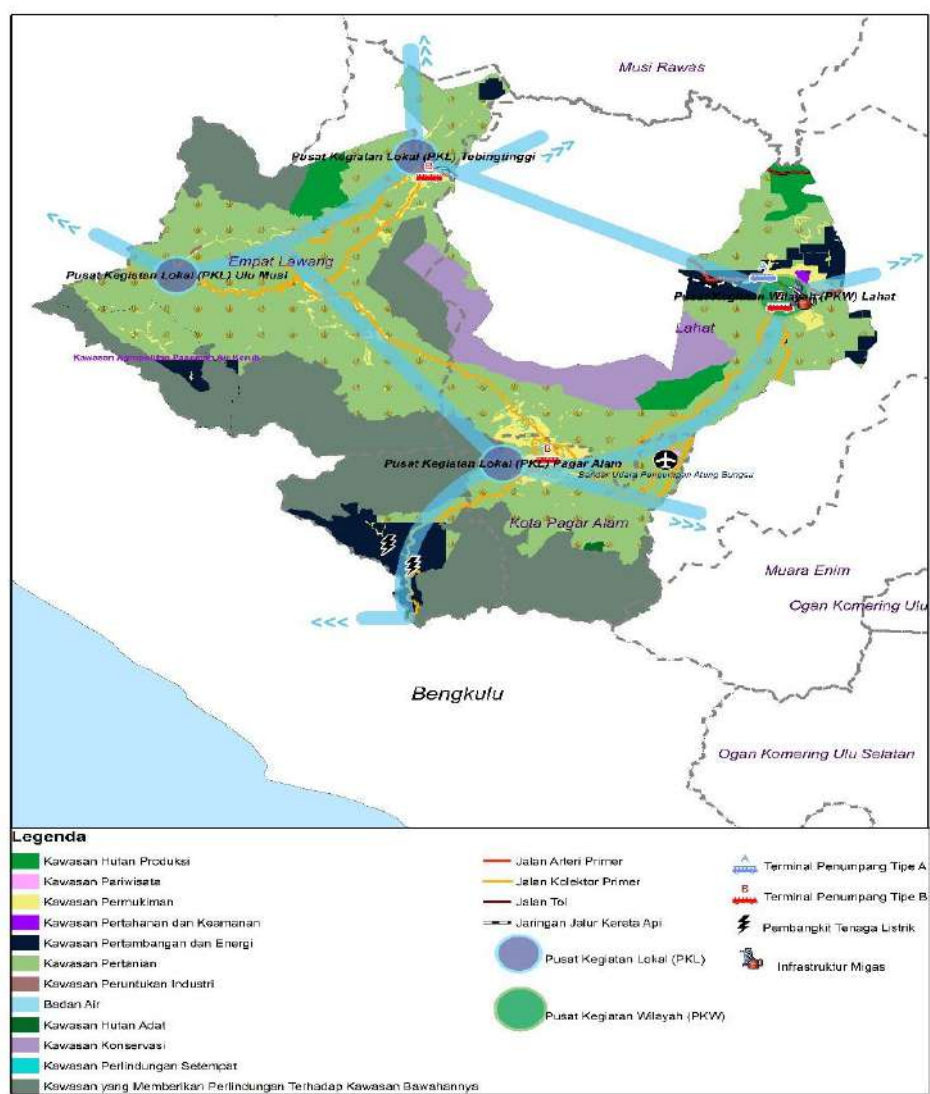
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan Kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- b. pengembangan Kawasan agropolitan Musi Rawas;
- c. pengembangan Kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;

- d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng , timah hitam dan batu bara di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan;

5.1.3.3 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya



Gambar 5.7 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten antara lain Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang.

- 1) Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

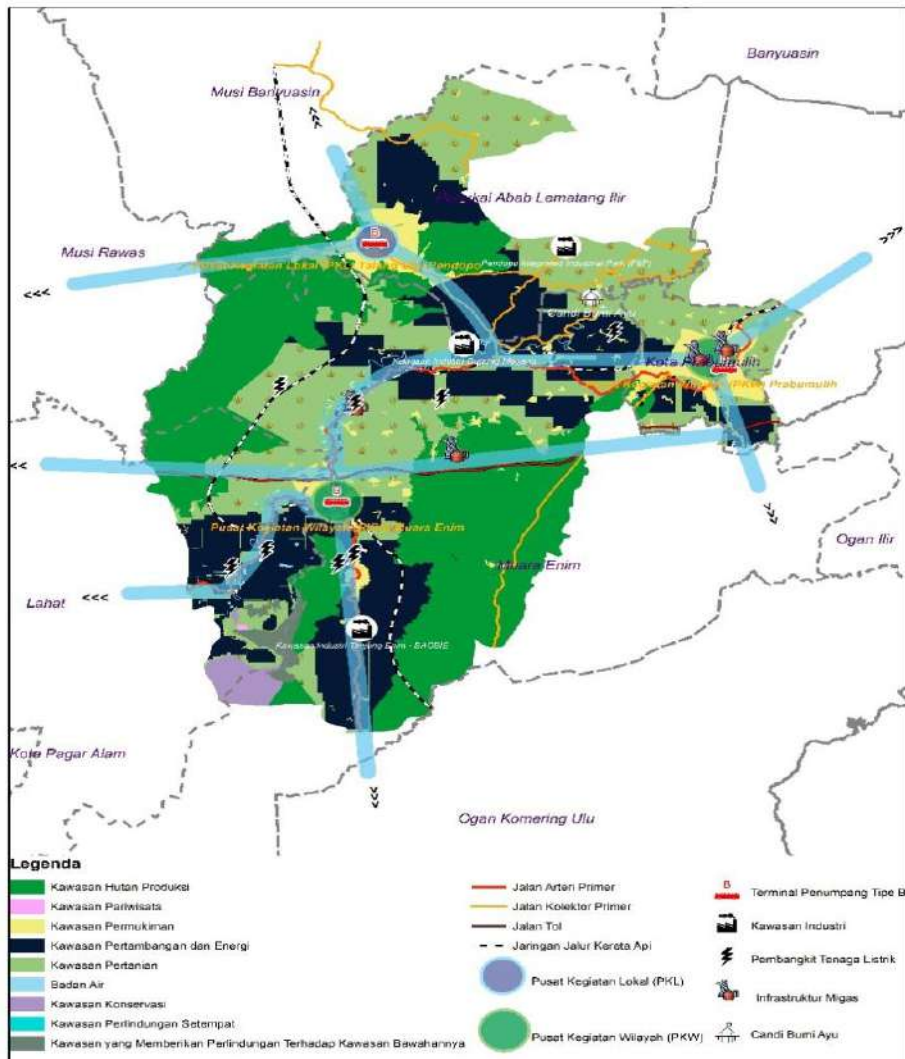
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- c. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kota Pagar Alam;
- d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- f. menjaga dan melestarikan Kawasan yang berfungsi lindung.

5.1.3.4 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Lahat.



Gambar 5.8 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- 2) Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- 4) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara

berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

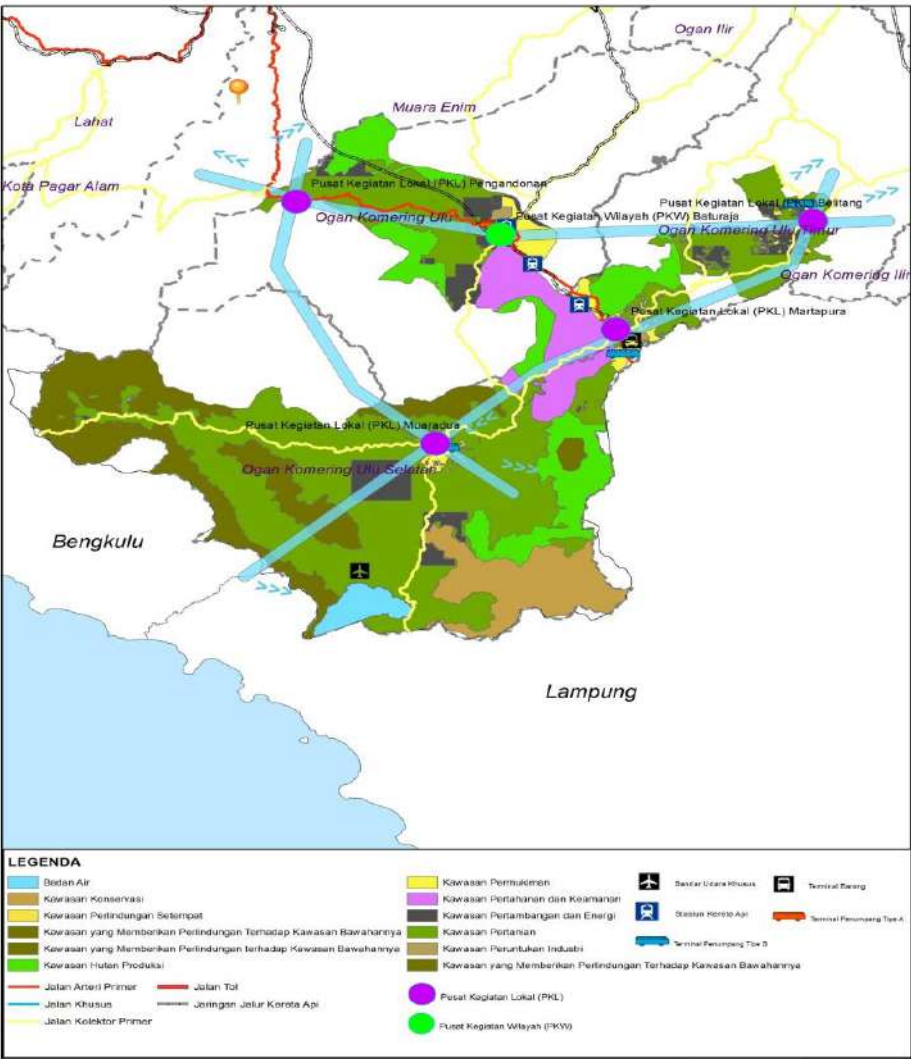
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- b. pengembangan potensi sumber daya alam berupa batu bara dan migas di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. pengembangan Kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan dan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional di Kabupaten Muara Enim;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

5.1.3.5 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan

- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.



Gambar 5.9 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau dan pelabuhan dermaga Danau Ranau serta dermaga wisata;
- e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- f. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- h. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;
- j. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. perlindungan pada Kawasan pesisir dan pantai;
- e. perwujudan untuk keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
- f. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- g. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. pengembangan Kawasan kerbau rawa Pampangan dan itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- j. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan Kawasan Pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste* terintegrasi dan mandiri energi.

5.2 Indikator Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Arah kebijakan pembangunan di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2027 disusun dengan menggunakan pendekatan kabupaten/kota dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Patungraya Agung berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), dan juga Kabupaten/Kota dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP), memperhatikan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ini bisa dilihat dari kondisi makro pembangunan kabupaten/kota saat ini yang dijabarkan dalam enam indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per Kapita dan Gini Ratio. Untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai arahan pengembangan wilayah, potensi dan keunggulan wilayah dan arah kebijakan pengembangan wilayah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Kota Palembang

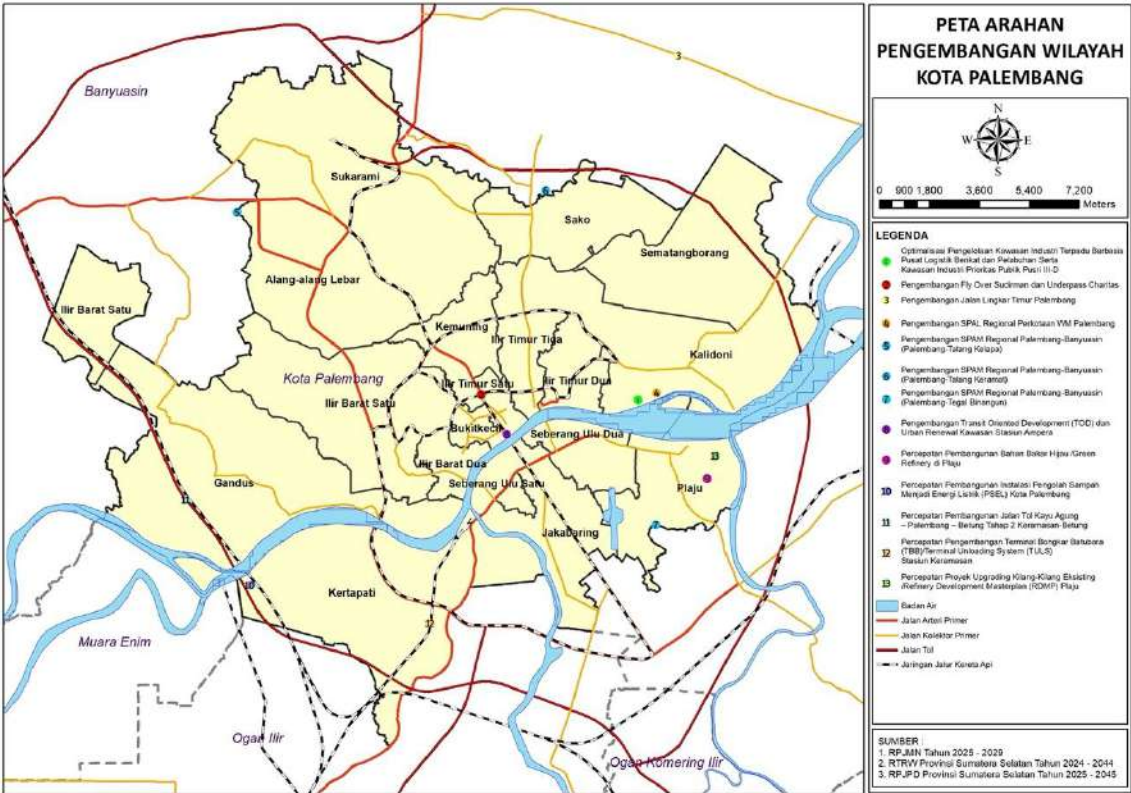
Pembangunan di Kota Palembang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 5.3
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,2 – 5,5	5,8 - 6,1
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	121,154 *	139,67	147,66- 156,39
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	30,31	30,54	18,57
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,04	9,20-9,40	8,70 - 9,00
5	Gini Ratio	0,389	0,317 - 0,337	0,298 - 0,305
6	Indeks Pembangunan Manusia	83,27	83,37	83,78
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		14.207,22	19.436,93
8	IKLH Daerah	67,90	61,71	61,97
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,8	5,75-6,50	5,50 - 6,00

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 (* data capaian tahun 2024)

Gambar 5.10
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kota Palembang



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Palembang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan dan Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Kota Palembang juga direncanakan sebagai pusat kegiatan Kawasan Perkotaan Inti dalam KSN Patungraya Agung, sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional, pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pusat pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi sungai dan laut skala nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, pusat pertemuan, pameran, dan konvensi skala nasional dan internasional, dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Kota Palembang juga memiliki Kawasan Konservasi yaitu Taman Wisata Alam Punti Kayu.

Dilihat dari Distribusi PDRB sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 79,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 31,68%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 18,78%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,36%; 4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,74%.

Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kota Palembang juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Palembang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pembangunan jaringan gas perkotaan.
- 10) Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Palembang (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung–Palembang– Betung Tahap 2 Keramasan-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) *LRT* Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang).

- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati
- 4) *Upgrading* kilang-kilang *eksisting/refinery development master plan (RDMP)*.
- 5) Pembangunan bahan bakar hijau/ *Green Refinery* di Plaju.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,30-5,60 % melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,04-9,24 % yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,50-6,00 %.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 83,78.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 94,53%, akses sumber air minum layak sebesar 95,00%, akses sanitasi layak sebesar 94,29%.
- 6) Pengembangan dan penataan WM Palembang, antara lain melalui:
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Palembang;
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
 - Penyusunan *metropolitan statistical area*;
 - Penataan Kawasan Strategis dan Penyediaan Perumahan Publik Vertikal Perkotaan Terpadu di Wilayah Metropolitan Palembang.
- 7) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan *Urban Renewal* Kawasan Stasiun Ampera.
- 8) Pengembangan Jalan Lingkar Timur Palembang.

- 9) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Palembang.
- 10) Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang.
- 11) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 12) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 13) Percepatan pengembangan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati, khususnya pada pengembangan Terminal Bongkar Batubara (TBB)/ *Terminal Unloading System* (TULS) Stasiun Keramasan.
- 14) Percepatan proyek *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting/*Refinery Development Masterplan* (RDMP) Plaju.
- 15) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Palembang (PHTC).
- 16) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 17) Optimalisasi pengelolaan kawasan industri terpadu berbasis pusat logistik berikat dan pelabuhan serta kawasan industri prioritas publik Pusri III-D.
- 18) Pengembangan *Fly Over* Sudirman dan *Underpass* Charitas.
- 19) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 20) *Samesta Green View: Large-Scale Integrated Housing in Talang Keramat, Palembang*
- 21) Revitalisasi Rusun Ilir Barat Palembang (*Revitalization of Ilir Barat Housing – Palembang*)
- 22) Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga di Kota Palembang (*Gas Distribution Network for Households in Palembang City*)
- 23) Revitalisasi Pasar Cinde
- 24) Pembangunan Masjid Raya

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Palembang diarahkan menjadi **kota metropolitan modern yang terintegrasi, berdaya saing, dan**

berkelanjutan, dengan fokus utama pada penguatan industri, infrastruktur, ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2.2 Kabupaten Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

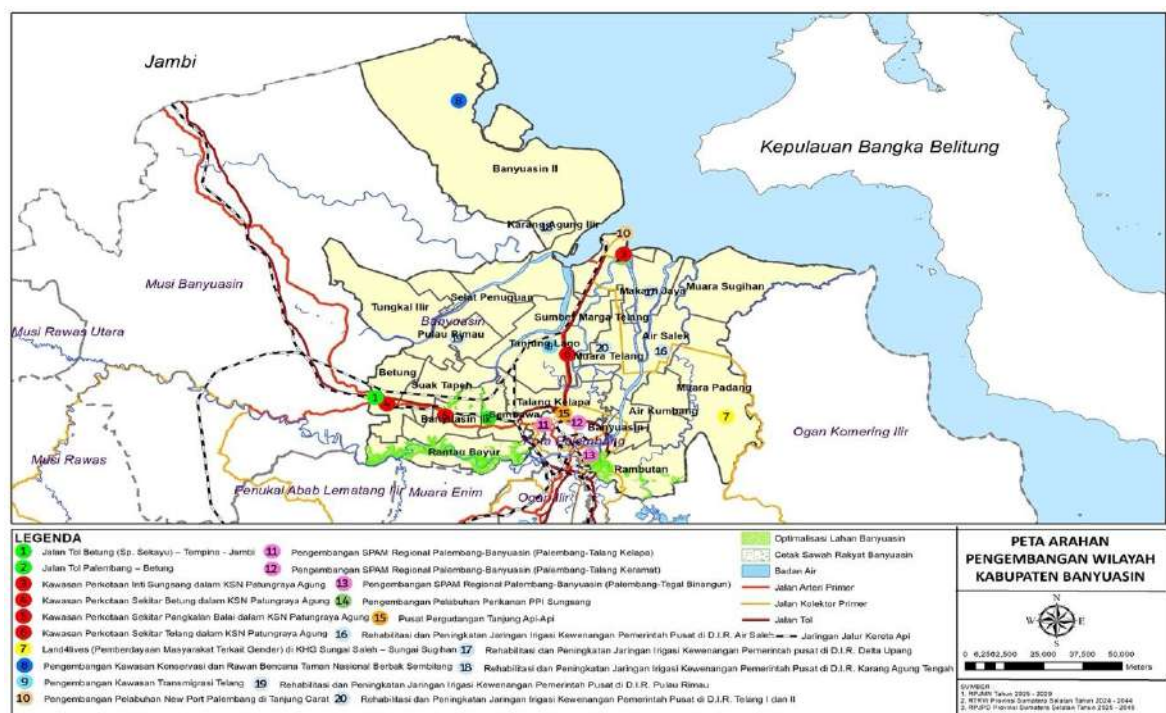
Tabel 5.4
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,48	6,80 - 7,00
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	44,734,2*	55,00-65,00	55,00-65,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,76	5,80*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,48	8,44 - 8,92	8,00 - 8,50
5	Gini Ratio	0,23	0,266 - 0,309	0,23 - 0,266
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,42	73,46	73,98
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		5.580.437,78	6.254.090,69
8	IKLH Daerah	74,62	67,36	67,61
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,68	3,17	2,65 - 2,98

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.11

Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Banyuasin memiliki 2 KSN mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang–Betung–Indralaya–Kayu Agung) dan Taman Nasional Berbak Sembilang dan 2 PKL (Pangkalan Balai dan Sungsang), serta termasuk juga ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin dikembangkan terutama dalam sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. Arah pengembangan Kabupaten Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, dan menjaga Kawasan yang berfungsi lindung. Selain itu, dikembangkan Kawasan Perkotaan Inti Sungsang dalam Metropolitan Patungraya Agung sebagai pusat pengembangan ekonomi skala nasional, pusat kegiatan industri, kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda), pusat pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan perikanan, dan pusat distribusi logistik.

Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung yang meliputi Betung, Pangkalan Balai, dan Telang juga dikembangkan. Betung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat permukiman, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi darat skala regional, pusat permukiman, dan pusat pelayanan kesehatan regional, serta Telang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan pusat kegiatan perikanan.

Kabupaten Banyuasin yang juga sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 85,46% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 31,25%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,42%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 13,19%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Banyuasin (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Jalan Tol Kayu Agung-Palembang_Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi bagian dari Trans Sumatera sepanjang 170,7 km.
- 3) Pembangunan Pelabuhan Baru/New Palembang di Tanjung Carat.
- 4) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2027:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,23-5,88% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,01-8,47% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,13%.
- 4) Peningkatan IPM.
- 5) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap provinsi sebesar 84,20%, akses air minum layak Kabupaten Banyuasin sebesar

81,42%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Banyuasin sebesar 61,51%.

- 6) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 7) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 8) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang.
- 9) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 10) Hilirisasi sawit untuk produk turunan dengan nilai tambah tinggi (*biofuel, fatty acid, fatty alcohol, biofertilizer, green diesel, green jet fuel, dan bioplastik biodegradable*).
- 11) Hilirisasi karet untuk produk lateks, ban, dan produk *value-added rubber* lainnya.
- 12) Hilirisasi Kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa yaitu, VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimernabari, santan instan, dan karbon aktif.
- 13) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Air Saleh, D.I.R. Delta Upang, D.I.R. Karang Agung Tengah, D.I.R. Pulau Rimau, D.I.R. Telang I dan II.
- 14) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 15) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 16) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 17) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 18) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 19) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 20) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 21) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan

- pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 22) Pengelolaan dan pengembangan lahan Pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan Pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
 - 23) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
 - 24) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
 - 25) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
 - 26) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi.
 - 27) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-Kenten.
 - 28) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1.
 - 29) Pembangunan infrastruktur sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Kenten-Sungsang-Muntok (Interkoneksi 275 kV Sumatera-Bangka).

- 30) Peningkatan produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (Sawit, karet, kelapa)
- 31) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas industri (Sawit, karet, kelapa)
- 32) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kelapa)
- 33) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industry (sawit, karet, kelapa)
- 34) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian (sawit, karet, kelapa)
- 35) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
- 36) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru
- 37) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang
- 38) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
- 39) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
- 40) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
- 41) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.
- 42) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- 43) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
- 44) Perlindungan pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
- 45) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan ,satwa dan biota perairan
- 46) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
- 47) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
- 48) Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
- 49) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
- 50) Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
- 51) Peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Banyuasin diarahkan menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi dan logistik yang strategis di Sumatera Selatan** dengan fokus pada sektor ekonomi unggulan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

5.2.3 Kabupaten Ogan Ilir

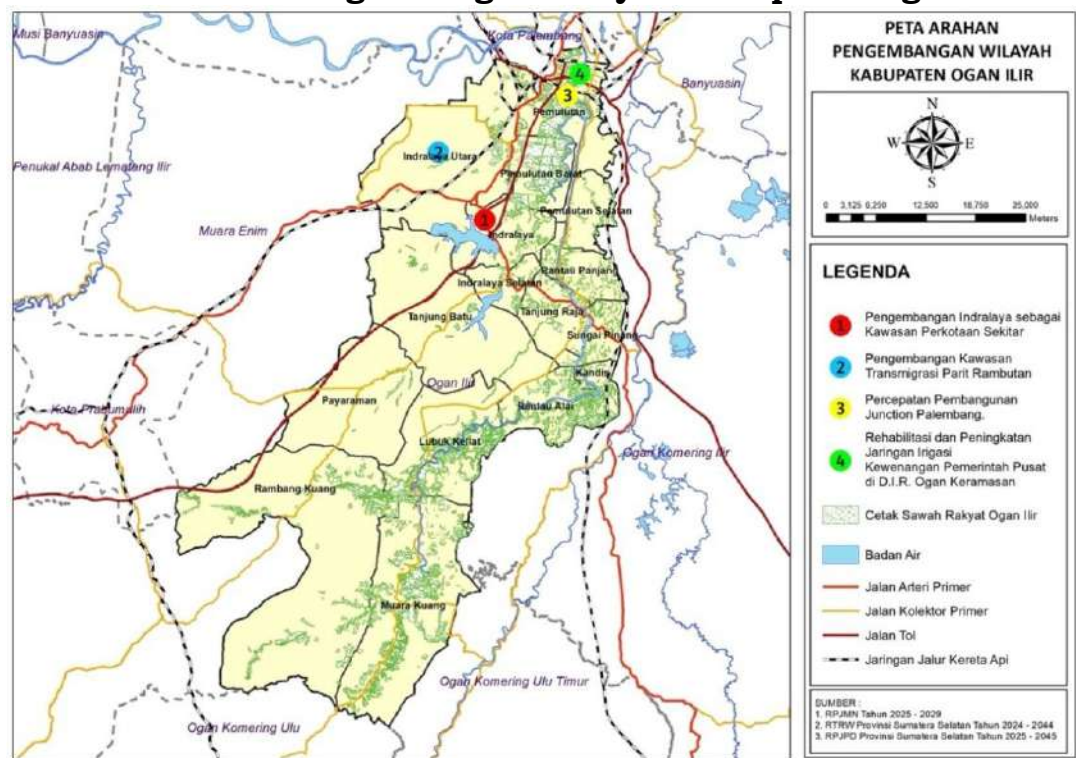
Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

Tabel 5.5
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97	5,00	5,8 - 6,1
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	34,94485*	38,24624	39,98
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,19	2,28	2,33
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,69	11,67	8,9 - 9,2
5	Gini Ratio	0,219	0,215	0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,21	73,50	74,48
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		90.066,16	99.626,52
8	IKLH Daerah	70,48	65,69	65,95
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,93	2,90	2,21 - 2,27

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.12
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Indralaya. Kawasan Indralaya dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan kesehatan regional. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Ogan Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,41%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,46%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,62%. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah kota tetangga yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Ilir (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatera (119,1 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,50-6,00% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,00-9,45%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,97-1,91%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 74,48.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi jalan mantap sebesar 80,76%, akses air minum layak sebesar 73,69%, dan akses sanitasi layak sebesar 75,12%.
- 6) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.

- 7) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Ogan Keramasan.
- 9) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 11) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 12) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 13) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 14) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 15) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 16) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 17) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 18) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 19) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 20) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan.
- 21) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan.
- 22) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit,karet, dan kelapa).
- 23) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 24) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 25) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 26) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 27) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 28) Pengembangan Indralaya sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.
- 29) Pengembangan Pusat Pendidikan.
- 30) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
- 31) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berkelanjutan**, serta sebagai **daerah penyangga utama Kota Palembang dan Prabumulih**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Ogan Ilir diharapkan menjadi **daerah yang maju secara ekonomi, unggul dalam sektor pertanian, kuat dalam infrastruktur**

dan konektivitas, serta berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan sekitarnya.

5.2.4 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

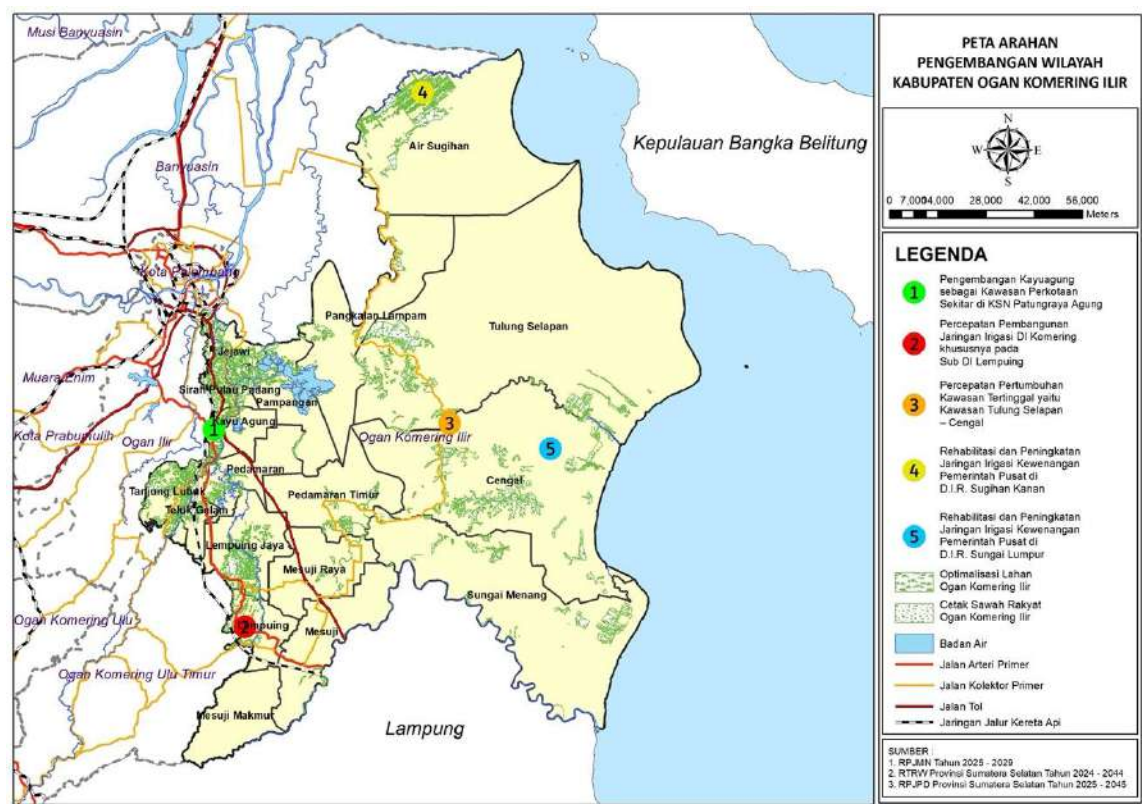
Tabel 5.6
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,38	6,1 - 6,3
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	57,80*	54,24	83,399
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	7,07	6,43	7,48
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,84	10,40	9,10 - 9,40
5	Gini Ratio	0,255	0,302	0,298 - 0,305
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,20	72,20	72,72
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		2.354.169,22	2.630.405
8	IKLH Daerah	73,50	69,36	69,61
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	3,05	3,00 - 3,06

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.13

Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kayu Agung, 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Sungai Lumpur, Air Sugihan, dan Tugumulyo, serta juga termasuk ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kawasan Kayu Agung dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri, dan pusat pelayanan transportasi darat skala regional.

Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;

optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan-Cengal; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 4 (empat) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024, yaitu 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,71%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 22,09%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 12,22%; dan 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,09%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km).
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI Komering.

- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,57% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,00% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,00%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 72,62.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 93,27%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 78,41%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 65,54%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Sugihan Kanan dan D.I.R. Sungai Lumpur
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 8) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan
- 9) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi)
- 10) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 11) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 12) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 14) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan

pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik

- 15) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 16) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 17) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 18) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 19) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 20) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 21) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 22) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 23) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 24) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.

- 25) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 26) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
- 27) percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan-Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 28) Melindungi kawasan pesisir dan pantai.
- 29) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 30) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 31) Penurunan *Stunting*.
- 32) Pengembangan Kayuagung sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan untuk menjadi **sentra produksi pangan dan perkebunan berkelanjutan, kawasan industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan, serta pusat perdagangan dan jasa di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan**. Secara keseluruhan, Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan menjadi **wilayah yang maju di sektor pertanian, industri, dan perdagangan berbasis sumber daya alam berkelanjutan, serta memiliki ketahanan lingkungan yang kuat terhadap perubahan iklim dan bencana alam**.

5.2.5 Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

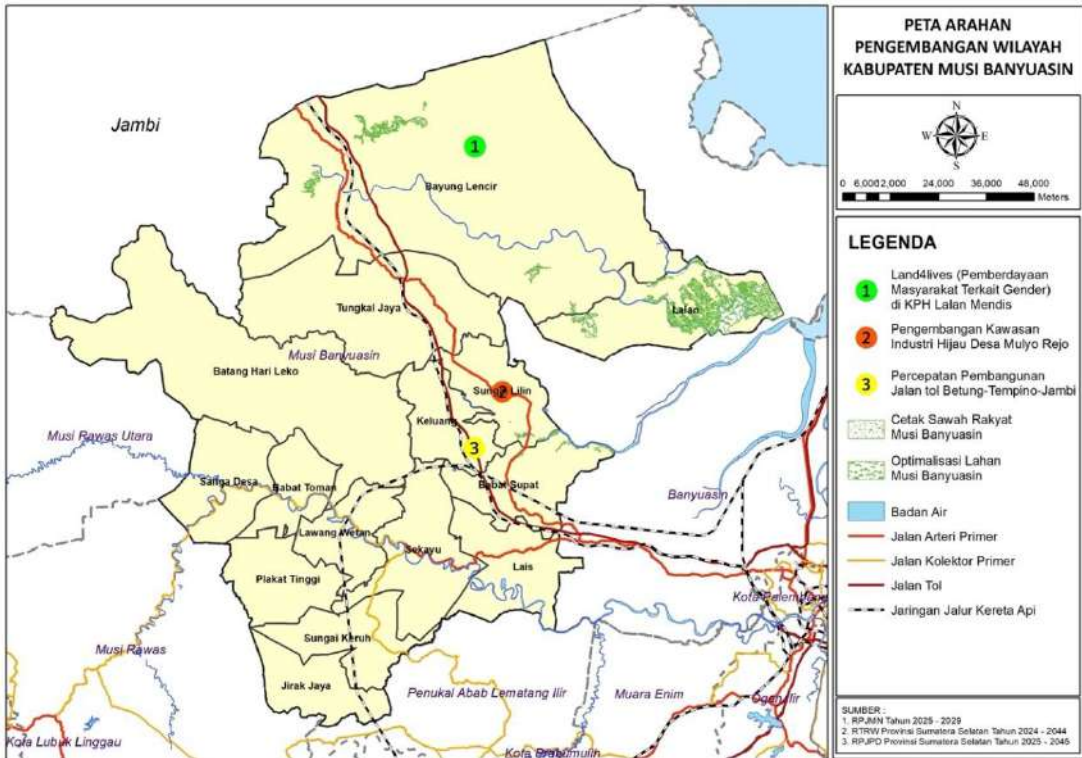
Tabel 5.7

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,0-5,2	6,20 - 6,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	142,138*	160,00-167,00	175,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	13,05	13,27*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,97	9,85	9,20
5	Gini Ratio	0,21	0,21	0,200
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,17	73,20	73,50
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		2.012.452,45	2.224.591,60
8	IKLH Daerah	70,93	64,69	64,94
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,04	2,03	1,98

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.14
Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 1 KSN (Taman Nasional Berbak Sembilang), 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (Sekayu), dan 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Babat Toman). Arah pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 5 (lima) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024 yaitu 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,79%, 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,09 %, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92%, 4) Sektor Konstruksi sebesar 8,20% dan 5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,90%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,02 – 5,20% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,23%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,98%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 73,10.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 82,12%, akses air minum layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 86,11%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 79,03%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.

- 7) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 8) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 10) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 11) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 13) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 14) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 15) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 16) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

- 17) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 18) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 19) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 20) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 22) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 23) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 24) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 25) Peningkatan akses energi.
- 26) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.
- 27) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 28) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *system integrated farm management* yang modern dan digital, dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 29) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 30) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 31) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata
- 32) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 33) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat

- 34) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 35) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 36) Pengembangan kawasan industri hijau Desa Mulyo Rejo.
- 37) Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas.
- 38) *Land4lives* (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk menjadi **pusat industri hijau dan energi berkelanjutan berbasis sumber daya alam, serta sentra produksi pertanian dan perkebunan berdaya saing tinggi di Sumatera Selatan**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Musi Banyuasin diposisikan sebagai **kawasan industri hijau dan energi terbarukan yang berorientasi pada keberlanjutan, pertanian maju berbasis teknologi, serta pusat konektivitas dan infrastruktur strategis di Sumatera Selatan**.

5.2.6 Kota Lubuk Linggau

Pembangunan di Kota Lubuk Linggau diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

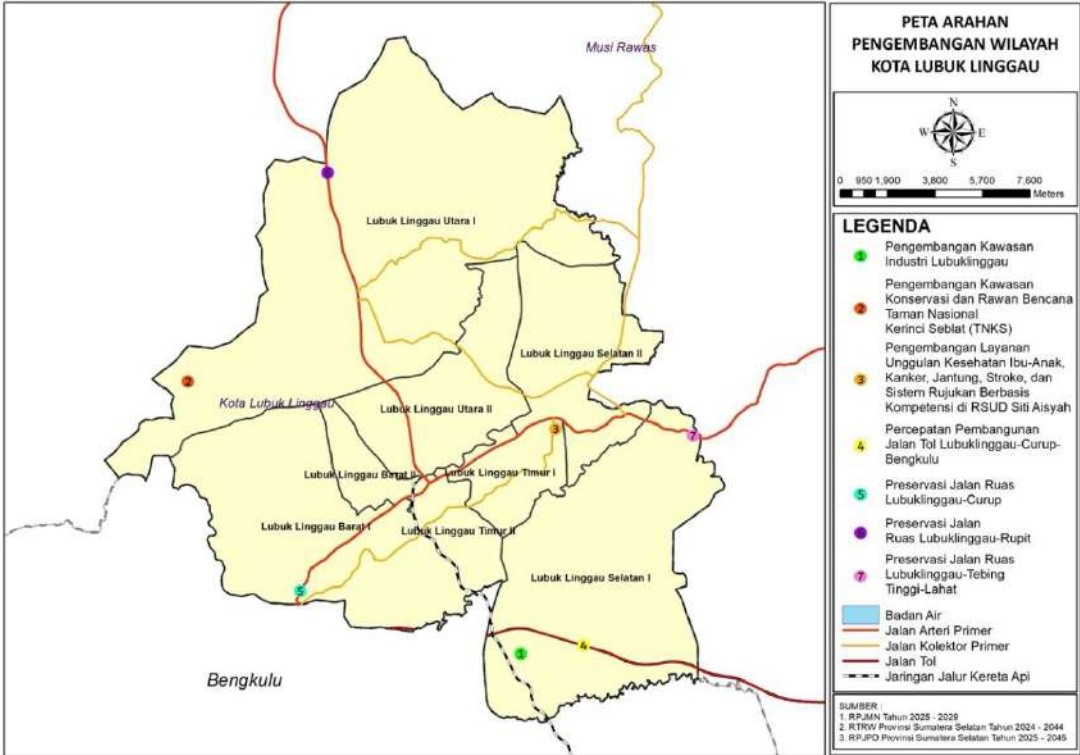
Tabel 5.8
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	5,0-5,5	6,3 - 6,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	35,43*	45,10414	45,551
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,24	1,30	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,49	9,7-10,2	9,00-9,30

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
5	Gini Ratio	0,37	0,315-0,345	0,298-0,305
6	Indeks Pembangunan Manusia	79,94	79,95	79,96
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		24.718,70	27.979,14
8	IKLH Daerah	75,34	68,99	71,90
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01	4,39-4,99	4,55-4,61

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.15
Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Lubuk Linggau memiliki 1 KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 1 PKW (Lubuklinggau). Arah pengembangan Kota Lubuk Linggau yaitu, pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang, pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung

fungsi Kawasan; penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; serta peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 67,00% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,67%, 2) Sektor Konstruksi sebesar 21,09%; 3) Sektor Real Estat sebesar 8,58%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,16%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuk Linggau pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Lubuk Linggau (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu terkait pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu yang merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 94,9 km.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,18-6,00% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,28-9,98%
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,98-4,58%.

- 4) Peningkatan IPM menjadi 79,49.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 83,33%, akses air minum layak sebesar 97,18%, akses sanitasi sebesar 86,84%.
- 6) Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
- 7) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- 8) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 9) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 10) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau dalam Progran Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- 11) Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuklinggau.
- 12) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC).
- 13) Preservasi jalan ruas Lubuklinggau-Tebing Tinggi-Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau-Curup.
- 14) Pengembangan kota agropolitan Lubuklinggau.
- 15) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 16) Pengembangan destinasi wisata.
- 17) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
- 18) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.
- 19) Pengembangan konektivitas wilayah.
- 20) Pemenuhan amenitas perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, *landmark* kota).
- 21) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan.
- 22) Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota.
- 23) Penguatan promosi pariwisata.
- 24) *Scaling-up* UMKM dan wirausaha muda.
- 25) Optimalisasi investasi sektor swasta.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diarahkan untuk menjadi **Pusat Perdagangan, Jasa, dan Konektivitas Regional Berbasis Perkotaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

5.2.7 Kabupaten Musi Rawas

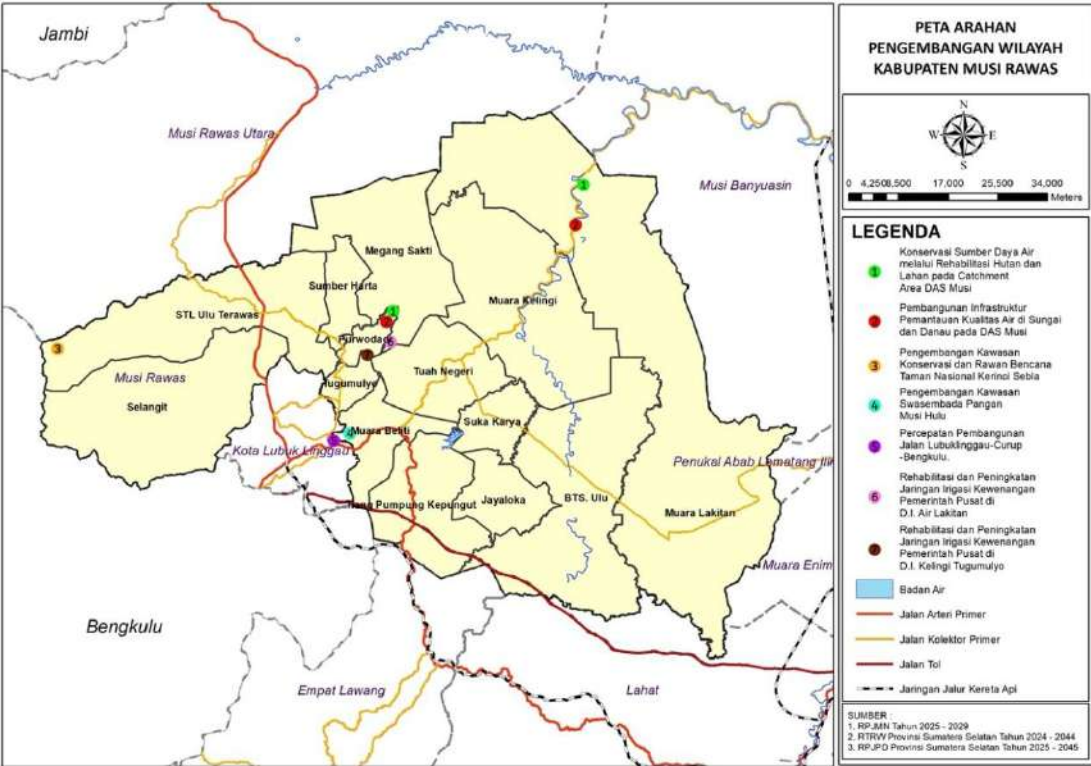
Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 5.9
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	5,50	6,10 - 6,30
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	61,86*	65,592	68,31
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,64	3,77	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,67	11,04	9,40 - 9,80
5	Gini Ratio	0,209	0,252	0,249
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,92	72,4	74,06
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		710.739,54	770.899,07
8	IKLH Daerah	76,83	71,40	71,65
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,74	1,93	1,70 - 1,75

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.16



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Musi Rawas memiliki 1 KSN (Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)), 2 PKL (Muara Beliti dan Muara Lakitan). Arah pengembangan Kabupaten Musi Rawas diantaranya diarahkan sebagai pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan desa tertinggal, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung, dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 dengan total 90,42% adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,83%, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,77%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 14,60%, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,88%, dan 5) Konstruksi 5,34%. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, Kabupaten Musi Rawas harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,8% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,57%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,92%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 74,06.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 95,87%, akses air minum layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 91,39%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,98%.
- 6) Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 10) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).

- 11) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 13) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 14) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 15) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 16) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 17) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi.
- 18) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 19) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).

- 20) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 22) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 23) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 24) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 25) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 26) Percepatan pembangunan Jalan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.
- 27) Mendorong realisasi investasi pada sektor rill terutama yang berfokus pada industri peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan daerah (pertanian/perkebunan/ pertambangan).
- 28) Menyusun strategi diversifikasi ekonomi dalam rangka peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi ke depan.
- 29) Pemerataan jumlah fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama peningkatan jumlah faskes tingkat I.
- 30) Pemerataan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan) khususnya melalui penguatan kapasitas SDM baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik serta standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.
- 31) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial ke depan.
- 32) Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.
- 33) Pengembangan konektivitas jalan intra kecamatan dan desa.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian dan perkebunan yang maju, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan agroindustri dan konektivitas regional di Sumatera Selatan.**

5.2.8 Kabupaten Musi Rawas Utara

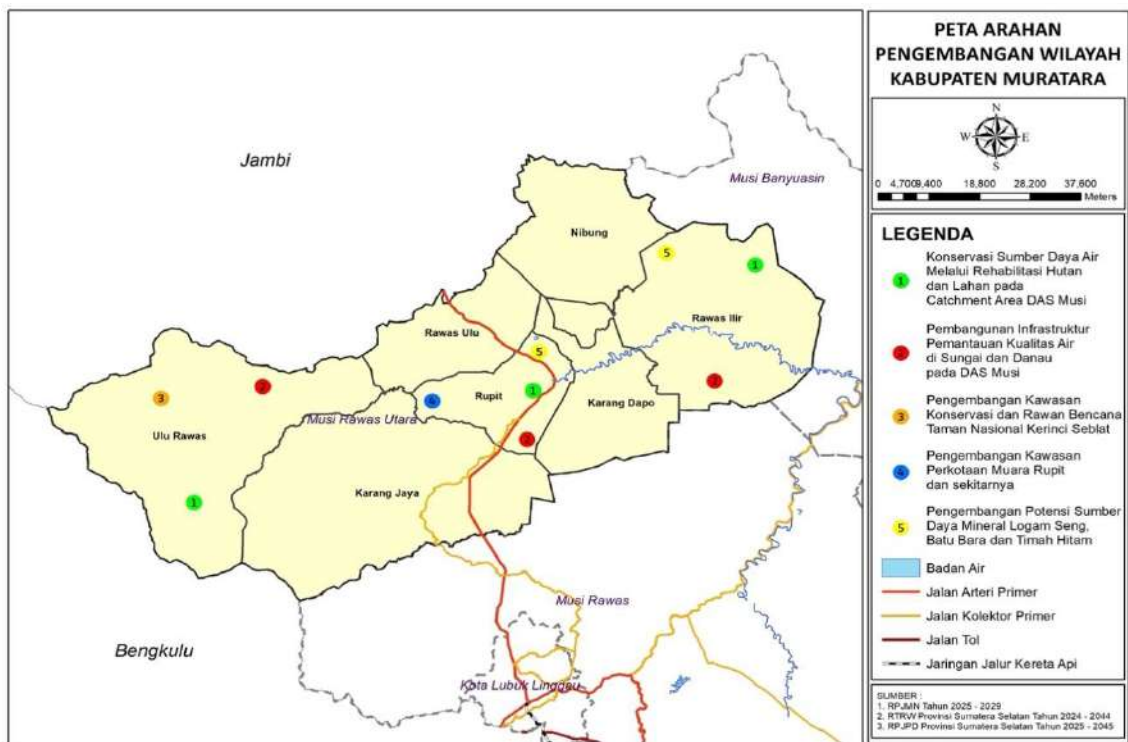
Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 5.10
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,05	5,20 - 5,40
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	48,87	53,90924	54,5
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,38	1,29	1,52
4	Tingkat Kemiskinan (%)	15,25	14,50	13,6-13,9
5	Gini Ratio	0,21	0,25	0,200-0,230
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,39	71,5	72,5
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		699.233,51	780.000
8	IKLH Daerah	76,68	71,63	72,6
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,78	4,65	4,05 - 4,19

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.17
Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Pengembangan Kabupaten Muli Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru memiliki 1 KSN (Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat), 1 PKL (Muara Rupit). Arahlan pengembangan Kabupaten Muli Rawas Utara yaitu, pengembangan desa tertinggal, pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara, dan timah hitam, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Muli Rawas Utara menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Muli Rawas Utara pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,77% dan 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,54%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas Utara pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,8% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 15,00%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,1%.
- 4) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 98,83%, akses air minum layak sebesar 88,41%, dan akses sanitasi layak sebesar 69,95%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 8) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 11) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung

perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik

- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 15) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi
- 16) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi
- 17) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 18) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 19) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 20) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)

- 21) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
- 22) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
- 23) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 24) Menjadi indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
- 25) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
- 26) Pengembangan desa tertinggal.
- 27) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam
- 28) Peningkatan kerjasama antarkawasan perbatasan
- 29) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 30) Perluasan akses internet dan digitalisasi
- 31) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*)
- 32) Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan
- 33) Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- 34) Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah
- 35) Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian berkelanjutan, pertambangan yang terintegrasi, serta ekonomi berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

5.2.9 Kota Pagar Alam

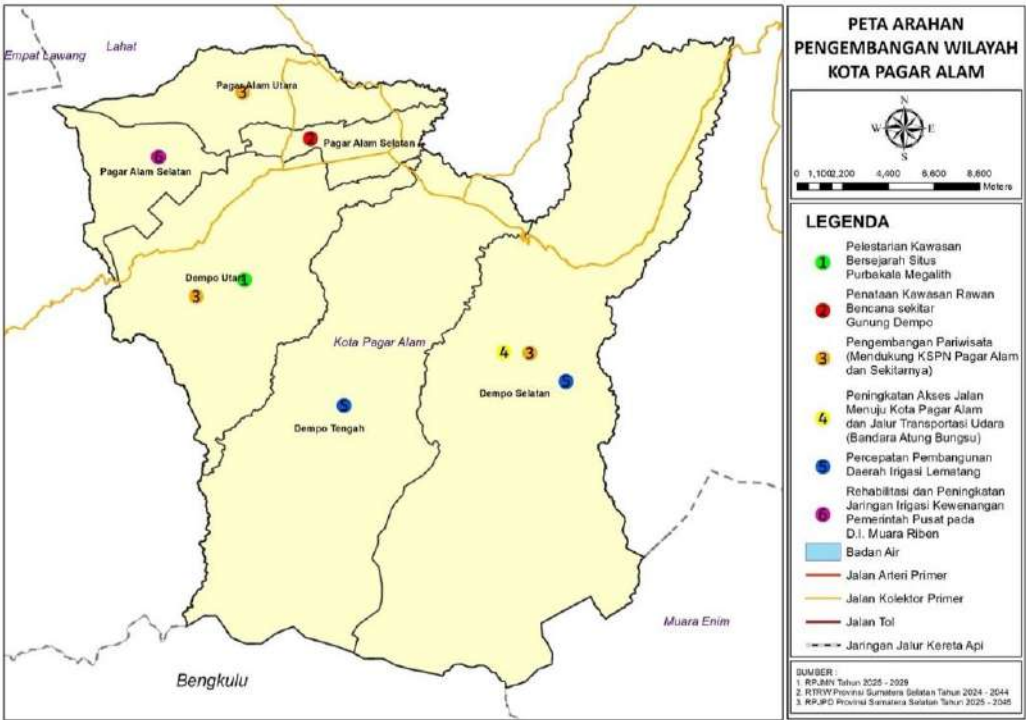
Pembangunan di Kota Pagar Alam diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 5.11
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,75	6,2 - 6,4
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	25,543*	24,03	34,15
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0,56	0,53*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,7	7,23	6,5 - 7,1
5	Gini Ratio	0,278	0,274	0,271
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,92	75,11	76,16
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		56.982,06	63,167,55
8	IKLH Daerah	74,15	72,27	72,52
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19	1,88	1,76

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.18
Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Pagar Alam merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Arahannya pengembangan Kota Pagar Alam yaitu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, serta sebagai pengembangan Kawasan pariwisata dataran tinggi karena dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, sehingga potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 75,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,84%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,61%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,33%; 4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 10,12%; 5) Sektor Real Estat sebesar 5,38%.

Arahannya Proyek Strategis Nasional di Kota Pagar Alam pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2027, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,01% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 6,86% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,76%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 75,69.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100%, akses air minum layak sebesar 89,81%, akses sanitasi sebesar 53,94%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Muara Riben.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 8) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 9) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 10) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 12) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 13) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 14) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- 15) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 16) Pengembangan pariwisata (mendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya).
- 17) Peningkatan ekonomi kreatif serta UMKM dengan skema kerja sama swasta dan komunitas lokal.
- 18) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
- 19) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
- 20) Peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil perkebunan dan hortikultura.
- 21) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
- 22) Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan.
- 23) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan.
- 24) Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.
- 25) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta perdagangan.
- 26) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 27) Beasiswa daerah untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 28) Optimalisasi pemberdayaan sosial, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.

29) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Pagar Alam diarahkan untuk menjadi **pusat pariwisata dataran tinggi berbasis sejarah dan alam, sentra hortikultura berkelanjutan, serta kota hijau yang mendukung ekonomi kreatif dan inklusif di Sumatera Selatan.**

5.2.10 Kabupaten Lahat

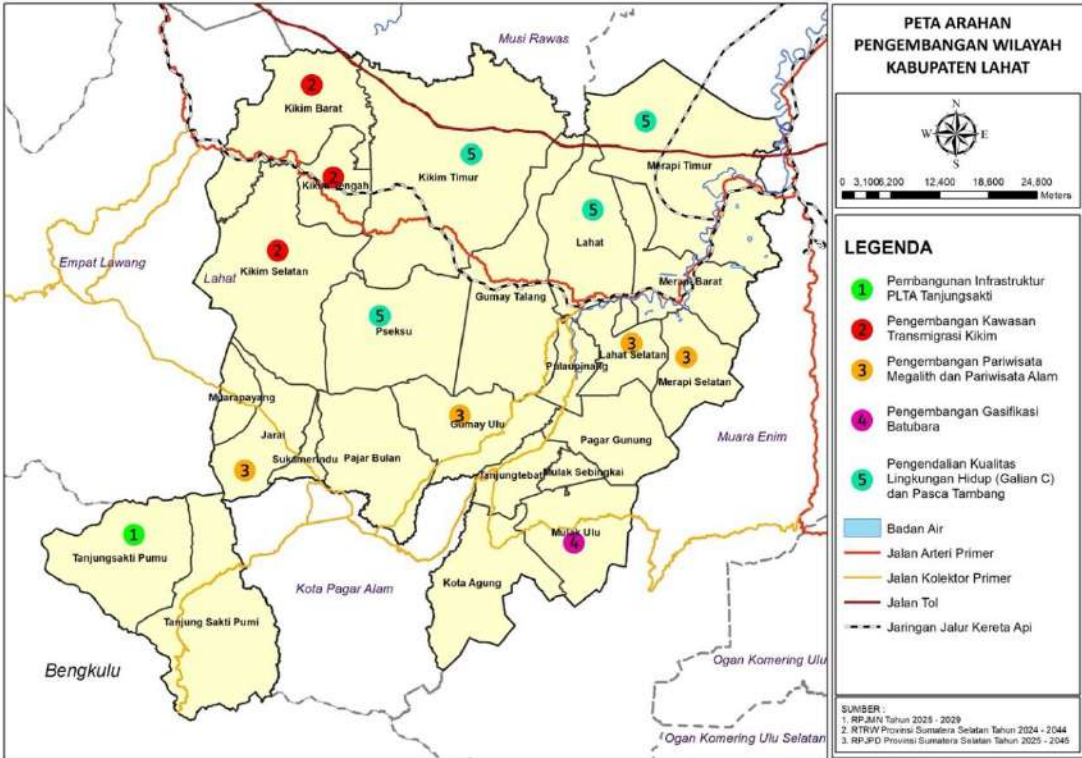
Pembangunan di Kabupaten Lahat diharapkan untuk mendukung capaian makro provinsi sumatera selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupten Lahat sebagai berikut :

Tabel 5.12
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,52	5,50	6,80 - 7,20
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	66,582*	66,83	86,75
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	4,46	4,30*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	13,69	13,35	8,90 - 9,20
5	Gini Ratio	0,235	0,313	0,298- 0,305
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	74,13	74,78
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		203.554,28	220.969,89
8	IKLH Daerah	78,09	70,34	66,53
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,84	2,99	2,78 - 2,84

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.19
Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Lahat memiliki 1 PKW, yaitu Lahat. Arah pengembangan Kabupaten Lahat yaitu, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, serta menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung. Selanjutnya, Kabupaten Lahat memiliki 1 (satu) PSN yaitu Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati untuk mempercepat hilirisasi barang.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 52,78%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,97%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

9,88%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 6,41%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,62%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lahat pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Lahat (Permenko RI No. 16 Tahun 2025) yaitu Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,2% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,93%
- 4) Peningkatan IPM menjadi 74,78.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 88,22%, akses air minum layak Kabupaten Lahat sebesar 84,86%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Lahat sebesar 69,27%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).

- 8) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura.
- 11) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani: pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani: perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi gudang. pengelokaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 15) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim.
- 16) Pengembangan gasifikasi batubara.
- 17) Pembangunan infrastruktur PLTA Tanjungsakti.
- 18) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)

- 19) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 20) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa.
- 23) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 24) Melindungi Kawasan konservasi.
- 25) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
- 26) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
- 27) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
- 28) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lahat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 29) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan.
- 30) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 31) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan.
- 32) Mendorong efisiensi iklim investasi di Kabupaten Lahat.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan agribisnis, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis sejarah dan alam, dengan infrastruktur modern serta lingkungan yang berkelanjutan.**

5.2.11 Kabupaten Empat Lawang

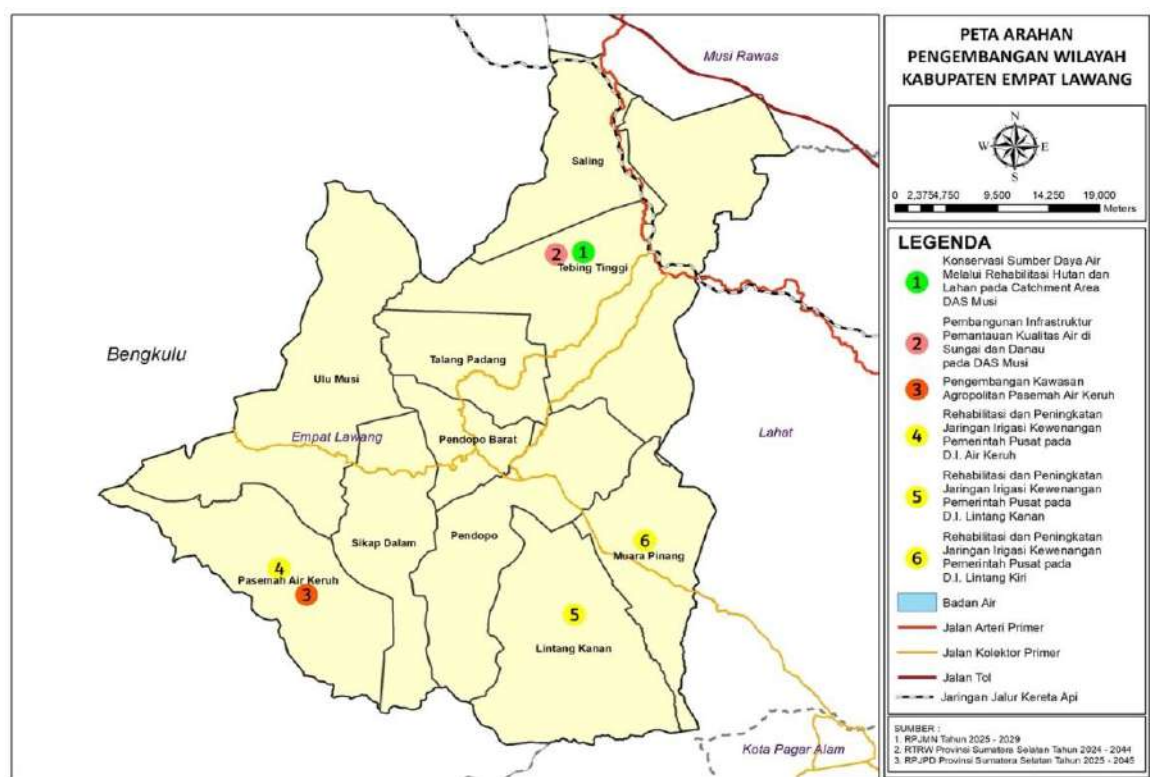
Pembangunan di Kabupaten Empat Lawang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Tabel 5.13
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,33	5,4 - 5,80	5,5 - 6,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	19,447	18,14	21,21
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,00	0,96*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,48	9,07 - 10,18	9,00 - 9,40
5	Gini Ratio	0,284	0,280 - 0,250	0,250 - 0,230
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,56	71,00	72,07
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		199.855,46	217.277,21
8	IKLH Daerah	76,15	66,92	67,17
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,68	2,65	2,38 - 2,67

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.20
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang



Kabupaten Empat Lawang memiliki 2 PKL (Tebing Tinggi dan Ulu Musi). Arahan pengembangan Kabupaten Empat Lawang yaitu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata, diarahkan sebagai pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Empat Lawang menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* sebesar 34,04%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparaasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,61%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,21%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Empat Lawang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,4-4,6% melalui sektor unggulan
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,0-9,5% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,0%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 68,03.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 74,36%, akses air minum layak sebesar 69,33%, dan akses sanitasi layak sebesar 39,84%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan, dan D.I. Lintang Kiri.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah.
- 8) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 9) Peningkatan produktivitas perternakan/panagn hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).

- 10) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 12) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 13) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 14) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 15) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 16) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 17) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 18) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 19) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).

- 20) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 23) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 24) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 25) Pengembangan destinasi wisata.
- 26) Pengembangan Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh.
- 27) Peningkatan penanganan dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan tingkat I.
- 28) Peningkatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah daerah terutama dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital.
- 29) Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana.
- 30) Inklusivitas pembangunan di antara berbagai kelas ekonomi.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Empat Lawang diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan pertanian terpadu, agribisnis berkelanjutan, dan ekowisata berbasis sumber daya alam, dengan dukungan infrastruktur modern serta pelayanan publik berbasis digital.**

5.2.12 Kabupaten Muara Enim

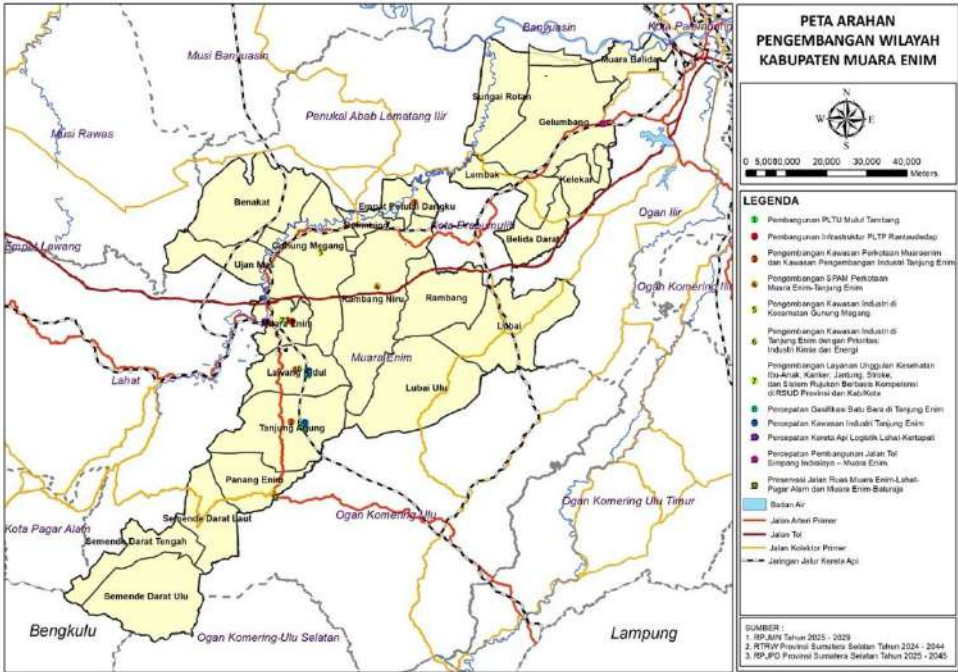
Pembangunan di Kabupaten Muara Enim diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 5.14
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42	7,44	7,9 - 8,1
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	182,108	210,00	205,92
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	18,51	18,84*	14,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,45	9,19	8,60 - 9,00
5	Gini Ratio	0,25	0,304	0,23 - 0,25
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,77	74,23	74,8
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2- e)		8.702.814,79	9.464.399,85
8	IKLH Daerah	73,06	67,00	67,25
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,13	3,76	3,45 - 3,79

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.21
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Muara Enim memiliki 1 PKW, yaitu Muara Enim. Arah pengembangan Kabupaten Muara Enim yaitu, pusat industri pertambangan batubara dan turunannya, sebagai lumbung energi, pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan disekitarnya, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di kecamatan Gunung Megang, Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 94,73% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 69,59%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,7%; 3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,26%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,87%; dan 5) Sektor Konstruksi sebesar 3,31%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Muara Enim pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Muara Enim (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Kawasan Industri Tanjung Enim.
- 2) Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km.
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.
- 4) Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim.
- 5) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 7,65% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,89%
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,69%.
- 4) Peningkatan IPM sebesar 74,8.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan Provinsi Sumatera Selatan saat ini jalan mantap sebesar 93,52%, akses air minum layak sebesar 91,18%, dan akses sanitasi layak sebesar 86,54%.
- 6) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muaraenim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim.
- 7) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 8) Pengembangan industri hilirisasi/industrialisasi di Tanjung Enim.

- 9) Hilirisasi hasil tambang batubara, termasuk produk-produk turunan, seperti briket, gasifikasi batubara, dan karbon aktif.
- 10) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Muara Enim (PHTC).
- 11) Pengembangan SPAM Perkotaan Muara Enim-Tanjung Enim.
- 12) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC).
- 13) Preservasi jalan ruas Muara Enim-Lahat-Pagar Alam dan Muara Enim-Baturaja.
- 14) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 15) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 16) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intesifikasi).
- 17) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 18) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 20) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 21) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 22) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta

pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 23) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 24) Pembangunan infrastruktur PLTP Rantau Dedap.
- 25) Pembangunan PLTU Mulut Tambang.
- 26) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muaraenim-Tarahan-Kalianda.
- 27) Pembangunan infrastruktur sistem jaringan transmisi listrik 275 kV Lumutbalai-Muaraenim-Gumawang-GITET 275 kV Lampung 1.
- 28) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 29) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 30) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 31) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industry (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 32) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 33) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 34) Indikasi daerah prioritas intervensi program Makan Bergizi Gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC).
- 35) Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- 36) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 37) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 38) Penurunan *stunting*.

- 39) Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang.
- 40) pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 41) peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 42) Optimalisasi verifikasi dan validas data kemiskinan melalui pemanfaatan data regsossek.
- 43) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur *high value economy & industry*.
- 44) Penguatan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- 45) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan.
- 46) Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan mitigasi bencana.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan industri berbasis energi dan sumber daya alam, dengan fokus pada hilirisasi sektor pertambangan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.**

5.2.13 Kota Prabumulih

Pembangunan di Kota Prabumulih diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Prabumulih sebagai berikut:

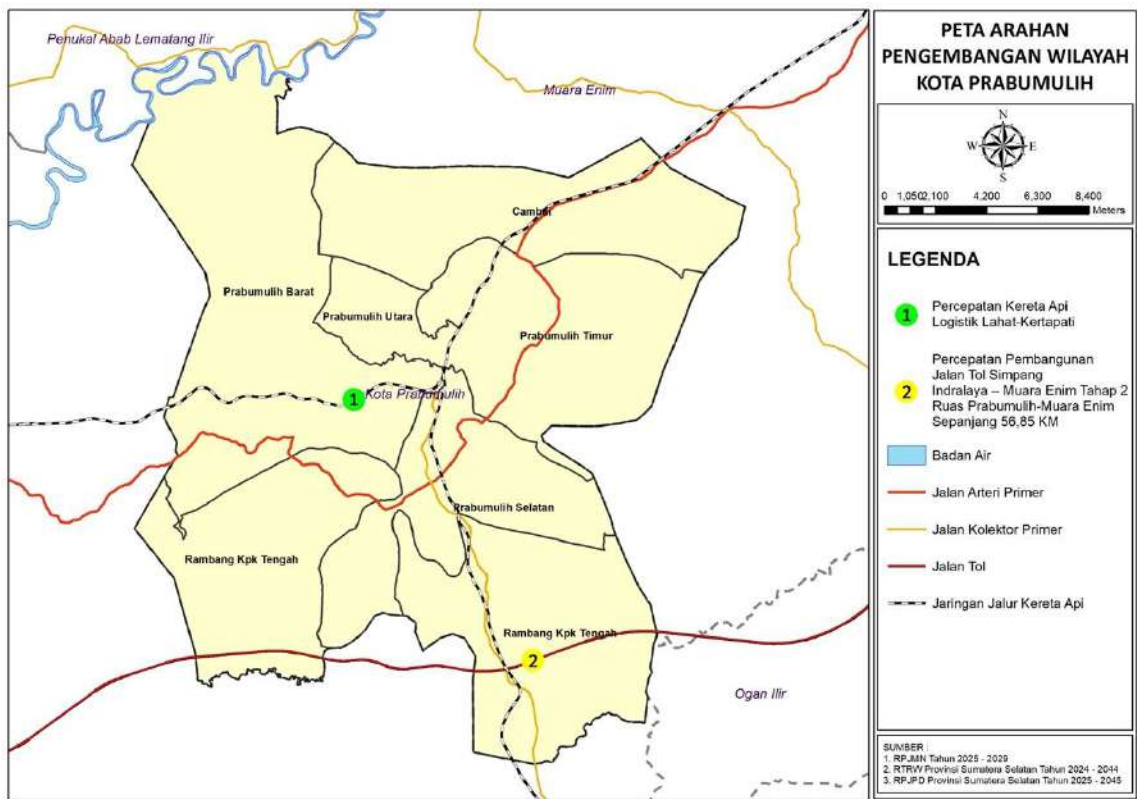
Tabel 5.15
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37	5,65	6,0 - 6,3

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	51,808*	56,54	60,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,51	1,57*	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,75	9,60	8,70-9,00
5	Gini Ratio	0,343	0,343	0,298- 0,305
6	Indeks Pembangunan Manusia	79,17	79,30	79,55
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		30.122,55	34.252,77
8	IKLH Daerah	68,97	63,50	62,67
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,72	4,65	4,63 - 4,66

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.22
Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Prabumulih digolongkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu, Kota Prabumulih memiliki 2 (dua) kegiatan PSN meliputi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km dan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati. Arahana pengembangan Kota Prabumulih yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah di Kota Prabumulih pada tahun 2024 berdasarkan sektor lapangan usaha terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi sebesar 70,90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,15%; 2) Sektor Konstruksi sebesar 17,12%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,85%; 4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,20%; dan 5) Sektor Real Estate sebesar 7,58%.

Arahana Proyek Strategis Nasional di Kota Prabumulih pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Prabumulih (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Pembangunan jalan tol Simpang Indralaya–Muara Enim tahap 2 Ruas Prabumulih-Muara Enim sepanjang 56,85 km.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,7% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,4% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,63%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 79,55.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak sebesar 94,94%, akses sanitasi sebesar 95,83%.
- 6) Peningkatan produktivitas perkebunan menuju kedaulatan pangan.
- 7) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 8) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 9) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 10) Optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah seperti hilirisasi produk nanas.
- 11) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 12) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 13) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data regsosek.
- 14) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Prabumulih diarahkan untuk menjadi **kota industri, energi, dan agroindustri berwawasan lingkungan dengan konektivitas tinggi serta kualitas hidup yang baik.**

5.2.14 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

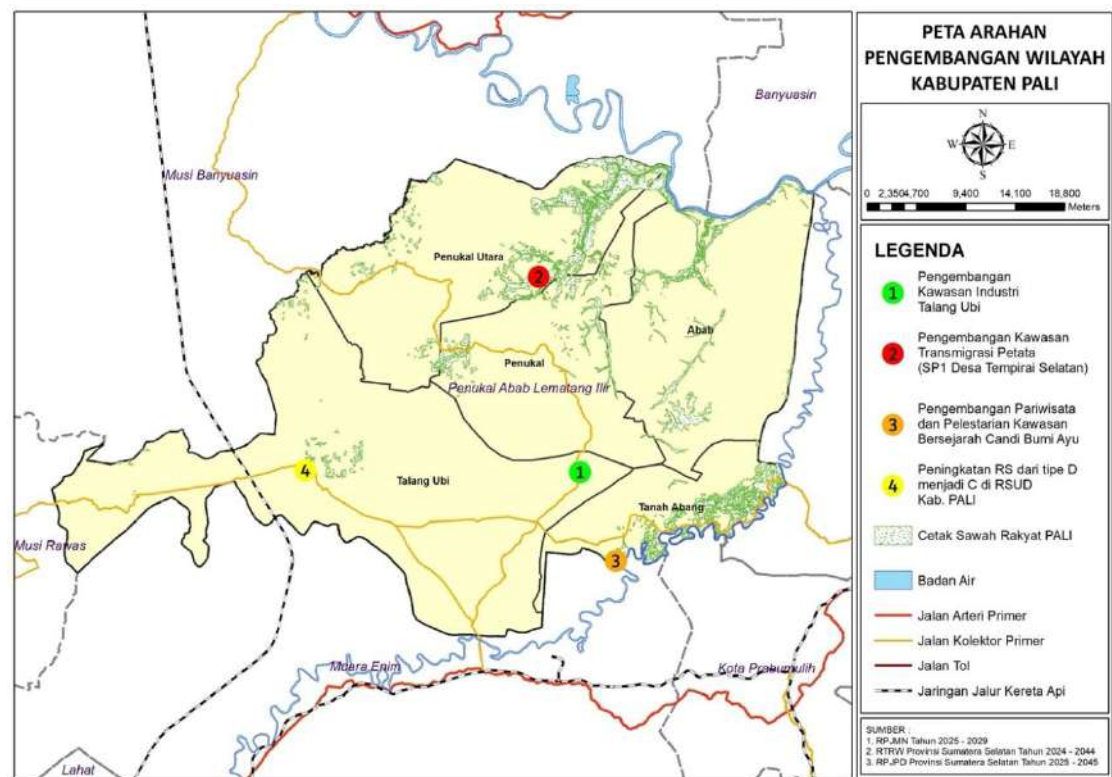
Pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

Tabel 5.16
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,72	5,30 - 5,40	6,20 - 6,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	45,701	49,83	52,34
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,40	1,27*	1,50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,27	9,0	8,8
5	Gini Ratio	0,243	0,285	0,284
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,55	71,56	73,16
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		318.319,90	353.289,47
8	IKLH Daerah	72,75	68,20	72,37
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,45	3,44

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.23
Peta Arahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 1 PKL (PKL Talang Ubi/Pendopo). Arahan pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 4 (empat) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 38,94%, 2) Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,26%, 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,68% dan 4) Sektor Konsruksi dengan *share* sebesar 14,91%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu:

- 1) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,70-5,90% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,8% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,44%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 72,13.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 95,99%, akses air minum layak sebesar 94,09%, dan akses sanitasi layak sebesar 95,72%.

- 6) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (SP1 Desa Tempirai Selatan).
- 7) Peningkatan RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
- 8) Peningkatan Produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet).
- 9) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet).
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet).
- 11) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas peoduksi industri (sawit dan karet).
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet.
- 13) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 14) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
- 15) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
- 16) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
- 17) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 18) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 19) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 20) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 21) Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan.
- 22) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
- 23) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan

- 25) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial EKonomi (Regsosek).
- 26) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten PALI diarahkan untuk menjadi **pusat industri berbasis perkebunan dan energi berkelanjutan, dengan konektivitas tinggi dan ekonomi inklusif yang berbasis budaya lokal.**

5.2.15 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

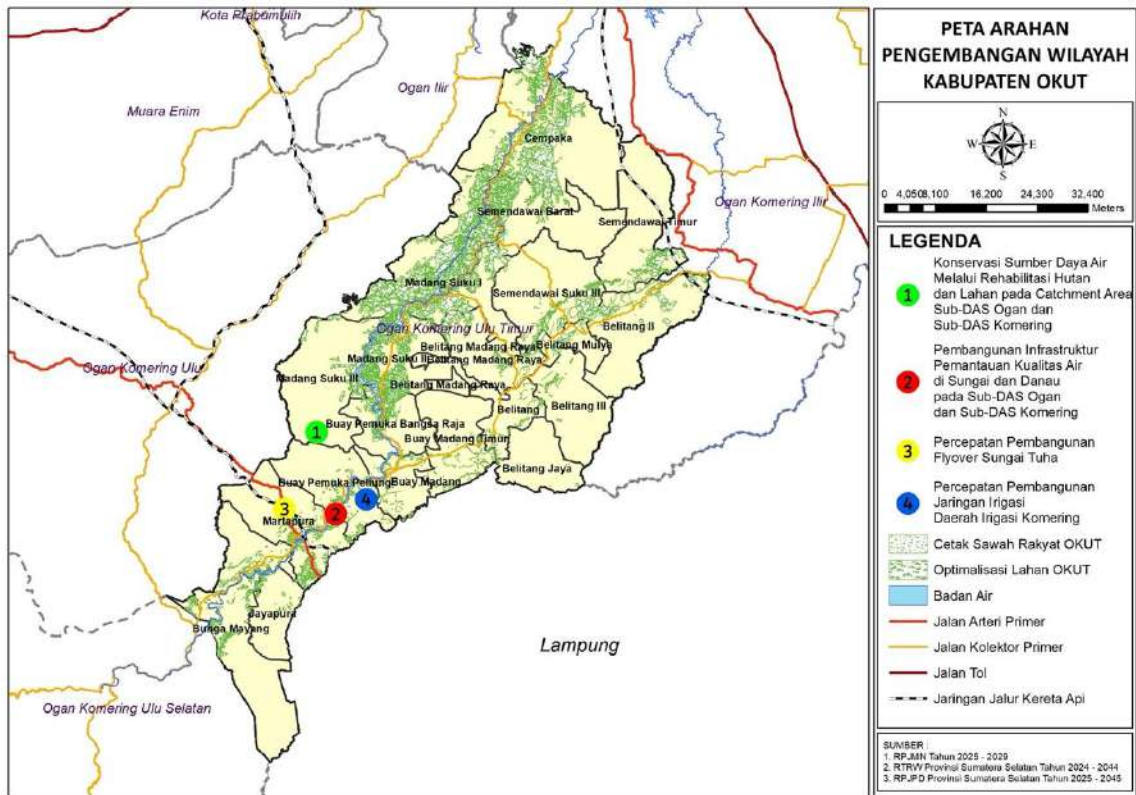
Tabel 5.17
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	5,1 - 5,5	5,8 - 6,1
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	31,504*	32,57- 33,40	33,40
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,16	3,17*	3,32
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,86	8,4 - 9,6	8,50-8,90
5	Gini Ratio	0,248	0,230- 0,280	0,259
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,42	74,82	75,32

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		300.005,31	327.836,37
8	IKLH Daerah	69,54	66,55	66,80
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,10	3,10 - 3,30	3,05-3,15

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.24
Peta Arahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu di Gumawang dan Martapura. Arahan pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan *biodiesel/ biofuel* berbasis kelapa

sawit, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,35%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,66%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 17,92%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,01%; dan 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,80%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati khususnya proyek *flyover* Sungai Tuha.
- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2027 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,35% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,79% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,24%.
- 4) Peningkatan IPM sebesar 75,32.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap provinsi sebesar 94,11%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 96,19%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 88,91%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 7) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 8) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 10) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 11) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 13) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
- 14) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 15) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 16) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 17) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 18) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 19) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 20) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 22) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 23) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 24) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 25) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 26) Pendekatan pengembangan pertanian holistik melalui model *closed-loop*.
- 27) Peningkatan kerjasama perdagangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- 28) Mendorong realisasi investasi sektor riil dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.

- 29) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial.
- 30) Pemerataan kualitas pelayanan dasar dan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik.
- 31) Standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan untuk menjadi **pusat ketahanan pangan dan agribisnis unggulan berkelanjutan, dengan infrastruktur pendukung yang kuat serta daya saing ekonomi berbasis inovasi dan investasi.**

5.2.16 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) diharapkan dapat mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 5.18

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

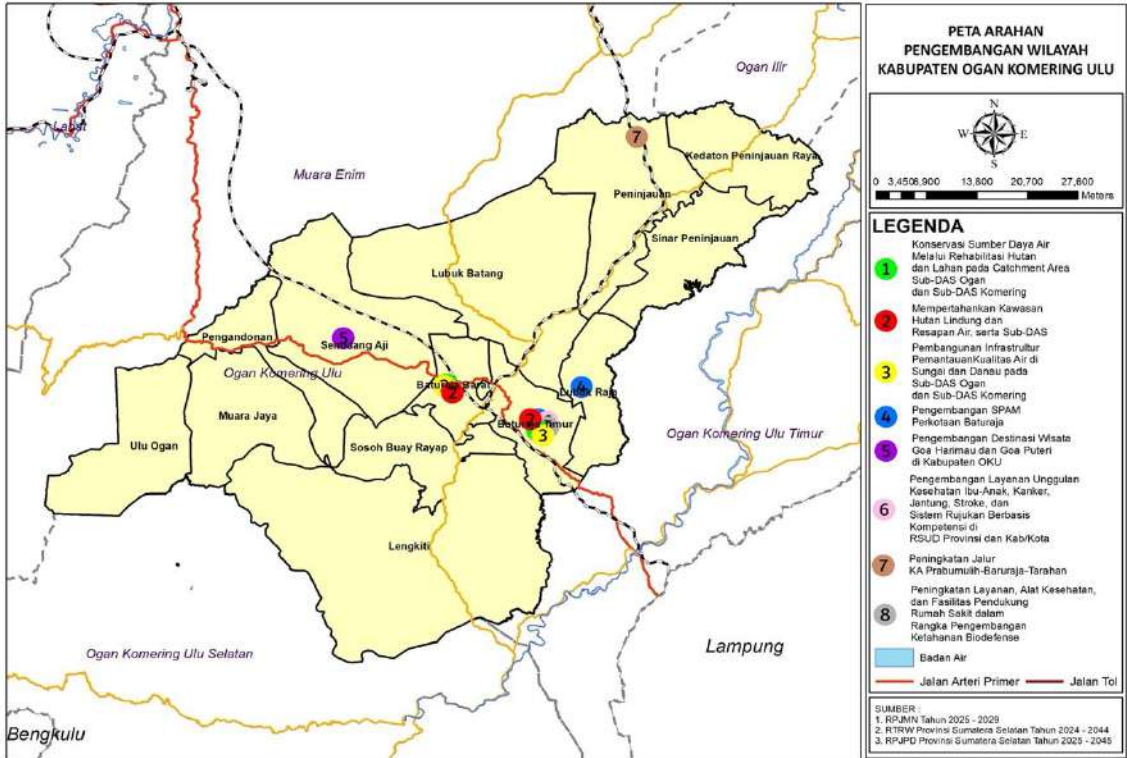
No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04 (TW II)	5,25 - 5,45	5,90 - 6,20
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	53,428	54,79	56,98- 57,47
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,03	2,94*	3,11
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,08	9,73-10,00	9,10-9,30
5	Gini Ratio	0,294	0,290- 0,293	0,285- 0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,57	75,01	75,58
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		220.775,86	238.331,87

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
8	IKLH Daerah	73,10	69,00	69,25
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,74 - 3,85	3,63 - 3,80

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.25

Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Baturaja, dan 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengandonan dan Peninjauan. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya diantaranya, pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,70%, 2) Industri pengolahan sebesar 19,30%, 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,07%, dan 4) Pertambangan dan penggalian sebesar 13,36%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2027, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,36-5,66% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,23-9,25% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,63-3,85%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 75,58.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 95,78%, akses air minum sebesar 82,55%, dan akses sanitasi layak sebesar 82,72%.
- 6) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Baturaja, antara lain melalui:
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- 7) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Baturaja (PHTC).
 - 8) Pengembangan SPAM Perkotaan Baturaja.
 - 9) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC).
 - 10) Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk-III dr. Noesmir Baturaja.
 - 11) Preservasi jalan ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua.
 - 12) Pengembangan kota agropolitan Baturaja.
 - 13) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
 - 14) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
 - 15) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
 - 16) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
 - 17) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
 - 18) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
 - 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
 - 20) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
 - 21) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan

akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 22) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 23) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 24) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 25) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 26) Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Baturaja-Tarahan.
- 27) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 28) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 29) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 30) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 31) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 32) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.

- 33) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 34) Pengembangan destinasi wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 35) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
- 36) Pengembangan Kawasan Industri.
- 37) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 38) Mempercepat hilirisasi dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 39) Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha guna menjaga momentum pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder.
- 40) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 41) Mengadakan program pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka meningkatkan *employability* dari para tenaga kerja.
- 42) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan puskesmas pembantu.
- 43) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- 44) Intensifikasi kegiatan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* terutama di daerah dengan akses kesehatan yang cenderung terbatas.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, agribisnis, dan perkotaan yang berkelanjutan, dengan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta daya saing yang tinggi.**

5.2.17 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera

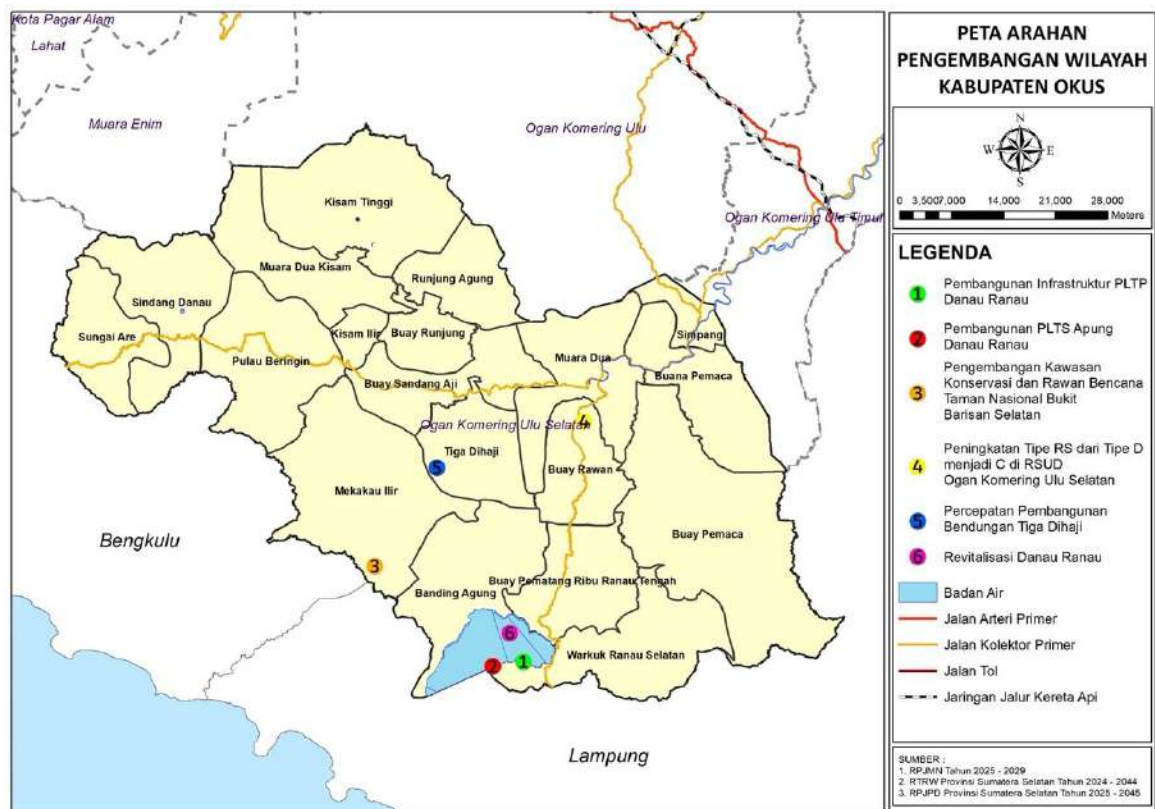
Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

Tabel 5.19
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan

No.	Indikator Makro	Capaian 2025	Target	
			2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,00	5,3 - 5,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	27,723*	25,27	30,11
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,75	1,74*	2,3
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,17	9,30	8,90 - 9,20
5	Gini Ratio	0,291	0,327	0,27
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,98	74,8	77,20
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)		168.302,39	182.470,98
8	IKLH Daerah	74,92	69,86	70,11
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.92	1,78	1,76 - 1,91

Sumber: Capaian 2025: BPS 2026, KLHK 2025; Target 2026 dan 2027: Perda RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Gambar 5.26
Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kabupaten OKU Selatan



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muaradua. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau, pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata, Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan bandara udara Bending Agung, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 84,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024 adalah 1) Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,77 %; 2) Perdagangan sebesar 24,43%; 3) Konstruksi sebesar 17,42%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,19%; dan 5) Sektor *Real Estate* sebesar 4,55 %.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Permenko RI No.16 Tahun 2025) yaitu Bendungan Tiga Dihaji.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2027, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,30% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,22% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,76%.
- 4) Peningkatan IPM sebesar 77,2.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 97,20%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 82,60%, akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 59,80%.
- 6) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.

- 7) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 8) Revitalisasi Danau Ranau.
- 9) Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau.
- 10) Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau.
- 11) Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan.
- 12) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 13) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 14) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 15) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 17) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 18) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- 19) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
- 20) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
- 21) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
- 22) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 23) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi.
- 24) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 25) Perluasan akses internet dan digitalisasi.
- 26) Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
- 27) Dukungan promosi dan kemudahan investasi.
- 28) Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- 29) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu.
- 30) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk menjadi **kawasan ekonomi hijau berbasis agribisnis, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan, dengan infrastruktur berkelanjutan serta ketahanan bencana yang tangguh.**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2027 yaitu **“Peningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui kesehatan, pendidikan, IPTEK, dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta Penguatan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang toleran berbasis kearifan lokal”** yang terdiri dari 7 (tujuh) Prioritas Daerah, yaitu:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

Berdasarkan tema dan Prioritas daerah tersebut, disusun program/kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan rekapitulasi per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.953.569.797.213
2	Dinas Kesehatan	588.777.538.687
	RSUD Siti Fatimah	501.387.535.366
	RS Mata	43.710.050.936
	RS Gigi dan Mulut	20.215.455.007
3	RS. Dr. Ernaldi Bahar	50.322.707.320
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	193.183.995.321
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	1.226.959.864.745
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	152.190.089.100
7	Satuan Polisi Pamong Praja	43.325.852.761
8	Dinas Sosial	56.588.701.695
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.968.692.251
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.402.031.674
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.673.896.302
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	54.613.059.700
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	57.687.109.537
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.783.246.351
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.415.948.392
16	Dinas Perhubungan	88.507.443.843
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.108.509.733
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41.325.000.000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.998.007.259
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	94.649.740.915
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69.407.164.845
22	Dinas Perpustakaan	26.166.200.362
23	Dinas Kearsipan	14.229.803.399
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.591.400.000
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	174.830.146.234
26	Dinas Perkebunan	39.431.511.798
27	Dinas Kehutanan	93.919.394.239
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	41.090.761.437
29	Dinas Perdagangan	33.587.898.515
30	Dinas Perindustrian	35.193.986.592
31	Sekretariat Daerah	387.933.799.471
A	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.974.367.463
B	Biro Hukum dan HAM	3.944.505.887
C	Biro Kesejahteraan Rakyat	46.285.687.138
D	Biro Perekonomian	5.813.175.609
E	Biro Administrasi Pembangunan	2.867.712.266
F	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.860.487.274
G	Biro Organisasi	2.272.541.759

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
H	Biro Umum dan Perlengkapan	267.160.784.100
I	Biro Humas dan Protokol	44.754.537.974
32	Sekretariat DPRD	453.951.689.653
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.351.156.206
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.148.552.175.353
35	Badan Pendapatan Daerah	310.335.347.291
36	Badan Kepegawaian Daerah	24.051.359.089
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	45.293.301.305
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	33.292.651.918
39	Badan Penghubung	20.821.808.114
40	Inspektorat	80.522.735.172
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.099.753.640
	Jumlah	11.626.018.318.742

Secara total, terdapat 226 Program yang tersebar pada 53 Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 11.626.018.318.742-

Secara rinci, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Satuan, Pagu Indikatif dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat sebagaimana pada lampiran Tabel 6.2.

Selanjutnya, total pagu anggaran untuk Prioritas Daerah dan untuk masing-masing Prioritas Daerah serta masing-masing Program Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.
 Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
 Tahun 2027

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
1.	Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.	897.626.665.291	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. RS. Umum Daerah Siti Fatimah 4. RS. Mata (OBK) 5. RS. Gigi dan Mulut (OBK) 6. RS. Ernaldi Bahar (OBK) 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian 10. Dinas Pemuda dan Olahraga 11. Dinas Perpustakaan
2.	Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	2.017.020.858.169	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Perkebunan 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13. Dinas Perdagangan
3.	Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	472.538.027.847	1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
			3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 6. Dinas Kehutanan 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8. Dinas Perindustrian
4.	Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/ Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1.633.098.122.666	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Sosial 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 8. Dinas Perhubungan 9. Badan Penghubung
5.	Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	1.032.212.903.778	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	5.144.032.726.503	1. Dinas Pendidikan 2. RSUD Siti Fatimah 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marta dan Tata Ruang 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Dinas Sosial 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 8. Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Kearsipan 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 14. Biro Hukum 15. Biro Kesejahteraan Rakyat 16. Biro Perekonomian 17. Biro Administrasi Pembangunan 18. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19. Biro Organisasi 20. Biro Umum 21. Biro Humas dan Protokol 22. Sekretariat DPRD 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 25. Badan Pendapatan Daerah 26. Badan Kepegawaian Daerah

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
			27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 28. Inspektorat
7.	Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal	102.245.744.662	1. Dinas Pendidikan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Dinas Perpustakaan 6. Dinas Kearsipan 7. Biro Kesejahteraan Rakyat 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total		11.268.775.048.916	

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Untuk memberikan kepastian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan maka perlu ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 2027.

Untuk itu, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya maka dapat dijelaskan beberapa indikator kinerja pembangunan Sumatera Selatan yang akan dicapai pada tahun 2027 yaitu:

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 - 7,2*
2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	104,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,24 - 9,24*
4	Rasio Gini	Indeks	0,298-0,305*
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56 - 0,57*
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	76,42
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,70
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,45 - 3,54

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Keterangan : * Target indikator disesuaikan dengan target kewilayahan untuk
Provinsi Sumatera Selatan pada Rancangan Awal RKP 2027

Keterangan: Target Disesuaikan dengan Kesepakatan pada Pembahasan
Rakortekrenbangnas Penyusunan RKP Tahun 2026

7.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,56 - 0,57*
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,49
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	12,9
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 - 7,2*
5	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	104,00
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52
7	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
8	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,05
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	23,79
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,70
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	76,42
12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,08
13	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,14
14	Tingkat Kemiskinan	%	8,24 - 9,24*
15	Rasio Gini	Indeks	0,298-0,305*
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,45 - 3,54
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (77-78)
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,441

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Keterangan: ^{a)} Target Disesuaikan dengan Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro
Keterangan : * Target indikator disesuaikan dengan target kewilayahan untuk

Provinsi Sumatera Selatan pada Rancangan Awal RKP 2027Daerah
antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 15 Mei 2024

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2027

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,08
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,88
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1020,61
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	92,76
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,70
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	14,80
7	Pengelolaan Sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	23
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	45
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	76,42
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,14
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,03
13	Rasio Penduduk	%	103,40
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	105,8
	Indeks Akses Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,473
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 - 7,2*
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,24 - 9,24*
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	104,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,45 - 3,54
5	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,305*
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,56 - 0,57*
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,49
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,347
9	Prevalensi Stunting	%	12,9
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36 – 9,38
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97-13,00
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74,00
13	Indeks Literasi Digital	Angka	3,52
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	52
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,35
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,91
17	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	68
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,66-69,67
19	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,441

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,34
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,80
22	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,93
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Jumlah	40.822
	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	3,40
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,54
	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	48,25
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Angka Ketergantungan	%	46,93
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,03
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,2
4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	3.090.903.000
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,65
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,85
7	Indeks Inovasi Daerah	Skor	78,09
8	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	63,05
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	23,79
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	24,30
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,26
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp. Miliar	246.397,12
13	Ekspor Barang dan Jasa	Juta US\$	7.216
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	72 (puas)
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	69,6
16	Persentase Desa Mandiri	%	20,98
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,256
18	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
19	Inklusi Keuangan	%	95,4
20	Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,11
21	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	17,90
22	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,74
23	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	13.338.639,98
24	Total Kredit/PDRB	%	18,69
25	Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,11
	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%	1,43
	Indeks Entrophy Theil	Indeks	1,24
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,95
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian	%	3,330
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,79

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
	Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	45,62
IV	Aspek Pelayanan Umum		
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	83
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,13
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,70)
4	Indeks Integritas Daerah	Indeks	77,6
5	Persentase Penegakan Perda	%	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	83,65
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	80,0
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52
	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,041
III	Aspek Pelayanan Umum		
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	Urusan Pendidikan		
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97-13,00
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36 – 9,38
1.3	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	Literasi Membaca	%	11,76 – 14,70
	Numerasi	%	2,94 – 8,82
1.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	Literasi Membaca	%	100
	Numerasi	%	68,1
1.5	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,93
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	75,514
2	Urusan Kesehatan		
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94
2.2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	97
2.3	Angka Kematian Balita	%	13,1
2.4	Prevalensi Stunting	%	12,9

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
2.5	Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>)	%	95
2.6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,63
2.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90
2.8	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	18
2.9	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95
2.10	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	30
2.11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,347
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 Km	2,50
3.2	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang	Index	70
3.3	Kapasitas air baku	m ³ /detik	2,69
3.4	Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,74
3.5	Akses Air Minum Layak	%	92,76
3.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	84,32
3.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	40,50
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	69,60
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
5.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41
5.2	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Angka	72,56
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	64,08
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	%	100
6	Urusan Sosial		
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,52
III.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja		
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,85
1.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.900.000
1.3	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak Dasarnya	%	74

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,50
2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,441
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,07 – 94,18
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68
3	Urusan Pangan		
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82.08
3.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4.88
4	Urusan Pertanahan		
4.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	95
5	Urusan Lingkungan Hidup		
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,70
5.2	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	20,52
5.3	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	39,97
5.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	52,5
5.5	Pengelolaan Sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	23
5.6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	% RT	45
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Rasio	90,44
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9,70
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	58
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	99, 060
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	50,58
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	53,01
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	53,61
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Persentase Desa Mandiri	%	20,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertilly Rate/TFR) Per wanita usia subur (15-49 Tahun	Angka	2,28
8.2	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Mcpr)	%	88,04
8.3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specitif Fertility Rate (ASFR 15-19)	Angka	29,07
9	Urusan Perhubungan		
9.1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,685
9.2	V/C Rasio	Rasio	0,385
9.3	Rata - rata <i>Load Factor</i> Angkutan Umum	%	72,00
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
10.1	Indeks IPTIK	Indeks	6,26
10.2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,06
10.3	Indeks SPBE	Indeks	3,13
11	Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Rasio Kewirausahaan	%	2,65
11.2	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,42
11.3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,64
12	Urusan Penanaman Modal		
12.1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,23
12.2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,7
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	58,335
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,383
14	Urusan Statistik		
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,75
15	Urusan Persandian		
15.1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	378 (metode perhitungan baru)
16	Urusan Kebudayaan		
16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	59,91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
17	Urusan Perpustakaan		
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	74,00
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72,00
18	Urusan Kearsipan		
18.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	92,25
18.2	Indeks Pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	86
III.3	Layanan Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	118,18
1.2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai	94,51
2	Urusan Pariwisata		
2.1	Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	2,2
2.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.320
2.3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	21.002.927
2.4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	3.090.903.000
3	Urusan Pertanian		
3.1	Nilai Tukar Petani	%	124,25
3.2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :		
	- Padi	%	5,00
	- Jagung	%	2,50
3.3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
	- Cabai Merah	%	10,00
	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,111
		Ton	1.011.693,33
	Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,449
		Ton	3.445.793,68
	Persentase peningkatan produksi Kopi	%	3,718
		Ton	243.956,93
	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	1,447
		Ton	64.357,14
4	Urusan Kehutanan		
4.1	Persentase Tutupan Lahan	%	19,40
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	100
5.2	Persentase Desa Berlistrik	%	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
5.3	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	24,30
5.4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	180
5.5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	1020,61
6	Urusan Perdagangan		
6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,06
6.2	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,89
6.3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		6,88
7	Urusan Perindustrian		
7.1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)	%	20,03
7.2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,17
7.3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,44
8	Urusan Transmigrasi		
8.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi	Indeks	57,45
III.4	Penunjang Urusan		
1	Sekretariat Daerah		
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (77-78)
1.2	Nilai SAKIP	Nilai	BB (79,33)
1.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,70)
1.4	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,20
1.5	Indeks Reformasi Hukum	Angka	83
2	Sekretariat DPRD		
2.1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	89
3	Perencanaan		
3.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,5
4	Keuangan		
4.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
4.2	Revenue Mobilization		7,34
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD		
4.3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,256
4.4	Indeks Kapasitas Fiskal	Indeks	2,09 (Sedang)
5	Kepegawaian		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
5.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77
6	Pendidikan dan Pelatihan		
6.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	29
7	Penelitian dan Pengembangan		
7.1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	78,09
7.2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,03
7.3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	70
8	Pengawasan		
8.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,19
9	Pemerintahan Umum		
9.1	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6,7
9.2	Indeks kerukunan Umat Beragama IKUB)	Indeks	78,35
9.3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	83,65
10	Pengelolaan Penghubung		
10.1	Indeks Kepuasan terhadap layanan penghubung	Indeks	93

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Keterangan : * Target indikator disesuaikan dengan target kewilayahan untuk Provinsi Sumatera Selatan pada Rancangan Awal RKP 2027

7.4. Indikator Outcome Pembangunan

Tabel 7.4

Indikator Outcome Pembangunan RKPD Tahun 2027

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
III	Aspek Pelayanan Umum		
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	Urusan Pendidikan		
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100
1.3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69.24
1.4	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100
1.5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,14
1.6	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67.40
1.7	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,14
1.8	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62.94
1.9	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,3
1.10	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,91
1.11	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,45
1.12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,48
1.13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,68
1.14	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	83
1.15	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	86,58
1.16	Iklim keamanan SMA	Nilai	81,86
1.17	Iklim keamanan SMK	Nilai	72,57
1.18	Iklim keamanan SDLB	Nilai	77,7
1.19	Iklim keamanan SMPLB	Nilai	72,6
1.20	Iklim keamanan SMALB	Nilai	77,9
1.21	Iklim kebinekaan SMA	Nilai	74,01
1.22	Iklim kebinekaan SMK	Nilai	73,15
1.23	Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	73,67
1.24	Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	77,81

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
1.25	Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	76,8
1.26	Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	63,26
1.27	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	63,93
1.28	Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	70,9
1.29	Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	72,32
1.30	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	70
2	Urusan Kesehatan		
2.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	97
2.2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98.7
2.3	Penemuan Kasus TBC	%	90
2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	16,3
2.5	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persenta se	60
2.6	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persenta se	45
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	2
3.2	Penetapan RDTR	Perda/Pe rkada	-
3.3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	14,80
3.4	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	23
3.5	Persentase kondisi mantap jalan	%	92,47
3.6	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	37
3.7	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	-
3.8	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13.440
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
4.1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	69,6
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
5.1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
5.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	45,26
5.3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	70
6	Urusan Sosial		
6.1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	5.000
6.2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
6.3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
6.4	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
6.5	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
6.6	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
7	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
7.1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	83.65
7.2	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	100
III.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja		
1.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	52
1.2	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	410000
1.3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	-
1.4	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	-
1.5	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	orang	8.917
1.6	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	orang	100.000
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
2.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
3	Urusan Pangan		
3.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82.08
3.2	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	%	54
4	Urusan Pertanahan		
4.1	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	9.220
4.2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	1.800
5	Urusan Lingkungan Hidup		
5.1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	45
5.2	Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)	poin	68,70
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	17
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Persentase Desa Mandiri	%	20,98
7.2	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	5
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,80
8.2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	88,04
9	Urusan Perhubungan		
9.1	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	100
9.2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	0,685
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
10.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	-
10.2	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	1,45
11	Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.64:0.64
11.2	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2.65
12	Urusan Penanaman Modal		
12.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	46,86
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58,335
13.2	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	14
14	Urusan Statistik		
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.75
15	Urusan Persandian		
15.1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	41
16	Urusan Kebudayaan		
16.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	75
16.2	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3
16.3	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	-
16.4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	-
16.5	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	-
17	Urusan Perpustakaan		
17.1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
17.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72.00
17.3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74.00
17.4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72.00
18	Urusan Kearsipan		
18.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	92.25
III.3	Layanan Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	305000
1.2	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	90
1.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	-
2	Urusan Pariwisata		
2.1	Rasio PDB Pariwisata	%	2,2
2.2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	3
3	Urusan Pertanian		
3.1	Jumlah Produksi Padi	Ton	3.368.008
3.2	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	1.014
4	Urusan Kehutanan		
4.1	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	45.000.000
4.2	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	374,57
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		
5.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	24.30
5.2	Rasio Elektrifikasi	%	100
6	Urusan Perdagangan		
6.1	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/Milyar Rupiah	212,813
6.2	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun	-
7	Urusan Perindustrian		
7.1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan	Rp	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Satuan	Target
	Non Migas (Rp. Triliun)		
7.2	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	-
7.3	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	20,03
7.4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,17
8	Urusan Transmigrasi		
8.1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	60

Sumber : BA Rakortekrenbang Tahun 2026

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, serta memperhatikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 mengemban tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

RKPD Tahun 2027 harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan KUA dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2027. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan APBD. Prioritas pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2027 adalah:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
3. Ketangguhan Daerah Dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar Perangkat Daerah, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan perbaikan terus-menerus.

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
2. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai bentuk pelaksanaan tahun ketiga.

3. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027 selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
4. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.
7. RKPD Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sehingga harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholders* untuk bekerja secara aktif dan efektif dalam mencapai target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
8. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 harus dipedomani oleh 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dalam menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

9. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan antar kewilayahan Kabupaten/Kota Tahun 2027.
10. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 digunakan sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Dengan kaidah pelaksanaan seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan dari pembangunan daerah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**LAMPIRAN
RANCANGAN AKHIR**

**R K P D
2 0 2 7**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2027**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan						2.953.569.797.213,00							3.198.754.507.310,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.953.569.797.213,00							3.198.754.507.310,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.953.569.797.213,00							3.198.754.507.310,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.929.829.063.844,00							2.175.013.773.941,00	
			-	-		-	-	1.929.829.063.844,00						-	2.175.013.773.941,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.150.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		-						1.150.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						750.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.785.276.423.844,00					-		2.030.461.133.941,00	
		-						1.785.276.423.844,00					-		2.030.461.133.941,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	1.488.000.000,00						-	1.488.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	275.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	135.000.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.782.303.423.844,00						-	2.027.488.133.941,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.782.303.423.844,00							2.027.488.133.941,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	14.331 Orang/ Bulan	1.782.303.423.844,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-		-	2.027.488.133.941,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.488.000.000,00							1.488.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	4 Dokumen	1.488.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.488.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	600.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						275.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	275.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						135.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	135.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						765.000.000,00					-		765.000.000,00	
		-						765.000.000,00					-		765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	215.000.000,00						-	215.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						215.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	215.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	215.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.790.000.000,00					-		1.790.000.000,00	
		-						1.790.000.000,00					-		1.790.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	135.000.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	1.380.000.000,00						-	1.380.000.000,00	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						135.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	135.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	3 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.380.000.000,00							1.380.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	858 Orang	1.380.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.380.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.135.000.000,00					-		1.135.000.000,00	
		-						1.135.000.000,00					-		1.135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	195.000.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	475.000.000,00						-	475.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	115.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						475.000.000,00							475.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	475.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	475.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						175.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		1 Paket	175.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						195.000.000,00							195.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-		1 Laporan	195.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	195.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.550.000.000,00					-		5.550.000.000,00	
		-						5.550.000.000,00					-		5.550.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-		-	1.800.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-		-	2.800.000.000,00						-	2.800.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		-	450.000.000,00						-	450.000.000,00	
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.800.000.000,00							2.800.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-		8 Unit	2.800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.800.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.800.000.000,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	9 Paket	1.800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.800.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						134.297.640.000,00					-		134.297.640.000,00	
		-						134.297.640.000,00					-		134.297.640.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.060.000.000,00						-	3.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	131.075.640.000,00						-	131.075.640.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	102.000.000,00						-	102.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.060.000.000,00							3.060.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	3.060.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.060.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						102.000.000,00							102.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	102.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	102.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						131.075.640.000,00							131.075.640.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	131.075.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	131.075.640.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
		-						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	450.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	550.000.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						550.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	21 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	550.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	450.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						600.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	600.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						125.000.000,00					-		125.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	4 Unit Kerja	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.003.069.033.369,00							1.003.069.033.369,00	
			-	-		-	-	1.003.069.033.369,00						-	1.003.069.033.369,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						582.068.828.546,00					-		582.068.828.546,00	
		-						582.068.828.546,00					-		582.068.828.546,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	875.000.000,00						-	875.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	1.623.799.046,00						-	1.623.799.046,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	555.000.000,00						-	555.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	207.305.467.000,00						-	207.305.467.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	1.750.000.000,00						-	1.750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.850.000.000,00						-	1.850.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	3.750.000.000,00						-	3.750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.850.000.000,00						-	1.850.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	17.500.000.000,00						-	17.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	336.690.320.000,00						-	336.690.320.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.594.242.500,00						-	1.594.242.500,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.750.000.000,00							1.750.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	5 Ruang	1.750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	3 Ruang	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	10 Unit	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.850.000.000,00							1.850.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Ruang	1.850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.850.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.850.000.000,00							1.850.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	10 Ruang	1.850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.850.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						555.000.000,00							555.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Ruang	555.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	555.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	10000 Paket	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1000 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						207.305.467.000,00							207.305.467.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	224031 Peserta didik	207.305.467.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	207.305.467.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.594.242.500,00							1.594.242.500,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	2189 Peserta Didik	1.594.242.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.594.242.500,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						1.623.799.046,00							1.623.799.046,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	1003 Orang	1.623.799.046,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.623.799.046,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						17.500.000.000,00							17.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	2 Satuan Pendidikan	17.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	17.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						336.690.320.000,00							336.690.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-		-	637 Satuan Pendidikan	336.690.320.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	336.690.320.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-		-	627 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	3 Komunitas	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						875.000.000,00							875.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	5 Ruang	875.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	875.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru						3.750.000.000,00							3.750.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	15 Ruang	3.750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						408.244.463.000,00					-		408.244.463.000,00	
		-						408.244.463.000,00					-		408.244.463.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	394.225.000,00						-	394.225.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	190.897.772.000,00						-	190.897.772.000,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	1.050.000.000,00						-	1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-		-	-	875.000.000,00						-	875.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	2.500.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	1.750.000.000,00						-	1.750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	-		-	-	875.000.000,00						-	875.000.000,00	
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	1.725.000.000,00						-	1.725.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	198.691.056.000,00						-	198.691.056.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.661.410.000,00						-	1.661.410.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	-		-	-	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.050.000.000,00							1.050.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	3 Ruang	1.050.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.050.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-		-	3 Ruang	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	10 Unit	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						875.000.000,00							875.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-		-	5 Ruang	875.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	875.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium						875.000.000,00							875.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	-		-	5 Ruang	875.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	875.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	10000 Paket	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1000 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						190.897.772.000,00							190.897.772.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	125996 Peserta didik	190.897.772.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	190.897.772.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.661.410.000,00							1.661.410.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	1398 Peserta Didik	1.661.410.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.661.410.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						394.225.000,00							394.225.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	92 Orang	394.225.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	394.225.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						1.725.000.000,00							1.725.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	96 Satuan Pendidikan	1.725.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.725.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						198.691.056.000,00							198.691.056.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-		-	323 Satuan Pendidikan	198.691.056.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	198.691.056.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	-		-	323 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	-		-	200 Orang	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	100 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	-		-	3 Ruang	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	10 Ruang	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						1.750.000.000,00							1.750.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	10 Ruang	1.750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	100 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						30.505.741.823,00					-		30.505.741.823,00	
		-						30.505.741.823,00					-		30.505.741.823,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	310.000.000,00						-	310.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	3.065.041.823,00						-	3.065.041.823,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	625.000.000,00						-	625.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	-		-	-	675.000.000,00						-	675.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	-		-	-	625.000.000,00						-	625.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	450.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	9.500.000.000,00						-	9.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	12.065.700.000,00						-	12.065.700.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	2.475.000.000,00						-	2.475.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	3 Unit	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1000 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						3.065.041.823,00							3.065.041.823,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	3096 Peserta Didik	3.065.041.823,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.065.041.823,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						2.475.000.000,00							2.475.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	982 Peserta Didik	2.475.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.475.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						310.000.000,00							310.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	120 Orang	310.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	310.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						9.500.000.000,00							9.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	1 Satuan Pendidikan	9.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	9.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						12.065.700.000,00							12.065.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-		-	40 Satuan Pendidikan	12.065.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	12.065.700.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	-		-	39 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	115.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	115.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru						675.000.000,00							675.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	-		-	5 Ruang	675.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	675.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						625.000.000,00							625.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	-		-	5 Ruang	625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	625.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						625.000.000,00							625.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	5 Ruang	625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	625.000.000,00	Dinas Pendidikan
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						716.700.000,00							716.700.000,00	
			-	-		-	-	716.700.000,00						-	716.700.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						477.800.000,00					-		477.800.000,00	
		-						477.800.000,00					-		477.800.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	-	477.800.000,00						-	477.800.000,00	
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						477.800.000,00							477.800.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	200 Orang	477.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	477.800.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						238.900.000,00					-		238.900.000,00	
		-						238.900.000,00					-		238.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	-	238.900.000,00						-	238.900.000,00	
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						238.900.000,00							238.900.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	100 Orang	238.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	238.900.000,00	Dinas Pendidikan
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						145.000.000,00							145.000.000,00	
			-	-		-	-	145.000.000,00						-	145.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						145.000.000,00					-		145.000.000,00	
		-						145.000.000,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	-	145.000.000,00						-	145.000.000,00	
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						145.000.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	-		-	1 Laporan	145.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	145.000.000,00	Dinas Pendidikan
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						75.000.000,00							75.000.000,00	
			-	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	5 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Dinas Kesehatan						588.777.538.687,00							612.288.068.773,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						588.557.538.687,00							612.046.068.773,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						588.557.538.687,00							612.046.068.773,00	
6.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						307.216.255.022,00							322.454.413.708,00	
			-	-		-	-	307.216.255.022,00						-	322.454.413.708,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.335.000.001,00					-		1.268.000.000,00	
		-						1.335.000.001,00					-		1.268.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	550.000.000,00						1 Berita Acara	605.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data		0 Data	50 Data	100.000.000,00						50 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00						1 Dokumen	181.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	320.000.001,00						1 Laporan	181.500.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						320.000.001,00							181.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	320.000.001,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Laporan	181.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data		0 Data	50 Data	100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		50 Data	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						165.000.000,00							181.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	165.000.000,00	-	-	-	-		1 Dokumen	181.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	550.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Berita Acara	605.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						263.026.186.671,00					-		270.468.694.523,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						263.026.186.671,00					-		270.468.694.523,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	560.340.000,00						20 Dokumen	616.374.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	192.500.000,00						2 Laporan	211.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		0 Orang/ Bulan	1124 Orang/ Bulan	262.273.346.671,00						1348 Orang/ Bulan	269.640.570.523,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						262.273.346.671,00							269.640.570.523,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		0 Orang/ Bulan	1440 Orang/ Bulan	262.273.346.671,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1348 Orang/ Bulan	269.640.570.523,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1470 Orang/ Bulan		1430 Orang/ Bulan	1440 Orang/ Bulan	262.273.346.671,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1450 Orang/ Bulan	269.640.570.523,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						560.340.000,00							616.374.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen		20 Dokumen	4 Dokumen	560.340.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		20 Dokumen	616.374.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	560.340.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		4 Dokumen	616.374.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						192.500.000,00							211.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	192.500.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Laporan	211.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00	
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.345.320.000,00					-		2.369.752.000,00	
		-						2.345.320.000,00					-		2.369.752.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	115.148.000,00						0 Orang	126.662.800,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	1.100.000.000,00						0 Paket	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	310 Orang		212 Orang	233 Orang	1.129.172.000,00						256 Orang	1.242.089.200,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						1.100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	1.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	1 Paket	1.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		0 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	1.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.129.172.000,00							1.242.089.200,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1100 Orang		950 Orang	282 Orang	1.129.172.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1050 Orang	1.242.089.200,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	310 Orang		212 Orang	282 Orang	1.129.172.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		256 Orang	1.242.089.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						115.148.000,00							126.662.800,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	100 Orang	115.148.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		0 Orang	126.662.800,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	115.148.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		100 Orang	126.662.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.086.648.350,00					-		7.909.057.185,00	
		-						6.086.648.350,00					-		7.909.057.185,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00						12 Dokumen	12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00						1 Dokumen	484.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	1.650.000.000,00						250 Laporan	1.400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	572.504.350,00						1 Paket	629.754.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	605.000.000,00						1 Paket	665.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	308.144.000,00						1 Paket	367.702.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	2.500.000.000,00						5 Paket	4.350.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						308.144.000,00							367.702.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	308.144.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Paket	367.702.400,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	4 Paket	308.144.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		5 Paket	367.702.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.500.000.000,00							4.350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	2.500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		5 Paket	4.350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						572.504.350,00							629.754.785,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	572.504.350,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Paket	629.754.785,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						605.000.000,00							665.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	6 Paket	605.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Paket	665.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		2 Paket	6 Paket	605.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		8 Paket	665.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						11.000.000,00							12.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		12 Dokumen	12.100.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.650.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	1.650.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		250 Laporan	1.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		50 Laporan	250 Laporan	1.650.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		40 Laporan	1.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						440.000.000,00							484.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	484.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						7.623.100.000,00					-		9.135.410.000,00	
		-						7.623.100.000,00					-		9.135.410.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.013.100.000,00						2 Paket	1.114.410.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	110.000.000,00						1 Unit	121.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00						1 Unit	4.900.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		4 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.013.100.000,00							1.114.410.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	1.013.100.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		5 Paket	1.114.410.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	5 Paket	1.013.100.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Paket	1.114.410.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000.000,00							4.900.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	156 Unit	4.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Unit	4.900.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	156 Unit	4.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	4.900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	110.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	121.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	121.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						11.511.000.000,00					-		12.262.100.000,00	
		-						11.511.000.000,00					-		12.262.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	Laporan	5.000.000.000,00						Laporan	5.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	Laporan	6.500.000.000,00						Laporan	6.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan		70 Laporan	90 Laporan	11.000.000,00						110 Laporan	12.100.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.000.000,00							12.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan		70 Laporan	90 Laporan	11.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		110 Laporan	12.100.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000.000,00							5.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		12 Laporan	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		14 Laporan	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	5.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		Laporan	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.500.000.000,00							6.750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		14 Laporan	6.750.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		12 Laporan	6.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	6.500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		Laporan	6.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.250.000.000,00					-		17.660.000.000,00	
		-						17.250.000.000,00					-		17.660.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		3 Unit	5 Unit	14.500.000.000,00						5 Unit	14.900.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit		34 Unit	34 Unit	2.000.000.000,00						34 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	750.000.000,00						4 Unit	760.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit		34 Unit	83 Unit	2.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		34 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit		80 Unit	83 Unit	2.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		86 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.500.000.000,00							14.900.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		3 Unit	5 Unit	14.500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		5 Unit	14.900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						750.000.000,00							760.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	450 Unit	750.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		4 Unit	760.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	540 Unit		420 Unit	450 Unit	750.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		480 Unit	760.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.000.000.000,00					-		4.500.000.000,00	
		-						4.000.000.000,00					-		4.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	Unit Kerja	4.000.000.000,00						Unit Kerja	4.500.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.000.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.000.000.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	-	-		Unit Kerja	4.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.000.000.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	-	-		1 Unit Kerja	4.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
7.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						270.025.719.060,00							279.973.252.993,00	
			-	-		-	-	270.025.719.060,00						-	279.973.252.993,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						15.654.422.760,00					-		24.000.000.000,00	
		-						15.654.422.760,00					-		24.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	200.000.000,00						100 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.400.000.000,00						17 Dokumen	1.600.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.100.000.000,00						1 Paket	7.100.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan		0 Layanan	1 Layanan	1.200.000.000,00						1 Layanan	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	4.754.422.760,00						1 Unit	10.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan		0 Layanan	1 Layanan	1.200.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Layanan	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						1.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit		17 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		17 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	100 Unit		100 Unit	2 Unit	200.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		100 Unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						1.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						1.400.000.000,00							1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	4 Dokumen	1.400.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		17 Dokumen	1.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						4.754.422.760,00							10.000.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	4.754.422.760,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	1 Unit	4.754.422.760,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		3 Unit	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						6.100.000.000,00							7.100.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	8 Paket	6.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		4 Paket	7.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	6.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		8 Paket	7.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	8 Paket	6.100.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		1 Paket	7.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						253.557.696.300,00					-		255.921.789.778,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						253.557.696.300,00					-		255.921.789.778,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	899.800.000,00						4 Dokumen	989.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	230.000.000.000,00						6 Dokumen	230.975.534.238,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	1.322.500.000,00						12 Dokumen	1.587.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00						4 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	20 Dokumen		13 Dokumen	14 Dokumen	1.725.000.000,00						15 Dokumen	1.585.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2.706.052.100,00						8 Dokumen	3.219.344.620,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	215.319.500,00						-	236.851.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	287.500.000,00						6 Dokumen	330.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	431.250.000,00						1 Dokumen	495.937.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	194.172.000,00						1 Dokumen	202.998.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.821.000.000,00						6 Dokumen	3.924.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	690.000.000,00						7 Dokumen	759.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00						1 Dokumen	475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	194.240.000,00						2 Dokumen	213.640.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	200.000.000,00						100 Keluarga	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	5.445.451.200,00						-	5.224.996.320,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39706 Orang		31451 Orang	33338 Orang	500.000.000,00						35339 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	333120 Orang		263863 Orang	279694 Orang	800.000.000,00						296476 Orang	800.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 Unit		12 Unit	12 Unit	510.000.000,00						12 Unit	530.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	440.411.500,00						-	351.332.650,00	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	333120 Orang		263863 Orang	279694 Orang	800.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		296476 Orang	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39706 Orang		31451 Orang	33338 Orang	500.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		35339 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						1.725.000.000,00							1.585.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	20 Dokumen		13 Dokumen	14 Dokumen	1.725.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		15 Dokumen	1.585.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						431.250.000,00							495.937.500,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	10 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	431.250.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		8 Dokumen	495.937.500,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	7 Dokumen	431.250.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	495.937.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						287.500.000,00							330.625.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	287.500.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		6 Dokumen	330.625.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1.322.500.000,00							1.587.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	1.322.500.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		12 Dokumen	1.587.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.706.052.100,00							3.219.344.620,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2.706.052.100,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		8 Dokumen	3.219.344.620,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						194.172.000,00							202.998.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	194.172.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	202.998.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		4 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						230.000.000.000,00							230.975.534.238,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	230.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		6 Dokumen	230.975.534.238,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						690.000.000,00							759.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	690.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		7 Dokumen	759.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						225.000.000,00							250.000.000,00	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						194.240.000,00							213.640.000,00	
		Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	194.240.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		2 Dokumen	213.640.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota						899.800.000,00							989.780.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	899.800.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		4 Dokumen	989.780.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						510.000.000,00							530.000.000,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 Unit		12 Unit	1 Unit	510.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		12 Unit	530.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik						3.821.000.000,00							3.924.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	0 Dokumen	3.821.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		6 Dokumen	3.924.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						450.000.000,00							475.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	475.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	200.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		100 Keluarga	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						5.445.451.200,00							5.224.996.320,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	8 Laporan	5.445.451.200,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		-	5.224.996.320,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						215.319.500,00							236.851.450,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	1 Dokumen	215.319.500,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	-	-		-	236.851.450,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						440.411.500,00							351.332.650,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	2 Laporan	440.411.500,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		-	351.332.650,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						2.000.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	7 Laporan	2.000.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		-	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	-	-	-	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1.813.600.000,00					-		1.901.463.215,00	
		-						1.813.600.000,00					-		1.901.463.215,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	89 Unit		75 Unit	80 Unit	818.600.000,00						85 Unit	869.463.215,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15 Unit		18 Unit	32 Unit	150.000.000,00						28 Unit	132.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	94 Unit		65 Unit	70 Unit	845.000.000,00						75 Unit	900.000.000,00	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						150.000.000,00							132.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15 Unit		18 Unit	32 Unit	150.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		28 Unit	132.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						845.000.000,00							900.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	94 Unit		65 Unit	70 Unit	845.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		75 Unit	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						818.600.000,00							869.463.215,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	89 Unit		75 Unit	0 Unit	818.600.000,00	-	-	-	-		85 Unit	869.463.215,00	Dinas Kesehatan
8.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						560.794.744,00							583.330.411,00	
			-	-		-	-	560.794.744,00						-	583.330.411,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						88.315.000,00					-		95.134.000,00	
		-						88.315.000,00					-		95.134.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang		1 Orang	140 Orang	40.252.000,00						160 Orang	42.265.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	300 Orang		100 Orang	225 Orang	48.063.000,00						250 Orang	52.869.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						40.252.000,00							42.265.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang		1 Orang	225 Orang	40.252.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		160 Orang	42.265.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	400 Orang		400 Orang	225 Orang	40.252.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		400 Orang	42.265.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						48.063.000,00							52.869.000,00	
		Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	300 Orang		100 Orang	225 Orang	48.063.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		250 Orang	52.869.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						472.479.744,00					-		488.196.411,00	
		-						472.479.744,00					-		488.196.411,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18 Dokumen		9 Dokumen	11 Dokumen	422.604.744,00						13 Dokumen	435.828.411,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang		100 Orang	120 Orang	49.875.000,00						140 Orang	52.368.000,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						49.875.000,00							52.368.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang		150 Orang	140 Orang	49.875.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		150 Orang	52.368.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang		100 Orang	140 Orang	49.875.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		140 Orang	52.368.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						422.604.744,00							435.828.411,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18 Dokumen		9 Dokumen	11 Dokumen	422.604.744,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		13 Dokumen	435.828.411,00	Dinas Kesehatan
9.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						1.064.686.969,00							1.107.471.661,00	
			-	-		-	-	1.064.686.969,00						-	1.107.471.661,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						1.064.686.969,00					-		1.107.471.661,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.064.686.969,00					-		1.107.471.661,00	
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	100 Sarana		90 Sarana	95 Sarana	1.064.686.969,00						100 Sarana	1.107.471.661,00	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						1.064.686.969,00							1.107.471.661,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	100 Sarana		90 Sarana	0 Sarana	1.064.686.969,00	-	-	-	-		100 Sarana	1.107.471.661,00	Dinas Kesehatan
10.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.079.082.892,00							1.154.500.000,00	
			-	-		-	-	2.079.082.892,00						-	1.154.500.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						1.011.082.892,00					-		1.129.500.000,00	
		-						1.011.082.892,00					-		1.129.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.082.892,00						1 Dokumen	1.129.500.000,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						1.011.082.892,00							1.129.500.000,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	1.011.082.892,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	1.129.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						1.043.000.000,00					-		1.129.500.000,00	
		-						1.043.000.000,00					-		1.129.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	1.043.000.000,00						0 Dokumen	1.129.500.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1.043.000.000,00							1.129.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	1.043.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		0 Dokumen	1.129.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	11 Dokumen	1.043.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	1.129.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	X							220.000.000,00							242.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						220.000.000,00							242.000.000,00	
11.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						220.000.000,00							242.000.000,00	
			-	-		-	-	220.000.000,00						-	242.000.000,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00					-		242.000.000,00	
		-						220.000.000,00					-		242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00						1 Laporan	242.000.000,00	
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		4 Laporan	242.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-		1 Laporan	242.000.000,00	Dinas Kesehatan
		RS. Mata (OBK)						43.710.050.937,00							45.836.914.628,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.710.050.937,00							45.836.914.628,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						43.710.050.937,00							45.836.914.628,00	
12.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						42.525.511.212,00							44.607.776.838,00	
			-	-		-	-	42.525.511.212,00						-	44.607.776.838,00	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						6.080.647.212,00					-		7.162.912.838,00	
		-						6.080.647.212,00					-		7.162.912.838,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	6.080.647.212,00						-	7.162.912.838,00	
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.080.647.212,00							7.162.912.838,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	6.080.647.212,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Sukajaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	7.162.912.838,00	RS. Mata (OBK)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						444.864.000,00					-		444.864.000,00	
		-						444.864.000,00					-		444.864.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	444.864.000,00						-	444.864.000,00	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						444.864.000,00							444.864.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	444.864.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Sukajaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	444.864.000,00	RS. Mata (OBK)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						36.000.000.000,00					-		37.000.000.000,00	
		-						36.000.000.000,00					-		37.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	36.000.000.000,00						-	37.000.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						36.000.000.000,00							37.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	36.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Sukajaya 0	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	37.000.000.000,00	RS. Mata (OBK)
13.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.184.539.725,00							1.229.137.790,00	
			-	-		-	-	1.184.539.725,00						-	1.229.137.790,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						1.184.539.725,00					-		1.229.137.790,00	
		-						1.184.539.725,00					-		1.229.137.790,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-		-	-	1.184.539.725,00						-	1.229.137.790,00	
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						1.184.539.725,00							1.229.137.790,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-		-	1 Dokumen	1.184.539.725,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.229.137.790,00	RS. Mata (OBK)
		RS Ernaldi Bahar (OBK)						50.322.707.320,00							45.178.657.696,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.322.707.320,00							45.178.657.696,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						50.322.707.320,00							45.178.657.696,00	
14.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38.215.760.000,00							39.846.201.887,00	
			-	-		-	-	38.215.760.000,00						-	39.846.201.887,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						425.000.000,00					-		490.000.000,00	
		-						425.000.000,00					-		490.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	425.000.000,00						-	490.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						425.000.000,00							490.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	425.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	490.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.212.000.000,00					-		1.575.000.000,00	
		-						1.212.000.000,00					-		1.575.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.020.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	192.000.000,00						-	575.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.020.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.020.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						192.000.000,00							575.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	192.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	575.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						6.078.760.000,00					-		6.781.201.887,00	
		-						6.078.760.000,00					-		6.781.201.887,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.204.000.000,00						-	3.731.201.887,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.874.760.000,00						-	3.050.000.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.204.000.000,00							3.731.201.887,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.204.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.731.201.887,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.874.760.000,00							3.050.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.874.760.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.050.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						30.500.000.000,00					-		31.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						30.500.000.000,00					-		31.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	30.500.000.000,00						-	31.000.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						30.500.000.000,00							31.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	30.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	31.000.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
15.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						11.883.067.320,00							5.080.000.000,00	
			-	-		-	-	11.883.067.320,00						-	5.080.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11.811.067.320,00					-		5.000.000.000,00	
		-						11.811.067.320,00					-		5.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	982.677.320,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	-	837.590.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	9.990.800.000,00						-	3.700.000.000,00	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						9.990.800.000,00							3.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	8 Unit	9.990.800.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.700.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						982.677.320,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	9 Unit	982.677.320,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	800.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						837.590.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	6 Unit	837.590.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						72.000.000,00					-		80.000.000,00	
		-						72.000.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	72.000.000,00						-	80.000.000,00	
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						72.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	10 Dokumen	72.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
16.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						146.880.000,00							181.658.251,00	
			-	-		-	-	146.880.000,00						-	181.658.251,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						146.880.000,00					-		181.658.251,00	
		-						146.880.000,00					-		181.658.251,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	146.880.000,00						-	181.658.251,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						146.880.000,00							181.658.251,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	12 Orang	146.880.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	181.658.251,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
17.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						77.000.000,00							70.797.558,00	
			-	-		-	-	77.000.000,00						-	70.797.558,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						77.000.000,00					-		70.797.558,00	
		-						77.000.000,00					-		70.797.558,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	-	77.000.000,00						-	70.797.558,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						77.000.000,00							70.797.558,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	10 Dokumen	77.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Alang-Alang Lebar 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.797.558,00	RS Ernaldi Bahar (OBK)
		RS. Gigi dan Mulut (OBK)						20.215.455.007,00							23.474.714.619,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.215.455.007,00							23.474.714.619,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						20.215.455.007,00							23.474.714.619,00	
18.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.505.144.000,00							22.740.144.000,00	
			-	-		-	-	19.505.144.000,00						-	22.740.144.000,00	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.505.144.000,00					-		2.740.144.000,00	
		-						2.505.144.000,00					-		2.740.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.250.000.000,00						-	1.315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.255.144.000,00						-	1.425.144.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.250.000.000,00							1.315.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Rami 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.315.000.000,00	RS. Gigi dan Mulut (OBK)
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.255.144.000,00							1.425.144.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.255.144.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Rami 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.425.144.000,00	RS. Gigi dan Mulut (OBK)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						17.000.000.000,00					-		20.000.000.000,00	
		-						17.000.000.000,00					-		20.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	17.000.000.000,00						-	20.000.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						17.000.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	17.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Rami 0	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	20.000.000.000,00	RS. Gigi dan Mulut (OBK)
19.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						710.311.007,00							734.570.619,00	
			-	-		-	-	710.311.007,00						-	734.570.619,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						710.311.007,00					-		734.570.619,00	
		-						710.311.007,00					-		734.570.619,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	710.311.007,00						-	734.570.619,00	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						710.311.007,00							734.570.619,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	710.311.007,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Rami 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	734.570.619,00	RS. Gigi dan Mulut (OBK)
		RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)						501.387.535.366,00							511.673.239.014,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						501.387.535.366,00							511.673.239.014,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						501.387.535.366,00							511.673.239.014,00	
20.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						199.211.280.838,00							205.571.361.616,00	
			-	-		-	-	199.211.280.838,00						-	205.571.361.616,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						460.000.000,00					-		470.000.000,00	
		-						460.000.000,00					-		470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	120.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	120.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	220.000.000,00						-	220.000.000,00	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						120.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	3 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	220.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	220.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						700.000.000,00					-		700.000.000,00	
		-						700.000.000,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	20 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	600.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.180.000.000,00					-		2.180.000.000,00	
		-						2.180.000.000,00					-		2.180.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.080.000.000,00						-	1.080.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	1.100.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						1.080.000.000,00							1.080.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	1.080.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.080.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1000 Orang	1.100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.100.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.010.000.000,00					-		7.310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						7.010.000.000,00					-		7.310.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.110.000.000,00						-	1.110.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.200.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.200.000.000,00						-	2.200.000.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.500.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.200.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.200.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.200.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.500.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.110.000.000,00							1.110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	40 Laporan	1.110.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.110.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						15.078.529.472,00					-		12.438.529.472,00	
		-						15.078.529.472,00					-		12.438.529.472,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	2.500.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	1.140.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.938.529.472,00						-	9.938.529.472,00	
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.140.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.140.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						2.500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Paket	2.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.938.529.472,00							9.938.529.472,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	9.938.529.472,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.938.529.472,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.500.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						31.930.000.000,00					-		34.823.000.000,00	
		-						31.930.000.000,00					-		34.823.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	15.730.000.000,00						-	17.303.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.200.000.000,00						-	14.520.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.730.000.000,00							17.303.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	15.730.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	17.303.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.200.000.000,00							14.520.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	13.200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	14.520.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.760.000.000,00					-		7.924.657.803,00	
		-						11.760.000.000,00					-		7.924.657.803,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.760.000.000,00						-	1.936.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000.000,00						-	5.988.657.803,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.760.000.000,00							1.936.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	34 Unit	1.760.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.936.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000.000,00							5.988.657.803,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	10.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.988.657.803,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						133.912.751.366,00					-		141.350.174.341,00	
		-						133.912.751.366,00					-		141.350.174.341,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	133.912.751.366,00						-	141.350.174.341,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						133.912.751.366,00							141.350.174.341,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	133.912.751.366,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	141.350.174.341,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
21.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						278.137.592.404,00							283.843.439.971,00	
			-	-		-	-	278.137.592.404,00						-	283.843.439.971,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						275.471.491.982,00					-		280.910.729.507,00	
		-						275.471.491.982,00					-		280.910.729.507,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	80.205.920.330,00						-	78.226.512.363,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	6.050.000.000,00						-	5.655.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	33.000.000.000,00						-	35.192.088.327,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	156.215.571.652,00						-	161.837.128.817,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						80.205.920.330,00							78.226.512.363,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	17 Unit	80.205.920.330,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	78.226.512.363,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						6.050.000.000,00							5.655.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	1 Unit	6.050.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.655.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						156.215.571.652,00							161.837.128.817,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	3 Unit	156.215.571.652,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	161.837.128.817,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						33.000.000.000,00							35.192.088.327,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	4 Paket	33.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	35.192.088.327,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2.666.100.422,00					-		2.932.710.464,00	
		-						2.666.100.422,00					-		2.932.710.464,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	2.666.100.422,00						-	2.932.710.464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						2.666.100.422,00							2.932.710.464,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	12 Dokumen	2.666.100.422,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	2.932.710.464,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
22.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						19.600.519.252,00							20.002.613.676,00	
			-	-		-	-	19.600.519.252,00						-	20.002.613.676,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						19.490.519.252,00					-		19.881.613.676,00	
		-						19.490.519.252,00					-		19.881.613.676,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	19.490.519.252,00						-	19.881.613.676,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						19.490.519.252,00							19.881.613.676,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	400 Orang	19.490.519.252,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	19.881.613.676,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						110.000.000,00					-		121.000.000,00	
		-						110.000.000,00					-		121.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	110.000.000,00						-	121.000.000,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	150 Orang	110.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	121.000.000,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
23.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						618.142.872,00							630.823.751,00	
			-	-		-	-	618.142.872,00						-	630.823.751,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						618.142.872,00					-		630.823.751,00	
		-						618.142.872,00					-		630.823.751,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	-	618.142.872,00						-	630.823.751,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						618.142.872,00							630.823.751,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	618.142.872,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Suka Bangun 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	630.823.751,00	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air						193.183.995.321,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						193.183.995.321,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						193.183.995.321,00							0,00	
24.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.867.840.994,00							0,00	
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	1 %	54.867.840.994,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						992.200.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						992.200.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	293.700.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						293.700.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	293.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						38.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						660.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.949.296.427,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						24.949.296.427,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.863.576.440,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan		154 Orang/ Bulan	154 Orang/ Bulan	23.047.219.987,00						154 Orang/ Bulan	0,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.047.219.987,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan		154 Orang/ Bulan	154 Orang/ Bulan	23.047.219.987,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		154 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.863.576.440,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.863.576.440,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						38.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						8.400.000.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						8.400.000.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2 Dokumen	42 Dokumen	8.400.000.000,00						Dokumen	0,00	
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						8.400.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2 Dokumen	42 Dokumen	8.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						851.100.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						851.100.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang	10 Orang	220.000.000,00						10 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	331.100.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	15 Orang	300.000.000,00						15 Orang	0,00	
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						331.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	331.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	10 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		15 Orang	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						220.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang	20 Orang	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Orang	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.967.400.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						2.967.400.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.126.400.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	165.000.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	825.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	165.000.000,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	55.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	220.000.000,00						1 Paket	0,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						55.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						220.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						825.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	825.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						165.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						11.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						165.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		24 Laporan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						400.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.126.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.126.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						12.939.104.567,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						12.939.104.567,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	220.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	3.080.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	4.000.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	1.239.104.567,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	2.350.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		40 Unit	8 Unit	550.000.000,00						12 Unit	0,00	
	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.239.104.567,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	1.239.104.567,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar						3.080.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	3.080.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						220.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	110 Paket	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Paket	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	2.350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.000.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	4.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						550.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		40 Unit	8 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.154.240.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						2.154.240.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.177.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	977.240.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.177.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.177.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						977.240.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	977.240.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.833.000.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
		-						3.833.000.000,00					Maju Pembangunan Yang Transparan dan Responsif (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas)		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	308.000.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.320.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		24 Unit	24 Unit	825.000.000,00						24 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	500.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00						1 Unit	0,00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						825.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		24 Unit	24 Unit	825.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		24 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						308.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	308.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						110.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.320.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						550.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
25.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						124.897.654.327,00							0,00	
			Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terlaksana	-		-	2 %	124.897.654.327,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						55.171.644.327,00					Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya Sedimentasi pada Aliran Sungai		0,00	
		-						55.171.644.327,00					Meningkatnya Pengamanan Kawasan Tebing Rawan Longsor dan Berkurangnya Sedimentasi pada Aliran Sungai		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.070.844.327,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.200.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	403.700.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Embung yang dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.356.750.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	0,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit		Unit	1 Unit	5.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	737.000.000,00						2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.317.150.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	14 Titik		7 Titik	8 Titik	1.881.550.000,00						9 Titik	0,00	
			Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Titik		0 Titik	2 Titik	100.000.000,00						2 Titik	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	82 KM		42 KM	79 KM	8.931.100.000,00						75 KM	0,00	
			Panjang sungai yang dipeliharra	14 KM		16 KM	12 KM	7.973.350.000,00						13 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.3 KM		0.2 KM	0.2 KM	10.000.000.000,00						0.2 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.12 KM		0 KM	0.1 KM	1.000.000.000,00						0.1 KM	0,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0.7 KM		0 KM	0.5 KM	5.000.000.000,00						0.5 KM	0,00	
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai						10.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.3 KM		0.2 KM	0.2 KM	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.2 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai						1.000.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.12 KM		0 KM	0.1 KM	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.1 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Lembaga	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai						8.931.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	82 KM		42 KM	79 KM	8.931.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		75 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi						5.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit		Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi						737.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	737.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai						5.000.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0.7 KM		0 KM	0.5 KM	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.5 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Titik		0 Titik	2 Titik	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Titik	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi						2.317.150.000,00							0,00	
		Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.317.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						1.881.550.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	14 Titik		7 Titik	8 Titik	1.881.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Titik	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						200.200.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						403.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	403.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						1.000.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung						4.000.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0132	Pemeliharaan Sungai						7.973.350.000,00							0,00	
		Terpeliharanya sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	14 KM		16 KM	12.6 KM	7.973.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0134	Rehabilitasi Embung						2.356.750.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.356.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						4.070.844.327,00							0,00	
		Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.070.844.327,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						80.926.010.000,00					Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan / Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik		0,00	
		-						80.926.010.000,00					Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan / Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen		14 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	76.500.000,00						1 Lembaga	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	17 KM		0 KM	7 KM	20.000.000.000,00						11 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM		18 KM	16 KM	3.490.740.000,00						16 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	13 KM		5 KM	12 KM	22.094.950.000,00						13 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	21 KM		0 KM	11 KM	15.000.000.000,00						11.9 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM		3.2 KM	3.5 KM	857.120.000,00						3.6 KM	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	20 KM		8 KM	15 KM	14.406.700.000,00						16 KM	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						20.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	17 KM		0 KM	7 KM	20.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						15.000.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	21 KM		0 KM	11 KM	15.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11.9 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						22.094.950.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	13 KM		5 KM	12 KM	22.094.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa						14.406.700.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	20 KM		8 KM	15 KM	14.406.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		16 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						3.490.740.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM		18 KM	16 KM	3.490.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		16 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						857.120.000,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM		3.2 KM	3.5 KM	857.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3.6 KM	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						5.000.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen		14 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						76.500.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	76.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Lembaga	0,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang						795.097.389.745,00							856.272.632.275,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						795.097.389.745,00							856.272.632.275,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						795.097.389.745,00							856.272.632.275,00	
26.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						74.795.231.275,00							75.132.207.275,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						74.795.231.275,00							75.132.207.275,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.220.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Perangkat Daerah		1.220.000.000,00	
		-						1.220.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Perangkat Daerah		1.220.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	10.000.000,00						1 Data	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	745.000.000,00						3 Dokumen	745.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00						2 Laporan	275.000.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						745.000.000,00							745.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	745.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	745.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Data	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.727.722.400,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		43.709.722.400,00	
		-						43.727.722.400,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		43.709.722.400,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.150.400,00						1 Laporan	62.150.400,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00						17 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	332 Orang/ Bulan		332 Orang/ Bulan	332 Orang/ Bulan	42.595.572.000,00						332 Orang/ Bulan	42.595.572.000,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						42.595.572.000,00							42.595.572.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	332 Orang/ Bulan		332 Orang/ Bulan	332 Orang/ Bulan	42.595.572.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		332 Orang/ Bulan	42.595.572.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						20.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						62.150.400,00							62.150.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.150.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	62.150.400,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						4.591.982.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		3.617.608.000,00	
		-						4.591.982.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		3.617.608.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.370.482.000,00						1 Dokumen	2.160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	254.500.000,00						1 Laporan	378.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	121.608.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	107.000.000,00						1 Laporan	108.000.000,00	
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						3.370.482.000,00							2.160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.370.482.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	2.160.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						254.500.000,00							378.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	254.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	378.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						107.000.000,00							108.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	107.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	108.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							121.608.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	121.608.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.710.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.730.000.000,00	
		-						1.710.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.730.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	150.000.000,00						30 Orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		106 Orang	2 Orang	1.260.000.000,00						2 Orang	1.280.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit		12 Unit	12 Unit	150.000.000,00						12 Unit	150.000.000,00	
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit		12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Unit	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						900.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		106 Orang	81 Orang	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Orang	900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Orang	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00						12 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.340.000,00						1 Dokumen	190.340.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00						12 Laporan	900.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						215.000.000,00							215.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	12 Paket	215.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	215.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						900.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						190.340.000,00							190.340.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.340.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	190.340.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						8.333.700.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.730.800.000,00	
		-						8.333.700.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.730.800.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	800.000.000,00						1 Paket	800.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		Unit	3 Unit	1.491.000.000,00						3 Unit	1.494.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	5 Unit	6.042.700.000,00						5 Unit	7.436.800.000,00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.491.000.000,00							1.494.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		Unit	3 Unit	1.491.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	1.494.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.742.700.000,00							6.006.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	2 Unit	4.742.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	6.006.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	7.694.840.000,00						5 Laporan	7.694.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.385.000.000,00							1.385.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	1 Laporan	1.385.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	1.385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.694.840.000,00							7.694.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	7.694.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Laporan	7.694.840.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.465.896.875,00						75 Unit	2.465.896.875,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00						1 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	4.750.750.000,00						14 Unit	4.983.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.465.896.875,00							2.465.896.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	80 Unit	2.465.896.875,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		75 Unit	2.465.896.875,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.450.750.000,00							3.483.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	3.450.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 Unit	3.483.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.210.000.000,00							2.210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1 Unit	2.210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	2.210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
27.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						708.502.158.470,00							770.032.150.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						708.502.158.470,00							770.032.150.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.772.500.000,00						3 Dokumen	2.899.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen		10 Dokumen	13 Dokumen	21.485.000.000,00						9 Dokumen	17.903.375.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	1.600.000.000,00						1779.27 KM	700.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	33.000.000.000,00						1779.27 KM	31.185.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	3.445.000.000,00						1779.27 KM	2.836.250.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun	11.50 KM		0.98 KM	1.20 KM	245.020.000.000,00						5.50 KM	363.040.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	23.75 KM		2.75 KM	22.75 KM	9.020.000.000,00						27.25 KM	109.460.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	1.34 KM	44.905.600.000,00						0.05 KM	10.886.400.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	7.25 KM		8.83 KM	6.5 KM	219.319.058.470,00						6.75 KM	65.180.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	20.6 Meter		60 Meter	220 Meter	46.165.000.000,00						203.7 Meter	97.745.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	356.30 Meter		152.40 Meter	111.90 Meter	92.402.000.000,00						108.66 Meter	52.037.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	500.00 Meter		430.00 Meter	950.00 Meter	18.408.000.000,00						500.00 Meter	10.080.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	600 Meter		500 Meter	600 Meter	6.080.000.000,00						600 Meter	6.080.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						10.785.600.000,00							10.886.400.000,00	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	2 KM	10.785.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.05 KM	10.886.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan						219.319.058.470,00							65.180.000.000,00	
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	7.25 KM		8.83 KM	24,48 KM	219.319.058.470,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6.75 KM	65.180.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						21.485.000.000,00							17.903.375.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen		10 Dokumen	14 Dokumen	21.485.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Dokumen	17.903.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						3.445.000.000,00							2.836.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1779.27 KM		1779.27 KM	1779,27 KM	3.445.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	2.836.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan						1.772.500.000,00							2.899.125.000,00	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.772.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	2.899.125.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan						92.402.000.000,00							52.037.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	356.30 Meter		152.40 Meter	210,96 Meter	92.402.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		108.66 Meter	52.037.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan						18.408.000.000,00							10.080.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	500.00 Meter		430.00 Meter	1390,90 Meter	18.408.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		500.00 Meter	10.080.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar						9.020.000.000,00							109.460.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	23.75 KM		2.75 KM	2,25 KM	9.020.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		27.25 KM	109.460.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi						33.000.000.000,00							31.185.000.000,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1779.27 KM		1779.27 KM	1779,27 KM	33.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	31.185.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan						46.165.000.000,00							97.745.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	20.6 Meter		60 Meter	150 Meter	46.165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		203.7 Meter	97.745.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan						6.080.000.000,00							6.080.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	600 Meter		500 Meter	600 Meter	6.080.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		600 Meter	6.080.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan						245.020.000.000,00							363.040.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11.50 KM		0.98 KM	1,20 KM	245.020.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5.50 KM	363.040.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi						1.600.000.000,00							700.000.000,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1779.27 KM		1779.27 KM	1779,27 KM	1.600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
28.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						4.950.000.000,00							4.825.275.000,00	
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang						4.950.000.000,00							4.825.275.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						1.350.000.000,00					OPD dan Masyarakat		1.480.000.000,00	
		-						1.350.000.000,00					OPD dan Masyarakat		1.480.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		2 Dokumen	Dokumen	300.000.000,00						Dokumen	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	550.000.000,00						100 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	500.000.000,00						1 Publikasi	550.000.000,00	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Publikasi	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang						550.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						3.400.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.400.000.000,00	
		-						3.400.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	2 Berita Acara		3 Berita Acara	3 Berita Acara	600.000.000,00						2 Berita Acara	550.000.000,00	
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00						1 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00						10 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000,00						5 Dokumen	450.000.000,00	
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	2 Dokumen		7 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Orang	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota						500.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	2 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota						600.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	2 Berita Acara		3 Berita Acara	3 Berita Acara	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Berita Acara	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota						1.200.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						2.050.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.100.000.000,00	
		-						2.050.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	7 Layanan		Layanan	7 Layanan	150.000.000,00						7 Layanan	150.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	200.000.000,00						8 Layanan	200.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Layanan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlayannya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	7 Layanan		Layanan	7 Layanan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Layanan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						3.050.000.000,00					OPD dan Masyarakat		3.208.275.000,00	
		-						3.050.000.000,00					OPD dan Masyarakat		3.208.275.000,00	
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	263.775.000,00	
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	181.500.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00						1 Berita Acara	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00						1 Berita Acara	200.000.000,00	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	500.000.000,00						2 Kasus	181.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	150.000.000,00						2 Kasus	181.500.000,00	
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	150.000.000,00						1 Kasus	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Kasus	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						500.000.000,00							181.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Kasus	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						150.000.000,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan						200.000.000,00							263.775.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	263.775.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						150.000.000,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Kasus	181.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR						400.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang						150.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas						41.925.125.000,00							49.995.125.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.925.125.000,00							49.995.125.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						41.925.125.000,00							49.995.125.000,00	
29.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80.000.000,00							900.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						80.000.000,00							900.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1,00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1,00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12,00 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							820.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1,00 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	820.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
30.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						41.833.125.000,00							49.083.125.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						41.833.125.000,00							49.083.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						4.733.125.000,00							4.733.125.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	186,93 KM	4.733.125.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	4.733.125.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						37.100.000.000,00							44.350.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	9 KM	37.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	44.350.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu						65.817.750.000,00							50.197.750.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						65.817.750.000,00							50.197.750.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						65.817.750.000,00							50.197.750.000,00	
31.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.100.000.000,00							80.000.000,00	
		<i>Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah</i>						5.100.000.000,00							80.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.020.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1 Unit	5.020.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
32.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						60.705.750.000,00							50.105.750.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						60.705.750.000,00							50.105.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	1.34 KM	44.905.600.000,00						0.05 KM	10.886.400.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						7.020.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	0,2 KM	7.020.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.05 KM	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						7.385.750.000,00							7.385.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	293,83 KM	7.385.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	7.385.750.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						46.300.000.000,00							42.720.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	12,70 KM	46.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	42.720.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim						42.049.000.000,00							50.069.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.049.000.000,00							50.069.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						42.049.000.000,00							50.069.000.000,00	
33.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1.00 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
34.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						41.957.000.000,00							49.977.000.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						41.957.000.000,00							49.977.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						7.777.000.000,00							7.777.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	309.48 KM	7.777.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	7.777.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						34.180.000.000,00							42.200.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	10.00 KM	34.180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	42.200.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim
		UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang						100.585.850.000,00							110.643.925.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.585.850.000,00							110.643.925.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						100.585.850.000,00							110.643.925.000,00	
35.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.330.000.000,00							110.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						1.330.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1,00 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	80.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.220.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1 Unit	1.220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
36.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						99.243.850.000,00							110.521.925.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						99.243.850.000,00							110.521.925.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						3.713.850.000,00							1.861.925.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	74,08 KM	3.713.850.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	1.861.925.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						95.530.000.000,00							108.660.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	14,21 KM	95.530.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	108.660.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir						40.263.500.000,00							55.273.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						40.263.500.000,00							55.273.500.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						40.263.500.000,00							55.273.500.000,00	
37.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.500.000.000,00							80.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						1.500.000.000,00							80.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.420.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1 Unit	1.420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
38.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						38.751.500.000,00							55.181.500.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						38.751.500.000,00							55.181.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						7.711.500.000,00							7.711.500.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	306,86 KM	7.711.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	7.711.500.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						31.040.000.000,00							47.470.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	10,30 KM	31.040.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	47.470.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin						15.295.000.000,00							37.135.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.295.000.000,00							37.135.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						15.295.000.000,00							37.135.000.000,00	
39.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						800.000.000,00							80.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						800.000.000,00							80.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1,00 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1,00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1,00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12,00 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						720.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	1 Unit	720.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
40.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						14.483.000.000,00							37.043.000.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						14.483.000.000,00							37.043.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						2.403.000.000,00							2.403.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	94,52 KM	2.403.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	2.403.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						12.080.000.000,00							34.640.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	4,00 KM	12.080.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	34.640.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat						61.287.750.000,00							52.915.250.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						61.287.750.000,00							52.915.250.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.287.750.000,00							52.915.250.000,00	
41.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80.000.000,00							80.000.000,00	
		<i>Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah</i>						80.000.000,00							80.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1.00 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1.00 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
42.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						61.195.750.000,00							52.823.250.000,00	
		Tingkat Kemantapan Jalan						61.195.750.000,00							52.823.250.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	1.34 KM	44.905.600.000,00						0.05 KM	10.886.400.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						24.580.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	0.04 KM	24.580.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.05 KM	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						6.515.750.000,00							6.163.250.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	244.13 KM	6.515.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	6.163.250.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						30.100.000.000,00							46.660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	7.00 KM	30.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	46.660.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat
		UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur						59.048.500.000,00							58.874.011.838,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						59.048.500.000,00							58.874.011.838,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						59.048.500.000,00							58.874.011.838,00	
43.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	18.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	12.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	50.000.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
44.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						58.956.500.000,00							58.782.011.838,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Kemantapan Jalan						58.956.500.000,00							58.782.011.838,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
		-						1.125.628.633.470,00					Masyarakat pengguna layanan jalan		1.233.549.711.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	115.21 KM	336.010.000.000,00						118.18 KM	418.725.511.838,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	1779.27 KM	46.996.475.000,00						1779.27 KM	44.792.050.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	1.34 KM	44.905.600.000,00						0.05 KM	10.886.400.000,00	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan						2.520.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.05 KM		2.06 KM	0,95 KM	2.520.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.05 KM	0,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						6.756.500.000,00							6.756.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	1779.27 KM		1779.27 KM	269,46 KM	6.756.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1779.27 KM	6.756.500.000,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						49.680.000.000,00							52.025.511.838,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	118.21 KM		68.96 KM	13,50 KM	49.680.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		118.18 KM	52.025.511.838,00	UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur
		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi						5.590.000.000,00							6.310.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.590.000.000,00							6.310.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						5.590.000.000,00							6.310.000.000,00	
45.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4.275.000.000,00							4.790.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						4.275.000.000,00							4.790.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						4.591.982.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		3.617.608.000,00	
		-						4.591.982.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		3.617.608.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	850.000.000,00						2 Laporan	850.000.000,00	
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	850.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.710.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.730.000.000,00	
		-						1.710.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		1.730.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		106 Orang	2 Orang	1.260.000.000,00						2 Orang	1.280.000.000,00	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						360.000.000,00							380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		106 Orang	25 Orang	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Orang	380.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
		-						2.766.340.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		2.781.340.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	261.000.000,00						10 Paket	266.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	314.000.000,00						10 Paket	319.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	326.000.000,00						21 Paket	331.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	25.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	12 Paket	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21 Paket	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						15.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	20.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						8.333.700.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.730.800.000,00	
		-						8.333.700.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.730.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	5 Unit	6.042.700.000,00						5 Unit	7.436.800.000,00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.300.000.000,00							1.430.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		5 Unit	3 Unit	1.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	1.430.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.604.840.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		9.609.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	109 Laporan	1.895.000.000,00						109 Laporan	1.900.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	109 Laporan		109 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		109 Laporan	85.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
		-						19.076.646.875,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang		12.048.896.875,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	10 Unit	11.790.000.000,00						5 Unit	4.530.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	4.750.750.000,00						14 Unit	4.983.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.300.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	12 Unit	1.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 Unit	1.500.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.200.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		11 Unit	4 Unit	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	1.500.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						450.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Perangkat Daerah		500.000.000,00	
		-						450.000.000,00					Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Perangkat Daerah		500.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	450.000.000,00						1 Unit Kerja	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						450.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit Kerja	500.000.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						152.190.089.100,00							167.409.098.008,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						152.190.089.100,00							167.409.098.008,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						25.992.866.107,00							28.592.152.716,00	
46.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						419.230.868,00							461.153.954,00	
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum pada kawasan lintas Kabupaten/Kota						419.230.868,00							461.153.954,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						419.230.868,00					OPD dan Masyarakat		461.153.954,00	
		-						419.230.868,00					OPD dan Masyarakat		461.153.954,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	67.765.574,00						2 Dokumen	74.542.131,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	17 Kabupate n/Kota		17 Kabupate n/Kota	17 Kabupate n/Kota	188.301.533,00						17 Kabupate n/Kota	207.131.686,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	45 Lembaga		26 Lembaga	28 Lembaga	163.163.761,00						33 Lembaga	179.480.137,00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						188.301.533,00							207.131.686,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	17 Kabupate n/Kota		17 Kabupate n/Kota	17 Kabupate n/Kota	188.301.533,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 Kabupate n/Kota	207.131.686,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						67.765.574,00							74.542.131,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	67.765.574,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	74.542.131,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						163.163.761,00							179.480.137,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	45 Lembaga		26 Lembaga	18 Lembaga	163.163.761,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		33 Lembaga	179.480.137,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						884.013.574,00							972.414.931,00	
		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional						884.013.574,00							972.414.931,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						884.013.574,00					OPD dan Masyarakat		972.414.931,00	
		-						884.013.574,00					OPD dan Masyarakat		972.414.931,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	884.013.574,00						1 Dokumen	972.414.931,00	
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						884.013.574,00							972.414.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	884.013.574,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	972.414.931,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						714.419.748,00							785.861.723,00	
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah						714.419.748,00							785.861.723,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						714.419.748,00					OPD dan Masyarakat		785.861.723,00	
		-						714.419.748,00					OPD dan Masyarakat		785.861.723,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17 Kabupate n/Kota		17 Kabupate n/Kota	17 Kabupate n/Kota	714.419.748,00						17 Kabupate n/Kota	785.861.723,00	
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota						714.419.748,00							785.861.723,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17 Kabupate n/Kota		17 Kabupate n/Kota	17 Kabupate n/Kota	714.419.748,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 Kabupate n/Kota	785.861.723,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
49.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						11.030.101.917,00							12.133.112.108,00	
		Meningkatnya Akses Penyediaan Air Minum dan Sanitasi pada Kawasan Strategis Provinsi						11.030.101.917,00							12.133.112.108,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						11.030.101.917,00					OPD dan Masyarakat		12.133.112.108,00	
		-						11.030.101.917,00					OPD dan Masyarakat		12.133.112.108,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	500 SR		500 SR	500 SR	2.561.619.791,00						500 SR	2.817.781.770,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit		0 Unit	3 Unit	3.119.594.643,00						3 Unit	3.431.554.107,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	30 Ton/hari		20 Ton/hari	20 Ton/hari	5.348.887.483,00						20 Ton/hari	5.883.776.231,00	
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						3.119.594.643,00							3.431.554.107,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit		0 Unit	3 Unit	3.119.594.643,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	3.431.554.107,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						2.561.619.791,00							2.817.781.770,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	500 SR		500 SR	200 SR	2.561.619.791,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		500 SR	2.817.781.770,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi						5.348.887.483,00							5.883.776.231,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	30 Ton/hari		20 Ton/hari	30 Ton/hari	5.348.887.483,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Ton/hari	5.883.776.231,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
50.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						4.650.000.000,00							5.115.000.000,00	
		Meningkatnya bangunan gedung yang terawat dan berfungsi dengan baik						4.650.000.000,00							5.115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						5.650.000.000,00					OPD dan Masyarakat		6.215.000.000,00	
		-						5.650.000.000,00					OPD dan Masyarakat		6.215.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00						1 Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	
			Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	25 Lisensi		20 Lisensi	20 Lisensi	300.000.000,00						20 Lisensi	330.000.000,00	
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	10 Rumah Negara		0 Rumah Negara	10 Rumah Negara	50.000.000,00						10 Rumah Negara	55.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	10 Rumah Negara		0 Rumah Negara	5 Rumah Negara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Rumah Negara	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	25 Lisensi		20 Lisensi	5 Lisensi	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Lisensi	330.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		-						5.650.000.000,00					OPD dan Masyarakat		6.215.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.200.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Provinsi	-		-	-	700.000.000,00						-	770.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	600.000.000,00						-	660.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota						600.000.000,00							660.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	17 Kabupate n/Kota	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	660.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0024	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						2.000.000.000,00							2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	-		1 Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	2.200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0025	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						700.000.000,00							770.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Provinsi	-	-		1 Bangunan Gedung	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	770.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0028	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	-		-	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
51.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						2.500.000.000,00							2.750.000.000,00	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						2.500.000.000,00							2.750.000.000,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.500.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.750.000.000,00	
		-						2.500.000.000,00					OPD dan Masyarakat		2.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	17 kabupaten /kota		17 kabupaten /kota	17 kabupaten /kota	700.000.000,00						17 kabupaten /kota	770.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	1.300.000.000,00						1 Kawasan	1.430.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota						700.000.000,00							770.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	17 kabupaten /kota		17 kabupaten /kota	17 kabupaten /kota	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 kabupaten /kota	770.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00							1.430.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	1.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Kawasan	1.430.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						4.495.100.000,00							4.944.610.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi						4.495.100.000,00							4.944.610.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						2.652.900.000,00					OPD dan Masyarakat		2.918.190.000,00	
		-						2.652.900.000,00					OPD dan Masyarakat		2.918.190.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	40 Orang		15 Orang	25 Orang	500.000.000,00						30 Orang	550.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	470.800.000,00						2 Lembaga	517.880.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	110.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	150 Orang		110 Orang	120 Orang	540.000.000,00						130 Orang	594.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	150 Orang		110 Orang	120 Orang	792.100.000,00						130 Orang	871.310.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		13 Orang	25 Orang	100.000.000,00						30 Orang	110.000.000,00	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	40 Orang		15 Orang	40 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Orang	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						792.100.000,00							871.310.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	150 Orang		110 Orang	250 Orang	792.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		130 Orang	871.310.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						470.800.000,00							517.880.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	10 Lembaga	470.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Lembaga	517.880.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						540.000.000,00							594.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	150 Orang		110 Orang	200 Orang	540.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		130 Orang	594.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang		13 Orang	40 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Orang	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga		1 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Lembaga	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						1.742.200.000,00					OPD dan Masyarakat		1.916.420.000,00	
		-						1.742.200.000,00					OPD dan Masyarakat		1.916.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	387.000.000,00						1 Dokumen	425.700.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	222.200.000,00						1 Layanan Informasi	244.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	62 Orang		18 Orang	22 Orang	133.000.000,00						37 Orang	146.300.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	1.000.000.000,00						1 Perangkat Pendukung	1.100.000.000,00	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						222.200.000,00							244.420.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	222.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Layanan Informasi	244.420.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Perangkat Pendukung	1.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi						387.000.000,00							425.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	387.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	425.700.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI						133.000.000,00							146.300.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	62 Orang		18 Orang	17 Orang	133.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		37 Orang	146.300.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						400.000.000,00					OPD dan Masyarakat		440.000.000,00	
		-						400.000.000,00					OPD dan Masyarakat		440.000.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha		2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	300.000.000,00						2 Badan Usaha	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha		2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Badan Usaha	330.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						126.197.222.993,00							138.816.945.292,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
53.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.912.118.993,00							38.403.330.892,00	
		Meningkatnya pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						34.912.118.993,00							38.403.330.892,00	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						985.000.000,00					OPD		1.083.500.000,00	
		-						985.000.000,00					OPD		1.083.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	230.000.000,00						1 Berita Acara	253.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00						1 Berita Acara	165.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	80.000.000,00						1 Data	88.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00						1 Dokumen	115.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	220.000.000,00	
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						105.000.000,00							115.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	115.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						15.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						15.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	220.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Data	88.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						230.000.000,00							253.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	230.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Berita Acara	253.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Berita Acara	165.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.351.034.000,00					OPD		27.886.137.400,00	
		-						25.351.034.000,00					OPD		27.886.137.400,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	820.300.000,00						1 Dokumen	902.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	66.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/ Bulan		249 Orang/ Bulan	254 Orang/ Bulan	24.390.734.000,00						259 Orang/ Bulan	26.829.807.400,00	
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.390.734.000,00							26.829.807.400,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 Orang/ Bulan		249 Orang/ Bulan	249 Orang/ Bulan	24.390.734.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		259 Orang/ Bulan	26.829.807.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						820.300.000,00							902.330.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	820.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	902.330.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						40.000.000,00							44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	44.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						60.000.000,00							66.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	66.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	11.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						70.000.000,00					OPD		77.000.000,00	
		-						70.000.000,00					OPD		77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	16.500.000,00	
	1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						40.000.000,00							44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	44.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.085.000.000,00					OPD		1.193.500.000,00	
		-						1.085.000.000,00					OPD		1.193.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang		30 Orang	30 Orang	20.000.000,00						33 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	800.000.000,00						1 Paket	880.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00						12 Orang	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		0 Unit	5 Unit	15.000.000,00						5 Unit	16.500.000,00	
	1.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						15.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit		0 Unit	5 Unit	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Unit	16.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						800.000.000,00							880.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	880.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						30.000.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Orang	220.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang		30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		33 Orang	22.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.225.484.993,00					OPD		2.448.033.492,00	
		-						2.225.484.993,00					OPD		2.448.033.492,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	945.000.000,00						1 Laporan	1.039.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	190.484.993,00						1 Paket	209.533.492,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	350.000.000,00						1 Paket	385.000.000,00	
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						350.000.000,00							385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	385.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						190.484.993,00							209.533.492,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	190.484.993,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	209.533.492,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	55.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						945.000.000,00							1.039.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	945.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	1.039.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	11.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						5.200.000.000,00					OPD		5.720.000.000,00	
		-						5.200.000.000,00					OPD		5.720.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	330.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	4.500.000.000,00						2 Unit	4.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	440.000.000,00	
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.500.000.000,00							4.950.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	8 Unit	4.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	4.950.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	330.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	440.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.425.600.000,00					OPD		1.568.160.000,00	
		-						1.425.600.000,00					OPD		1.568.160.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00						1 Laporan	880.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	542.600.000,00						1 Laporan	596.860.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00						1 Laporan	71.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	19.800.000,00	
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						18.000.000,00							19.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	19.800.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						800.000.000,00							880.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	880.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.000.000,00							71.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	71.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						542.600.000,00							596.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	542.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	596.860.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.340.000.000,00					OPD		1.474.000.000,00	
		-						1.340.000.000,00					OPD		1.474.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	800.000.000,00						18 Unit	880.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00						1 Unit	44.000.000,00	
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						800.000.000,00							880.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	28 Unit	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		18 Unit	880.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	10 Unit	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	44.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100.000.000,00					OPD		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					OPD		110.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.000.000,00						1 Unit Kerja	110.000.000,00	
	1.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit Kerja	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						710.000.000,00							781.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi warga negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah						710.000.000,00							781.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						900.000.000,00					OPD dan Masyarakat		990.000.000,00	
		-						900.000.000,00					OPD dan Masyarakat		990.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						1 Dokumen	198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						1 Dokumen	198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						1 Dokumen	198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						1 Dokumen	198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00						1 Dokumen	198.000.000,00	
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						180.000.000,00							198.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						180.000.000,00							198.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						180.000.000,00							198.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi						180.000.000,00							198.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi						180.000.000,00							198.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						580.000.000,00					OPD dan Masyarakat		638.000.000,00	
		-						580.000.000,00					OPD dan Masyarakat		638.000.000,00	
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	5 Orang		2 Orang	3 Orang	180.000.000,00						3 Orang	198.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	105 Orang		75 Orang	75 Orang	200.000.000,00						85 Orang	220.000.000,00	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	105 Orang		75 Orang	100 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		85 Orang	220.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator						180.000.000,00							198.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	5 Orang		2 Orang	2 Orang	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Orang	198.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						90.000.000,00					Masyarakat		99.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Masyarakat		99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	17 Unit Rumah		9 Unit Rumah	12 Unit Rumah	30.000.000,00						13 Unit Rumah	33.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	12 Unit Rumah		9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	30.000.000,00						10 Unit Rumah	33.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	27 Unit Rumah		18 Unit Rumah	19 Unit Rumah	30.000.000,00						22 Unit Rumah	33.000.000,00	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	27 Unit Rumah		18 Unit Rumah	1 Unit Rumah	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		22 Unit Rumah	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	17 Unit Rumah		9 Unit Rumah	1 Unit Rumah	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 Unit Rumah	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	12 Unit Rumah		9 Unit Rumah	1 Unit Rumah	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Unit Rumah	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						300.000.000,00					Masyarakat		330.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Masyarakat		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	330.000.000,00	
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		-						580.000.000,00					OPD dan Masyarakat		638.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	1.04.02.1.02.0011	Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersosialisasinya Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	100 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	220.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						18.545.104.000,00							20.399.614.400,00	
		Meningkatnya Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha) yang tertangani						18.545.104.000,00							20.399.614.400,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.930.000.000,00					Masyarakat		2.123.000.000,00	
		-						1.930.000.000,00					Masyarakat		2.123.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremaj aan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	10 Kelompok Masyarakat		7 Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00						8 Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00						1 Laporan	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	660.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	70 Rumah Tangga		50 Rumah Tangga	55 Rumah Tangga	150.000.000,00						60 Rumah Tangga	165.000.000,00	
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00						1 Sistem Informasi	165.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Sistem Informasi	165.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						400.000.000,00							440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	10 Kelompok Masyarakat		7 Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremaj aan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh						150.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	70 Rumah Tangga		50 Rumah Tangga	33 Rumah Tangga	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		60 Rumah Tangga	165.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						600.000.000,00							660.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	660.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0020	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						18.265.104.000,00					Masyarakat		20.091.614.400,00	
		-						18.265.104.000,00					Masyarakat		20.091.614.400,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00						1 Laporan	308.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	385.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	60 Unit Rumah		20 Unit Rumah	32 Unit Rumah	1.500.000.000,00						38 Unit Rumah	1.650.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	107 Unit Rumah		50 Unit Rumah	72 Unit Rumah	1.500.000.000,00						88 Unit Rumah	1.650.000.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	1 Hektar		0 Hektar	1 Hektar	1.876.401.000,00						1 Hektar	2.064.041.100,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	1832.28 Hektar		1792.28 Hektar	1802.28 Hektar	5.082.494.000,00						1812.28 Hektar	5.590.743.400,00	
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1832.28 Ha		1792.28 Ha	1802.28 Ha	7.616.209.000,00						1812.28 Ha	8.377.829.900,00	
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						280.000.000,00							308.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	308.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.500.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	107 Unit Rumah		50 Unit Rumah	33 Unit Rumah	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		88 Unit Rumah	1.650.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						350.000.000,00							385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	385.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.876.401.000,00							2.064.041.100,00	
		Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	1 Hektar		0 Hektar	1 Hektar	1.876.401.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Hektar	2.064.041.100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.500.000.000,00							1.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	60 Unit Rumah		20 Unit Rumah	19 Unit Rumah	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		38 Unit Rumah	1.650.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						60.000.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	66.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						5.082.494.000,00							5.590.743.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	1832.28 Hektar		1792.28 Hektar	1802,28 Hektar	5.082.494.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1812.28 Hektar	5.590.743.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						7.616.209.000,00							8.377.829.900,00	
		Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1832.28 Ha		1792.28 Ha	1802,28 Ha	7.616.209.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1812.28 Ha	8.377.829.900,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
56.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						66.100.000.000,00							72.710.000.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU)						66.100.000.000,00							72.710.000.000,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						66.100.000.000,00					Masyarakat		72.710.000.000,00	
		-						66.100.000.000,00					Masyarakat		72.710.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00						1 Dokumen	1.870.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	19 Lokasi		15 Lokasi	16 Lokasi	61.100.000.000,00						17 Lokasi	67.210.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	7 Lokasi		0 Lokasi	5 Lokasi	3.000.000.000,00						5 Lokasi	3.300.000.000,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						1.700.000.000,00							1.870.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.870.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						300.000.000,00							330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						3.000.000.000,00							3.300.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	7 Lokasi		0 Lokasi	17 Lokasi	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Lokasi	3.300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						61.100.000.000,00							67.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	19 Lokasi		15 Lokasi	17 Lokasi	61.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 Lokasi	67.210.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
57.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Meningkatnya identifikasi registrasi dan sertifikasi bagi orang atau badan hukum dan perencanaan						250.000.000,00							275.000.000,00	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah						250.000.000,00					OPD dan Masyarakat		275.000.000,00	
		-						250.000.000,00					OPD dan Masyarakat		275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	275.000.000,00	
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah						250.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	275.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						43.325.852.761,00							44.207.545.138,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.325.852.761,00							44.207.545.138,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						43.325.852.761,00							44.207.545.138,00	
58.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						39.615.852.761,00							39.652.545.138,00	
			-	-		-	-	39.615.852.761,00						-	39.652.545.138,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000,00					-		230.000.000,00	
		-						115.000.000,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	35.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.512.565.138,00					-		31.532.565.138,00	
		-						31.512.565.138,00					-		31.532.565.138,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	31.102.565.138,00						-	31.102.565.138,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						31.102.565.138,00							31.102.565.138,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	139 Orang/ Bulan	31.102.565.138,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	31.102.565.138,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						735.000.000,00					-		830.000.000,00	
		-						735.000.000,00					-		830.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	85.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	400.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	150.000.000,00						-	170.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						400.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						85.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	90.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	7 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.180.000.000,00					-		1.290.000.000,00	
		-						1.180.000.000,00					-		1.290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	600.000.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	110.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						600.000.000,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	650.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.313.287.623,00					-		5.314.980.000,00	
		-						5.313.287.623,00					-		5.314.980.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	283.307.623,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.022.980.000,00						-	5.022.980.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						283.307.623,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	283.307.623,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	285.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.022.980.000,00							5.022.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.022.980.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.022.980.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.200.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
		-						1.200.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	850.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
59.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.800.000.000,00							1.895.000.000,00	
			-	-		-	-	1.800.000.000,00						-	1.895.000.000,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.905.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		-						1.905.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	-		-	-	350.000.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	-		-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	350.000.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	-		-	-	430.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	-		-	-	325.000.000,00						-	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						350.000.000,00							375.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						350.000.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						430.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	-	-		1 laporan	430.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat						325.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	-	-		1 Laporan	325.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-		250 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						350.000.000,00					-		475.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	-	-		-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-		-	-	150.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-		-	1 laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						295.000.000,00					-		370.000.000,00	
		-						295.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	95.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	-	150.000.000,00						-	175.000.000,00	
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						95.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	1 Dokumen	95.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	1 laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						150.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
60.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						585.000.000,00							680.000.000,00	
			-	-		-	-	585.000.000,00						-	680.000.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						670.000.000,00					-		780.000.000,00	
		-						670.000.000,00					-		780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-		-	-	85.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	-	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	-	85.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	125.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						85.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-		-	3 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	275.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota						85.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	3 Unit	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Dinas Sosial						56.588.701.695,00							58.422.244.257,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						56.588.701.695,00							58.422.244.257,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						56.588.701.695,00							58.422.244.257,00	
61.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28.283.650.683,00							29.449.102.268,00	
			-	-		-	-	28.283.650.683,00						-	29.449.102.268,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						445.846.526,00					-		470.109.151,00	
		-						445.846.526,00					-		470.109.151,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	195.846.526,00						2 Dokumen	220.109.151,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						195.846.526,00							220.109.151,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	195.846.526,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	220.109.151,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.998.524.000,00					-		24.904.712.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						23.998.524.000,00					-		24.904.712.960,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.800.000,00						12 Dokumen	793.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00						12 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	50.000.000,00						19 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/ Bulan		222 Orang/ Bulan	222 Orang/ Bulan	22.654.724.000,00						222 Orang/ Bulan	23.560.912.960,00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.654.724.000,00							23.560.912.960,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/ Bulan		222 Orang/ Bulan	175 Orang/ Bulan	22.654.724.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		222 Orang/ Bulan	23.560.912.960,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						793.800.000,00							793.800.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	793.800.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.900.000,00					-		250.900.000,00	
		-						250.900.000,00					-		250.900.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00						50 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00						50 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	175.000.000,00						20 Orang	175.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.900.000,00						1 Unit	15.900.000,00	
	1.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						15.900.000,00							15.900.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	15.900.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	175.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.154.000.000,00					-		1.154.000.000,00	
		-						1.154.000.000,00					-		1.154.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	12.000.000,00						48 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	25.000.000,00						3 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	60.000.000,00						12 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.000.000,00						1 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						48.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	48.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	60.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	9.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Laporan	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	600.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						450.000.000,00					-		450.000.000,00	
		-						450.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	100.000.000,00	
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.137.000.000,00					-		1.137.000.000,00	
		-						1.137.000.000,00					-		1.137.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	765.000.000,00						12 Laporan	765.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00						12 Laporan	360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						765.000.000,00							765.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	765.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	765.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						360.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	360.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.339.380.157,00					-		1.574.380.157,00	
		-						1.339.380.157,00					-		1.574.380.157,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	915.380.157,00						1 Unit	1.150.380.157,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	350.000.000,00						45 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	24.000.000,00						50 Unit	24.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Unit	350.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	24.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	24.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						915.380.157,00							1.150.380.157,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	915.380.157,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.150.380.157,00	Dinas Sosial
62.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						346.901.654,00							374.086.211,00	
			-	-		-	-	346.901.654,00						-	374.086.211,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						21.901.654,00					-		49.086.211,00	
		-						21.901.654,00					-		49.086.211,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	21.901.654,00						17 Dokumen	49.086.211,00	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						21.901.654,00							49.086.211,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	21.901.654,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Dokumen	49.086.211,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	100 Badan Usaha		100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	50.000.000,00						100 Badan Usaha	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00						50 Keluarga	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	25.000.000,00						50 Lembaga	25.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100 Lembaga		100 Lembaga	100 Lembaga	100.000.000,00						100 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Keluarga	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100 Lembaga		100 Lembaga	100 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Lembaga	25.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	100 Badan Usaha		100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Badan Usaha	50.000.000,00	Dinas Sosial
63.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						27.492.317,00							27.492.317,00	
			-	-		-	-	27.492.317,00						-	27.492.317,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						27.492.317,00					-		27.492.317,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						27.492.317,00					-		27.492.317,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	27.492.317,00						50 Orang	27.492.317,00	
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						27.492.317,00							27.492.317,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	27.492.317,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	27.492.317,00	Dinas Sosial
64.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						17.055.941.550,00							17.515.433.530,00	
			-	-		-	-	17.055.941.550,00						-	17.515.433.530,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						1.505.483.596,00					-		1.544.975.576,00	
		-						1.505.483.596,00					-		1.544.975.576,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00						25 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	25 Kabupate n/Kota		25 Kabupate n/Kota	25 Kabupate n/Kota	20.000.000,00						25 Kabupate n/Kota	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	30.000.000,00						25 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00						25 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00						25 Orang	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	20.000.000,00						25 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	273.750.000,00						25 Orang	273.750.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00						25 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	25.000.000,00						25 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	676.733.596,00						25 Orang	716.225.576,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00						25 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25 orang		25 orang	25 orang	5.000.000,00						25 orang	5.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	25 orang		25 orang	25 orang	20.000.000,00						25 orang	20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	300.000.000,00						25 Orang	300.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						273.750.000,00							273.750.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	273.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	273.750.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						676.733.596,00							716.225.576,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	676.733.596,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	716.225.576,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	25 Kabupate n/Kota		25 Kabupate n/Kota	25 Kabupate n/Kota	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Kabupate n/Kota	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	25 orang		25 orang	25 orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	25 orang		25 orang	25 orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 orang	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						3.809.750.000,00					-		3.829.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						3.809.750.000,00					-		3.829.750.000,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	10.000.000,00						130 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	130 Dokumen		130 Dokumen	130 Dokumen	5.000.000,00						130 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	40.000.000,00						130 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	15.000.000,00						130 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.149.750.000,00						130 Orang	1.149.750.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	130.000.000,00						130 Orang	130.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.600.000.000,00						130 Orang	1.620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	100.000.000,00						130 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	720.000.000,00						130 Orang	720.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00						130 Orang	5.000.000,00	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	130.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						1.600.000.000,00							1.620.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	1.620.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						720.000.000,00							720.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	720.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	720.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	40.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						1.149.750.000,00							1.149.750.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.149.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	1.149.750.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	130 Dokumen		130 Dokumen	130 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						6.322.258.000,00					-		6.722.258.000,00	
		-						6.322.258.000,00					-		6.722.258.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Dokumen		220 Dokumen	220 Dokumen	20.000.000,00						220 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.618.000,00						220 Orang	5.618.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00						220 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00						220 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	31.640.000,00						220 Orang	31.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	2.409.000.000,00						200 Orang	2.409.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00						220 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	200.000.000,00						200 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	2.600.000.000,00						200 Orang	3.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	1.000.000,00						220 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	50.000.000,00						220 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	100.000.000,00						220 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	840.000.000,00						220 Orang	840.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						2.409.000.000,00							2.409.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	220 Orang	2.409.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	2.409.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	220 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						2.600.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	220 Orang	2.600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	200 Orang		200 Orang	220 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						31.640.000,00							31.640.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	31.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	31.640.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						840.000.000,00							840.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	840.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	840.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar						5.618.000,00							5.618.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.618.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	5.618.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Dokumen		220 Dokumen	220 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.03.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						3.371.950.000,00					-		3.371.950.000,00	
		-						3.371.950.000,00					-		3.371.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	180 Dokumen		180 Dokumen	180 Dokumen	20.000.000,00						180 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00						180 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.000.000,00						180 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	50.000.000,00						180 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00						180 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	Orang	5.000.000,00						180 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	43.950.000,00						180 Orang	43.950.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	1.971.000.000,00						180 Orang	1.971.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00						180 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	90.000.000,00						180 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	750.000.000,00						180 Orang	750.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	1.000.000,00						180 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	30.000.000,00						180 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	24.000.000,00						180 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	360.000.000,00						180 Orang	360.000.000,00	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan						1.971.000.000,00							1.971.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	1.971.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	1.971.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang						90.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	90.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						43.950.000,00							43.950.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	43.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	43.950.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						360.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	360.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	24.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	24.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	180 Dokumen		180 Dokumen	180 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis						1.000.000,00							1.000.000,00	
		TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.04.0017	Pemulasaraan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	180 Orang		180 Orang	180 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						4.372.499.954,00					-		4.372.499.954,00	
		-						4.372.499.954,00					-		4.372.499.954,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00						100 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00						100 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	547.500.000,00						100 Orang	547.500.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00						100 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	124.999.954,00						100 Orang	124.999.954,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.500.000.000,00						100 Orang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	720.000.000,00						100 Orang	720.000.000,00	
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	750.000.000,00						100 Orang	750.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan						547.500.000,00							547.500.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	180 Orang	547.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	547.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	1.500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						720.000.000,00							720.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	720.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	720.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.05.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah						124.999.954,00							124.999.954,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	124.999.954,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	124.999.954,00	Dinas Sosial
65.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						6.074.453.626,00							6.239.302.477,00	
			-	-		-	-	6.074.453.626,00						-	6.239.302.477,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						49.453.626,00					-		84.302.477,00	
		-						49.453.626,00					-		84.302.477,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	49.453.626,00						20 Orang	84.302.477,00	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI						49.453.626,00							84.302.477,00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	49.453.626,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	84.302.477,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						6.025.000.000,00					-		6.155.000.000,00	
		-						6.025.000.000,00					-		6.155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	25.000.000,00						17 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	200.000.000,00						17 Kab/Kota	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	5.000.000.000,00						1000 Orang	5.130.000.000,00	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	51 Orang		51 Orang	51 Orang	100.000.000,00						51 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	250 Orang		100 Orang	250 Orang	700.000.000,00						250 Orang	700.000.000,00	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						5.000.000.000,00							5.130.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1500 Orang	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Orang	5.130.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	250 Orang		100 Orang	51 Orang	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	700.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Kab/Kota	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	51 Orang		51 Orang	51 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		51 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
66.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						617.821.794,00							617.821.794,00	
		-	-	-	-	-	-	617.821.794,00						-	617.821.794,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						1.217.821.794,00					-		1.217.821.794,00	
		-						1.217.821.794,00					-		1.217.821.794,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	50 Orang		Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	17 Daerah		17 Daerah	17 Daerah	50.000.000,00						17 Daerah	50.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00						17 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan		1 Desa/Kelurahan	50 Desa/Kelurahan	50.000.000,00						Desa/Kelurahan	50.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1 Keluarga		Keluarga	1 Keluarga	50.000.000,00						1 Keluarga	50.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	400 Orang		400 Orang	400 Orang	100.000.000,00						400 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00						1000 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	50 Orang		Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang		3000 Orang	3000 Orang	317.821.794,00						3000 Orang	317.821.794,00	
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00						1000 Orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						317.821.794,00							317.821.794,00	
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang		3000 Orang	3000 Orang	317.821.794,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3000 Orang	317.821.794,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	400 Orang		400 Orang	400 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1 Keluarga		Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Keluarga	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	50 Orang		Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	50 Orang		Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0020	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	17 Daerah		17 Daerah	17 Daerah	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Daerah	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.1.01.0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan		1 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Desa/Kelurahan	50.000.000,00	Dinas Sosial
67.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						409.440.071,00							426.005.660,00	
			-	-		-	-	409.440.071,00						-	426.005.660,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						409.440.071,00					-		426.005.660,00	
		-						409.440.071,00					-		426.005.660,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00						12 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00						12 Laporan	96.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	10 Makam		10 Makam	10 Makam	33.440.071,00						10 Makam	50.005.660,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00						100 Orang	250.000.000,00	
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						33.440.071,00							50.005.660,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	10 Makam		10 Makam	10 Makam	33.440.071,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Makam	50.005.660,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						96.000.000,00							96.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	96.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.1.01.0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						52.968.692.251,00							56.941.579.926,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						52.968.692.251,00							56.941.579.926,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						52.968.692.251,00							56.941.579.926,00	
68.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						36.004.412.251,00							39.039.669.926,00	
			-	-		-	-	36.004.412.251,00						-	39.039.669.926,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						754.000.000,00					-		714.000.000,00	
		-						754.000.000,00					-		714.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00						100 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	319.000.000,00						100 Dokumen	319.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00						100 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00						100 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		100 Dokumen	Dokumen	50.000.000,00						Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	155.000.000,00						100 Laporan	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	80.000.000,00						100 Laporan	80.000.000,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						319.000.000,00							319.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	319.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	319.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						155.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	115.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.472.792.251,00					-		28.757.759.109,00	
		-						23.472.792.251,00					-		28.757.759.109,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	1.925.519.816,00						100 Dokumen	2.118.071.797,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	150.000.000,00						100 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	21.397.272.435,00						100 Orang/ Bulan	26.479.687.312,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.397.272.435,00							26.479.687.312,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	21.397.272.435,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100 Orang/ Bulan	26.479.687.312,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.925.519.816,00							2.118.071.797,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	1.925.519.816,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	2.118.071.797,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	160.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						490.000.000,00					-		520.000.000,00	
		-						490.000.000,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	300.000.000,00						100 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	190.000.000,00						100 Orang	220.000.000,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						190.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	50 Orang	190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	220.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.437.000.000,00					-		2.494.000.000,00	
		-						2.437.000.000,00					-		2.494.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	60.000.000,00						100 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	135.000.000,00						100 Laporan	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	707.000.000,00						100 Laporan	709.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	220.000.000,00						100 Paket	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	235.000.000,00						100 Paket	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	880.000.000,00						100 Paket	880.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	200.000.000,00						100 Paket	200.000.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						235.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	235.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						880.000.000,00							880.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	880.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	880.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						220.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						135.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	155.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						707.000.000,00							709.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	707.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	709.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.514.020.000,00					-		2.610.990.817,00	
		-						4.514.020.000,00					-		2.610.990.817,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	2.484.020.000,00						100 Unit	2.580.990.817,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	2.030.000.000,00						100 Unit	30.000.000,00	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.484.020.000,00							2.580.990.817,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	2 Unit	2.484.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	2.580.990.817,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.030.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	1 Unit	2.030.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.076.600.000,00					-		1.162.920.000,00	
		-						1.076.600.000,00					-		1.162.920.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	931.600.000,00						100 Laporan	997.920.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	25.000.000,00						100 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	120.000.000,00						100 Laporan	140.000.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						120.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	140.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						931.600.000,00							997.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	931.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	997.920.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.410.000.000,00					-		3.170.000.000,00	
		-						3.410.000.000,00					-		3.170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	1.600.000.000,00						100 Unit	1.660.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	500.000.000,00						100 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	1.310.000.000,00						100 Unit	1.010.000.000,00	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.600.000.000,00							1.660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	1.660.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.310.000.000,00							1.010.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	2 Unit	1.310.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	1.010.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
69.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						15.664.280.000,00							16.411.910.000,00	
			-	-		-	-	15.664.280.000,00						-	16.411.910.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						1.935.000.000,00					-		2.035.000.000,00	
		-						1.935.000.000,00					-		2.035.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.935.000.000,00						100 Orang	2.035.000.000,00	
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)						1.935.000.000,00							2.035.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	5000 Orang	1.935.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	2.035.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						9.101.180.000,00					-		9.281.000.000,00	
		-						9.101.180.000,00					-		9.281.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	2.855.000.000,00						100 Dokumen	2.855.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	250.000.000,00						100 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	4.500.000.000,00						100 Keluarga	4.500.000.000,00	
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00						100 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	846.180.000,00						100 Orang	726.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	400.000.000,00						100 Orang	700.000.000,00	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						846.180.000,00							726.000.000,00	
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang		100 Orang	1500 Orang	846.180.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	726.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						4.500.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga		100 Keluarga	1000 Keluarga	4.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Keluarga	4.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.855.000.000,00							2.855.000.000,00	
		Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	2.855.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	2.855.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						400.000.000,00							700.000.000,00	
		Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	700.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						3.836.100.000,00					-		4.203.910.000,00	
		-						3.836.100.000,00					-		4.203.910.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	-	480.000.000,00						-	480.000.000,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00						100 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	2.585.000.000,00						100 Orang	2.835.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	73.000.000,00						100 Laporan	73.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	60.000.000,00						100 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	78.100.000,00						100 Laporan	85.910.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	360.000.000,00						100 Laporan	410.000.000,00	
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi						480.000.000,00							480.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	100 Orang	480.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	480.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						78.100.000,00							85.910.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	78.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	85.910.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						2.585.000.000,00							2.835.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang		100 Orang	1000 Orang	2.585.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	2.835.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						360.000.000,00							410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	410.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						73.000.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	73.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	73.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						1.942.000.000,00					-		1.992.000.000,00	
		-						1.942.000.000,00					-		1.992.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000.000,00						100 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00						100 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	150.000.000,00						100 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	100 kabupate n/kota		100 kabupate n/kota	100 kabupate n/kota	375.000.000,00						100 kabupate n/kota	425.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	315.000.000,00						100 Keluarga	315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	202.000.000,00						100 Dokumen	202.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	150.000.000,00						100 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	100 Kegiatan		100 Kegiatan	100 Kegiatan	150.000.000,00						100 Kegiatan	150.000.000,00	
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00						100 Dokumen	200.000.000,00	
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						315.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		100 Keluarga	100 Keluarga	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Keluarga	315.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	100 Kegiatan		100 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Kegiatan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang		100 Orang	50 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						375.000.000,00							425.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	100 kabupate n/kota		100 kabupate n/kota	17 kabupaten /kota	375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 kabupate n/kota	425.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor						202.000.000,00							202.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	202.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	202.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						47.402.031.674,00							47.912.031.674,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						47.049.495.943,00							47.559.495.943,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						47.049.495.943,00							47.559.495.943,00	
70.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.912.788.116,00							41.412.788.116,00	
			-	-		-	-	40.912.788.116,00						-	41.412.788.116,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						275.000.000,00					-		275.000.000,00	
		-						275.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						125.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.365.000.000,00					-		31.865.000.000,00	
		-						31.365.000.000,00					-		31.865.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00						1 Dokumen	255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00						18 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/ Bulan		237 Orang/ Bulan	237 Orang/ Bulan	31.000.000.000,00						237 Orang/ Bulan	31.500.000.000,00	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						31.000.000.000,00							31.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/ Bulan		237 Orang/ Bulan	237 Orang/ Bulan	31.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		237 Orang/ Bulan	31.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						255.000.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	255.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Laporan	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						130.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						130.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	50.000.000,00						1 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	300.000.000,00						10 Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	237 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.165.000.000,00					-		1.165.000.000,00	
		-						1.165.000.000,00					-		1.165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	180.000.000,00						1 Paket	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						180.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.250.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
		-						2.250.000.000,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00						1 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						750.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	750.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.265.000.000,00					-		1.265.000.000,00	
		-						1.265.000.000,00					-		1.265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	720.000.000,00						1 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	540.000.000,00						1 Laporan	540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						720.000.000,00							720.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	720.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	720.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						540.000.000,00							540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	540.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	540.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.812.788.116,00					-		4.812.788.116,00	
		-						4.812.788.116,00					-		4.812.788.116,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	4.442.788.116,00						1 Unit	4.442.788.116,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	300.000.000,00						27 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00						2 Unit	70.000.000,00	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Unit	300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.442.788.116,00							4.442.788.116,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.442.788.116,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.442.788.116,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						130.568.789,00							130.568.789,00	
		Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja						130.568.789,00							130.568.789,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						130.568.789,00					-		130.568.789,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						130.568.789,00					-		130.568.789,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.568.789,00						1 Dokumen	130.568.789,00	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						130.568.789,00							130.568.789,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	130.568.789,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	130.568.789,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
72.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						966.209.042,00							966.209.042,00	
		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya						966.209.042,00							966.209.042,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						896.209.042,00					-		896.209.042,00	
		-						896.209.042,00					-		896.209.042,00	
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1 Kesepakatan		0 Kesepakatan	1 Kesepakatan	0,00						1 Kesepakatan	0,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	196.209.042,00						1 Unit	196.209.042,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang		48 Orang	64 Orang	600.000.000,00						80 Orang	600.000.000,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	80 Orang		48 Orang	64 Orang	600.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Orang	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja						196.209.042,00							196.209.042,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit		1 Unit	1 Unit	196.209.042,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	196.209.042,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1 Kesepakatan		0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kesepakatan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	25 LPK		10 LPK	10 LPK	50.000.000,00						15 LPK	50.000.000,00	
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	25 LPK		10 LPK	10 LPK	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 LPK	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
73.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						556.315.508,00							566.315.508,00	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri						556.315.508,00							566.315.508,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						181.315.508,00					-		181.315.508,00	
		-						181.315.508,00					-		181.315.508,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10 Orang		Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang		Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	2 Orang		0 Orang	2 Orang	10.000.000,00						2 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00						20 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang		25 Orang	20 Orang	106.315.508,00						20 Orang	106.315.508,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	25.000.000,00	
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	2 Orang		0 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang		Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10 Orang		Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						106.315.508,00							106.315.508,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang		25 Orang	20 Orang	106.315.508,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	106.315.508,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	3 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	10.000.000,00						3 Lembaga	10.000.000,00	
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	3 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	10.000.000,00						3 Lembaga	10.000.000,00	
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	3 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Lembaga	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	3 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Lembaga	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						255.000.000,00					-		265.000.000,00	
		-						255.000.000,00					-		265.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	250 Orang		0 Orang	250 Orang	20.000.000,00						250 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang		250 Orang	200 Orang	215.000.000,00						200 Orang	225.000.000,00	
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	250 Orang		0 Orang	250 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						215.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang		250 Orang	200 Orang	215.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00						100 Orang	30.000.000,00	
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang		40 Orang	13 Orang	150.000.000,00						20 Orang	150.000.000,00	
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang		40 Orang	13 Orang	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
74.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						359.064.171,00							359.064.171,00	
		Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial						359.064.171,00							359.064.171,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	5.000.000,00						10 Perusahaan	5.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	7 Perusahaan		5 Perusahaan	7 Perusahaan	5.000.000,00						7 Perusahaan	5.000.000,00	
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Perusahaan	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	7 Perusahaan		5 Perusahaan	7 Perusahaan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Perusahaan	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						105.000.000,00					-		105.000.000,00	
		-						105.000.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00						5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						254.064.171,00					-		254.064.171,00	
		-						254.064.171,00					-		254.064.171,00	
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	204.064.171,00						1 Surat Keputusan	204.064.171,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	50.000.000,00						20 Orang	50.000.000,00	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						204.064.171,00							204.064.171,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	204.064.171,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Surat Keputusan	204.064.171,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
75.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						3.034.550.317,00							3.034.550.317,00	
		Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya						3.034.550.317,00							3.034.550.317,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						3.034.550.317,00					-		3.034.550.317,00	
		-						3.034.550.317,00					-		3.034.550.317,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		10 Kasus	10 Kasus	250.000.000,00						10 Kasus	250.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.500.000.000,00						50 Perusahaan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	120 Perusahaan		120 Perusahaan	120 Perusahaan	1.284.550.317,00						120 Perusahaan	1.284.550.317,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						1.284.550.317,00							1.284.550.317,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	120 Perusahaan		120 Perusahaan	120 Perusahaan	1.284.550.317,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Perusahaan	1.284.550.317,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus		10 Kasus	10 Kasus	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Kasus	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan		50 Perusahaan	50 Perusahaan	1.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perusahaan	1.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						352.535.731,00							352.535.731,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						352.535.731,00							352.535.731,00	
76.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI						32.642.197,00							32.642.197,00	
		Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan						32.642.197,00							32.642.197,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						32.642.197,00					-		32.642.197,00	
		-						32.642.197,00					-		32.642.197,00	
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi		2 Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	22.642.197,00						2 Kawasan Transmigrasi	22.642.197,00	
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar		0 Hektar	0 Hektar	0,00						0 Hektar	0,00	
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						22.642.197,00							22.642.197,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi		2 Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	22.642.197,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kawasan Transmigrasi	22.642.197,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar		0 Hektar	1 Hektar	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Hektar	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
77.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						239.893.534,00							239.893.534,00	
		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang						239.893.534,00							239.893.534,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						289.893.534,00					-		289.893.534,00	
		-						289.893.534,00					-		289.893.534,00	
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	1 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	1 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						0 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	31 Orang		0 Orang	31 Orang	89.893.534,00						31 Orang	89.893.534,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00						0 Kepala Keluarga	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	31 Kepala Keluarga		31 Kepala Keluarga	31 Kepala Keluarga	50.000.000,00						31 Kepala Keluarga	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	100.000.000,00						5 Lokasi	100.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00						0 Kepala Keluarga	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00						0 KK	0,00	
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00						0 Kepala Keluarga	0,00	
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						0,00							0,00	
		Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kepala Keluarga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kepala Keluarga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	1 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kepala Keluarga	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						89.893.534,00							89.893.534,00	
		Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	31 Orang		0 Orang	31 Orang	89.893.534,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Orang	89.893.534,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	31 Kepala Keluarga		31 Kepala Keluarga	31 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	1 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Lokasi	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	1 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Orang	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0010	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0011	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0012	Penampungan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran						0,00							0,00	
		Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0014	Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0015	Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0016	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	1 KK		0 KK	0 KK	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 KK	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
78.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Persentase Transmigrasi Yang Dibina dan Diberdayakan						30.000.000,00							30.000.000,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	31 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	31 Kepala Keluarga	20.000.000,00						31 Kepala Keluarga	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	10.000.000,00						3 Satuan Permukiman	10.000.000,00	
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	31 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga	31 Kepala Keluarga	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Kepala Keluarga	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Ulu 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Satuan Permukiman	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						22.673.896.302,00							22.864.189.715,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.673.896.302,00							22.864.189.715,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						22.673.896.302,00							22.864.189.715,00	
79.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.729.058.750,00							14.920.384.392,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						15.729.058.750,00							14.920.384.392,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						110.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	24 Data		24 Data	24 Data	35.000.000,00						24 Data	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00						4 Laporan	30.000.000,00	
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	24 Data		24 Data	24 Data	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Data	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.330.000.000,00					-		9.840.000.000,00	
		-						9.330.000.000,00					-		9.840.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00						60 Orang/ Bulan	9.500.000.000,00	
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.000.000.000,00							9.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Orang/ Bulan	9.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						80.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						509.058.750,00					-		570.384.392,00	
		-						509.058.750,00					-		570.384.392,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100.000.000,00						8 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.000.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	129.058.750,00						10 Orang	190.384.392,00	
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						130.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	130.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						129.058.750,00							190.384.392,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	129.058.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	190.384.392,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.260.000.000,00					-		2.345.000.000,00	
		-						2.260.000.000,00					-		2.345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00						2 Laporan	660.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	250.000.000,00						2 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	850.000.000,00						1 Paket	850.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	850.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						60.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						550.000.000,00							660.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	660.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.500.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		-						1.500.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00						2 Unit	1.200.000.000,00	
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.500.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.130.000.000,00					-		780.000.000,00	
		-						1.130.000.000,00					-		780.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						700.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.870.000.000,00					-		1.950.000.000,00	
		-						1.870.000.000,00					-		1.950.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	170.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00						1 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	400.000.000,00						17 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00						4 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						170.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2.825.112.503,00							2.986.416.152,00	
		Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)						2.825.112.503,00							2.986.416.152,00	
		-						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	1.400.000.000,00						2 Lembaga	1.400.000.000,00	
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						1.400.000.000,00							1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	1.400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga	1.400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						280.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						280.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	180.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	50 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota						180.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	180.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						945.112.503,00					-		986.416.152,00	
		-						945.112.503,00					-		986.416.152,00	
			Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-		-	-	150.000.000,00						-	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	445.112.503,00						-	466.416.152,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						445.112.503,00							466.416.152,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	15 Lembaga	445.112.503,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	466.416.152,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02.0013	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Provinsi						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-		-	1 Kegiatan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
		-						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.1.03.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
81.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						475.143.625,00							410.000.000,00	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif						475.143.625,00							410.000.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						180.143.625,00					-		165.000.000,00	
		-						180.143.625,00					-		165.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	-	65.143.625,00						-	50.000.000,00	
	2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						65.143.625,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	100 Orang	65.143.625,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						260.000.000,00					-		260.000.000,00	
		-						260.000.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						135.000.000,00					-		135.000.000,00	
		-						135.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.08.03.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	10 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03.0013	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	75 Orang	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
82.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						197.445.513,00							205.249.244,00	
		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar						197.445.513,00							205.249.244,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						85.000.000,00					-		85.000.000,00	
		-						85.000.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	40 Lembaga		40 Lembaga	40 Lembaga	85.000.000,00						40 Lembaga	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	40 Lembaga		40 Lembaga	40 Lembaga	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Lembaga	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						112.445.513,00					-		120.249.244,00	
		-						112.445.513,00					-		120.249.244,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	10 Lembaga		0 Lembaga	10 Lembaga	62.445.513,00						10 Lembaga	70.249.244,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00						10 Lembaga	50.000.000,00	
	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						62.445.513,00							70.249.244,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	10 Lembaga		0 Lembaga	10 Lembaga	62.445.513,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	70.249.244,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
	2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
83.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						334.385.823,00							344.931.410,00	
		-						334.385.823,00					-		344.931.410,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.05.1.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan						334.385.823,00							344.931.410,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						334.385.823,00					-		344.931.410,00	
		-						334.385.823,00					-		344.931.410,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	40 Lembaga		0 Lembaga	40 Lembaga	84.385.823,00						40 Lembaga	94.931.410,00	
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						84.385.823,00							94.931.410,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	40 Lembaga		0 Lembaga	40 Lembaga	84.385.823,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Lembaga	94.931.410,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
84.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						648.708.507,00							649.166.936,00	
		Indeks Pemehuhan Hak Anak (IPHA)						648.708.507,00							649.166.936,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						213.708.507,00					-		214.166.936,00	
		-						213.708.507,00					-		214.166.936,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	110.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	103.708.507,00						-	104.166.936,00	
	2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi						110.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	18 Lembaga	110.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						103.708.507,00							104.166.936,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	200 Orang	103.708.507,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	104.166.936,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						435.000.000,00					-		435.000.000,00	
		-						435.000.000,00					-		435.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.06.1.02.0014	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	1 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0015	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	30 Lembaga	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	100 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
85.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						1.234.041.581,00							1.203.041.581,00	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)						1.234.041.581,00							1.203.041.581,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		219.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		219.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	70.000.000,00						-	74.000.000,00	
	2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0013	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0015	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						70.000.000,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	100 Orang	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	74.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						260.000.000,00					-		260.000.000,00	
		-						260.000.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	210.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						210.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	210.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	210.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						824.041.581,00					-		724.041.581,00	
		-						824.041.581,00					-		724.041.581,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	74.041.581,00						-	74.041.581,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	350.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.08.07.1.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						74.041.581,00							74.041.581,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	20 Lembaga	74.041.581,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	74.041.581,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.03.0016	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03.0017	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						350.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	200 Orang	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						54.613.059.700,00							54.636.008.785,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.853.059.700,00							47.381.008.785,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						42.853.059.700,00							47.381.008.785,00	
86.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						36.110.559.700,00							39.203.508.785,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						36.110.559.700,00							39.203.508.785,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						525.000.000,00					-		650.000.000,00	
		-						525.000.000,00					-		650.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	12.500.000,00						1 Data	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00						1 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00						6 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						225.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	12.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	12.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	12.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.277.639.700,00					-		32.956.008.785,00	
		-						31.277.639.700,00					-		32.956.008.785,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	221 Orang/ Bulan		221 Orang/ Bulan	221 Orang/ Bulan	31.077.639.700,00						221 Orang/ Bulan	32.756.008.785,00	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						31.077.639.700,00							32.756.008.785,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	221 Orang/ Bulan		221 Orang/ Bulan	221 Orang/ Bulan	31.077.639.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		221 Orang/ Bulan	32.756.008.785,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100.000.000,00						20 Orang	100.000.000,00	
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	250 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						745.000.000,00					-		820.000.000,00	
		-						745.000.000,00					-		820.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00						5 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	75.000.000,00						20 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	75.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	75.000.000,00						8 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket		34 Paket	34 Paket	75.000.000,00						34 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket	50.000.000,00						19 Paket	50.000.000,00	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket		34 Paket	34 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		34 Paket	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Paket	80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						330.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						450.000.000,00					-		2.350.000.000,00	
		-						450.000.000,00					-		2.350.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.000.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	200.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						6 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	200.000.000,00	
	2.09.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	10 Unit	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.130.420.000,00					-		2.330.000.000,00	
		-						3.130.420.000,00					-		2.330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00						4 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.505.420.000,00						2 Laporan	1.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						600.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.505.420.000,00							1.600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.505.420.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						810.000.000,00					-		875.000.000,00	
		-						810.000.000,00					-		875.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	300.000.000,00						5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						10 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit		33 Unit	33 Unit	410.000.000,00						33 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						410.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit		33 Unit	33 Unit	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Unit	450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
87.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Persentase jumlah cadangan pangan						75.000.000,00							125.000.000,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						75.000.000,00					-		125.000.000,00	
		-						75.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	8 Unit		0 Unit	8 Unit	75.000.000,00						8 Unit	125.000.000,00	
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	8 Unit		0 Unit	8 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
88.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						3.100.000.000,00							4.150.000.000,00	
		Skor Pola Pangan Harapan						3.100.000.000,00							4.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1.225.000.000,00					-		1.625.000.000,00	
		-						1.225.000.000,00					-		1.625.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						500.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi						225.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi						0,00							0,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						925.000.000,00					-		1.250.000.000,00	
		-						925.000.000,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	111.88 Ton		15 Ton	100.69 Ton	750.000.000,00						104.42 Ton	1.000.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	111.88 Ton		96.96 Ton	100.69 Ton	75.000.000,00						104.42 Ton	100.000.000,00	
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	111.88 Ton		96.96 Ton	31,5 Ton	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		104.42 Ton	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						750.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	111.88 Ton		15 Ton	31,5 Ton	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		104.42 Ton	1.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat						100.000.000,00					-		125.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
	2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						1.550.000.000,00					-		1.925.000.000,00	
		-						1.550.000.000,00					-		1.925.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00						1 Laporan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						1.000.000.000,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
89.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						1.050.000.000,00							1.225.000.000,00	
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan						1.050.000.000,00							1.225.000.000,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						1.200.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
		-						1.200.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						700.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
90.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						740.000.000,00							850.000.000,00	
		Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan						740.000.000,00							850.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						740.000.000,00					-		850.000.000,00	
		-						740.000.000,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00						4 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00						3 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	45 Sertifikat		45 Sertifikat	45 Sertifikat	300.000.000,00						45 Sertifikat	350.000.000,00	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	45 Sertifikat		45 Sertifikat	45 Sertifikat	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Sertifikat	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						200.000.000,00							225.000.000,00	
		terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.760.000.000,00							7.255.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.760.000.000,00							7.255.000.000,00	
91.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.885.000.000,00							3.380.000.000,00	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Jumlah Produksi Daging dan Telur)						2.885.000.000,00							3.380.000.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						1.310.000.000,00					-		1.680.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.310.000.000,00					-		1.680.000.000,00	
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	320.000.000,00						3 Dokumen	455.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	940.000.000,00						2 laporan	1.150.000.000,00	
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang		0 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	75.000.000,00	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						320.000.000,00							455.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	455.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						940.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	940.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 laporan	1.150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang		0 Orang	10 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						1.075.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		-						1.075.000.000,00					-		1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	925.000.000,00						1 laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						925.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terkendalnya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan		1 laporan	1 laporan	925.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	1.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5500 Ekor		3500 Ekor	4000 Ekor	500.000.000,00						4500 Ekor	500.000.000,00	
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5500 Ekor		3500 Ekor	4000 Ekor	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4500 Ekor	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
92.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						700.000.000,00							875.000.000,00	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Jumlah Produksi Daging dan Telur)						700.000.000,00							875.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						400.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan						0,00							0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300.000.000,00					-		375.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
93.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.450.000.000,00							1.600.000.000,00	
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)						775.000.000,00							1.025.000.000,00	
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						175.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						175.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	5 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00						10 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkendalnya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	5 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						825.000.000,00					-		950.000.000,00	
		-						825.000.000,00					-		950.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang		0 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	2 Produk		0 Produk	2 Produk	50.000.000,00						2 Produk	50.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha		0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100.000.000,00						10 Unit Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00						10 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000,00						20 Unit Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	75.000.000,00						20 Unit Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terpenuhinya Persyaratan Teknis SertifikasiZona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha		0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang		0 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	2 Produk		0 Produk	2 Produk	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Produk	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						250.000.000,00					-		300.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	5 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	30 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00						20 Dokumen	250.000.000,00	
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	30 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	5 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan						150.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus		0 Kasus	2 Kasus	50.000.000,00						2 Kasus	50.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat		0 Sertifikat	20 Sertifikat	100.000.000,00						20 Sertifikat	150.000.000,00	
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus		0 Kasus	2 Kasus	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kasus	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat		0 Sertifikat	20 Sertifikat	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Sertifikat	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis						875.000.000,00							975.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.075.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		-						1.075.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	17 Laporan		1 Laporan	17 Laporan	375.000.000,00						17 Laporan	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100 Kasus		0 Kasus	100 Kasus	200.000.000,00						100 Kasus	225.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan		0 Laporan	17 Laporan	200.000.000,00						17 Laporan	225.000.000,00	
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						375.000.000,00							400.000.000,00	
		Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	17 Laporan		1 Laporan	17 Laporan	375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan		0 Laporan	17 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100 Kasus		0 Kasus	100 Kasus	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Kasus	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
94.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Peternakan)						50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.05.1.01.0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
95.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Persentase Perizinan Usaha Pertanian (Peternakan)						50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00						10 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.06.1.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
96.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						5.550.000.000,00							0,00	
		Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan						5.550.000.000,00							0,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						5.050.000.000,00					-		0,00	
		-						5.050.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	0 Kelompok		324 Kelompok	0 Kelompok	5.050.000.000,00						0 Kelompok	0,00	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						5.050.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	0 Kelompok		324 Kelompok	208 Kelompok	5.050.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Kelompok	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendapat pembinaan	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
	3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendapat pembinaan	-		-	17 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan						57.687.109.537,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						57.687.109.537,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.350.000.000,00							0,00	
97.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						250.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi						250.000.000,00					Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OPD yang membidangi Pertanahan		0,00	
		-						250.000.000,00					Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OPD yang membidangi Pertanahan		0,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
98.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						150.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00					Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OPD yang membidangi Pertanahan		0,00	
		-						150.000.000,00					Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OPD yang membidangi Pertanahan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40 Berita Acara		40 Berita Acara	40 Berita Acara	150.000.000,00						40 Berita Acara	0,00	
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40 Berita Acara		40 Berita Acara	4 Laporan Berita Acara	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Berita Acara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
99.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						100.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						200.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						200.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						100.000.000,00							0,00	
		Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
100.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						150.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					Perusahaan/Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat		0,00	
		-						200.000.000,00					Perusahaan/Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat		0,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						50.000.000,00							0,00	
		Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
101.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						350.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan		0,00	
		-						200.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.10.08.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						150.000.000,00					-		0,00	
		-						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.10.08.1.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
102.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						200.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						56.337.109.537,00							0,00	
103.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.118.669.537,00							0,00	
			-	-		-	-	48.118.669.537,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						635.000.000,00					ASN DLHP Prov. Sumsel		0,00	
		-						635.000.000,00					ASN DLHP Prov. Sumsel		0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00						1 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.913.581.000,00					-		0,00	
		-						17.913.581.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.120.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan		140 Orang/ Bulan	148 Orang/ Bulan	17.567.461.000,00						150 Orang/ Bulan	0,00	
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.567.461.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan		140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	17.567.461.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		150 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						246.120.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						18.000.000,00					-		0,00	
		-						18.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						6.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						225.000.000,00					-		0,00	
		-						225.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang		52 Orang	52 Orang	150.000.000,00						52 Orang	0,00	
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang		52 Orang	7 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		52 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.147.080.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.147.080.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	145.080.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	60.000.000,00						3 Paket	0,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						145.080.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	145.080.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						700.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.288.948.537,00					-		0,00	
		-						1.288.948.537,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	463.948.537,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	175.000.000,00						5 Unit	0,00	
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						450.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						463.948.537,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	463.948.537,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.174.000.000,00					-		0,00	
		-						1.174.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						365.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						800.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						460.900.000,00					-		0,00	
		-						460.900.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	270.900.000,00						31 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	30.000.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		31 Unit	31 Unit	60.000.000,00						31 Unit	0,00	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	1 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						270.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	23 Unit	270.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		31 Unit	20 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						26.268.160.000,00					Pelaku Usaha dan Masyarakat		0,00	
		-						26.268.160.000,00					Pelaku Usaha dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	26.268.160.000,00						1 Unit Kerja	0,00	
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						26.268.160.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	26.268.160.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		1 Unit Kerja	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
104.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						375.000.000,00							0,00	
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						25.000.000,00					-		0,00	
		-						25.000.000,00					-		0,00	
			Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi						25.000.000,00							0,00	
		RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						350.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota		0,00	
		-						350.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota		0,00	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						300.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
105.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						2.781.440.000,00							0,00	
			-	-		-	-	2.781.440.000,00						-	0,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						1.391.440.000,00					-		0,00	
		-						1.391.440.000,00					-		0,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	17 Lokasi		17 Lokasi	17 Lokasi	370.000.000,00						17 Lokasi	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	540.000.000,00						6 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	315.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	166.440.000,00						4 Paket	0,00	
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						315.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						540.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	540.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						166.440.000,00							0,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	4 Paket		4 Paket	242 Paket	166.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						370.000.000,00							0,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	17 Lokasi		17 Lokasi	179 Lokasi	370.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Lokasi	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						290.000.000,00					-		0,00	
		-						290.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	290.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						290.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	290.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						1.100.000.000,00					-		0,00	
		-						1.100.000.000,00					-		0,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00						1 Kegiatan	0,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00						4 Kegiatan	0,00	
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi						1.000.000.000,00							0,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Kegiatan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						100.000.000,00							0,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
106.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						100.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5 Orang		5 Orang	5 Orang	100.000.000,00						5 Orang	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha		5 Ha	5 Ha	100.000.000,00						5 Ha	0,00	
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						100.000.000,00							0,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha		5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5 Orang		5 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati						100.000.000,00							0,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						100.000.000,00							0,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
107.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						200.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
108.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						200.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		-						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Usaha/Ke giatan		25 Usaha/Ke giatan	25 Usaha/Ke giatan	200.000.000,00						25 Usaha/Ke giatan	0,00	
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						200.000.000,00							0,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Usaha/Ke giatan		25 Usaha/Ke giatan	17 Usaha/Ke giatan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Usaha/Ke giatan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
109.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						700.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	700.000.000,00						-	0,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						900.000.000,00					-		0,00	
		-						900.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	50 Keluarga		0 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00						50 Keluarga	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00						1 Lembaga	0,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1204 Orang		1204 Orang	1204 Orang	600.000.000,00						1204 Orang	0,00	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						600.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1204 Orang		1204 Orang	615 Orang	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1204 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	50 Keluarga		0 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Keluarga	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga		1 Lembaga	50 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lembaga	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
110.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.300.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	1.300.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						1.300.000.000,00					-		0,00	
		-						1.300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	186 Entitas		186 Entitas	186 Entitas	1.300.000.000,00						186 Entitas	0,00	
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						1.300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	186 Entitas		186 Entitas	4 Entitas	1.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		186 Entitas	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
111.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						700.000.000,00							0,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	-		-	6 Pengaduan	700.000.000,00						-	0,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						700.000.000,00					Masyarakat dan badan usaha		0,00	
		-						700.000.000,00					Masyarakat dan badan usaha		0,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan		20 Pengaduan	20 Pengaduan	200.000.000,00						20 Pengaduan	0,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	20 Perkara		20 Perkara	20 Perkara	500.000.000,00						20 Perkara	0,00	
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi						500.000.000,00							0,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	20 Perkara		20 Perkara	3 Perkara	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Perkara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan		20 Pengaduan	6 Pengaduan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Pengaduan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
112.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						250.000.000,00							0,00	
			Jumlah Dokumen pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00						-	0,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						250.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota		0,00	
		-						250.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota		0,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						14.783.246.351,00							14.783.246.351,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.783.246.351,00							14.783.246.351,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						14.783.246.351,00							14.783.246.351,00	
113.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.963.514.018,00							12.963.514.018,00	
			Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi	-		-	1 Laporan	11.048.641.697,00						-	11.048.641.697,00	
			-	-		-	-	1.914.872.321,00						-	1.914.872.321,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						279.712.500,00					-		279.712.500,00	
		-						279.712.500,00					-		279.712.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	129.250.000,00						1 Berita Acara	129.250.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00						10 Dokumen	12.925.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.500,00						1 Dokumen	6.462.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	29.137.500,00						10 Dokumen	29.137.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00						10 Dokumen	12.925.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00						10 Dokumen	12.925.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00						10 Dokumen	12.925.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	51.700.000,00						10 Laporan	51.700.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.462.500,00						1 Laporan	6.462.500,00	
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.137.500,00							29.137.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	29.137.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	29.137.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						12.925.000,00							12.925.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	12.925.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	12.925.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						12.925.000,00							12.925.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	12.925.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						12.925.000,00							12.925.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	12.925.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.925.000,00							12.925.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.925.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	12.925.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						51.700.000,00							51.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		10 Laporan	2 Laporan	51.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	51.700.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.462.500,00							6.462.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.462.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.462.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						129.250.000,00							129.250.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	129.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	129.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						6.462.500,00							6.462.500,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.462.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.115.640.000,00					-		8.115.640.000,00	
		-						8.115.640.000,00					-		8.115.640.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.960.000,00						1 Dokumen	90.960.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	7.994.680.000,00						59 Orang/ Bulan	7.994.680.000,00	
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.994.680.000,00							7.994.680.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan		59 Orang/ Bulan	64 Orang/ Bulan	7.994.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		59 Orang/ Bulan	7.994.680.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						90.960.000,00							90.960.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	90.960.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						8.632.321,00					-		8.632.321,00	
		-						8.632.321,00					-		8.632.321,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.632.321,00						1 Laporan	8.632.321,00	
	2.12.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.632.321,00							8.632.321,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.632.321,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	8.632.321,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						700.325.000,00					-		700.325.000,00	
		-						700.325.000,00					-		700.325.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	92.600.000,00						1 Dokumen	92.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	323.125.000,00						1 Dokumen	323.125.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	175.000.000,00						2 Paket	175.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	109.600.000,00						4 Orang	109.600.000,00	
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	175.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						92.600.000,00							92.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	92.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	92.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						323.125.000,00							323.125.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	323.125.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	323.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						109.600.000,00							109.600.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	6 Orang	109.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	109.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						798.825.447,00					-		798.825.447,00	
		-						798.825.447,00					-		798.825.447,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	451.037.947,00						2 Laporan	451.037.947,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00						1 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.237.500,00						1 Paket	65.237.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.550.000,00						1 Paket	77.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00						1 Paket	65.000.000,00	
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						65.237.500,00							65.237.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.237.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	65.237.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.550.000,00							77.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	77.550.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	65.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	65.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						451.037.947,00							451.037.947,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	451.037.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	451.037.947,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.205.915.000,00					-		1.205.915.000,00	
		-						1.205.915.000,00					-		1.205.915.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		Unit	7 Unit	750.000.000,00						7 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		8 Unit	9 Unit	255.915.000,00						9 Unit	255.915.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit		33 Unit	35 Unit	200.000.000,00						35 Unit	200.000.000,00	
	2.12.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		Unit	4 Unit	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	750.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						255.915.000,00							255.915.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		8 Unit	11 Unit	255.915.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Unit	255.915.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit		33 Unit	23 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						981.701.250,00					-		981.701.250,00	
		-						981.701.250,00					-		981.701.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	347.321.250,00						1 Laporan	347.321.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	631.380.000,00						3 Laporan	631.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						347.321.250,00							347.321.250,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	347.321.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	347.321.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						631.380.000,00							631.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	631.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	631.380.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.063.000.000,00					-		1.063.000.000,00	
		-						1.063.000.000,00					-		1.063.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	370.000.000,00						2 Unit	370.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000.000,00						7 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	360.000.000,00						7 Unit	360.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	258.000.000,00						15 Unit	258.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	65.000.000,00						1 Unit	65.000.000,00	
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	5 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						360.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	360.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						370.000.000,00							370.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	370.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	370.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						258.000.000,00							258.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	258.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	258.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	5 Unit	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	65.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
114.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						517.014.190,00							517.014.190,00	
			Terwujudnya Fasilitas Pendaftaran Penduduk Provinsi Sumatera Selatan	-		-	1 Laporan	517.014.190,00						-	517.014.190,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan						83.875.000,00					-		83.875.000,00	
		-						83.875.000,00					-		83.875.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	83.875.000,00						1 Dokumen	83.875.000,00	
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi						83.875.000,00							83.875.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	83.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	83.875.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						241.711.690,00					-		241.711.690,00	
		-						241.711.690,00					-		241.711.690,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	84.012.500,00						1 Laporan	84.012.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	86.597.500,00						1 Laporan	86.597.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.101.690,00						1 Laporan	71.101.690,00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk						84.012.500,00							84.012.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	84.012.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	84.012.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk						71.101.690,00							71.101.690,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.101.690,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	71.101.690,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk						86.597.500,00							86.597.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	86.597.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	86.597.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						191.427.500,00					-		191.427.500,00	
		-						191.427.500,00					-		191.427.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.427.500,00						1 Laporan	81.427.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk						110.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk						81.427.500,00							81.427.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.427.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	81.427.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
115.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						387.760.643,00							387.760.643,00	
			Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	250.760.643,00						-	250.760.643,00	
			Terwujudnya Fasilitas Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	-		-	1 Laporan	137.000.000,00						-	137.000.000,00	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						137.000.000,00					-		137.000.000,00	
		-						137.000.000,00					-		137.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	137.000.000,00						1 Laporan	137.000.000,00	
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil						137.000.000,00							137.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	137.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	137.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						250.760.643,00					-		250.760.643,00	
		-						250.760.643,00					-		250.760.643,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	163.163.143,00						1 Laporan	163.163.143,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	87.597.500,00						1 Laporan	87.597.500,00	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil						87.597.500,00							87.597.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	87.597.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	87.597.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						163.163.143,00							163.163.143,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	163.163.143,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	163.163.143,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
116.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						599.720.000,00							599.720.000,00	
			Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		-	1 Laporan	395.200.000,00						-	395.200.000,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		-	undefined undefined	289.520.000,00						-	289.520.000,00	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						85.000.000,00					-		85.000.000,00	
		-						85.000.000,00					-		85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	85.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						289.520.000,00					-		289.520.000,00	
		-						289.520.000,00					-		289.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	154.520.000,00						Dokumen	154.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						154.520.000,00							154.520.000,00	
		Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	154.520.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Dokumen	154.520.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						310.200.000,00					-		310.200.000,00	
		-						310.200.000,00					-		310.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	193.875.000,00						17 Laporan	193.875.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	116.325.000,00						35 Orang	116.325.000,00	
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						193.875.000,00							193.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	193.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17 Laporan	193.875.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						116.325.000,00							116.325.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	116.325.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		35 Orang	116.325.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
117.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						20.000.000,00							20.000.000,00	
			Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	-		-	1 Laporan	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						40.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						40.000.000,00					-		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00						50 Dokumen	20.000.000,00	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat peman- gunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat peman- gunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		50 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						55.415.948.392,00							199.016.837.442,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55.415.948.392,00							199.016.837.442,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						55.415.948.392,00							199.016.837.442,00	
118.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.154.395.171,00							18.869.834.688,00	
		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah						17.154.395.171,00							18.869.834.688,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						209.000.000,00					-		229.900.000,00	
		-						209.000.000,00					-		229.900.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00						2 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	84.000.000,00						2 Dokumen	92.400.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00						2 Laporan	77.000.000,00	
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						84.000.000,00							92.400.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	84.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	92.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.000.000,00							77.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	77.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						15.000.000,00							16.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	16.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.616.000.000,00					-		12.777.600.000,00	
		-						11.616.000.000,00					-		12.777.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	360.558.000,00						3 Dokumen	396.613.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	82.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	82.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan		56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	11.105.442.000,00						56 Orang/ Bulan	12.215.986.200,00	
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.105.442.000,00							12.215.986.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan		56 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	11.105.442.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		56 Orang/ Bulan	12.215.986.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						360.558.000,00							396.613.800,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	360.558.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	396.613.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						75.000.000,00							82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	82.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						75.000.000,00							82.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	82.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110.000.000,00					-		121.000.000,00	
		-						110.000.000,00					-		121.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	110.000.000,00						4 Orang	121.000.000,00	
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	121.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.932.058.669,00					-		3.225.264.536,00	
		-						2.932.058.669,00					-		3.225.264.536,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00						1 Dokumen	90.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165.000.000,00						1 Laporan	181.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.345.358.669,00						2 Laporan	2.579.894.536,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	93.500.000,00						4 Paket	102.850.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	99.000.000,00						4 Paket	108.900.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	86.000.000,00						4 Paket	94.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	61.200.000,00						4 Paket	67.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						86.000.000,00							94.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	86.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	94.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						61.200.000,00							67.320.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	61.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	67.320.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.500.000,00							102.850.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	93.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	102.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						99.000.000,00							108.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	99.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	108.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						82.000.000,00							90.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	90.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						165.000.000,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	181.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						2.345.358.669,00							2.579.894.536,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.345.358.669,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.579.894.536,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						48.036.502,00					-		52.840.152,00	
		-						48.036.502,00					-		52.840.152,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	48.036.502,00						30 Unit	52.840.152,00	
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.036.502,00							52.840.152,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	48.036.502,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	52.840.152,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.484.000.000,00					-		1.632.400.000,00	
		-						1.484.000.000,00					-		1.632.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	429.000.000,00						4 Laporan	471.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	990.000.000,00						1 Laporan	1.089.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan		1800 Laporan	1800 Laporan	65.000.000,00						1800 Laporan	71.500.000,00	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						65.000.000,00							71.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan		1800 Laporan	1800 Laporan	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1800 Laporan	71.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						429.000.000,00							471.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	429.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	471.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						990.000.000,00							1.089.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	990.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.089.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						949.300.000,00					-		1.044.230.000,00	
		-						949.300.000,00					-		1.044.230.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	209.000.000,00						1 Unit	229.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	550.000.000,00						28 Unit	605.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	91.300.000,00						13 Unit	100.430.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	99.000.000,00						70 Unit	108.900.000,00	
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.300.000,00							100.430.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	91.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Unit	100.430.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		28 Unit	605.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						99.000.000,00							108.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	15 Unit	99.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Unit	108.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						209.000.000,00							229.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	209.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	229.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
119.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						125.708.313,00							138.197.573.355,00	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						125.708.313,00							138.197.573.355,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						125.708.313,00					-		138.197.573.355,00	
		-						125.708.313,00					-		138.197.573.355,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.708.313,00						1 Dokumen	138.197.573.355,00	
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						125.708.313,00							138.197.573.355,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.708.313,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	138.197.573.355,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
120.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						31.997.793.959,00							35.197.573.355,00	
		meningkatnya efektivitas kerja sama desa						31.997.793.959,00							35.197.573.355,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						31.997.793.959,00					-		35.197.573.355,00	
		-						31.997.793.959,00					-		35.197.573.355,00	
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	31.997.793.959,00						4 Dokumen	35.197.573.355,00	
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						31.997.793.959,00							35.197.573.355,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	31.997.793.959,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	35.197.573.355,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
121.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.148.659.395,00							1.263.525.335,00	
		meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						1.148.659.395,00							1.263.525.335,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						1.155.259.395,00					-		1.270.785.335,00	
		-						1.155.259.395,00					-		1.270.785.335,00	
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	656 Orang		350 Orang	450 Orang	55.000.000,00						500 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	1 Desa		1 Desa	1 Desa	1.100.000,00						1 Desa	1.210.000,00	
			jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.359.395,00						1 Dokumen	836.395.335,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00						2 Dokumen	2.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00						1 Dokumen	363.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00						1 Dokumen	1.210.000,00	
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						1.100.000,00							1.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						1.100.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa						2.200.000,00							2.420.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	2.420.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						760.359.395,00							836.395.335,00	
		Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.359.395,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	836.395.335,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan						1.100.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						55.000.000,00							60.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	656 Orang		350 Orang	1 Orang	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	60.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis						1.100.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						330.000.000,00							363.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	363.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa						1.100.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0020	Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa						1.100.000,00							1.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	1 Desa		1 Desa	1 Desa	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Desa	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota						1.100.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.210.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
122.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						4.788.791.554,00							5.267.670.709,00	
		meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan						4.788.791.554,00							5.267.670.709,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4.788.791.554,00					-		5.267.670.709,00	
		-						4.788.791.554,00					-		5.267.670.709,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.210.000,00						1 Laporan	134.431.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	370.260.000,00						5 Dokumen	407.286.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.210.000,00						1 Laporan	1.331.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.991.120.870,00						1 Laporan	4.390.232.957,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	303.990.684,00						4 Lembaga	334.389.752,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						303.990.684,00							334.389.752,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	4 Lembaga		4 Lembaga	3 Lembaga	303.990.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Lembaga	334.389.752,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						370.260.000,00							407.286.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	370.260.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	407.286.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						122.210.000,00							134.431.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	134.431.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						1.210.000,00							1.331.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.331.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						3.991.120.870,00							4.390.232.957,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.991.120.870,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.390.232.957,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Perhubungan						88.507.443.843,00							95.881.700.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						88.507.443.843,00							95.881.700.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						88.507.443.843,00							95.881.700.000,00	
123.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						43.617.708.000,00							41.092.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						43.617.708.000,00							41.092.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						900.000.000,00					-		1.004.000.000,00	
		-						900.000.000,00					-		1.004.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		Data	14 Data	140.000.000,00						14 Data	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00						1 Dokumen	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	77.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	77.000.000,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						420.000.000,00							470.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	470.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.000.000,00							77.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	77.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00							77.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	77.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						140.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		Data	4 Data	140.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Data	160.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.840.412.000,00					-		28.110.000.000,00	
		-						25.840.412.000,00					-		28.110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00						1 Dokumen	445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/ Bulan		139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	25.240.412.000,00						139 Orang/ Bulan	27.500.000.000,00	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.240.412.000,00							27.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/ Bulan		139 Orang/ Bulan	225 Orang/ Bulan	25.240.412.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		139 Orang/ Bulan	27.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						450.000.000,00							445.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	445.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	165.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.400.796.000,00					-		1.550.500.000,00	
		-						1.400.796.000,00					-		1.550.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	75.000.000,00						10 Orang	82.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	425.796.000,00						200 Orang	478.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	348 Paket	500.000.000,00						Paket	550.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	400.000.000,00						5 Orang	440.000.000,00	
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	2 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						400.000.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	30 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	440.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						425.796.000,00							478.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		200 Orang	700 Orang	425.796.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	478.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						75.000.000,00							82.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	82.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.340.000.000,00					-		2.574.000.000,00	
		-						2.340.000.000,00					-		2.574.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	980.000.000,00						1 Laporan	1.078.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	150.000.000,00						10 Paket	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	240.000.000,00						1 Paket	264.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	300.000.000,00						11 Paket	330.000.000,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						240.000.000,00							264.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	264.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	3 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Paket	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	165.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	165.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						980.000.000,00							1.078.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	980.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.078.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						400.000.000,00							440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	440.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.700.000.000,00					-		1.870.000.000,00	
		-						1.700.000.000,00					-		1.870.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		9 Unit	5 Unit	500.000.000,00						5 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	1.100.000.000,00	
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		9 Unit	2 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		Paket	2 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	220.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						6.260.000.000,00					-		7.546.000.000,00	
		-						6.260.000.000,00					-		7.546.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00						1 Laporan	935.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.400.000.000,00						1 Laporan	6.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	11.000.000,00	
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						850.000.000,00							935.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	935.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.400.000.000,00							6.600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.600.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.886.500.000,00					-		1.870.000.000,00	
		-						1.886.500.000,00					-		1.870.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	440.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		32 Unit	32 Unit	596.500.000,00						32 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	240.000.000,00						12 Unit	330.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit		214 Unit	214 Unit	300.000.000,00						214 Unit	330.000.000,00	
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						240.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						596.500.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit		32 Unit	40 Unit	596.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		32 Unit	550.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						150.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	5 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	440.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit		214 Unit	412 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		214 Unit	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.000.000.000,00					-		6.600.000.000,00	
		-						6.000.000.000,00					-		6.600.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00						1 Unit Kerja	6.600.000.000,00	
	2.15.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						6.000.000.000,00							6.600.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	-	-		1 Unit Kerja	6.600.000.000,00	Dinas Perhubungan
124.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						30.365.081.843,00							31.814.700.000,00	
		Outcome						30.365.081.843,00							31.814.700.000,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						300.000.000,00					-		330.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						Dokumen	330.000.000,00	
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						11.635.381.843,00					-		12.000.000.000,00	
		-						11.635.381.843,00					-		12.000.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	550 Unit		6 Unit	250 Unit	11.635.381.843,00						350 Unit	12.000.000.000,00	
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						11.635.381.843,00							12.000.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	550 Unit		6 Unit	1080 Unit	11.635.381.843,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		350 Unit	12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						13.025.000.000,00					-		13.540.000.000,00	
		-						13.025.000.000,00					-		13.540.000.000,00	
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	10 Orang		Orang	10 Orang	100.000.000,00						10 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit		7 Unit	2 Unit	771.000.000,00						2 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.654.000.000,00						7 Unit	11.000.000.000,00	
			Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit		Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	330.000.000,00	
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B						1.200.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)						10.654.000.000,00							11.000.000.000,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.654.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	11.000.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit		Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	10 Orang		Orang	30 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)						771.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit		7 Unit	2 Unit	771.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						1.382.700.000,00					-		1.520.200.000,00	
		-						1.382.700.000,00					-		1.520.200.000,00	
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	77.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.312.700.000,00						1 Laporan	1.443.200.000,00	
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						1.312.700.000,00							1.443.200.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.312.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.443.200.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						70.000.000,00							77.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	77.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						55.000.000,00					-		60.500.000,00	
		-						55.000.000,00					-		60.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	60.500.000,00	
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						55.000.000,00							60.500.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	60.500.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						300.000.000,00					-		330.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	300.000.000,00						7 Laporan	330.000.000,00	
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						4.092.000.000,00					-		4.501.500.000,00	
		-						4.092.000.000,00					-		4.501.500.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit		6 Unit	10 Unit	3.685.000.000,00						10 Unit	4.053.500.000,00	
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	407.000.000,00						1 Laporan	448.000.000,00	
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi						407.000.000,00							448.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	407.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	448.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3.685.000.000,00							4.053.500.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit		6 Unit	4 Unit	3.685.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	4.053.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						175.000.000,00					-		192.500.000,00	
		-						175.000.000,00					-		192.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00						Dokumen	192.500.000,00	
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi						175.000.000,00							192.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	192.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						175.000.000,00					-		192.500.000,00	
		-						175.000.000,00					-		192.500.000,00	
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	175.000.000,00						25 Unit	192.500.000,00	
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						175.000.000,00							192.500.000,00	
		Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	25 Unit		25 Unit	2 Unit	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	192.500.000,00	Dinas Perhubungan
125.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						9.875.460.000,00							10.820.000.000,00	
		Outcome						9.875.460.000,00							10.820.000.000,00	
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan						300.000.000,00					-		330.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	330.000.000,00	
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						765.000.000,00					-		840.000.000,00	
		-						765.000.000,00					-		840.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	440.000.000,00	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						400.000.000,00							440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	440.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						365.000.000,00							400.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						1.266.550.000,00					-		1.400.000.000,00	
		-						1.266.550.000,00					-		1.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	710.975.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	555.575.000,00						1 Laporan	600.000.000,00	
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						710.975.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	710.975.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						555.575.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	555.575.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	600.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						2.790.160.000,00					-		3.030.000.000,00	
		-						2.790.160.000,00					-		3.030.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit		1 Unit	1 Unit	790.160.000,00						1 Unit	830.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit		Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	2.200.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						790.160.000,00							830.000.000,00	
		Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit		1 Unit	1 Unit	790.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	830.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						2.000.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit		Unit	3 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	2.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3.553.750.000,00					-		3.900.000.000,00	
		-						3.553.750.000,00					-		3.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.273.750.000,00						1 Laporan	3.600.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						280.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						3.273.750.000,00							3.600.000.000,00	
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.273.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.600.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional						1.200.000.000,00					-		1.320.000.000,00	
		-						1.200.000.000,00					-		1.320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00						1 Laporan	1.320.000.000,00	
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional						1.200.000.000,00							1.320.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.320.000.000,00	Dinas Perhubungan
126.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						914.194.000,00							995.000.000,00	
		Outcome						914.194.000,00							995.000.000,00	
	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	100.000.000,00						200 Dokumen	110.000.000,00	
	2.15.05.1.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	200 Dokumen		200 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi						214.194.000,00					-		225.000.000,00	
		-						214.194.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	214.194.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi						214.194.000,00							225.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	214.194.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.05.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						600.000.000,00					-		660.000.000,00	
		-						600.000.000,00					-		660.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00						1 Dokumen	660.000.000,00	
	2.15.05.1.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						600.000.000,00							660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	660.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						51.108.509.733,00							56.070.360.706,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.108.509.733,00							56.070.360.706,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						49.608.509.733,00							54.420.360.706,00	
127.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.168.509.733,00							37.451.360.706,00	
			-	-		-	-	34.168.509.733,00						-	37.451.360.706,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						240.000.000,00					-		264.000.000,00	
		-						240.000.000,00					-		264.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	220.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.318.656.049,00					-		21.250.521.654,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						19.318.656.049,00					-		21.250.521.654,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	218.880.000,00						-	240.768.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	19.069.776.049,00						-	20.976.753.654,00	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.069.776.049,00							20.976.753.654,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	108 Orang/ Bulan	19.069.776.049,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.976.753.654,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						218.880.000,00							240.768.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	218.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	240.768.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	33.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						631.000.000,00					-		694.100.000,00	
		-						631.000.000,00					-		694.100.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	461.000.000,00						-	507.100.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	170.000.000,00						-	187.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						461.000.000,00							507.100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	4 Paket	461.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	507.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						170.000.000,00							187.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	20 Orang	170.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	187.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.785.853.684,00					-		1.964.439.052,00	
		-						1.785.853.684,00					-		1.964.439.052,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	955.853.684,00						-	1.051.439.052,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	33.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	220.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	55.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						955.853.684,00							1.051.439.052,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	955.853.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.051.439.052,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.300.000.000,00					-		1.430.000.000,00	
		-						1.300.000.000,00					-		1.430.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.320.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						1.200.000.000,00							1.320.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.320.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.494.000.000,00					-		2.743.400.000,00	
		-						2.494.000.000,00					-		2.743.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	550.000.000,00						-	605.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.924.000.000,00						-	2.116.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	605.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.924.000.000,00							2.116.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	1.924.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.116.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.069.000.000,00					-		9.841.900.000,00	
		-						9.069.000.000,00					-		9.841.900.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	8.049.000.000,00						-	8.719.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	700.000.000,00						-	770.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	70.000.000,00						-	77.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						700.000.000,00							770.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	18 Unit	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	770.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						70.000.000,00							77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	100 Unit	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	77.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	230 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.049.000.000,00							8.719.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	8.049.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	8.719.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
128.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						6.170.000.000,00							6.937.000.000,00	
			-	-		-	-	6.170.000.000,00						-	6.937.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						6.620.000.000,00					-		7.267.000.000,00	
		-						6.620.000.000,00					-		7.267.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	3.345.000.000,00						-	3.679.500.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	675.000.000,00						-	742.500.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	350.000.000,00						-	385.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	1.400.000.000,00						-	1.540.000.000,00	
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						1.400.000.000,00							1.540.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	1.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.540.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0027	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						3.345.000.000,00							3.679.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	100 Orang	3.345.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.679.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0030	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	1 Rekomendasi	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0031	Penyusunan Konten						675.000.000,00							742.500.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	7 Konten	675.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	742.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0032	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						350.000.000,00							385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	90 %	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	385.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.1.01.0033	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	17 Komunitas	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
129.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						7.750.000.000,00							8.525.000.000,00	
			-	-		-	-	7.750.000.000,00						-	8.525.000.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						150.000.000,00					-		165.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						7.750.000.000,00					-		8.525.000.000,00	
		-						7.750.000.000,00					-		8.525.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	3.750.000.000,00						-	4.125.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	550.000.000,00						-	605.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	400.000.000,00						-	440.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.800.000.000,00						-	3.080.000.000,00	
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						400.000.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	1 Layanan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	440.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet						2.800.000.000,00							3.080.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	49 Titik	2.800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.080.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0040	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						3.750.000.000,00							4.125.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	1 Aplikasi	3.750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						550.000.000,00							605.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	605.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.1.02.0042	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	18 Titik	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						1.050.000.000,00							1.155.000.000,00	
130.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						750.000.000,00							825.000.000,00	
			-	-		-	-	750.000.000,00						-	825.000.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						1.050.000.000,00					-		1.155.000.000,00	
		-						1.050.000.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	350.000.000,00						-	385.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						350.000.000,00							385.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	100 %	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	385.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-		-	100 %	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	100 %	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	100 %	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						450.000.000,00							495.000.000,00	
131.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						350.000.000,00							385.000.000,00	
			-	-		-	-	350.000.000,00						-	385.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						450.000.000,00					-		495.000.000,00	
		-						450.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						41.325.000.000,00							43.760.803.014,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.325.000.000,00							43.760.803.014,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						41.325.000.000,00							43.760.803.014,00	
132.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.625.000.000,00							14.885.803.014,00	
			-	-		-	-	14.625.000.000,00						-	14.885.803.014,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		0 Substansi	1 Substansi	50.000.000,00						1 Substansi	50.000.000,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	0 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		0 Substansi	1 Substansi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Substansi	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.885.803.014,00					-		11.885.803.014,00	
		-						11.885.803.014,00					-		11.885.803.014,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	500.000.000,00						13 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00						12 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan		91 Orang/ Bulan	91 Orang/ Bulan	11.085.803.014,00						91 Orang/ Bulan	11.085.803.014,00	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.085.803.014,00							11.085.803.014,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan		91 Orang/ Bulan	91 Orang/ Bulan	11.085.803.014,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		91 Orang/ Bulan	11.085.803.014,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						170.000.000,00					-		220.000.000,00	
		-						170.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						355.000.000,00					-		430.000.000,00	
		-						355.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	25.000.000,00						5 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		0 Paket	2 Paket	150.000.000,00						2 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		4 Orang	2 Orang	50.000.000,00						5 Orang	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		0 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	20.000.000,00	
	2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		0 Unit	2 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		0 Paket	2 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		4 Orang	2 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	125.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.534.196.986,00					-		1.820.000.000,00	
		-						1.534.196.986,00					-		1.820.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	664.196.986,00						12 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	250.000.000,00						2 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						664.196.986,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	664.196.986,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	800.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.300.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		-						1.300.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	300.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	300.000.000,00						20 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						0 Unit	0,00	
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						830.000.000,00					-		830.000.000,00	
		-						830.000.000,00					-		830.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.150.000.000,00					-		2.150.000.000,00	
		-						2.150.000.000,00					-		2.150.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	900.000.000,00						2 Unit	900.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	350.000.000,00						15 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		0 Unit	50 Unit	100.000.000,00						50 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		20 Unit	50 Unit	200.000.000,00						50 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		0 Unit	50 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		20 Unit	50 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						900.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	900.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
133.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						200.000.000,00							200.000.000,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha		0 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00						100 Unit Usaha	200.000.000,00	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha		0 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha		50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00						100 Unit Usaha	200.000.000,00	
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha		50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
134.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						1.700.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						1.700.000.000,00							200.000.000,00	
		-						1.700.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		30 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.500.000.000,00						100 Unit Usaha	200.000.000,00	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						1.500.000.000,00							200.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		30 Unit Usaha	100+17+17+50 Unit Usaha	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.700.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						1.700.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
135.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Persentase koperasi aktif						200.000.000,00							200.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha		25 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00						100 Unit Usaha	200.000.000,00	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha		25 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
136.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						400.000.000,00							400.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang		50 Orang	100 Orang	400.000.000,00						100 Orang	400.000.000,00	
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang		50 Orang	100 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
137.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						7.100.000.000,00							7.225.000.000,00	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						7.100.000.000,00							7.225.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						7.100.000.000,00					-		7.225.000.000,00	
		-						7.100.000.000,00					-		7.225.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	-	3.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
			Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	-	4.100.000.000,00						-	4.225.000.000,00	
	2.17.06.1.01.0011	Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi						4.100.000.000,00							4.225.000.000,00	
		Implementasi sistem pencatatan transaksi dan operasional koperasi	Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	100+20+100 Koperasi	4.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.225.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.06.1.01.0012	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	100+50 Koperasi	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
138.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						7.500.000.000,00							9.000.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						7.500.000.000,00							9.000.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						8.500.000.000,00					-		10.000.000.000,00	
		-						8.500.000.000,00					-		10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	5.000.000.000,00						-	6.000.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.07.1.01.0013	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	100 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						1.200.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	1000+10 Unit Usaha	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.700.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						5.000.000.000,00							6.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	1000 Orang	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	6.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0016	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	1000 Unit Usaha	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0018	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	100 Kegiatan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	20 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0020	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0021	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	200 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	100 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
139.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						3.700.000.000,00							5.700.000.000,00	
		Meningkatnya daya saing UMKM						3.700.000.000,00							5.700.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						4.300.000.000,00					-		6.300.000.000,00	
		-						4.300.000.000,00					-		6.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan kekuatan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	3.000.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.08.1.01.0009	Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan kekuatan	-		-	1 Lembaga	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0011	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	10 Unit Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	50 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0015	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						3.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	200 Unit Usaha	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	15 Unit Usaha	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0024	Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	50 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	X							0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
140.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0,00							0,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						35.998.007.259,00							62.527.160.667,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						35.998.007.259,00							62.527.160.667,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						35.998.007.259,00							62.527.160.667,00	
141.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						26.797.949.055,00							29.505.046.145,00	
			Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100100 %	605.500.000,00						-	631.375.000,00	
			-	-		-	-	26.252.449.055,00						-	29.033.671.145,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						667.500.000,00					Pelaksanaan operasional kinerja TUPOKSI OPD		705.375.000,00	
		-						667.500.000,00					Pelaksanaan operasional kinerja TUPOKSI OPD		705.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Berita Acara		0 Berita Acara	17 Berita Acara	50.000.000,00						17 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	273.500.000,00						0 Berita Acara	30.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	10.000.000,00						1 Data	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	325.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	24.875.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	145.000.000,00						2 Laporan	73.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							325.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	325.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						12.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							24.875.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	24.875.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00							73.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	145.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	73.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Data	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Berita Acara		0 Berita Acara	17 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		17 Berita Acara	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						273.500.000,00							30.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara		0 Berita Acara	17 Berita Acara	273.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Berita Acara	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.716.401.000,00					-		23.673.401.000,00	
		-						21.716.401.000,00					-		23.673.401.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.400.000,00						1 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00						12 Dokumen	90.400.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00						18 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan		128 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	21.570.001.000,00						128 Orang/ Bulan	23.527.001.000,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.570.001.000,00							23.527.001.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan		128 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	21.570.001.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		128 Orang/ Bulan	23.527.001.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						36.400.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	36.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						90.000.000,00							90.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	90.400.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Laporan	10.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						360.000.000,00					-		300.000.000,00	
		-						360.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	240.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	120.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						240.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						120.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	17 Orang	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.620.000.000,00					-		3.013.270.145,00	
		-						2.620.000.000,00					-		3.013.270.145,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00						12 Dokumen	25.145.145,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	190.000.000,00						9 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		90 Laporan	120 Laporan	1.010.000.000,00						120 Laporan	1.298.125.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	350.000.000,00						5 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	150.000.000,00						4 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	850.000.000,00						2 Paket	800.000.000,00	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						850.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	800.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						350.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	4 Paket	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						20.000.000,00							25.145.145,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	25.145.145,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.010.000.000,00							1.298.125.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		90 Laporan	120 Laporan	1.010.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Laporan	1.298.125.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						190.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Paket		15 Paket	17 Paket	500.000.000,00						19 Paket	500.000.000,00	
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Paket		15 Paket	17 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Paket	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.316.048.055,00					-		1.347.000.000,00	
		-						1.316.048.055,00					-		1.347.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	650.000.000,00						48 Laporan	672.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	650.000.000,00						36 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	16.048.055,00						1000 Laporan	25.000.000,00	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.048.055,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	16.048.055,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Laporan	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						650.000.000,00							672.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Laporan	672.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						650.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	650.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						900.000.000,00					-		710.000.000,00	
		-						900.000.000,00					-		710.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit		6 Unit	18 Unit	500.000.000,00						20 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit		56 Unit	56 Unit	75.000.000,00						56 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	0 Unit	325.000.000,00						0 Unit	0,00	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit		6 Unit	18 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	550.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit		56 Unit	56 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		56 Unit	160.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						325.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	3 Unit	325.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
142.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						2.705.000.000,00							2.315.250.000,00	
			Realisasi total terhadap investasi	-		-	120 %	550.000.000,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	2.155.000.000,00						-	1.765.250.000,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						550.000.000,00					investor / Pelaku Usaha-UMKM		550.000.000,00	
		-						550.000.000,00					investor / Pelaku Usaha-UMKM		550.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	16 Dokumen		12 Dokumen	16 Dokumen	420.000.000,00						16 Dokumen	420.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	130.000.000,00	
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						100.000.000,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						420.000.000,00							420.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	16 Dokumen		12 Dokumen	16 Dokumen	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Dokumen	420.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						30.000.000,00							130.000.000,00	
		Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						2.155.000.000,00					promosi potensi pada calon investor		1.765.250.000,00	
		-						2.155.000.000,00					promosi potensi pada calon investor		1.765.250.000,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17 Daerah		17 Daerah	17 Daerah	390.000.000,00						17 Daerah	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	1.465.000.000,00						-	1.265.250.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	300.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						390.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17 Daerah		17 Daerah	17 Daerah	390.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		17 Daerah	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						300.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	10 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi						1.465.000.000,00							1.265.250.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	5 Dokumen	1.465.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		-	1.265.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
143.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.430.000.000,00							1.501.500.000,00	
			Persentase peningkatan investor yg ber investasi	-		-	6 %	1.430.000.000,00						-	1.501.500.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1.430.000.000,00					Calon Investor		1.501.500.000,00	
		-						1.430.000.000,00					Calon Investor		1.501.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	1.078.035.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	351.965.000,00						2 Dokumen	501.500.000,00	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						1.078.035.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	1.078.035.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						351.965.000,00							501.500.000,00	
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	351.965.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	501.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
144.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.627.077.959,00							1.648.431.856,00	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	-		-	82 %	1.627.077.959,00						-	1.648.431.856,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1.627.077.959,00					Pelaku usaha / Investor		1.648.431.856,00	
		-						1.627.077.959,00					Pelaku usaha / Investor		1.648.431.856,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha		1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	200.000.000,00						1 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00						0 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1464 Pelaku Usaha		1089 Pelaku Usaha	1100 Pelaku Usaha	550.000.000,00						1210 Pelaku Usaha	700.000.000,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2050 Pelaku Usaha		1650 Pelaku Usaha	1720 Pelaku Usaha	727.077.959,00						1800 Pelaku Usaha	648.431.856,00	
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						550.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1464 Pelaku Usaha		1089 Pelaku Usaha	1100 Pelaku Usaha	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1210 Pelaku Usaha	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						727.077.959,00							648.431.856,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2050 Pelaku Usaha		1650 Pelaku Usaha	1720 Pelaku Usaha	727.077.959,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1800 Pelaku Usaha	648.431.856,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha		1 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
145.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						1.765.897.000,00							1.854.191.850,00	
			-	-		-	-	1.765.897.000,00						-	1.854.191.850,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						1.765.897.000,00					-		1.854.191.850,00	
		-						1.765.897.000,00					-		1.854.191.850,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan usaha		200 Kegiatan usaha	200 Kegiatan usaha	874.720.000,00						200 Kegiatan usaha	875.720.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		360 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	639.740.000,00						500 Pelaku Usaha	620.880.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan usaha		60 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	251.437.000,00						40 Kegiatan usaha	357.591.850,00	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal						874.720.000,00							875.720.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan usaha		200 Kegiatan usaha	60 Kegiatan usaha	874.720.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Kegiatan usaha	875.720.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						251.437.000,00							357.591.850,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan usaha		60 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	251.437.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Kegiatan usaha	357.591.850,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						639.740.000,00							620.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		360 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	639.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Pelaku Usaha	620.880.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
146.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						390.083.245,00							24.958.740.816,00	
			-	-		-	-	390.083.245,00						-	24.958.740.816,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						390.083.245,00					-		24.958.740.816,00	
		-						390.083.245,00					-		24.958.740.816,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		3 Dokumen	64 Dokumen	390.083.245,00						8 Dokumen	24.958.740.816,00	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						390.083.245,00							24.958.740.816,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		3 Dokumen	6 Dokumen	390.083.245,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	24.958.740.816,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Pemuda dan Olahraga						94.649.740.915,00							106.122.364.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						94.649.740.915,00							106.122.364.446,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						94.649.740.915,00							106.122.364.446,00	
147.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.008.611.505,00							29.956.991.291,00	
		Meningkatnya pelayanan tata kelola organisasi perangkat daerah						29.008.611.505,00							29.956.991.291,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.010.000.000,00					-		1.160.000.000,00	
		-						1.010.000.000,00					-		1.160.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	450.000.000,00						7 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Laporan		35 Laporan	30 Laporan	500.000.000,00						40 Laporan	600.000.000,00	
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						450.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Laporan		35 Laporan	30 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Laporan	600.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	50.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.825.000.000,00					-		18.825.000.000,00	
		-						18.825.000.000,00					-		18.825.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 Orang/ Bulan		172 Orang/ Bulan	172 Orang/ Bulan	18.250.000.000,00						172 Orang/ Bulan	18.250.000.000,00	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.250.000.000,00							18.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 Orang/ Bulan		172 Orang/ Bulan	172 Orang/ Bulan	18.250.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		172 Orang/ Bulan	18.250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Dokumen Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						325.000.000,00					-		332.500.000,00	
		-						325.000.000,00					-		332.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00						1 Dokumen	322.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						315.000.000,00							322.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	322.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						580.100.000,00					-		594.150.000,00	
		-						580.100.000,00					-		594.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		35 Orang	75 Orang	252.000.000,00						77 Orang	258.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang		20 Orang	22 Orang	52.500.000,00						24 Orang	53.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket		250 Paket	200 Paket	233.600.000,00						200 Paket	239.400.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		4 Orang	3 Orang	42.000.000,00						3 Orang	43.000.000,00	
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						233.600.000,00							239.400.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket		250 Paket	200 Paket	233.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Paket	239.400.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						42.000.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		4 Orang	3 Orang	42.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	43.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						52.500.000,00							53.750.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang		20 Orang	22 Orang	52.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Orang	53.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						252.000.000,00							258.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		35 Orang	75 Orang	252.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		77 Orang	258.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.548.812.430,00					-		2.153.506.524,00	
		-						1.548.812.430,00					-		2.153.506.524,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00						1 Dokumen	21.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00						1 Dokumen	86.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	19.687.500,00						1 Dokumen	20.156.250,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.035.624.930,00						1 Laporan	1.628.100.274,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	126.000.000,00						250 Paket	129.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	52.500.000,00						20 Paket	53.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	52.500.000,00						10 Paket	53.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	31.500.000,00						1 Paket	32.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	63.000.000,00						1 Paket	64.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	63.000.000,00						30 Paket	64.500.000,00	
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						31.500.000,00							32.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	31.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	32.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.000.000,00							64.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	63.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	64.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						63.000.000,00							64.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	63.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	64.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						126.000.000,00							129.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket		250 Paket	250 Paket	126.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Paket	129.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						52.500.000,00							53.750.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	52.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	53.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						21.000.000,00							21.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						52.500.000,00							53.750.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	52.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Paket	53.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.035.624.930,00							1.628.100.274,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.035.624.930,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.628.100.274,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						19.687.500,00							20.156.250,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	19.687.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.156.250,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						84.000.000,00							86.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	86.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						262.500.000,00					-		268.750.000,00	
		-						262.500.000,00					-		268.750.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		5 Unit	5 Unit	262.500.000,00						5 Unit	268.750.000,00	
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						262.500.000,00							268.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		5 Unit	5 Unit	262.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	268.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.663.507.344,00					-		4.774.543.233,00	
		-						4.663.507.344,00					-		4.774.543.233,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.365.000.000,00						6 Laporan	1.397.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	3.288.007.344,00						6 Laporan	3.366.293.233,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00						1 Laporan	10.750.000,00	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.500.000,00							10.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.750.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.365.000.000,00							1.397.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.365.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.397.500.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.288.007.344,00							3.366.293.233,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	3.288.007.344,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	3.366.293.233,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		-						2.503.191.731,00					-		2.562.791.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.055.496.091,00						2 Unit	2.104.436.474,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	31.500.000,00						1 Unit	32.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.975.000,00						1 Unit	31.712.500,00	
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						31.500.000,00							32.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	31.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	32.250.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.975.000,00							31.712.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.975.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	31.712.500,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.055.496.091,00							2.104.436.474,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	2.055.496.091,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	2.104.436.474,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.503.191.731,00					-		2.562.791.534,00	
		-						2.503.191.731,00					-		2.562.791.534,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	385.220.640,00						-	394.392.560,00	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						385.220.640,00							394.392.560,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	36 Unit	385.220.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	394.392.560,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
148.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						9.403.331.186,00							10.027.902.220,00	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan						9.403.331.186,00							10.027.902.220,00	
		-						8.603.331.186,00					-		8.952.902.220,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	47 Orang		30 Orang	40 Orang	250.000.000,00						45 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2200 Orang		1409 Orang	1700 Orang	2.500.000.000,00						1850 Orang	2.750.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	47 Orang		30 Orang	40 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Orang	250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						2.500.000.000,00							2.750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2200 Orang		1409 Orang	1700 Orang	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1850 Orang	2.750.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						1.050.000.000,00					-		1.075.000.000,00	
		-						1.050.000.000,00					-		1.075.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	190 Organisasi		175 Organisasi	180 Organisasi	850.000.000,00						185 Organisasi	875.000.000,00	
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	200.000.000,00	
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Persentase	200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi						850.000.000,00							875.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	190 Organisasi		175 Organisasi	180 Organisasi	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		185 Organisasi	875.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						8.603.331.186,00					-		8.952.902.220,00	
		-						8.603.331.186,00					-		8.952.902.220,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	-	4.573.331.186,00						-	4.642.902.220,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	250.000.000,00						-	260.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	-	330.000.000,00						-	330.000.000,00	
	2.19.02.1.01.0016	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi						330.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	50 Persentase	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	330.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	55 Orang	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	600.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						4.573.331.186,00							4.642.902.220,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	2435 Orang	4.573.331.186,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.642.902.220,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	120.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0021	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi						250.000.000,00							260.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	12 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	260.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
149.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						49.921.059.999,00							57.858.109.778,00	
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga						49.921.059.999,00							57.858.109.778,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						11.050.000.000,00					Atlet Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		11.150.000.000,00	
		-						11.050.000.000,00					Atlet Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		11.150.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-		-	-	1.150.000.000,00						-	1.150.000.000,00	
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	-	1.800.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	-	8.100.000.000,00						-	8.200.000.000,00	
	2.19.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus						1.150.000.000,00							1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-		-	1 Kegiatan	1.150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	1.150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						1.800.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	48 Unit	1.800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	1.800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.01.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha						8.100.000.000,00							8.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		-	3 Unit	8.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	8.200.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						14.871.059.999,00					-		8.000.000.000,00	
		-						14.871.059.999,00					-		8.000.000.000,00	
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	-	7.871.059.999,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	-	7.000.000.000,00						-	7.000.000.000,00	
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						7.871.059.999,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	50 Orang	7.871.059.999,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	9 Kegiatan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	7.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						1.900.000.000,00					-		7.558.109.778,00	
		-						1.900.000.000,00					-		7.558.109.778,00	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	-	350.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	-	900.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	400.000.000,00						-	5.258.109.778,00	
	2.19.03.1.03.0011	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi						350.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0012	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi						900.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	70 Orang	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0013	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						400.000.000,00							5.258.109.778,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	50 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.258.109.778,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0014	Seleksi Atlet Daerah						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	500 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						22.100.000.000,00					-		33.150.000.000,00	
		-						22.100.000.000,00					-		33.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	-	22.100.000.000,00						-	33.150.000.000,00	
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						22.100.000.000,00							33.150.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	8 Dokumen	22.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	33.150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
150.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						5.357.238.225,00							5.565.111.157,00	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan						5.357.238.225,00							5.565.111.157,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						5.357.238.225,00					-		5.565.111.157,00	
		-						5.357.238.225,00					-		5.565.111.157,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	5.357.238.225,00						-	5.565.111.157,00	
	2.19.04.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						5.357.238.225,00							5.565.111.157,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	5.357.238.225,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.565.111.157,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						69.407.164.845,00							73.544.888.388,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55.214.664.845,00							58.644.888.388,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						55.214.664.845,00							58.644.888.388,00	
151.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						37.879.930.402,00							40.094.888.388,00	
			Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah provinsi	-		-	100 persen	101.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi	-		-	100 persen	2.153.767.015,00						-	1.900.000.000,00	
			-	-		-	-	36.725.163.387,00						-	38.044.888.388,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						101.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		-						101.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	45.000.000,00						3 Data	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.000.000,00						3 Dokumen	25.000.000,00	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						45.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	2 Data	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Data	65.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						40.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.300.111.906,00					Perangkat Daerah		30.480.000.000,00	
		-						29.300.111.906,00					Perangkat Daerah		30.480.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	429.668.000,00						3 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	28.845.443.906,00						12 Orang/ Bulan	30.000.000.000,00	
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28.845.443.906,00							30.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan		12 Orang/ Bulan	350 Orang/ Bulan	28.845.443.906,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Orang/ Bulan	30.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						429.668.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	429.668.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						365.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		-						365.000.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	270.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	95.000.000,00						12 Orang	150.000.000,00	
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						270.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	350 Paket	270.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						95.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		12 Orang	4 Orang	95.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Orang	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.695.855.882,00					Perangkat Daerah		1.805.855.882,00	
		-						1.695.855.882,00					Perangkat Daerah		1.805.855.882,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00						10 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.070.855.882,00						4 Laporan	1.070.855.882,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000.000,00						12 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000.000,00						12 Paket	250.000.000,00	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						200.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						150.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	160.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	50 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.070.855.882,00							1.070.855.882,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.070.855.882,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	1.070.855.882,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						2.153.767.015,00					Perangkat Daerah		1.900.000.000,00	
		-						2.153.767.015,00					Perangkat Daerah		1.900.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.053.767.015,00						3 Unit	1.100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00						1 Unit	800.000.000,00	
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.100.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	800.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						1.053.767.015,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	250 Unit	1.053.767.015,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.420.032.506,00					Perangkat Daerah		3.609.032.506,00	
		-						3.420.032.506,00					Perangkat Daerah		3.609.032.506,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.291.032.506,00						24 Laporan	1.291.032.506,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.111.000.000,00						12 Laporan	2.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00						2 Laporan	18.000.000,00	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	18.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.291.032.506,00							1.291.032.506,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.291.032.506,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		24 Laporan	1.291.032.506,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.111.000.000,00							2.300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.111.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.144.163.093,00					Perangkat Daerah		2.250.000.000,00	
		-						2.144.163.093,00					Perangkat Daerah		2.250.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00						2 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	644.163.093,00						18 Unit	650.000.000,00	
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						644.163.093,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	644.163.093,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		18 Unit	650.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	100 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.100.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
152.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						5.207.176.238,00							5.550.000.000,00	
			Persentase OPK yang dilestarikan, Jumlah WBTB yang ditetapkan	-		-	100 persen	2.984.676.238,00						-	3.150.000.000,00	
			-	-		-	-	2.222.500.000,00						-	2.400.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.984.676.238,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		3.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.984.676.238,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		3.150.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek		10 Objek	10 Objek	2.279.489.596,00						10 Objek	2.300.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	-		-	-	405.186.642,00						-	500.000.000,00	
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	150 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya						405.186.642,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	-		-	4 Unit	405.186.642,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan						2.279.489.596,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek		10 Objek	10 Objek	2.279.489.596,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Objek	2.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						2.000.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		2.100.000.000,00	
		-						2.000.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	2.000.000.000,00						10 Objek	2.100.000.000,00	
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						2.000.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Objek	2.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						222.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		300.000.000,00	
		-						222.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		300.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	222.500.000,00						2 Objek	300.000.000,00	
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						222.500.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek		2 Objek	10 Objek	222.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Objek	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
153.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						710.000.000,00							1.750.000.000,00	
			Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan keberlanjutan kesenian tradisional daerah	-		-	100 persen	710.000.000,00						-	1.750.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.420.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.750.000.000,00	
		-						1.420.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.750.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga		12 Lembaga	12 Lembaga	710.000.000,00						12 Lembaga	850.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	75 Orang		75 Orang	75 Orang	710.000.000,00						75 Orang	900.000.000,00	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						710.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	75 Orang		75 Orang	150 Orang	710.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		75 Orang	900.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						710.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga		12 Lembaga	15 Lembaga	710.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Lembaga	850.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
154.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						410.250.000,00							500.000.000,00	
			Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah daerah Satuan Program	-		-	100 Persen	410.250.000,00						-	500.000.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						410.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		500.000.000,00	
		-						410.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		500.000.000,00	
			Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	410.250.000,00						2 Dokumen	500.000.000,00	
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal						410.250.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	410.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
155.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						886.875.000,00							950.000.000,00	
			Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah	-		-	100 persen	611.875.000,00						-	650.000.000,00	
			-	-		-	-	275.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						1.223.750.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.300.000.000,00	
		-						1.223.750.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.300.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	611.875.000,00						5 Objek	650.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	50 Objek		50 Objek	50 Objek	611.875.000,00						50 Objek	650.000.000,00	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						611.875.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	50 Objek		50 Objek	50 Objek	611.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Objek	650.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						611.875.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	611.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		5 Objek	650.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						275.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		300.000.000,00	
		-						275.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		300.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	275.000.000,00						20 Orang	300.000.000,00	
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya						275.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		20 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
156.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						7.498.558.205,00							8.900.000.000,00	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan permuseuman daerah	-		-	100 persen	7.498.558.205,00						-	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						7.498.558.205,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		8.900.000.000,00	
		-						7.498.558.205,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		8.900.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	-		-	-	1.677.722.100,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	500 Unit		500 Unit	500 Unit	1.300.000.000,00						500 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Layanan Operasional Museum	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
			Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-		-	-	600.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	250.000.000,00						9 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-		-	-	520.836.105,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-		-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu						1.300.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	500 Unit		500 Unit	500 Unit	1.300.000.000,00	-	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		500 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						150.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-		-	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum						600.000.000,00							800.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-		-	1 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	800.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						520.836.105,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-		-	5 Unit	520.836.105,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit		9 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		9 Unit	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0010	Pengelolaan Operasional Museum						1.000.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	-		-	3 Layanan	1.000.000.000,00	-	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06.1.01.0012	Pengelolaan Operasional Taman Budaya						2.000.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	-		-	3 Layanan	2.000.000.000,00	-	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.06.1.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum						1.677.722.100,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	-		-	500 Unit	1.677.722.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	1.700.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						14.192.500.000,00							14.900.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14.192.500.000,00							14.900.000.000,00	
157.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						3.551.500.000,00							3.050.000.000,00	
			Meningkatnya daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata daerah	-		-	100 persen	650.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Meningkatnya daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata provinsi	-		-	100 persen	2.276.500.000,00						-	1.800.000.000,00	
			-	-		-	-	625.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						650.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		850.000.000,00	
		-						650.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		850.000.000,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00						2 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	400.000.000,00						4 Lokasi	500.000.000,00	
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						400.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Lokasi	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						250.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						2.276.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.800.000.000,00	
		-						2.276.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Daerah Provinsi	-		-	-	666.250.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	1.610.250.000,00						2 Orang	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi						666.250.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	666.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi						1.610.250.000,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	2 Orang		2 Orang	50 Orang	1.610.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Orang	1.700.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						625.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		750.000.000,00	
		-						625.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00						2 Laporan	400.000.000,00	
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi						350.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi						275.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
158.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						6.512.250.000,00							7.150.000.000,00	
			Meningkatnya kunjungan wisatawan dan citra positif pariwisata provinsi	-		-	100 Persen	6.512.250.000,00						-	7.150.000.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						6.512.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		7.150.000.000,00	
		-						6.512.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		7.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000.000,00						9 Dokumen	2.500.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	13 Kegiatan		13 Kegiatan	13 Kegiatan	4.012.250.000,00						13 Kegiatan	4.100.000.000,00	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						2.000.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						500.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						4.012.250.000,00							4.100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	13 Kegiatan		13 Kegiatan	15 Kegiatan	4.012.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 Kegiatan	4.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
159.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						1.682.500.000,00							1.800.000.000,00	
			Meningkatnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif	-		-	100 persen	750.000.000,00						-	800.000.000,00	
			-	-		-	-	932.500.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						750.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						750.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00						1 Laporan	800.000.000,00	
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula						750.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	800.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						932.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.000.000.000,00	
		-						932.500.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		1.000.000.000,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi		1 Promosi	1 Promosi	932.500.000,00						1 Promosi	1.000.000.000,00	
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						932.500.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi		1 Promosi	5 Promosi	932.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Promosi	1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
160.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						2.446.250.000,00							2.550.000.000,00	
			Persentase peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	-		-	100 persen	1.996.250.000,00						-	2.050.000.000,00	
			Persentase peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-		-	100 persen	450.000.000,00						-	500.000.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						1.996.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		2.050.000.000,00	
		-						1.996.250.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		2.050.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang		50 Orang	50 Orang	721.250.000,00						50 Orang	750.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	250 Orang		250 Orang	250 Orang	1.275.000.000,00						250 Orang	1.300.000.000,00	
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						721.250.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang		50 Orang	200 Orang	721.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		50 Orang	750.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						1.275.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	250 Orang		250 Orang	200 Orang	1.275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		250 Orang	1.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						450.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		500.000.000,00	
		-						450.000.000,00					Perangkat Daerah dan Komunitas terkait		500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	450.000.000,00						-	500.000.000,00	
	3.26.05.1.02.0008	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						450.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	150 Orang	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Dinas Perpustakaan						26.166.200.362,00							27.050.025.552,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.166.200.362,00							27.050.025.552,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						26.166.200.362,00							27.050.025.552,00	
161.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.331.633.362,00							21.814.869.163,00	
			-	-		-	-	20.331.633.362,00						-	21.814.869.163,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00					-		208.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		208.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	10.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	7.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektor al Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	0,00						1 Data	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		Substansi	1 Substansi	0,00						1 Substansi	7.000.000,00	
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						15.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	0 Data	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							2.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						30.000.000,00							7.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		Substansi	0 Substansi	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Substansi	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.906.200.000,00					-		17.154.000.000,00	
		-						14.906.200.000,00					-		17.154.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.200.000,00						1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	21.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan		126 Orang/ Bulan	126 Orang/ Bulan	14.800.000.000,00						126 Orang/ Bulan	17.000.000.000,00	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.800.000.000,00							17.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan		126 Orang/ Bulan	143 Orang/ Bulan	14.800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		126 Orang/ Bulan	17.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						85.200.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.200.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						21.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	8.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						60.000.000,00					-		38.000.000,00	
		-						60.000.000,00					-		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						7.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						18.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	19.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						367.000.000,00					-		241.000.000,00	
		-						367.000.000,00					-		241.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00						1 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	20 Orang	5.000.000,00						20 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	20 Orang	70.000.000,00						20 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	185.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	65.000.000,00						5 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang		Orang	2 Orang	10.000.000,00						2 Orang	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		0 Unit	2 Unit	5.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						185.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	185.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						10.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						10.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang		Orang	5 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	65.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						70.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	30 Orang	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		Orang	5 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						749.000.000,00					-		754.000.000,00	
		-						749.000.000,00					-		754.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	37.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	37.000.000,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						55.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							37.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	37.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	220.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.000.000,00							37.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	37.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						24.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	26.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						3.130.000.000,00					-		3.009.869.163,00	
		-						3.130.000.000,00					-		3.009.869.163,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000.000,00						1 Paket	280.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	70.000.000,00						1 Unit	709.869.163,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		2 Unit	2 Unit	1.210.000.000,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	5 Unit	300.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		12 Unit	1 Unit	350.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		Unit	10 Unit	300.000.000,00						10 Unit	200.000.000,00	
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.210.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		2 Unit	3 Unit	1.210.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							709.869.163,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	709.869.163,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	280.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		12 Unit	15 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		Unit	25 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						904.433.362,00					-		1.092.000.000,00	
		-						904.433.362,00					-		1.092.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00						1 Laporan	480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.433.362,00						1 Laporan	12.000.000,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.433.362,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.433.362,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	12.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						450.000.000,00							480.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	480.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						450.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.370.000.000,00					-		1.292.000.000,00	
		-						1.370.000.000,00					-		1.292.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	325.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	650.000.000,00						1 Unit	480.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	250.000.000,00						14 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00						2 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		Unit	5 Unit	30.000.000,00						5 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit		69 Unit	69 Unit	45.000.000,00						69 Unit	42.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	85.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	210.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		Unit	5 Unit	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit		69 Unit	24 Unit	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		69 Unit	42.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						325.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	325.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						650.000.000,00							480.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	480.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan
162.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						3.515.000.000,00							2.862.011.627,00	
			-	-		-	-	3.515.000.000,00						-	2.862.011.627,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						1.950.000.000,00					-		1.264.316.151,00	
		-						1.950.000.000,00					-		1.264.316.151,00	
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	74.92 Indeks		Indeks	73.30 Indeks	50.000.000,00						73.91 Indeks	60.000.000,00	
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	72 Nilai		Nilai	70.81 Nilai	50.000.000,00						71 Nilai	60.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2200 Eksemplar		1500 Eksemplar	1700 Eksemplar	350.000.000,00						1800 Eksemplar	280.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00						2 Dokumen	87.000.000,00	
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	65 Dokumen		36 Dokumen	42 Dokumen	150.000.000,00						50 Dokumen	27.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100 Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00						100 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	240 Eksemplar		Eksemplar	210 Eksemplar	0,00						220 Eksemplar	15.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan		1 Layanan	1 Layanan	0,00						1 Layanan	25.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00						1 Perpustakaan	7.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	700.000.000,00						1 Perpustakaan	260.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan		50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	125.000.000,00						50 Perpustakaan	123.316.151,00	
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	170 Perpustakaan		Perpustakaan	100 Perpustakaan	60.000.000,00						120 Perpustakaan	25.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	100 Perpustakaan		Perpustakaan	100 Perpustakaan	70.000.000,00						100 Perpustakaan	35.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	180 Orang		60 Orang	90 Orang	210.000.000,00						120 Orang	230.000.000,00	
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi						70.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	100 Perpustakaan		Perpustakaan	30 Perpustakaan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Perpustakaan	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	240 Eksemplar		Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Eksemplar	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						125.000.000,00							123.316.151,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan		50 Perpustakaan	70 Perpustakaan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Perpustakaan	123.316.151,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						210.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	180 Orang		60 Orang	90 Orang	210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Orang	230.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan		1 Layanan	0 Layanan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Layanan	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit						0,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Perpustakaan	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						350.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2200 Eksemplar		1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1800 Eksemplar	280.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						100.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	72 Nilai		Nilai	72,00 Nilai	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		71 Nilai	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	74.92 Indeks		Indeks	74,00 Indeks	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		73.91 Indeks	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi						150.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	65 Dokumen		36 Dokumen	60 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Dokumen	27.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						700.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Perpustakaan	260.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						85.000.000,00							87.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	87.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi						60.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	170 Perpustakaan		Perpustakaan	26 Perpustakaan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Perpustakaan	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						1.765.000.000,00					-		1.732.695.476,00	
		-						1.765.000.000,00					-		1.732.695.476,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	40 Orang		Orang	20 Orang	100.000.000,00						25 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan		Perpustakaan	10 Perpustakaan	80.000.000,00						10 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	765.000.000,00						1 Lokus	765.000.000,00	
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	17 Orang		Orang	17 Orang	50.000.000,00						17 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	30 Perpustakaan		17 Perpustakaan	20 Perpustakaan	770.000.000,00						22 Perpustakaan	767.695.476,00	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						765.000.000,00							765.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	765.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lokus	765.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						770.000.000,00							767.695.476,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	30 Perpustakaan		17 Perpustakaan	20 Perpustakaan	770.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22 Perpustakaan	767.695.476,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	17 Orang		Orang	10 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Orang	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						80.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan		Perpustakaan	10 Perpustakaan	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	40 Orang		Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan
163.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						549.567.000,00							237.144.762,00	
			-	-		-	-	549.567.000,00						-	237.144.762,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						105.000.000,00					-		53.000.000,00	
		-						105.000.000,00					-		53.000.000,00	
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	230 Eksemplar		100 Eksemplar	210 Eksemplar	65.000.000,00						220 Eksemplar	41.000.000,00	
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	18 Penerbit		0 Penerbit	12 Penerbit	40.000.000,00						14 Penerbit	12.000.000,00	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						65.000.000,00							41.000.000,00	
		Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	230 Eksemplar		100 Eksemplar	210 Eksemplar	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Eksemplar	41.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						40.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	18 Penerbit		0 Penerbit	12 Penerbit	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Penerbit	12.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						55.000.000,00					-		54.000.000,00	
		-						55.000.000,00					-		54.000.000,00	
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	70 Naskah		70 Naskah	70 Naskah	25.000.000,00						70 Naskah	27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	100 Entry		50 Entry	60 Entry	30.000.000,00						70 Entry	27.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah						30.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	100 Entry		50 Entry	100 Entry	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Entry	27.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah						25.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	70 Naskah		70 Naskah	100 Naskah	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Naskah	27.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						384.567.000,00					-		145.000.000,00	
		-						384.567.000,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		45 Orang	50 Orang	153.237.500,00						50 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	30 Eksemplar		30 Eksemplar	30 Eksemplar	231.329.500,00						30 Eksemplar	80.000.000,00	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						231.329.500,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	30 Eksemplar		30 Eksemplar	30 Eksemplar	231.329.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Eksemplar	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						153.237.500,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		45 Orang	70 Orang	153.237.500,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	65.000.000,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						70.000.000,00					-		12.144.762,00	
		-						70.000.000,00					-		12.144.762,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	240 Eksemplar		Eksemplar	210 Eksemplar	5.000.000,00						220 Eksemplar	6.144.762,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	240 Eksemplar		Eksemplar	210 Eksemplar	65.000.000,00						220 Eksemplar	6.000.000,00	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						65.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	240 Eksemplar		Eksemplar	500 Eksemplar	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Eksemplar	6.000.000,00	Dinas Perpustakaan
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						5.000.000,00							6.144.762,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	240 Eksemplar		Eksemplar	500 Eksemplar	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		220 Eksemplar	6.144.762,00	Dinas Perpustakaan
		Dinas Kearsipan						14.229.803.399,00							14.715.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.229.803.399,00							14.715.000.000,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						14.229.803.399,00							14.715.000.000,00	
164.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.980.898.484,00							13.497.000.000,00	
			-	-		-	-	12.980.898.484,00						-	13.497.000.000,00	
	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		65.000.000,00	
		-						60.000.000,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.500.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.250.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	45.000.000,00						400 Laporan	45.000.000,00	
	2.24.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						4.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Laporan	45.000.000,00	Dinas Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.472.898.218,00					-		11.500.000.000,00	
		-						11.472.898.218,00					-		11.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	45.000.000,00						10 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan		105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	11.422.898.218,00						105 Orang/ Bulan	11.450.000.000,00	
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.422.898.218,00							11.450.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan		105 Orang/ Bulan	105 Orang/ Bulan	11.422.898.218,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		105 Orang/ Bulan	11.450.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		20 Orang	30 Orang	50.000.000,00						30 Orang	50.000.000,00	
	2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		20 Orang	30 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						450.868.995,00					-		600.000.000,00	
		-						450.868.995,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen		1000 Dokumen	1500 Dokumen	15.868.995,00						1500 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		65 Laporan	75 Laporan	200.000.000,00						75 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2038 Paket		2038 Paket	2038 Paket	85.000.000,00						1038 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		38 Paket	40 Paket	50.000.000,00						40 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		20 Paket	35 Paket	30.000.000,00						35 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		30 Paket	35 Paket	70.000.000,00						35 Paket	85.000.000,00	
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		20 Paket	35 Paket	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Paket	30.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		30 Paket	35 Paket	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Paket	85.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2038 Paket		2038 Paket	2040 Paket	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1038 Paket	100.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		38 Paket	40 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Paket	65.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.868.995,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen		1000 Dokumen	1500 Dokumen	15.868.995,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1500 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		65 Laporan	75 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		10 Unit	15 Unit	150.000.000,00						15 Unit	200.000.000,00	
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		10 Unit	15 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	200.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						678.131.271,00					-		683.000.000,00	
		-						678.131.271,00					-		683.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	475.131.271,00						12 Laporan	480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	3.000.000,00						100 Laporan	3.000.000,00	
	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	3.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						475.131.271,00							480.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	475.131.271,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	480.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						614.000.000,00					-		664.000.000,00	
		-						614.000.000,00					-		664.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	199.000.000,00						2 Unit	199.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	215.000.000,00						13 Unit	215.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		60 Unit	70 Unit	200.000.000,00						70 Unit	250.000.000,00	
	2.24.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						215.000.000,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	215.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Unit	215.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		60 Unit	70 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Unit	250.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						199.000.000,00							199.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	199.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	199.000.000,00	Dinas Kearsipan
165.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						591.068.850,00							803.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis						591.068.850,00							803.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						354.368.850,00					-		385.000.000,00	
		-						354.368.850,00					-		385.000.000,00	
			Jumlah arsiparis	80 Dokumen		70 Dokumen	80 Dokumen	27.000.000,00						80 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	27.000.000,00						30 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	650 Arsip		500 Arsip	650 Arsip	18.000.000,00						650 Arsip	20.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	600 Arsip		1000 Arsip	600 Arsip	18.000.000,00						600 Arsip	20.000.000,00	
			Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	45.000.000,00						6 Lembaga	45.000.000,00	
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	43 Lembaga		0 Lembaga	0 Lembaga	165.368.850,00						0 Lembaga	175.000.000,00	
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	75 Instansi		66 Instansi	75 Instansi	54.000.000,00						75 Instansi	60.000.000,00	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis						18.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	650 Arsip		500 Arsip	500 Arsip	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		650 Arsip	20.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis						18.000.000,00							20.000.000,00	
		Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	600 Arsip		1000 Arsip	500 Arsip	18.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600 Arsip	20.000.000,00	Dinas Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan						27.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	30 Orang		30 Orang	25 Orang	27.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	30.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi						54.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	75 Instansi		66 Instansi	58 Instansi	54.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Instansi	60.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis						27.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	80 Dokumen		70 Dokumen	60 Dokumen	27.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						165.368.850,00							175.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	43 Lembaga		0 Lembaga	67 Lembaga	165.368.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Lembaga	175.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	6 Lembaga		6 Lembaga	10 Lembaga	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Lembaga	45.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						101.700.000,00					-		113.000.000,00	
		-						101.700.000,00					-		113.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	400 Arsip		300 Arsip	400 Arsip	76.500.000,00						400 Arsip	85.000.000,00	
			jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	350 Arsip		300 Arsip	350 Arsip	25.200.000,00						350 Arsip	28.000.000,00	
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis						76.500.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	400 Arsip		300 Arsip	150 Arsip	76.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Arsip	85.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						25.200.000,00							28.000.000,00	
		terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	350 Arsip		300 Arsip	150 Arsip	25.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		350 Arsip	28.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						180.000.000,00					-		325.000.000,00	
		-						180.000.000,00					-		325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	66 Laporan		66 Laporan	66 Laporan	67.500.000,00						66 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5000 Pengguna		5000 Pengguna	5000 Pengguna	112.500.000,00						5000 Pengguna	250.000.000,00	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						112.500.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5000 Pengguna		5000 Pengguna	5000 Pengguna	112.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5000 Pengguna	250.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						67.500.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	66 Laporan		66 Laporan	58 Laporan	67.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		66 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan
166.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						117.836.065,00							130.000.000,00	
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK						117.836.065,00							130.000.000,00	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						90.836.065,00					-		100.000.000,00	
		-						90.836.065,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip		1500 Arsip	1500 Arsip	31.500.000,00						1500 Arsip	35.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas		0 Berkas	1500 Berkas	59.336.065,00						1500 Berkas	65.000.000,00	
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun						59.336.065,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas		0 Berkas	1500 Berkas	59.336.065,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1500 Berkas	65.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						31.500.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip		1500 Arsip	1500 Arsip	31.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1500 Arsip	35.000.000,00	Dinas Kearsipan
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						27.000.000,00					-		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						27.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 Arsip		Arsip	Arsip	27.000.000,00						Arsip	30.000.000,00	
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						27.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 Arsip		Arsip	150 Arsip	27.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Arsip	30.000.000,00	Dinas Kearsipan
		Dinas Kelautan dan Perikanan						47.591.400.000,00							46.028.410.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						47.574.400.000,00							46.011.410.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						47.574.400.000,00							46.011.410.000,00	
167.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.619.400.000,00							27.739.410.000,00	
		Meningkatnya Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani						27.619.400.000,00							27.739.410.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						639.930.000,00					-		639.930.000,00	
		-						639.930.000,00					-		639.930.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	50.000.000,00						3 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	395.000.000,00						2 Dokumen	395.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	159.930.000,00						1 Laporan	159.930.000,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						395.000.000,00							395.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	395.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	395.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						159.930.000,00							159.930.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	159.930.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	159.930.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Data	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.170.780.000,00					-		22.689.930.000,00	
		-						22.170.780.000,00					-		22.689.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.388.000.000,00						1 Dokumen	1.388.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00						1 Laporan	17.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang/ Bulan		187 Orang/ Bulan	187 Orang/ Bulan	20.765.780.000,00						187 Orang/ Bulan	21.284.930.000,00	
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.765.780.000,00							21.284.930.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang/ Bulan		187 Orang/ Bulan	179 Orang/ Bulan	20.765.780.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		187 Orang/ Bulan	21.284.930.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						1.388.000.000,00							1.388.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.388.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.388.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	17.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						440.000.000,00					-		450.000.000,00	
		-						440.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Paket	1 Paket	190.000.000,00						1 Paket	190.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	250.000.000,00						14 Orang	260.000.000,00	
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						190.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Paket	1 Paket	190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	190.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Orang	260.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.851.690.000,00					-		1.892.550.000,00	
		-						1.851.690.000,00					-		1.892.550.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	211.690.000,00						1 Paket	222.550.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	420.000.000,00						1 Paket	450.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						420.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						211.690.000,00							222.550.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	211.690.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	222.550.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.117.000.000,00					-		1.117.000.000,00	
		-						1.117.000.000,00					-		1.117.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	682.000.000,00						1 Laporan	682.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	435.000.000,00						1 Laporan	435.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						682.000.000,00							682.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	682.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	682.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						435.000.000,00							435.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	435.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	435.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Unit	4 Unit	900.000.000,00						4 Unit	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						900.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Unit	4 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
		-						1.600.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	450.000.000,00						-	450.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	32 Unit	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
168.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						835.000.000,00							885.000.000,00	
		Meningkatnya Kontiribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB						835.000.000,00							885.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						710.000.000,00					-		735.000.000,00	
		-						710.000.000,00					-		735.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	976.032 Ha		976.032 Ha	976.032 Ha	260.000.000,00						976.032 Ha	260.000.000,00	
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	12 Ha		10 Ha	10 Ha	350.000.000,00						11 Ha	375.000.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						260.000.000,00							260.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	976.032 Ha		976.032 Ha	976,032 Ha	260.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		976.032 Ha	260.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						350.000.000,00							375.000.000,00	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	12 Ha		10 Ha	10 Ha	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Ha	375.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	140 Orang		60 Orang	80 Orang	125.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	140 Orang		60 Orang	80 Orang	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
169.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						6.450.000.000,00							3.167.000.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						6.450.000.000,00							3.167.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						1.800.000.000,00					-		2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.800.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	230 Unit		100 Unit	185 Unit	1.500.000.000,00						200 Unit	1.700.000.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						1.500.000.000,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	230 Unit		100 Unit	185 Unit	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Unit	1.700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						4.050.000.000,00					-		497.000.000,00	
		-						4.050.000.000,00					-		497.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	415 Unit		230 Unit	350 Unit	3.950.000.000,00						370 Unit	397.000.000,00	
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						3.950.000.000,00							397.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	415 Unit		230 Unit	350 Unit	3.950.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		370 Unit	397.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	200.000.000,00						90 Persentase	200.000.000,00	
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Persentase	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						700.000.000,00					-		770.000.000,00	
		-						700.000.000,00					-		770.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	300.000.000,00						1 Layanan	320.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	450.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						400.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	1 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						300.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Layanan	320.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
170.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						6.760.000.000,00							7.780.000.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						6.760.000.000,00							7.780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						310.000.000,00					-		310.000.000,00	
		-						310.000.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	8 Rekomendasi		0 Rekomendasi	5 Rekomendasi	80.000.000,00						5 Rekomendasi	80.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	44 Rekomendasi		36 Rekomendasi	38 Rekomendasi	110.000.000,00						40 Rekomendasi	110.000.000,00	
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						110.000.000,00							110.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	44 Rekomendasi		36 Rekomendasi	38 Rekomendasi	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Rekomendasi	110.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	8 Rekomendasi		0 Rekomendasi	5 Rekomendasi	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Rekomendasi	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						660.000.000,00					-		740.000.000,00	
		-						660.000.000,00					-		740.000.000,00	
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	42 Dokumen		34 Dokumen	36 Dokumen	110.000.000,00						38 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	6 Unit		0 Unit	5 Unit	100.000.000,00						6 Unit	120.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	6 Unit		0 Unit	5 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	42 Dokumen		34 Dokumen	36 Dokumen	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						6.200.000.000,00					-		6.970.000.000,00	
		-						6.200.000.000,00					-		6.970.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	320.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	275 Unit		68 Unit	200 Unit	5.900.000.000,00						225 Unit	6.650.000.000,00	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.900.000.000,00							6.650.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	275 Unit		68 Unit	200 Unit	5.900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		225 Unit	6.650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	320.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
171.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.100.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						1.100.000.000,00							1.200.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						1.050.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		-						1.050.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	250.000.000,00						40 Pelaku Usaha	300.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	38 Kelompok Masyarakat		38 Kelompok Masyarakat	38 Kelompok Masyarakat	800.000.000,00						38 Kelompok Masyarakat	850.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						800.000.000,00							850.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	38 Kelompok Masyarakat		38 Kelompok Masyarakat	38 Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Kelompok Masyarakat	850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00						30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00						30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00						30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
172.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						3.100.000.000,00							3.200.000.000,00	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						3.100.000.000,00							3.200.000.000,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						2.850.000.000,00					-		2.950.000.000,00	
		-						2.850.000.000,00					-		2.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	600.000.000,00						1 Kegiatan	650.000.000,00	
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.250.000.000,00						3 Kegiatan	2.300.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						600.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						2.250.000.000,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Kegiatan	2.300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						850.000.000,00					-		900.000.000,00	
		-						850.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00						1 Dokumen	650.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	20 Unit Usaha		10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	250.000.000,00						20 Unit Usaha	250.000.000,00	
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						600.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Diberikannya Insentif dan Fasilitas bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	20 Unit Usaha		10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit Usaha	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X							17.000.000,00							17.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.000.000,00							17.000.000,00	
173.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.000.000,00							17.000.000,00	
			-	-		-	-	17.000.000,00						-	17.000.000,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00					-		17.000.000,00	
		-						17.000.000,00					-		17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00						1 Laporan	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	17.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						174.830.146.234,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						174.830.146.234,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						174.830.146.234,00							0,00	
174.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						91.543.924.320,00							0,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						91.543.924.320,00							0,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.650.000.000,00					-		0,00	
		-						1.650.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		1 Data	2 Data	350.000.000,00						2 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						550.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		1 Data	2 Data	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Data	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						49.916.253.000,00					-		0,00	
		-						49.916.253.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.601.181.000,00						5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.940.000,00						5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	51.000.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	376 Orang/ Bulan		376 Orang/ Bulan	376 Orang/ Bulan	47.107.132.000,00						376 Orang/ Bulan	0,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						47.107.132.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	376 Orang/ Bulan		376 Orang/ Bulan	376 Orang/ Bulan	47.107.132.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		376 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						2.601.181.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.601.181.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						105.940.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.940.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						51.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						51.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	51.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						300.000.000,00					-		0,00	
		-						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						602.500.000,00					-		0,00	
		-						602.500.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	25.000.000,00						5 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0 Paket	376 Paket	295.000.000,00						376 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	132.500.000,00						10 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit		0 Unit	20 Unit	50.000.000,00						20 Unit	0,00	
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit		0 Unit	20 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						295.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0 Paket	376 Paket	295.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		376 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						132.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	132.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.020.000.000,00					-		0,00	
		-						3.020.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	365.000.000,00						4 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	680.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	0,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						680.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	680.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						365.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	365.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						55.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						775.000.000,00					-		0,00	
		-						775.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	6 Unit	725.000.000,00						6 Unit	0,00	
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						725.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	6 Unit	725.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						32.229.500.000,00					-		0,00	
		-						32.229.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.220.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	30.006.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00						2 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.220.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.006.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	30.006.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.076.671.320,00					-		0,00	
		-						4.076.671.320,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.011.071.320,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit		250 Unit	250 Unit	900.000.000,00						250 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		2 Unit	1 Unit	165.600.000,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit		250 Unit	250 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						165.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		2 Unit	1 Unit	165.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.011.071.320,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.011.071.320,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
175.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						72.073.872.700,00							0,00	
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pertanian						72.073.872.700,00							0,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						69.735.922.700,00					-		0,00	
		-						69.735.922.700,00					-		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	64.940.245.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan		1 laporan	1 laporan	250.677.700,00						1 laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	3 laporan		1 laporan	3 laporan	1.915.000.000,00						3 laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	3 laporan		3 laporan	3 laporan	1.580.000.000,00						3 laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 laporan		1 laporan	3 laporan	850.000.000,00						3 laporan	0,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						64.940.245.000,00							0,00	
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	64.940.245.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan						1.915.000.000,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	3 laporan		1 laporan	3 laporan	1.915.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura						250.677.700,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan		1 laporan	1 laporan	250.677.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						1.580.000.000,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	3 laporan		3 laporan	3 laporan	1.580.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						850.000.000,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3 laporan		1 laporan	3 laporan	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						2.337.950.000,00					-		0,00	
		-						2.337.950.000,00					-		0,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	6000 Batang		6000 Batang	6000 Batang	500.000.000,00						6000 Batang	0,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	53 Ton		24 Ton	33 Ton	780.000.000,00						48 Ton	0,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	188.650.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	214 Sertifikat		20 Sertifikat	78 Sertifikat	594.300.000,00						109 Sertifikat	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						594.300.000,00							0,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	214 Sertifikat		20 Sertifikat	78 Sertifikat	594.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		109 Sertifikat	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	6000 Batang		6000 Batang	6000 Batang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6000 Batang	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						780.000.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	53 Ton		24 Ton	33 Ton	780.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Ton	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						275.000.000,00							0,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						188.650.000,00							0,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	188.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
176.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.436.349.214,00							0,00	
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pertanian						3.436.349.214,00							0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						3.936.349.214,00					-		0,00	
		-						3.936.349.214,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.836.349.214,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						200.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						1.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						1.836.349.214,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.836.349.214,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi						300.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi						200.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
177.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.850.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						1.850.000.000,00							0,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						2.250.000.000,00					-		0,00	
		-						2.250.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha		400 Ha	500 Ha	400.000.000,00						500 Ha	0,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha		0 Ha	500 Ha	500.000.000,00						500 Ha	0,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1550 Ha		1000 Ha	1550 Ha	950.000.000,00						1550 Ha	0,00	
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan		0 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						Laporan	0,00	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						950.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1550 Ha		1000 Ha	1550 Ha	950.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1550 Ha	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						400.000.000,00							0,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha		400 Ha	500 Ha	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Ha	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha		0 Ha	500 Ha	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Ha	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						400.000.000,00							0,00	
		Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan		0 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
178.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						4.000.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian						4.000.000.000,00							0,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						3.700.000.000,00					-		0,00	
		-						3.700.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit		0 Unit	17 Unit	3.700.000.000,00						17 Unit	0,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						3.700.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit		0 Unit	1 Unit	3.700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						300.000.000,00					-		0,00	
		-						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Dinas Perkebunan						39.431.511.798,00							41.481.511.798,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.431.511.798,00							41.481.511.798,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						39.431.511.798,00							41.481.511.798,00	
179.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.771.511.798,00							25.771.511.798,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						25.771.511.798,00							25.771.511.798,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						440.000.000,00					-		440.000.000,00	
		-						440.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00						1 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00						5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00						2 Laporan	40.000.000,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	40.000.000,00	Dinas Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.766.511.798,00					-		20.611.511.798,00	
		-						18.766.511.798,00					-		20.611.511.798,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00						6 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	792 Orang/ Bulan		792 Orang/ Bulan	792 Orang/ Bulan	18.416.511.798,00						792 Orang/ Bulan	20.261.511.798,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.416.511.798,00							20.261.511.798,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	792 Orang/ Bulan		792 Orang/ Bulan	792 Orang/ Bulan	18.416.511.798,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		792 Orang/ Bulan	20.261.511.798,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						600.000.000,00					-		600.000.000,00	
		-						600.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		15 Orang	20 Orang	350.000.000,00						20 Orang	350.000.000,00	
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		15 Orang	20 Orang	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.460.000.000,00					-		1.515.000.000,00	
		-						1.460.000.000,00					-		1.515.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	800.000.000,00						150 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	500.000.000,00						3 Paket	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00						1 Paket	65.000.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	65.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	550.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	800.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.150.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		-						1.150.000.000,00					-		1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	2 Unit	700.000.000,00						2 Unit	700.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	250.000.000,00						25 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit		40 Unit	50 Unit	200.000.000,00						50 Unit	200.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	2 Unit	700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	700.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit		40 Unit	50 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.405.000.000,00					-		1.505.000.000,00	
		-						3.405.000.000,00					-		1.505.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00						12 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	2.680.000.000,00						12 Laporan	780.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	700.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.680.000.000,00							780.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	2.680.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	780.000.000,00	Dinas Perkebunan
		-						1.700.000.000,00					-		1.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	100.000.000,00						50 Unit	100.000.000,00	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.700.000.000,00					-		1.700.000.000,00	
		-						1.700.000.000,00					-		1.700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						850.000.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	90 Unit	850.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	850.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	750.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Perkebunan
180.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.870.000.000,00							4.995.000.000,00	
		Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)						4.870.000.000,00							4.995.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						2.000.000.000,00					-		2.050.000.000,00	
		-						2.000.000.000,00					-		2.050.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan		4 laporan	1 laporan	1.650.000.000,00						1 laporan	1.650.000.000,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan						1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan		4 laporan	1 laporan	1.650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	1.650.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						2.870.000.000,00					-		2.945.000.000,00	
		-						2.870.000.000,00					-		2.945.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	8200 Batang		9020 Batang	8200 Batang	2.420.000.000,00						8200 Batang	2.495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	4500 Sertifikat		4200 Sertifikat	4200 Sertifikat	300.000.000,00						4300 Sertifikat	300.000.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	4500 Sertifikat		4200 Sertifikat	4300 Sertifikat	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4300 Sertifikat	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						2.420.000.000,00							2.495.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	8200 Batang		9020 Batang	80339 Batang	2.420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8200 Batang	2.495.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi						350.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
181.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						500.000.000,00							475.000.000,00	
			-	-		-	-	500.000.000,00						-	475.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						500.000.000,00					-		475.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	2 Unit	300.000.000,00						1 Unit	275.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						300.000.000,00							275.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Kemuning Kelurahan Sekip Jaya 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	275.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-		-	50 Ha	50.000.000,00	-	DBH Sawit	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
182.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.450.000.000,00							1.450.000.000,00	
			-	-		-	-	1.450.000.000,00						-	1.450.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						1.450.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
		-						1.450.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha		0 Ha	50 Ha	100.000.000,00						50 Ha	100.000.000,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250 Ha		250 Ha	250 Ha	350.000.000,00						250 Ha	350.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha		125 Ha	250 Ha	1.000.000.000,00						250 Ha	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha		125 Ha	250 Ha	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Ha	1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha		0 Ha	50 Ha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Ha	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250 Ha		250 Ha	250 Ha	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
183.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						150.000.000,00							150.000.000,00	
			-	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00						20 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
184.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						4.540.000.000,00							6.440.000.000,00	
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan						4.440.000.000,00							6.340.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						4.440.000.000,00					-		6.340.000.000,00	
		-						4.440.000.000,00					-		6.340.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	100 Kelompok		94 Kelompok	100 Kelompok	4.440.000.000,00						100 Kelompok	6.340.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						4.440.000.000,00							6.340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	100 Kelompok		94 Kelompok	100 Kelompok	4.440.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Kelompok	6.340.000.000,00	Dinas Perkebunan
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Dinas Kehutanan						93.919.394.239,00							95.919.394.239,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						93.919.394.239,00							95.919.394.239,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						93.919.394.239,00							95.919.394.239,00	
185.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						84.071.554.239,00							85.687.554.239,00	
		Meningkatnya Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah						84.071.554.239,00							85.687.554.239,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						760.000.000,00					Pemerintah Provinsi		782.000.000,00	
		-						760.000.000,00					Pemerintah Provinsi		782.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		8 Laporan	14 Laporan	210.000.000,00						14 Laporan	252.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00						8 Laporan	150.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						210.000.000,00							252.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		8 Laporan	14 Laporan	210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Laporan	252.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						73.600.634.239,00					Pemerintah Provinsi		74.079.434.239,00	
		-						73.600.634.239,00					Pemerintah Provinsi		74.079.434.239,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	340.000.000,00						3 Dokumen	408.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581 Orang/ Bulan		581 Orang/ Bulan	497 Orang/ Bulan	73.060.634.239,00						581 Orang/ Bulan	73.431.434.239,00	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						73.060.634.239,00							73.431.434.239,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	581 Orang/ Bulan		581 Orang/ Bulan	497 Orang/ Bulan	73.060.634.239,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		581 Orang/ Bulan	73.431.434.239,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						340.000.000,00							408.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	340.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	408.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	240.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						305.000.000,00					Pemerintah Provinsi		366.000.000,00	
		-						305.000.000,00					Pemerintah Provinsi		366.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00						1 Dokumen	126.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						105.000.000,00							126.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	126.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.031.000.000,00					Pemerintah Provinsi		1.237.200.000,00	
		-						1.031.000.000,00					Pemerintah Provinsi		1.237.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00						12 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	455 Paket		0 Paket	455 Paket	455.000.000,00						455 Paket	546.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	150.000.000,00						2 Orang	180.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	468 Unit		0 Unit	468 Unit	351.000.000,00						468 Unit	421.200.000,00	
	3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						351.000.000,00							421.200.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	468 Unit		0 Unit	468 Unit	351.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		468 Unit	421.200.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						455.000.000,00							546.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	455 Paket		0 Paket	455 Paket	455.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		455 Paket	546.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						75.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	90.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.596.000.000,00					Pemerintah Provinsi		3.115.200.000,00	
		-						2.596.000.000,00					Pemerintah Provinsi		3.115.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00						2 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	380 Dokumen		0 Dokumen	380 Dokumen	94.000.000,00						380 Dokumen	112.800.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		100 Laporan	200 Laporan	1.500.000.000,00						200 Laporan	1.800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	190.000.000,00						2 Paket	228.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	144.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	170.000.000,00						1 Paket	204.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	132.000.000,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						120.000.000,00							144.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	144.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						170.000.000,00							204.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	170.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	204.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						110.000.000,00							132.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	132.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						190.000.000,00							228.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	228.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						12.000.000,00							14.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	14.400.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.500.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		100 Laporan	200 Laporan	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		200 Laporan	1.800.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						94.000.000,00							112.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	380 Dokumen		0 Dokumen	380 Dokumen	94.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		380 Dokumen	112.800.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.100.000.000,00					Pemerintah Provinsi		880.000.000,00	
		-						1.100.000.000,00					Pemerintah Provinsi		880.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	20 Unit	700.000.000,00						10 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	62 Unit		0 Unit	150 Unit	200.000.000,00						62 Unit	240.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						700.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	20 Unit	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	400.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	60.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	62 Unit		0 Unit	150 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		62 Unit	240.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.653.920.000,00					Pemerintah Provinsi		4.817.720.000,00	
		-						4.653.920.000,00					Pemerintah Provinsi		4.817.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00						12 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	3.834.920.000,00						12 Laporan	3.834.920.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	189.000.000,00						12 Laporan	226.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	36.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	36.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						600.000.000,00							720.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	720.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						189.000.000,00							226.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	189.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	226.800.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.834.920.000,00							3.834.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	3.834.920.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	3.834.920.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.025.000.000,00					Pemerintah Provinsi		2.430.000.000,00	
		-						2.025.000.000,00					Pemerintah Provinsi		2.430.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	6 Unit	600.000.000,00						3 Unit	720.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit		22 Unit	38 Unit	730.000.000,00						38 Unit	876.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		50 Unit	65 Unit	195.000.000,00						65 Unit	234.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	5 Unit	500.000.000,00						2 Unit	600.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						730.000.000,00							876.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit		22 Unit	38 Unit	730.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		38 Unit	876.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						195.000.000,00							234.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		50 Unit	65 Unit	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	234.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600.000.000,00							720.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	6 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	720.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	5 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	600.000.000,00	Dinas Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						760.000.000,00					Pemerintah Provinsi		782.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	5 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
186.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						4.328.840.000,00							5.722.840.000,00	
		Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Perekonomian Daerah						4.328.840.000,00							5.722.840.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						626.000.000,00					Pemerintah Provinsi		246.000.000,00	
		-						626.000.000,00					Pemerintah Provinsi		246.000.000,00	
			Dokumen RKTP yang disahkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	100 Unit		0 Unit	140 Unit	126.000.000,00						140 Unit	126.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan						200.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						126.000.000,00							126.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	100 Unit		0 Unit	140 Unit	126.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		140 Unit	126.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						620.000.000,00					Pemerintah Provinsi		840.000.000,00	
		-						620.000.000,00					Pemerintah Provinsi		840.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen		18 Dokumen	20 Dokumen	620.000.000,00						20 Dokumen	840.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						620.000.000,00							840.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen		18 Dokumen	20 Dokumen	620.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Dokumen	840.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						480.000.000,00					Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		755.000.000,00	
		-						480.000.000,00					Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		755.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	225.000.000,00						9 Dokumen	265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	255.000.000,00						2 Dokumen	490.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						225.000.000,00							265.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		9 Dokumen	265.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						255.000.000,00							490.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	255.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	490.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						1.300.000.000,00					Pemerintah Provinsi		1.525.000.000,00	
		-						1.300.000.000,00					Pemerintah Provinsi		1.525.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	40 Laporan		200 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00						40 Laporan	180.000.000,00	
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7 Ha		7 Ha	7 Ha	200.000.000,00						7 Ha	200.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha		0 Ha	20 Ha	300.000.000,00						20 Ha	300.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha		26 Ha	10 Ha	400.000.000,00						10 Ha	520.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						250.000.000,00							325.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	325.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha		0 Ha	20 Ha	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Ha	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						400.000.000,00							520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha		26 Ha	10 Ha	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Ha	520.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	40 Laporan		200 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		40 Laporan	180.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7 Ha		7 Ha	7 Ha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Ha	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2.002.840.000,00					Pemerintah Provinsi		2.406.840.000,00	
		-						2.002.840.000,00					Pemerintah Provinsi		2.406.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1.652.840.000,00						15 Laporan	2.056.840.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha		300 Ha	300 Ha	300.000.000,00						300 Ha	300.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.652.840.000,00							2.056.840.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1.652.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		15 Laporan	2.056.840.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	300 Ha		300 Ha	300 Ha	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		300 Ha	300.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						150.000.000,00					Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		150.000.000,00	
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	150.000.000,00						15 Laporan	150.000.000,00	
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		15 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan						100.000.000,00					Pemerintah Provinsi		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Pemerintah Provinsi		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100.000.000,00						3 Unit Usaha	100.000.000,00	
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	3 Unit Usaha		3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
187.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan						300.000.000,00							300.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						300.000.000,00					Pemerintah Provinsi		300.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Pemerintah Provinsi		300.000.000,00	
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	200.000.000,00						60 Orang	200.000.000,00	
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	200 Ha		0 Ha	200 Ha	100.000.000,00						200 Ha	100.000.000,00	
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		60 Orang	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	200 Ha		0 Ha	200 Ha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200 Ha	100.000.000,00	Dinas Kehutanan
188.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						1.924.000.000,00							1.539.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan dan meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial KUPS						1.924.000.000,00							1.539.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						1.924.000.000,00					Masyarakat sekitar kawasan hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial		1.539.000.000,00	
		-						1.924.000.000,00					Masyarakat sekitar kawasan hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial		1.539.000.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit		0 Unit	3 Unit	300.000.000,00						4 Unit	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	127 Orang		30 Orang	184 Orang	609.000.000,00						78 Orang	349.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar		5000 Hektar	3000 Hektar	200.000.000,00						3500 Hektar	250.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						609.000.000,00							349.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	127 Orang		30 Orang	184 Orang	609.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		78 Orang	349.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar		5000 Hektar	3000 Hektar	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3500 Hektar	250.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						300.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit		0 Unit	3 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Unit	200.000.000,00	Dinas Kehutanan
		-						1.924.000.000,00					Masyarakat sekitar kawasan hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial		1.539.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	815.000.000,00						-	740.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						815.000.000,00							740.000.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya	-		-	121 Kelompok	815.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	740.000.000,00	Dinas Kehutanan
189.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						345.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga						345.000.000,00							350.000.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						345.000.000,00					Pemerintah Provinsi		350.000.000,00	
		-						345.000.000,00					Pemerintah Provinsi		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00						2 Lembaga	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	80.000.000,00	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50 Orang		0 Orang	50 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50 Orang	80.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Kehutanan
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						120.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						41.090.761.437,00							41.640.761.437,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.015.761.437,00							40.265.761.437,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						39.015.761.437,00							40.265.761.437,00	
190.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						31.328.261.437,00							31.898.261.437,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.278.750.000,00							2.386.168.972,00	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.778.750.000,00					Aparatur		2.886.168.972,00	
		-						2.778.750.000,00					Aparatur		2.886.168.972,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.023.750.000,00						1 Laporan	1.131.168.972,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	700.000.000,00						2 Paket	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	500.000.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	700.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.023.750.000,00							1.131.168.972,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.023.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.131.168.972,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan BLUD						550.000.000,00							600.000.000,00	
	3.29.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						550.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		600.000.000,00	
		-						550.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		600.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00						1 Unit Kerja	600.000.000,00	
	3.29.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						550.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit Kerja	600.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.450.000.000,00							1.500.000.000,00	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.450.000.000,00					Aparatur		1.500.000.000,00	
		-						1.450.000.000,00					Aparatur		1.500.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Unit	3 Unit	300.000.000,00						3 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	900.000.000,00						30 Unit	900.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Unit	900.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Unit	3 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					Aparatur		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Aparatur		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	
	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00							300.000.000,00	
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00					Aparatur		300.000.000,00	
		-						200.000.000,00					Aparatur		300.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		16 Orang	20 Orang	200.000.000,00						20 Orang	300.000.000,00	
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		16 Orang	20 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		20 Orang	300.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.360.000.000,00							2.610.000.000,00	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.360.000.000,00					Aparatur		2.610.000.000,00	
		-						2.360.000.000,00					Aparatur		2.610.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	850.000.000,00						36 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000.000,00						2 Laporan	1.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00						1000 Laporan	10.000.000,00	
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1000 Laporan	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						850.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.500.000.000,00							1.600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	1.600.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						492.500.000,00							112.500.000,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						525.000.000,00					Aparatur		225.000.000,00	
		-						525.000.000,00					Aparatur		225.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	20.000.000,00						1 Data	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	380.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00						2 Dokumen	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00						2 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						380.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	380.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	7.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	7.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Data	20.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.852.011.437,00							24.244.592.465,00	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.852.011.437,00					Aparatur		24.244.592.465,00	
		-						23.852.011.437,00					Aparatur		24.244.592.465,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	222.960.000,00						1 Dokumen	222.960.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan		145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	23.629.051.437,00						145 Orang/ Bulan	24.021.632.465,00	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.629.051.437,00							24.021.632.465,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan		145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	23.629.051.437,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		145 Orang/ Bulan	24.021.632.465,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						222.960.000,00							222.960.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	222.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	222.960.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						700.000.000,00							700.000.000,00	
	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						700.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		700.000.000,00	
		-						700.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen		9 Dokumen	7 Dokumen	700.000.000,00						5 Dokumen	700.000.000,00	
	3.29.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-						1.450.000.000,00					Aparatur		1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
191.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Data Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						175.000.000,00							175.000.000,00	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						175.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		175.000.000,00	
		-						175.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	28 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	175.000.000,00						28 Laporan	175.000.000,00	
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terkendalnya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	28 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		28 Laporan	175.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya pengelolaan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi						175.000.000,00							175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						175.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		175.000.000,00	
		-						175.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	23 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
192.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						150.000.000,00							150.000.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						150.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelayanan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						250.000.000,00							250.000.000,00	
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						250.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		250.000.000,00	
		-						250.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	100.000.000,00						16 Laporan	100.000.000,00	
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	16 Laporan		16 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		16 Laporan	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pengelolaan Data Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						150.000.000,00							150.000.000,00	
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						250.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		250.000.000,00	
		-						250.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	29 Dokumen		29 Dokumen	29 Dokumen	100.000.000,00						29 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	29 Laporan		0 Laporan	29 Laporan	100.000.000,00						29 Laporan	100.000.000,00	
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	29 Dokumen		29 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		29 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	29 Laporan		0 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		29 Laporan	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
193.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						3.150.000.000,00							3.350.000.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi						100.000.000,00							200.000.000,00	
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						100.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		200.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	22 laporan		1 laporan	11 laporan	100.000.000,00						22 laporan	200.000.000,00	
	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	22 laporan		1 laporan	5 laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		22 laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						50.000.000,00							100.000.000,00	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						50.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rekomendasi Perizinan danInformasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi						3.150.000.000,00							3.150.000.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						3.150.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		3.150.000.000,00	
		-						3.150.000.000,00					Stakeholder/Mas yarakat		3.150.000.000,00	
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5 unit		1 unit	3 unit	3.000.000.000,00						3 unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	6 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						6 Laporan	50.000.000,00	
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	6 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Laporan	50.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5 unit		1 unit	3 unit	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 unit	3.000.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi						100.000.000,00							200.000.000,00	
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi						100.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	22 Laporan		1 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00						22 Laporan	200.000.000,00	
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	22 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		22 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi						50.000.000,00							100.000.000,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi						50.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi						100.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		100.000.000,00	
			jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa						100.000.000,00							100.000.000,00	
		terkumpulnya data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
194.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						1.700.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan						1.700.000.000,00							2.000.000.000,00	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						2.000.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		2.300.000.000,00	
		-						2.000.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		2.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	22 Laporan		11 Laporan	22 Laporan	200.000.000,00						22 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1241 Keluarga		200 Keluarga	500 Keluarga	1.500.000.000,00						600 Keluarga	1.800.000.000,00	
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		1 Dokumen	22 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk mbutuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						1.500.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1241 Keluarga		200 Keluarga	500 Keluarga	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk mbutuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		600 Keluarga	1.800.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	22 Laporan		11 Laporan	22 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk mbutuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		22 Laporan	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perdagangan						33.587.898.515,00							35.969.775.914,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						33.587.898.515,00							35.969.775.914,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						33.587.898.515,00							35.969.775.914,00	
195.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.761.898.515,00							30.801.698.514,00	
			-	-		-	-	29.761.898.515,00						-	30.801.698.514,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000,00					-		242.000.000,00	
		-						220.000.000,00					-		242.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00						3 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	22.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.563.358.629,00					-		26.872.527.240,00	
		-						25.563.358.629,00					-		26.872.527.240,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.173.600,00						1 Dokumen	209.190.960,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	429.840.000,00						12 Dokumen	472.824.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan		157 Orang/ Bulan	170 Orang/ Bulan	24.943.345.029,00						175 Orang/ Bulan	26.190.512.280,00	
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.943.345.029,00							26.190.512.280,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan		157 Orang/ Bulan	170 Orang/ Bulan	24.943.345.029,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		175 Orang/ Bulan	26.190.512.280,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						190.173.600,00							209.190.960,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.173.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	209.190.960,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						429.840.000,00							472.824.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	429.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	472.824.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						23.544.000,00					-		25.898.400,00	
		-						23.544.000,00					-		25.898.400,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.544.000,00						12 Laporan	25.898.400,00	
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						23.544.000,00							25.898.400,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.544.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	25.898.400,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000.000,00					-		300.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	1 Paket	300.000.000,00						Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		2 Orang	8 Orang	200.000.000,00						12 Orang	300.000.000,00	
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	0,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		2 Orang	15 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Orang	300.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.608.795.886,00					-		1.444.075.474,00	
		-						1.608.795.886,00					-		1.444.075.474,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00						12 Dokumen	29.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00						1 Dokumen	39.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.260.000.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.795.886,00						4 Paket	116.375.474,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	36.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	99.000.000,00						4 Paket	108.900.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	45.000.000,00						4 Paket	49.500.000,00	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.000.000,00							49.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	49.500.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						105.795.886,00							116.375.474,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	105.795.886,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	116.375.474,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						99.000.000,00							108.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	99.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	108.900.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						27.000.000,00							29.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	29.700.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						36.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.260.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.260.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						36.000.000,00							39.600.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	39.600.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						500.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		-						500.000.000,00					-		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		Unit	12 Unit	200.000.000,00						25 Unit	500.000.000,00	
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		Unit	12 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	500.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						889.200.000,00					-		978.120.000,00	
		-						889.200.000,00					-		978.120.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	765.000.000,00						12 Laporan	841.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	102.600.000,00						1 Laporan	112.860.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00						1 Laporan	23.760.000,00	
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.600.000,00							23.760.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	23.760.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						765.000.000,00							841.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	765.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	841.500.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.600.000,00							112.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	102.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	112.860.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.093.000.000,00					-		1.598.154.800,00	
		-						1.093.000.000,00					-		1.598.154.800,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	500.000.000,00						2 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	312 Unit		216 Unit	276 Unit	441.000.000,00						348 Unit	549.077.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	152.000.000,00						50 Unit	549.077.400,00	
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						441.000.000,00							549.077.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	312 Unit		216 Unit	216 Unit	441.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		348 Unit	549.077.400,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						152.000.000,00							549.077.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	152.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	549.077.400,00	Dinas Perdagangan
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	500.000.000,00	Dinas Perdagangan
196.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						225.000.000,00							247.500.000,00	
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi						225.000.000,00							247.500.000,00	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						100.000.000,00					-		117.500.000,00	
		-						100.000.000,00					-		117.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	117.500.000,00	
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						100.000.000,00							117.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	117.500.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						125.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						125.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	6000 Dokumen		6000 Dokumen	6000 Dokumen	125.000.000,00						6000 Dokumen	130.000.000,00	
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						125.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	6000 Dokumen		6000 Dokumen	6000 Dokumen	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6000 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Perdagangan
197.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						1.000.000.000,00					-		1.100.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00					-		1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	200.000.000,00						50 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	320 Unit		240 Unit	260 Unit	690.000.000,00						280 Unit	780.000.000,00	
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						690.000.000,00							780.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	320 Unit		240 Unit	525 Unit	690.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		280 Unit	780.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	120.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	200.000.000,00	Dinas Perdagangan
198.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						160.000.000,00							196.000.000,00	
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						160.000.000,00							196.000.000,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						60.000.000,00					-		96.000.000,00	
		-						60.000.000,00					-		96.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	96.000.000,00	
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						60.000.000,00							96.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	96.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						200.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
199.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						205.000.000,00							245.500.000,00	
		Nilai Ekspor Barang						205.000.000,00							245.500.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						405.000.000,00					-		445.500.000,00	
		-						405.000.000,00					-		445.500.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100.000.000,00						3 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100.000.000,00						2 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	105.000.000,00						3 Pelaku Usaha	145.500.000,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk		5 Produk	5 Produk	100.000.000,00						5 Produk	100.000.000,00	
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional						105.000.000,00							145.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Pelaku Usaha	145.500.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk		5 Produk	5 Produk	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Produk	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
200.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						550.000.000,00							640.000.000,00	
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen						550.000.000,00							640.000.000,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					-		490.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		490.000.000,00	
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK		2 BPSK	2 BPSK	250.000.000,00						2 BPSK	340.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	14 LPKSM		0 LPKSM	14 LPKSM	50.000.000,00						14 LPKSM	50.000.000,00	
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	50 Pengaduan		25 Pengaduan	50 Pengaduan	100.000.000,00						50 Pengaduan	100.000.000,00	
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						250.000.000,00							340.000.000,00	
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK		2 BPSK	2 BPSK	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 BPSK	340.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	14 LPKSM		0 LPKSM	14 LPKSM	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 LPKSM	50.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	50 Pengaduan		25 Pengaduan	50 Pengaduan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Pengaduan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	150.000.000,00						1 laporan	150.000.000,00	
			Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk		3 Produk	3 Produk	100.000.000,00						3 Produk	100.000.000,00	
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00						1 Sertifikat	150.000.000,00	
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Sertifikat	150.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 laporan	150.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk		3 Produk	3 Produk	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Produk	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
201.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						100.000.000,00							230.000.000,00	
		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan						100.000.000,00							230.000.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						100.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM		1 UMKM	5 UMKM	100.000.000,00						5 UMKM	130.000.000,00	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						100.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kebersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM		1 UMKM	10 UMKM	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 UMKM	130.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM		1 UMKM	5 UMKM	100.000.000,00						5 UMKM	100.000.000,00	
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM		1 UMKM	10 UMKM	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 UMKM	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perdagangan
		Dinas Perindustrian						35.193.986.592,00							36.193.986.592,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						35.193.986.592,00							36.193.986.592,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						35.193.986.592,00							36.193.986.592,00	
202.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.614.474.175,00							17.018.786.592,00	
			Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	-		-	100 %	9.849.474.175,00						-	10.343.786.592,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 %	6.065.000.000,00						-	6.975.000.000,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						859.000.000,00					Dinas Perindustrian		859.000.000,00	
		-						859.000.000,00					Dinas Perindustrian		859.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	137.000.000,00						1 Data	137.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00						1 Dokumen	140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	164.000.000,00						1 Dokumen	164.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00						1 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	163.000.000,00						1 Laporan	163.000.000,00	
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						164.000.000,00							164.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	164.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	164.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	175.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						163.000.000,00							163.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	163.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	163.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						137.000.000,00							137.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	137.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Data	137.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						140.000.000,00							140.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	140.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.150.474.175,00					Dinas Perindustrian		9.644.786.592,00	
		-						9.150.474.175,00					Dinas Perindustrian		9.644.786.592,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.750.474.175,00						55 Orang/ Bulan	9.244.786.592,00	
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.750.474.175,00							9.244.786.592,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	8.750.474.175,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		55 Orang/ Bulan	9.244.786.592,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						230.000.000,00					Dinas Perindustrian		230.000.000,00	
		-						230.000.000,00					Dinas Perindustrian		230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00						1 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00						1 Laporan	115.000.000,00	
	3.31.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	115.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	115.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						420.000.000,00					Dinas Perindustrian		410.000.000,00	
		-						420.000.000,00					Dinas Perindustrian		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		1 Orang	10 Orang	300.000.000,00						10 Orang	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00							290.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		1 Orang	10 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Orang	290.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.950.000.000,00					Dinas Perindustrian		2.450.000.000,00	
		-						1.950.000.000,00					Dinas Perindustrian		2.450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00						1 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	450.000.000,00						1 Paket	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00						1 Paket	350.000.000,00	
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						450.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	550.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						250.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	350.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						900.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						450.000.000,00					Dinas Perindustrian		0,00	
		-						450.000.000,00					Dinas Perindustrian		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00						0 Unit	0,00	
	3.31.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						450.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Unit	0,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.430.000.000,00					Dinas Perindustrian		2.600.000.000,00	
		-						2.430.000.000,00					Dinas Perindustrian		2.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.120.000.000,00						1 Laporan	1.290.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.240.000.000,00						1 Laporan	1.240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.120.000.000,00							1.290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	1.290.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.240.000.000,00							1.240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	1.240.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.450.000.000,00					Dinas Perindustrian		1.450.000.000,00	
		-						1.450.000.000,00					Dinas Perindustrian		1.450.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	700.000.000,00						1 Unit	700.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	500.000.000,00						9 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		9 Unit	500.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	700.000.000,00	Dinas Perindustrian
203.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						15.079.512.417,00							15.325.200.000,00	
			Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan	-		-	5,17 %	15.079.512.417,00						-	15.325.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	-		-	2,44 %	15.079.512.417,00						-	15.325.200.000,00	
			Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	-		-	20,03 %	15.079.512.417,00						-	15.325.200.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						16.679.512.417,00					Perangkat Daerah & Pelaku Usaha Industri		16.925.200.000,00	
		-						16.679.512.417,00					Perangkat Daerah & Pelaku Usaha Industri		16.925.200.000,00	
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00						1 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00						1 Dokumen	255.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	726.000.000,00						1 Dokumen	726.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00						1 Dokumen	2.246.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.968.512.417,00						1 Dokumen	7.968.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000.000,00						1 Dokumen	2.420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00						1 Dokumen	260.000.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00						1 Dokumen	650.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	800.000.000,00						1 Rekomendasi	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	800.000.000,00						1 Rekomendasi	800.000.000,00	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						260.000.000,00							260.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	260.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						726.000.000,00							726.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	726.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	726.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						7.968.512.417,00							7.968.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.968.512.417,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	7.968.200.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						2.100.000.000,00							2.246.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	2.246.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						2.320.000.000,00							2.420.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	2.420.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						255.000.000,00							255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	255.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	800.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Rekomendasi	800.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Rekomendasi	800.000.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi						650.000.000,00							650.000.000,00	
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Perindustrian
204.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						412.500.000,00							425.000.000,00	
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-		-	100 %	412.500.000,00						-	425.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						825.000.000,00					Perusahaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar		850.000.000,00	
		-						825.000.000,00					Perusahaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar		850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	412.500.000,00						1 Dokumen	425.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	412.500.000,00						1 Dokumen	425.000.000,00	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						412.500.000,00							425.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	412.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	425.000.000,00	Dinas Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						412.500.000,00							425.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	412.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	425.000.000,00	Dinas Perindustrian
205.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						375.000.000,00							387.500.000,00	
			Persentase Tersedianya Informasi Indsutri secara lengkap, akurat, dan terkini	-		-	100 %	375.000.000,00						-	387.500.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						750.000.000,00					Perusahaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar		775.000.000,00	
		-						750.000.000,00					Perusahaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar		775.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00						1 Dokumen	387.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00						1 Dokumen	387.500.000,00	
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						375.000.000,00							387.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	387.500.000,00	Dinas Perindustrian
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas						375.000.000,00							387.500.000,00	
		Terantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	387.500.000,00	Dinas Perindustrian
		Sekretariat Daerah						783.067.511,00							814.749.742,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						783.067.511,00							814.749.742,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						783.067.511,00							814.749.742,00	
206.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						758.067.511,00							789.749.742,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						157.112.000,00							97.112.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.112.000,00							97.112.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						419.115.511,00							510.797.742,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		1 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		7 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		3 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		5 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						389.115.511,00							480.797.742,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						156.840.000,00							156.840.000,00	
		-						95.789.315.000,00					Pegawai /ASN/PPPK dilingkungan Setda Provinsi Sumsel		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						156.840.000,00							156.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						758.067.511,00							789.749.742,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					Pegawai /ASN/PPPK dilingkungan Setda Provinsi Sumsel		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					Pegawai /ASN/PPPK dilingkungan Setda Provinsi Sumsel		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						156.840.000,00							156.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		7 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		3 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		1 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		5 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.067.552.266,00						1 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						389.115.511,00							480.797.742,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.112.000,00							97.112.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						758.067.511,00							789.749.742,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	200.000.000,00						12 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		-						95.789.315.000,00					Pegawai /ASN/PPPK dilingkungan Setda Provinsi SumseI		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						156.840.000,00							156.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						3 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		1 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		3 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		5 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		7 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.474.872.747,00						1 Laporan	9.993.389.689,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.067.552.266,00						1 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						389.115.511,00							480.797.742,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.112.000,00							97.112.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						758.067.511,00							789.749.742,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
		-						95.789.315.000,00					Pegawai /ASN/PPPK dilingkungan Setda Provinsi Sumsel		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						156.840.000,00							156.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	156.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	156.840.000,00	Sekretariat Daerah
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		5 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		7 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		1 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		4 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		2 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	-	-		3 Orang	20.000.000,00	Sekretariat Daerah
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	18 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	10.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						389.115.511,00							480.797.742,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	75 Laporan	389.115.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	480.797.742,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						1 Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.112.000,00							97.112.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	97.112.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	97.112.000,00	Sekretariat Daerah
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						5.191.299.952,00							5.230.839.314,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						5.191.299.952,00							5.230.839.314,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.191.299.952,00							5.230.839.314,00	
207.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						4.391.299.952,00							5.130.839.314,00	
			-	-		-	-	4.391.299.952,00						-	5.130.839.314,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						2.591.299.952,00					-		2.150.000.000,00	
		-						2.591.299.952,00					-		2.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	322 Dokumen		322 Dokumen	322 Dokumen	1.691.299.952,00						322 Dokumen	1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000,00						3 Dokumen	900.000.000,00	
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						900.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	900.000.000,00	-	-	-	-		3 Dokumen	900.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						1.691.299.952,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	322 Dokumen		322 Dokumen	0 Dokumen	1.691.299.952,00	-	-	-	-		322 Dokumen	1.250.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.900.000.000,00					-		2.280.839.314,00	
		-						1.900.000.000,00					-		2.280.839.314,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	120 Dokumen		100 Dokumen	106 Dokumen	700.000.000,00						114 Dokumen	880.839.314,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	61 Laporan		61 Laporan	61 Laporan	1.000.000.000,00						61 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat Daerah		52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100.000.000,00						52 Perangkat Daerah	100.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat Daerah		52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100.000.000,00						52 Perangkat Daerah	100.000.000,00	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						700.000.000,00							880.839.314,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	120 Dokumen		100 Dokumen	114 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		114 Dokumen	880.839.314,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	61 Laporan		61 Laporan	61 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		61 Laporan	1.200.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0004	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat Daerah		52 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		52 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat Daerah		52 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		52 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						700.000.000,00					-		800.000.000,00	
		-						700.000.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	48 Dokumen		31 Dokumen	36 Dokumen	700.000.000,00						41 Dokumen	800.000.000,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						700.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	48 Dokumen		31 Dokumen	82 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Dokumen	800.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Hukum						3.944.505.887,00							4.104.097.165,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.944.505.887,00							4.104.097.165,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.944.505.887,00							4.104.097.165,00	
208.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.863.968.621,00							1.939.383.171,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						960.000.000,00							952.283.171,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.000.000,00							167.283.171,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						665.000.000,00							665.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						743.868.621,00							805.000.000,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	381.000.000,00						5 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	636.036.450,00						1 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						33.868.621,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						410.000.000,00							430.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						100.100.000,00							120.100.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.100.000,00							120.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						60.000.000,00							62.000.000,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						1.863.968.621,00							1.939.383.171,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.100.000,00							120.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	16 Orang	381.000.000,00						16 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	636.036.450,00						7 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						33.868.621,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	54 Paket	33.868.621,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	16 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	220.000.000,00	Biro Hukum
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						410.000.000,00							430.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.000.000,00							167.283.171,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						665.000.000,00							665.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						1.863.968.621,00							1.939.383.171,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.100.000,00							120.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						410.000.000,00							430.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.907.750.000,00						15 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.000.000,00							167.283.171,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						665.000.000,00							665.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						1.863.968.621,00							1.939.383.171,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Hukum
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.100.000,00							120.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	100.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	120.100.000,00	Biro Hukum
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	8 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Hukum
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	70.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						410.000.000,00							430.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	430.000.000,00	Biro Hukum
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						1 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	120.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	120.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.000.000,00							167.283.171,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	9 Unit	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	167.283.171,00	Biro Hukum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						665.000.000,00							665.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	665.000.000,00	Biro Hukum
209.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.080.537.266,00							2.164.713.994,00	
			-	-		-	-	2.080.537.266,00						-	2.164.713.994,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						763.791.696,00					-		795.000.000,00	
		-						763.791.696,00					-		795.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	570 Dokumen		530 Dokumen	540 Dokumen	240.000.000,00						550 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	837 Dokumen		825 Dokumen	828 Dokumen	150.791.696,00						831 Dokumen	140.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	50 Dokumen		36 Dokumen	43 Dokumen	230.000.000,00						46 Dokumen	245.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	87 Dokumen		75 Dokumen	78 Dokumen	143.000.000,00						81 Dokumen	150.000.000,00	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan						230.000.000,00							245.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	50 Dokumen		36 Dokumen	43 Dokumen	230.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Dokumen	245.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan						150.791.696,00							140.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	837 Dokumen		825 Dokumen	828 Dokumen	150.791.696,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		831 Dokumen	140.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						143.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	87 Dokumen		75 Dokumen	78 Dokumen	143.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81 Dokumen	150.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota						240.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	570 Dokumen		530 Dokumen	540 Dokumen	240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550 Dokumen	260.000.000,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						1.316.745.570,00					-		1.369.713.994,00	
		-						1.316.745.570,00					-		1.369.713.994,00	
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	70 Kasus		60 Kasus	65 Kasus	1.191.745.570,00						70 Kasus	1.237.713.994,00	
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	125.000.000,00						4 Kasus	132.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						1.191.745.570,00							1.237.713.994,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	70 Kasus		60 Kasus	65 Kasus	1.191.745.570,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 Kasus	1.237.713.994,00	Biro Hukum
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						125.000.000,00							132.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Kasus	132.000.000,00	Biro Hukum
		Biro Kesejahteraan Rakyat						46.285.687.138,00							48.158.365.787,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						46.285.687.138,00							48.158.365.787,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						46.285.687.138,00							48.158.365.787,00	
210.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.596.497.559,00							1.657.101.940,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						529.430.000,00							568.134.381,00	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	30 Unit	1.907.750.000,00						30 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						332.750.000,00							371.454.381,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.820.000,00							116.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	139.860.000,00						10 Unit	139.860.000,00	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						79.860.000,00							79.860.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	79.860.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	79.860.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit		120 Unit	10 Unit	79.860.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Unit	79.860.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						720.075.559,00							720.075.559,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	10 Paket	251.483.612,00						10 Paket	251.483.612,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						121.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						51.483.612,00							51.483.612,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	51.483.612,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	51.483.612,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	6 Paket	51.483.612,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	51.483.612,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						497.591.947,00							497.591.947,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						188.892.000,00							188.892.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						188.892.000,00							188.892.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						158.100.000,00							180.000.000,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	255.100.000,00						1 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						133.100.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	133.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	133.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						1.596.497.559,00							1.657.101.940,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	255.100.000,00						1 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						133.100.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	133.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	133.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						188.892.000,00							188.892.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	636.036.450,00						1 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						121.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						497.591.947,00							497.591.947,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						332.750.000,00							371.454.381,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	16.382.867.469,00						13 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.820.000,00							116.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						1.516.637.559,00							1.577.241.940,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	200.000.000,00						12 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						188.892.000,00							188.892.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						121.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						497.591.947,00							497.591.947,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	30 Unit	1.907.750.000,00						30 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						332.750.000,00							371.454.381,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.820.000,00							116.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		<i>Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti</i>						1.516.637.559,00							1.577.241.940,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	30.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						188.892.000,00							188.892.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	188.892.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						121.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	0 Paket	121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	121.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						497.591.947,00							497.591.947,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	150 Laporan	497.591.947,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	497.591.947,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	30 Unit	1.907.750.000,00						30 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						332.750.000,00							371.454.381,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	15 Unit	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	371.454.381,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	16.382.867.469,00						13 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.820.000,00							116.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	116.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	116.820.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
211.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						44.664.189.579,00							46.471.263.847,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	44.664.189.579,00						-	46.471.263.847,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						43.808.574.579,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		45.615.648.847,00	
		-						43.808.574.579,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		45.615.648.847,00	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	17.835.524.579,00						7 Lembaga	19.642.598.847,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	10 Unit		10 Unit	10 Unit	25.973.050.000,00						10 Unit	25.973.050.000,00	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						25.973.050.000,00							25.973.050.000,00	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	10 Unit		10 Unit	10 Unit	25.973.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Unit	25.973.050.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						17.835.524.579,00							19.642.598.847,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	17.835.524.579,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		7 Lembaga	19.642.598.847,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						291.865.000,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		291.865.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						291.865.000,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		291.865.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	109.195.000,00						1 Dokumen	109.195.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.170.000,00						1 Dokumen	68.170.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.500.000,00						1 Dokumen	114.500.000,00	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						68.170.000,00							68.170.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.170.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	68.170.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						109.195.000,00							109.195.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	109.195.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	109.195.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						114.500.000,00							114.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	114.500.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						563.750.000,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		563.750.000,00	
		-						563.750.000,00					Menguatnya Ketentraman di Masyarakat		563.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	332.750.000,00						1 Dokumen	332.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.000.000,00						1 Dokumen	129.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00						1 Dokumen	102.000.000,00	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						332.750.000,00							332.750.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	332.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	332.750.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						102.000.000,00							102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	102.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						129.000.000,00							129.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	129.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Perekonomian						5.813.175.609,00							6.195.257.083,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						5.813.175.609,00							6.195.257.083,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.813.175.609,00							6.195.257.083,00	
212.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.459.022.450,00							2.560.450.095,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						1.575.000.000,00							1.575.000.000,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						1 Unit	6.513.936.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	30 Unit	1.907.750.000,00						30 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						664.136.450,00							664.136.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						164.136.450,00							164.136.450,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						169.886.000,00							169.886.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						169.886.000,00							169.886.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						50.000.000,00							151.427.645,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						2.459.022.450,00							2.560.450.095,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	200.000.000,00						12 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							151.427.645,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						169.886.000,00							169.886.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						164.136.450,00							164.136.450,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	12 Unit	7.725.279.700,00						12 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	16.382.867.469,00						13 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						2.459.022.450,00							2.560.450.095,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							151.427.645,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						169.886.000,00							169.886.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						164.136.450,00							164.136.450,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	7.725.279.700,00						Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						2.459.022.450,00							2.560.450.095,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							151.427.645,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	10 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	151.427.645,00	Biro Perekonomian
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						169.886.000,00							169.886.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	169.886.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	169.886.000,00	Biro Perekonomian
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	636.036.450,00						1 Orang	672.036.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						164.136.450,00							164.136.450,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	10 Orang	164.136.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	164.136.450,00	Biro Perekonomian
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	350.000.000,00	Biro Perekonomian
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	4 Unit	7.725.279.700,00						5 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	1.100.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Perekonomian
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	75.000.000,00	Biro Perekonomian
213.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						3.354.153.159,00							3.634.806.988,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan						3.354.153.159,00							3.634.806.988,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						1.289.984.084,00					Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang Terlaksana		1.289.984.084,00	
		-						1.289.984.084,00					Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang Terlaksana		1.289.984.084,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	958.815.684,00						3 Dokumen	958.815.684,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	331.168.400,00						2 Dokumen	331.168.400,00	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						958.815.684,00							958.815.684,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	958.815.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	958.815.684,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						331.168.400,00							331.168.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	331.168.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	331.168.400,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						907.069.575,00					-		1.007.069.575,00	
		-						907.069.575,00					-		1.007.069.575,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	358.504.450,00						2 Dokumen	358.504.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	318.779.125,00						2 Dokumen	318.779.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.786.000,00						4 Dokumen	329.786.000,00	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						229.786.000,00							329.786.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dokumen		2 Dokumen	100% Dokumen	229.786.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	329.786.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						318.779.125,00							318.779.125,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	318.779.125,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	318.779.125,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						358.504.450,00							358.504.450,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	358.504.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	358.504.450,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1.157.099.500,00					-		1.337.753.329,00	
		-						1.157.099.500,00					-		1.337.753.329,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	73.924.000,00						2 Dokumen	137.753.329,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00						2 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.694.650,00						1 Dokumen	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.412.500,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.068.350,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						128.068.350,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.068.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						103.412.500,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.412.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	750.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						101.694.650,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.694.650,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Biro Perekonomian
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD						73.924.000,00							137.753.329,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	73.924.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	137.753.329,00	Biro Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biro Administrasi Pembangunan						2.867.712.266,00							2.994.965.244,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.867.712.266,00							2.994.965.244,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.867.712.266,00							2.994.965.244,00	
214.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.517.712.266,00							1.499.965.244,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						990.000.000,00							884.965.244,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						470.000.000,00							460.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115.000.000,00							174.965.244,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						205.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						391.552.266,00							440.000.000,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	381.000.000,00						20 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.552.266,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						230.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						111.160.000,00							150.000.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						111.160.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	255.100.000,00						1 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						1.517.712.266,00							1.499.965.244,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	255.100.000,00						1 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						111.160.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	381.000.000,00						20 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	60 Paket	406.868.621,00						60 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						40.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	30 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	4 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	40.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.552.266,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						230.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	1.907.750.000,00						12 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						470.000.000,00							460.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115.000.000,00							174.965.244,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						205.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						1.517.712.266,00							1.499.965.244,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	200.000.000,00						12 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						111.160.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.552.266,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						230.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	30 Unit	1.907.750.000,00						30 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						470.000.000,00							460.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115.000.000,00							174.965.244,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						205.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						1.517.712.266,00							1.499.965.244,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	200.000.000,00						12 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						111.160.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	111.160.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.552.266,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.552.266,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						230.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	275.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						470.000.000,00							460.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	470.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	460.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115.000.000,00							174.965.244,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	115.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	174.965.244,00	Biro Administrasi Pembangunan
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						205.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
215.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						675.000.000,00							745.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						675.000.000,00							745.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						675.000.000,00					-		745.000.000,00	
		-						675.000.000,00					-		745.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	225.000.000,00	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						250.000.000,00							270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	270.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						225.000.000,00							250.000.000,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	225.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						625.000.000,00					-		700.000.000,00	
		-						625.000.000,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						225.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa						8.860.487.274,00							10.091.038.350,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.860.487.274,00							10.091.038.350,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.860.487.274,00							10.091.038.350,00	
216.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.945.440.289,00							2.142.484.318,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						1.400.000.000,00							917.484.318,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	12 Unit	7.725.279.700,00						12 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							517.484.318,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						288.165.289,00							850.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	636.036.450,00						7 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						192.165.289,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						232.275.000,00							350.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						232.275.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						1.945.440.289,00							2.142.484.318,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						232.275.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						192.165.289,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	4 Unit	7.725.279.700,00						5 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	1.907.750.000,00						12 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							517.484.318,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						1.945.440.289,00							2.142.484.318,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						232.275.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						192.165.289,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.907.750.000,00						15 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							517.484.318,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						1.945.440.289,00							2.142.484.318,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	12 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	25.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						232.275.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	232.275.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	350.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.474.872.747,00						1 Laporan	9.993.389.689,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	24 Paket	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						192.165.289,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	192.165.289,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	0 Unit	1.907.750.000,00						0 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	8 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							517.484.318,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	517.484.318,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
217.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						6.090.046.985,00							7.423.554.032,00	
			-	-		-	-	6.090.046.985,00						-	7.423.554.032,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						2.615.046.985,00					-		2.973.554.032,00	
		-						2.615.046.985,00					-		2.973.554.032,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.815.046.985,00						12 Laporan	2.023.554.032,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00						4 Laporan	450.000.000,00	
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						350.000.000,00							450.000.000,00	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	450.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.815.046.985,00							2.023.554.032,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.815.046.985,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.023.554.032,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						450.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						1.550.000.000,00					-		1.750.000.000,00	
		-						1.550.000.000,00					-		1.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00						4 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00						4 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00						4 Laporan	500.000.000,00	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						750.000.000,00							850.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	850.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						450.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	500.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						2.725.000.000,00					-		3.200.000.000,00	
		-						2.725.000.000,00					-		3.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000,00						4 Dokumen	1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	875.000.000,00						5 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang		100 Orang	100 Orang	950.000.000,00						100 Orang	1.200.000.000,00	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						950.000.000,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang		100 Orang	45 Orang	950.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	1.200.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						875.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	875.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	900.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						900.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.100.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Biro Organisasi						2.272.541.759,00							2.364.486.823,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.272.541.759,00							2.364.486.823,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.272.541.759,00							2.364.486.823,00	
218.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.162.215.469,00							1.220.422.490,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						394.215.469,00							420.922.490,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	1.907.750.000,00						12 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						155.000.000,00							158.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.239.469,00							42.873.490,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.146.106.800,00						18 Unit	30.148.606.800,00	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						58.500.000,00							61.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						547.000.000,00							574.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	381.000.000,00						20 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	30 Paket	406.868.621,00						0 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						11.000.000,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.067.552.266,00						1 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						256.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						175.000.000,00							178.000.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						175.000.000,00							178.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						46.000.000,00							47.500.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.000.000,00							21.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						1.162.215.469,00							1.220.422.490,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	10 Data	200.000.000,00						10 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.000.000,00							21.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						175.000.000,00							178.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	16 Orang	381.000.000,00						16 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	636.036.450,00						5 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						11.000.000,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	1 Paket	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	11.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	3 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						256.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	0 Unit	1.907.750.000,00						0 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						155.000.000,00							158.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.239.469,00							42.873.490,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	70.000.000,00						5 Unit	73.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.146.106.800,00						18 Unit	30.148.606.800,00	
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						70.000.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	5 Unit	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	73.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	73.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						58.500.000,00							61.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	1 Unit	58.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	61.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						1.033.715.469,00							1.086.422.490,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	200.000.000,00						1 Data	308.427.645,00	
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						175.000.000,00							178.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						256.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	5 Unit	1.907.750.000,00						12 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						155.000.000,00							158.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	16.382.867.469,00						13 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.239.469,00							42.873.490,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						1.033.715.469,00							1.086.422.490,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	6 Data	200.000.000,00						6 Data	308.427.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.000.000,00							21.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Data	26.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.153.000,00						1 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						175.000.000,00							178.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	178.000.000,00	Biro Organisasi
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						3 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	1 Orang	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	12.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.067.552.266,00						18 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						93.000.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	1 Paket	93.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						256.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	260.000.000,00	Biro Organisasi
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						155.000.000,00							158.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	158.000.000,00	Biro Organisasi
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	16.382.867.469,00						13 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.239.469,00							42.873.490,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	30.239.469,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	42.873.490,00	Biro Organisasi
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						105.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						32.000.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						32.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Biro Organisasi
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	52.500.000,00	
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	52.500.000,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	80.476.000,00						-	86.049.000,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.476.000,00							86.049.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	80.476.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	86.049.000,00	Biro Organisasi
219.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.056.326.290,00							1.099.064.333,00	
			-	-		-	-	1.056.326.290,00						-	1.099.064.333,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						433.326.290,00					-		454.064.333,00	
		-						433.326.290,00					-		454.064.333,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	78.000.000,00						Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	164.000.000,00						2 Dokumen	170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.326.290,00						1 Dokumen	204.064.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						191.326.290,00							204.064.333,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.326.290,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	204.064.333,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						78.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	80.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						164.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	164.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	170.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						623.000.000,00					-		645.000.000,00	
		-						623.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00						1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00						2 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	145.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00						2 Dokumen	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00						1 Laporan	95.000.000,00	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						145.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	145.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						170.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	175.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						90.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	95.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						130.000.000,00							135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	135.000.000,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						88.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	90.000.000,00	Biro Organisasi
		Biro Umum						267.160.784.100,00							268.239.405.325,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						267.160.784.100,00							268.239.405.325,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						267.160.784.100,00							268.239.405.325,00	
220.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						256.033.784.100,00							257.073.905.325,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						108.513.477.100,00							109.592.134.325,00	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						2.080.000.000,00					-		2.080.000.000,00	
		-						2.080.000.000,00					-		2.080.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000.000,00						1 Dokumen	1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	130.000.000,00						4 Laporan	130.000.000,00	
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.650.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	130.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Biro Umum
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000.000,00						4 Paket	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.755.279.700,00							4.833.936.925,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	2.000.000.000,00	Biro Umum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	10.000.000.000,00						50 Laporan	10.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	26.000.000.000,00						36 Laporan	26.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						220.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	220.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Laporan	10.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.000.000.000,00							26.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	26.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	26.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.708.646.000,00							14.708.646.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.146.106.800,00						1 Unit	30.148.606.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit		150 Unit	150 Unit	9.638.258.400,00						150 Unit	9.638.258.400,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	850.000.000,00						2 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	800.000.000,00						50 Unit	800.000.000,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	850.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.638.258.400,00							9.638.258.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit		150 Unit	220 Unit	9.638.258.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Unit	9.638.258.400,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	800.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.037.606.800,00							30.037.606.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						34.456.900.000,00							34.456.900.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	381.000.000,00						5 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	0,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						185.900.000,00							185.900.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						6 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.000.000.000,00						12 Laporan	24.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	3.067.552.266,00						10 Paket	3.342.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	251.483.612,00						6 Paket	251.483.612,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		10 Paket	12 Paket	400.000.000,00						12 Paket	400.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		10 Paket	7 Paket	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	400.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.571.000.000,00							2.571.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		10 Paket	15 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	200.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	15 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	200.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.000.000.000,00							24.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	24.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	200.000.000,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						94.426.162.000,00							94.426.162.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.000.000,00						1 Laporan	73.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00						2 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	515 Orang/ Bulan		480 Orang/ Bulan	480 Orang/ Bulan	93.448.162.000,00						480 Orang/ Bulan	93.448.162.000,00	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						93.448.162.000,00							93.448.162.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	515 Orang/ Bulan		480 Orang/ Bulan	487 Orang/ Bulan	93.448.162.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		480 Orang/ Bulan	93.448.162.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	25.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						73.000.000,00							73.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	73.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	30.000.000,00	Biro Umum
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						242.836.000,00							204.300.000,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00						2 Dokumen	38.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.536.000,00						2 Dokumen	38.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00						2 Dokumen	38.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00						2 Dokumen	38.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	255.100.000,00						1 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						93.800.000,00							93.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						38.500.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	38.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						38.500.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	38.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						38.500.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	38.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						38.536.000,00							38.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.536.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	38.500.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.000.000,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	72.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	72.000.000,00	Biro Umum
		Meningkatnya Pelayanan KDH dan WKDH						29.244.409.000,00							29.244.409.000,00	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						14.244.409.000,00					-		14.244.409.000,00	
		-						14.244.409.000,00					-		14.244.409.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	9.057.972.000,00						2 Orang/ Bulan	9.057.972.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.171.437.000,00						2 Orang/Bulan	2.171.437.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	15.000.000,00						4 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000.000,00						2 Paket	3.000.000.000,00	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.171.437.000,00							2.171.437.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.171.437.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Orang/Bulan	2.171.437.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	3.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	2 Orang	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	15.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						9.057.972.000,00							9.057.972.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	9.057.972.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang/ Bulan	9.057.972.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						15.000.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
		-						15.000.000.000,00					-		15.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	10.000.000.000,00						50 Paket	10.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	1.500.000.000,00						15 Paket	1.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	3.500.000.000,00						30 Paket	3.500.000.000,00	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	10.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						3.500.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	3.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	3.500.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	1.500.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						234.709.375.100,00							235.749.496.325,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	255.100.000,00						4 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						93.800.000,00							93.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.000.000,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	72.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	72.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	381.000.000,00						5 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	0,00	Biro Umum
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						185.900.000,00							185.900.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	100.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	20 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	100.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.571.000.000,00							2.571.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	7.151.866.250,00						10 Unit	7.151.866.250,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.755.279.700,00							4.833.936.925,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.151.866.250,00							7.151.866.250,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	50 Unit	7.151.866.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	7.151.866.250,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						220.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	220.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.708.646.000,00							14.708.646.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.146.106.800,00						1 Unit	30.148.606.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.271.819.950,00						10 Unit	1.271.819.950,00	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.037.606.800,00							30.037.606.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.037.606.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	30.037.606.800,00	Biro Umum
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.271.819.950,00							1.271.819.950,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	200 Unit	1.271.819.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	1.271.819.950,00	Biro Umum
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti						193.961.689.950,00							194.001.811.175,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						185.900.000,00							185.900.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.067.552.266,00						1 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.571.000.000,00							2.571.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	7.725.279.700,00						Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.755.279.700,00							4.833.936.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.708.646.000,00							14.708.646.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						193.961.689.950,00							194.001.811.175,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						93.800.000,00							93.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.800.000,00	Biro Umum
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	850.000.000,00	Biro Umum
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						3 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						185.900.000,00							185.900.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	185.900.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	185.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	185.900.000,00	Biro Umum
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	3.067.552.266,00						24 Paket	3.342.000.000,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.571.000.000,00							2.571.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	12 Paket	2.571.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Paket	2.571.000.000,00	Biro Umum
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.000.000.000,00	Biro Umum
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.755.279.700,00							4.833.936.925,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	4.755.279.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	4.833.936.925,00	Biro Umum
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.708.646.000,00							14.708.646.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	36 Laporan	14.708.646.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	14.708.646.000,00	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biro Humas dan Protokol						44.754.537.974,00							46.565.267.659,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						44.754.537.974,00							46.565.267.659,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						44.754.537.974,00							46.565.267.659,00	
221.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						44.689.537.974,00							46.475.267.659,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						1.225.050.000,00							875.050.000,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	3 Unit	7.725.279.700,00						4 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						285.050.000,00							285.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.146.106.800,00						1 Unit	30.148.606.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit		120 Unit	120 Unit	139.860.000,00						120 Unit	139.860.000,00	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	60.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit		120 Unit	10 Unit	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Unit	60.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						2.512.000.000,00							2.432.000.000,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	381.000.000,00						5 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	60 Paket	406.868.621,00						60 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	7 Orang	636.036.450,00						7 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						322.000.000,00							192.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	9.474.872.747,00						30 Laporan	9.993.389.689,00	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						229.000.000,00							229.000.000,00	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						229.000.000,00							229.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						25.000.000,00							75.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	255.100.000,00						4 Laporan	297.000.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti						44.689.537.974,00							46.475.267.659,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	255.100.000,00						4 Laporan	297.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.213.153.000,00						6 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						229.000.000,00							229.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	381.000.000,00						5 Orang	412.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	406.868.621,00						1 Paket	238.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						322.000.000,00							192.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		54 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		0 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	2 Paket	322.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	192.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		8 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		25 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang		6 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.474.872.747,00						3 Laporan	9.993.389.689,00	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	12 Unit	7.725.279.700,00						12 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	1.907.750.000,00						10 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.382.867.469,00						4 Laporan	16.757.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	80.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						285.050.000,00							285.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						41.916.045.150,00					-		42.921.545.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.146.106.800,00						1 Unit	30.148.606.800,00	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						30.448.487.974,00					-		32.414.217.659,00	
		-						30.448.487.974,00					-		32.414.217.659,00	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.900.000.000,00						5 Dokumen	4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00						1 Laporan	2.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.748.487.974,00						1 Laporan	25.514.217.659,00	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						3.900.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.900.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	4.000.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						2.800.000.000,00							2.900.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.900.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						23.748.487.974,00							25.514.217.659,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.748.487.974,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.514.217.659,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						10.250.000.000,00					-		10.500.000.000,00	
		-						10.250.000.000,00					-		10.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.800.000.000,00						1 Laporan	5.900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.700.000.000,00						1 Laporan	3.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00						1 Laporan	800.000.000,00	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						5.800.000.000,00							5.900.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.800.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.900.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.700.000.000,00							3.800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	3.800.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						750.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	800.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		<i>Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat uang ditindaklanjuti</i>						<i>3.881.050.000,00</i>							<i>3.501.050.000,00</i>	
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						229.000.000,00							229.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	4 Orang	636.036.450,00						4 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	60 Laporan	9.474.872.747,00						75 Laporan	9.993.389.689,00	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.907.750.000,00						1 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.382.867.469,00						1 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						285.050.000,00							285.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat yang ditindaklanjuti						3.881.050.000,00							3.501.050.000,00	
		-						883.936.000,00					-		1.040.727.645,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00						1 Dokumen	281.300.000,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						95.789.315.000,00					-		95.968.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.213.153.000,00						12 Dokumen	2.392.718.000,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						229.000.000,00							229.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	229.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
		-						1.592.905.071,00					-		1.498.536.450,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	3 Orang	636.036.450,00						2 Orang	672.036.450,00	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		8 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		5 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		3 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	40.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						39.443.908.625,00					-		40.239.373.301,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	9.474.872.747,00						150 Laporan	9.993.389.689,00	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan		40 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
		-						19.065.371.950,00					-		17.823.554.971,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	7.725.279.700,00						0 Unit	6.513.936.925,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.907.750.000,00						20 Unit	2.071.702.796,00	
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Biro Humas dan Protokol
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		30 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	400.000.000,00	Biro Humas dan Protokol
		-						52.682.867.469,00					-		53.057.985.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	16.382.867.469,00						36 Laporan	16.757.985.808,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						285.050.000,00							285.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	285.050.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	285.050.000,00	Biro Humas dan Protokol
		Sekretariat DPRD						453.951.689.653,20							459.689.892.522,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						453.951.689.653,20							459.689.892.522,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						453.951.689.653,20							459.689.892.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
222.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						260.073.302.554,20							203.647.380.000,00	
			-	-		-	-	260.073.302.554,20						-	203.647.380.000,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.855.000.000,00					-		1.898.500.000,00	
		-						1.855.000.000,00					-		1.898.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.720.000.000,00						6 Laporan	1.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	33.000.000,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.720.000.000,00							1.750.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.720.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.750.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	33.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.343.681.754,00					-		8.106.880.000,00	
		-						18.343.681.754,00					-		8.106.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	81.880.000,00						2 Dokumen	81.880.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/ Bulan		162 Orang/ Bulan	162 Orang/ Bulan	18.236.801.754,00						162 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.236.801.754,00							8.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/ Bulan		162 Orang/ Bulan	162/14 Orang/ Bulan	18.236.801.754,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		162 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						81.880.000,00							81.880.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	81.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	81.880.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.250.000.000,00					-		1.440.000.000,00	
		-						1.250.000.000,00					-		1.440.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00						1 Laporan	440.000.000,00	
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						850.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						400.000.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	440.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						650.000.000,00					-		735.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		735.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	17.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang		104 Orang	104 Orang	620.000.000,00						104 Orang	700.000.000,00	
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						15.000.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						15.000.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						620.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang		104 Orang	103 Orang	620.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		104 Orang	700.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.236.440.000,00					-		60.410.000.000,00	
		-						89.236.440.000,00					-		60.410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.245.000.000,00						14 Dokumen	1.450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	670.000.000,00						3 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	400 Laporan		300 Laporan	400 Laporan	10.000.000.000,00						400 Laporan	11.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.696.440.000,00						100 Paket	5.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	950.000.000,00						5 Paket	1.050.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	600.000.000,00						4 Paket	660.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		20 Paket	15 Paket	41.275.000.000,00						15 Paket	20.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		40 Paket	20 Paket	29.750.000.000,00						20 Paket	20.000.000.000,00	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						600.000.000,00							660.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	660.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.275.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		20 Paket	12 Paket	41.275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	20.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						29.750.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		40 Paket	24 Paket	29.750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Paket	20.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.696.440.000,00							5.500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	20 Paket	4.696.440.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	5.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						950.000.000,00							1.050.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	950.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	1.050.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.245.000.000,00							1.450.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	1.245.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Dokumen	1.450.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000.000,00							11.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	400 Laporan		300 Laporan	50 Laporan	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Laporan	11.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						670.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	670.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	700.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						160.000.000,00					-		0,00	
		-						160.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	160.000.000,00						Unit	0,00	
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						160.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	4 Unit	160.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						29.510.415.800,00					-		30.610.000.000,00	
		-						29.510.415.800,00					-		30.610.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.637.000.000,00						12 Laporan	5.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.868.415.800,00						12 Laporan	25.604.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	6.000.000,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.637.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.637.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	5.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.868.415.800,00							25.604.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.868.415.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	25.604.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.072.120.000,20					-		48.700.000.000,00	
		-						47.072.120.000,20					-		48.700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit		23 Unit	23 Unit	34.230.000.000,20						23 Unit	35.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	3.011.020.000,00						46 Unit	3.400.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	9.831.100.000,00						100 Unit	10.300.000.000,00	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.011.020.000,00							3.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	3.011.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Unit	3.400.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						34.230.000.000,20							35.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit		23 Unit	23 Unit	34.230.000.000,20	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Unit	35.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.831.100.000,00							10.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	9.831.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	10.300.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						68.755.645.000,00					-		69.212.500.000,00	
		-						68.755.645.000,00					-		69.212.500.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	63.693.145.000,00						75 Orang/ Bulan	63.900.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang		75 Orang	75 Orang	562.500.000,00						75 Orang	562.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.500.000.000,00						2 Paket	4.750.000.000,00	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						63.693.145.000,00							63.900.000.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75/14 Orang/ Bulan	63.693.145.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		75 Orang/ Bulan	63.900.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						4.500.000.000,00							4.750.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	4.750.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						562.500.000,00							562.500.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang		75 Orang	75 Orang	562.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	562.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD						3.340.000.000,00					-		3.340.000.000,00	
		-						3.340.000.000,00					-		3.340.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00						5 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket		144 Paket	144 Paket	3.240.000.000,00						144 Paket	3.240.000.000,00	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						3.240.000.000,00							3.240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket		144 Paket	144 Paket	3.240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Paket	3.240.000.000,00	Sekretariat DPRD
223.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						185.453.387.099,00							231.997.012.522,00	
			-	-		-	-	185.453.387.099,00						-	231.997.012.522,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						3.592.600.000,00					-		15.555.000.000,00	
		-						3.592.600.000,00					-		15.555.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	767.600.000,00						3 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	18750 Orang		18750 Orang	18750 Orang	2.625.000.000,00						18750 Orang	13.950.000.000,00	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda						767.600.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	767.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						50.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						2.625.000.000,00							13.950.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	18750 Orang		18750 Orang	3750 Orang	2.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18750 Orang	13.950.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						300.000.000,00					-		350.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						2.725.000.000,00					-		2.725.000.000,00	
		-						2.725.000.000,00					-		2.725.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.625.000.000,00						1 Laporan	2.625.000.000,00	
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						2.625.000.000,00							2.625.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.625.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						50.436.661.669,00					-		69.512.000.000,00	
		-						50.436.661.669,00					-		69.512.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.492.411.669,00						2 Dokumen	10.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.600.000.000,00						6 Dokumen	3.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 Dokumen		50 Dokumen	40 Dokumen	34.072.250.000,00						40 Dokumen	51.740.000.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang		55 Orang	55 Orang	3.888.000.000,00						55 Orang	3.888.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang		8 Orang	8 Orang	384.000.000,00						8 Orang	384.000.000,00	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						9.492.411.669,00							10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	9.492.411.669,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	10.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						3.888.000.000,00							3.888.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang		55 Orang	54 Orang	3.888.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Orang	3.888.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						384.000.000,00							384.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang		8 Orang	8 Orang	384.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Orang	384.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						2.600.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	18 Dokumen	2.600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						34.072.250.000,00							51.740.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 Dokumen		50 Dokumen	38 Dokumen	34.072.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Dokumen	51.740.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						42.560.000.000,00					-		42.765.000.000,00	
		-						42.560.000.000,00					-		42.765.000.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	39.825.000.000,00						2 Dokumen	39.825.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3750 Orang		3750 Orang	3750 Orang	2.625.000.000,00						3750 Orang	2.790.000.000,00	
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						110.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses						39.825.000.000,00							39.825.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	39.825.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	39.825.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						2.625.000.000,00							2.790.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3750 Orang		3750 Orang	3750 Orang	2.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3750 Orang	2.790.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						2.625.000.000,00					-		2.790.000.000,00	
		-						2.625.000.000,00					-		2.790.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.625.000.000,00						1 Dokumen	2.790.000.000,00	
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						2.625.000.000,00							2.790.000.000,00	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.790.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						91.539.125.430,00					-		101.540.012.522,00	
		-						91.539.125.430,00					-		101.540.012.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	91.539.125.430,00						3 Dokumen	101.540.012.522,00	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						91.539.125.430,00							101.540.012.522,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	91.539.125.430,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	101.540.012.522,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						59.351.156.206,00							87.125.151.827,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59.351.156.206,00							87.125.151.827,00	
	5.01	PERENCANAAN						59.351.156.206,00							87.125.151.827,00	
224.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						43.473.101.700,00							75.529.291.870,00	
		Tercapainya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah						4.558.000.000,00							28.403.800.000,00	
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						393.000.000,00					-		427.300.000,00	
		-						393.000.000,00					-		427.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00						1 Dokumen	96.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	60.500.000,00	
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						55.000.000,00							60.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	60.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						88.000.000,00							96.800.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	96.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.800.000.000,00					-		26.220.000.000,00	
		-						4.800.000.000,00					-		26.220.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	500.000.000,00						2 Paket	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	25.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		2 Paket	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							25.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	25.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.265.000.000,00					-		2.471.500.000,00	
		-						2.265.000.000,00					-		2.471.500.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	352.000.000,00						1 Unit	387.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	286.000.000,00						1 Unit	314.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		0 Unit	8 Unit	200.000.000,00						8 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		0 Unit	15 Unit	80.000.000,00						15 Unit	88.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit		126 Unit	126 Unit	847.000.000,00						126 Unit	931.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	220.000.000,00	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		0 Unit	8 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						286.000.000,00							314.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	286.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	314.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		0 Unit	15 Unit	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	88.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						847.000.000,00							931.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit		126 Unit	126 Unit	847.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		126 Unit	931.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						352.000.000,00							387.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	352.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	387.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tercapainya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian						41.466.651.700,00							47.272.196.870,00	
		-						34.822.636.700,00					-		38.304.900.370,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	415.000.000,00						5 Dokumen	416.500.000,00	
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						415.000.000,00							416.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	415.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	416.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.509.015.000,00					-		1.394.916.500,00	
		-						1.509.015.000,00					-		1.394.916.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	2 Orang		Orang	2 Orang	50.000.000,00						2 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.015.000,00						1 Dokumen	64.916.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	279 Orang		279 Orang	279 Orang	500.000.000,00						279 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	150.000.000,00						135 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket		Paket	400 Paket	400.000.000,00						400 Paket	440.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	100.000.000,00						3 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00						3 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	55.000.000,00	
	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						400.000.000,00							440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket		Paket	400 Paket	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		400 Paket	440.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						59.015.000,00							64.916.500,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.015.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	64.916.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang		0 Orang	3 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Orang	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	2 Orang		Orang	2 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Orang	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		135 Orang	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	279 Orang		279 Orang	279 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		279 Orang	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						4.249.000.000,00					-		4.723.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.000.000,00						4 Dokumen	24.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00						1 Dokumen	121.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		120 Laporan	120 Laporan	1.000.000.000,00						120 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	500.000.000,00						110 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	192.500.000,00						16 Paket	211.750.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		20 Paket	Paket	110.000.000,00						Paket	121.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.000.000.000,00						5 Paket	2.200.000.000,00	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		20 Paket	20 Paket	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		Paket	121.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		5 Paket	2.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		110 Paket	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						192.500.000,00							211.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	192.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Paket	211.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						22.000.000,00							24.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	22.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	24.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		120 Laporan	120 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		120 Laporan	1.100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	121.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.146.000.000,00					-		3.684.480.000,00	
		-						2.146.000.000,00					-		3.684.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.069.200.000,00						1 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	968.000.000,00						1 Laporan	1.064.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00						1 Laporan	9.680.000,00	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.800.000,00							9.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	9.680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.069.200.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.069.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	2.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						968.000.000,00							1.064.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	968.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.064.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah						34.771.086.700,00							38.248.195.370,00	
		-						442.450.000,00					-		486.695.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00						1 Dokumen	9.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00						1 Dokumen	9.075.000,00	
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.250.000,00							9.075.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	9.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.250.000,00							9.075.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	9.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.822.636.700,00					-		38.304.900.370,00	
		-						34.822.636.700,00					-		38.304.900.370,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00						6 Dokumen	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	220.000.000,00						5 Dokumen	242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	45.650.000,00						3 Laporan	50.215.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/ Bulan		159 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan	33.941.986.700,00						179 Orang/ Bulan	37.376.185.370,00	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						33.941.986.700,00							37.376.185.370,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/ Bulan		159 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan	33.941.986.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		179 Orang/ Bulan	37.376.185.370,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	242.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						45.650.000,00							50.215.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	45.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	50.215.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah						4.187.450.000,00							4.656.195.000,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						442.450.000,00					-		486.695.000,00	
		-						442.450.000,00					-		486.695.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	55.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	55.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.500.000,00						2 Dokumen	18.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.250.000,00						1 Dokumen	21.175.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.700.000,00						1 Dokumen	20.570.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	35.750.000,00						2 Laporan	39.325.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	35.750.000,00						4 Laporan	39.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		Substansi	1 Substansi	50.000.000,00						1 Substansi	55.000.000,00	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.500.000,00							18.150.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	16.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	18.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						18.700.000,00							20.570.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.570.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						19.250.000,00							21.175.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	21.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.750.000,00							39.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	35.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	39.325.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.750.000,00							39.325.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	35.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	39.325.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Data	1 Data	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Data	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		Substansi	1 Substansi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Substansi	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.249.000.000,00					-		4.723.900.000,00	
		-						4.249.000.000,00					-		4.723.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	214.500.000,00						16 Dokumen	235.950.000,00	
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						214.500.000,00							235.950.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	214.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Dokumen	235.950.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
225.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.594.503.506,00							4.868.953.857,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Dukungan Data yang berkualitas dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan						2.964.503.506,00							3.060.953.857,00	
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						650.000.000,00					-		1.265.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		1.265.000.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku		3 Buku	3 Buku	300.000.000,00						3 Buku	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	715.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang		0 Orang	3 Orang	100.000.000,00						3 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Orang		0 Orang	3 Orang	100.000.000,00						3 Orang	110.000.000,00	
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						150.000.000,00							715.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	715.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang		0 Orang	3 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Orang	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Orang		0 Orang	3 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Orang	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku		3 Buku	3 Buku	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Buku	330.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional di Provinsi						4.444.503.506,00							4.153.953.857,00	
		-						2.714.503.506,00					-		2.235.953.857,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.664.503.506,00						2 Dokumen	1.080.953.857,00	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						1.664.503.506,00							1.080.953.857,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.664.503.506,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	1.080.953.857,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.730.000.000,00					-		1.918.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Provinsi						4.444.503.506,00							4.153.953.857,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.714.503.506,00					-		2.235.953.857,00	
		-						2.714.503.506,00					-		2.235.953.857,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	220.000.000,00	
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.730.000.000,00					-		1.918.000.000,00	
		-						1.730.000.000,00					-		1.918.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00						4 Dokumen	1.320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						1.200.000.000,00							1.320.000.000,00	
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	1.320.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah						2.714.503.506,00							2.235.953.857,00	
		-						2.714.503.506,00					-		2.235.953.857,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00						2 Berita Acara	330.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	550.000.000,00						1 Berita Acara	605.000.000,00	
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Berita Acara	330.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	605.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah						1.730.000.000,00							1.918.000.000,00	
		-						1.730.000.000,00					-		1.918.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama		1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	80.000.000,00						1 Kerja Sama	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00						3 Laporan	400.000.000,00	
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama		1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Kerja Sama	88.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
226.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.529.551.000,00							1.682.506.100,00	
		Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Proviinsi						1.529.551.000,00							1.682.506.100,00	
		-						1.419.551.000,00					-		1.561.506.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.110.000.000,00					-		1.221.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.100.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah						1.529.551.000,00							1.682.506.100,00	
		-						1.419.551.000,00					-		1.561.506.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	419.551.000,00						7 Laporan	461.506.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	165.000.000,00	
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	165.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						419.551.000,00							461.506.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	419.551.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	461.506.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.110.000.000,00					-		1.221.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00						1 Laporan	396.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						360.000.000,00							396.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	396.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.100.000.000,00					-		1.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00						3 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00						3 Laporan	165.000.000,00	
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	165.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah						1.529.551.000,00							1.682.506.100,00	
		-						1.419.551.000,00					-		1.561.506.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.110.000.000,00					-		1.221.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						1.100.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Pengendalian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah						1.529.551.000,00							1.682.506.100,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.419.551.000,00					-		1.561.506.100,00	
		-						1.419.551.000,00					-		1.561.506.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	110.000.000,00	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.110.000.000,00					-		1.221.000.000,00	
		-						1.110.000.000,00					-		1.221.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	220.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						1.100.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
		-						1.100.000.000,00					-		1.210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00						2 Dokumen	275.000.000,00	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						3.148.552.175.353,00							3.188.723.865.534,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.113.704.228.353,00							3.151.844.109.534,00	
	5.02	KEUANGAN						3.113.704.228.353,00							3.151.844.109.534,00	
227.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						76.776.449.200,00							38.262.544.820,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						76.776.449.200,00							38.262.544.820,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.806.289.200,00					-		3.086.918.120,00	
		-						2.806.289.200,00					-		3.086.918.120,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	100.000.000,00						1 Data	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00						1 Dokumen	181.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00						4 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.000.000,00						2 Dokumen	181.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	137.500.000,00						2 Dokumen	151.250.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000,00						1 Dokumen	151.250.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	237.600.000,00						4 Laporan	261.360.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.413.689.200,00						10 Laporan	1.555.058.120,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						137.500.000,00							151.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	151.250.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						137.500.000,00							151.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	137.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	151.250.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						165.000.000,00							181.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	181.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						165.000.000,00							181.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	181.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						237.600.000,00							261.360.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	237.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	261.360.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.413.689.200,00							1.555.058.120,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.413.689.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	1.555.058.120,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	110.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	165.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.193.928.000,00					-		2.413.320.800,00	
		-						2.193.928.000,00					-		2.413.320.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	308.000.000,00						2 Dokumen	338.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.000.000,00						12 Dokumen	205.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	187.000.000,00						2 Dokumen	205.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	1.291.928.000,00						60 Dokumen	1.421.120.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	220.000.000,00						2 Laporan	242.000.000,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.291.928.000,00							1.421.120.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	1.291.928.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Dokumen	1.421.120.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						187.000.000,00							205.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	205.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	242.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						308.000.000,00							338.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	308.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	338.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						187.000.000,00							205.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	187.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	205.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.336.932.300,00					-		1.470.625.530,00	
		-						1.336.932.300,00					-		1.470.625.530,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	297.000.000,00						1 Dokumen	326.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	539.432.300,00						1 Laporan	593.375.530,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	181.500.000,00						4 Laporan	199.650.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.000.000,00						4 Laporan	157.300.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	176.000.000,00						1 Dokumen	193.600.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						176.000.000,00							193.600.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	176.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	193.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						297.000.000,00							326.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	297.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	326.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						539.432.300,00							593.375.530,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	539.432.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	593.375.530,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						143.000.000,00							157.300.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	157.300.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						181.500.000,00							199.650.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	181.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	199.650.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.370.000.000,00					-		1.447.000.000,00	
		-						1.370.000.000,00					-		1.447.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	220.000.000,00						13 Dokumen	242.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	330.000.000,00						3 Dokumen	363.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000.000,00						1 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	220.000.000,00						50 Orang	242.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	600.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						330.000.000,00							363.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	363.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Dokumen	242.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						220.000.000,00							242.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	242.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						13.177.488.980,00					-		14.495.237.878,00	
		-						13.177.488.980,00					-		14.495.237.878,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00						1 Dokumen	121.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	880.000.000,00						8 Dokumen	968.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	330.000.000,00						12 Dokumen	363.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	506.000.000,00						12 Laporan	556.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	1.650.000.000,00						500 Laporan	1.815.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.365.000.000,00						1 Paket	2.601.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.188.000.000,00						1 Paket	1.306.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.375.000.000,00						5 Paket	1.512.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.773.488.980,00						1 Paket	5.250.837.878,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.375.000.000,00							1.512.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	1.512.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.773.488.980,00							5.250.837.878,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.773.488.980,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.250.837.878,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.365.000.000,00							2.601.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.365.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.601.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.188.000.000,00							1.306.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.188.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.306.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						110.000.000,00							121.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	121.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						506.000.000,00							556.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	506.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	556.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.650.000.000,00							1.815.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	1.650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Laporan	1.815.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						330.000.000,00							363.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	363.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						880.000.000,00							968.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	880.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	968.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						43.345.000.000,00					-		3.149.500.000,00	
		-						43.345.000.000,00					-		3.149.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	1.045.000.000,00						0 Paket	1.149.500.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	39.000.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		4 Unit	0 Unit	2.500.000.000,00						0 Unit	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	800.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		4 Unit	6 Unit	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.045.000.000,00							1.149.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	1.045.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	1.149.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						39.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	39.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						800.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.091.582.000,00					-		4.500.740.200,00	
		-						4.091.582.000,00					-		4.500.740.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.621.400.000,00						36 Laporan	1.783.540.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.415.182.000,00						12 Laporan	2.656.700.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00						12 Laporan	60.500.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						55.000.000,00							60.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	60.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.621.400.000,00							1.783.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.621.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	1.783.540.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.415.182.000,00							2.656.700.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.415.182.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.656.700.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.926.978.720,00					-		12.584.652.292,00	
		-						10.926.978.720,00					-		12.584.652.292,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.458.298.720,00						5 Unit	5.786.054.292,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	1.212.250.000,00						40 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.212.250.000,00						6 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.044.180.000,00						10 Unit	2.798.598.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.212.250.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.212.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.212.250.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	1.212.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.044.180.000,00							2.798.598.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.044.180.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	2.798.598.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.458.298.720,00							5.786.054.292,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.458.298.720,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	5.786.054.292,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
228.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.026.846.669.153,00							3.100.325.818.714,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan						3.026.846.669.153,00							3.100.325.818.714,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						8.228.500.000,00					-		9.036.350.000,00	
		-						8.228.500.000,00					-		9.036.350.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	446.000.000,00						4 Dokumen	485.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000,00						4 Dokumen	423.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000.000,00						1 Dokumen	4.730.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.320.000.000,00						17 Dokumen	1.452.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	962.500.000,00						17 Dokumen	1.058.750.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	380.000.000,00						40 Dokumen	413.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	435.000.000,00						40 Dokumen	473.500.000,00	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						446.000.000,00							485.600.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	446.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	485.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						385.000.000,00							423.500.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	423.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						435.000.000,00							473.500.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	435.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Dokumen	473.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						380.000.000,00							413.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	380.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Dokumen	413.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						1.320.000.000,00							1.452.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Dokumen	1.452.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						962.500.000,00							1.058.750.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	962.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Dokumen	1.058.750.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						4.300.000.000,00							4.730.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.730.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						3.212.640.000,00					-		3.503.904.000,00	
		-						3.212.640.000,00					-		3.503.904.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00						1 Dokumen	363.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	265.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	578.000.000,00						17 Laporan	630.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.100.000.000,00						17 Laporan	1.210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	633.000.000,00						17 Laporan	691.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Orang		17 Orang	17 Orang	321.640.000,00						17 Orang	343.804.000,00	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						633.000.000,00							691.300.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	633.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	691.300.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						1.100.000.000,00							1.210.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	1.210.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						578.000.000,00							630.800.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	578.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	630.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						330.000.000,00							363.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	-	-	-	-		1 Dokumen	363.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						250.000.000,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	265.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						321.640.000,00							343.804.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Orang		17 Orang	17 Orang	321.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Orang	343.804.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						2.128.700.000,00					-		2.336.570.000,00	
		-						2.128.700.000,00					-		2.336.570.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	550.000.000,00						36 Dokumen	605.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	275.500.000,00						18 Dokumen	298.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000,00						4 Dokumen	423.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen		538 Dokumen	538 Dokumen	618.200.000,00						538 Dokumen	680.020.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	330.000.000,00	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Dokumen	605.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	330.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						275.500.000,00							298.050.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	275.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Dokumen	298.050.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						385.000.000,00							423.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	423.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						618.200.000,00							680.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen		538 Dokumen	538 Dokumen	618.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		538 Dokumen	680.020.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1.979.970.000,00					-		2.162.967.000,00	
		-						1.979.970.000,00					-		2.162.967.000,00	
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	135.470.000,00						10 Lembaga	144.017.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	550.000.000,00						16 Dokumen	605.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00						1 Laporan	220.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00						1 Laporan	484.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.500.000,00						12 Laporan	116.550.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	539.000.000,00						2 Dokumen	592.900.000,00	
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						205.000.000,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	220.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Dokumen	605.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						110.500.000,00							116.550.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	116.550.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						440.000.000,00							484.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	484.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						539.000.000,00							592.900.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	539.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	592.900.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi						135.470.000,00							144.017.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	135.470.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	144.017.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						3.012.231.859.153,00					-		3.084.314.527.714,00	
		-						3.012.231.859.153,00					-		3.084.314.527.714,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	146.470.000,00						1 Laporan	156.117.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	813.240.562.359,00						34 Laporan	832.861.857.776,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.148.844.826.794,00						18 Laporan	2.201.296.552.938,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000.000,00						4 Laporan	50.000.000.000,00	
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah						146.470.000,00							156.117.000,00	
		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	146.470.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	156.117.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						813.240.562.359,00							832.861.857.776,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	813.240.562.359,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		34 Laporan	832.861.857.776,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						50.000.000.000,00							50.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						2.148.844.826.794,00							2.201.296.552.938,00	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.148.844.826.794,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Laporan	2.201.296.552.938,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
229.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						6.674.360.000,00							7.341.796.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.674.360.000,00							7.341.796.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.674.360.000,00					-		7.341.796.000,00	
		-						6.674.360.000,00					-		7.341.796.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen		51 Dokumen	51 Dokumen	1.105.500.000,00						51 Dokumen	1.216.050.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	297.000.000,00						3 Laporan	326.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.642.360.000,00						17 Laporan	1.801.596.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	1.561.500.000,00						30 Laporan	1.722.650.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	407.000.000,00						60 Laporan	447.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	660.000.000,00						5 Laporan	726.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	550.000.000,00						53 Laporan	605.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	71.500.000,00						41 Dokumen	78.650.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	379.500.000,00						4 Dokumen	417.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga						379.500.000,00							417.450.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	379.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	417.450.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						71.500.000,00							78.650.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	71.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Dokumen	78.650.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						550.000.000,00							605.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53 Laporan	605.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						1.642.360.000,00							1.801.596.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	1.642.360.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Laporan	1.801.596.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						407.000.000,00							447.700.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	407.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Laporan	447.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.561.500.000,00							1.722.650.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	1.561.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Laporan	1.722.650.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1.105.500.000,00							1.216.050.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen		51 Dokumen	51 Dokumen	1.105.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		51 Dokumen	1.216.050.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						660.000.000,00							726.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	660.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	726.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						297.000.000,00							326.700.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	297.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	326.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	X							34.847.947.000,00							36.879.756.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						34.847.947.000,00							36.879.756.000,00	
230.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.847.947.000,00							36.879.756.000,00	
			-	-		-	-	34.847.947.000,00						-	36.879.756.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.847.947.000,00					-		36.879.756.000,00	
		-						34.847.947.000,00					-		36.879.756.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	198.000.000,00						2 Laporan	217.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang/ Bulan		217 Orang/ Bulan	217 Orang/ Bulan	34.649.947.000,00						217 Orang/ Bulan	36.661.956.000,00	
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						34.649.947.000,00							36.661.956.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang/ Bulan		217 Orang/ Bulan	217 Orang/ Bulan	34.649.947.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		217 Orang/ Bulan	36.661.956.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						198.000.000,00							217.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	198.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	217.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						278.848.747.291,00							295.809.069.033,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						278.848.747.291,00							295.809.069.033,00	
	5.02	KEUANGAN						278.848.747.291,00							295.809.069.033,00	
231.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						269.499.155.371,00							286.529.169.033,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						269.499.155.371,00							286.529.169.033,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						450.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		700.000.000,00	
		-						450.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						172.935.565.625,00					Badan Pendapatan Daerah		179.847.820.313,00	
		-						172.935.565.625,00					Badan Pendapatan Daerah		179.847.820.313,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	705.800.000,00						4 Dokumen	755.800.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00						1 Laporan	182.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	623 Orang/ Bulan		623 Orang/ Bulan	623 Orang/ Bulan	172.074.765.625,00						623 Orang/ Bulan	178.909.420.313,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						172.074.765.625,00							178.909.420.313,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	623 Orang/ Bulan		623 Orang/ Bulan	632 Orang/ Bulan	172.074.765.625,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		623 Orang/ Bulan	178.909.420.313,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						705.800.000,00							755.800.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	705.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	755.800.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						155.000.000,00							182.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	182.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						60.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		66.000.000,00	
		-						60.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		66.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	66.000.000,00	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						60.000.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	66.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						648.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		758.000.000,00	
		-						648.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		758.000.000,00	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00						1 Dokumen	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	499.000.000,00						1 Laporan	549.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00						1 Laporan	54.000.000,00	
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah						105.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	155.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						499.000.000,00							549.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	499.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	549.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						44.000.000,00							54.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	54.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.469.400.000,00					Badan Pendapatan Daerah		1.622.540.000,00	
		-						1.469.400.000,00					Badan Pendapatan Daerah		1.622.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.400.000,00						1 Dokumen	34.540.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		200 Orang	300 Orang	938.000.000,00						300 Orang	1.038.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	500.000.000,00						35 Orang	550.000.000,00	
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						31.400.000,00							34.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	34.540.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	200 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		35 Orang	550.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						938.000.000,00							1.038.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		200 Orang	200 Orang	938.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Orang	1.038.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					Badan Pendapatan Daerah		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					Badan Pendapatan Daerah		36.342.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00						3 Dokumen	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	202.000.000,00						1 Laporan	222.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000.000,00						1 Paket	1.980.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00						1 Paket	1.150.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000.000,00							575.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Paket	575.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.800.000.000,00							1.980.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	1.980.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000.000,00							1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	1.150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.850.000.000,00							2.035.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.035.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.400.000.000,00							8.140.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	7.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	8.140.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	88.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						202.000.000,00							222.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	202.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	222.200.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.302.000.000,00							1.432.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.302.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	1.432.200.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						42.266.531.346,00					Badan Pendapatan Daerah		45.493.184.480,00	
		-						42.266.531.346,00					Badan Pendapatan Daerah		45.493.184.480,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00						1 Paket	1.650.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	400.000.000,00						10 Unit	440.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	27.366.531.346,00						1 Unit	30.103.184.480,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	8.900.000.000,00						4 Unit	9.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.100.000.000,00						2 Unit	4.300.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4.100.000.000,00							4.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	4 Unit	4.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	4.300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.900.000.000,00							9.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	8 Unit	8.900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	9.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.500.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	1.650.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						400.000.000,00							440.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	4 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	440.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						27.366.531.346,00							30.103.184.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	27.366.531.346,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	30.103.184.480,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					Badan Pendapatan Daerah		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					Badan Pendapatan Daerah		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	252.000.000,00						1 Laporan	277.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00						1 Laporan	57.200.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						52.000.000,00							57.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	57.200.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.257.000.000,00							3.582.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.257.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	3.582.700.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						252.000.000,00							277.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	252.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	277.200.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						26.034.658.400,00							28.638.124.240,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	26.034.658.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Laporan	28.638.124.240,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					Badan Pendapatan Daerah		14.077.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.990.000.000,00						2 Unit	4.389.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.800.000.000,00							3.080.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	4 Unit	2.800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	3.080.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.950.000.000,00							2.145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	4 Unit	1.950.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		29 Unit	2.145.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.990.000.000,00							4.389.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	12 Unit	3.990.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	4.389.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
232.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						267.000.000,00							317.000.000,00	
			Persentase penerimaan dana transfer.	-		-	97 %	267.000.000,00						-	317.000.000,00	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						267.000.000,00					Masyarakat Wajib Pajak		317.000.000,00	
		-						267.000.000,00					Masyarakat Wajib Pajak		317.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	267.000.000,00						3 Laporan	317.000.000,00	
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						267.000.000,00							317.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	267.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	317.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
233.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						7.882.591.920,00							8.712.900.000,00	
		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD						7.882.591.920,00							8.712.900.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						7.882.591.920,00					Masyarakat Wajib Pajak		8.712.900.000,00	
		-						7.882.591.920,00					Masyarakat Wajib Pajak		8.712.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	20.000.000,00						1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan		1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	177.000.000,00						1 Dokumen Ketetapan	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	839.200.000,00						1 Dokumen	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	29 Dokumen SSPD		29 Dokumen SSPD	29 Dokumen SSPD	884.791.920,00						29 Dokumen SSPD	974.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.500.000,00						12 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	107.000.000,00						2 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.625.000.000,00						2 Laporan	1.787.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	399.600.000,00						29 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	302.500.000,00						2 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000,00						3 Laporan	2.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.152.000.000,00						1 Laporan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	274.000.000,00						1 Laporan	301.400.000,00	
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						839.200.000,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	839.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	950.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						1.152.000.000,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.152.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						2.000.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	2.200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1.625.000.000,00							1.787.500.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	1.625.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	1.787.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						302.500.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	302.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	330.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						177.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan		1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	177.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen Ketetapan	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						101.500.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	101.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	125.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						884.791.920,00							974.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	29 Dokumen SSPD		29 Dokumen SSPD	29 Dokumen SSPD	884.791.920,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		29 Dokumen SSPD	974.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	25.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						399.600.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	399.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		29 Laporan	450.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						107.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	107.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						274.000.000,00							301.400.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	274.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	301.400.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
234.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.914.600.000,00						1 Dokumen	18.000.000.000,00	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						17.914.600.000,00							18.000.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.914.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	18.000.000.000,00	UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi
		UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I						648.000.000,00							678.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						648.000.000,00							678.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						648.000.000,00							678.000.000,00	
235.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						523.000.000,00							541.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						523.000.000,00							541.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	21.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						325.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	330.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	21.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang I
		UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II						623.000.000,00							706.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						623.000.000,00							706.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						623.000.000,00							706.000.000,00	
236.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						498.000.000,00							565.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						498.000.000,00							565.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	350.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang II
		UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III						773.000.000,00							811.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						773.000.000,00							811.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						773.000.000,00							811.000.000,00	
237.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						648.000.000,00							670.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						648.000.000,00							670.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						450.000.000,00							455.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	455.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang III
		UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
238.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Palembang IV
		UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
239.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
240.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							470.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							470.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	255.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Banyuasin II
		UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
241.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
242.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							470.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							470.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	255.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Banyuasin II
		UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
243.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II						523.000.000,00							561.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						523.000.000,00							561.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						523.000.000,00							561.000.000,00	
244.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						398.000.000,00							420.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						398.000.000,00							420.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	205.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Muara Enim II
		UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
245.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
246.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Ogan Ilir II
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
247.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI I
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II						573.000.000,00							660.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							660.500.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							660.500.000,00	
248.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							470.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							470.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	255.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKI II
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I						323.000.000,00							391.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							391.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							391.000.000,00	
249.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							301.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							301.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	7.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							143.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	143.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU I
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II						523.000.000,00							655.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						523.000.000,00							655.500.000,00	
	5.02	KEUANGAN						523.000.000,00							655.500.000,00	
250.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						398.000.000,00							590.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						398.000.000,00							590.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	35.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	6.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							143.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	143.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	250.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	60.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU II
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I						373.000.000,00							445.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						373.000.000,00							445.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						373.000.000,00							445.000.000,00	
251.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							294.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							294.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							143.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	143.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT I
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II						573.000.000,00							665.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							665.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							665.000.000,00	
252.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							659.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							659.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	30.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							143.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	143.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	275.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	65.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	60.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKUT II
		UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan						653.000.000,00							691.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						653.000.000,00							691.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						653.000.000,00							691.000.000,00	
253.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						528.000.000,00							550.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						528.000.000,00							550.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						330.000.000,00							335.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	335.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. OKU Selatan
		UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						323.000.000,00							356.000.000,00	
254.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
255.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							470.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							470.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	255.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Lahat II
		UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang						373.000.000,00							411.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						373.000.000,00							411.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						373.000.000,00							411.000.000,00	
256.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Empat Lawang
		UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam						373.000.000,00							411.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						373.000.000,00							411.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						373.000.000,00							411.000.000,00	
257.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							215.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							215.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Pagar Alam
		UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I						423.000.000,00							461.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						423.000.000,00							461.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						423.000.000,00							461.000.000,00	
258.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						298.000.000,00							320.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						298.000.000,00							320.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	105.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas I
		UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						573.000.000,00							611.000.000,00	
259.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						448.000.000,00							470.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						448.000.000,00							470.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							255.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	255.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas II
		UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara						723.000.000,00							761.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						723.000.000,00							761.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						723.000.000,00							761.000.000,00	
260.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						598.000.000,00							620.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						598.000.000,00							620.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						400.000.000,00							405.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	405.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
		UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau						473.000.000,00							550.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						473.000.000,00							550.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						473.000.000,00							550.000.000,00	
261.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						348.000.000,00							434.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						348.000.000,00							434.000.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	6.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							143.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	143.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	175.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	30.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Lubuk Linggau
		UPTB PPD Wilayah Kab. PALI						373.000.000,00							410.300.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						373.000.000,00							410.300.000,00	
	5.02	KEUANGAN						373.000.000,00							410.300.000,00	
262.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							217.800.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							217.800.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	22.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							135.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	135.300.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	22.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kab. PALI
		UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih						373.000.000,00							428.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						373.000.000,00							428.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						373.000.000,00							428.000.000,00	
263.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.000.000,00							257.500.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						198.000.000,00							257.500.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						34.368.600.000,00					-		36.342.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.752.000.000,00						2 Laporan	3.047.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.430.000.000,00						4 Paket	2.765.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.545.000.000,00						4 Paket	8.303.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	645.000.000,00						30 Paket	786.500.000,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	22.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	5.500.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
		-						37.367.658.400,00					-		40.860.524.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.824.000.000,00						1 Laporan	7.443.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	30.239.658.400,00						13 Laporan	33.083.124.240,00	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
		-						12.620.000.000,00					-		14.077.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	3.400.000.000,00						29 Unit	3.765.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	4.250.000.000,00						37 Unit	4.700.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	980.000.000,00						2 Unit	1.223.000.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Unit	55.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	UPTB PPD Wilayah Kota Prabumulih
		Badan Kepegawaian Daerah						24.051.359.089,00							23.807.247.872,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						24.051.359.089,00							23.807.247.872,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						24.051.359.089,00							23.807.247.872,00	
264.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.859.790.325,00							21.371.061.358,00	
		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah						21.859.790.325,00							21.371.061.358,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						180.000.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		192.999.999,00	
		-						180.000.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		192.999.999,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00						1 Data	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	32.999.999,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00						3 Laporan	77.000.000,00	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							32.999.999,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	32.999.999,00	Badan Kepegawaiaan Daerah
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Badan Kepegawaiaan Daerah
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00							77.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	77.000.000,00	Badan Kepegawaiaan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Data	25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.664.646.326,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		18.971.151.859,00	
		-						18.664.646.326,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		18.971.151.859,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	297.720.000,00						1 Dokumen	297.720.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan		80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	18.366.926.326,00						80 Orang/ Bulan	18.673.431.859,00	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.366.926.326,00							18.673.431.859,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan		80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	18.366.926.326,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		80 Orang/ Bulan	18.673.431.859,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						297.720.000,00							297.720.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	297.720.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Dokumen	297.720.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						282.500.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		90.750.000,00	
		-						282.500.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		90.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	200.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	82.500.000,00						3 Orang	90.750.000,00	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						82.500.000,00							90.750.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	4 Orang	82.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		3 Orang	90.750.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		50 Orang	0,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.999.999,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		748.659.500,00	
		-						735.999.999,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		748.659.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00						1 Dokumen	18.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.854.999,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.645.000,00						1 Paket	20.509.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.645.000,00							20.509.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.645.000,00	-	-	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Paket	20.509.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	220.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	220.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						280.854.999,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	280.854.999,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						16.500.000,00							18.150.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	18.150.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						743.400.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		326.700.000,00	
		-						743.400.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		326.700.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	205.700.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	330.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	216.400.000,00						5 Unit	121.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	97.000.000,00						0 Unit	0,00	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						330.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	330.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							205.700.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	205.700.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						216.400.000,00							121.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	216.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		5 Unit	121.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						97.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	97.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						960.744.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		980.800.000,00	
		-						960.744.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		980.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	570.800.000,00						1 Laporan	570.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.944.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.944.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.944.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						380.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						570.800.000,00							570.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	570.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	570.800.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						747.500.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		705.000.000,00	
		-						747.500.000,00					ASN di BKD Prov. Sumsel		705.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	312.500.000,00						24 Unit	265.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	35.000.000,00						10 Unit	40.000.000,00	
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						312.500.000,00							265.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	312.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Unit	265.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	40.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
265.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.635.145.919,00							1.679.621.384,00	
			Nilai Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	-		-	89 Nilai	1.635.145.919,00						-	1.679.621.384,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						652.732.750,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		725.071.155,00	
		-						652.732.750,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		725.071.155,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	67.565.130,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.732.750,00						1 Dokumen	210.906.025,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	256.000.000,00						5 Dokumen	281.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00						1 Lembaga	165.000.000,00	
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						256.000.000,00							281.600.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	256.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	281.600.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Lembaga	165.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						191.732.750,00							210.906.025,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.732.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	210.906.025,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						55.000.000,00							67.565.130,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	67.565.130,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						562.413.169,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		495.550.230,00	
		-						562.413.169,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		495.550.230,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	45.245.200,00						1 Dokumen	45.245.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	455.745.124,00						1 Dokumen	382.739.900,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.422.845,00						1 Laporan	67.565.130,00	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						45.245.200,00							45.245.200,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	45.245.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	45.245.200,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						61.422.845,00							67.565.130,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.422.845,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	67.565.130,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						455.745.124,00							382.739.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	455.745.124,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	382.739.900,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						370.000.000,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		404.000.000,00	
		-						370.000.000,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		404.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500 Orang		500 Orang	500 Orang	40.000.000,00						500 Orang	44.000.000,00	
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	330.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						40.000.000,00							44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500 Orang		500 Orang	500 Orang	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		500 Orang	44.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						151.422.845,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		166.565.129,00	
		-						151.422.845,00					ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel		166.565.129,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang		600 Orang	600 Orang	50.000.000,00						600 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	14000 Orang		14000 Orang	14000 Orang	61.422.845,00						14000 Orang	67.565.129,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	44.000.000,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	44.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang		600 Orang	600 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		600 Orang	55.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						61.422.845,00							67.565.129,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	14000 Orang		14000 Orang	16000 Orang	61.422.845,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14000 Orang	67.565.129,00	Badan Kepegawaiaan Daerah
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						45.293.301.305,00							52.360.514.800,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						31.193.301.305,00							38.160.514.800,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						31.193.301.305,00							38.160.514.800,00	
266.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.371.261.305,00							32.842.294.800,00	
			-	-		-	-	27.371.261.305,00						-	32.842.294.800,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000.000,00					-		440.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	165.000.000,00	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	165.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	27.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	27.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	165.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.031.738.642,00					-		19.433.329.300,00	
		-						17.031.738.642,00					-		19.433.329.300,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	92.040.000,00						12 Dokumen	132.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan		119 Orang/ Bulan	119 Orang/ Bulan	16.939.698.642,00						119 Orang/ Bulan	19.301.329.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.939.698.642,00							19.301.329.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan		119 Orang/ Bulan	119 Orang/ Bulan	16.939.698.642,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		119 Orang/ Bulan	19.301.329.300,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						92.040.000,00							132.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	92.040.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	132.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		5 Orang	12 Orang	100.000.000,00						12 Orang	200.000.000,00	
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Orang	200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.547.225.000,00					-		1.363.975.000,00	
		-						1.547.225.000,00					-		1.363.975.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.500.000,00						4 Dokumen	19.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.725.000,00						1 Dokumen	225.725.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00						4 Laporan	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	760.000.000,00						20 Laporan	495.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	204.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	90.000.000,00						1 Paket	99.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	170.000.000,00						1 Paket	187.000.000,00	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						170.000.000,00							187.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	170.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	187.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						204.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	204.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						90.000.000,00							99.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	90.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	99.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						17.500.000,00							19.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.500.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	19.250.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	88.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						760.000.000,00							495.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	760.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Laporan	495.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						225.725.000,00							225.725.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	225.725.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	225.725.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						4.642.200.000,00					-		6.450.000.000,00	
		-						4.642.200.000,00					-		6.450.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.742.200.000,00						1 Unit	5.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	700.000.000,00						50 Unit	1.000.000.000,00	
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	450.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						700.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	700.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.742.200.000,00							5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	3.742.200.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	5.000.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.756.947.663,00					-		3.227.490.500,00	
		-						2.756.947.663,00					-		3.227.490.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.494.587.663,00						48 Laporan	1.641.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.242.360.000,00						4 Laporan	1.561.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.494.587.663,00							1.641.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.494.587.663,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Laporan	1.641.200.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.242.360.000,00							1.561.290.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.242.360.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	1.561.290.500,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.468.150.000,00					-		2.140.000.000,00	
		-						1.468.150.000,00					-		2.140.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	602.600.000,00						4 Unit	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	465.550.000,00						16 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	200.000.000,00						20 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00						10 Unit	220.000.000,00	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						465.550.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	465.550.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	50 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	220.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						602.600.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	10 Unit	602.600.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	1.200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	50 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	220.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
267.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.647.040.000,00							3.825.720.000,00	
			-	-		-	-	2.647.040.000,00						-	3.825.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						900.000.000,00					-		1.620.000.000,00	
		-						900.000.000,00					-		1.620.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	220 Orang		200 Orang	200 Orang	900.000.000,00						200 Orang	1.620.000.000,00	
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						900.000.000,00							1.620.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	220 Orang		200 Orang	200 Orang	900.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	1.620.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.347.040.000,00					-		3.285.720.000,00	
		-						2.347.040.000,00					-		3.285.720.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	60 Orang		70 Orang	60 Orang	300.000.000,00						60 Orang	540.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	330 Orang		304 Orang	325 Orang	1.447.040.000,00						240 Orang	1.665.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00						2 Laporan	540.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi						300.000.000,00							540.000.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	540.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						300.000.000,00							540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	60 Orang		70 Orang	60 Orang	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	540.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						300.000.000,00							540.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	540.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.447.040.000,00							1.665.720.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	330 Orang		304 Orang	240 Orang	1.447.040.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		240 Orang	1.665.720.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	X							14.100.000.000,00							14.200.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.100.000.000,00							14.200.000.000,00	
268.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.100.000.000,00							14.200.000.000,00	
			-	-		-	-	14.100.000.000,00						-	14.200.000.000,00	
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						14.100.000.000,00					-		14.200.000.000,00	
		-						14.100.000.000,00					-		14.200.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.100.000.000,00						1 Unit Kerja	14.200.000.000,00	
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						14.100.000.000,00							14.200.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	14.200.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Badan Riset dan Inovasi Daerah						33.292.651.918,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						33.292.651.918,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						33.292.651.918,00							0,00	
269.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						26.571.151.918,00							0,00	
			-	-		-	-	26.571.151.918,00						-	0,00	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						260.000.000,00					-		0,00	
		-						260.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	77.500.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	88.500.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						77.500.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	77.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						11.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						11.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						11.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						11.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						88.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	88.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.237.573.773,00					-		0,00	
		-						20.237.573.773,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.250.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/ Bulan		144 Orang/ Bulan	144 Orang/ Bulan	19.862.823.773,00						144 Orang/ Bulan	0,00	
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.862.823.773,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/ Bulan		144 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	19.862.823.773,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		144 Orang/ Bulan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						137.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						151.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						16.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						42.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						27.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						81.500.000,00					-		0,00	
		-						81.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						25.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						41.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						246.730.000,00					-		0,00	
		-						246.730.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	202.730.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	44.000.000,00						5 Orang	0,00	
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						202.730.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	202.730.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						44.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	44.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.244.400.000,00					-		0,00	
		-						1.244.400.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.400.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	207.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	88.500.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	0,00	
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						33.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						207.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	207.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						88.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	88.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						600.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.996.528.145,00					-		0,00	
		-						1.996.528.145,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.128.145,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	800.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	346.400.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	220.000.000,00						1 Unit	0,00	
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						800.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						130.128.145,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.128.145,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						346.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	346.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						220.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.305.920.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.305.920.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	588.500.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	710.270.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.150.000,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						588.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	588.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						710.270.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	710.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.520.000.000,00					-		0,00	
		-						1.520.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	200.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	Unit	80.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	Unit	315.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	Unit	375.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	200.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	350.000.000,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						315.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	18 Unit	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	21 Unit	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						375.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	35 Unit	375.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
270.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						2.150.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	2.150.000.000,00						-	0,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						1.100.000.000,00					-		0,00	
		-						1.100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000,00						1 Rekomendasi	0,00	
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						150.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Rekomendasi	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						700.000.000,00					-		0,00	
		-						700.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						200.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						1.500.000.000,00					-		0,00	
		-						1.500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						400.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						2.000.000.000,00					-		0,00	
		-						2.000.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						400.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						300.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
271.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						350.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						600.000.000,00					-		0,00	
		-						600.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	125.000.000,00						1 Pelatihan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	125.000.000,00						1 Naskah	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						125.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						125.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						125.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Naskah	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						125.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Pelatihan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	50.000.000,00						1 Naskah	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Naskah	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Penghubung						20.821.808.114,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.963.448.000,00							0,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						17.963.448.000,00							0,00	
272.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.036.448.000,00							0,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah						17.036.448.000,00							0,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.400.000,00					-		0,00	
		-						68.400.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		100 Dokumen	Dokumen	10.350.000,00						Dokumen	0,00	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.350.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		100 Dokumen	7 Dokumen	10.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.752.073.000,00					-		0,00	
		-						9.752.073.000,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	9.542.451.000,00						100 Orang/ Bulan	0,00	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.542.451.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan		100 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	9.542.451.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100 Orang/ Bulan	0,00	Badan Penghubung
		-						21.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	11.500.000,00						100 Dokumen	0,00	
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						11.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	0,00	Badan Penghubung
		-						500.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		Orang	100 Orang	130.000.000,00						100 Orang	0,00	
	5.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						130.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		Orang	20 Orang	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						163.875.000,00					-		0,00	
		-						163.875.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	163.875.000,00						100 Paket	0,00	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						163.875.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	163.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Unit		Unit	100 Unit	500.000.000,00						Unit	0,00	
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 Unit		Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.638.100.000,00					-		0,00	
		-						2.638.100.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	2.600.150.000,00						100 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	37.950.000,00						100 Laporan	0,00	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						37.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	37.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.600.150.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	2.600.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.392.500.000,00					-		0,00	
		-						3.392.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	2.702.500.000,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	230.000.000,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	460.000.000,00						100 Unit	0,00	
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.702.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	46 Unit	2.702.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						230.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	230.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						460.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	5 Unit	460.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Badan Penghubung
		-						68.400.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	8.050.000,00						-	0,00	
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	8.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
		-						9.752.073.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	209.622.000,00						-	0,00	
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						209.622.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	209.622.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						21.500.000,00					-		0,00	
		-						21.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000.000,00					-		0,00	
		-						500.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	70.000.000,00						-	0,00	
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penghubung
273.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						557.000.000,00							0,00	
			-	-		-	-	557.000.000,00						-	0,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						927.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						927.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	370.000.000,00						100 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	187.000.000,00						100 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	370.000.000,00						100 Laporan	0,00	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat						187.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	187.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya						370.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	370.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPelayanan Penghubung						370.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	370.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	X							2.858.360.114,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.858.360.114,00							0,00	
274.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.858.360.114,00							0,00	
			-	-		-	-	2.858.360.114,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.164.211.292,00					-		0,00	
		-						2.164.211.292,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.123.387.450,00						100 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	345.323.842,00						100 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	195.500.000,00						100 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		Paket	100 Paket	500.000.000,00						100 Paket	0,00	
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						500.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		Paket	1 Paket	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	0,00	Badan Penghubung
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						345.323.842,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	6 Paket	345.323.842,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	0,00	Badan Penghubung
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						195.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	2 Paket	195.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	0,00	Badan Penghubung
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.123.387.450,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	1.123.387.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						300.000.000,00					-		0,00	
		-						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		Unit	100 Unit	300.000.000,00						100 Unit	0,00	
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		Unit	4 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Badan Penghubung
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						394.148.822,00					-		0,00	
		-						394.148.822,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	394.148.822,00						100 Laporan	0,00	
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						394.148.822,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	394.148.822,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	0,00	Badan Penghubung
		Inspektorat						80.522.735.172,00							83.681.758.753,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						80.522.735.172,00							83.681.758.753,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						80.522.735.172,00							83.681.758.753,00	
275.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						64.290.323.243,00							67.635.226.226,00	
			-	-		-	-	64.290.323.243,00						-	67.635.226.226,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		-						1.200.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		0 Data	12 Data	50.000.000,00						12 Data	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						6 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00						6 Dokumen	157.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00						4 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						6 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00						6 Dokumen	157.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000,00							157.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	157.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						150.000.000,00							157.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	157.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		0 Data	12 Data	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Data	55.000.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.217.566.894,00					-		44.956.859.991,00	
		-						43.217.566.894,00					-		44.956.859.991,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00						12 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	63.111.048,00						12 Dokumen	66.266.600,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	395.931.126,00						12 Dokumen	415.727.682,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	200.000.000,00						6 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980 Orang/ Bulan		1965 Orang/ Bulan	1970 Orang/ Bulan	42.158.524.720,00						1975 Orang/ Bulan	43.844.865.709,00	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						42.158.524.720,00							43.844.865.709,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980 Orang/ Bulan		1965 Orang/ Bulan	1970 Orang/ Bulan	42.158.524.720,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1975 Orang/ Bulan	43.844.865.709,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						63.111.048,00							66.266.600,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	63.111.048,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	66.266.600,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						395.931.126,00							415.727.682,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	395.931.126,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	415.727.682,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						600.000.000,00					-		630.000.000,00	
		-						600.000.000,00					-		630.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						Dokumen	210.000.000,00	
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.390.927.560,00					-		3.950.157.392,00	
		-						3.390.927.560,00					-		3.950.157.392,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		50 Orang	50 Orang	384.871.200,00						55 Orang	404.114.760,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang		0 Orang	90 Orang	350.000.000,00						90 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	161 Paket		150 Paket	150 Paket	241.500.000,00						155 Paket	253.575.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	285 Orang		280 Orang	285 Orang	2.264.556.360,00						285 Orang	2.717.467.632,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		0 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	225.000.000,00	
	6.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	225.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						241.500.000,00							253.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	161 Paket		150 Paket	155 Paket	241.500.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		155 Paket	253.575.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.264.556.360,00							2.717.467.632,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	285 Orang		280 Orang	285 Orang	2.264.556.360,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		285 Orang	2.717.467.632,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang		0 Orang	90 Orang	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Orang	350.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						384.871.200,00							404.114.760,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang		50 Orang	50 Orang	384.871.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Orang	404.114.760,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.621.250.000,00					-		5.039.714.293,00	
		-						4.621.250.000,00					-		5.039.714.293,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	36.750.000,00						30 Dokumen	38.587.500,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	315.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	2.577.000.000,00						96 Laporan	2.705.850.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	157.500.000,00						3 Paket	163.375.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	300.000.000,00						4 Paket	315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	250.000.000,00						3 Paket	437.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00						4 Paket	224.401.793,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	3 Paket	200.000.000,00						4 Paket	210.000.000,00	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						250.000.000,00							437.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	437.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							224.401.793,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	224.401.793,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						157.500.000,00							163.375.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	157.500.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	163.375.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						300.000.000,00							315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	315.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						36.750.000,00							38.587.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	36.750.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	38.587.500,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						300.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	315.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						2.577.000.000,00							2.705.850.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	2.577.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	2.705.850.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						200.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						13.757.445.789,00					-		9.433.954.900,00	
		-						13.757.445.789,00					-		9.433.954.900,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.216.930.455,00						3 Paket	452.776.978,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	1.138.636.821,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	6.000.000.000,00						1 Unit	4.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	3 Unit	2.500.000.000,00						3 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.140.515.334,00						20 Unit	1.197.541.101,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00						1 Unit	367.500.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00						1 Unit	367.500.000,00	
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.500.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	3 Unit	2.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.200.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						1.216.930.455,00							452.776.978,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.216.930.455,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	452.776.978,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.140.515.334,00							1.197.541.101,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	1.140.515.334,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	1.197.541.101,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						2.000.000.000,00							1.138.636.821,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.138.636.821,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	2 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.000.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	6.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.500.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000,00							367.500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	367.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000,00							367.500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	367.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.353.133.000,00					-		1.420.789.650,00	
		-						1.353.133.000,00					-		1.420.789.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	628.908.000,00						12 Laporan	660.353.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	624.225.000,00						12 Laporan	655.436.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	105.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						628.908.000,00							660.353.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	628.908.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	660.353.400,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						624.225.000,00							655.436.250,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	624.225.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	655.436.250,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.450.000.000,00					-		5.571.250.000,00	
		-						1.450.000.000,00					-		5.571.250.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	105.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	4.048.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	300.000.000,00						7 Unit	315.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	500.000.000,00						20 Unit	525.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00						3 Unit	157.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	200.000.000,00						50 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	105.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	105.000.000,00	
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							525.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	525.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							315.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	315.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						150.000.000,00							157.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	157.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	105.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							4.048.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.048.750.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	105.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan Sungai Pangeran 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	105.000.000,00	Inspektorat
276.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.558.378.079,00							6.886.296.984,00	
			-	-		-	-	6.558.378.079,00						-	6.886.296.984,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						6.256.795.950,00					Perangkat Daerah		6.569.635.748,00	
		-						6.256.795.950,00					Perangkat Daerah		6.569.635.748,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		6 Dokumen	Dokumen	442.863.750,00						Dokumen	465.006.938,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		0 Kesepakatan	2 Kesepakatan	200.000.000,00						2 Kesepakatan	210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.285.029.900,00						100 Laporan	1.349.281.395,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.285.029.900,00						100 Laporan	1.349.281.395,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	2.343.872.400,00						45 Laporan	2.461.066.020,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	367.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00						2 Laporan	367.500.000,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.285.029.900,00							1.349.281.395,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.285.029.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Laporan	1.349.281.395,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						1.285.029.900,00							1.349.281.395,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.285.029.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Laporan	1.349.281.395,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						350.000.000,00							367.500.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	367.500.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						350.000.000,00							367.500.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	367.500.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						2.343.872.400,00							2.461.066.020,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	2.343.872.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Laporan	2.461.066.020,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		0 Kesepakatan	2 Kesepakatan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Kesepakatan	210.000.000,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						442.863.750,00							465.006.938,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	442.863.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Dokumen	465.006.938,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.936.612.029,00					Perangkat Daerah		2.033.442.631,00	
		-						1.936.612.029,00					Perangkat Daerah		2.033.442.631,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140 Laporan		140 Laporan	140 Laporan	1.694.862.029,00						140 Laporan	1.779.605.131,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	241.750.000,00						24 Laporan	253.837.500,00	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						241.750.000,00							253.837.500,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	241.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	253.837.500,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.694.862.029,00							1.779.605.131,00	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140 Laporan		140 Laporan	140 Laporan	1.694.862.029,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		140 Laporan	1.779.605.131,00	Inspektorat
277.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.989.003.950,00							2.088.454.148,00	
			-	-		-	-	1.989.003.950,00						-	2.088.454.148,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						529.003.950,00					-		555.454.148,00	
		-						529.003.950,00					-		555.454.148,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	300.000.000,00						1 Rekomendasi	315.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	229.003.950,00						3 Rekomendasi	240.454.148,00	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan						229.003.950,00							240.454.148,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	229.003.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Rekomendasi	240.454.148,00	Inspektorat
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan						300.000.000,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Rekomendasi	315.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi						2.210.000.000,00					-		2.320.500.000,00	
		-						2.210.000.000,00					-		2.320.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	350.000.000,00						4 Kegiatan	367.500.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah		4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	360.000.000,00						4 Perangkat Daerah	378.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	750.000.000,00						41 Perangkat Daerah	787.500.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	750.000.000,00						41 Perangkat Daerah	787.500.000,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						750.000.000,00							787.500.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Perangkat Daerah	787.500.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi						750.000.000,00							787.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Perangkat Daerah	787.500.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						350.000.000,00							367.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Kegiatan	367.500.000,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas						360.000.000,00							378.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah		4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	360.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Perangkat Daerah	378.000.000,00	Inspektorat
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						39.099.753.640,00							46.439.704.368,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						31.435.766.640,00							37.242.919.968,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.435.766.640,00							37.242.919.968,00	
278.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.760.766.640,00							6.912.919.968,00	
			-	-		-	-	5.760.766.640,00						-	6.912.919.968,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						390.000.000,00					-		468.000.000,00	
		-						390.000.000,00					-		468.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00						1 Data	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00						1 Dokumen	186.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	42.000.000,00	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						155.000.000,00							186.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	155.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	186.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						475.000.000,00					-		570.000.000,00	
		-						475.000.000,00					-		570.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	18.000.000,00	
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						400.000.000,00							480.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	480.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						40.000.000,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	48.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	24.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	18.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						270.000.000,00					-		324.000.000,00	
		-						270.000.000,00					-		324.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	240.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		3 Orang	5 Orang	70.000.000,00						6 Orang	84.000.000,00	
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		3 Orang	8 Orang	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Orang	84.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.230.000.000,00					-		996.000.000,00	
		-						1.230.000.000,00					-		996.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	400.000.000,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	120.000.000,00	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						400.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						600.000.000,00							720.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	720.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						795.000.000,00					-		954.000.000,00	
		-						795.000.000,00					-		954.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		2 Unit	2 Unit	495.000.000,00						2 Unit	594.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		40 Unit	40 Unit	300.000.000,00						40 Unit	360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						495.000.000,00							594.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		2 Unit	11 Unit	495.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	594.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		40 Unit	82 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	360.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.850.766.640,00					-		2.220.919.968,00	
		-						1.850.766.640,00					-		2.220.919.968,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00						1 Laporan	540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.380.766.640,00						1 Laporan	1.656.919.968,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	24.000.000,00	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	24.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						450.000.000,00							540.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	540.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.380.766.640,00							1.656.919.968,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.380.766.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.656.919.968,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.800.000.000,00					-		2.160.000.000,00	
		-						1.800.000.000,00					-		2.160.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	360.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	1.000.000.000,00						13 Unit	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	600.000.000,00	
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	34 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Unit	1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	360.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
279.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						5.100.000.000,00							6.120.000.000,00	
			-	-		-	-	5.100.000.000,00						-	6.120.000.000,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						5.350.000.000,00					-		6.420.000.000,00	
		-						5.350.000.000,00					-		6.420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	420.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00						100 Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	250.000.000,00						250 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	50 Orang		50 Orang	50 Orang	4.500.000.000,00						50 Orang	5.400.000.000,00	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						350.000.000,00							420.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	420.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka						4.500.000.000,00							5.400.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	50 Orang		50 Orang	50 Orang	4.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	5.400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
280.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						15.650.000.000,00							18.780.000.000,00	
			-	-		-	-	15.650.000.000,00						-	18.780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						15.650.000.000,00					-		18.780.000.000,00	
		-						15.650.000.000,00					-		18.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.830.000.000,00						1 Dokumen	17.796.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang		550 Orang	550 Orang	500.000.000,00						550 Orang	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang		150 Orang	150 Orang	120.000.000,00						150 Orang	144.000.000,00	
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						14.830.000.000,00							17.796.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.830.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.796.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						120.000.000,00							144.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang		150 Orang	100 Orang	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	144.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang		550 Orang	550 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	180.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
281.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						875.000.000,00							1.050.000.000,00	
			-	-		-	-	875.000.000,00						-	1.050.000.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						1.075.000.000,00					-		1.290.000.000,00	
		-						1.075.000.000,00					-		1.290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	240.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	300.000.000,00						200 Orang	360.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	125.000.000,00						50 Orang	150.000.000,00	
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						300.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	360.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
282.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						200.000.000,00							240.000.000,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	240.000.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						800.000.000,00					-		960.000.000,00	
		-						800.000.000,00					-		960.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	240.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang		600 Orang	600 Orang	200.000.000,00						600 Orang	240.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang		600 Orang	600 Orang	200.000.000,00						600 Orang	240.000.000,00	
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	-	-	-	-		1 Dokumen	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang		600 Orang	500 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600 Orang	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang		600 Orang	300 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		600 Orang	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
283.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.550.000.000,00							1.860.000.000,00	
			-	-		-	-	1.550.000.000,00						-	1.860.000.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.750.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		-						1.750.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00						1 Dokumen	840.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	300.000.000,00						200 Orang	360.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000.000,00						100 Orang	240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						300.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang		200 Orang	400 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	360.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi						700.000.000,00							840.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	840.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X							7.663.987.000,00							9.196.784.400,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.663.987.000,00							9.196.784.400,00	
284.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7.663.987.000,00							9.196.784.400,00	
			-	-		-	-	7.663.987.000,00						-	9.196.784.400,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.663.987.000,00					-		9.196.784.400,00	
		-						7.663.987.000,00					-		9.196.784.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan		53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	7.663.987.000,00						53 Orang/ Bulan	9.196.784.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.663.987.000,00							9.196.784.400,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan		53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	7.663.987.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		53 Orang/ Bulan	9.196.784.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	-	-						2.075.000.000,00							1.375.000.000,00	
285.	-	-						1.600.000.000,00							800.000.000,00	
	-	-						2.075.000.000,00							1.375.000.000,00	
			Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	-		-	100 Persen	100.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	-		-	100 Persen	1.600.000.000,00						-	800.000.000,00	
			-	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	-	-						200.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		200.000.000,00	
		-						25.000.000,00					Stakeholder/Masyarakat		25.000.000,00	
	-	-						250.000.000,00							250.000.000,00	
		-	-	-		-	-	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	250.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	-	-						150.000.000,00							150.000.000,00	
	-	-						25.000.000,00							25.000.000,00	
	-	-						100.000.000,00							200.000.000,00	
		-	-	-		-	-	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	25.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-			-	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	75.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-			-	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-			-	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	200.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-		-	-	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		-	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-		-	-	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	150.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	-	-						100.000.000,00							100.000.000,00	
	-	-						75.000.000,00							75.000.000,00	
	-	-						1.000.000.000,00							200.000.000,00	
	J U M L A H							11.626.018.318.741,20							11.873.375.197.403,00	